

KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA

Sambutan

Dr. Ir. Chairy, S.E., M..M.

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM

Kata Pengantar

Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si.

Dr. Suprawoto, S.H., M.Si

Editor:

Heri Budianto

KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA

Komunikasi dan Konflik di Indonesia

Editor : Heri Budianto

Kata Pengantar: Dr. Ir. Chairy, S.E.,M.M.

Pengantar : Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Dr. Suprawoto, S.H. M.Si.

Desain cover/tata letak: mth

gambar: www.greenglobaltravel.com

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, Juli 2012

Hak Cipta (c) 2012 pada penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit:



PT Showcase Indonesia Dotcom

Bekerjasama dengan

Universitas Tarumanagara

Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi

Editor Heri Budianto

Pengantar Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si., Dr. Suprawoto, S.H. M.Si.

KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA

Edisi Pertama -

xxxii + 366 hlm, 1 jil: 23,5 cm 15,5 cm

ISBN 978-602-18684-0-9

1. Komunikasi 2. Konflik di Indonesia

1. Judul



KOMUNIKASI DAN KONFLIK DI INDONESIA



SAMBUTAN

Dr. Ir. Chairy, S.E.,M.M.

Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta

Memasuki era kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam kurun waktu tertentu, pada satu sisi memberikan harapan tercapainya kesejahteraan spiritual dan material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pada sisi lain, justru munculnya kekhawatiran terjadinya konflik antar kelompok yang ada di Indonesia.

Perbedaan kelompok etnisitas, agama, dan keyakinan dalam rangka keanekaragaman *belief* sejumlah komunitas, mewarnai konflik yang terjadi di Indonesia. Catatan berbagai lembaga nonpemerintah sejak reformasi kenegaraan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Ini gambaran yang amat memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan Bangsa Indonesia seringkali dieksplorasi sebagai sumber kekuatan bangsa. Semangat gotong royong yang tumbuh di antara rakyat Indonesia yang berjiwa ramah di negeri yang kaya sumber daya alam, melengkapi harmonisasi masyarakat yang majemuk.

Oleh sebab itu, mencermati eskalasi konflik yang muncul di berbagai wilayah, maka tanpa mengesampingkan aspek hukum dan pendekatan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan institusi masyarakat yang peduli terhadap terjaganya keanekaragaman sosial, ekonomi, dan politik, maka selayaknya jika komunikasi dapat dipakai sebagai salah satu alat yang dapat menghindari, mencegah, ataupun menyelesaikan konflik antar kelompok yang berbeda nilai (*value*), sikap dan kepercayaan (*belief*).

Upaya memanfaatkan komunikasi untuk mencegah konflik, bertitik tolak dari pemahaman terhadap komunikasi antar kelompok yang berusaha untuk menumbuhkan nilai-nilai bersama demi menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Dalam konteks ini, kesadaran untuk menghilangkan sikap etnosentrisme yang menganggap nilai-nilai kelompoknya jauh lebih



unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain, harus dikesampingkan.

Tidak dapat disangkal, jika etnosentrisme dieksplorasi secara demonstratif akan memicu konflik yang terpendam maupun frontal saling menyerang. Lebih celaka lagi, konflik juga akan menimbulkan semangat komunalisme, sektarian, etnosentrisme, dan semangat sub-nasional yang mengancam nilai kemajemukan Bangsa Indonesia.

Karena itu, saya menyambut baik dengan mengucapkan selamat atas terbitnya buku “Komunikasi dan Konflik di Indonesia” ini. Diharapkan buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang eksistensi komunikasi di antara belenggu kebebasan berekspresi dalam relasi antar kelompok. Dengan menjunjung tinggi empati dan mengedepankan etika dalam berkomunikasi, maka berbagai pertikaian antar kelompok di lingkungan majemuk dapat diminimalisir. §

Jakarta, Juli 2012



SAMBUTAN

Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M.

Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta

Dengan gembira saya menyambut terbitnya buku dengan judul *Komunikasi dan Konflik di Indonesia* yang diterbitkan secara bersama oleh Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (Puskombis), Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta dengan Universitas Tarumanegara dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM).

Ada tiga alasan mengapa saya dengan antusias menyambut penerbitan buku ini. Pertama, menulis buku, sebagaimana menulis di jurnal ilmiah atau menulis makalah serta aktif dalam berbagai seminar ilmiah adalah bagian dari kewajiban seorang dosen di sebuah perguruan tinggi. Hal ini disadari, tetapi dalam praktik, itu belum merata dilakukan oleh para dosen di banyak perguruan tinggi di tanah air. Kebetulan di Universitas Mercu Buana, sikap demikian kami sedang sosialisasikan dan juga digiatkan.

Kedua, Indonesia merupakan “laboratorium hidup” terlengkap bagi penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam hal ini ilmu komunikasi. Keanekaragaman suku bangsa, asal usul, permulaan di bidang kemajuan, pengguna teknologi informasi dan luasnya geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri sangat menarik dikaji.

Selama satu dekade terakhir ini memang penelitian ilmu komunikasi di negara kita berkembang, tetapi tidak cukup pesat untuk dikatakan signifikan. Saya masih melihat bahwa teori-teori ilmu komunikasi banyak bertumpu pada pemikiran yang dihasilkan oleh para pakar atau ahli ilmu komunikasi asing, padahal para pakar komunikasi Indonesia saya yakini seharusnya mampu mengembangkan teori-teori ilmu komunikasi yang tipikal untuk Indonesia. Buku ini, saya harapkan merupakan tangga pertama menuju impian tersebut.



Ketiga, masalah konflik, lebih-lebih setelah tahun 1998, merupakan hal yang seolah-olah meledak hampir merata di seluruh penjuru tanah air. Ini sungguh kenyataan yang memprihatinkan, karena berpotensi besar memecah persatuan dan kesatuan nasional yang telah secara susah-payah kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Michael E. Brown dalam tulisannya *Ethnic and Internal Conflicts: Causes and Implication* (2001) menyatakan bahwa penyebab pokok konflik ada empat, pertama kondisi negara yang lemah (*weak states*), permasalahan keamanan (*interstate security concern*) dan geografi etnis (*ethnical geography*); kedua faktor politik berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan negara; ketiga masalah ekonomi setempat; dan terakhir faktor kultural.

Ketika negara harus hadir di daerah atau wilayah konflik, seringkali kedatangannya ketika konflik sudah menjadi parah. Dalam banyak kasus lain, seolah-olah eksistensi negara tidak ada dan kewibawaan pimpinan negara dan pimpinan daerah tidak terpancar di wilayah tersebut. Contoh yang paling tepat adalah konflik horizontal di wilayah Maluku dan Maluku Utara tahun 1999. Dalam konflik yang membawa ratusan orang tak bersalah menjadi korban tersebut, terlihat bahwa salah satu kata kunci penyelesaian konflik tersebut adalah komunikasi yang intensif antara pihak yang berkonflik dan pemerintah (Soeharto: 2006) dan dilakukan dengan cara mediasi tatap muka yang intensif (Moore: 1986). Kesadaran komunikasi memang datang terlambat sehingga tidak mengherankan konflik horisontal di Maluku dan Maluku Utara baru berhenti tahun 2002, sementara bara konflik belum padam sama sekali hingga sekarang.

Itu pelajaran pahit bagi bangsa Indonesia dan mudah-mudahan kata kunci tersebut digunakan untuk mengatasi berbagai konflik lain, sebelum konflik memuncak lagi dan menjadi sebuah konflik horisontal yang sangat *costly*. Ini menakutkan kita semua, tetapi bisa saja terjadi.

Dalam buku yang sebentar Anda akan baca ini terdapat 30 tulisan yang secara komprehensif menggambarkan akar dari berbagai konflik yang terjadi di tanah air, peran komunikasi, penanganan atau resolusi konflik serta peran dan pengaruh media (massa) dalam



berbagai konflik. Dengan spektrum yang cukup luas ini, saya optimistis buku ini mampu menambah khasanah ilmiah di bidang ilmu komunikasi kontemporer.§

Jakarta 30 Juli 2012



CATATAN EDITOR

Heri Budianto

Persoalan konflik di negeri ini kian menyeruak dengan berbagai penyebab yang seolah tak kunjung reda. Bersamaan dengan editor menulis catatan ini, terjadi bentrok antara Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan dengan masyarakat Ogan Ilir Sumatera Selatan. Pemicunya sengketa lahan (agraria) yang sudah berlangsung puluhan tahun (warisan Orde Baru). Konflik tersebut berujung meninggalnya seorang siswa SMP kelas 1 bernama Angga. Satu hal yang memilukan bentrok tersebut terjadi di saat umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Sungguh ironi memang, konflik yang dialami negeri ini.

Berbagai macam akar konflik yang menyebabkan persoalan konflik di Indonesia yang merenggut korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian material yang tentu tidak murah? Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di Indonesia disebabkan oleh sentimen keagamaan (baik berbeda agama) maupun dalam satu agama yang berbeda pandangan dan keyakinan. Kedua ini dapat kita lihat dari persoalan konflik Ambon dan beberapa kasus pelarangan tempat ibadah yang berujung pada konflik, serta persoalan Ahmadiyah yang juga belum sepenuhnya terselesaikan.

Pemicu konflik lain adalah soal agraria (pertanahan) yang bila ditelusuri lebih jauh akarnya disebabkan oleh hegemoni negara dan kekuatan kapital yang “menguasai” tanah rakyat. Hal ini juga berakar dari faktor yang beragam mulai dari penyerobotan tanah masyarakat, penggantian ganti rugi yang tidak sepadan dan pembayaran yang belum selesai, sampai kepada “sentimen kesukuan” yang diakibatkan oleh perlakuan tidak adil negara dan pemilik perusahaan terhadap masyarakat lokal (asli) dengan pendatang. Faktor ini juga kemudian mendorong terjadinya konflik antar suku dan ras yang mengerikan.

Proses politik juga menyumbang faktor terjadinya konflik yang terjadi dengan berbagai ekses yang ditimbulkan. Proses politik yang



menjadi akar bisa dilihat dengan berbagai penyerangan kantor KPUD akibat tersumbatnya proses demokrasi atau ketidakpuasan terhadap kinerja KPUD. Bahkan juga bentrok antar pendukung calon di beberapa kasus PILKADA. Serta sentimen kesukuan dan ras dikonstruksi dalam ranah politik dalam semangat otonomi daerah. tidak jarang juga soal “putera daerah” dan “orang luar daerah” menyebabkan sentimen-sentimen yang berujung pada kekerasan fisik dan konflik pada tataran akar rumput. Hegemoni negara atas daerah yang begitu kuat “warisan masa lalu” yang menguasai secara dominan sentra-sentra ekonomi, juga memicu konflik seperti yang terjadi di Papua saat ini dan Aceh beberapa waktu lalu.

Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan konflik yang terjadi di negeri ini yang tentu harus terus diredam dan diminimalisir. Bila mengacu pada pendapat Parson (1951), bahwa konflik dalam suatu masyarakat sulit dihindari. Sehingga, konflik dalam kehidupan manusia sudah menjadi bagian yang melekat. Konflik menurut Parson adalah harapan dari hasil sebuah interpretasi dari norma-norma secara sempurna (menyeluruh) ke dalam pola-pola yang tidak menyenangkan dan dari sisi lain, konflik juga suatu bentuk interaksi dari bentuk ego dan meluas kepada sebuah pola-pola normatif yang bisa berbentuk pemberontakan.

Indonesia merupakan sebuah negara yang dari awal pendiriannya disadari sebagai negara yang beragam “bhinneka” dan keberagaman itu dirajut dengan kekuatan “tunggal ika” menjadi satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pandangan saat ini sebagai bentuk keberagaman anak negeri ini kita mengenalnya dengan istilah “multikulturisme”.

Sebagai negara yang multikultur dan multietnis, Indonesia menyimpan potensi konflik. Potensi merupakan kemampuan atau ancaman yang belum muncul ke permukaan (tersembunyi). Apabila tidak disikapi secara waspada, hal tersebut bisa berubah menjadi konflik terbuka yang dapat menjadi sumber perpecahan bangsa (disintegrasi bangsa).

Sebagai anak bangsa yang mempunyai tanggungjawab merajut perbedaan semua komponen “anak bangsa” sudah sejatinya kita menanamkan semangat kebersamaan di tengah perbedaan dan

ancaman global. Tentu sebagai manusia kita membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya untuk bertahan hidup dan meneruskan cita-cita “*founding fathers*” negara ini.

Indonesia yang damai dan sejahtera merupakan cita-cita yang harus terus dijadikan cita-cita utama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera merah putih tidak boleh berhenti berkibar hanya karena kita sebagai anak bangsa tak pandai merawat dan merajut perbedaan yang ada. Indonesia yang damai dengan dasar serasi, harmonisasi, tenggang rasa, dan saling menghargai merupakan jalan mencapai cita-cita itu.

Kita sebagai manusia membutuhkan komunikasi untuk mencapai cita-cita meredam potensi konflik dan menyelesaikan konflik yang berlangsung. Sebab sebuah keniscayaan kehidupan manusia dapat berkembang dan mengarah pada perbaikan tanpa adanya komunikasi. Walaupun sebagai ilmuwan komunikasi, saya menyadari bahwa komunikasi bukanlah “*panacea*”. Bahkan banyak juga masalah komunikasi menyebabkan terjadinya konflik.

Berbagai strategi komunikasi dapat dilakukan untuk meredam potensi konflik dan membantu penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi. Bila mengacu pada pendekatan “Komunikasi dalam Perspektif Teori Konflik”, peran komunikasi berada pada peran sentral yang sangat penting, karena kegiatan komunikasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah, menyelesaikan, mengelola, resolusi, dan transformasi konflik. Apabila konflik sudah terlanjur merebak, maka komunikasi dapat dilakukan dengan lebih intensif.

Tentu bila kita mengacu pada berbagai elemen yang ada di komunikasi sangatlah banyak yang dapat dilibatkan dalam mengelola persoalan konflik mulai dari komunikator, pesan, saluran, khalayak dan efek. Semua elemen tersebut mempunyai peran sentral masing-masing dalam kontribusinya pada persoalan tersebut. Namun, peran masing-masing tersebut tidaklah dapat efektif jika berjalan sendiri-sendiri. Sebagai suatu elemen yang saling terkait dalam bingkai komunikasi merupakan suatu proses semuanya menjadi bagian penting dalam kerangka mewujudkan meredam potensi konflik dan sebagai resolusi konflik.

Katakan sebagai suatu contoh, media massa sebagai saluran



komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik sangat sentral peranannya dalam melestarikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Melalui pemberitaan yang dikonstruksikannya media, diharapkan memegang prinsip idealisme media dan menjauhkan prinsip ekonomi, politik, dan ideologi. Hal ini dapat disampaikan dengan menghindari berita bernada provokasi dan merepresentasikan relasi seimbang dalam pemberitaan tentang konflik. Hal itu tentu, akan menumbuhkan kesatuan dan kebangsaan dalam diri anggota masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan memiliki atau integritas dalam bingkai multikultur dan multi-etnis.

Alangkah indahya negeri ini, jika semua pihak menyadari betapa pentingnya menjaga perbedaan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dalam merawat itu semua. Berdasarkan renungan diatas, maka saya berfikir betapa pentingnya referensi yang mengupas tentang “Komunikasi dari Permasalahan Konflik di Indonesia”, karena masih sangat terbatasnya referensi yang membahas permasalahan konflik di Indonesia dari perspektif ilmu komunikasi.

Hal ini dipandang sangat penting karena Ilmu Komunikasi merupakan Ilmu yang multidisipliner yang dapat melihat persoalan konflik di Indonesia dari berbagai sisi. Saya berupaya mengedit buku ini dari berbagai pandangan komponen komunikasi dalam melihat permasalahan konflik multidimensi yang terjadi. Buku ini di tulis oleh 30 penulis yang melihat bagaimana komunikasi ditengah pergulatan konflik di Indonesia.

Buku ini diilhami dari ide Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (PUSKOMBIS) Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Ide cemerlang yang lahir di tengah persoalan konflik yang terus mendera negeri ini disambut baik oleh PT Showcase Indonesia Dotcom, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara (UNTAR) dan Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) untuk mewujudkannya. Alhamdulillah akhirnya penerbitan buku ini dapat terwujud.

Bagi PUSKOMBIS buku ini merupakan buku ke-3 (tiga) yang diterbitkan jelang ulang tahun yang kedua tahun 2012 ini. Akhirnya, saya berharap buku ini menjadi referensi bagi semua pihak baik



mahasiswa, dosen, dan berbagai pihak lainnya yang ingin melihat permasalahan konflik di Indonesia dari perspektif ilmu komunikasi. Akhirnya semoga sumbangsih akademis ini dapat bermanfaat bagi pendalaman ilmiah maupun praktis bagi upaya meredam potensi konflik dan resolusi konflik di tanah air. Semoga bermanfaat dan sejarah akan mencatat konflik di Indonesia akan dapat diatasi dan Indonesia akan tetap terjaga.

Jakarta, 30 Juli 2012



DAFTAR ISI

Sambutan Rektor Universitas Tarumanagara <i>Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M.</i>	vii
Sambutan Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta <i>Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM</i>	ix
Catatan Editor	xii
Daftar Isi	xvii

KATA PENGANTAR

Konflik dan Kekerasan serta Harapan Terakhir Indonesia: Sebuah Citra Komunikasi Indonesia Pasca Reformasi <i>Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si.</i>	xxi
Mencari Formula Komunikasi (Penyelesaian) Konflik di Indonesia <i>Dr. Suprawoto, S.H., M.Si.</i>	xxx

AKAR KONFLIK	1
Menguatnya Semangat Sektarian dan Disharmonisasi Hubungan Antar Kelompok <i>Eko Harry Susanto</i>	3
Konflik Sosial di Ambon Maluku, Suatu Tinjauan Komunikasi Antar Budaya <i>Farid Hamid</i>	19
Konflik Lingkungan dan Persoalan Komunikasi Lingkungan <i>Yenrizal</i>	36
Ekonomi Politik Konflik di Kawasan Perkotaan <i>Dewi S. Tanti</i>	50
Identitas yang Terjepit, Krisis Komunikasi Sosial Jemaat Ahmadiyah di Indonesia Akibat Konflik Ideologis MUI- Ahmadiyah <i>Bambang Sukmawijaya</i>	59
Politik Komunikasi dan Identitas Nasional <i>MT Hidayat</i>	73
<i>Pop Culture</i> Mesin Konflik, Refleksi Atas Komunikasi Konflik <i>Gregorius Genep Sukendro</i>	85
Tubuh Perempuan dan Konflik Ideologi dalam Demokrasi Disensus: Studi Kasus Kontroversi Konser Lady Gaga di Indonesia <i>Hendri Yulius Wijaya</i>	95



PERAN KOMUNIKASI	
DALAM MEREDAM KERAWANAN KONFLIK	105
Menyikapi Konflik Secara Positif	
<i>Widayatmoko</i>	107
Mencegah Konflik Melalui Kompetensi Antarpribadi	
<i>Agustina Zubair</i>	120
Pendekatan Komunikasi dalam Penyelesaian Konflik Antarnelayan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	
<i>Nurjanah</i>	130
Strategi Meredam Konflik Antara Perusahaan dan Masyarakat Melalui Pendekatan Komunikasi: Studi Kasus PT Pupuk Kalimantan Timur	
<i>Yugih Setyanto</i>	144
Komunikasi Multikultural dan Pencegahan Konflik Sosial: Studi terhadap Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape Kemang Jakarta Selatan	
<i>Halimatusa'diah</i>	153
Membangun Kembali Harmoni dan Kearifan Komunikasi : Menyemai Perdamaian dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia	
<i>Setio Budi H.H.</i>	166
PENANGANAN KONFLIK	183
Teori Identitas dan Komunikasi Akomodasi:	
Peran Penting Komunikasi dalam Mengatasi Konflik	
<i>Dorien Kartikawangi</i>	185
Ideologi Santunisme dan Penyelesaian Konflik	
<i>Mustika Ranto Gulo</i>	198
Fungsi Kolasara sebagai Media Komunikasi Tradisional dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara	
<i>M. Najib Husain</i>	217
Resolusi Konflik pada Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Perusahaan Tambang: Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi	
<i>Prima M. Agustini</i>	231
Manajemen Komunikasi dan Resolusi Konflik Studi Kasus Konflik Sosial di Kabupaten. Paser Provinsi Kalimantan Timur	
<i>Inda Fitriyani dan Hj. Hairunnisa</i>	246
Komunikasi dan Konflik di Indonesia:	
Komunikasi dan Penanganan/Resolusi Konflik	
<i>Enos Rudy Jovan Tomasila</i>	261
MEDIA DAN KONFLIK	275
Media dan Konflik Dari Ekskalasi sampai Resolusi	
<i>Riris Loisa</i>	277



Pemberitaan Media dalam Resolusi Konflik Horizontal	
<i>Afdhal Makkuraga</i>	291
Media Massa dan Konflik Sosial di Jawa Timur	
Studi Kasus Harian Regional Surya	
<i>Yuli Nugraheni dan Maria Yuliasuti</i>	300
Eksistensi Media Sosial dalam Ekskalasi Konflik tentang Irshad Manji	
<i>Novena Adelwis Gisela</i>	317
Konflik Suporter Sepakbola dalam Pemberitaan Media Menyoal	
Kontribusi Media Massa dalam Merebaknya Konflik Suporter di Indonesia	
<i>Fajar Junaedi</i>	326
Hermeneutika Media,	
Studi Naratologi Konflik Agama dan Multikulturalisme di Indonesia	
<i>Ahmad Toni</i>	342
Media, Konflik dan Perempuan	
<i>Bonaventura Satya Bhrata</i>	357
Kontribusi Jurnalisme Multikultural	
dalam Konflik dan Untuk Perdamaian	
<i>Andy Corry Wardhani</i>	378
Jurnalisme Damai dan Rutinitas Media	
<i>Farid Rusdi</i>	387
Media Kontemporer dan Konflik di Indonesia	
<i>Elvinaro Ardianto</i>	396
TENTANG PENULIS DAN EDITOR	407



Konflik dan Kekerasan serta Harapan Terakhir Indonesia:

Sebuah Citra Komunikasi Indonesia Pasca Reformasi

Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si.

Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta

Ketika.....

Ketika gegap-gempita suara lantang menantang Orde Baru

Ketika Soeharto kemudian lengser

Ketika rakyat kemudian menang

Ketika kekuatan rakyat tak terbendung lagi

Ketika gedung-gedung dirobohkan dan api menganga

Ketika anak-anak perempuan kita diperkosa ;,

Ketika, ketika

Tegaklah Orde Reformasi

Orde yang katanya lebih baik, lebih bersih dan lebih, lebih....

Namun euforia belum berhenti

Korupsi di mana-mana

Konflik menghiasi setiap pemberitaan media setiap saat

Korban terus berjatuhan namun penguasa kita tak peduli

Slogan dihembuskan dan iklan disiarkan

Hentikan kekerasan....., hentikan permusuhan,

Namun Sambas telah menjadi tempat pembantaian....

Tombak dan panah terus dilontarkan di Papua

Parang dan salawaku terus dihunuskan di Ambon

Bedil dan bom terus berbunyi

Darah dan nyawa terus melayang di Bima dan Aceh..

Anak-anak muda dan mahasiswa terus berperang di Makasar

Dan dimana-mana saja yang namanya bumi Indonesia.....

Terus... terus saja konflik berlangsung..

Seperti berkonflik dengan diri sendiri

Bahkan media massa pun tak ambil peduli....

Siaran-siaran terus ditayangkan

Hingga korban terus berjatuhan....

Pondok Mutiara, 29 Juni 2012

Pendahuluan

Perkelahian, pembunuhan dan kekerasan etnis dan agama, penembakan petugas, kekerasan kepada wartawan dan penganiayaan buruh, akhir-akhir ini muncul di mana-mana dengan berbagai bentuk. Kita bukan sedang berperang, namun kata yang paling tepat untuk menandai fenomena ini adalah “konflik”. Kadang konflik



dipicu oleh hal-hal yang sepele, namun sering berkembang menjadi fatal dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sejak runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya Orde Reformasi, telah jatuh korban beribu-ribu jiwa manusia dan musnahnya berbagai harta benda yang tak terhitung nilainya akibat konflik ini. Konflik telah menjadi masalah dan melahirkan berbagai masalah baru di masyarakat, seperti masalah pengungsi, masalah keamanan dan yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya masalah keutuhan bangsa yang semakin rapuh.

Menyusul konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru sampai saat ini, sebagaimana dapat disaksikan di berbagai media massa, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut, (1) konflik telah terjadi di mana-mana di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, (2) konflik terjadi pada pola komunikasi vertikal maupun horizontal dan bahkan telah terjadi di level ideologi dan moral, (3) media massa telah mengambil keuntungan di ketiga pola konflik, namun sering gagal menjadi media pendamai, (4) konflik di Indonesia telah berada pada posisi menjadi mesin penghancur bangsa.

Walaupun para pakar Indonesia percaya terhadap Alfred Russel Wallace, namun Charles Darwin (1858)-lah yang dikenal sebagai pencipta teori asal-usul konflik yang postulat-postulatnya didapat dari kiriman bahan-bahan etnografi Wallace setelah melakukan perjalanan di Indonesia Bagian Timur, terutama Banda dan Halmahera. Teori utama Darwin itu adalah, pertama, keunggulan spesies saat ini terhadap spesies yang lampau dan kedua, evolusi menjadi seleksi alam. Teori Darwin yang pertama itulah yang menjadi akar teori yang membenarkan konflik menjadi jalan utama sekelompok orang menguasai kelompok yang lain.

Pada era berikutnya teori konflik berkembang melalui tesis-tesis Karl Marx di dalam *Das Kapital* dengan menekankan konflik-konflik kelas yang terjadi di masyarakat paskah berkuasanya kaum borjuis atas perbudakan. Tesis-tesis Marx di bangun berdasarkan relasi-kuasa kaum borjuis dalam memperebutkan modal, produksi dan kelas buruh. Lewis Coser, bahkan menanggapi pemikiran Marx dengan mengatakan bahwa konflik dalam memperebutkan kekuasaan



akan terjadi tanpa henti. Pemikiran Coser ini di dasari oleh asumsi yang berlawanan dengan pandangan fungsional, bahwa masyarakat selalu berada di dalam situasi konflik.

Arus besar lain dalam pemikiran konflik berasal dari pemikiran Ralf Dahrendorf, bahwa konflik akan terjadi di dalam tiga ranah penting di masyarakat, yaitu ranah modal, tenaga kerja dan lahirnya ranah kelas menengah baru. C. Wright Mills, melalui sosiologi imajinatif, mengatakan bahwa relasi-kuasa antar kepentingan di dalam kelas-kelas sosial masyarakat berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari. Kepemilikan modal kapitalis dan penguasaan politik penguasa, kelompok-kelompok sosial di masyarakat adalah ranah-ranah konflik di masyarakat sepanjang sejarah.

Melihat akar-akar pemikiran konflik tersebut, dan melihat *mainstream* objek berita media massa Indonesia adalah harta, tahta dan perempuan (HTP). Maka akar konflik tersebut di atas, baik Marx, Coser, Dahrendorf dan Mills adalah menjadi tesis-tesis yang selalu berkaitan erat dengan *mindstream* objek berita HTP, terutama Coser, Dahrendorf dan Mills.

Pada kenyataannya media Indonesia tidak memiliki ideologi dominan di luar *mainstream* di atas, kecuali menjadi abdi dari kapitalisme media, dimana HTP menjadi sumber utama dari mesin media massa dalam melipatgandakan keuntungan kapitalisme media massa. Sehingga peran orang media hanyalah pelengkap mesin kepentingan kapitalisme semata.

Beberapa waktu lalu di Indonesia, ketika awal lahirnya reformasi, lahir kelompok-kelompok yang mengatakan sebagai kelompok idealisme orang-orang pers Indonesia, mereka keluar dari PWI dan membentuk lembaga-lembaga pers baru sebagai tempat berkumpulnya wartawan-wartawan idealis katanya, namun pasca reformasi, gerakan idealisme mereka melemah dan kembali menjadi abdi kapitalisme.

Memang ada perbedaan antara idealisme orang-orang pers di zaman Orde Baru dan Orde Reformasi, dimana orang-orang pers Orde Baru adalah sebagai abdi rezim Soeharto (negara), sedangkan di zaman reformasi, orang-orang pers menjadi pengabdi kapitalisme. Idealnya, idealisme orang-orang pers muncul dari kepenting-

annya sendiri sebagai lembaga pemberitaan masyarakat sehingga media massa menjadi media independen dan mampu menjadi corong masyarakatnya. Namun, saya pun pesimistis keadaan ini bisa terwujud, karena hampir pasti tidak ada media massa saat ini yang perkembangannya di luar penguasaan kapitalis, dengan kata lain, bahwa perkembangan media massa menggunakan cara-cara kapitalisme, jadi ke depan kita akan sulit mendapatkan media-media yang ide-alis, yang terlepas dari kepentingan serta dapat menjadi media massa yang benar-benar “independen”.

Karena media massa belum memiliki kemandirian ideologi, maka akhirnya keterlibatan media massa di dalam berbagai konflik di masyarakat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, media memberitakan konflik di masyarakat sebagai objek pemberitaan. Konflik sebagai sebuah realitas sosial, sebuah fakta, dan definisi sosial, yang memang ada dan perlu diberitakan oleh media dan karenanya masyarakat ingin mendapat informasi dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kedua, media massa menjadi pemantik dari konflik itu sendiri, yaitu media massa menjadi sumber dan alat konflik dimana keterlibatan media adalah langsung sebagai alat kepentingan pihak-hak yang terlibat. Ketiga, media massa berkonflik dengan pihak-pihak tertentu. Sebagai institusi atau sebagai pribadi di dalam sebuah institusi lembaga pemberitaan, maka sangat mungkin media massa memiliki kepentingan di masyarakatnya yang berkaitan dengan HTP, sehingga memicu konflik antara institusi media massa tertentu dengan pihak manapun di masyarakat. Keempat, media menjadi media pendamai konflik. Di banyak peristiwa, media massa selalu memainkan peran ini untuk menunjukkan salah satu sisi baik media massa di masyarakat.

Runtuhnya Moral Masyarakat

Paling tidak ketika masyarakat kita mulai sadar bahwa konflik yang terjadi di masyarakat saat ini secara keseluruhan tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri, maka kita semua mulai terbelalak. Betapa sukaria anak muda dan pemerintah-perintah harian elite politik kita telah banyak memakan korban, sementara ada berjuta-juta tenaga kerja kita yang terpaksa di PHK. Ada sekian ban-



yak perusahaan yang gulung tikar. Ada sekian banyak anak-anak kita yang terpaksa tidak dapat melanjutkan sekolah.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan betapa konflik horizontal yang dialami masyarakat saat ini dan dimanfaatkan oleh media massa sebagai sumber-sumber pemberitaan harian mereka, menjadi masalah besar bangsa yang apabila tidak di atasi dengan segera, maka akan berubah menjadi malapetaka bangsa.

Kalau media massa sadar dengan apa yang dikatakan oleh Durkheim tentang *anomie*, maka sesungguhnya fenomena konflik horizontal ini menunjukkan adanya keadaan anomali di masyarakat. Tanpa di sadari bahwa reformasi telah membawa angin buruk *disorder*, keadaan dimana telah terjadi kekacauan sosial sampai detik ini dan hancurnya tatanan lama, sementara tatanan baru belum diyakini masyarakat sebagai tatanan yang perlu dipatuhi.

Bahwa secara nyata dapat dilihat di mana konflik-konflik terjadi tidak saja pada tataran horizontal, namun juga vertikal. Konflik horizontal terjadi di semua level politik dan sosial. Begitu pula *disorder* terjadi di semua level sosial, semua itu dapat kita saksikan setiap saat, setiap hari, setiap minggu di media massa. Jadi, ketika perang argumentasi antara tokoh-tokoh politik terjadi, maka akan memicu konflik terjadi pada level elite. Konflik tersebut memicu terjadi konflik ke bawah, sehingga menimbulkan konflik horizontal-vertikal yang semakin luas.

Begitu pula konflik horizontal terjadi di antara kelompok masyarakat karena berbagai penyebab, menimbulkan kekacauan di mana-mana. Tidak ada lagi kata yang benar, tidak ada lagi perbuatan yang salah. Kebenaran dan kesalahan sangat tipis jaraknya, bahwa tidak bisa dipisahkan lagi. Begitu tidak ada norma dan aturan yang dipatuhi oleh masyarakat, karena para elite dan penegak hukum juga menabrak-nabrak hukum yang ada. Hukum hanya retorika, kebenaran hanyalah cerita-cerita, sedangkan keyakinan adalah terserah kamu. Inilah gambaran ketika anomali melanda suatu masyarakat dan masyarakat itu adalah masyarakat kita, Indonesia.

Konflik vertikal sering dipicu oleh berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, seperti hubungan negara yang tidak harmonis dengan rakyat, gara-gara kenaikan BBM

dan harga-harga sembako lainnya. Seakan negara sedang berperang dengan rakyatnya sendiri, polisi dan tentara turun menghadapi demo rakyat, gas airmata dilepaskan dan tameng-tameng politisi digunakan. Begitu pula masalah lain seperti penggusuran, pengusahaan lahan, dan sebagainya.

Ketika orang bilang kita sedang belajar demokrasi, Indonesia menjadi negara paling demokratis di Asia saat ini, sebenarnya kata-kata itu hanya menghibur bangsa ini, karena kita terlalu bodoh di dalam berdemokrasi. Kita lupa bahwa kita berpuluh-puluh tahun pernah mengatakan, kalau demokrasi adalah ajaran-ajaran tradisional kita, ajaran, moral yang telah diajarkan di dalam keluarga kita, di kelompok-kelompok sosial kita. Lantas, di mana pengetahuan dan moral itu sekarang, kita seperti melupakannya begitu saja.

Federalisme sebagai Harapan Terakhir

Ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahan pusat, sebenarnya permasalahannya bukan sekadar karena praktek pemerintahan Orde Baru berbuat banyak kesalahan. Namun justru kesalahan itu harus terjadi di mana saja apabila sebuah negara menggunakan sistem sentralistik. Dari sinilah, banyak terbukti. Di manapun di dunia ini, apapun nama negara itu, apabila sistem sentralistik diterapkan, maka masa depan daerah selalu menjadi *issue-issue* yang selalu diperdebatkan, karena begitu kuatnya sentral memainkan peran mereka.

Dalam konteks global pun demikian, bahwa negara-negara dunia I yang memainkan peran sentral, senantiasa menempatkan negara dunia III sebagai negara pinggiran yang miskin dan tak berdaya. Dengan demikian kita tak perlu lagi ragu, apabila negara sentralistik akan senantiasa memelaratkan daerah-daerah, sebaliknya kekayaan pusat diperoleh dari begitu banyak sumbangan daerah padanya.

Dalam kasus Indonesia, siapapun yang pernah mengelilingi separuh saja dari wilayah Indonesia ini, akan dapat membuktikan sendiri, betapa daerah-daerah itu jatuh miskin, pada hal begitu banyak sumbangannya terhadap kejayaan ibukota yang menjadi sentral aktivitas negara dan bangsa ini. Hampir 70 tahun Indonesia



merdeka, hampir seumur itulah kita belum merasakan merdeka yang sesungguhnya. Distribusi uang dan kekayaan lainnya masih terpusat di ibukota, sedangkan daerah hanya menikmati sisa-sisa kekayaan para “tuan” tanah di pusat Jakarta.

Untuk mengatasi begitu buruk dampak negara sentral kepada masa depan bangsa, di samping memenuhi begitu banyak keinginan masyarakat daerah untuk mengurus kekayaan mereka sendiri, maka harapan terakhir adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Namun sedikit dari masyarakat kita yang sadar bahwa sistem ini memiliki kelemahan yang sangat besar. Salah satu kelemahan yang sangat menakutkan adalah otonomi daerah merupakan jaring terakhir yang dapat kita pegang. Karena apabila implementasinya gagal, maka dorongan daerah-daerah untuk memisahkan diri dari negara Indonesia menjadi sangat kuat dan pemerintahan pusat akan tidak mampu menolak keinginan ini.

Menyadari keadaan ini, pemerintah pusat saat ini mengebiri otonomi daerah dengan berbagai kebijakan, sehingga kenyataan yang dapat kita saksikan saat ini, bahwa otonomi daerah sudah tidak ada lagi, dalam arti otonomi daerah hanya ada di peraturan dan undang-undang yang dibuat kita, namun sesungguhnya sistem sentralistik-lah yang berkuasa saat ini, karena itu sebenarnya kita tinggal menunggu kehancuran bangsa ini diambang gelombang korupsi yang merajalela dimana-mana.

Karena itu harapan terakhir kita untuk mempertahankan negara dan bangsa Indonesia ini adalah melalui federalisme, di mana gagasan-gagasan otonomi daerah disusun kembali berdasarkan norma-norma global yang dianut oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Pertimbangannya adalah, (1) federalisme tidak merubah sistem negara dan empat pilar kebangsaan Indonesia saat ini, kecuali beberapa tata pemerintahan dalam negeri, (2) beberapa institusi negara sudah menunjukkan pelaksanaan sistem federalisme, seperti pemerintah pusat dan daerah, kepolisian negara dan kepolisian daerah dan sebagainya, (3) akan memicu peredaran kekayaan negara yang merata di seluruh negara dari Sabang sampai Merauke, sehingga memungkinkan kesejahteraan cepat tercapai, (4) pada kenyataannya negara pusat tak mampu mengatasi persoalan-persoalan

bangsa, seperti korupsi, konflik kepentingan, kontrol keamanan dan ketahanan negara, masalah moral bangsa, sehingga tugas ini perlu dilakukan bersama-sama antara pusat (negara federal) dan daerah (negara bagian) yang telah terbentuk, (5) mempercepat pembangunan di seluruh Indonesia sehingga dapat menangkal gerakan-gerakan radikal yang menghancurkan negara Indonesia.

Kita tidak lagi dapat berargumentasi bahwa otonomi daerah yang saat ini (gagal) dilaksanakan sebagai model Indonesia dalam mendistribusikan kekuasaan pusat dan ke daerah, karena pada kenyataannya saat ini, tugas-tugas yang dilaksanakan oleh daerah adalah tugas-tugas “cuci piring” dari sebuah pesta besar. Sementara pusat menikmati porsi-porsi kekayaan negara yang tak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh pusat dan daerah. Sebaliknya kebobrokan birokrasi pusat yang tidak bisa dikendalikan merajalela dan menghabiskan kekayaan daerah yang disetor ke pusat melalui praktek-praktek korupsi dan nepotisme.

Ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan guna menakar kebobrokan birokrasi di dalam beberapa level, (1) kerusakan birokrasi dan tindakan korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh individu yang gagal dalam pembinaan mental aparat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak cukup (2) kerusakan birokrasi sengaja dilakukan untuk bersama-sama melakukan korupsi dan nepotisme untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak cukup, (3) kerusakan birokrasi dan korupsi serta nepotisme yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga negara lainnya serta pihak-pihak luar birokrasi negara untuk merampok kekayaan negara, (4) korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh pihak-pihak lembaga negara tidak saja untuk merampok kekayaan negara namun juga untuk merusak ideologi meracuni moral bangsa.

Keempat-empat level kebobrokan birokrasi ini telah ada di Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah, sehingga banyak pendapat yang mengatakan Indonesia adalah negara gagal, namun masih ada harapan yang terakhir adalah federalisme. Mari kita belajar dari kesuksesan berbagai negara federal di dunia, mari kita jujur berkaca pada mereka, maka kita akan tahu bahwa kritik-kritik terhadap negara sentralistik itu adalah sebuah keniscayaan hukum-hukum



Tuhan.

Media massa Indonesia sebenarnya akan menikmati keuntungan yang sangat besar dari semua ini, karena sumber pemberitaan semakin merata di seluruh negara bagian dan negara federal di pusat, begitu pula akses pemberitaan yang selama ini belum dijangkau akan menjadi tambang emas pemberitaan di kemudian hari karena sudah terbuka aksesnya disebabkan transportasi yang lancar dan sebagainya.

Sekarang seluruh masyarakat Indonesia menunggu... Apa yang kita akan lakukan..?

Melihat apa yang ditulis di dalam buku ini adalah sebuah harapan bersama... bahwa media massa, para pakar komunikasi akan menjadi salah satu dari berbagai komponen bangsa yang dapat membantu mengatasi persoalan konflik di Indonesia, paling tidak dapat membantu menjelaskan apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan bagaimana kita mengambil tindakan tepat agar korban tidak lagi berjatuhan.§

Daftar Pustaka:

- Elster, J. (2000). Karl Marx Marxisme-Analisis Kritis, Sebuah Analisis Kritis Tokoh Historis Pengguncang Dunia Perlu Kita Menolak Komunisme. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Magnis-Suseno, F. (1999). Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, Jakarta: Gramedia.
- Redwood, J. (1990). Kapitalisme Rakyat. Jakarta: Grafiti.
- Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Teori Postmodern, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Turner, B. (2000). Sosiologi Modernitas Posmodernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Mencari Formula Komunikasi (Penyelesaian) Konflik di Indonesia

Dr. Suprawoto S.H. M.Si.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta

Sejarah konflik dengan kekerasan di Indonesia dapat dilacak mulai dari jaman sebelum negara Indonesia terbentuk. Mulai konflik perebutan kekuasaan antarraja juga sudah diwarnai dengan kekerasan. Tetapi bukan berarti kekerasan telah menjadi “budaya” rakyat Indonesia.

Ada tipe paling menonjol dari kekerasan di Indonesia, diantaranya adalah kekerasan oleh kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan mereka baik ideologi, budaya, atau ekonomi maupun politik. Penyebab dan wujudnya sangat beragam. Bisa berupa perseteruan antarumat beragama dan/atau antarumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah; sengketa sumber daya alam; dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang, dan sebagainya.

Tidak sedikit kemudian ada pihak yang memandang Indonesia seperti memandang sebuah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Lantaran gesekan dan getaran sekecil apapun dapat memicu terjadinya ledakan konflik yang tidak dapat terbayangkan.

Memahami Konflik di Indonesia

Pakar studi konflik dari Universitas Oxford, France Steward menyebutkan empat kategori negara yang memiliki potensi konflik, yaitu (1) negara dengan keanekaragaman dan perbedaan, (2) negara dengan tingkat pendapatan dan pembangunan manusia rendah, (3) negara dengan tingkat jarak perbedaan horizontal yang tinggi, dan (4) negara yang berada dalam transisi rezim represif menuju rezim demokratis (Kompas 16/12/03). Menariknya hampir semua kategori itu ada di Indonesia.



Pertama Indonesia merupakan negara yang terdiri atas beragam etnik dengan perbedaan yang sangat jelas. Tentu saja perbedaan akan memungkinkan terjadinya kekerasan pada tingkatan manapun. Mulai dari elit sampai ke akar rumput. Kedua, sekalipun menunjukkan kecenderungan perkembangan ekonomi yang terus meningkat, tapi banyak survei lembaga dunia yang masih menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan dan indeks pembangunan manusia yang masih tergolong rendah. Ketiga, saat ini Indonesia dalam masa konsolidasi demokrasi, setelah fase transisi. Tentunya tidak bisa dihindari akan terjadi gesekan antar kelompok sosial dalam masyarakat baik dalam konteks hubungan antarwarga maupun antara warga negara dengan pemerintah.

Pola konflik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari unsur kebudayaan, agama dan politik. Ketiga hal tersebut memberikan pengaruh penting bagi interaksi yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi, keterlibatan agama dalam politik tidak bisa diabaikan, yang ditandai dengan menguatnya identitas keagamaan dalam ranah politik. Namun di sisi lain, keterlibatan kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pola keberagamaan tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai faktor penentu jarak sosial antar kelompok.

Bagaimanapun, konflik adalah keniscayaan dalam kehidupan sosial. Konflik terjadi di setiap aras, di dalam dan di antara individu, komunitas, negara dan budaya. Sebagai peristiwa alamiah, konflik bisa terjadi antar orang atau kelompok dari berbagai latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, umur dan jender setiap hari. Bagi Brand Jacobsen (2005), hal penting bukanlah apakah konflik itu baik atau buruk tetapi adalah bagaimana kita menghadapinya.

Penanganan Konflik Sosial

Tanggal 10 Mei 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial telah disahkan. Dalam 62 pasalnya, diatur penanganan konflik melalui tiga tahapan, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik dilakukan dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.



Penanganan konflik dilakukan melalui penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Status keadaan konflik berada pada keadaan tertib sipil sampai dengan darurat sipil. Selanjutnya penanganan konflik pada pascakonflik dilakukan secara terpadu, terencana, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

Prinsip penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah penanganan konflik mencerminkan asas kemanusiaan; *kebhinekatunggalika*-an; keadilan; ketertiban dan kepastian hukum. Hal yang menarik, dalam penanganan konflik diatur dengan mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan hasil musyawarah mengikat para pihak. Artinya, penanganan konflik sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Robert I Rotberg pernah menjelaskan bagaimana penanganan konflik menjadi salah satu indikator negara gagal. Dimana negara cenderung menghadapi konflik yang berkelanjutan, kekerasan komunal maupun kekerasan negara sangat tinggi, permusuhan karena etnik, agama, ataupun bahasa, teror, jalan-jalan atau infrastruktur lainnya dibiarkan hancur.

Untungnya hal itu tidak semuanya dan selamanya terjadi di Indonesia. Faktanya, memang tidak ada pembiaran dari negara atau pemerintah. Bahkan perlindungan negara secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembentukan pemerintahan didasarkan pada cita-cita: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Belum lagi kehadiran Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Di sisi lain, ada kecenderungan positif bahwa saat ini masyarakat sudah mulai mempercayai mekanisme hukum positif untuk menyelesaikan konflik yang ada. Meski tidak mengesampingkan



adanya aksi kekerasan dalam beberapa konflik akibat pemilukada misalnya, tapi pelembagaan penyelesaian konflik Pemilukada jelas merupakan indikasi ada mekanisme yang diakui bersama bisa menyelesaikan konflik di kalangan elit dan masyarakat. Tapi tentu saja konflik memerlukan pengelolaan yang tepat dan komunikasi bisa menjadi salah satu cara atau strategi untuk menghentikan dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Mengomunikasikan Konflik

Konflik bagi setiap orang memiliki arti yang berbeda. Namun, penyelesaian konflik selalu dipahami pada ujung kegiatan yang lebih berorientasi dengan kedamaian dan meyakinkan individu atau kelompok tertentu untuk meninggalkan kekerasan dalam mencapai tujuan.

Dalam konflik seringkali liputan media konflik digambarkan oleh Scanlon, Luuko & Morten (1978) cenderung tidak akurat dan mengandung rumor atau desas-desus. Dalam sebuah konflik yang sedang terjadi, media cenderung lebih mengutamakan penyajian berita secara cepat dari pada berita yang akurat.

Memang pada dasarnya isi dan hasil komunikasi bergantung pada cara mengkonstruksi realitas yang akan disampaikan. Jika konstruksinya positif dan tujuan positif dapat digunakan untuk memahami persoalan dan bukan malah memperuncing konflik sosial. Untuk mencapai dua hal tersebut, syaratnya pesan harus bebas dari prasangka. Itulah syarat yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang komunikatif, masyarakat yang didalamnya terbebas dari manipulasi, hegemoni, dan dominasi.

Lantas apa yang bisa dilakukan? Pendekatan yang lebih beradab atau *softpower* adalah pilihan yang lebih bijak untuk diterapkan, terutama di tengah meluburnya informasi dan pesatnya perkembangan teknologi. Langkah nyata misalnya dengan menambah dan terus menerus membuka saluran (*channel*) komunikasi sehingga arus informasi terus mengalir dan ketersediaan informasi bisa diperoleh secara memadai.

Mengenai aspek konten, tentu bisa dimulai dengan meningkatkan kualitas informasi tentang konflik yang ada sehingga bisa

diperoleh informasi yang bermakna dan berguna secara memadai bagi kepentingan publik secara luas.

Last but not least, perlu difokuskan pada penyajian informasi dan proses komunikasi yang mengarah pada isu-isu spesifik dari situasi konflik dan setiap dimensi krisis secara mendalam sehingga tidak memperluas dan semakin membuat ruwet interpretasi dan pemaknaan publik yang bisa semakin mengacaukan situasi konflik.

Mendaras Komunikasi Sosial?

Globalisasi informasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Informasi secara bebas masuk ke segala penjuru dunia tanpa bisa dibendung. Di era global seperti inilah tantangan relasi sosial dan penanganan konflik dalam masyarakat ber-*bhinneka* sangat terasa.

Sebenarnya keanekaragaman suku, budaya dan agama adalah realitas yang memungkinkan kita merencanakan strategi berdasarkan asumsi saling memahami. Dari sini kemudian diharapkan akan timbul empati untuk menerima perbedaan pemahaman terhadap agama. Adanya saling memahami dan pengertian ini akan mengurangi konflik dan kekerasan yang mungkin akan terjadi. Kita semua mahfum bahwa konflik biasanya terjadi karena berbedanya persepsi mengenai nilai-nilai antarbudaya atau antaragama.

Oleh karena itu, dibutuhkan formula baru bagi semua pihak untuk melakukan upaya-upaya strategis dan kreatif, terutama dalam rangka mensinergikan antara konteks historis dan realitas kekinian. Rintisan bangunan “komunikasi sosial” perlu dikembangkan sebagai komunikasi dari dan dalam masyarakat manusia. Komunikasi sosial tidak hanya terdiri atas media massa, tapi juga semua sarana yang dipakai manusia untuk berkomunikasi sejauh mereka berkaitan dengan masyarakat manusia.

Selain melalui dialog, yang bisa difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, penanganan konflik bisa dilakukan dalam berbagai program kolaborasi antar komunitas dalam kegiatan nyata dan sebagainya. Tentu relasi ini harus berdasarkan nilai-nilai yang diakui bersama. Salah satu yang bisa diambil adalah keinginan me-



ngenal dan memahami perbedaan secara apa adanya. Itulah modal sosial yang dapat kita kembangkan untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara di masa depan sekaligus menangani konflik atas nama apapun. §





AKAR KONFLIK DI INDONESIA

MENGUATNYA SEMANGAT SEKTARIAN DAN DISHARMONISASI HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK

Eko Harry Susanto

Konflik, kerusuhan dan keberingasan massa, yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dipicu oleh sejumlah persoalan kompleks yang bermuara kepada perbedaan nilai, karakter dan sejumlah kepentingan kelompok yang sulit untuk diintegrasikan. Oleh sebab itu, konflik di masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan formal dalam versi kekuasaan negara yang cenderung berlindung dibalik peraturan maupun penggunaan kekuatan aparat. Tidak bisa dikesampingkan, konflik antarkelompok merupakan problem krusial yang membelenggu harmonisasi dalam kehidupan masyarakat majemuk di tanah air. Bahkan dalam bingkai kebebasan komunikasi dan berekspresi, justru eksistensi konflik dan keberingasan massa semakin mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diikat oleh nilai-nilai kebhinekaan. Menghadapi problem semacam itu, maka komunikasi harus mampu menjembatani interaksi antar kelompok yang berbeda, dengan mengedepankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis. Tujuannya jelas untuk menjaga keanekaragaman masyarakat dalam bingkai kebhinekaan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan

Pendahuluan

Kerusuhan dan kebingungan massa yang terjadi pada akhir-akhir ini di berbagai daerah, dipicu oleh persoalan kompleks yang tidak bisa dibedah dari sudut regulasi, sosial, ekonomi dan politik saja, tetapi harus didekati pula melalui kajian komunikasi yang terikat oleh nilai kultural dai kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Perbedaan kelompok budaya, etnik, agama dan keyakinan dalam kerangka keanekaragaman *belief* di sejumlah komunitas, secara faktual mewarnai berbagai konflik yang terus terjadi dan cenderung tidak bisa diselesaikan secara tuntas. Bahkan gejalanya semakin kompleks, rumit dan bertali temali, jika dihubungkan dengan faktor pemicu konflik di era reformasi politik yang mengunggulkan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi.

Berdasarkan data *The Wahid Institute* (TWI), selama tahun 2009, ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh pemerintah, dan 93 kasus intoleransi beragama yang dilakukan antar umat beragama (Kompas, 30 Desember 2009). Sedangkan *Moderate Muslim Society* dalam laporan akhir tahun 2009, mencatat 22 kasus intoleransi dilakukan oleh aparat pemerintah, 15 kasus penyusutan terhadap kelompok agama atau berkeyakinan (Kompas, 26 Desember 2009).

Selain itu, TWI juga mencatat terdapat 92 kasus pelanggaran ataupun konflik bermotif perbedaan agama, kepercayaan dan keyakinan selama tahun 2011. Jumlah itu meningkat 18% dibanding tahun 2010 yang 62 kasus (Kompas, 30 Desember 2011). Masih sehaluan dengan konflik yang terjadi di Indonesia, catatan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) menunjukkan gejala yang sama. Terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas (Susanto dalam Suara Pembaruan, 10 Januari 2012).

Namun meningkatnya konflik, kekerasan, penyerangan, kebingungan massa dan tindakan lain yang merugikan keamanan maupun ketenteraman warga, tidak bisa dilepaskan dari situasi politik yang terjadi pascareformasi kenegaraan di Indonesia. Bagaimana-



pun juga, sejak tahun 1998, dinamika komunikasi antar kelompok, secara horisontal maupun vertikal berbeda dengan slogan-slogan penyebaran pesan dalam komunikasi politik masa pemerintahan sebelumnya.

Kebebasan komunikasi dan berekspresi mendorong munculnya semangat yang tidak lagi menghiraukan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah komunitas, merasa terlepas dari kungkungan yang membelenggu hak mereka selama puluhan tahun berusaha menunjukkan kekuatan. Karena itu, untuk mengeksplorasi keberadaannya, yang dilakukan adalah menyuarakan pesan dalam koridor menumbuhkan semangat komunalisme, sektarianisme, etnosentrisme dan jargon lain, yang membangkitkan semangat kelompok. Tujuannya jelas, untuk memamerkan kepada pemegang kekuasaan negara maupun kelompok lain di masyarakat, bahwa nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik mereka yang lebih “baik” dalam pengakuan sepihak, dibandingkan kelompok lain.

Merujuk ke aspek historis, pada masa kekuasaan Orde Baru sebelum reformasi politik, jargon tentang serasi, selaras dan seimbang, menjadi kekuatan dahsyat yang dipakai oleh pemerintah beserta sub-ordinat kekuasaan politiknya, untuk mendominasi semua sektor kehidupan. Karena itu, ketika memasuki era reformasi politik yang menuntut demokrasi, jargon itu menjadi tidak populer, bahkan semakin terpinggirkan.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan semboyan keserasian hubungan itu, diikuti oleh semua elite dari tingkat desa di pelosok negeri sampai di pusat kekuasaan utama. Namun yang menjadi persoalan, kemasam pesan harmonisasi itu, dalam nuansa komunikasi politik yang digunakan untuk membelenggu hak bicara dan hak memperoleh informasi faktual serta transparan sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, para elite sebagai epigon loyal pemegang otoritas komunikasi politik yang kursif, cenderung menafsirkan keserasian hubungan secara sepihak. Tidak menghiraukan eksistensi komunitas lain yang memiliki persepsi, pemikiran dan *worldview* berbeda dengan kehendak pemerintah dan poros-poros kekuatannya yang mampu menekan rakyat.



Oleh sebab itu, retorika pesan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antar kelompok secara sepihak yang nyaring disuarakan oleh pemerintah, hakekatnya mengandung perintah agar rakyat “patuh dan tunduk” kepada para pemilik otoritas dalam kekuasaan negara beserta subordinat kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekelilingnya.

Pola penafsiran sepihak dan integralistik terhadap segala sesuatu yang menyangkut komunikasi penyelenggaraan negara, merujuk kepada piramida komunikasi, yang memiliki satu titik di puncak kekuasaan sebagai pengendali tunggal lalu lintas informasi. Dengan ideologi semakin ketat membatasi kebebasan rakyat bicara, maka semakin menguntungkan, maka elit dalam tubuh kekuasaan negara cenderung semakin represif dengan melakukan pembungkaman komunikasi secara berlebihan. Tujuannya jelas, agar memperoleh dan dapat mempertahankan kekuasaan di sekitar puncak kekuasaan organisasi pemerintahan.

Menilik kondisi masa pemerintahan sebelum reformasi, maka tidak mengherankan jika mereka yang selama ini merasa suaranya dibungkam, berupaya untuk mengekspresikan kehendak terpendam. Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya, ketegangan hingga konflik terbuka yang terjadi di lingkungan masyarakat majemuk, pada era pasca reformasi politik, ditinjau dari pendekatan komunikasi yang terikat oleh substansi politik dan budaya dalam hubungan antar kelompok-kelompok yang memiliki sejumlah karakteristik berbeda di masyarakat.

Hubungan Antar Kelompok dan Nilai Kemajemukan

Hubungan antar etnik tidak dapat dilepaskan dari masalah suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Bahkan idiom SARA sedemikian menakutkan dalam komunikasi publik di masa pemerintahan represif. Jadi sangat dimaklumi jika retorika, pembicaraan dan penyebaran pesan dalam kaitannya dengan komunikasi massa menjadi amat sensitif kalau menyangkut masalah perbedaan yang mengacu kepada SARA.

Karena itu, walaupun masalah itu muncul ke permukaan atau sampai menjadi opini publik, maka pihak-pihak yang bertanggung-



jawab terhadap masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat, pada umumnya tidak mau mengakui, bahwa konflik yang terjadi bernuansa perbedaan etnisitas, kepercayaan, komunitas dan perbedaan nilai kelompok di masyarakat. Justru yang muncul adalah mengkambinghitamkan, bahwa pertikaian sampai pada kerusuhan massa, dipicu oleh masalah yang sepele berkaitan dengan kepentingan dari pihak yang bertikai. Padahal jika ditelusuri akar konfliknya, justru bersumber kepada perbedaan dalam bingkai SARA.

Namun, karakter para pemegang kekuasaan yang menafikan adanya konflik semacam itu, ternyata tetap dilakukan oleh elit dalam kekuasaan negara dan elit politik di era kebebasan berkomunikasi. Karena itu, pokok persoalan konflik antar kelompok yang berbeda harus menjadi perhatian negara. Pada konteks ini, bukan sebatas pada pejabat institusi negara, tetapi juga semua elit pemilik otoritas sosial, ekonomi dan politik dalam bingkai formal maupun informal. Suatu harapan yang tidak mudah, sebab ada kecenderungan menafsirkan kebebasan secara integralistik sesuai kepentingannya.

Hakikatnya, jika di masa pemerintahan represif, pengendali utama hubungan antar kelompok adalah pemerintah beserta kekuatan sayap-sayap politiknya yang mempunyai kekuasaan besar. Saat ini, di era reformasi, pengendali interaksi dan komunikasi antar kelompok di masyarakat adalah komunitas dan komunitas yang mengunggulkan nilai sektarian, komunalisme dan etnosentrisme yang berlindung di balik demokrasi berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, intinya sama, masih ada problem yang melembaga dalam menangani komunikasi antar kelompok yang berbeda pada masa lalu, maupun pada era reformasi yang mengedepankan kebebasan dan hak asasi manusia.

Padahal, Indonesia dikenal dengan kebhinekaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Shinzo Abe (2007), yang memuji Indonesia dengan mengemukakan, bangsa Indonesia mampu mengatasi perbedaan, dengan mewujudkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan, karena sejak dulu telah ada tradisi *care and share*, yang tidak lain adalah semangat

gotong royong diantara rakyat berjiwa ramah di alam yang kaya raya.

Keanekaragaman harus dipertahankan mengingat bangsa Indonesia yang majemuk. Menurut Hildred Geertz (1981:86), “Indonesia mempunyai kurang lebih tiga ratus suku bangsa atau golongan etnik, dengan kira-kira dua ratus lima puluh bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”. Berpijak pada kondisi itu, pluralisme masyarakat Indonesia akan tampak di berbagai wilayah Indonesia. Keanekaragaman etnik semakin tampak menonjol karena tidak dibatasi lagi oleh faktor geografis saja, tetapi perkembangan teknologi transportasi yang menciptakan mobilitas perpindahan antar wilayah menjadi suatu hal yang wajar dan tidak ada satu keistimewaan apapun.

Pemandangan yang menonjol adalah pola interaksi yang beragam antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Hubungan yang bersifat homofili yang pada mulanya mendominasi sebagian besar wilayah di Indonesia dengan keseragaman kultur dan sosial mengalami pergeseran atau perubahan menjadi hubungan yang sangat jamak dengan berbagai karakteristik etnik. Menurut Durkheim (dalam Anthony Giddens, 1986:139), bahwa meningkatnya keanekaragaman sosial ini menjadi ciri khas dari proses perkembangan bentuk – bentuk masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Sementara itu Jean Martin (1981:151) menyatakan bahwa, pluralisme sebagai pilihan yang terbaik untuk masyarakat maupun individu.

Ternyata nilai pluralisme yang menjadi pegangan itu, dalam perkembangannya semakin mengkhawatirkan ketika termarginalisasi oleh semangat komunalisme yang menguat. Padahal pentingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu sering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional. Namun di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan perilaku anarkis yang menafikan kemajemukan justru semakin sering terjadi di sejumlah wilayah tanah air. Karena itu, yang menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya kebhinekaan dari para elit dalam pemerintahan, politik dan pemegang otoritas ekonomi, benar-benar dipakai rujukan oleh



masyarakat pada umumnya. Selain itu, benarkah mereka yang menyuarakan pentingnya kemajemukan selalu konsisten mengunggulkan pentingnya kemajemukan dalam kesempatan di hadapan publik sendiri maupun di lingkungan kelompok yang berbeda.

Sebab disinyalir bahwa pesan kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah pemanis pidato para elit ketika mereka berada di luar kelompoknya. Teriakan lantang mendukung kebhinekaan dan pluralisme, sesungguhnya hanya muncul pada saat seremoni, yang memang mengusung kemajemukan bernegara. Tentu saja sudah menjadi kelaziman, berbicara di depan publik, harus menyesuaikan dengan tema. Jadi, pada hakikatnya, elit yang mengeksplorasi nilai-nilai kebhinekaan, semata-mata muncul hanya muncul dalam kemasan perhelatan yang memang didesain untuk mengutuk konflik, kekerasan, dan radikalisme berbasis semangat kelompok

Ketidakpedulian masyarakat terhadap retorika kemajemukan, tampak dalam berbagai peristiwa yang bernuansa SARA. Misalnya, “peristiwa keberingasan massa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pada bulan Januari 2012, benar-benar mengoyak kebhinekaan bangsa Indonesia. Dalam konflik yang diwarnai oleh isu suku, agama, ras dan antar golongan itu, 48 rumah warga pendatang dari Bali, hangus terbakar (Kompas, 26/1/2012).

Peristiwa ini terjadi bukti nyata ada pengabaian pluralisme yang menguat di sejumlah komunitas. Nilai kemajemukan hanya disuarakan dalam ruang publik dengan beragam khalayak. Tetapi dalam situasi homogenitas kelompok, yang disuarakan adalah nilai-nilai sektarian, komunalisme, etnosentrisme dan semangat subnasional yang berpotensi memecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Memang, di lingkungan masyarakat paternalistik sebagaimana di Indonesia, dimana massa wajib tunduk kepada tokohnya, yang diperlukan adalah menyuarakan pluralisme di lingkungan komunitasnya sendiri. Bukan pada satu kegiatan yang diikuti oleh orang-orang dari berbagai kelompok etnik, budaya dan kepercayaan yang berbeda.

Pertikaian lainnya, bukan hanya antar etnik dan kepercayaan, tetapi juga muncul dalam kaitannya dengan konflik yang diwar-

nai oleh kepentingan ekonomi. Pemilik modal yang didukung oleh kelompok-kelompok untuk melancarkan tujuan dari berbagai kalangan melawan masyarakat yang merasa dirugikan. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria terdapat 163 konflik agraria pada tahun 2010. Rinciannya 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan dan 1 kasus di wilayah tambak dan pesisir. Dari sebaran konflik, Jawa Timur 36 kasus, Sumatera Utara 25 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jambi 11 kasus, Riau 10 kasus, Sumatera Selatan 9 kasus, dan sisanya tersebar di sejumlah provinsi (Kompas, Senin 6 Februari 2012).

Merujuk kepada berbagai peristiwa tentang konflik, maka sesungguhnya pertikaian dapat dipicu oleh berbagai faktor yang menjadi pedoman yang dipakai sebagai keyakinan dasar oleh setiap kelompok. Dalam konflik antarkelompok kepentingan, sesungguhnya tersirat karakteristik nilai, sikap dan kepercayaan dari setiap kelompok yang memiliki perbedaan mendasar dalam hubungan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Jadi secara esensial, karakter dan sikap kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat juga bisa dikaitkan dengan pendekatan komunikasi antarkelompok yang berbasis kepada nilai budaya yang melekat. Bahkan dalam konstelasi sosial, ekonomi maupun politik di Indonesia, kelompok kepentingan di sektor kekuasaan negara, politik dan ekonomi, pengkutuban kelompok seringkali bersentuhan pula dengan polarisasi komunitas dan nilai komunalisme dan kebudayaan dalam konteks yang luas menyangkut etnisitas.

Dalam konsepsi komunikasi antar kelompok dengan budaya yang berbeda Samovar, Porter dan Jain (1988 : 195) melihat bahwa penilaian terhadap kelompok lain dilakukan secara tidak sadar karena kelompok menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Jika nilai kelompok budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi. Sedangkan ketidaksamaan nilai budaya yang semakin besar, akan berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar budaya. Masalah yang sering menghambat dalam komunikasi antar budaya disebabkan



kan oleh aspek-aspek potensial yang mendasarinya sebagaimana diuraikan oleh Samovar, Porter dan Jain (1981 :192 -200) mencakup tujuh permasalahan, yaitu: (1) perbedaan tujuan berkomunikasi, (2) etnosentrisme, (3) ketidakpercayaan (*lack of trust*), (4) penarikan diri (*withdrawl*), (5) ketiadaan empati, (6) stereotip (*stereotypes*) dan (7) jarak kekuasaan.

Hakikatnya perbedaan tujuan berkomunikasi merupakan diferensiasi orientasi maupun fokus ketika dua kelompok yang berbeda melakukan interaksi dan komunikasi. Sedangkan etnosentrisme (*ethnocentrism*) menurut Myron W. Lustig (dalam Samovar dan Porter, 1988: 55) adalah kepercayaan bahwa adat, tindakan dan nilai-nilai budaya diri sendiri adalah yang paling baik (*superior*) dibandingkan dengan budaya lainnya. Penekanan pada superioritas kelompok sendiri merupakan upaya memelihara tatanan nilai dan stabilitas sosial kultural yang diikutinya. Dengan demikian sikap etnosentrisme cenderung melihat kelompok lain dari sisi negatif, dan menguatkan kepercayaan pada kekuatan budaya sendiri dalam kehidupan sosial.

Samovar, Porter dan Mc. Daniel (2007: 195) melihat bahwa, penilaian terhadap budaya lain ini dilakukan secara tidak sadar karena kelompok kita menggunakan nilai dan kebiasaan sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Jika nilai budaya terdapat kesamaan-kesamaan maka akan semakin dekat dalam melakukan interaksi, sedangkan ketidaksamaan nilai sosial kultural yang semakin besar, berpengaruh terhadap hubungan yang semakin jauh, dan selanjutnya akan menghambat komunikasi antar kelompok.

Ketidakpercayaan (*lack of trust*) dalam hubungan antarkelompok adalah sikap dan perilaku terhadap individu, kelompok ataupun berbagai entitas yang diasumsikan tidak segaris dengan karakteristik baku yang melekat dalam kelompoknya. Faktor lain penghambat hubungan antarkelompok sebagaimana yang disebutkan di atas adalah penarikan diri (*withdrawl*) dalam interaksi dan komunikasi. Ini dipicu oleh anggapan bahwa lawan komunikasinya, tidak mampu memberikan manfaat, merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Akibatnya, menarik diri dari interaksi dan komunikasi dilakukan dengan pertimbangan keuntungan semata dalam ukuran untuk kepentingan diri sendiri ataupun kelompoknya.

Ketiadaan empati dalam komunikasi dengan individu atau kelompok lain yang memiliki sejumlah karakter yang berbeda. Secara umum, empati berupaya memposisikan individu atau kelompok, berada pada diri seseorang atau kelompok lain dalam suatu komunikasi dan interaksi di lingkungan entitas-entitas yang memiliki diferensiasi nilai, sikap dan kepercayaan.

Faktor lain penghambat komunikasi antar kelompok berbeda adalah stereotip (*stereotypes*) dalam masyarakat majemuk. Stereotip merupakan penggeneralisasian yang terlalu luas, terlampaui disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai sebuah kategori terhadap sekelompok orang. Penggeneralisasian kepercayaan lebih didasarkan pada emosi, dimensi, stereotip meliputi aspek negatif dan positif (Samovar, Porter dan Jain, 1991 :121). Sedangkan jarak kekuasaan yang potensial menghambat komunikasi antar kelompok ataupun budaya berbeda, merupakan diferensiasi posisional antara individu yang memiliki keunggulan ataupun kekuasaan, dengan individu ataupun kelompok pada umumnya yang memiliki posisi lebih rendah dalam struktur sosial-ekonomi maupun politik, yang membawa implikasi merasa inferior di satu pihak dan superior di pihak lainnya.

Dari problem potensial komunikasi antarbudaya ataupun kelompok-kelompok yang berbeda tersebut, faktor stereotip, yang biasanya dikaitkan dengan prasangka (*prejudice*) merupakan aspek yang mudah muncul dan pengaruhnya terasa sekali dalam lingkungan masyarakat majemuk. Menurut Scott dan Power (dalam Samovar, et.al. 1981: 122) bahwa stereotip dengan cepat mengantarkan prasangka (*prejudice*) untuk mendukung atau melawan individu. Prasangka adalah sikap kaku terhadap suatu kelompok, yang didasarkan pada sistem kepercayaan dan prakonsepsi yang keliru. Prasangka ini dapat meliputi sejumlah kepercayaan atau sistem kepercayaan yang membentuk kelompok yang saling berkaitan secara relatif menghasilkan sikap prasangka tertentu terhadap kelompok lain.

Perwujudan sikap dari prasangka yang mengkhawatirkan bagi kemajemukan masyarakat adalah (1) *antilocution*, yaitu mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya; (2) *avoidance* sebagai upaya



menghindar dari kelompok yang tidak disukainya; (3) *discrimanation* dengan mengucilkan setelah emosi meningkat; (5) *extermination* sebagai upaya pemusnahan secara satu per satu atau massal (Samovar, Porter dan Jain, 1981 :124).

Persoalan krusial, dalam koridor kebebasan berekspresi mendorong kecenderungan sikap yang melembagakan prasangka terhadap kelompok lain yang berbeda. Akibatnya muncul ketegangan hubungan yang berpotensi menyulut konflik. Lebih celaka lagi dalam konflik antar etnik, stereotip negatif lebih menonjol dibandingkan dengan stereotip yang positif. Misalnya orang dari kelompok budaya tertentu terkesan lamban, pelit, teliti, keras kepala, kasar dan lain-lainnya yang berkonotasi dengan sifat jelek; sementara yang positif seperti bekerja keras, teliti, hemat, konsisten serta sejumlah nilai positif lainnya akan dijauhkan dalam membentuk persepsi konflik. Jika pelembagaan prasangka itu terus berlanjut, maka berdampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Menjaga Kebhinekaan dalam Bernegara

Secara substantif, penerapan komunikasi yang menghargai keanekaragaman dan mengandung toleransi kemajemukan bernegara, harus diawali dari lingkungan komunitasnya sendiri. Karena kelompok lebih percaya kepada orang yang berasal dari kelompoknya sendiri. Pengikut tidak ragu-ragu menjalankan perintah untuk memelihara kemajemukan dalam interaksi dan komunikasi antarkelompok. Namun ternyata dalam bingkai memburu kekuasaan di era kebebasan berekspresi, para pimpinan negeri ini lebih berfokus kepada upaya menyuarakan kebhinekaan di ruang-ruang publik dengan khalayak beragam.

Sebaliknya di lingkungannya sendiri, cenderung mengeksplorasi semangat sektarian, bahkan semangat subnasional demi untuk menarik massa. Upaya yang mengunggulkan pandangan hidup kelompok ini, akan menghasilkan atribut, perilaku dan idiom bahasa komunalisme, yang berpotensi mengentalkan nuansa perbedaan di lingkungan masyarakat majemuk. Celakanya, dengan berlindung di balik demokrasi integralistik sesuai penafsiran untuk kepentingan kelompok, maka politik pengabaian nilai kemajemukan dipelihara

melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan bernegara.

Karena itu, sangat beralasan jika gegap gempita mendukung pelestarian nilai pluralisme di masyarakat yang penuh dengan keteladanan dalam nuansa kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti untuk mengurangi terjadinya konflik sampai keberingasan massa yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air.

Padahal, sesungguhnya masyarakat, bisa saja untuk didorong untuk terus menghargai perbedaan. Ini dapat dilihat dari tingkat kepercayaan terhadap kelompok lain di Indonesia berdasarkan tele-survei majalah *Intisari*. Hasil survei adalah sebagai berikut, orang dengan latar belakang budaya sama dipercaya oleh 62% responden, orang dengan latar belakang budaya berbeda, dipercaya oleh 53% responden. Sementara itu, orang dengan status sosial sama atau lebih tinggi memperoleh kepercayaan dari responden 55%, dan orang dengan sosial lebih rendah dipercaya oleh 56% responden (*Intisari*, 2011: 25). Artinya masyarakat masih saling percaya terhadap kelompok yang berbeda, walaupun dalam kisaran yang tidak tinggi

Sejalan dengan peran sejumlah pimpinan yang mengabaikan kemajemukan, hasil jajak pendapat *Kompas*, menarik untuk dicermati. Karena dalam menghadapi konflik, negara dinilai lalai menjaga harmonisasi hubungan antar kelompok-kelompok di masyarakat. Hanya 15,4% responden yang menyatakan bahwa negara sudah menjalankan peran dalam melindungi warga negara. Sebaliknya, 81,3% responden menyatakan negara belum melindungi warga negara dari konflik sosial, dan sisanya 3,3%, bungkam tidak berpendapat (*Kompas*, 30/01/2012). Jelas ini gambaran yang sangat memprihatinkan dalam rangka membangun komunikasi yang integratif di lingkungan masyarakat yang beranekaragam kelompok maupun komunitas .

Oleh sebab itu, berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antarkelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antarkelompok yang membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik



dan tindak kekerasan

Untuk menciptakan komunikasi di antara kelompok yang berbeda adalah pemahaman terhadap karakteristik sikap dan perilaku dalam interaksi di masyarakat. Menurut Brent D. Ruben (dalam Samovar dan Porter, 1988: 331) menyarankan supaya komunikasi dengan tuan rumah lancar dilakukan: (1) menciptakan kapasitas yang menghargai kelompok budaya lain, pada konteks ini termasuk keyakinan dasar, sikap dan perilaku, (2) tidak memaksakan pendapat dalam melakukan komunikasi dan interaksi, (3) pengetahuan individual yang mampu memahami karakteristik orang atau kelompok lain secara utuh, bukan sepenggal-sepenggal, dikaitkan dengan kepentingan kelompoknya sendiri, (4) melakukan komunikasi dengan empati, (5) bersikap fleksibel sebagai pengirim ataupun penerima pesan harus mengedepankan fleksibilitas melalui komunikasi sebagai hal yang membangun makna, kepentingan, dan keuntungan bersama, (6) menjaga hubungan, komunikasi dengan kelompok-kelompok yang berbeda merupakan upaya untuk membangun relasi yang kohesif diantara individu maupun kelompok yang ada di sekelilingnya, (7) mengembangkan sikap toleransi yang menghargai karakteristik individu maupun kelompok lain, tanpa ada unsur kepentingan semata-mata untuk komunitasnya sendiri

Namun untuk menjalankan komunikasi yang sejalan dengan penghargaan terhadap kelompok lain tidak mudah. Dalam berbagai konflik yang terjadi, malah para elit dalam tubuh kekuasaan negara seringkali mengabaikan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, komunitas yang termarginalkan, kelompok yang dikaitkan dengan karakteristik inferior, kelompok warga yang kurang beruntung dan entitas lain yang tidak mampu untuk berhadapan dengan kekuatan mayoritas. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hasil jajak pendapat Kompas di 12 kota besar di Indonesia, menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik. Hanya 8,8 % responden yang percaya bahwa pemerintah mampu menangani konflik, sedangkan yang tidak percaya berjumlah 81,2%, dan sisanya 10% menyatakan tidak tahu. Demikian juga dalam melindungi hak warga minoritas, yang masih percaya kepada kinerja pemerintah dalam kisaran

16,6%. Sementara yang tidak percaya menacapi 79,1%, dan yang bersikap tidak tahun menahu dalam kisaran angka 4,3% (Kompas, 6 Februari 2012).

Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya dan mencegah munculnya konflik di lingkungan masyarakat majemuk dapat dipakai pula sebagai acuan meminimalisir konflik antar kelompok yang berbeda. Strategi untuk meningkatkan kohesivitas hubungan antar kelompok yang memiliki kultur berbeda, harus merujuk kepada: (1) pahamiilah diri kita sendiri (*know yourself*), (2) penggunaan bahasa yang sama, (3) sediakan waktu (*take time*), (4) perhitungan *setting*, (5) tingkatkan kemampuan berkomunikasi (*communication style*) yang menghargai kelompok lain, (6) tumbuhkan umpan balik (*feedback*), (7) kembangkan empati, (8) perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda; (9) tanggung jawab etis (Samovar, Porter dan Jain 1981: 202-210).

Dalam konteks aplikatif yang seharusnya dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan kekuasaan negara, adalah memahami diri sendiri, sebagai strategi yang berhubungan dengan instropeksi. Bagaimana sebaiknya bersikap tidak memihak terhadap kelompok yang bertikai. Bukan secara terselubung memberikan dukungan atau melakukan pembiaran terjadinya konflik karena tujuan keberlangsungan jabatan yang ditopang oleh kekuatan nilai sektarian. Sedangkan penggunaan bahasa yang sama sebenarnya mengandung arti pemahaman penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal untuk menghasilkan kesepakatan. Bukan malah menggunakan simbol maupun bahasa komunalisme yang menyulut semangat sektarian dan memperuncing konflik.

Selain itu, komunikasi dengan empati yang berpijak kepada pemahaman terhadap posisi orang lain ketika berinteraksi dengan kelompok yang berbeda dapat mencegah konflik dalam masyarakat majemuk. Penyesuaian perilaku dalam interaksi dan komunikasi harus berjalan dua arah sebagaimana dikemukakan Edward T. Hall (1969:188), yang secara substantif menandakan harus ada ruang-ruang negosiasi pada setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang akan membahayakan, karena menutup ru-



ang negosiasi yang mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang "merasa" lebih unggul dalam jumlah anggota maupun kualitas keyakinannya yang integralistik

Namun tidak kalah pentingnya adalah "*take time*" dengan memperhatikan masukan dan bersikap positif terhadap pendapat orang lain. Jadi bagi para elit yang bertanggung jawab terhadap kemajemukan, bukan secara agresif membalas setiap dikritik. Namun *take time*, bukan berarti mengulur waktu agar konflik dapat selesai secara alamiah sesuai dengan berjalannya waktu. Intinya, harus memberikan kesempatan komunikasi yang sama untuk mengungkapkan pendapat yang beretika dan memiliki tanggung jawab moral.

Faktor-faktor ideal tersebut memang dalam tataran teoritis semata-mata, tetapi bukan sesuatu yang menyalahi. Aspek strategis untuk mencapai keharmonisan hubungan antarkelompok dapat dijalankan oleh para pimpinan maupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menghambat menguatnya nilai sektarian yang integralistik dalam hubungan antarkelompok.

Upaya untuk meminimalisir konflik dan membangun komunikasi yang efektif di antara kelompok yang berbeda itu, bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kesempatan komunikasi atau setidaknya tidaknya dalam situasi komunikasi tertentu dapat dipakai beberapa aspek strategi komunikasi yang harus dikedepankan.

Penutup

Dengan tidak mengabaikan aspek formal yang berpijak kepada aspek hukum dan keamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan sejumlah pihak yang bertanggungjawab terhadap tercapainya hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pendekatan komunikasi antar kelompok yang mengacu kepada pola komunikasi antar budaya yang menyangkut perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan, demi untuk mencegah menguatnya semangat sektarian yang mengancam kemajemukan tetap diperlukan. Model pendekatan komunikasi antarkelompok, secara spesifik diorientasikan untuk menumbuhkan pemahaman makna bersama di antara pihak-pihak yang berinteraksi.

Sebaliknya jika elit dalam kekuasaan negara hanya semata-ma-

ta berpijak pada pendekatan hukum dan keamanan dalam nuansa untuk memburu kekuasaan, bukan mustahil akan memicu sikap sektarian yang selalu mengunggulkan kelompoknya sendiri. Alhasil kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga memudar. Di sisi lain, justru semangat sektarian semakin menguat dan terjadi pelembagaan disharmonisasi hubungan antar kelompok di lingkungan masyarakat majemuk.§

Daftar Pustaka

- Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: YIIS dan FIS-UI.
- Abe, Shinzo. (2007). "Hubungan Jepang Indonesia". Ceramah Tanggal 21 Agustus 2007 di Gedung Prince Sudirman Jakarta
- Giddens, Anthony. (1986). *Capitalism and Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*. Terjemahan Soehaba Kramadibrata. Jakarta: UI Press.
- Hall, Edward T. (1969). *The Hidden Dimension*. USA: Anchor Books
- Intisari. (2011). "Telesurvei Intisari: Bertindaklah Maka Kau Kupercaya", Intisari Edisi April 2011
- Kompas. (2011). "Sidney : Kaum Ekstrimis Dekati Bupati/walikota". Kompas, 5 Juli 2011
- Kompas. (2011). "Intoleransi Meningkat Tajam: Institusi Pelanggar Terbanyak". Kompas, 30 Desember 2011.
- Kompas. (2012). "Tawuran Warga: Sidomulya Mencekam, 48 Rumah Terbakar" dalam Kompas, 25 Januari 2012.
- Kompas. (2012). Negara Melemah di Hadapan Konflik. Kompas, 30 Januari 2012
- Kompas. (2012). "Masalah Sosial: Konflik Ancam Integrasi Bangsa", Kompas, Senin 6 Februari 2012.
- Kompas. (2012). "Ketidakpercayaan pada Negara", Kompas, Senin 6 Februari 2012.
- Martin, Jean. (1981). *The Ethnic Dimension*. North Sydney: George Allen And Unwin Australia Pty Ltd.
- Samovar, Larry A dan Richard E. Porter. (1988). *Intercultural Communication: A Reader*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter dan Nemi C. Jain. (1981). *Understanding Intercultural Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Samovar, Larry A, Ricahard E. Porter dan Edwin R. Mc. Daniel. (2007). *Communication Between Culture. Sixth Edition*. Australia: Thomson – Wadsworth International Student Edition.
- Susanto, Eko Harry. (2012). "Meredam atau Melembagakan Konflik". Opini di Surat Kabar Suara Pembaruan, 10 Januari 2012.



KONFLIK AMBON MALUKU

Suatu Tinjauan Sejarah dan Budaya

Farid Hamid

Dalam suatu masyarakat majemuk, potensi konflik lahir karena secara inheren setiap suku/etnis dilahirkan berbeda baik secara fisik, bahasa, agama, budaya maupun warisan sejarahnya. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan jarak antar budaya. Jarak ini bisa melebar atau menyempit tergantung dari sejauh mana interaksi dan komunikasi antarbudaya dilakukan. Bisa semakin merenggang sehingga melahirkan konflik seperti yang terjadi di Ambon, Maluku tapi bisa juga menyempit sehingga melahirkan saling pengertian dan bahkan mengarah pada akulturasi masing-masing budaya.

Suatu budaya mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, atau tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, tetapi juga melukiskan kadar dan tipe kontak fisik yang dituntut oleh adat kebiasaan dan intensitas emosi yang menyertainya. Tulisan ini membahas mengenai konflik dari tinjauan sejarah dan budaya dengan *setting* kasus konflik di Ambon, Maluku

Kata kunci: konflik, sejarah dan budaya, Ambon

Pendahuluan

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi persoalan pelik, yaitu belum adanya kesepahaman di antara berbagai komponen bangsa dalam menyikapi keanekaragaman suku, ras, agama dan antar golongan. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sekarang ini sekadar menjadi simbol tak bermakna, tercermin dari mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks tulisan ini konflik Maluku (Ambon) bisa dijadikan contoh kasus.

Maluku, sebuah nama yang pada hakikatnya berasal dari istilah para pedagang Arab *Al-Jaziratul Muluk* (negeri dari banyak raja), karena hampir di setiap penjuru dan sudut pulau memiliki raja sebagai panutan umat. Beribukotakan Ambon, sebuah nama yang diberikan oleh orang Portugis. Nama sebenarnya adalah *Nusa Yapoono* yang berarti Pulau *Embun* (Ambon). Memang bila mendekati dari laut, pulau itu tak tampak karena ditutupi kabut (Nanulaitta, 1966).

Sejak awal, Kepulauan Maluku sudah beraneka warna dari berbagai kelompok budaya (ras, suku dan agama) tetapi masyarakatnya tetap rukun, memiliki derajat toleransi, kompromi, dan harmoni yang begitu tinggi, dipersatukan oleh suatu pranata sosial setempat *Pela-Gandong*.

Namun peristiwa Hari Raya Idul Fitri 1419 (19 Januari 1999) yang lalu toleransi dan harmonisasi yang terbangun seakan runtuh. Maluku pada saat itu menjadi simbol perseteruan yang bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang diliputi perasaan saling curiga dan penuh dendam. Budaya *Pela-Gandong*, yang mempersaudarakan komunitas Muslim dan Kristen terkoyak dan menjadi runtuh. Bahkan hingga kini konflik tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Masih saja muncul-konflik-konflik sporadis.

Asal Usul dan Watak Penduduk Maluku

Sebelum mengkaji lebih dalam menyangkut konflik sosial di Ambon terlebih dahulu perlu dikaji asal usul dan watak orang Maluku (Ambon). Menurut Wilfred T. Neill (1973), dari Amerika Serikat, bahwa orang Maluku, termasuk orang Ambon berasal dari Vietnam dan Kamboja. Katanya di sana terdapat dua gunung, yang



satu dihuni oleh orang kulit kuning dan yang satu lagi dihuni oleh orang kulit hitam. Pada zaman dahulu orang kulit hitam ini membuat perahu dan berlayar dengan perahu itu meninggalkan daratan Asia ke arah Tenggara dan tiba di kepulauan Malanesia, disebelah utara Papua Nugini.

Mereka menempati kepulauan Malanesia, dan dari pulau-pulau ini mereka ke Pulau Halmahera dan ke Pulau Seram. Orang Belanda menamakan mereka orang *Alfur*. Nama lainnya ialah *Alfuro*, atau Arafura diambil orang Belanda dari kata dalam bahasa Portugis “*fora*”, yang kemudian ditambah dengan kata “*al*” di depannya dari bahasa Arab. Kata “*fora*” yang berasal dari kata “*outsider*” dalam bahasa Inggris, yang berarti orang luar atau orang yang datang dari luar kepulauan Maluku (Neill, 1973).

Dari Pulau Seram, mereka menyeberang ke Pulau Ambon, pada akhirnya menjadi penduduk Pulau Ambon yang dikenal dengan “orang Ambon atau *Ambonese*”. Sebagai penghuni pertama kepulauan, orang-orang Alifuru ini membentuk keluarga, masyarakat dan pada akhirnya kaum atau suku bangsa dilakukan melalui perkawinan, baik sesama suku maupun dari orang luar yang datang kemudian antara lain: orang Arab, Portugis, Spanyol, Belanda, maupun dengan suku-suku lain dari nusantara. Generasi yang menjadi penduduk provinsi Maluku atau Ambon khususnya dewasa ini adalah berintikan etnik asli Melanesia, Melayu, dan kaum peranakan.

Berbicara mengenai masyarakat Maluku, tak bisa dipisahkan dari watak atau kepribadian dasar masyarakat itu sendiri. Masyarakat Maluku selain mempunyai kepribadian atau watak yang baik seperti; jujur (suka berterus terang), rasa kesetiakawanan sosialnya tinggi, cepat dalam mempelajari sesuatu, dan sebagainya, juga mempunyai watak atau kepribadian yang jelek antara lain: sering kasar, gaduh (ribut), bengis (tidak menyenangkan), penuh rasa benci, terus menerus dalam keadaan curiga dan waspada, sombong, lekas naik darah dan suka bertengkar (Ohorella, 1994). Watak atau kepribadian ini dapat dijadikan acuan mengapa konflik yang terjadi di Maluku masih sering terjadi.



Anatomi Konflik

Miall, Hugh Ramsbotham, Woodhouse (2000) mengemukakan konflik adalah aspek instrinsik yang tidak mungkin dihindari dalam perubahan sosial. Konflik merupakan ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Konflik di Ambon (Maluku) pada dasarnya secara laten sudah terkondisikan sebelumnya. Potensi dan benih-benih konflik sebenarnya sudah tertanam sejak lama, jauh sebelum Januari 1999. Sejak era kolonial Maluku adalah kawasan yang sarat akan konflik sosial. Secara umum dapat dikatakan bahwa konflik di Maluku adalah produk sejarah kolonial, yang berhasil memecah belah warga Maluku. Sejarah panjang Ambon selalu diwarnai oleh persaingan terselelubung umat Islam dan Kristen.

Seperti dikatakan oleh Daniel S. Lev, pakar politik Asia di Universitas of Washington di Seattle, AS. :

“ Dari sejarahnya konflik SARA selalu diciptakan dari atas. Itu adalah taktik pemerintahan kolonial, supaya rakyat tidak pernah bersatu, karena persatuan adalah kekuatan yang amat besar dan mengancam kekuasaan” (Dedy Mulyana, 1999).

Menurut penulis faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial dapat disebut antara lain:

1. Produk Sejarah Kolonial

- Era Portugis

Perselisihan antar komunitas di Maluku memang sudah berlangsung lama, terutama antara empat kerajaan Islam (Moloku Kie Raha) yakni Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo, yang juga melibatkan Kimelaha (*vazal*) mereka di belahan selatan: Pulau Ambon (Hitu/Leihitu di Utara dan Leitimur di Selatan), Pulau Haruku, Seram, Saparua, Manipa, Nusalaut, Boano, Tual, Buru dan sebagainya. Namun, skala perang, intensitas dan nuansa konflik menjadi berubah setelah pengkristenan orang Maluku oleh para Paderi Portugis.



Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512 di Ternate, yang merupakan *primus enterpares* empat kerajaan Islam tersebut. Ada dua misi yang diemban yaitu, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah dengan memerangi para pedagang muslim di mana saja ditemukan yang merupakan imbas perang salib dan penyiaran Agama Katolik. Dalam menjalankan misi penginjilan mereka mendapat banyak pengikut di Halmahera dan Leitimur yang kebanyakan masih memegang agama leluhur (animisme/dinamisme). Tapi akibatnya cukup fatal, kaum muslim Ternate dan Tidore memerangi pengikut baru Kristen tersebut. Ini insiden saling bunuh pertama antara Islam dan Kristen di Maluku (Willard A. Hanna & Des Alwi, 1996).

Peristiwa ini bukannya menciutkan semangat Portugis, malah usaha Kristenisasi bertambah luas dan intens. Tokoh paling bertanggung jawab dalam penginjilan ini adalah Gubernur Antonio Galvao (1536-1539) dan Pastor Fransiskus Xaverius (1546) dari Ordo Jesuit. Galvao dikenal karena dorongan yang diberikan kepada misi-misi Kristen, khususnya di kepulauan selatan termasuk Pulau Ambon. Disana Agama Kristen berkembang dengan pesat, mulai puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan. Fenomena ini mungkin merupakan ekspresi permusuhan rakyat Leitimur terhadap penguasa Muslim di belahan utara. Pulau Ambon itu sendiri terbagi atas dua jazirah yaitu Leihitu dan Leitimur. Leitimur adalah kawasan di mana Kota Ambon sekarang berada. Suksesnya Kristenisasi memicu golongan Islam untuk melakukan tekanan. Perpindahan agama ketika itu dipandang sebagai pergeseran loyalitas politik.

Seiring dengan gencarnya pengabaran injil dan monopoli rempah-rempah oleh Portugis. Permusuhan Islam-Kristen makin menjadi-jadi. Pada tahun 1564, rakyat muslim mengepung dan membakar kampung-kampung Kristen. Nusaniwe, kampung di Leitimur itu juga merupakan pusat Kristen diratakan dengan tanah. Seratus orang Kristen dibunuh, sisanya lari ke gunung-gunung dan Uliase. Tetapi di

sana pun perang sedang berkecamuk. Kaum Muslim di Sirisori (Pulau Saparua) menyerang Kampung Kristen Ulath. Tetapi dengan bantuan dari Portugis di bawah pimpinan Pareira Maramaque, mengepung pasukan Muslim Jawa dan Hitu di Teluk Ambon. Portugis menang dan rakyat Muslim dihukum berat.

Pada tahun 1570, akibat penghianatan dan pembunuhan terhadap Sultan Khairun, seluruh Maluku bergelolak. Sultan Baabullah (1570 -1583), putera Khairun, mengirim pasukan ke Selatan. Dengan bantuan Rakyat Hitu yang beragama Islam di Pulau Ambon, bantuan dari Jawa dan Makassar (Kerajaan Gowa), kedudukan Portugis di Hitu bagian selatan dihancurkan, yang selamat lari ke Leitimur dibawah pimpinan Sancho de Vasconcellos. Disana mereka mendirikan benteng yang kemudian hari berkembang menjadi Kota Ambon. Ini adalah sekelumit sejarah permusuhan umat Islam versus Nasrani pada masa imperialisme Portugis.

- Era Belanda

Kebencian rakyat Muslim Maluku terhadap Portugis yang membuat mereka menyambut kedatangan Belanda pada akhir abad 16. Mulanya orang Belanda tidak berniat menyebarkan agama Kristen (Protestan) kepada penduduk setempat tetapi di kemudian hari karena politik kepentingan, yaitu memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan asumsi kaum muslim sulit diajak kerjasama karena perbedaan agama, maka perlahan orang Belanda pun mulai melaksanakan misi penginjilan. Selain itu VOC memaksakan perjanjian-perjanjian berat sebelah dengan penguasa-penguasa setempat yang beragama Islam guna membatasi produk cengkeh dan pala. Melalui kebijakan *hongi tochten* (pelayaran razia), VOC menghancurkan tanaman rempah-rempah di berbagai tempat dan memusatkan penanamannya di Leitimur yang mayoritas beragama Kristen. Dengan demikian kemakmuran yang pernah dinikmati rakyat muslim dulu lenyap seketika.

Hal ini memicu pemberontakan-pemberontakan rak-



yat melawan VOC secara berkepanjangan. Perang Ambon yang terkenal antara lain; Perang Hitu I (1634-1643), Perang Hitu II (1643-1646) dan Perang Hoamoal (1651-1656). Pembunuhan pemimpin Muslim Kapitan Hitu bernama Kakiali dan kemudian Tulukabessy, pemimpin perang Hitu I dan II, yang sangat dihormati penduduk meninggalkan kesan yang sangat buruk sampai sekarang. Tak heran, orang Hitu bereaksi amat keras dengan menyerang Kampung Kristen Benteng Karang, dibakar hingga diratakan dengan tanah tiga hari setelah serangan orang Kristen terhadap pihak Muslim Ambon di daerah Leitimur pada Hari Raya Idul Fitri, 19 Januari 1999 lalu.

Kendati kontrol diperketat, kaum muslim masih sering melanggar perjanjian monopoli dengan memberikan hasil cengkih mereka ke pedagang Makassar, Melayu dan Jawa. Bahkan penduduk Muslim juga masih menanam cengkih di wilayah terlarang. Di tangan Gubernur Ambon Arnold de Vleming van Qudshorn, VOC mendapat inspirasi untuk menghentikan semua kegiatan “ilegal” itu. De Vleming dengan kebenciannya yang meluap-luap terhadap kaum Muslim, menghancurkan benteng kecil pertahanan kaum muslimin di Manipa (Maluku Tengah), membakar desa-desa muslim, bahkan ia menggiring penduduk yang telah menyerah dan memaksa sekitar 5.000 orang untuk bunuh diri, diperbudak atau dikirim ke pulau lain. Strategi bumi hangus diterapkan. Dan terakhir benteng persembunyian para pejuang muslim yang paling kuat Assahoedi (1655) berhasil ditaklukkan. M.C.Ricklefs mengatakan, sebagian pejuang muslim yang tertangkap dibuang ke Ambon (Sejarah Indonesia Modern, 1991).

Contoh lain di Kota Ambon, terdapat Desa Batumerah sebagai perkampungan muslim dimana sebagian penduduknya berasal dari Hoamoal (Muslim) yang dipindahkan De Vleming ke Ambon. Sedangkan tetangga desa Batumerah adalah Mardika, menurut C.P.F. Luhulima dalam “Bunga Rampai Sejarah Maluku” (1971), Mardika (Kam-

pung Kristen) didirikan oleh Portugis untuk dihuni orang Portugis hitam, bekas budak India (*Keling*) yang telah dibebaskan. Ini terlihat adanya kesengajaan pihak kolonial untuk melestarikan permusuhan umat Islam-Kristen ke Ambon guna memudahkan mereka mengontrolnya.

Menarik juga dikaji adanya dikotomi yang tajam antara kelompok Kristen-Islam dan juga *privileges* dari pemerintah Kolonial Belanda terhadap Ambon Kristen turut memperlebar jarak antara Masyarakat Ambon (Maluku) yang berbeda agama tersebut. Kondisi ini diperkuat dengan upaya penjajah Belanda membagi masyarakat Maluku menurut garis agama, secara geografis dan sosial, walaupun konflik bisa diredam karena adanya kearifan lokal yang dianut (baca: *pela gandong*).

2. Faktor Sosial Politik dan Ekonomi.

Di Maluku umumnya atau lebih spesifik lagi di Ambon, potensi konflik ini bisa dirunut sejak masa kolonial ketika kekuasaan kolonial Belanda menerapkan kebijakan diskriminatif dalam berbagai bidang. Orang Kristen diberi akses yang lebih besar dalam pendidikan dan posisi politik, sedangkan Muslim menjadi mayoritas pedagang dan pebisnis.

Akibat warisan penjajahan itu, warga Kristen di Maluku pada umumnya memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat pada tingkat melek huruf dan mental orang Nasrani Ambon. Ketika Indonesia Merdeka, jumlah penduduk Ambon yang mengecap pendidikan formal sebesar 37%, jauh di atas Jawa yang hanya mencapai 0,2% (Ricklefs, 1991).

Privilege itu mengakibatkan posisi-posisi dalam pemerintahan dikuasai kelompok masyarakat Kristen. Sedangkan masyarakat muslim, hanya bisa bekerja di bidang pertanian dan perdagangan sesuatu hal yang dianggap hina pada masa itu menurut pandangan Kaum Kristen. Kondisi ini didukung adanya migrasi sukarela dari pendatang Bugis, Buton dan Makassar (muslim) yang juga adalah pedagang.

Akhirnya perdagangan di Maluku dikuasai oleh masyarakat



muslim Maluku sehingga memunculkan mereka sebagai kekuatan dominan dalam ekonomi lokal. Dimana akibat penguasaan sumber-sumber ekonomi itu, secara bertahap warga Muslim dapat berkompetisi dalam bidang pendidikan. Peluang untuk memasuki birokrasi pun makin terbuka.

Perubahan-perubahan ini dibiarkan terjadi tanpa ada upaya dari pemerintah Orde Baru, untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerimanya. Ketika otoritarianisme runtuh, potensi konflik ini bukannya ditangani dengan baik tetapi justru dieksploitasi oleh para pemimpin lokal dan nasional demi keuntungan-keuntungan politik dan ekonominya sendiri.

Konflik yang terjadi ini sebenarnya gejala awalnya dapat dilihat pada konflik sebelumnya yaitu dari pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada awal tahun 1950 yang salah satu faktor penyebabnya karena sebagian masyarakat (kaum Kristen umumnya) tidak bisa menerima kenyataan atas hilangnya hak-hak istimewa yang mereka nikmati selama masa penjajahan.

Tapi harapan mereka untuk mendirikan Republik Maluku Selatan, dengan mudah dipatahkan dari pusat, antara lain penyebabnya karena tak didukung penduduk muslim di seluruh Maluku, yang menyatakan RMS (Republik Maluku Selatan) sebenarnya tak lain dari Republik Maluku Sarani (Sarani sebuah sebutan untuk kaum Nasrani/Kristen).

3. Adanya Provokator

Suatu kelompok yang terorganisir atau provokator dengan motif politik dan tujuan tertentu diduga sebagai penyulut konflik yang bernuansa SARA ini atau mereka yang diuntungkan dengan adanya konflik Maluku ini.

4. Akibat Orde Baru

Dalam kerangka berpikir Orde Baru perbedaan dianggap akan mengarah pada konflik, yang sedapat mungkin harus dihindari. Untuk itu diperlukan adanya keseragaman yang memungkinkan terjadinya kerjasama. Politik sentralisme menjadi strategi dan program utama dalam mengelola kemajemukan masyarakat, yaitu untuk meredam kekuatan-kekuatan tertentu

yang dianggap melekat di dalam pluralitas masyarakat, sehingga tidak muncul ke permukaan. Cara represi pun ditempuh dalam menyelesaikan persoalan.

Hal ini berakibat terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan. Kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konflik sesuai kearifan lokal menjadi berkurang. Perbedaan-perbedaan yang ada bahkan cenderung memperkuat identitas satu kelompok dan menghadapkannya pada kelompok yang lain. Perubahan-perubahan sosial yang potensial menimbulkan konflik terlambat disadari dan dibiarkan menumpuk dalam jangka yang lama.

Contoh menarik adalah sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 di Maluku, instrumen adat sebagai *problem solving* bagi masyarakat telah terpinggirkan. Mekanisme adatpun terabaikan. Akibatnya melemahnya adat dan kepemimpinan tradisional atau lokal, misalnya *Pela-Gandong*. Hal lain yang dapat dilihat adalah proses ketidakadilan di masyarakat diabaikan dan secara egoistis hanya melihat secara sepihak kepentingan-kepentingan kelompok sendiri. Sebab lain pendekatan dialog antar umat beragama yang telah dicanangkan pemerintah Orde Baru akhirnya terbukti tidak efektif karena cenderung hanya menyentuh permukaan, insidental, sloganistik dan elitis, jauh dari suatu upaya melahirkan *solution problem* yang mendasar dan efektif.

5. Adanya kesenjangan dalam proses komunikasi, khususnya komunikasi antar budaya. Hal ini terjadi karena:
 - Timbulnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat, seperti perbedaan agama, ras, perbedaan penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan lainnya. Dimana perbedaan-perbedaan ini menyatu hingga memperkuat identitas kelompok, hingga melahirkan perbedaan-perbedaan persepsi hingga membentuk stereotipe dan prasangka sosial. Akibatnya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku individu/kelompok.
 - Masing-masing pihak kurang menyadari, atau belum terbentuknya nilai-nilai rasa persatuan dan perilaku komunikasi dalam memahami pihak lainnya.



- Belum terbentuknya nilai-nilai (solidaritas), norma-norma budaya yang diterima dan yang berlaku, padahal nilai budaya ini justru berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, termasuk perilaku dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya tersebut melalui sarana, media atau perilaku komunikasi yang juga dikendalikan dan diatur oleh nilai-nilai budaya tersebut.

Dalam konteks komunikasi antarbudaya, fenomena di atas mengisyaratkan bahwa masyarakat Maluku selama ini kurang melakukan komunikasi antarbudaya yang efektif. Sebuah proses komunikasi antarmanusia yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahpahaman budaya.

6. Media sebagai pemicu konflik

Pemberitaan media yang berisi konflik dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik dan kedua, dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik (Sieber, et al., 1986).

Selama konflik di Kota Ambon, media dapat dikatakan memainkan peran dalam mempromosikan kekerasan. Dalam konflik Ambon, media ternyata menjadi corong komunitas yang bertikai yang tanpa sadar justru memperluas eskalasi konflik. Media pun terbagi dalam garis keagamaan dan digunakan untuk menyebarkan isu dan informasi palsu yang belum tentu kebenarannya. Contohnya, konflik mengakibatkan terpecahnya sebuah koran lokal, *Suara Maluku* menjadi *Suara Maluku* untuk pembaca Kristen dan *Ambon Express* untuk pembaca Muslim.

Solusi

Di dalam suatu masyarakat majemuk, potensi konflik lahir karena secara *inherent* setiap suku/etnis dilahirkan berbeda baik secara fisik, bahasa, agama, budaya maupun warisan sejarahnya. Perbedaan-perbedaan ini menciptakan jarak antar budaya. Jarak sosial ini bisa melebar atau menyempit tergantung proses komunikasi antarbudaya yang dilakukan.

Selama ini yang dilakukan pemerintah jika konflik terjadi adalah segera meredakan bentrokan, memisahkan kedua belah pihak,



dan merelokasi pengungsi, dan terkesan sporadis. Pemerintah tidak memiliki basis kebijakan yang jelas sehingga solusi yang ditawarkan kurang efektif sehingga konflik tetap bisa terjadi lagi.

Dalam penyelesaian konflik sosial di Ambon ini perlu adanya pendekatan untuk memahami dan mengidentifikasi unsur-unsur konflik sosial melalui suatu pemahaman yang *integrated* atau holistik, berdasarkan sistem nilai budaya yang berlaku di masyarakat Ambon. Hal ini karena budaya itu berkenaan dengan cara manusia hidup, berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan komunikasi.

Suatu budaya mempengaruhi komunikasi dalam banyak hal. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, atau tentang apa dan bagaimana orang menyampaikan pesan, tetapi juga melukiskan kadar dan tipe kontak fisik yang dituntut oleh adat kebiasaan dan intensitas emosi yang menyertainya.

Masyarakat Maluku adalah masyarakat adat, dengan raja sebagai tokoh panutan yang berbasis pada suatu desa atau negeri (istilah di Ambon atau Maluku). Seorang raja mempunyai pengaruh yang besar. Seorang raja diangkat berdasarkan berdasarkan garis keturunan, dimana hanya marga atau *fam* tertentu saja, yang bisa diangkat menjadi raja. Seorang raja pada suatu negeri dibantu oleh para kepala *soa* (pemimpin dari suatu marga) dan *kapitan* (panglima perang). Selain itu adapula lembaga atau sistem adat, seperti pelagandong yaitu suatu hubungan kekerabatan antardesa, tanpa melihat suku, golongan, dan agama penduduknya dengan tujuan untuk saling membantu dalam segala hal, dalam ikatan persaudaraan.

Tetapi itu dulu, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, tatanan adat tidak dipakai, misalnya menyangkut hak atas wilayah adat dan sistem tatanan negeri. Seperti di daerah-daerah lain, tatanan perkampungan di Maluku juga diseragamkan. Negeri dengan raja sebagai pemimpin diubah menjadi desa atau kelurahan dengan kepala desa atau lurah. Mereka kehilangan wibawa tradisionalnya yang sangat disegani oleh masyarakat. Tatanan yang baru hanya melingkupi administrasi. Urusan antar warga yang dahulu bisa dipecahkan ber-



sama, malah tidak diperhatikan oleh lembaga baru. Hal ini berakibat terhadap sistem pengetahuan lokal masyarakat dalam bentuk pranata *Pela-Gandong* mulai rapuh sehingga dengan mudah dikoyak oleh provokator.

Menyikapi hal di atas, untuk solusi penyelesaiannya adalah sedapat mungkin menggunakan pendekatan budaya, beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain:

1. Menghilangkan/mengurangi kesenjangan komunikasi diantara kelompok yang bertikai. Antara lain dengan cara;
 - a) menghilangkan perbedaan-perbedaan persepsi dimana dapat melahirkan stereotip dan prasangka.

Komunikasi adalah proses penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. Keefektifan komunikasi ini berbanding lurus dengan derajat kesamaan atau kesesuaian makna yang tercipta diantara pesertanya. Inti dari proses komunikasi adalah persepsi, yakni suatu proses internal dengan mana manusia memilih, mengevaluasi, mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari sekitarnya. Jika persepsi kita tidak akurat, tak mungkin komunikasi kita efektif.

Pada hakekatnya kedua kelompok yang bertikai mempunyai *frame of reference* yang tidak sama (berdasarkan agama) maka otomatis mempunyai perbedaan-perbedaan persepsi terhadap suatu hal/rangsangan. Perbedaan-perbedaan ini melahirkan stereotip dan prasangka. Hal ini karena tidak dikelola secara baik sehingga menimbulkan kerusuhan. Komunikasi mereka ditandai dengan retorika bahwa kelompoknyalah yang benar dan kelompok lainnya salah. Dengan kata lain, setiap kelompok cenderung etnosentrik, yang menganggap nilai-nilai budaya sendiri lebih baik daripada budaya lainnya, dan terus mengukur budaya lain berdasarkan kerangka rujukan budayanya sendiri.

Melekat dalam etnosentrisme ini adalah stereotip, yaitu generalisasi yang biasanya bersifat negatif atas kelompok lainnya, dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individu.



Menghadapi hal di atas, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri perlu melakukan usaha-usaha konkret, demi terwujudnya suatu perdamaian. Untuk itu stereotip dan prasangka harus disingkirkan jauh-jauh. Saling memahami dan empati mutlak diperlukan karena kita diperhadapkan pada suatu sistem nilai dan aturan kelompok yang berbeda. Merealisisasi hal ini pertemuan-pertemuan berkala diantara para pemimpin opini, tokoh-tokoh adat atau orang yang berpengaruh dari kedua kelompok, harus sering dilakukan dan disosialisasikan kepada anggota kelompoknya.

- b) Membentuk kembali nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku manusia.

Norma-norma budaya masyarakat Maluku yaitu *Pela-Gandong* bermula dari pengkristenan Maluku oleh penjajah, terhadap penduduk asli yang telah beragama Islam menimbulkan konflik horisontal antara penduduk yang beragama Islam dengan mereka yang telah memeluk agama lain (Kristen). Ternyata atas rekayasa Belanda bisa didamaikan dengan suatu pendekatan budaya *Pela-Gandong*. Walaupun tujuan Belanda sebenarnya untuk mengurangi kecemburuan sosial dari kaum muslimin terhadap kaum kristen Maluku, yang diberi peran lebih, tapi ternyata sistem ini terbukti efektif untuk membina kerukunan antarumat beragama.

Pela-Gandong sebagai suatu sistem kekerabatan antara satu desa dengan desa lainnya atau lebih yang tujuannya untuk saling membantu dalam segala hal, dimana hal ini terjadi biasanya kalau didahului konflik, bisa dikatakan masihlah sangat relevan untuk dipertahankan dengan direvisi sesuai perkembangan terkini (*Pela-Gandong* gaya baru) dengan terlebih dahulu memulihkan hak-hak adat pemerintahan desa di Maluku. Seperti, desa dikembalikan fungsinya menjadi Negeri yang dikepalai oleh Bapa Raja, bukan oleh kepala desa/lurah, yang dibantu oleh *soa*, (sekelompok mata rumah/rumpun rumah tangga seketurunan menurut garis



ayah, yang dianggap mempunyai hubungan kekerabatan dibantu oleh *kapitan* (panglima perang) dan lembaga adat lainnya yang berperan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran *pela*.

2. Konflik Ambon telah berkembang terlalu jauh, sehingga pemerintah harus mengambil peran yang signifikan dan mampu menjembatani semua pihak yang bertikai.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengacu pada akar persoalan. Akar permasalahannya harus diurai yang melibatkan banyak faktor sambil menyingkirkan unsur-unsur yang memperkeruh suasana. Tanpa hal ini, persoalan Ambon akan sulit dibedah dan konflik antaragama ini kembali bisa meletup setiap saat dengan skala yang lebih besar.

3. Pemahaman tentang SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) selama ini harus diubah. Bentuk kesadaran bahwa SARA itu amat peka, rentan dan eksplosif hingga membahayakan hubungan antarumat beragama. Dari situ muncul anggapan bahwa hubungan antarbudaya (menyangkut masalah SARA) sangat membahayakan. Akibatnya ketika terjadi konflik pendekatan utama yang dilakukan adalah melalui jalur keamanan. Padahal hubungan antar budaya yang pluralistik bila dikelola secara benar dan rasional sesungguhnya bisa menjadi sumberdaya bagi ekspresi politik dan budaya, terutama dengan menggunakan pendekatan komunikasi antarbudaya. Hal ini tentu saja setelah terlebih dahulu menata kembali struktur sosial, ekonomi dan politik demi mempertegas integritas bersama dalam kehidupan yang demokratis.
4. Melakukan upaya transformasi pada masyarakat

Hal ini merupakan upaya jangka panjang, sebab bagaimanapun konflik Maluku/Ambon telah menggoreskan luka yang sulit dihapuskan. Dimana secara mental tidak mungkin dihilangkan hanya dalam waktu beberapa tahun saja, tetapi membutuhkan upaya yang lama, bahkan bisa beberapa generasi.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melalui berbagai jalur seperti pendidikan, legislasi, ekonomi, dan lain-lain yang integratif sifatnya, antara lain:



- Dalam pendidikan ditumbuhkembangkan toleransi dan kesediaan seseorang untuk menghormati simbol, simbol agama lain.
- Peraturan dan kebijakan politik yang diskriminatif harus dihapuskan. Selain itu undang-undang mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) perlu dibuat demi menghindari penyebaran kebencian karena hal di atas.
- Pembangunan ekonomi perlu diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang tersisih secara ekonomi untuk meningkatkan diri karena kesenjangan ekonomi potensial menjadi ancaman bagi integrasi sosial.
- Secara psikologis, perlu adanya pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap trauma pada masyarakat akibat konflik tersebut.§

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Yaya M. (2001). *Konflik Etnis dan Harmoni Sosial*. Harian Republika: 13 Maret 2001
- Adimihardja, Kusnaka. (2000). *Potensi Konflik di Berbagai Daerah di Indonesia*. Transformasi Vol. 1 No. 2, Juli-September 2000.
- Ecip, S., Sinansari. (1999). *Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan Lintas Wilayah di Indonesia*. Bandung: Mizan
- Keuning, J. (1973). *Sejarah Ambon Sampai Pada Akhir Abad Ke-17*. Jakarta: Bhrata.
- Lestaluhu, M.R.Z. (1998). *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam Terhadap Imprealisme di Daerah Maluku*. Bandung : Al-Maarif
- Luhulima, CPF (ed). (1971). *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. (2000). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyana, Dedy. (1999). *Nuansa-Nuansa Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nanulaita, I.O. (1966). *Timbulnya Militerisme Ambon Sebagai Suatu Permasalahan Politik, Sosial, Ekonomi*. Jakarta : Bhratara
- Ohorella, M.G. (1994). *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA)*, Disertasi Doktor, Universitas Hasanuddin.
- Radjab, Budi. (2000). *Masyarakat Indonesia: Tinjauan dari Dimensi Pluralitas dan Peradaban*. Transformasi Vol. 1 No. 3, Oktober-Desember 2000.



- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Willard, A. Hanna. (1996). *Colonialism and Its aftermath in The Nutmeg Islands*. Philadelphia: ISHI
- Willard, A. Hanna dan Des Alwi. (1996). *History of Ternate and Tidore Islands in Maluku Province During Colonialism Period*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



KONFLIK LINGKUNGAN DAN PERSOALAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Yenrizal

Fakta di Indonesia menunjukkan peningkatan konflik lingkungan dari tahun ke tahun dan kerap berujung pertikaian fisik yang memakan korban jiwa. Realitas ini menunjukkan posisi lingkungan alam sebagai wilayah strategis yang senantiasa menjadi perebutan dan objek pertikaian.

Tulisan ini ingin membahas lebih jauh bahwa manusia dengan lingkungan alam bukanlah sebuah entitas yang bisa dipisahkan. Ada keterkaitan antara keduanya sebagai sebuah ekologi. Konteks itu yang dimaknai sebagai komunikasi lingkungan. Pembahasannya akan diawali dengan gambaran realitas konflik lingkungan, kajian teoritis komunikasi lingkungan dan etika lingkungan, kemudian menitik pada peran strategis komunikasi lingkungan sebagai wilayah yang harus digalakkan.

Komunikasi lingkungan selama ini yang memandang alam sebagai objek harus direposisi dengan memandang alam sebagai subjek. Komunikasi lingkungan diharapkan bisa membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik.

Kata kunci: konflik lingkungan, komunikasi lingkungan, etika lingkungan

Realitas Konflik Lingkungan

Persoalan lingkungan hidup, sampai saat ini, dan sampai kapan pun, akan terus aktual. Masalah ini berkaitan dengan realitas yang dialami manusia. Kasus banjir bandang yang kerap melanda berbagai daerah, tanah longsor, kekeringan, masalah iklim, pemanasan suhu bumi, adalah fakta-fakta yang sekarang menjadi keseharian di masyarakat.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkatkan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus¹.

Pada konteks lain juga terjadi kasus lingkungan yang bentuknya adalah perebutan sumber daya alam. Bukan dalam bentuk kerusakan lingkungan saja, namun juga memperlihatkan pertikaian antar sesama manusia. Belakangan, yang mencuat adalah permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan yang saling klaim kepemilikan lahan. Kasus ini bisa juga dikategorikan sebagai kasus lingkungan, karena memiliki objek lingkungan alam itu sendiri.

Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria² menunjukkan bahwa tahun 2011 terjadi 163 konflik berkaitan SDA. Konflik tersebut telah mengakibatkan 22 petani/warga orang yang tewas. Luas lahan yang disengketakan mencapai 472.048,22 hektar. Konflik ini tersebar dalam berbagai bentuk, seperti penguasaan izin perkebunan, izin penguasaan hutan, izin pertambangan, dan izin pengelolaan pulau serta pesisir.

Konflik penguasaan SDA berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang membolehkan, atas nama pembangunan dan investasi, mengeksploitasi sumber daya alam. Data yang dilansir *Forest People*³ menyebutkan bahwa sekitar 133,6 juta hektar dari 187,9 juta hek-

1 http://www.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kerusakan+Lingkungan+di+Indonesia+Meningkat+Drastis+, diambil tanggal 23 Mei 2012

2 <http://www.kpa.or.id/?p=761>, diambil tanggal 25 Mei 2012

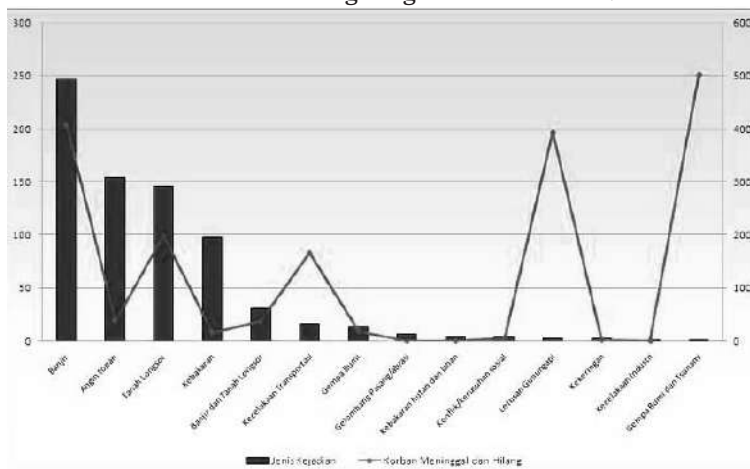
3 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/01/KOMISI%20PE-NYELESAIAN%20KONFLIK%20AGRARIA_sekber-2.pdf, diambil tanggal 25 Mei 2012

tar atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Sebanyak 25.384.650 hektar dikuasakan dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan, 8.441.976 hektar dikuasai oleh perusahaan Hutan Taman Industri, 9 juta hektar lebih dikuasai perkebunan besar sawit, dan 28.27 juta hektar untuk kontrak pertambangan. Semua ini sangat berpotensi menimbulkan konflik sumberdaya alam yang berkaitan erat dengan lingkungan alam.

Apapun motifnya, semua konflik itu sama-sama berakar dari lingkungan alam. Hal yang terjadi adalah fenomena pengabaian terhadap eksistensi lingkungan. Oleh Sonny Keraf⁴ ini disebut menentang konsep etika itu sendiri, karena etika lingkungan tidak saja sama dengan moralitas bagi manusia, namun juga menuntut pemperlakuan yang sama bagi komunitas biotis ataupun ekologis. Etika lingkungan tidak hanya bicara soal relasi manusia dengan alam, namun juga semua kehidupan di alam semesta.

Relasi manusia dengan alam, sebagaimana di atas menunjukkan konflik-konflik lingkungan yang terjadi. Konflik yang tidak saja menimbulkan efek pada alam, namun juga berdampak langsung pada manusia. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2012 menunjukkan bahwa bencana alam yang terus meningkat di Indonesia. Selengkapnya bisa dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 1 Bencana Lingkungan di Indonesia 2010



Sumber : BNPB, 2011

4 Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2002;26



Kasus lingkungan di atas menunjukkan adanya korelasi kuat dengan terjadinya bencana di masyarakat. Hampir semua bencana, bermula dari masalah pengelolaan lingkungan alam. Kondisi ini bisa dilihat dari data BNPB. Data ini merupakan kondisi terakhir tahun 2010, yang tentunya masih cukup relevan dengan kondisi sekarang. Relevan dalam arti kata, ada kecenderungan terus terjadi bencana lingkungan pada tahun 2011.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa bencana banjir adalah yang paling sering terjadi, diikuti oleh angin topan, tanah longsor dan kebakaran. Semuanya juga menelan korban jiwa. Jenis bencana tersebut, jelas berhubungan langsung dengan perlakuan manusia terhadap alam. Di sinilah kelihatan relasi penting antara manusia dengan lingkungan.

Selain data tersebut, realitas lain juga telah dirasakan masyarakat. Ketidakjelasan musim dan pergantian cuaca yang sangat cepat, kerap menjadi persoalan. Di berbagai wilayah kerap ditemukan daerah yang sebelumnya tidak mengenal banjir, sekarang sudah jadi langganan terendam setiap tahun. DKI Jakarta adalah bukti konkret. Wilayah-wilayah yang sebelumnya bebas banjir, sekarang harus tergenang ketika musim hujan. Sementara masyarakat yang berada di pinggir sungai, harus merasakan kekuatan banjir bandang, sebagaimana dialami di Bahorok, Sumatera Utara. Begitu juga di Papua, yang harus menerima kekuatan tanah longsor. Banyak daerah lain di Indonesia harus menerima kejadian-kejadian serupa.

Dari berbagai kasus tersebut, kecenderungannya menempatkan masyarakat sebagai biang keladi. Contohnya perilaku perambahan hutan, berkaitan dengan aktifitas masyarakat yang menjadikan alam sebagai sumber pencaharian. Pembangunan rumah dan tempat usaha dengan menggunduli bukit, menimbun rawa. Pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan besar dengan memabat hutan, serta bentuk-bentuk lainnya.

FAO merilis data bahwa kerusakan hutan setiap tahun di tiap wilayah mencapai 5-15%. Saat ini data jumlah hutan di Indonesia hanya berkisar 60 juta hektar. FAO juga menegaskan bahwa faktor utama penyebab kerusakan hutan adalah, *illegal logging*, kebakaran

hutan, konversi perkebunan, HTI, tanah pertanian, dan masyarakat yang membentuk wilayah⁵.

Oleh karena itu, keterkaitan dan interaksi yang rapat antara manusia dengan lingkungan alam menjadi strategis. Kesalahan dalam menetapkan sudut pandang, dan pergeseran dalam memahami pola hubungan yang terjadi, berpotensi menciptakan konflik-konflik lingkungan hidup. Tidak hanya antara manusia dengan lingkungan, tetapi juga antar sesama manusia itu sendiri.

Perspektif Teoritis Komunikasi Lingkungan

Kajian teoritis mengenai perspektif komunikasi lingkungan, cukup banyak di bahas para ahli, walaupun dalam beberapa sisi banyak berhubungan dengan konsep kearifan lokal, sebagaimana sudut pandang sosiologi lingkungan. Oravec dan Klurke⁶ menegaskan bahwa komunikasi lingkungan adalah suatu studi tentang cara pandang manusia dalam melihat, mengetahui, dan membangun secara sosial budaya terhadap alam sekitarnya, dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu, sebagai bahan dalam bertindak dan menuntun perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Sebuah definisi lainnya diperjelas oleh Richard Jurin⁷ bahwa komunikasi lingkungan adalah sebuah generasi sistematis dan pertukaran pesan manusia dalam, dari, untuk, dan tentang dunia di sekitar kita dan interaksi kita dengan alam. Dalam hal ini, Jurin juga menegaskan beberapa aksioma dari komunikasi lingkungan, yaitu :

- Komunikasi adalah aktifitas manusia

Meskipun para ilmuwan telah mengidentifikasi banyak proses antara organisme non-manusia yang dapat diberi label 'komunikasi', kesengajaan dan kekayaan pesan yang membentuk komunikasi lingkungan hanya ditemukan di antara manusia. Memang, anggapan manusia berada di atas seluruh alam telah menjadi sumber dari banyak masalah lingkungan. Hal ini adalah

5 Harian Umum Sumatera Ekspres, 28 Maret 2011

6 Senecah, Susan L, ed., *The Environmental Communication Year Book*, New Jersey, London, Lawrence Ehlbaum Associates Publisher, 2004;3

7 Jurin, Richard, ed., *Environmental Communications, Skill and Principles for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer*, Springer Doerdrecht Heidelberg, Newyork London, 2010;15



ironis dan berharap bahwa sudut pandang yang sekarang sedang digunakan oleh komunikator lingkungan bisa membantu mengatasi degradasi yang disebabkan manusia biosfer.

- Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi

Eksistensi dasar adalah tindakan komunikasi; bertindak adalah berkomunikasi. Mencoba untuk tidak mengirimkan pesan apapun adalah mengirimkan pesan itu sendiri. Jika seseorang tidak mengirimkan pesan, sesungguhnya itu adalah mencoba berkomunikasi dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Menjadi hal yang paling tepat ketika manusia memilih berkonsentrasi pada sumber daya alam. Pemahaman tergantung pada bentuk yang sesuai dan pengiriman pesan. Kebingungan adalah satu hasil dari komunikasi yang buruk.
- Pemahaman adalah sasaran komunikasi

Komunikasi berhasil bila pesan dipahami oleh penerima yang diinginkan. Banyak pesan disalahpahami, tertutup oleh beberapa kesalahan dalam sistem. Gangguan ini disebut *noise* yang dapat terjadi dalam setiap bagian dari sistem komunikasi. Komunikator berusaha untuk mengatasi dan menghindari *noise* ini.
- Tanggung jawab terletak pada komunikator, bukan penerima

Kesuksesan komunikator adalah kemampuan mereka mengemas pesan untuk tampil dengan efektivitas maksimum. Mereka harus tahu persis kepada siapa mereka mengirimkan informasi spesifik, bagaimana publik ini lebih suka menerima informasi tersebut, dan bagaimana mereka dapat diharapkan untuk menerjemahkannya. Mengetahui mengapa seseorang ingin mengirim pesan membantu komunikator untuk bertanggungjawab dengan sukses. Etika memainkan peranan yang menentukan dalam komunikasi lingkungan. Saat suatu pesan tidak dipahami, kesalahan jatuh kembali pada pencetus pesan.
- Manusia bergantung pada alam untuk bertahan hidup

Segala sesuatu yang dilakukan untuk berkembang dan mengelompokkan masyarakat secara khusus, tergantung pada tindakan yang dilakukan dalam hidup. Bumi adalah satu-satunya rumah yang dimiliki dan fungsi biosfernya mendukung kehidup-

an manusia. Sistem alam memberi manusia udara bersih, air bersih, makanan, tempat tinggal, kesenangan, keindahan dan keyakinan dalam urusan di luar diri manusia sendiri. Manusia hidup dan bekerja jika, dan hanya jika, alam kehidupan bekerja.

- Bumi/alam memiliki pesannya sendiri untuk dibagikan pada manusia

Mendengarkan planet ini adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan karya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan merupakan sumber penting dari informasi untuk semua lingkungan komunikator. Mereka berkomunikasi lingkungan untuk memahami apa yang lingkungan telah katakan pada mereka. Indra manusia telah diberikan segala macam *gadget* dan instrumentasi.

Mengacu pada pandangan di atas, posisi lingkungan alam bukanlah sesuatu yang terpisah dengan manusia. Keduanya harus memiliki posisi yang setara. Dalam konteks komunikasi, ini identik dengan perspektif dalam komunikasi transaksional. Tekanannya adalah semua unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan. Persepsi seorang peserta komunikasi saling bergantung dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, bahkan tergantung pula pada konteks lingkungannya. Deddy Mulyana⁸ berkata bahwa komunikasi dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, dan tidak membatasi diri sesuatu yang disengaja atau respons yang diamati. Dalam proses ini, komunikasi dianggap sudah berlangsung apabila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal maupun non verbalnya.

Pada konteks lingkungan, ini bisa menjadi acuan bahwa manusia pada dasarnya menafsirkan berbagai pesan yang disampaikan alam, berupa simbol-simbol. Penafsiran ini berlangsung terus menerus dan menjadi aktifitas keseharian. Kearifan manusialah yang kemudian menentukan bagaimana kualitas komunikasi tersebut terjadi. Kearifan ini berkaitan dengan sudut pandang dalam melihat lingkungan, atau dalam bahasa disebut etika lingkungan hidup.

⁸ Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001:68.



Etika perlu mendapat sorotan, sebagai kondisi yang memandu manusia dalam berkomunikasi dengan lingkungan alam. Ada tiga perspektif etika lingkungan yaitu, antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Antroposentris adalah sudut pandang yang menempatkan manusia sebagai titik sentral, alam dipandang sebagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam bisa diolah dan dieksploitasi sebesar-besarnya. Biosentris, lebih melihat bahwa kewajiban manusia pada alam, bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies yang lain. Sementara Ekosentris, kerap juga disebut *deep ecology*, merupakan sudut pandang yang mengatakan bahwa, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lain saling terkait satu sama lain⁹.

Otto Soemarwoto¹⁰ mengatakan, konsep *deep ecology* akan melestarikan lingkungan hidup beserta penghuni non-manusia demi lingkungan hidup itu sendiri. Manusia sebagai salah satu organisme hidup, tidak dilihat dalam isolasi, terpisah dari dan berada di atas alam, melainkan bagian dari dan berada di alam semesta.

Perspektif dalam melihat komunikasi lingkungan hidup, seharusnya ditempatkan pada posisi *deep ecology*. Sesuai dengan konteks komunikasi transaksional, manusia dengan lingkungan hidup memiliki sudut pandang dan kepentingan sendiri. Ia tidak bisa diabaikan dan dipandang berat sebelah. Pentingnya menegaskan komunikasi lingkungan, dalam menekan konflik lingkungan berada pada titik ini, pemahaman posisi dan sudut pandang.

Reposisi Komunikasi Lingkungan Untuk Solusi Konflik Lingkungan

Mengacu pada realitas dalam etika lingkungan, yang kemudian bisa menjadi dasar dalam melihat komunikasi lingkungan, tampaklah bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan dalam lingkungan hidup. Masalah-masalah lingkungan hidup, sebagaimana diilustrasikan pada bagian awal tulisan ini, menuntut penempatan posisi komunikasi lingkungan dalam wilayah

9 Keraf, *ibid*, hal.33-35

10 Atur Diri Sendiri, *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004; 88



yang lebih dialogis dan setara.

Diakui atau tidak, persoalan lingkungan hidup, yang berwujud pada munculnya konflik-konflik lingkungan, bersumber dari sudut pandang dalam melihat posisi masing-masing. Pendekatan antroposentris, menjadi masalah utama, sehingga lingkungan alam dijadikan objek untuk kepentingan manusia. Keraf¹¹ menyebutkan sejauh ini teori tersebut dituduh sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama krisis lingkungan yang dialami sekarang. Cara pandang antroposentris menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa memberi perhatian pada kelestarian alam.

Di sisi lain, Sonny Keraf¹² juga mengatakan bahwa yang salah sebenarnya bukan antroposentris, tetapi penggunaannya yang berlebihan. Pada dasarnya pendekatan ini masih menganggap bahwa kehidupan manusia dengan alam saling bergantung, tidak saling meniadakan. Hanya saja ketika antroposentris dijadikan sudut pandang utama untuk melihat manusia sebagai sosok yang memiliki superioritas, disitulah kekeliruan tersebut terjadi. Alam kemudian hanya dijadikan sebagai objek semata.

Dalam konteks inilah, reposisi komunikasi lingkungan menjadi sangat vital. Penekanannya bukan hanya pada bagaimana memandang lingkungan alam tersebut, namun juga pada bagaimana melakukan konstruksi terhadap lingkungan. Gagasan ini akan berkaitan dengan bagaimana persoalan keberlanjutan (*sustainability*) dalam melihat kondisi lingkungan hidup. Ditegaskan oleh Harriet Nalukenge¹³ mengatakan bahwa keberlanjutan adalah sebuah konstruksi manusia dimana manusia menggunakan lingkungannya pada konteks yang objektif, termasuk kehidupan, komunitas produksi, estetika dan pelayanan ekosistem secara tidak langsung.

Hal yang sama juga disebutkan Stephen W Littlejohn¹⁴ di mana banyak kalangan sekarang sudah mencoba mengetengahkan cara

11 Keraf, *ibid*, hal.35

12 Keraf, *ibid*, hal.41

13 Weber, Estelle L, ed., *Environmental Ethics, Sustainability and Education*, Inter Disciplinary Press, Oxford UK, 2009; 100.

14 Littlejohn, Stephen W. And Karent Foss, ed. *Encyclopedia of Communication Theories*. Sage Publication, 2009;347



alternatif tentang komunikasi lingkungan. Cara ini bisa membantu masyarakat untuk mengatasi atau menumbangkan budaya dominan yang destruktif terhadap alam. Penekanannya adalah dengan menjelajahi simbol-simbol yang ada, membongkar pandangan lama yang mengatakan manusia lebih unggul dari alam, terpisah dari alam. Sebaliknya menempatkan keduanya dalam posisi yang saling berkaitan. Disinilah inti reposisi komunikasi lingkungan, perubahan dalam menempatkan sudut pandang yang kemudian berefek pada perubahan dalam pola hubungan yang terjadi.

Sebagai pandangan dasar melihat konflik lingkungan, dalam kaitan dengan reposisi komunikasi lingkungan, bisa dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar manusia yang menunjuk pada ekosistem. Hal ini ditegaskan oleh Mullins dan Watson¹⁵ yang membaginya menjadi lima nilai dasar yaitu :

1. Ekonomis, nilai yang tetap berorientasi bahwa sumber daya alam memiliki nilai ekonomis bagi manusia.
2. Ekologis, menekankan pada pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia terhadap alam, seperti air bersih, udara, dan regulasi-regulasi tentang perubahan iklim.
3. Estetika dan spiritualitas, hal ini dianggap sebagai sumber dari rasa dan pandangan mengenai keindahan dan gagasan manusia.
4. Etika, menjelaskan mengenai ketentuan moral yang akan melindungi lingkungan alam.
5. Pengetahuan dan Pendidikan. Hal ini berhubungan dengan mekanisme pendidikan yang akan memberikan pembekalan bagi manusia dalam memahami kondisi lingkungan alamnya.

Beberapa aspek di atas bisa menjadi acuan dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimanapun juga, lingkungan alam memiliki nilai ekonomis. Tanpa memandang sisi ekonomis lingkungan, akan sulit pula dalam menempatkan komunikasi manusia dengan lingkungan alam. Hanya saja, konteks ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks lainnya, seperti ekologi, estetika, etika, maupun pendidikan. Semuanya harus berada dalam satu

15 Jurin., Ibid. Hal 257



mata rantai yang memiliki keterhubungan. Tanpa menempatkan hal tersebut, yang terjadi adalah kecenderungan untuk melakukan eksploitasi alam sebesar-besarnya.

Melakukan reposisi komunikasi lingkungan sebagai solusi dalam konflik lingkungan yang terjadi, pada dasarnya adalah harus mendasarkan diri atas nilai-nilai dasar manusia. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang estetika dan spiritualitas, perbincangan akan mengarah pada aspek bagaimana nilai-nilai budaya, kearifan lokal, penghargaan terhadap alam, dijadikan sebagai sudut pandang yang utama. Aspek ekonomis dari alam tetap jadi perhatian, namun penghargaan terhadap eksistensi alam, sebagai bentuk nilai dasar manusia yang punya sisi estetika dan spiritualitas, juga harus diperhatikan.

Mengacu pada pandangan konstruktivistik, dapat dipahami bahwa manusia sebenarnya melakukan proses konstruksi terhadap lingkungan mereka. Melalui nilai-nilai dan norma kearifan lokal, masyarakat memberikan pemaknaan tersendiri terhadap apa itu hutan, sungai, sawah, gunung, dan sebagainya. Konstruksi ini terwujud dalam perilaku, yang sebagian dilihat dalam bentuk kearifan lokal.

Pearce¹⁶ mengatakan bahwa dunia sosial ini diciptakan. Manusia yang memberikan pemaknaan terhadap apa yang ada disekitar mereka, sehingga kemudian memberikan aktifitas timbal balik dengan kehidupan mereka. Begitu juga dengan lingkungan alam. Kendati hutan, gunung, sungai, pohon dan lainnya, memiliki fungsi dan gejalanya masing-masing, namun ketika ia berada dalam kehidupan manusia, maka manusia memberikan makna terhadap mereka. Apabila hutan dimaknai sebagai tempat mencari kayu, membuat perkebunan, lahan yang bisa memberikan penghasilan secara ekonomis semata, maka hutan akan dieksploitasi sebesar-besarnya. Sebaliknya, jika hutan dimaknai sebagai sebuah ekosistem, bagian dari sistem ekologi manusia, maka kondisinya akan dijaga. Hutan akan dimaknai memiliki fungsi strategis bagi kehidupan manusia secara lebih luas.

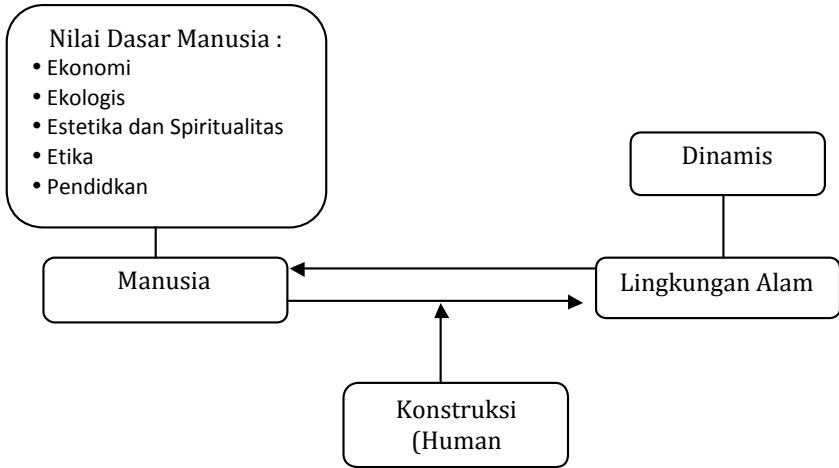
Oleh karena itu, menempatkan posisi lingkungan alam dalam

16 Pearce, Barnet, *Making Social World*, Blackwell Publishing, USA, 2007; 40



posisi pemaknaan yang tepat, akan bisa menjadi sebuah solusi tepat guna mengatasi konflik lingkungan. Secara sederhana, gambaran mengenai posisi terbaik komunikasi lingkungan sebagai solusi konflik lingkungan bisa dilihat dari bagan dalam gambar 2.

Gambar 2 Komunikasi Lingkungan



Bagan di atas memperjelas konsep komunikasi lingkungan. Terdapat aspek penting di atas yaitu ekologi manusia (*human ecology*). Hal ini bisa dilihat dalam pandangan Otto Soemarwoto¹⁷ yang menyebutkan bahwa hal dasar yang perlu dipahami mengenai konflik lingkungan adalah ekologi manusia. Ekologi ini akan menempatkan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya.

Sementara dalam proses hubungan timbal balik tersebut, terjadi proses konstruksi realitas oleh manusia. Di sinilah proses komunikasi terjadi. Apabila selama ini komunikasi yang berlangsung menempatkan manusia sebagai titik sentral, dan memandang alam sebagai objek manusia, maka dalam upaya mengatasi konflik lingkungan, harus dilakukan pembenahan sudut pandang. Konstruksi yang dilakukan harus dilandasi oleh pandangan ekologi manusia. Lingkungan tidak bisa dikatakan statis, namun dinamis karena memiliki kemampuan memberikan reaksi atas apa yang dimaknakan terhadapnya.

17 Soemarwoto, Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008; 22

Pembenahan terhadap sudut pandang tersebut, bisa dijadikan acuan pada nilai dasar manusia. Aspek ekonomi, etika, ekologi, estetika dan spiritualitas, dan pendidikan, dijadikan sebagai titik pijak utama. Semua berada dalam satu rangkaian. Pendidikan yang dimaksudkan di sini bisa dalam artian pendidikan secara formal, maupun pendidikan dengan belajar terhadap alam itu sendiri. Pendidikan yang diiringi dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Intinya adalah memberikan pemahaman tentang posisi alam dalam konteks yang semestinya.

Kedepannya, perlu dimulai berbagai langkah strategis untuk membenahi sudut pandang manusia terhadap lingkungan alam. Semua level harus menunjukkan niat baik terhadap ini. Harus ada sinergi, karena ketika memahami lingkungan alam, maka kesatuan dalam sebuah sistem ekologi yang harus dipahami, bukan terpisah-pisah.

Di level pemerintah, diperlukan munculnya kebijakan-kebijakan yang prolingkungan hidup. Bisa saja kebijakan yang sifatnya preventif, ataupun dalam bentuk *punishment* dan penjagaan. Sudut pandang harus diperbaiki, tidak memandang alam sebagai objek devisa semata. Begitu juga di kalangan dunia usaha. Faktor keuntungan ekonomis (modal), tentu tetap jadi perhatian, tetapi kesatuan sebagai sebuah ekosistem jauh lebih penting. Aturan dari pemerintah yang akan membatasi ini. Sementara di masyarakat, penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal harus dimulai. Ini menjadi dasar dalam melaksanakan komunikasi lingkungan yang berperspektif human ecology. Sinergi semua kalangan di atas akan menentukan keberhasilan proses yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Barnet, Pearce (2007), *Making Social World*, USA, Blackwell Publishing
- Jurin, Richard, ed. (2010), *Environmental Communications, Skill and Principles for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer*, Newyork-London, Springer Doerdrecht Heidelberg
- Keraf, Sonny (2002), *Etika Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Kompas
- Littlejohn, Stephen W. And Karent Foss, ed. (2009), *Encyclopedia of Communication Theories*, California, The Sage Publications.
- Mulyana, Deddy (2001), *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya.



- Senecah, Susan L, ed. (2004), *The Environmental Communication Year Book, Volume 1*, New Jersey, London, Lawrence Ehlbaum Associates Publisher.
- Soemarwoto, Otto (2004), *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- (2008), *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Weber, Estelle L, ed. (2009), *Environmental Ethics, Sustainability and Education*, Oxford UK, Inter Disciplinary Press, Oxford UK.
- http://www.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kerusakan+Lingkungan+di+Indonesia+Meningkat+Drastis+, diambil tanggal 23 Mei 2012
- <http://www.kpa.or.id/?p=761>, diambil tanggal 25 Mei 2012
- http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/01/KOMISI%20PENYELESAIAN%20KONFLIK%20AGRARIA_sekber-2.pdf, diambil tanggal 25 Mei 2012
- Harian Umum Sumatera Ekspres, 28 Maret 2011

EKONOMI POLITIK KONFLIK DI PERKOTAAN

Dewi S. Tanti

Dinamika perkotaan di Indonesia membawa banyak eksekusi pada relasi interpersonal, komunitas, bahkan antar organisasi, salah satunya terlihat pada potensi konflik sosial.

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan beragam organisasi massa merupakan sebuah laboratorium besar yang dapat digunakan untuk memahami akar konflik di kawasan perkotaan dalam perspektif komunikasi. Keragaman masyarakat membuat komunikasi dalam konflik memiliki pola yang bervariasi. Dalam perspektif ekonomi politik, konflik terjadi akibat adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang berupaya mengembangkan praktik penguasaan sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik.

Pendekatan ekonomi politik komunikasi digunakan dalam kajian ini untuk memotret potensi konflik di kawasan perkotaan. Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk menelusuri akar konflik, aktor dan relasi antaraktor dan ragam kepentingan di balik konflik yang terjadi di kawasan perkotaan.

Kata kunci: ekonomi politik, komunikasi konflik, kawasan perkotaan

Pendahuluan

Pasca keruntuhan rezim Orde Baru, terjadi sejumlah ledakan kekerasan massa di Indonesia. Konflik dan kekerasan seolah menjadi realitas masyarakat sehari-hari. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang sepenuhnya terbebas dari konflik. Seperti serempak, fenomena konflik¹ tersebut menunjukkan gejala yang sangat menarik jika dicermati, terlebih konflik yang terjadi di kawasan perkotaan.

Lazimnya kawasan perkotaan, heterogenitas etnis, budaya dan agama penduduk sering membuat kompetisi antarwarga kota makin ketat dalam memperebutkan sumberdaya demi kelangsungan hidup mereka. Tak ayal jika potensi konflik di kawasan perkotaan relatif lebih tinggi terjadi. Misalnya, DKI Jakarta, sebagai ibukota negara dan kota multietnis memang tidak pernah sepi dari kekerasan berlatar belakang etnis ataupun kelompok (Fauzi, 2010).

Miniatur Indonesia, sesungguhnya bisa dilihat di Jakarta meski tidak mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya. Pasalnya di Jakarta, ruang untuk hidup sekaligus menjadi arena pertarungan dan persaingan dalam penguasaan wilayah. Potensi ekonomi dan sosial juga menjadi tumpuan penghidupan orang.

Di tengah kompetisi atas akses terhadap pekerjaan yang layak, muncul sektor informal berupa jasa keamanan dan perparkiran yang dikoordinir kelompok preman dan aktor kekerasan. Di Jakarta misalnya beberapa organisasi massa terlibat dalam pertikaian berebut lahan ekonomi dalam bentuk pertikaian mengatasnamakan etnis, agama atau kelompok lain (Purnomo, dkk, 2004).

Konflik Kawasan Perkotaan: Sebuah Perspektif

Konflik sebagai ancaman tatanan sosial terwujud ketika kapasitas kultural dan modal sosial masyarakat untuk berpartisipasi di arena publik tidak pernah mendapat apresiasi dalam proses politik, padahal preseden kewargaan untuk ini sangatlah kaya (Hefner 2000).

1 Beberapa peneliti konflik dan kekerasan mendefinisikan jenis-jenis kekerasan dan konflik yang sporadis dan seringkali terjadi di tingkat komunitas sebagai kekerasan rutin. Peneliti Bank Dunia mengategorikan kekerasan rutin meliputi tawuran, perkelahian massa, penghakiman massa. Kekerasan rutin digunakan untuk membedakan secara analitis dengan konflik sosial lainnya yang berbasis etnis dan agama.

Tohari, dkk (2011) membedakan konflik di Indonesia dalam konflik agama atau etnik, politik, sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, kekerasan rutin dan konflik antar aparat negara. Varshney dkk (2004) mengidentifikasi tiga kerangka perspektif yang menjelaskan merebaknya konflik di Indonesia sepanjang 1990-2003. Pertama, Indonesia di bawah rezim Soeharto relatif damai karena mekanisme politik, administratif dan militer untuk meredam gejolak sosial. Kedua, dalam perspektif historis, kekerasan berakar kuat dalam sejarah budaya Indonesia. Kekerasan yang terjadi sekarang bukan hanya “warisan Orde Baru” (Colombijn dan Lindblad dalam Varshney dkk, 2004).

Ketiga, kekerasan terjadi akibat mekanisme pendisiplinan komunitas atau peremukan tatanan sosial yang mematikan semangat kewargaan tumbang (Bertrand, 2004 dalam Varshney et. al., 2004). Kondisi itu selanjutnya merenggangkan kohesi sosial yang substantif. Hasil yang bisa disaksikan adalah munculnya ketidakpercayaan warga negara terhadap aparatus negara ketika menggunakan kekerasan untuk melakukan kontrol terhadap warganya.

Konflik dapat disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Jika dilihat dari aspek pembeda penyebab sejumlah konflik di beberapa wilayah di Indonesia bukan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, namun karena ketidakadilan ekonomi dan politik (Madjid, 2009).

Senada dengan hal itu, Tamagola (2010) mengidentifikasi pemicu konflik di masyarakat antara lain *hard cover* atau potensi konflik, amunisi yang menjadi pemicu konflik, sumbu yang sebenarnya atau akar permasalahan dan provokator yang mendorong konflik itu meledak.

Akar Konflik Perkotaan dan Budaya Kekerasan

Hasil monitoring Institut Titian Perdamaian terhadap 44 media *online* yang terdiri atas 11 media nasional dan 33 media lokal, yang dilakukan sejak tahun 2006 menunjukkan data yang menarik. Kecenderungan atau trend konflik cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2008-2010, tak kurang terjadi sekira 1.340 konflik setiap

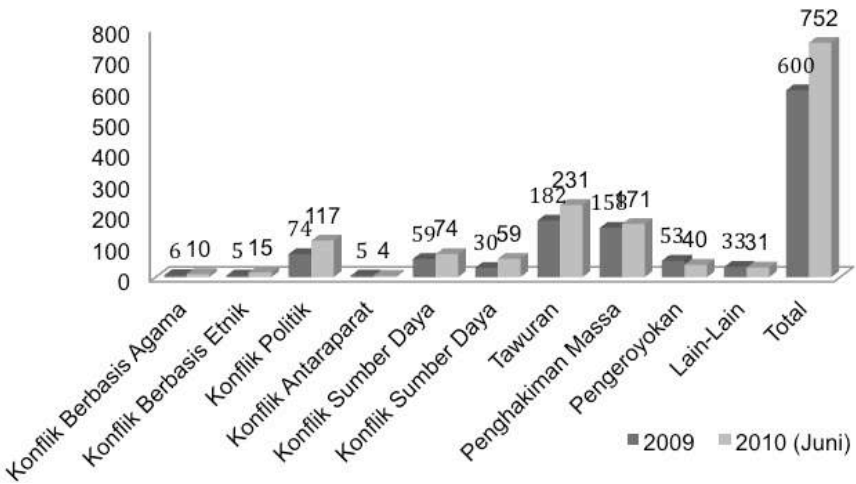


tahun, hal itu berarti terjadi 3, insiden konflik setiap harinya (Tohari dkk, 2011).

Hal yang menarik terdapat temuan bahwa kekerasan yang menonjol dalam setahun adalah penghakiman massa (30%), tawuran (21%), dan konflik politik (16%). Selain itu, terdapat konflik sumber daya ekonomi (11%) dan sumberdaya alam (10%) dan sisanya insiden konflik etnis atau agama, antara aparat dan lain-lain.

Jenis tawuran yang muncul selama tahun 2008 adalah tawuran antarpelajar, antarmahasiswa, antarkampung, dan antarpendukung kelompok tertentu. Pemicu terbesar dari penghakimam massa adalah tindakan kriminal seperti pencurian, pencopetan, penjam-bretan biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal dan lainnya.

Gambar 1. Konflik dan Kekerasan Tahun 2009-Juni 2010*



Sumber: Tohari, dkk, 2011

Beragamnya masyarakat yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dapat dipandang sebagai suatu potensi pembangunan, tetapi dapat juga menjadi peluang bagi terjadinya konflik sosial. Dua sisi Jakarta selalu menjadikan kontras hingga paradoks, ketika kemiskinan dan kemakmuran bercampur menjadi satu, berpadu dan tersaji sebagai potret kehidupan di berbagai sudut kota. Sebagai rumah bagi sekitar 9,6 juta penduduk, ibu kota memang sangat timpang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011

jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 363,42 ribu orang (3,75 persen), meningkat sebesar 51,24 ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 312,18 ribu orang (3,48 persen).

Pertambahan jumlah penduduk tentu merupakan pemicu konflik sosial dalam bentuk kriminalitas atau tawuran. Dimensi-dimensi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik kehidupan di Jakarta seperti ketergantungan akan ekonomi uang (*commodization*), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (*enviromental hazards*) dan kehidupan sosial yang individualisitis (*social fragmentation*).

Tingkat kepadatan penduduk yang terlalu tinggi juga akan menyulut konflik yang dipicu oleh gesekan sosial dan konflik antara pengguna ruang. Hasil sensus 2010 menunjukkan kepadatan penduduk Jakarta mencapai 12.992 jiwa perkilometer persegi. Beberapa kawasan di Jakarta bahkan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terlalu tinggi dan terpadat di Asia Tenggara.

Kombinasi antara ekonomi dan kondisi sosial serta kepadatan penduduk terakumulasi permasalahan sosial dan memicu beberapa konflik atau tawuran antar kampung yang anarkis dan mengakibatkan kerugian materiel yang besar dan korban jiwa.

Konflik itu tersebut tidak dapat dihindari oleh karena tidak ada peranan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Serta bertambah banyaknya jumlah pengangguran di umur produktif dan remaja. Sejalan dengan bertambah sempit dan terbatasnya lahan sumber penghasilan di lingkungan kawasan konflik (Yara, 2002).

Hal yang menarik, terdapat hubungan antara kondisi sosial politik dengan kondisi moral dan emosional masyarakat (Tohari, dkk, 2011). Di kawasan perkoraan yang terjadi. Budaya kekerasan lestari karena tidak berjalannya sistem penegakan hukum. Artinya, di Indoensia konflik dapat meningka akibat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum masih rendah. Citra aparat penegak hukum yang buruk di masyarakat menjadi masyarakat mengambil langkah sendiri dalam bereaksi terhadap pelanggaran hukum (Warta Titian Damai, 2009)

Ekonomi Politik Konflik: Perspektif Komunikasi

Mosco (1996: 25) mendefinisikan ekonomi politik komunikasi



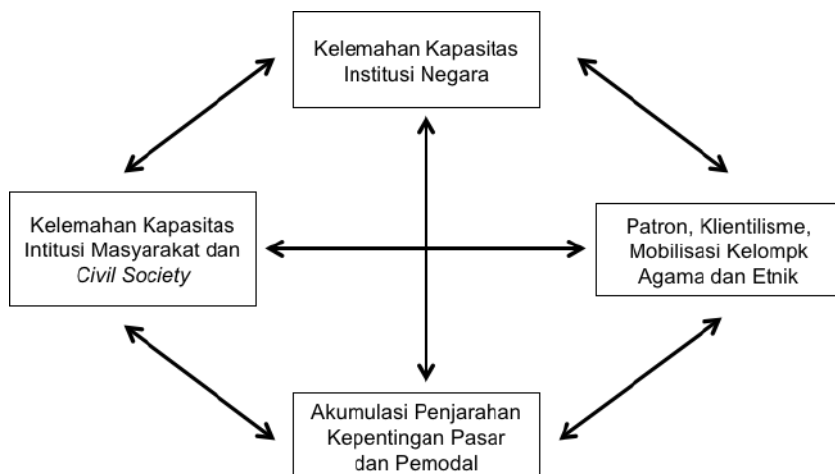
sebagai studi tentang relasi sosial, khususnya relasi kuasa, yang secara mutual merupakan produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Aspek ekonomi politik berkaitan dengan keberlangsungan hidup dan kontrol, atau bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri untuk memproduksi apa yang diperlukan untuk bertahan hidup dan bagaimana tatanan dipertahankan guna memenuhi tujuan kemasyarakatan.

Lebih lanjut Mosco (1996: 15) menggambarkan salah satu karakteristik ekonomi politik adalah totalitas sosial, dimana ekonomi politik merupakan pendekatan yang mengeksplorasi hubungan di antara komoditas, institusi, relasi sosial, dan hegemoni, juga mengeksplorasi determinasi di antara unsur-unsur tersebut, meskipun beberapa unsur itu lebih ditekankan daripada yang lainnya.

Model Mosco (1996) serupa dengan formulasi yang dikembangkan oleh Murdock dan Golding (1991: 20). Fokus utama kajian ekonomi politik dalam model tersebut pada keseimbangan antara usaha kaum kapitalis dan intervensi publik serta melampaui isu-isu teknis tentang efisiensi untuk melibatkan persoalan-persoalan moral yang mendasar ikhwal keadilan, persamaan dan kebaikan umum (Golding dan Murdock, 1991, h. 20).

Model ini akan sangat menarik digunakan dalam memahami konflik yang terjadi di kawasan perkotaan. Menurut Tomagola (2011) terdapat tiga penyebab konflik yang berlangsung di perkotaan Indonesia, yaitu (1) hal-hal yang sudah berproses lama. Misalnya pembedaan pola tempat tinggal yang terpisah antarkelompok, (2) peran lembaga keagamaan yang lebih berurusan dengan politik daripada mengurus umatnya sendiri, dan (3) pola kepemimpinan lokal yang hancur akibat pola rekrutmen pemimpin yang bergantung ke atas.

Dalam konteks relasi kekuasaan, berbagai aksi kekerasan komunal yang melibatkan massa pendukung partai politik atau elit politik dicurigai sebagai tindakan rekayasa belaka. Rekayasa yang ditujukan untuk mengalihkan isu politik atau ekonomi agar tidak terjadi konflik vertikal dengan mengalihkannya menjadi konflik horizontal. Jika dikaitkan dengan aspek relasi sosial maka dapat digambarkan dalam model berikut ini:

Gambar 2. Relasi dan Pemicu Konflik Komunal di Indonesia

Sumber: Adaptasi dari Saputra, dkk, 2010: 22

Di kawasan perkotaan, konflik bisa dipicu dan diperkuat oleh kondisi struktural dan interaksi antar aktor sosial. Setidaknya ada empat faktor utama yang mendorong peningkatan konflik, yaitu (1) "akumulasi dengan penjarahan" yang dilakukan oleh kekuatan pasar dan kapital terhadap sumber daya ekonomi melalui pemaksaan, pengusuran, dan kekerasan; (2) lemahnya kapasitas institusional pemerintah dalam mencegah, mengelola dan mentransformasi konflik akibat kebijakan yang diskriminatif; (3) maraknya jaringan klientilisme, komunalisme, dan pengerahan identitas etnik dan agama yang non-demokratis dan berkecenderungan kekerasan; dan (4) lemahnya kapasitas institusional masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan sosial yang ditandari dengan minimnya *political engagement* dan penyemaian tradisi kewargaan dan mendorong aksi yang lebih demokratis untuk mencapai kebaikan bersama.

Penutup

Terdapat kecenderungan bahwa konflik yang merebak di Indonesia lebih pada konflik komunal dengan berbasis isu agama dan etnis. Pengalaman dimanapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Hal



tersebut karena konflik yang berbasis agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan, tidak rasional dengan ekspresi konflik yang muncul berupa konflik kekerasan.

Celakanya dua hal tersebut (agama dan etnis) bagi sebagian masyarakat Indonesia adalah *survival* unit atau identitas yang paling signifikan. Di negara yang multikultural seperti Indonesia tidak sulit untuk menyulut suatu konflik sosial. Dengan menyulut cara pandang mayoritas-minoritas, kaum mayoritas merasa berhak untuk melakukan kekerasan terhadap minoritas. Tentu dalam perspektif komunikasi, ada aspek ekonomi politik yang melandasi kemunculan konflik di kawasan perkotaan. Selain perebutan sumber daya kapasitas kelompok dalam meningkatkan komunikasi dan saling pengertian serta mengusahakan toleransi agar lebih bisa saling menerima keragaman juga sangat signifikan.

Bagaimanapun, kota merupakan arena kontestasi ekonomi, politik, pertahanan, dan juga kebudayaan. Bagi penduduknya kota harus menjadi tempat yang nyaman bagi penduduk. Dalam sebuah kota terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Kontak sosial dan saling menyesuaikan diri terjadi antara penduduk asli dan pendatang, antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Apabila salah satu elemen terganggu maka seluruh lingkungan akan terganggu juga, sehingga akan mencari keseimbangan baru. Dan tentu saja, konflik menjadi keniscayaan.§

Daftar Pustaka

- Fauzi, M. (2010). "Komunalisme dalam Sejarah Jakarta" Dalam ASASI Edisi Juli-Agustus 2010. Jakarta: Elsam. Halaman 8-9.
- Heffner, R.W. (2001). *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI.
- Madjid, Aldy. (2009). "JK: Adanya Konflik di Indonesia Karena Ketidakadilan Ekonomi Politik. Diakses dari <http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/717-jk-adanya-konflik-di-indonesia-karena-ketidakadilan-ekonomi-politik.html>
- Pamuji, Nanang M, Akiko Horiba, Mohamad Miqdad, Nerlian Gogali, Loury Sipasulta. (2008). *Final Report Success Story Mekanisme Komunitas dalam Penanganan dan Pencegahan Konflik: Studi Kasus di Desa Wayame (Ambon) dan Desa Tangkura (Poso)*. Jakarta: Institut Titian Perdamaian (ITP) - Friedrich Ebert Stiftung (FES)



- Purnomo, Agus Budi. dkk. (2010). Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara dan Warga. Jakarta: YAPPIKA.
- Saputra, Dany Yuda, Dian Yanuardi, dan Muntaza. (2010). Kekerasan Makin Meningkat: Analisis Varian, Pola, dan Struktur Konflik dan Kekerasan di Indonesia Tahun 2009-2010.
- Tamagola, Tamrin Amal. (2010). Demokrasi Merupakan Konflik yang Terkelola. Diakses dari <http://www.bawaslu.go.id/berita/37/tahun/2010/bulan/07/tanggal/12/id/1455/>
- Thamrin Amal Tomagola. (2011). Konflik Maluku Sulit Diselesaikan Karena Banyak Sisa Pola Lama.
- Tohari, Amien, Dany Yuda Saputra, Didi Novrian S, Dian Yanuardy, Lisa Taschler, Muntaza, Swanvri, dan Ria Soumahu. (2011). Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Tifa - Institut Titian Perdamaian
- Warta Titian Damai Februari 2009
- Yara, Idawati H.M. (2002). Konflik Komunal di Jakarta : Studi Kasus di Kawasan Matraman, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia



IDENTITAS YANG TERJEPIT

Krisis Komunikasi Sosial Jemaat Ahmadiyah Akibat Konflik Ideologis MUI-Ahmadiyah

*Bambang Sukma
Wijaya*

Perbedaan penafsiran mengenai ajaran keislaman merupakan pokok konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI sebagai organisasi resmi ulama di Indonesia. Hal ini setidaknya memberikan dampak yang cukup signifikan di lapisan bawah. Beberapa kelompok masyarakat memaksakan penghentian kegiatan ibadah maupun sosial Ahmadiyah. Bahkan di beberapa daerah, kelompok tersebut melakukan pengusiran dan merusak tempat tinggal dan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah. Melalui metode naratif-biografis, penulis berusaha menelaah implikasi konflik ideologis MUI-Ahmadiyah bagi pola komunikasi sosial seorang anggota jemaat Ahmadiyah. Penulis menemukan bahwa peristiwa kekerasan dari sekelompok masyarakat, cara penanganan aparat keamanan dan pemerintah terhadap peristiwa tersebut serta bingkai media massa dalam memberitakan peristiwa kekerasan terhadap kelompok jemaat Ahmadiyah membuat pola komunikasi sosial anggota jemaat penganut aliran Ahmadiyah menjadi lebih tertutup namun aktif-konsolidatif secara internal. Pola komunikasi sosial dipengaruhi oleh proses konsep-diri dan identifikasi sosial yang terbentuk dari pantulan persepsi lingkungan sosial terhadap fatwa sesat MUI.

Kata kunci: komunikasi sosial, konflik ideologis, konsep-diri, identitas sosial, ahmadiyah

Pendahuluan

Pada bulan Juli 2005, terjadi penyerbuan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Umat Islam terhadap Kampus Mubarak di Parung, Bogor. Kampus Mubarak adalah sebuah kompleks pusat pendidikan agama Islam sekaligus Kantor Pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pada saat itu sedang berlangsung *Jalsah Salanah* ke-46 tingkat nasional dari tanggal 8 – 10 Juli 2005. *Jalsah Salanah* adalah forum keagamaan berisi serangkaian ceramah dan shalat berjamaah.

Adalah M. Amin Djamaluddin, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang pertama mengendus perhelatan akbar itu. Ia adalah orang yang sejak lama menentang kehadiran Ahmadiyah di Indonesia. Bertahun-tahun Amin mengaku meneliti *Tadzki-rah* –buku kumpulan wahyu dan mimpi pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, yang diterbitkan setelah Ghulam Ahmad meninggal. Ketekunannya membuahkan buku yang amat provokatif berjudul Ahmadiyah dan Pembajakan Al-Quran (2002). Ia akhirnya menyimpulkan: Ahmadiyah aliran sesat. Sebelumnya, pada 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sesat bagi aliran yang mengklaim memiliki sedikitnya 500 ribu pengikut di Tanah Air ini (Mustafa, 2005: 144).

Mengetahui akan diselenggarakannya *Jalsah Salanah*, Amin mengencarkan aksi provokasinya dan meminta kepolisian untuk membubarkan acara tersebut. Pihak JAI juga bersikeras tidak ingin membubarkan diri karena telah mengantongi izin resmi dari pihak kepolisian setempat. Karena tidak menemukan kata sepakat, maka terjadilah insiden perusakan oleh massa beratribut FPI dan GUI. Tak cuma kampus, rumah-rumah di sekitar kampus milik jemaat juga menjadi sasaran perusakan dan tindakan berbau kriminal. Mengetahui aparat kepolisian membiarkan tindakan anarkis dari kelompok yang mengatasnamakan umat Islam ini, pihak JAI kemudian mengadukannya ke Komnas HAM dan menunjuk Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya.

Berbagai kecaman muncul atas peristiwa tersebut, tidak hanya datang dari individu, tetapi juga lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Alih-alih mendapatkan pembelaan



kemanusiaan dari MUI sebagai organisasi resmi ulama, MUI justru mengeluarkan fatwa baru untuk menegaskan fatwa tahun 1980 yang menetapkan ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan, serta Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam.

Ihwal perseteruannya dengan MUI, Ahmadiyah berpendapat bahwa fatwa MUI tersebut tidak berdasar. MUI bahkan tak pernah sekalipun menunjukkan bukti 9 buku yang diklaim sebagai dasar pemahaman tentang ajaran Ahmadiyah yang kemudian melahirkan keputusan fatwa sesat (Suryawan, 2005: 110).

Ahmadiyah adalah organisasi dan aliran keagamaan yang berasal dari Qadian, India. Aliran ini dicetuskan dan disebarluaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan karena itu dianggap sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah mendapat penentangan keras dikarenakan ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai kenabian. Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan fatwa sesat dan menetapkan Ahmadiyah Qadian bukan salah satu bagian atau aliran dalam agama Islam.

Dalam organisasinya, Ahmadiyah menggunakan sistem hirarki kekhalifahan seperti yang pernah dipraktikkan di zaman kejayaan kekhalifahan Islam pasca Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ketatan terhadap pemimpin adalah wajib. Kewajiban lain adalah membayar *candah* atau sumbangan sebesar 1/16, 1/10 hingga 1/3 bergantung pada kemampuan anggota jemaat. Di samping kewajiban tersebut, Ahmadiyah juga menetapkan aturan keharusan menikahi sesama jemaat, dan larangan bermakmum pada imam nonjemaat pada shalat berjamaah. Ahmadiyah juga dikenal sangat agresif menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah bahkan negara-negara yang mayoritas nonmuslim, seperti benua Afrika, Eropa dan Amerika dengan menawarkan paradigma baru tentang Islam yang anti-kekerasan, cinta kasih, dan penuh kesabaran. Program-program kemanusiaannya bernaung di bawah bendera *Humanity First*.

Kepatuhan terhadap ajaran agama Islam juga terlihat dari kewajiban shalat tahajud dan membaca Al-Quran secara rutin. Namun, beberapa pemahaman tentang ajaran keislaman menuai kontroversi, seperti tentang pemaknaan nabi terakhir, kematian Nabi Isa AS

atau Yesus, kedatangan Imam Mahdi, dan tentang Nabi Adam AS. Ahmadiyah menganggap kenabian tidak terputus pada Nabi Muhammad SAW, namun kenabian setelahnya tidak membawa syariat baru kecuali melanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu, tokoh sentral mereka yakni Mirza Ghulam Ahmad dipercaya sebagai nabi karena telah menerima wahyu dari Tuhan. Pemahaman tentang Nabi Isa AS yang dianggap telah meninggal secara wajar disertai bukti makamnya, sehingga takkan muncul lagi di akhir zaman.

Demikian pula dengan Imam Mahdi, bagi Ahmadiyah, yang dimaksud Nabi Isa AS dan Imam Mahdi yang dipercaya umat akan muncul di akhir zaman, tak lain adalah Mirza Ghulam Ahmad, nabi mereka. Itulah mengapa, penyebutan namanya selalu ditambahkan gelar AS dan dijuluki Hz. Masih Mau'ud AS. Kontroversi pemahaman ajaran keislaman inilah yang menjadi pokok konflik ideologis Ahmadiyah dengan MUI dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Namun demikian, yang jarang terungkap adalah bagaimana pengaruh konflik tersebut bagi anggota jemaat Ahmadiyah yang dari pemberitaan media tampak sering menjadi korban kekerasan maupun intimidasi sosial.

Karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh bagaimana pola komunikasi sosial anggota jemaat Ahmadiyah dalam skala mikro dengan mengamati kehidupan seorang anggota jemaat Ahmadiyah asal Bandung, namun berdomisili di Jakarta. Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan ini penulis tidak memfokuskan pengamatan dan pembahasan pada topik-topik dalam ajaran Islam yang menjadi pokok konflik ideologis Ahmadiyah-MUI, namun lebih kepada dampaknya bagi pola komunikasi sosial salah satu anggota jemaat Ahmadiyah.

Metode

Karena tulisan ini bertujuan menggambarkan pola komunikasi sosial anggota jemaat Ahmadiyah di Indonesia, maka penulis menggunakan metode naratif dan pengalaman pribadi. Sementara dalam mengumpulkan informasi, penulis menggunakan observasi partisipan. Penulis mengambil bagian dalam kehidupan informan



untuk mengamati secara langsung pola komunikasi sesama anggota komunitas maupun kepada masyarakat lain (nonkomunitas) tanpa informan sadari bahwa penulis sedang melakukan penelitian.

Penulis juga mendengarkan tuturan-tuturan pribadi informan berkaitan dengan keyakinan yang dianutnya, kemudian menganalisis makna-makna baik konten maupun konteks yang menyertainya. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita (Manning, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 616). Naratif bisa mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa, dan bisa berkaitan dengan peristiwa atau persona-persona nyata.

Denzin (1989 dalam Denzin, et al., 2009: 575) menguraikan serangkaian istilah narasi seperti proses penetapan alur cerita (*emplotment*), teks, alur cerita, perspektif, narasi personal dan impersonal, serta suara/opini pengarang. Sedangkan metode pengalaman pribadi adalah sebuah cara/ teknik yang mengizinkan seorang peneliti terjun ke lapangan dan berpartisipasi dengan dunia sosial (Clandinin, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 588). Dengan demikian, maka metode pengalaman pribadi adalah metode hubungan, dalam hal ini mencerminkan di antaranya pola hubungan antara peneliti dan partisipan atau informan.

Pengalaman yang hendak dikaji bergantung dari tujuan dan kepentingan seorang pengamat. Mengacu pada Teori Pengalaman John Dewey, pengalaman masing-masing individu secara otomatis mewakili kondisi-kondisi internal dan eksistensial, sehingga pada semua tingkat pengalaman selalu terkandung dimensi internal dan eksistensial yang dapat dikaji.

Ringkasnya, metode-metode yang digunakan dalam kajian pengalaman terfokus pada empat arah secara bersamaan: “batin & lahir” (*inward & outward*) dan “mundur & maju” (*backward & forward*). Istilah “batin” (*inward*) mengandung arti kondisi internal berupa perasaan, harapan, reaksi estetis, sikap moral, dan sebagainya, sedangkan “lahir” (*outward*) berarti kondisi-kondisi eksistensial manusia; lingkungan yang oleh E.M Brunner (1986) disebut sebagai “realitas” (Clandinin, et al. dalam Denzin, et al., 2009: 576). Istilah *backward* dan *forward* sendiri mengacu pada temporalitas masa lalu,

masa kini dan masa depan seseorang.

Sementara itu, anonimitas (tanpa nama) menjadi prinsip etis yang sangat penting, khususnya bagi kajian pengalaman pribadi. Hal ini karena metode pengalaman pribadi melibatkan manusia yang “sesungguhnya”, bukan sekadar teks tertulis, yang oleh karenanya kita benar-benar harus memerhatikan “akibat/dampak” penelitian terhadap partisipan (Lightfoot, 1983 dalam Denzin, et al., 2009: 584). Karena itu, dalam penulisan ini penulis sengaja menyamarkan identitas informan.

Pembahasan

Komunikasi Sosial dan Teori Komunikasi Relasional

“We can not not communicate” (Watzlawick, Beavin, Jackson).

Dapatkah kita tidak berkomunikasi? Adalah sebuah kekeliruan besar ketika kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa berkomunikasi. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Kepada siapapun, apapun, kapanpun, bagaimanapun. Komunikasi menjadi semakin penting ketika kita dihadapkan pada sekeliling kita. Komunikasi, dalam konteks apapun, adalah bentuk dasar adaptasi lingkungan.

Menurut Rene Spitz, komunikasi (ujaran) adalah jembatan antara bagian luar dan bagian dalam kepribadian. Itulah mengapa kita selalu membutuhkan orang lain, bukan saja karena kita tidak dapat lepas dari lingkungan, tetapi kehadiran orang lain akan memperteguh fitrah kekomunikasian kita. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita, dengan memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Komunikasi sosial menandakan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan-diri, untuk merasa terhibur, nyaman dan tenteram dengan diri-sendiri dan juga orang lain.

Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar mengatakan bahwa fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep-diri kita, aktualisasi-diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain



Konsep-diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. George Herbert Mead mengatakan setiap manusia mengembangkan konsep-dirinya melalui interaksi dengan orang lain dalam masyarakat –dan itu dilakukan lewat komunikasi. Morris Rosenberg (dalam Charon, 2007: 82) mendeskripsikan konsep diri sebagai “totalitas dari pikiran dan perasaan seseorang dengan acuan kepada dirinya sebagai objek” dengan kata lain bahwa konsep diri adalah apa yang kita lihat pada saat kita melihat kembali ke diri kita sendiri seperti “gambar” diri kita.

Sejumlah jemaat penganut Ahmadiyah yang dikucilkan bahkan diusir oleh masyarakat sekitar karena ajarannya dianggap sesat, kemungkinan besar akan merefleksikan dirinya sebagai kelompok masyarakat yang tak dapat diterima secara sosial dan budaya. Hal ini membuat mereka cenderung menyembunyikan identitas keahmadiyahannya ketika sedang berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain. Namun, nilai-nilai dan norma yang kuat baik yang melekat pada ajarannya maupun pada aturan organisasinya, akan menjadikan para anggota jemaat justru mengidentifikasikannya sebagai sebuah kekuatan dari dalam yang tak rentan terhadap gesekan-gesekan dari luar. Kepatuhan terhadap khalifah, keteguhan terhadap keyakinan, dan kelenturan terhadap kemanusiaan adalah identitas yang melekat pada kelompok ini. Dan apa yang melekat pada kelompok akan melekat pula pada diri individu setiap anggota jemaat yang merupakan anggota kelompok. Itulah mengapa, dengan mudah kita bisa memperkirakan nilai-nilai yang dianut orang-orang berdasarkan kelompok yang mereka masuki.

Psikolog John C. Turner dan Henri Tajfel mengembangkan sebuah model identifikasi sosial (*social identification model*) pengaruh kelompok. Model ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai dua individu atau lebih yang berbagi identifikasi sosial yang sama atau memandang diri mereka sendiri sebagai anggota kategori sosial yang sama (Severin, 2007).

Keanggotaan kelompok terutama dilihat sebagai proses kognitif, seringkali terjadi sebagai upaya-upaya untuk menjawab pertanyaan, “Siapakah saya?” dan bukan respons emosional dari pertan-

yaan misalnya, “Apakah saya menyukai orang-orang ini?”. Selain itu, model identifikasi sosial menyatakan bahwa proses identifikasi ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Individu-individu memanfaatkan keanggotaannya secara serius karena keanggotaan itu berhubungan dengan konsep mereka tentang siapa mereka sebenarnya. Tak heran, ketaatan yang ditunjukkan anggota jemaat Ahmadiyah merupakan konsekuensi logis dari keanggotaan mereka.

Identitas ketaatan ini kerap pula mendapatkan sorotan serius, terutama terhadap aturan-aturan tertentu, seperti larangan bermakmum pada imam selain anggota jemaat, atau larangan menikah dengan orang selain anggota jemaat. Mengenai hal ini, Mirza Gulam Ahmad, tokoh sentral yang dianggap Nabi, mengatakan, “... orang-orang itu menyebut saya kafir, tentu kekufuran itu berbalik kea rah mereka. Orang yang menyebut seorang muslim sebagai kafir, berarti orang yang berkata itu sendiri kafir. Oleh karena itu shalat di belakang mereka tidak dibenarkan” (Suryawan, 2005: 117).

Beberapa ideologi atau ajaran yang berbeda dari mayoritas penganut Agama Islam dan menjadi dasar alasan MUI memfatwa mereka sesat dan menyesatkan memang semakin memperlebar jurang konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI yang mewakili umat Islam mayoritas. Dampak dari konflik ini adalah ketidakharmonisan hubungan Ahmadiyah dan MUI yang kemudian berspektrum lebih luas ke pengikut masing-masing.

Gregory Bateson melalui Teori Interaksi Relasional menyebutkan bahwa komunikasi sebagai interaksi menciptakan struktur suatu hubungan (Littlejohn, et al., 2008: 198). Komunikasi berfungsi mengukuhkan, mempertahankan, atau mengubah hubungan-hubungan. Bateson mengemukakan dua proposisi yang mendasari teorinya. Yang pertama adalah pesan mendua. Setiap komunikasi yang bersifat relasional membawa dua pesan, yakni pesan “*report*” dan pesan “*command*”. Pesan “*report*” menyangkut substansi atau isi komunikasi, sedangkan pesan “*command*” menyangkut pernyataan mengenai hubungan. Fatwa sesat dan menyesatkan yang dikeluarkan MUI merupakan pesan “*report*” kepada Ahmadiyah, sedangkan pernyataan untuk tidak terpengaruh atau mengikuti ajaran kelompok ini merupakan sebuah pesan “*command*”.



Proposisi kedua Bateson adalah hubungan-hubungan yang dicirikan secara komplementaris atau simetris. Dalam hubungan komplementer, satu bentuk perilaku diikuti bentuk anonimnya. Misalnya perilaku dominan dijawab dengan kepatuhan. Sedangkan dalam hubungan simetri, perilaku seseorang diikuti perilaku sama. Dominan dengan dominan, patuh dengan patuh, marah dengan marah, dan lain-lain. Sikap penentangan Ahmadiyah terhadap fatwa sesat MUI menunjukkan perilaku simetris kelompok tersebut.

Yang menarik dipahami adalah bagaimana Ahmadiyah menyikapi tindakan-tindakan anarkis kelompok tertentu yang sangat dominan. Ternyata Ahmadiyah tidak bertindak simetris. Para jemaat lebih banyak bersikap sabar, bertahan, sambil membawa kasus-kasus untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini adalah cerminan dari ajaran anti-kekerasan dan cinta-kesabaran sejak pemimpin dan nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad meredefinisikan makna jihad sebagai salah satu syariat Islam dari “perang dengan pedang” menjadi “perang dengan pena” (Suryawan, 2007: 65).

Komunikasi Sosial Anggota Jemaat Ahmadiyah

Reno (bukan nama sebenarnya) adalah seorang anggota jemaat penganut aliran Islam Ahmadiyah. Pegawai di salah satu instansi pemerintah ini sekilas tampak seperti penganut Islam lainnya: aktif melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan puasa-puasa sunat, aktif shalat tahajud, bersedekah dan membaca Al-Quran (mengaji). Namun, tak seorang pun dari lingkungan pergaulan dan pekerjaannya (setidaknya menurut pengakuannya) yang mengetahui bahwa dia seorang anggota jemaat Ahmadiyah, sebuah komunitas aliran Islam yang telah difatwa sesat oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

*“Gue certain semua ini biarpun gue tau risikonya pasti sangat berbahaya.”
(percakapan pribadi informan, 2005 di Jakarta).*

Penulis mencoba memaknai kata ‘berbahaya’ dalam kalimat informan sebagai sesuatu yang mengancam jiwanya, sehingga mendorongnya untuk tidak terbuka kepada siapapun. Reno mengakui bahwa bukan hal yang mudah menjadi anggota jemaat penganut

Ahmadiyah, di tengah pengetahuan masyarakat bahwa keberadaan kelompok atau komunitas tersebut tidak diakui, dan paham atau ajarannya telah difatwa sesat oleh MUI.

“Bayangin aja gimana rasanya kalau lo dibilang sesat. Lo pasti merasa seperti tertuduh dan pantas dijauhi. Ya jelas dong lo ngga mau dikucilin dan dijauhin. Lo pasti tetap pengen gaul dan bebas.” (tuturan informan, 2005 di Jakarta)

Media juga turut memberi peran dalam pembentukan persepsi sosial melalui pemberitaannya yang kurang memberikan bingkai dari sudut pandang jemaat Ahmadiyah. Astuti (2011: 206) dalam risetnya mengenai bingkai berita mengenai Ahmadiyah di media *online* Pikiran Rakyat, Bandung misalnya, hanya menemukan dua berita yang memunculkan suara Ahmadiyah dari 18 berita tahun 2011. Hal ini membuat masyarakat kurang mendapatkan gambaran mengenai dampak dari berbagai tindakan kekerasan yang muncul akibat konflik ideologis MUI-Ahmadiyah bagi jemaat Ahmadiyah, baik dampak sosial maupun psikologis. Hasil riset Astuti mengungkapkan bahwa dalam hal seleksi isu, media (Pikiran Rakyat) berusaha menyempitkan permasalahan Ahmadiyah sebagai persoalan yang mengancam kerukunan umat beragama sehingga dalam pemberitaannya lebih terfokus pada upaya mencegah pertikaian dengan ‘melarang Ahmadiyah’ atau mengeluarkan regulasi yang melarang aktivitas Ahmadiyah (Astuti, 2011: 207).

Fenomena pemberitaan seperti ini disebut Usman Kansong, aktivis SeJuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) sebagai SARA-fobia warisan Orde Baru yang merupakan salah satu ciri konservatisme media yang cenderung enggan mengangkat keberagaman sebagaimana seharusnya. Ada semacam ketakutan untuk memuat berita tentang isu keberagaman di media (Purnama, 2011: 224). Dengan kecenderungan dan fenomena pemberitaan media tersebut, tak heran, seperti yang diungkapkan Reno bahwa walaupun keluarga dan teman-teman sekominuitas merasa sedih, marah dan kecewa melihat pemberitaan-pemberitaan media mengenai tindakan kekerasan terhadap sebagian anggota komunitas mereka, namun mereka memilih diam disebabkan tidak ingin memancing perha-



tian kelompok-kelompok ekstrim beratribut Islam yang bukan tidak mungkin akan menjadikan mereka korban berikutnya.

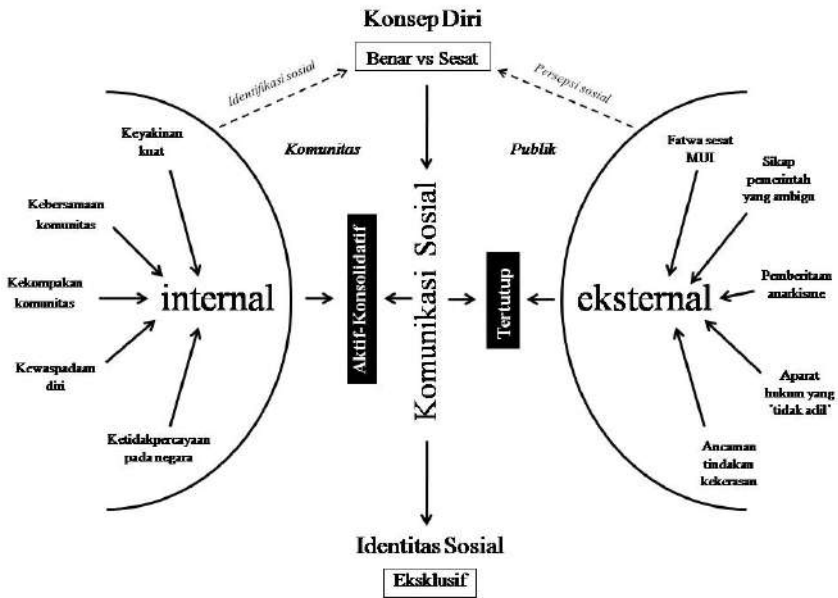
“Lihat aja orang-orang itu membawa-bawa nama Islam tapi sikapnya tidak islami. Mana ada ajaran Islam yang menganjurkan perusakan di muka bumi. Tapi heran kenapa polisi diam saja ya. Padahal itu kan jelas-jelas melanggar hukum.” (tuturan informan, 2005 di Jakarta).

Penanganan aparat yang tidak tegas juga membuat anggota komunitas menjadi semakin ragu untuk mengungkapkan identitas keahmadiyahannya secara terbuka pada lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dikuatirkan, anggota kelompok radikal tersebut bergelut mencari anasir-anasir komunitas Ahmadiyah dan bertindak anarkis. Sikap ketidaktegasan juga diperlihatkan oleh pemerintah, yang meskipun telah mengeluarkan SKB tiga menteri, namun masih bersifat ambigu, antara setuju dan tidak setuju dengan pembubaran Ahmadiyah dengan berbagai pertimbangan, termasuk penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan berserikat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut membuat status sosial Ahmadiyah seakan tersandera oleh berbagai kepentingan dan pertimbangan. Entah disadari atau tak disadari oleh pemerintah, keadaan ini ikut menyumbang pemeliharaan dan penguatan persepsi akan status sosial ‘kesesatan’ Ahmadiyah di mata publik atau masyarakat umum, yang kemudian ikut membentuk konsep-diri anggota jemaat Ahmadiyah seperti Reno.

Di sisi lain, dari hasil pengamatan penulis dalam komunitas Ahmadiyah, kohesivitas kelompok juga turut menguat. Perasaan teraniaya sebagai korban kekerasan, baik kekerasan ideologi maupun fisik, selain menegaskan keyakinan akan nilai-nilai yang mereka anut, juga semakin mempererat kekerabatan, kebersamaan dan kekompakan sesama anggota komunitas.

Sebuah milis anggota komunitas Ahmadiyah Indonesia, ahmadi_indonesia cukup ramai menampilkan pertukaran informasi, pesan-pesan bersifat dukungan, peringatan, diskusi dan berbagai ekspresi dan pendapat mengenai peristiwa terkait Ahmadiyah menandakan aktifnya komunikasi internal antarsesama anggota kelompok atau komunitas. Sementara komunikasi sosial yang bersifat *offline*, dilakukan di masjid-masjid secara terbatas, terutama waktu

Gambar 1.
Pembentukan Pola Komunikasi dan Identitas Sosial
Anggota Jemaat Ahmadiyah



shalat Jumat. Interaksi yang intens antar anggota kelompok sosial ini, sebagaimana dijelaskan dalam Model Identifikasi Sosial Turner dan Tajfel, memiliki peran penting dalam membentuk konsep diri anggota. Konsep diri inilah yang mewarnai pola komunikasi sosial sesama anggota jemaat Ahmadiyah, yang pada akhirnya membentuk identitas sosial individu maupun kelompoknya.

Jika diilustrasikan, proses komunikasi sosial dan pembentukan identitas sosial anggota jemaat Ahmadiyah dapat dilihat pada gambar 1. Dari gambar, dapat dijelaskan bahwa berbagai faktor eksternal yang langsung maupun tak langsung ditimbulkan oleh sikap maupun respons atas fatwa sesat MUI, memengaruhi pembentukan persepsi sosial masyarakat terhadap Ahmadiyah, yang kemudian membentuk konsep diri anggota jemaatnya. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Persepsi sosial dapat dikategorikan sebagai bagian dari informasi eksistensial. Konsep diri yang ditimbulkan oleh persepsi sosial ter-



hadap Ahmadiyah yang dianggap sesat, kemudian mewarnai komunikasi sosial anggota jemaat Ahmadiyah dengan ‘dunia luar’ atau masyarakat luas non-Ahmadiyah.

Secara simultan, proses identifikasi sosial yang ditimbulkan oleh interaksi dan persepsi internal sesama anggota kelompok ikut pula membentuk konsep-diri anggota jemaat yang berlawanan dengan persepsi sosial masyarakat luas atau non-Ahmadiyah. Konsep-diri yang meneguhkan kebenaran keyakinan yang mereka anut ini kemudian mewarnai pola komunikasi sosial secara internal yang cenderung aktif-konsolidatif hingga membentuk kohesivitas kelompok. Dua warna komunikasi sosial (aktif-konsolidatif secara internal dan tertutup secara eksternal) yang berjalan simultan ini akhirnya membentuk identitas sosial kelompok maupun anggota kelompok yang bersifat eksklusif.

Simpulan

Perbedaan penafsiran mengenai suatu ajaran keislaman merupakan pokok konflik ideologis antara Ahmadiyah dan MUI sebagai organisasi resmi ulama Indonesia. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan di lapisan bawah. Beberapa kelompok masyarakat memaksakan penghentian kegiatan-kegiatan ibadah maupun sosial Ahmadiyah. Bahkan di beberapa daerah, kelompok tersebut melakukan pengusiran dan perusakan tempat tinggal dan tempat ibadah jemaat Ahmadiyah.

Peristiwa-peristiwa tersebut langsung atau tidak langsung memberikan implikasi terhadap pola komunikasi sosial anggota jemaat penganuh aliran Ahmadiyah. Pola komunikasi sosial dipengaruhi oleh proses konsep-diri yang dibentuk oleh identifikasi sosial dan pantulan persepsi lingkungan sosial terhadap fatwa sesat MUI. Sehingga, anggota jemaat Ahmadiyah berusaha menyembunyikan identitas keahmadiyahannya ketika berinteraksi dengan kelompok sosial lain, namun di sisi lain, mereka giat melakukan konsolidasi nilai sebagai bentuk kepatuhan dan keyakinannya yang kuat terhadap ajaran maupun organisasinya. Pola komunikasi sosial semacam ini akhirnya membentuk identitas sosial Ahmadiyah sebagai komunitas eksklusif.



Dari perspektif kemanusiaan, sudah sepatutnya jika kita memberikan perhatian khusus terhadap berbagai dampak konflik di tingkat ‘elit’ (konflik ideologis, konflik kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya) terhadap interaksi dan komunikasi sosial di tingkat ‘akar rumput’ yang kerap kali abai dipedulikan oleh pihak penguasa, dalam hal ini pemerintah maupun media sebagai ‘penguasa informasi’. Karena itu, tulisan ini diharapkan mampu memberi inspirasi bagi para ‘elit’ maupun penguasa untuk lebih cermat dan bijak mengelola konflik, mengomunikasikan ide dan kepentingan, sehingga dampak yang tak diinginkan di tingkat ‘akar rumput’ dapat diminimalisir dan obsesi bangsa sesuai sila kedua, ketiga dan kelima Pancasila dapat terwujud, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Referensi

- Astuti, Santi Indra. (2011). Love-Hate Relationship: Wacana Ahmadiyah dalam Bingkai Pers Online Lokal. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 1 No. 2 Desember 2011, hal. 199-219
- Charon, Joel M. (2009). *Symbolic Interactionism: An Introduction, an Interpretation, an Integration*. England: Prentice Hall.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Penerj. Dariyatno, Badrus Samsul fata, Abi, John Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kompas, 26 Juli 2005, 29 Juli 2005
- Koran Tempo, 16 Juli 2005, 26 Juli 2005, 28 Juli 2005, 29 Juli 2005
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2008). *Theories of Human Communication*. Boston, USA: Wadsworth
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustafa, Aris, Ngarto Februana, Feby Indirani & Sri Wahyuni. (2005). *Ahmadiyah: Keyakinan yang Digugat*. Jakarta: Pusat Data dan Analisa TEMPO
- Purnama, Finsensus Yuli. (2011). Peran Media Baru dalam Melaporkan Kekerasan Agama di Indonesia: Bercermin dari Kasus Ahmadiyah. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 1 No. 2 Desember 2011, hal. 220-233
- Severin, Werner J. dan James W. Tankard, Jr. (2007). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa*. Penerj. Sugeng Hariyanto. Jakarta: Kencana
- Suryawan, M. A. (2005). *Bukan Sekadar Hitam Putih*. Bogor: Arista



POLITIK KOMUNIKASI DAN IDENTITAS NASIONAL Menelisik Akar Konflik dalam Kebijakan Komunikasi di Indonesia

MT Hidayat

Pembentukan komunitas terbayangkan bernama Indonesia tidak lepas dari konstruksi politik komunikasi (kebijakan komunikasi) pemerintah. Fakta sejarah menunjukkan dinamika pendekatan kebijakan komunikasi di Indonesia, mulai pendekatan penerangan, diseminasi informasi, hingga komunikasi publik yang diarahkan untuk membentuk dan memperkuat identitas nasional. Permasalahannya, usaha menyatukan identitas melalui kebijakan komunikasi menyisakan beragam persoalan. Corak “keseragaman” dan “penyeragaman” ternyata memicu kemunculan seremonialitas karena tidak sesuai dengan kultur lokal.

Dalam perspektif *cultural studies*, kebijakan merupakan salah satu politik identitas yang mendefinisikan posisi dan identitas warga negara. Kebijakan komunikasi (politik komunikasi) sedikit banyak akan membentuk dan mengarahkan adopsi persepsi, pengetahuan, sikap atau perilaku tertentu warga negara. Tulisan ini akan mencoba mencermati serta menelisik aspek-aspek dalam kerangka kebijakan komunikasi yang menjadi pemicu konflik baik dalam ranah kelembagaan dan komunitas di tengah negara bangsa yang multietnis.

Kata kunci: konflik, identitas, kebijakan komunikasi

Pendahuluan

Potensi konflik secara intrinsik ada dalam setiap bangsa, tak terkecuali bagi bangsa Indonesia yang dikenal *bhinneka* tapi *ika*. Keberagaman suku, pandangan hidup, budaya dan agama memunculkan persoalan bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Sementara di dalam relasi antar anak bangsa pun selalu menimbulkan persoalan.

Belum lagi adanya kecenderungan kebijakan pemerintah Indonesia yang diarahkan untuk “penyatuan identitas” melalui proyek nasionalisme. Proyek itu pun juga muncul melalui kebijakan komunikasi. Namun fakta menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dan pusat kekuasaan dalam proyek nasionalisme hanya membuat integrasi nasional yang bersifat vertikal atau bahkan formalistik.

Bagaimana pun, nasionalisme sebagai bangunan identitas sangat ditentukan oleh sistem yang mendahului atau melingkupinya. Hal yang menarik, nasionalisme bisa ditanamkan melalui bahasa, kepercayaan pada pusat kekuasaan dan kesementaraan (Anderson, 2002). Padahal, setiap kebijakan, termasuk kebijakan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari beragam kepentingan individu, kelompok, maupun politik. Tak jarang hal itu memicu timbulnya konflik antar sesama suku bangsa.

Potensi konflik akibat kebijakan komunikasi bisa terjadi lantaran pembentukan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa sebenarnya belumlah tuntas. Dominasi pemahaman kebhinnekaan sangat kentara ditujukan untuk membangun solidaritas pada perumusan kebijakan tingkat nasional hingga ke level yang lebih kecil diarahkan untuk menyatukan semua keragaman bangsa pada batas kesamaan. Artinya, di satu sisi ada keinginan untuk menjallin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara kuat, namun di sisi lain, berbagai kebijakan yang berpotensi ke arah penyeragaman pada gilirannya justru menghancurkan budaya lokal yang asli (*local cultural genius*) (Esfendy, 2009).

Salah satu contoh yang bisa dicermati adalah proyek kebijakan komunikasi untuk pembangunan karakter bangsa. Ketika proyek itu berlangsung di tengah sistem komunikasi dan informasi di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi kepentingan publik, akan



memunculkan persoalan yang menarik dikaji: apakah politik komunikasi di tengah potensi konflik yang ada menjadi solusi bagi potensi konflik ataukah menjadi bagian dari konflik itu sendiri?

Politik Identitas Keindonesiaan

Benedict Anderson (2002) memahami nasionalisme sebagai bagian dari komunitas khayalan (*imagined community*) yang disatukan oleh persaudaraan mendalam. Entitas utuh yang bernama bangsa diciptakan setiap anggotanya melalui sebuah identitas bersama, identitas nasional yang terbentuk karena perasaan sebangsa serta pengalaman, penderitaan dan sejarah yang sama.

Konsep identitas dipahami sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu. Identitas nasional sebagai identitas kolektif merujuk pada pemaknaan kebersamaan yang dibangun melalui interaksi antar anak bangsa untuk kepentingan tertentu (Johnston, Larana, dan Gusfield, 1994: 12-24). Dalam interaksi yang terjadi, terbentuk struktur dimana masing-masing pelaku saling memengaruhi dan pada waktu yang sama membentuk posisi dan peran bergantung pada corak interaksi yang dibentuk.

Terminologi politik identitas dikemukakan Stuart Hall sebagai bentuk resistensi terhadap pembakuan identitas, mengikuti alur berpikir Hall terminologi politik(isasi) identitas digunakan dalam menjelaskan gejala pembakuan identitas oleh dan untuk kepentingan kekuasaan (Pilliang, 2009).

Lebih lanjut (Barker, 2004) menyatakan pembentukan identitas atau politik identitas berlangsung dalam tiga wilayah publik, yaitu (1) pemerintahan atau negara, dengan menjadikan identitas suatu kelompok sebagai identitas nasional suatu bangsa yang dijalankan melalui kuasa negara yang lebih menonjolkan etnis tertentu, (2) wilayah agama, kelompok yang disatukan oleh kepercayaan, (3) wilayah hukum yang merupakan paduan antara wilayah negara dan agama melalui pembagian kekuasaan dan identitas kelompok diterima secara partikular.

Di Indonesia, politik identitas tampak kental dalam sosialisasi karakter bangsa kepada warga negara. Di dalamnya berlangsung proses penyampaian pesan-pesan berupa nilai-nilai *nation and charac-*

ter building (NCB) yang dilakukan oleh agen sosialisasi melalui satu atau lebih media kepada sejumlah khalayak dengan harapan diterimanya nilai-nilai NCB sebagai dampak dari sosialisasi.

Proyek ini mulai dikembangkan sejak negara Indonesia terbentuk. Ketika itu, Soekarno mencanangkan Program NCB untuk memperkuat jari diri bangsa Indonesia (Soekirman, dkk, 1984). Melalui konsep NCB atau pembangunan karakter bangsa, identitas keIndonesiaan dirancang dan dikomunikasikan sebagai upaya mengembangkan moralitas bangsa untuk hidup sesuai dengan tuntutan hukum, peraturan, dan adat kebiasaan yang baik, sebagai bangsa yang beradab¹.

Proyek itu tidak berlanjut ketika orde baru, namun tergantikan dalam model indoktrinasi Pancasila dengan pengamalan nilai-nilai yang diambil dari kemajemukan suku bangsa di Indonesia. Pascareformasi, proyek pembentukan karakter bangsa dijalankan dalam program yang parsial dan tidak dikelola secara nasional.

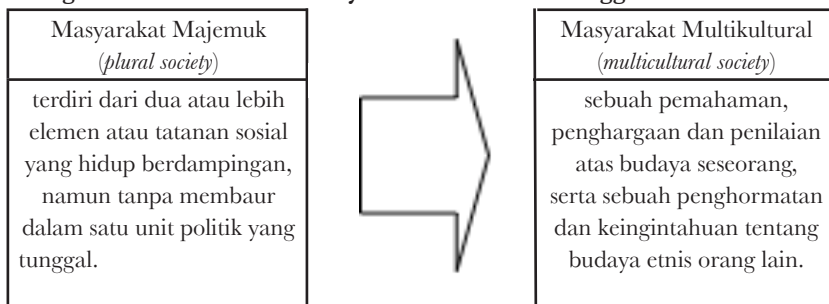
Proyek pembangunan karakter bangsa uniknya berlangsung di tengah masyarakat yang sangat beragam tradisi sosio-kultural lokal. Realitas menunjukka bahwa tradisi lokal itu merupakan kekayaan yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri tetapi bagi masyarakat-masyarakat lain. Tradisi lokal ini juga merupakan *defense mechanism* dan sekaligus *early warning system* yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan.

Effendy (2009) menilai politik penyeragaman tergambar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang selama ini bercorak “monokul-turalisme”, serba penyeragaman demi stabilitas dan integrasi bangsa. Pemaksaan ini menjadi bagian dari pemicu munculnya berbagai konflik sosial di beberapa daerah yang sekaligus telah menegasikan semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang disinyalir akibat masyarakat tercerabut dari nilai-nilai lokal mereka yang asli.

1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter mempunyai pengertian sifat-sifat kejiwaan; tabiat; watak; perangai; akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Berkarakter artinya berkepribadian; berkonsep atau berwatak. Demikian pula dengan konsep pekerti mempunyai pengertian yang sama dengan karakter, yaitu tabiat; watak; atau sifat-sifat kejiwaan.



Bagan 1. Transformasi Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika Indonesia



Sumber: Effendy, 2009

Dalam kehidupan politik, pertanda jelas dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu adalah tidak adanya kehendak bersama (*common will*). Atau dalam bahasa Clifford Gertz; masih terikat dalam ikatan yang bersifat primordial. Walhasil peristiwa konflik ideologis dan politis seolah menjadi hal yang tak terelakkan lagi. Pada gilirannya membawa perubahan pada sistem sosial budaya, bahkan sampai pada tataran sistem nilai (Nasikun, 1995).

Penyeragaman memunculkan persoalan, karena bangsa Indonesia bukan hanya berdasar kesamaan asal, bahasa, dan agama. Bagi Hatta (1992), bangsa Indonesia lebih dibentuk akibat persamaan nasib dan tujuan. Dan tentu pada setiap masa nasib dan tujuan akan bergeser sesuai dengan persepsi dan kebutuhan sesuai nilai masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia .

Apalagi saat ni pengakuan atas sumber daya/wilayah/identitas lokal menjadi lingkup kontestasi politik yang signifikan di Indonesia. Keterbukaan politik membuat banyak pihak menuntut hak-hak mereka, baik yang berkaitan dengan sumber daya, wilayah, atau identitas. Pada banyak wilayah di Indonesia konflik kekerasan tercipta karena kompetisi atas hal-hal ini. Sementara kebijakan komuniaksi yang dikembangkan atau politik komunikasi belum bisa menjadi mekanisme yang transparan dan merakyat guna menyelesaikan perselisihan yang seimbang dan proporsional.

Realitas menunjukkan di tengah pluralitas budaya bangsa, konflik merupakan hal yang sulit dihindari akibat perbedaan nilai masing-masing kelompok budaya tersebut. Benturan itu akan mencapai klimaksnya ketika dibumbui oleh isu-isu agama atau kesukuan.

Politik Komunikasi di Indonesia

Fakta sejarah menunjukkan dinamika pendekatan kebijakan komunikasi di Indonesia, mulai pendekatan penerangan, diseminasi informasi, hingga komunikasi publik. Hal yang menarik, beragam pendekatan kebijakan tersebut diarahkan untuk membentuk dan memperkuat identitas nasional.

Presiden RI pertama Bung Karno sebagai Bapak Bangsa pernah mencanangkan program NCB atau pembangunan watak bangsa untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Konten NCB juga disebarluaskan oleh Departemen Penerangan sebagai alat dan corong pemerintah. Aktivitas penerangan dilakukan dengan alat dan cara praktis pragmatis. Keterbatasan fasilitas, biaya serta belum lengkapnya organisasi penerangan di daerah membuat penerangan lebih bersifat di dan dari bawah, karena penerangan berasal dari rakyat (pejuang) dan untuk rakyat, maka metode tatap muka diterapkan oleh para juru penerang.

Ketika Orde Baru tugas pokok organisasi penerangan² salah satunya adalah membimbing pendapat umum ke arah terwujudnya *social support*, *social control*, dan *social participation* yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Di tingkat lokal, dibentuk jawatan penerangan provinsi dan kantor penerangan kabupaten serta juru penerang di tingkat kecamatan (Deppen, 1990).

Bahkan, kebijakan langit terbuka (*Open Sky Policy*) dan mulai diadopsinya sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) mulai pertengahan 1975, dimaksudkan untuk memperkuat persatuan bangsa. Akan tetapi kemudian kebijakan tersebut juga berdampak terhadap pembangunan watak bangsa, terutama akibat membanjirnya program siaran televisi produk budaya asing khususnya dari negara-negara barat.

Pada masa reformasi, khususnya pemerintahan Presiden BJ Habibie, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Hal yang menarik, Pasca pemberlakuan Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi reposisi

2 Diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 34/SK/M/1966 tanggal 14 Mei 1966 tentang Tugas-tugas Pokok Departemen Penerangan.



terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Di era itu, terjadi bibit pemahaman pluralitas karena masing-masing daerah mulai mengakomodasi kepentingan masing-masing sejalan dengan otonomi daerah.

Selanjutnya, Departemen Penerangan dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sesuai dengan Kepres 153 tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi; kabupaten dan kota bervariasi namanya, namun semua tingkat tingkat ada. Keberadaan juru penerang di tingkat kecamatan hampir seluruhnya dihapuskan. Kondisi itu membuat proyek penyeragaman melalui kampanye NCB dengan kendali nasional terasa hilang. Apalagi basis NCB atau identitas nasional Pancasila mulai ditinggalkan dalam perbincangan di ruang publik lantaran dianggap sebagai "warisan orde baru" yang hegemonik.

Pada masa ini, dan berlanjut hingga masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sosialisasi NCB hanya sebatas dalam bentuk kegiatan temporal dan seremonial, misalnya melalui pelaksanaan forum pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dan beberapa elit tertentu, misalnya perwakilan dari kelompok agama, profesi dan pemuda atau perempuan. Selain itu dapat ditemukan dalam peringatan hari besar nasional yang sifatnya lebih seremonial.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai kembali proyek nasionalisme dengan menggalakan pendidikan karakter bangsa. Mulanya dikembangkan melalui pendidikan formal, namun ketika Departemen Komunikasi dan Informatika dibentuk, dimulailah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi guna kepentingan seluruh warga negara (Kominfo, 2009). Namun corak seremonial dan penyeragaman masih sangat tampak. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan 'penerangan'. Meski demikian dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional belum dilakukan dengan baik (Dahlan, 1999).



Penyeragaman: Akar Konflik Politik Kebijakan

Pola keberagaman di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari unsur politik dan kebudayaan. Kedua hal itu memberikan pengaruh penting bagi pola keberagaman. Di satu sisi, keterlibatan agama dalam politik tidak bisa diabaikan, yang ditandai dengan menguatnya identitas keagamaan dalam ranah politik kontemporer. Namun di sisi lain, keterlibatan kebudayaan sebagai bagian tak terpisahkan dalam pola keberagaman tidak bisa diabaikan begitu saja (Lan, dkk. 2010).

Hal yang menarik, dalam kebijakan komunikasi, negara yang mempunyai kemauan dan kepentingannya sendiri dengan melakukan intervensi dalam kehidupan warga negara. Ini dilakukan oleh elite politik dengan mengatasmakan negara. Partisipasi politik lebih diarahkan untuk mobilisasi politik dari kelompok-kelompok warga negara secara terbatas. Dengan kata lain, dominasi pemerintah sangat kental dalam penentuan kebijakan (Budiman, 1995).

Dominasi pemerintah dalam pembuatan kebijakan komunikasi bisa berlangsung dalam tahap indentifikasi hingga pembuatan kebijakan. Hal itu dimungkinkan karena pemerintah memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas untuk membuat kebijakan. Namun demikian, Chakravartty dan Sarikakis (2006: 7) menyatakan bahwa kebijakan komunikasi selalu memiliki konteks atau keterkaitan dengan aspek politik, ekonomi atau khalayak.

Memang saat ini, kebijakan komunikasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh demokratisasi, keterbukaan pers dan proses yang berlangsung. Pemerintah sebagai perumus dan pengelola kebijakan komunikasi memiliki tekanan atas kehadiran kekuasaan kepala pemerintahan dan tuntutan publik. Apalagi struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri unik. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, secara vertikal, ditandai oleh adanya perbedaan lapisan atas, menengah, dan lapisan bawah (Nasikun, 1995).

Kondisi itu, mereproduksi berbagai kekuasaan sebagaimana dikemukakan Foucault (dalam Littlejohn dan Foss, 1999: 205) bah-



wa kekuasaan merupakan bagian yang melekat atau inheren dengan seluruh susunan diskursif sebagai struktur diskursus. Kuasa dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berelasi satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran.

Meminjam konsep Karl D. Jackson, elite yang berkuasa di Indonesia membentuk semacam *bureaucratic polity*, yaitu: upaya menjadikan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dengan menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan. Akhirnya, sistem politik yang terbentuk dengan ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, birokrasi menjadi arena utama permainan politik. Kedua, yang dipertaruhkan dalam permainan politik di atas adalah kepentingan pribadi. Bukan kepentingan publik. Ketiga, masyarakat dianggap tidak relevan dalam sistem politik yang elitis semacam ini (Mas'ood, 1994).

Tantangan Politik Identitas di Tengah Masyarakat Plural

Barker (2004) menyatakan identitas adalah gambaran kultural seseorang yang dibentuk secara emosional serta digunakan secara personal dan sosial. Sebagai konstruksi budaya, identitas merupakan sesuatu yang diciptakan. Oleh karena itu, konsep identitas sangat kontekstual bergantung dimana dan kapan sebuah identitas dibiarkan.

Secara sosial politik identitas dikembangkan melalui sosialisasi keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Namun secara politik pembentukan karakter bangsa itu disebabkan oleh faktor kultural dan struktural. Dalam perspektif *cultural studies*, kebijakan merupakan salah satu politik identitas yang mendefinisikan posisi dan peran warga negara. Proyek nasionalisme yang diarahkan membentuk identitas keIndonesiaan pada dasarnya merupakan cara pemerintah melalui kebijakan komunikasi (politik komunikasi) untuk mengatur cara interaksi antarwarga dengan beragam pesan komunikasi.

Keragaman nilai-nilai budaya suku bangsa memang amat sulit disarikan atau ditunggalkan, karena sebagian besar nilai budaya itu mempunyai ciri khas sendiri sebagai bentuk kearifan budaya setempat. Namun demikian, guna merumuskan kebudayaan dan kepriba-

dian bangsa Indonesia, perlu diupayakan untuk mengangkat atau mengadopsi nilai-nilai budaya suku bangsa di Indonesia yang arif (positif). Berkaitan dengan upaya tersebut, ada sebuah pepatah bijak yang berbunyi: mempertahankan hal-hal (nilai-nilai) lama yang baik dan mengambil hal-hal (nilai-nilai) baru yang lebih sesuai atau cocok.

Selain itu, pranata adat di Indonesia kini kian melemah dengan masuknya pengaruh globalisasi. Modernitas kemudian membuat masyarakat meninggalkan adat istiadatnya, tak terkecuali masyarakat desa yang dahulu menjadi “pengikat” terakhir dari adat. Hal ini perlu diperhatikan dan dibuatkan upaya-upaya pelestarian dan pengefektifan penggunaan pranata adat dalam mengembangkan karakter dan pekerti bangsa.

Di Indonesia, masyarakat bangsa yang majemuk terajut menjadi satu melalui berbagai pertumbuhan alami dan dikelola dengan pelbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Salah satu fenomena baru ekspresi identitas kultural adalah menguatnya komodifikasi etnik dan agama sebagai penyusun dasar politik identitas.

Sekalipun reformasi kelembagaan pemerintah telah bergulir dan deregulasi media sudah berlangsung lama, namun secara ekspansif media dengan kekuatan hegemoniknya memproduksi dan mereproduksi berbagai nilai yang tidak saja mempengaruhi tetapi merusak pola-pola komunikasi yang ada dalam masyarakat (Rusadi, 2008).

Globalisasi informasi adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi yang demikian cepat membuat sekat antar negara menjadi tidak ada. Informasi secara bebas masuk ke segala penjuru dunia tanpa bisa dibendung. Di era global seperti inilah tantangan kebijakan komunikasi di masyarakat majemuk sangat terasa.

Penutup

Indonesia kini berada pada sebuah era dimana pola-pola komunikasi dan ikatan-ikatan sosial yang terbangun dari kekuatan elemen struktur masyarakat secara perlahan sedang terkikis oleh de-



sakan pola komunikasi dan budaya global. Konsekuensi dari semua itu adalah adanya perubahan kontelasi dalam kebijakan komunikasi pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa saat pemerintah bukan menjadi sumber utama informasi, oleh karena itu, kebijakan komunikasi membutuhkan cara dan pendekatan baru yang lebih berpihak pada kepentingan dan kebutuhan publik.

Pasca reformasi, pemerintah dinilai gagal menyapa publik, diseminasi sejumlah informasi penting tidak berjalan dengan baik (Koran Tempo, 2010: B6). Kondisi itu mengakibatkan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah sangat beragam. Permasalahannya di Indonesia, di tengah dinamika masyarakat akan selalu dibutuhkan cara dan strategi baru dalam berkomunikasi dengan publik atau masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pula pendekatan komunikasi publik yang tidak hanya sekadar menyebarluaskan informasi saja, melainkan memberi ruang akses kepada publik sekaligus lebih memahami dan merespons aspirasi publik, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. §

Daftar Pustaka

- Abrar, dkk. (1999). *Membangun Ilmu Komunikasi dan Sosiologi*. Yogyakarta: FISIP dan Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Anderson, Benedict (2002). *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press.
- Barker, Chris (2004). *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Terjemahan oleh Nurhadi dari Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies, Theory and Practice*. (Sage Publication). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Budiardjo, Miriam (1986). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Budiman, Arief (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chakravartty, Paula dan Katharine Sarikakis. (2006). *Media, Policy and Globalization*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Dahlan, M. Alwi. (1999). "Implikasi Pembubaran Departemen (Penerangan)" dalam Kompas Edisi Senin, 1 November 1999. Diakses melalui <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9911/01/opini/imp4.htm>
- Soekirman, Djoko, dkk (1984). *Sejarah Departemen Penerangan*. Jakarta: Puslitbang Departemen Penerangan.
- Effendy, Muhadjir. (2009). "Rethinking dan Reshaping Visi dan Strategi Pendidikan Kebangsaan di Era Global". Makalah dalam Acara Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009.

- Foucault, Michael, (1980). *Power/Knowledge. Selected interviews 1972-1977*. Terjemahan Colin Gordon, Leo Marshall, John Mephan, Kate Soper, New York: Pantheon Oak.
- Hatta, Mohammad. (1992). *Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta UI-Press.
- Johnston, Hank ; Enrique Larana, dan Joseph R. Gusfield, (1994). *New Social Movements: From Ideology to Identity*. Philadelphia: Temple University Press
- Kominfo (2010) Menuju Indonesia *Connected*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas.
- Lan, Thung Ju; Dedi S. Adhuri, Achmad Fedyani Saifuddin, Zulyani Hidayah. (2010). *Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas: Lokalitas vis-à-vis Nasionalitas*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. (2009). *Encyclopedia of Communications Theory*. California: Sage Publications.
- Mas'ood, Mochtar. (1994). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasikun. (1995). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Rajawali Press.
- Nimmo, Dan (2006). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (terj).. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Piliang, Yasraf Amir (1999). *Dunia yang Dilipat*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam. ed. (1987). *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Jakarta: LP3ES.
- Ritzer, George. (2003). *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rusadi, Udi. (2008). "Revitalisasi Media Tradisional dalam Penguatan Komunikasi Sosial di Indonesia". Makalah dalam Simposium Internasional Antropologi, 22 Juli 2008 di Banjarmasin.
- Sumarsono. dkk. (1994). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.



POP CULTURE MESIN #KONFLIK Refleksi Atas Komunikasi Konflik

*Gregorius Genep
Sukendro*

Kehidupan ini bisa disebut juga kehidupan yang bernafaskan dan semangat *pop culture*. Budaya populer adalah budaya yang berkembang mengikuti perubahan zaman dengan perkembangannya yang lebih banyak ditentukan industri komunikasi seperti film, televisi, media berita dan industri iklan.

Kebudayaan ini menumbuhkembangkan konsumerisme dan hedonisme di segala lapisan masyarakat, laki-laki maupun perempuan. Mesin-mesin penggerak budaya pop yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme ini menciptakan manusia semakin terasing dari Lingkungannya—dengan L kapital—ketika tidak mengonsumsi ciptaan mesin budaya pop. Realita ini menciptakan konflik personal dan konflik sosial. Alih-alih ini adalah tanggungjawab dan peranan besar yang bernama komunikasi.

Kata kunci: komunikasi konflik, pop culture, media massa, konsumerisme

Intro

Komunikasi? Itu sudah menjadi bagian dari setiap tarikan nafas kehidupan manusia modern zaman ini, dimulai dari aktifitas aktif sehari-hari sampai dalam aktifitas pasif, tidur—jangan-jangan dalam mimpi pun—tak lepas dari hiruk-pikuk komunikasi. Ini karena era banjir bah informasi, seperti yang kita alami saat ini, dimana setiap orang setiap hari menerima sedikitnya tujuh ribu informasi, luar biasa. Inilah era globalisasi dalam lingkungan informasi yang menciptakan jalur komunikasi bebas antar negara, pastinya akan membawa dampak ganda, disatu sisi era ini membuka kesempatan informasi banjir keseluruhan kehidupan manusia dimana pun, namun di sisi lain era itu, membawa persaingan semakin tajam dan ketat.

Perjalanan waktu membawa pada sebuah masa yang bernama *pop culture*, budaya populer yang berkembang mengikuti perubahan zaman, arah perkembangannya lebih banyak ditentukan oleh industri komunikasi seperti berita dan hiburan, film, televisi, dan industri iklan. Industri yang berisikan hal-hal yang biasa diproduksi dan diseminasikan oleh media budaya massa. Asumsi masalahnya sering dimaknai dengan budaya massa dipahami dengan suatu yang “murahan/rendah”. Meskipun sebetulnya istilah budaya massa bias dipahami sebagai sesuatu yang baik; merujuk sebuah proses akan pluralisme dan demokrasi yang kuat dan terus menerus tak terbenjung. Dimana tidak bisa pungkiri budaya massa sendiri adalah hasil budaya yang dibuat atas nama kemassifan untuk kepentingan pihak pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, dan lebih mengabdikan pada kepentingan pemuasan selera “sesaat”. Dari sini lahirlah budaya populer yang selalu membawa berubah atas ruang dan waktu, hal ini dikarenakan ideologi budaya populer memang mengusung sifat komersialisasi dan komodifikasi.

Hadirnya zaman informasi dalam komunikasi global, budaya tradisional sepertinya mendapat perlawanan yang ketat melawan dirinya sendiri untuk tetap bertahan atau melanjutkan diri berkembang. Informasi dan budaya berinformasi yang berkembang hari ini telah banyak mengalami pergeseran fungsi. Ikatan-ikatan estetis antara elemen-elemen informasi tradisional dengan kebudayaan baru



menuju budaya populer yang modern bagaikan peristiwa perlawanan budaya yang sulit diantisipasi oleh budaya tradisional. Adanya perubahan baru bisa mengubah adat, kebiasaan, cara pandang, bahkan ideologi suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat mengarah pada hal-hal positif (kemajuan) dan negatif (kemunduran). Hal ini tentu saja mempengaruhi pola dan perilaku manusia modern.

Mendata atas hal-hal positif atau bentuk kemajuan akibat adanya perubahan sosial budaya pop seperti:

- a) Memunculkan ide-ide budaya baru atas perkembangan zamannya,
- b) Membentuk cara dan logika pikir masyarakat lebih rasional dan terbuka,
- c) Melahirkan penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia
- d) Munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan “ideal”.

Suatu yang positif tentu juga ada mata sisi lain, melahirkan hal negatif akibat adanya perubahan antara lain:

- a) Terbentuk budaya baru/asing yang terkadang tidak sesuai dengan nilai budaya yang sudah ada,
- b) Adanya kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan oleh kemajuan budaya dan kemajuan zaman baru—baik dari sisi cara pikir ataupun kehidupannya,
- c) Munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang makin beragam,
- d) Lunturnya kaidah-kaidah atau nilai budaya lama.

Penilainya pun tidak bias hitam putih, disinilah terjadi bebas nilai yang munculnya sikap manusia-manusia baru dengan pola pikir baru, perilaku baru, budaya baru, kesenangan baru, dan hal-hal yang baru itu bernama budaya konsumerisme.

Konsumerisme adalah ranah budaya populer, ranah yang sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ideologi kapitalisme yang banyak mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.



kat dibelahan mana pun. Budaya ini diciptakan sebagai bagian dari logika pasar dan komoditi. Logikanya hasrat manusia dijadikan komoditi pasar yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu. Tentu saja keberadaannya ini akan mengancam tatanan nilai dan identitas yang telah dianut oleh tatanan dan keyakinan manusia selama ini, terutama budaya hidup sederhana dan bersahaja.

Fiske (1989) menyatakan bahwa budaya populer hampir selalu diproduksi dalam sistem kapitalis yang memandang produk-produk budaya populer sebagai komoditi yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis. Budaya populer diproduksi oleh lembaga-lembaga yang disebut industri budaya. Budaya populer dengan demikian bisa dianggap sebagai satu hal yang kedudukannya diperkuat oleh sistem kapitalis, yang salah satu agen terkuatnya adalah media massa, terutama media-media global (Martin dan Nakayama, 2003).

Logika terbalik atas keterasingan (*alienation*) Karl Marx yang berjudul *Economic and Philosophic Manuscript*, manusia diasingkan dari dunia bukan hanya dalam pemikiran, namun dalam keseluruhan keberadaannya dan keterasingan tenaga kerja dari proses ekonomi merupakan hal paling penting dalam proses ini. Bagi Marx, proses keterasingan, eksternalisasi dan objektifikasi diri ini, tidak terbatas pada para pekerja saja, namun terjadi pada sistem yang berorientasi pada uang. Manusia diputuskan dari diri alamiahnya, dan diperbudak bukan lagi oleh kaum kapitalis, tetapi oleh kapital itu sendiri. Itu dunia baru, itulah budaya baru, dan itulah manusia baru dalam lingkaran budaya pop. Ketika tidak mengikuti atau mengkonsumsi budaya baru maka akan menjadi manusia asing yang teralenessi oleh “perdaban” dan dari sinilah beranak pinak konflik atas dirinya dan lingkungan.

Aku Ngepop Maka Aku Konflik

Cogito ergo sum sebuah ungkapan Rene Descartes, seorang filsuf kebangsaan Perancis yang hidup abad ke-17, “aku berpikir maka aku ada”. Ungkapan yang membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa bisa berpikir sendiri maka dia ada.



“Aku belanja maka aku ada” peneguhan atas esistensi manusia modern (mungkin sebagian besar manusia Indonesia). Belanja itu memang lumrah, namun yang terjadi sekarang ini, dunia menawarkan beragam kebutuhan baru dan baru dengan sangat cepat agar orang mengkonsumsinya secara terus menerus dan beranti-ganti. Sifat konsumerisme sebagai anak kandung kapitalisme telah merangsek sampai ke jantung masyarakat. Konsumerisme berhasil menciptakan kebutuhan baru di masyarakat. Pada kondisi ini, manusia modern mengkonsumsi barang bukan lantaran butuh secara fungsional, melainkan karena tuntutan atas gengsi (*prestige*), status, dan atau sekadar gaya hidup (*life style*).

Konsumerisme diusung yang bernama media. Pastikan, mulai dari Koran, televisi sampai majalah-majalah gaya hidup wanita/pria banyak menyajikan liputan-liputan atas kehidupan papan atas, kaum *jetsset* mulai dari cara belanja, cara memilih makanan, cara merawat tubuhnya, semua dikupas habis. Pastinya juga dalam industri film dan iklan baik yang terang-terangan maupun persuasif terselubung, masyarakat disuguhi beragam produk baru. Lewat medium inilah, manusia modern disuguhi tiada henti beragam gaya hidup populer yang akhirnya memaksa kita untuk mengkonsumsi produk yang dipajangkan itu. Bahasa etalase begitu membujuk dan membutakan mata kesadaran manusia modern. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berekses negatif terhadap lingkungan hidup, juga meluruhnya hubungan sosial dan bertahtanya kesadaran palsu di benak manusia. Lambat tapi pasti itu melahirkan konflik.

Konflik adalah sesuatu pilihan yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari peradaban manusia. Selama manusia masih memiliki perbuatan atas; kepentingan, kehendak, dan impian, maka konflik senantiasa seiring sekata dalam kehidupannya. Satu paket dalam hukum mewujudkan apa yang inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus dihadapi dan dilawan. Kemungkinan besar itu akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan sosialnya, kelompok dengan kelompok, dan biasa juga individu dengan diri sendiri atas tubuh dan pikirannya.

Bahasa konflik itu sendiri seringkali mengandung pengertian

negatif, yang cenderung diartikan sebagai lawan kata dari pengertian keserasian, kedamaian, dan keteraturan/anarki. Konflik seringkali diasosiasikan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik mau pun pikiran. Pandangan yang sempit mengenai konflik yang demikian, tidak mudah untuk diubah, lalu muncul semangat budaya “mencegah konflik”, “meredam konflik” dan “berdamai dengan konflik”.

Bermunculan definisi konflik yang dikemukakan oleh para pemikir. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik, namun tidak akan dipaparkan panjang lebar, ini akan lebih fokus pada; Satu, konflik itu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan. Dua, pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya. Tiga, bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada. Empat, proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing. Lima, kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Solusi menyelesaikan konflik yang terjadi tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik bahwa selalu dalam kondisi perubahan dalam setiap pelaku konflik. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”. Collins, seorang ahli sosiologi, lebih menekankan bahwa konflik lebih berakar pada masalah individual karena akartoretisnya lebih pada fenomenologis dan etnometodologi. Dia lebih memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial.

Yang terjadi kebanyakan konflik karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap



manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan, konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan. Konflik seringkali terjadi karena *output* dan *outcome* dari individu atau kehidupan sosialnya kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka di antara mereka. Kesenjangan ekonomi di antara kelompok sosial, termasuk dalam konflik ini. Konflik ini terjadi karena ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial. Banyak pula konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan.

Kehidupan modern inilah yang terjadi dimana kehidupan *hedonism*, kehidupan nikmat ditawarkan setiap hari dalam hitungan detik per detik. Itulah yang menciptakan manusia modern menjadi sangat kosong dan rapuh sehingga mudah masuk dalam wilayah konflik personal dan lingkungannya, yang menjadi manusia menjadi mudah galau (meminjam istilah anak muda sekarang).

Mau tidak mau, suka tidak suka, peranan komunikasi dalam hal ini sangat besar menghadirkan konflik personal mau pun konflik sosial atas eksistensi sebagai seorang manusia individu atau sebagai manusia. Dimana semakin tidak *nge-pop* maka dia akan di-*cap* sebagai manusia yang aneh, termarjinalkan, kesendirian, dan terputus kehidupan sosialnya.

Namun ketika manusia terbujuk oleh iming-iming pesan komunikasi yang diusung oleh media pop, dirinya pun juga akan mengalami konflik diri dan konflik atas kehidupan sosialnya. Dalam konflik diri, ia akan selalu mengikuti, selalu *update*, selalu mengkonsumsi tentang kekiniaan, yang dimana itu bisa masuk dalam sebuah jebakan kepalsuan, semu. Konflik identitas, jati diri, dan tentunya adalah konflik ekonomi, alih-alih ini membawa pada sifat menghalalkan cara. Dan konflik yang lebih besar adalah konflik atas kehidupan sosialnya, menjadi semakin jauh dari realita sosial yang sebenarnya, akhirnya menjadi suatu kehidupan yang *awang-awang* tidak menginjak bumi atas kehidupan sekelilingnya.

Solusi model *Boulding* yang menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan



mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik. Seperti tidak mampu lagi untuk konteks ini karena ini harus dihadapi dan hanya kemampuan niat individu, masyarakat, dan negara untuk berpikir cerdas, dan mempunyai benteng diri atas budayanya.

Dan Akhirnya...

Menyitir kata M Subhi Azhari dalam artikel “Konflik, Identitas dan Perubahan Damai” Kalau kita bandingkan lebih mudah mana menemukan sinonim kata “konflik” ketimbang “perdamaian” dalam kosa kata kita sendiri, tanpa sadar kita akan menemukan ternyata menemukan padanan kata “konflik” lebih mudah. Fakta ini boleh saja dibantah karena alasan-alasan tertentu. Namun kenyataan tersebut menjadi bukti kecil betapa konflik sungguh merupakan realita yang hadir dalam kehidupan dan manusia adalah pabriknya. Manusia tidak bisa eksis tanpa konflik, karena pada dasarnya konflik dibutuhkan. Tinggal bagaimana manusia merespons konflik tersebut, akan menentukan progresifitas mereka sendiri. Setiap budaya telah menentukan cara mereka merespons konflik yang mereka temukan dari pengalaman secara evolusional dan terus mengalami reduksi dan pembaruan seiring berkembangnya masyarakat.

Memang konflik tidak selamanya berakibat hal fatal bagi pribadi atau kehidupan tatanan sosial. Jika bisa dikelola dengan baik, konflik justru bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Misalnya, sebagai pemicu perubahan dalam masyarakat, memperbaiki kualitas keputusan, menciptakan inovasi dan kreativitas, sebagai sarana evaluasi, dan lain sebagainya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa jika konflik tidak dikelola dengan baik dan benar, maka akan menimbulkan dampak negatif dan merugikan bagi diri individu atau sosialnya.



Pointnya dalam upaya menyelesaikan konflik haruslah dipahami betul kompleksitas serta kerumitan konflik yang dihadapi. Semua harus sadar bahwa setiap konflik memiliki kompleksitas masing-masing sehingga tidak bisa begitu saja mengaplikasikan sebuah teori untuk menyelesaikannya. Semua juga harus ingat bahwa selain teori-teori resolusi konflik yang ada, sebenarnya individu, tatanan social dan masing-masing bangsa memiliki budaya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Namun demikian, penyelesaian konflik sering melupakan akar dimana tanah dipijak yaitu adat dan budaya lokal tersebut. Untuk itulah penting untuk menggali kembali kekayaan budaya sendiri di zaman modern ini yang semua serba cepat dan kadang semu.

Budaya populer memang ada di mana-mana. Manusia dibombardir oleh budaya populer setiap hari di mana pun kita berada. Menghindari budaya populer merupakan hal yang sulit dilakukan, bukan hanya karena manusia ada di mana-mana, melainkan juga karena budaya populer memiliki satu fungsi sosial yang penting.

Pop culture memang memutarakan mesin-mesin mengerakkan pegas-pegas konflik, itu seandainya tidak disiasati dengan sangat hati-hati dan cerdas makan semua akan tergilas konflik manusia modern. Dan inilah peranan bahasa dan medium komunikasi untuk “mendamaikan” agar semua kembali dalam ranah keteraturan dan kenyataan. Pertanyaan sekarang para pelaku industri dan pemikir komunikasi itu mau atau tidak, dan jangnan-jangan juga sudah tergilas dengan mesin-mesin *pop culture*. Semua masih gelap, tapi keyakinan tidak boleh dimatikan cahaya terang untuk manusia-manusia produk postmodern harus tetap berjalan. Salam.§

Daftar Pustaka

- Alo Liliweri, (2005). Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Yogyakarta: LKiS.
- Baudrillard, Jean, (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage Publications.
- Budiman, Hikmat, (2002). Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davis, Howard dan Paul Walton. (2010). Bahasa, Citra, dan Media. Yogyakarta: Jalasutra.



- Eatwell, Roger, & Anthony Wright (Ed), (2004). *Ideologi Politik Kontemporer*. Penerjemah R.M. Ali, Yogyakarta: Jendela.
- Marcuse, Herbert. (2000). *Manusia Satu Dimensi*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Martin, Judith N. dan Thomas K. Nakayama. (2004). *Intercultural Communication in Context*. Boston: McGraw-Hill.
- Fisher, Simon. (2001). *Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak* Jakarta: The British Council.
- Strinati, Dominick, (2003). "Populer Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer". Penerjemah Abdul Mukhid, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Storey, John. 2008. *Culture Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta : Jalasutra.
- <http://sosiologibudaya.wordpress.com/>
- http://wahidinstitute.org/Opini/Detail/?id=229/hl=id/Konflik_Identitas_Dan_Perubahan_Damai



TUBUH PEREMPUAN DAN KONFLIK IDEOLOGI DALAM DEMOKRASI DISENSUS Studi Kasus Kontroversi Konser Lady Gaga di Indonesia

Hendri Yulius Wijaya

Setelah tumbangya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki periode reformasi dan demokrasi. Seiring dengan berkembangnya banyak kelompok kepentingan, demokrasi memasuki aras demokrasi disensus, bukan lagi konsensus.

Pertentangan dan konflik yang terjadi di antara kelompok kepentingan menjadi sesuatu yang lumrah. Salah satu jenis konflik yang terjadi di Indonesia kontemporer ini adalah konflik ideologi yang menggunakan tubuh perempuan sebagai medan pertarungan.

Salah satu kasus yang dapat dibedah adalah kontroversi konser Lady Gaga di Jakarta yang semakin memperlihatkan dengan jelas bagaimana tubuh dan penampilan perempuan dijadikan medan pertarungan wacana antara kelompok konservatif-fundamentalis vis a vis kelompok moderat-liberal.

Kata kunci: konflik, ideologi, demokrasi, disensus, konservatif, liberal, feminisme, gender.

Melihat Kembali Paradoks Demokrasi

Menurut pakar politik Francis Fukuyama (2012:3), jumlah negara yang memilih demokrasi sebagai sistem politiknya meningkat dengan pesat. Padahal, pada era tahun 1970-an, tercatat hanya sejumlah 45 negara dari 151 negara yang dinilai sebagai ‘negara bebas’ (*free*) oleh *Freedom House*. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kini kian populer dalam era globalisasi ini. Lebih jauh lagi, sistem pemerintahan demokrasi semakin lama seolah-olah menjadi ‘*default setting*’ bagi negara-negara di abad dua puluh ini. Fukuyama (2012:3) mengutip Samuel Huntington yang menyebutnya sebagai ‘demokratisasi gelombang ketiga’ (*third-wave democratization*) yang menjadi demokrasi liberal sebagai ‘*default setting*’ pemerintahan negara-negara ini. Klaim ini agaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan Budiarto Danujaya (2012: xiv) bahwa kiranya hanya tinggal segelintir negara lagi yang tidak mengklaim telah menetapkan demokrasi sebagai asas pengelolaan politik di negeri mereka atau mengklaim pemerintahan mereka sebagai sebuah rezim demokratis.

Indonesia sendiri mengalami proses reformasi pemerintahan menuju demokrasi sejak tumbangannya Orde Baru yang dipimpin oleh mantan presiden Soeharto. Keterjatuhan rezim yang otoriter ini akhirnya menumbuhkan kesuburan baru kelompok-kelompok yang selama ini dibungkam dalam era tersebut. Misalnya, setelah gerakan islam politik terbungkam pada Orde Baru, jatuhnya Soeharto ini boleh dibilang membawa angin segar. Jemaat Tarbiyah yang bertransformasi dari gerakan informal menjadi partai politik (Muhtadi, 2012: 110). Kebebasan pers mulai dikumandangkan. Isu kesetaraan gender dan hak-hak asasi manusia mulai membahana. Menanggapi euforia ini, beberapa orang pun bersikap sinis terhadap demokrasi ‘formalistis’, bukan substantif.

Nyatanya demokrasi tidaklah melulu mengarah pada pembentukan konsensus bersama atau demokrasi konsensual. Tetapi, ironisnya, di tengah kemajuan teknologi dan derasnyanya arus informasi, serta tumbuhnya berbagai kekuatan dan kelompok-kelompok kepentingan di masyarakat meletakkan demokrasi dalam paradoksnya yang paling dalam, yaitu demokrasi disensus. Istilah ini mengacu pada ‘konsensus, apalagi dalam pengertian utuh-penuh-padu



dan tak terkontestasikan lagi, sungguh-sungguh takkan kunjung tercapai' (Danujaya, 2012: 395). Pertarungan ideologi dan berbagai kepentingan yang diusung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang plural dalam sistem demokrasi ini akan selalu berkontestasi dalam ruang publik.

Kontestasi ini tak akan pernah selesai, karena peran negara dan pemerintah menjadi seolah-olah regulator atas pertarungan ini. Negara akan menghasilkan suatu kebijakan yang tak akan pernah 'selesai' atau hegemoni suatu kelompok yang hanya 'sementara' sebab begitu kebijakan atau hegemoni itu terlahir, ia akan kembali dikritisi dan ditantang oleh kelompok lainnya. Proses inilah boleh dibilang seperti dialektika yang tak pernah menemui akhir-kehendak menggapai kondisi 'ideal' yang ditawarkan demokrasi, tetapi sayangnya, idealisme itu tak akan pernah tergapai. Ia, seperti makna, selalu menjauh ketika didekati. Di tengah paradoks itu, justru sebenarnya demokrasi dan pluralitas bangsa Indonesia menemukan 'nilai substantif'-nya: keberagaman terus terjaga dalam proses kontestasi berbagai kekuatan dan kepentingan.

Tubuh Perempuan dan Konflik Ideologi dalam Demokrasi Disensus

Menilik penjabaran tentang demokrasi disensus di atas, konflik atau pertentangan antar kelompok kepentingan merupakan salah satu hal yang wajar dan lumrah terjadi. Salah satu konflik yang sering terjadi di negeri ini adalah konflik ideologi yang menggunakan tubuh perempuan sebagai medan pertarungannya.

Hal ini terjadi dengan jelas dalam perdebatan antar kelompok yang muncul dalam kontroversi kedatangan dan konser Lady Gaga di Indonesia. Rasanya, jarang sekali seorang penyanyi pop internasional yang membuat heboh masyarakat Indonesia—mulai dari anak sekolah, mahasiswa, hingga sampai aparat pemerintahan. Lady Gaga memang bukan sekadar pelantun lagu biasa, tetapi ia adalah seorang ikon posmodernisme, yang sadar politik dan pandai bermain-main dengan simbol dan wacana. Lagu-lagunya pun menyerukan 'semangat untuk menjadi diri sendiri' bagi semua orang, terlepas dari identitas gender, warna kulit, hingga orientasi seksual.



Penampilannya pun tak tanggung-tanggung. Kostum hingga lenggak-lenggoknya di atas panggung memicu konflik ideologis yang muncul antara kelompok konservatif *vis a vis* kelompok moderat atau liberal atau kelompok kiri *vis a vis* kelompok kanan.

Melihat berbagai argumen yang disajikan dalam menyebabkan konflik ideologi itu semakin memanas mengenai perempuan muda yang baru berusia dua puluh enam tahun ini adalah tubuh dan penampilannya. Sebenarnya, ini bukanlah hal baru di negeri ini. Konflik ideologi yang menggunakan tubuh perempuan sudah terjadi pada perdebatan saat *goyang ngebor* Inul Daratista muncul dalam kancah pertelevisian, penyusunan dan pengesahan RUU Anti Pornografi dan Pornografi yang kemudian disahkan menjadi UU Pornografi pada tahun 2006 dan implementasi perda-perda syariah.

Tubuh perempuan memang menjadi sesuatu yang kompleks dan memicu konflik ideologis karena:

“...berawal dari “persepsi tubuh perempuan adalah bukan persepsi perempuan itu sendiri”, tubuh perempuan menjadi milik pihak lain, celakanya untuk distigmatisasi, mulai ayat-ayat suci, sampai pornografi. Selain bukan milik perempuan sendiri, tubuh perempuan bukan semata-mata menjadi persoalan pribadi, kamar mandi, ruang tidur, dan ruang ganti pakaian. Tubuh perempuan adalah politik dalam permainan kehidupan, dalam aturan-aturan moral dan agama. (<http://jurnalperempuan.com/2011/11/politik-tubuh-politik-kuasa/>).”

Bila menggunakan perspektif dan teori feminisme untuk membedah kasus ini, persepsi atas tubuh perempuan memang tak lepas dari konstruksi gender yang dilekatkan padanya. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Mulia, 2009: 56). Lebih jauh lagi, bentukan budaya ini akhirnya menyebabkan persepsi seseorang atas tubuh kedua jenis kelamin menjadi berbeda atau menciptakan ‘standar ganda’ (*double standard*), terutama bagi perempuan. Misalnya, perempuan yang mengenakan pakaian seksi akan dicap sebagai ‘perempuan jalang’, sedangkan lelaki bebas dari tuduhan negatif semacam ini.



Hal ini bisa terjadi karena pengaruh budaya patriarki yang berada di belakang konstruksi gender ini. Seorang pemikir feminis, Gayle Rubin menyatakan bahwa sistem seks atau gender adalah “suatu rangkaian pengaturan, yang digunakan masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi kegiatan manusia.” Perbedaan biologis dijadikan jalan tol untuk memaksakan peran atau konstruksi gender antara kedua jenis kelamin. Lebih lanjut lagi, Rosemarie Tong dalam *Feminist Thought* (2010: 72) menerangkan lebih jauh gagasan Rubin ini bahwa:

“Masyarakat patriarkal menggunakan fakta tertentu mengenai fisiologi perempuan dan laki-laki (kromosom, anatomi, hormon), sebagai dasar untuk membangun serangkaian identitas dan perilaku ‘maskulin’ dan ‘feminin’ yang berlaku untuk memberdayakan laki-laki dan melemahkan perempuan.”

Akibatnya, tubuh perempuan selalu ‘direndahkan’ dalam arti ‘tubuh itu tak pernah menjadi miliknya sendiri’. Tubuh dan penampilan perempuan dijadikan korban. Misalnya, terlihat dalam kasus perkosaan. Senada dengan itu, Mafaz (2012:9) berargumen bahwa:

“Walaupun mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah lelaki, namun tersangka utama adalah perempuan. Artinya dalam kejahatan ini, tubuh perempuan seringkali dituding sebagai penyebabnya. Tubuh mereka yang seolah menjadi sumber ‘masalah’ dalam pelecehan seksual.”

Atas dasar ketimpangan konstruksi dan persepsi atas tubuh perempuan itulah, penampilan dan tubuh pelantun lagu *hit Bad Romance* ini memicu kontroversi dan konflik ideologi antara kelompok konservatif yang memandang bahwa tubuh dan penampilan perempuan harus ‘sesuai’ dengan konstruksi gender yang dianggap ‘sesuai’ dengan budaya Indonesia dan kelompok moderat-liberal yang bersandar pada keyakinan bahwa Lady Gaga dan para penggemarnya memiliki hak untuk menentukan pilihannya dan berekspresi.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah tabel argumen atau komentar dari dua kubu dalam masyarakat yang menerakan pertentangan ideologis:

Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga

Komentar Kelompok Pro	Komentar Kelompok Kontra
<p>Menurut peneliti Setara Institute Ismail Hasani, pelarangan konser oleh polisi tidak berdasar peraturan perundangan dan lebih karena adanya desakan dari kelompok radikal.</p>	<p>“Intinya kami menolak tegas sama sekali konser tersebut,” kata Muhammad Rahmat Kurnia Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia.</p>
<p>“Jangan lupa, Kepolisian bukan perkumpulan para ulama. Bukan perkumpulan orang-orang yang terikat pada hukum, tapi mereka menegakan hukum itu sendiri. Seluruh keputusan kalau memang bisa dijelaskan secara rasional dan memiliki dasar hukum yang kuat silahkan saja. Kan seperti itu. Tapi ini kan nyata-nyata dibangun dari desakan-desakan kelompok organisasi radikal, intoleran, juga Majelis Ulama Indonesia. Artinya mereka bekerja dibawah ketundukan organisasi-organisasi.”kata Ismail Hasani. (Sumber:http://kbr68h.com/seni/musik/24915-setara-tidak-ada-landasan-hukum-larang-konser-lady-gaga)</p>	<p>”Karena kita negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan ini bukan masalah dua jam atau tidak. Kita membentengi generasi muda supaya tidak ada liberalisasi kebudayaan. Karena, ini bisa merusak moral bangsa,” jelasnya. (Sumber:http://www.jpnn.com/read/2012/05/24/128264/Lagu-%22Judas%22-Lady-Gaga-Disebut-Singgung-Nasrani)</p>
<p>“Tidak boleh melarang karena itu kebebasan warga negara untuk berkumpul untuk ekspresikan pendapatnya lewat tulisan atau lewat kesenian atau lagu,itu bebas tidak boleh disentuh itu dan itu hak konstitusional,” ujar Sosiologi dari Universitas Indonesia, Thamrin Tamagola ketika ditemui di Akbar Tandjung Institute, Senin (21/5/2012). Menurutnya, kegiatan konser merupakan hak konstitusi sama halnya seperti orang yang sedang beribadah tidak boleh dilarang. (Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/1863352/sosiolog-pemerintah-tak-boleh-larang-lady-gaga)</p>	<p>“Insya Allah, kami melakukannya untuk tolak konser Lady Gaga,” kata Ketua FPI Kota Depok Idrus Al Gadri kepada Tempo, Rabu, 23 Mei 2012. Idrus mengatakan massa yang akan turun berjumlah ribuan orang, gabungan dari FPI se-Jabodetabek. Di lain pihak, dari FPI Kota Depok sendiri dipastikan turun 400 orang. Mereka akan memperlihatkan bahwa “Mother Monster” itu tidak layak manggung di Indonesia. Dalam <i>long march</i>, kata Idrus, mereka menyuarakan penolakan kedatangan penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu. Konser Gaga dinilai akan merusak anak-anak bangsa Indonesia. “Dia ini sangat vulgar,” katanya. Menurut dia, semua lapisan masyarakat seharusnya menolak Lady Gaga. Negara-negara lain seperti Filipina, Cina, dan Korea juga menolak, apalagi Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar. “Kalau menerima lucu banget, deh,” katanya. “Dia tidak sesuai dengan konsep Republik.” (Sumber:http://www.tempo.co/read/news/2012/05/23/173405598/Tolak-Lady-Gaga-FPI-Ancam-Turun-ke-Jalan)</p>



Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga (lanjutan)

Komentar Kelompok Pro	Komentar Kelompok Kontra
<p>Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memandang konser Lady Gaga akan memberikan citra positif kepada pariwisata Indonesia di mata dunia. “Kehadiran Lady Gaga di Indonesia akan membuat Indonesia dikenal lebih luas oleh dunia internasional,” kata Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Seni Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ukus Kuswara, saat dihubungi Selasa, 22 Mei 2012.</p> <p>(Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/22/112405322/Kementerian-Pariwisata-Dukung-Konser-Lady-Gaga)</p>	<p>“Itu mencerminkan rasa cinta Tanah Air terhadap budaya dalam negeri,” kata Devi, Selasa, 22 Mei 2012. “Karena bukan artis nasional, isu ini sangat strategis untuk dilempar.”</p> <p>Ia membandingkan sikap masyarakat yang lebih menolak Gaga ketimbang selebritis nasional yang bergaya erotis. Penolakannya pun tak seheboh penolakan terhadap Gaga.</p> <p>Hal ini menunjukkan masyarakat sadar bahwa budaya Barat hampir menguasai seni-seni kehidupan masyarakat. Walaupun ada kalangan yang menolak, toh, Devi menilai masyarakat Indonesia memiliki budaya dan toleransi yang cukup tinggi. Ia menilai masyarakat cukup dewasa untuk menolak berbagai macam provokasi.</p> <p>(Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/22/112405365/Pakar-Budaya-Tolak-Lady-Gaga-Cermin-Cinta-Negara)</p>
<p>Salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Biem Benjamin, menyatakan bahwa dia mendukung konser Lady Gaga. Namun, menurut dia, Gaga harus menyesuaikan penampilannya dengan kultur Indonesia.</p> <p>“Iya, mendukung. Namun, siapa pun artisnya, kalau di Indonesia harus ikuti peraturan kita,” ujar putra Benyamin Suaeb ini ketika dihubungi, Senin 21 Mei 2012. Biem mencontohkan, Gaga perlu memodifikasi busana dan gerakan. “Kasih tahu aja dia agar menyesuaikan. Busana dan gerakannya jangan erotis,” dia mengimbau.</p> <p>Mengenai penilaian tampilan Gaga porno atau tidak, Biem mengembalikan itu pada pandangan masing-masing pribadi yang menonton. Menurut Biem, Gaga biasa saja. Apalagi buat dia yang pernah tinggal di Amerika.</p> <p>“Tergantung orangnya,” ujarnya.</p> <p>(Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/21/112405162/Biem-Benjamin-Dukung-Konser-Lady-Gaga)</p>	<p>Alasan penolakan konser yang bertajuk <i>The Born This Way Ball</i> ini ke Indonesia karena sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Asrorun juga mengatakan, konser tersebut juga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan norma agama.</p> <p>Asrorun menjelaskan, konser Lady Gaga ini merupakan bentuk pengingkaran dari prinsip-prinsip demokrasi bangsa. Menurutnya, hal ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman dan aspirasi rakyat. Selain itu, MUI juga menilai, konser tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, kecemburuan sosial, serta kesenjangan sosial di masyarakat.</p> <p>Sosok penyanyi eksentrik ini, melalui pakaian dan lagu-lagunya, mengindikasikan telah menistakan agama. “Karena Lady Gaga ini ikon liberalis. Tidak hanya dari caranya berpakaian, tapi juga lagunya,” ungkap Asrorun.</p> <p>(Sumber: http://www.republika.co.id/berita/senggang/musik/12/05/22/m4fmkc-mui-tegas-tolak-ke kedatangan-lady-gaga)</p>

Tabel Argumen Pro-Kontra Atas Konser Lady Gaga (lanjutan)

Komentar Kelompok Pro	Komentar Kelompok Kontra
<p>“Poin-poin dari mereka bisa jadi memang bagus. Jika konser tersebut bisa menggunakan norma ketimuran, saya kira tidak ada yang dikhawatirkan. Kecuali kalau Lady Gaga telanjang bulat. Itu kan nggak mungkin,” (Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso.) (Sumber: http://sidomi.com/96778/dpr-dukung-konser-lady-gaga/)</p>	<p>FUI menilai, Lady gaga juga menonjolkan pornografi, dan selalu tampil erotis. (Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/05/23/fui-akan-gelar-demo-sejuta-umat-tolak-lady-gaga)</p>

Dari penjabaran di atas dalam dilihat bahwa kelompok konser-vatif menunding tubuh perempuan yang terbuka atau ‘seksi’ sebagai bentuk liberalisme yang dibawa oleh budaya asing, tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945, bahkan disamakan dengan pornografi. Apalagi, mereka menafsirkan bahwa gaya ‘liberal’ *a la* Gaga ini bisa diikuti anak muda sekarang yang dianggap bisa menjerumuskan moral mereka.

Sementara itu, kelompok moderat atau liberal melihat bahwa konser tersebut masih bisa dilakukan asal penyanyi bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu mengenakan pakaian yang dianggap ‘sesuai’ dengan budaya Indonesia, melihat kebebasan berekspresi sebagai bentuk hak individu, dan meletakkan dasar hukum sebagai acuan, bukan norma agama tertentu yang dijadikan pijakan.

Ruang Kosong dan Kemungkinan Demokrasi Disensus

Demokrasi disensus memang merupakan sebuah paradoks—demokrasi yang menawarkan ‘kontestasi’ berbagai wacana yang diusung beragam kepentingan. Sesuai dengan semangatnya, demokrasi memang seharusnya tidak memaktubkan satu hegemoni kepentingan tertentu, tetapi membiarkan bagaimana berbagai kepentingan dan wacana yang ada saling berartikulasi dan ‘bertarung’ sehingga hegemoni satu pihak atau kepentingan akan selalu dipertanyakan dan ditantang. Inilah yang disebut oleh Claude Lefort sebagai ‘ruang kosong’ dalam demokrasi yang tak pernah terhegemoni secara partikular dalam jangka waktu lama, seperti otoritarianisme.

Di tengah konflik dan pertentangan wacana yang selalu terjadi ini, bukan berarti kondisi negara dan politik akan menjadi centang-



perenang dan tak beraturan. Tetapi, menurut Danujaya (2012: 397) menanggapi hal ini bahwa:

“Betapapun konsensus disadari takkan kunjung pernah sungguh tercapai, tapi artikulasi-artikulasi konsensual, seperti upaya menggalang ekuivalensi intergratif, melakukan domestikasi, ataupun meningkatkan determinasi dalam politik, secara tidak langsung juga tetap terselenggara dalam politik demokrasi disensus. Hanya saja, artikulasi-artikulasi konsensual tersebut tidak pernah menjadi upaya-upaya yang berdiri sendiri, apalagi menjadi titik berat rangkaian praksis politiknya, melainkan senantiasa berada dalam cakrawala prioritas artikulasi-artikulasi disensual.”

Perlu dicatat bahwa di tengah berbagai pertarungan dan konflik kepentingan tersebut, negara harus menempatkan seluruh aktor yang terlibat dalam posisi yang adil dan setara. Yang dimaksudkan dengan adil dan setara ini adalah tidak boleh ada pihak yang memiliki kuasa lebih dari yang lainnya, apalagi membiarkan terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Bila kekerasan terjadi, maka hukum harus bisa bertindak tegas untuk mengatasinya.

Dalam kasus kontroversi konser Lady Gaga di Indonesia, wajar-wajar saja bila terjadi pertentangan dan konflik ideologi di antara kedua kubu konservatif-fundamentalis versus kelompok moderat dan liberal. Tetapi, menjadi tidak wajar adalah ketika kekerasan dan ancaman termasuk di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem demokrasi sekarang ini, kita dapat menemukan sebuah paradoks, sebuah tegangan: pemeliharaan pluralitas dalam masyarakat akan melahirkan berbagai konflik kepentingan dan pertarungan wacana. Tetapi, hal ini bukanlah menjadi rambu-rambu untuk menghentikan laju demokrasi, tetapi untuk semakin mengartikulasikan perbedaan tersebut, sehingga perbedaan tetap terpelihara dan hegemoni sementara dari satu kepentingan akan selalu ditantang dan dipertanyakan.⁸

Daftar Pustaka

Amirrudin, Mariana (2011). Politik Tubuh, Politik Kuasa dimuat dalam <http://jurnalperempuan.com/2011/11/politik-tubuh-politik-kuasa/>. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

- Azcharie, Suzy dan Nurlailah (2011). Pengaruh Program MTV Terhadap Gaya Hidup Remaja Jakarta dalam Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara (Vol 3. No. 1), Jakarta. Universitas Tarumanegara.
- Danuwijaya, Budiarto (2012). Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Corry W., Andy (2009). Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi dimuat di Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara (Vol 1. No. 1), Jakarta. Universitas Tarumanegara.
- Fukuyama, Francis (2012). The Origin of Political Order. London. Profile Books LTD.
- Mafaz, Salamun Ali (2012). Perempuan dalam Jeratan Aurat dan Pornografi dimuat di Majalah Bhinneka (Edisi 8 Februari 2012), Surabaya. Lembaga Bhinneka.
- Muhtadi, Burhanuddin (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mulia, Siti Musdah (2009). Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender. Yogyakarta. Kibar Press.
- Pakaya, Nurdin (2009), Pengantar Ilmu Komunikasi. Gorontalo, Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Tong, Rosemarie Putnam (2010). *Feminist Thought* (Cetakan V). Bandung. Jalasutra.

Sumber Internet:

- <http://kbr68h.com/seni/musik/24915-setara-tidak-ada-landasan-hukum-larang-konser-lady-gaga>
- <http://www.jpnn.com/read/2012/05/24/128264/Lagu-%22Judas%22-Lady-Gaga-Disebut-Singgung-Nasrani>
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/1863352/sosiolog-pemerintah-tak-boleh-larang-lady-gaga>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/23/173405598/Tolak-Lady-Gaga-FPI-Ancam-Turun-ke-Jalan>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/22/112405322/Kementrian-Pariwisata-Dukung-Konser-Lady-Gaga>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/22/112405365/Pakar-Budaya-Tolak-Lady-Gaga-Cermin-Cinta-Negara>
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/21/112405162/Biem-Benjamin-Dukung-Konser-Lady-Gaga>
- <http://www.republika.co.id/berita/senggang/musik/12/05/22/m4fmk-mui-tegas-tolak-keatangan-lady-gaga>
- <http://sidomi.com/96778/dpr-dukung-konser-lady-gaga/>
- <http://www.tribunnews.com/2012/05/23/fui-akan-gelar-demo-sejuta-umat-tolak-lady-gaga>





PERAN KOMUNIKASI
DALAM MEREDAM KERAWANAN KONFLIK

MENYIKAPI KONFLIK SECARA POSITIF

Widayatmoko

Konflik tak lain muncul disebabkan adanya perbedaan persepsi, perbedaan selera, perbedaan ideologi, dan yang paling alami adalah perbedaan sifat dan karakter.

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu konflik memberikan efek negatif namun adakalanya justru memberikan efek yang positif, tergantung dari sejauh mana seseorang dapat menyikapi konflik tersebut

Upaya menyikapi konflik antara lain memandang konflik sebagai hal yang wajar dengan rasa damai dan sejahtera, dialog antara partner dalam suasana kesetaraan, bersedia berdialog bagi kepentingan bersama, memperjuangkan kepentingan tidak boleh melanggar HAM, kerendahan hati, serta bersedia memaafkan dengan penuh kasih sayang.

Kata kunci: akar konflik, perbedaan, budaya komunikasi organisasi

Latar Belakang

Konflik sudah ada sejak jaman Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa tidak mentaati seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, hal ini kemudian memicu terjadinya konflik yang pertama antara manusia dengan sang pencipta-Nya. Hal ini menunjukkan konflik tak lain muncul disebabkan adanya perbedaan persepsi, perbedaan selera, perbedaan ideologi, dan yang paling alami adalah perbedaan sifat dan karakter. Perbedaan ini harus dipikul bersama dengan keyakinan dan semangat pengorbanan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang merangkum bagaimana agar setiap individu, keluarga, maupun masyarakat memiliki pola pikir bahwa perbedaan adalah milik kita bersama. Seyogyanya semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” ini, menjadi pilar yang dipegang teguh kala menyikapi setiap perbedaan atau ketidakcocokan yang menimbulkan konflik.

Konflik tidak ada yang tidak dapat diatasi, jika mempunyai niat bersama untuk mengatasinya melalui musyawarah yang dilakukan secara baik. Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi harus disikapi dengan cara-cara yang tepat. Banyak orang memandang konflik sebagai perihal yang negatif, namun konflik dapat dimanfaatkan dengan cara merubah hal yang negatif menjadi hal yang positif. Seperti, kejadian di tengah-tengah masyarakat, konflik dapat diproses menuju rekonsiliasi dan kesediaan untuk membangun kembali masyarakatnya. Sebagai makhluk sosial yang hidup saling bahu-membahu, tentunya diperlukan kehadiran orang lain sebagai penolong, karena tidak baik jika manusia hidup tanpa ada tolong-menolong. Artinya, setiap individu memerlukan orang lain sebagai penolong dalam melakukan sesuatu.

Salah satu penyebab konflik berkaitan dengan komunikasi seperti yang dinyatakan oleh Robbins (2003), bahwa komunikasi sebagai kekuatan-kekuatan yang berlawanan yang timbul dari dalam kesulitan semantik, kesalahpahaman dan “kebisingan” dalam saluran komunikasi. Hal senada diungkapkan oleh Luthans (1973), bahwa komunikasi sebagai pemindahan atau pertukaran (Katz & Khan, 1966) informasi (dalam Mulyana, 2006:29). Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator dan komunikan yang bertujuan pada perubahan perilaku. Dari definisi tersebut,



menjelaskan bahwa dalam proses penyampaian pesan, ketika pesan disampaikan dan diterima kemudian ada umpan balik dan seterusnya, selama proses tersebut bisa saja ada kendala yang membuat pesan diterima berbeda oleh rekan bicara. Tantangannya adalah bagaimana informasi yang disampaikan tidak berbeda dengan pemahaman atas informasi yang diterima. Maka, komunikasi juga perlu diperhatikan dalam menyikapi konflik. Dengan komunikasi yang efektif dapat mengubah konflik menjadi bermanfaat pada kinerja. Efek positifnya pada kinerja antara lain merangsang diskusi tentang gagasan-gagasan yang membantu berkinerja lebih baik (Robbins: 2003).

Perbedaan dan konflik yang muncul biasanya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita, karena manusia terus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksinya setiap individu atau kelompok menggunakan komunikasi sebagai jembatan penghubung. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa perbedaan dan konflik akan berguna jika disikapi secara positif.

Pengertian Konflik

Istilah konflik tidak akan pernah kekurangan definisi. Sebuah buku meng gambarkannya sebagai “perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain:” “proses dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya,” atau hanya “jika ada kegiatan yang tidak cocok”. Perbedaan dan konflik bukan sesuatu yang baru bagi individu, keluarga maupun masyarakat.

Konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka (Frost & Wilmot, 1978: 9). Dalam pandangan ini “perjuangan” tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan, dikenali, dan dialami. Konflik baru terjadi ketika atau setelah perbedaan tersebut dikomunikasikan. Konflik mungkin dinyatakan dengan cara yang berbeda, dari sarkasme yang halus



hingga kecaman verbal yang terbuka (Mulyana, 2006:369).

Berdasarkan pemahaman tentang terjadinya konflik yang menjadi titik poinnya adalah perbedaan. Seringkali individu atau kelompok terfokus pada apa yang harus dicapai sehingga perbedaan kepentingan, perbedaan perjuangan yang ada menjadi tidak kelihatan dan diabaikan. Hal ini semata-mata untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Stephen P. Robbins dalam buku *Perilaku Organisasi* (2003:136) mengatakan bahwa oposisi atau ketidakcocokan dan suatu bentuk interaksi adalah faktor-faktor penentu titik awal dari proses konflik. Menyikapi perbedaan dalam hal apa pun dengan arif adalah keputusan yang bijak untuk tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dilaksanakan demi keutuhan dan kesejahteraan, terlebih demi institusi.

Konflik harus dirasakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Apakah konflik tersebut memang ada karena adalah masalah persepsi. Jika tidak ada yang dirasakan adanya konflik, pada umumnya konflik dianggap tidak ada. Tentu saja, konflik yang dirasakan sebetulnya tidak ada, sedangkan banyak situasi yang digambarkan mengandung konflik sebenarnya tidak demikian, karena para pihak tidak merasakan adanya konflik tersebut. Kesamaan lain pada kebanyakan definisi tentang konflik adalah konsep mengenai oposisi, kelangkaan, dan halangan (*blockage*) dan asumsi bahwa ternyata terdapat dua pihak atau lebih yang kepentingannya atau tujuannya kelihatannya tidak cocok. Sumber daya apakah itu uang, promosi, prestise, kekuasaan, atau apa saja tidak terbatas, dan kelangkaannya mendukung perilaku yang menghalangi. Oleh karena itu pihak-pihak tersebut saling bertentangan. Jika salah satu pihak menghalangi pencapaian tujuan pihak yang lain, maka konflik pun akan terjadi.

Perbedaan di antara definisi-definisi itu cenderung berpusat pada maksud dan apakah konflik adalah sebuah istilah yang hanya terbatas pada tindakan terbuka. Masalah maksud merupakan perdebatan mengenai apakah perilaku yang menghalangi harus merupakan tindakan yang ditentukan atau apakah maksud itu terjadi sebagai akibat dari keadaan yang kebetulan saja. Mengenai apakah konflik hanya dapat ditujukan kepada tindakan yang terbuka, be-



berapa definisi, misalnya, meminta adanya tanda-tanda pertikaian atau pertarungan terbuka sebagai kriteria bagi eksistensi konflik.

Pengakuan dan pemahaman konflik mengakui adanya kesadaran (persepsi), oposisi, kelangkaan, dan halangan. Selanjutnya, diasumsikan bahwa konflik merupakan tindakan yang ditentukan, yang dapat timbul pada tingkat yang tersembunyi atau terbuka. Definisi konflik sebagai suatu proses dimana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebarang usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustrasi pada B dalam usahanya untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya.

Konflik, Peran Keluarga dalam Kaitan dengan Organisasi

Kolaborasi sebagai usaha untuk mempertahankan hubungan yang produktif yang akan mengatasi ketidaksetujuan ketika bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan cara-cara yang kreatif, tujuan dan kebutuhan setiap orang dapat dicapai. Sehingga sebagai manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Dengan demikian konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Konflik biasanya diberi pengertian sebagai satu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih.

Perbedaan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang dari pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*), bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*). Perbedaan dikatakan sebagai konflik manakala perbedaan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang berten-tangan.

Selain itu, perbedaan itu juga dilakukan di atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan. Konflik pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan sosial, karena itu tidak ada masyarakat yang steril dari realitas konflik. Konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses

fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda, merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti. Karena konflik merupakan bagian kehidupan sosial, maka dapat dikatakan konflik sosial merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar. Bagi kebanyakan orang istilah konflik mempunyai konotasi negatif.

Organisasi yang efektif biasanya dianggap sebagai sekelompok individu terkoordinasi yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pandangan ini, konflik hanya merintangikan koordinasi dan kerja sama tim dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Munculnya Konflik dalam organisasi karena dorongan adanya konflik dalam keluarga itu sendiri sehingga disebut Konflik keluarga-kerja yang didefinisikan sebagai “*a form of inter-role conflict in which the role pressures from work and family domains are mutually incompatible in some respect. That is, participation in the family (work) role*” (Greenhaus dan Beutell, 1985: 77). Dari definisi ini diketahui bahwa konflik keluarga-kerja berkaitan dengan dua peran berbeda yang dilaksanakan pekerja, yaitu peran dalam keluarga dan dalam pekerjaan. Dalam melaksanakan peran itu, beberapa aspek yang terdapat pada kedua peran itu tidak saling sesuai. Jadi, pekerja mungkin saja tidak mengalami konflik keluarga-kerja jika tidak ada aspek yang saling tidak sesuai yang dialaminya dalam melakukan peran dalam keluarga dan dalam pekerjaan.

Konflik keluarga-kerja dapat membuat pekerja mengalami ketegangan dan kelelahan (Netemeyer, Boles, dan McMurrian, 2004). Terkait dengan itu, begitu ada penurunan sumberdaya emosional, pekerja akan mengalami perasaan lelah, kehilangan kepercayaan dan perhatian, serta frustrasi (Gaines dan Jermier, 1983). Dampaknya adalah bahwa pekerja yang mempersepsi ada konflik antara tanggung jawab yang terkait dengan kerja dan komitmen terhadap keluarga dan/atau sosial maka tanggung jawabnya untuk bekerja menjadi berlebihan (Hyman dkk. sebagaimana dikutip oleh Karatepe dan Tekinkus, 2006).

Jika individu dihadapkan pada peran-peran yang tidak sesuai, misalnya terkait dengan kendala fisik dan waktu, ia harus memprioritaskan satu peran (Larson dan Fukami sebagaimana dikutip oleh



Caykoylu, Egri, dan Havlovic, 2007). Makin rendah tingkat konflik peran makin baik kualitas kehidupan kerja (Baba dan Jamal, 1991), yang kemudian berpengaruh pada kepuasan kerja. Terkait dengan itu, beberapa contoh hasil penelitian konflik tersebut menyatakan bahwa konflik antara keluarga dengan kerja dapat berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja.

Boles dan Babin (1996) meneliti pada pekerja *front-line* untuk jasa makanan menunjukkan ada kaitan yang negatif antara konflik keluarga-kerja dan kepuasan kerja pekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Caykoylu, Egri, dan Havlovic (2007) terhadap pekerja medis. Pekerja *front-line* bank mengenai kaitan konflik keluarga-kerja dan kepuasan kerja juga menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan. Sebaliknya, hasil penelitian terhadap manajer senior keuangan di kantor pemerintah lokal di Israel menunjukkan bahwa konflik keluarga-kerja dan kepuasan kerja berkaitan negatif tetapi tidak signifikan. Ia juga menemukan efek interaksi antara konflik keluarga-kerja dan inteligensi emosional terhadap kepuasan kerja bersifat positif tapi tidak signifikan.

Beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu konflik memberikan efek negatif namun adakalanya justru memberikan efek yang positif, tergantung dari sejauh mana seseorang dapat menyikapi konflik tersebut dan justru sebaliknya akan memberikan efek positif pada diri seseorang, bahkan ada pandangan yang lain tentang konflik. Pandangan yang satu ini berargumentasi bahwa konflik meningkatkan keefektifan dengan merangsang perubahan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Kegunaan Perbedaan dan Konflik Jika Disikapi Secara Positif

Konflik tak lepas dari kehidupan sehari-hari dari lingkungan yang kecil dalam keluarga hingga dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kita perlu tetap mengusahakan untuk meredakan konflik dari pemicu apapun. Penggambaran konflik dalam realita ragam kehidupan sehari-hari yang umumnya terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat kita lihat sebagai berikut:

Pada saat-saat awal hidup berkeluarga saling mengasihi dalam

kualitasnya yang tinggi. Dalam keluarga saling mencintai dengan pengorbanan yang tidak kecil, saling mencintai dalam iman, karena mencintai pasangannya dan anak demi cintanya. Sesuatu yang baru membuat dengan mudah melepas cinta yang begitu mengasihi. Tetapi dalam perjalanan waktu, kualitas kasih dapat merosot seiring persoalan yang dihadapi karena berbagai alasan juga dapat dipengaruhi oleh apa yang bisa terjadi di tengah masyarakat luas dan tidak terbiasa menyikapi dan disikapi sesama manusia dengan iman. Cinta keluarga tidak lagi berdasarkan kasih yang “walaupun” namun berubah menjadi kasih yang “karena”. Pola pikir atau *mind set* kita seharusnya terus mengatakan kasih untuk pasangan dan anak-anak yang dicintai tidak boleh dirusak oleh waktu atau hal apapun. Keindahan keluarga, cinta dan kasih dalam iman adalah permata yang tak dapat digantikan bahkan ketika permata dalam keluarga telah didapatkan, dapat menerima permata dari luar. Sebab, jika dalam keluarga kita bisa saling mengasihi dengan kualitas yang tinggi, tidak diragukan lagi kita dapat berhasil di tengah masyarakat.

Konflik dalam tertib berlalu lintas dapat kita lihat saat orang mengendarai motor atau mobil, saling berebut jalan. Pengendara motor merenggut hak pejalan kaki dengan melewati trotoar di saat kemacetan terjadi, ketidaksabaran membuat orang melanggar peraturan dan hak-hak orang lain. Para pengemudi mobil menerobos lampu merah ketika dilihatnya jalanan sepi dan tak jarang banyak diantara mereka yang tidak mengurangi kecepatan ketika melihat penyeberang jalan menginjakkan kakinya pada *zebra cross*. Rasanya begitu sulit untuk mematuhi peraturan yang ada dan sulit menghargai hak orang lain. Hal ini juga dapat memicu konflik. Hiruk pikuk di jalanan, menyebabkan stress karena kepenatan seharian bekerja membuat kepala terasa pusing dan kemarahan mungkin muncul dalam hati.

Dalam lingkungan pekerjaan, pimpinan dapat melakukan semena-mena terhadap karyawan rendah. Pandangan bahwa karyawan rendah adalah seseorang yang derajatnya berada jauh di bawah pemimpin membuat hal itu tidak heran dilakukan. Kalau anda yang menjadi atasan bisa jadi melakukan sikap yang serupa. Jika setiap orang bertindak dan berpikir seperti itu, siapa yang akan



dijadikan suri teladan. Jika anda memiliki sikap rendah hati, anda bisa menolak untuk menjadi serupa dengan dunia yang seperti itu dan membuat dunia yang baru, di mana dalam lingkungan pekerjaan setiap pekerja dan atasan menempati posisi yang sama dalam hal martabat diri. Dunia yang damai adalah di mana harkat dan martabat manusia dijunjung dan dihormati, siapapun tidak peduli latar belakang dirinya, dia layak untuk dihargai.

Jika anda pulang ke tengah keluarga suasana yang terjadi di luar rumah yang sudah anda alami sepanjang hari dapat terbawa. Anda seperti benda yang harus diperlakukan hati-hati, salah sedikit saja bisa menimbulkan kemarahan yang tidak diperlukan. Sikap terhadap isteri atau suami dan anak tidak lagi menjadi lembut, apalagi terhadap pembantu rumah tangga, sikap anda seolah berubah seratus delapan puluh derajat, menjadi kurang hikmat. Dalam kondisi tersebut kekerasan mudah saja terjadi. Amarah dan kekesalan melupakan seseorang untuk melampiaskan amarah dalam dirinya yang tidak diketahui orang lain.

Hal umum yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran dalam keluarga adalah uang. Ayah dapat bertengkar dengan si ibu atau anak ketika uang terbatas. Setiap anggota keluarga ingin keinginannya terpenuhi, bukan kebutuhannya. Misalnya, ayah ingin membeli televisi, ibu ingin membeli mesin cuci, sedangkan anak ingin dibelikan sepeda motor. Sangat disayangkan jika harmonisasi keluarga harus terganggu karena uang. Terbatasnya uang bukanlah hal mutlak pemicu konflik, jika kita pandai menguasainya.

Berlawanan dengan HAM, bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Jangan-jangan semangat demi kepentingan pribadi dan kelompok, perlakuan tidak jujur, tidak adil yang anda alami dapat menumpulkan kepekaan sosial. Sehingga dalam keluarga pun anda bisa tidak jujur dan tidak adil, kasih sayang anda dapat menjadi egoistis, demi kesenangan sendiri.

Mengacu hal tersebut di atas, akan mempengaruhi cara pandang dan akan membantu dalam menyikapi konflik. Adapun upaya yang dilakukan untuk menyikapi konflik sebagai berikut:

1. Memandang konflik sebagai hal yang wajar.

Pandangan hubungan manusia menerima konflik sebagai peris-



tiwa yang wajar dalam semua kelompok dan organisasi dan karena konflik tidak terelakkan maka aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik (Robbins, 2003:137). Konflik perlu dipandang sebagai hal yang wajar yang dapat terjadi karena tidak ada orang yang sama di dunia ini. Tuhan menciptakan setiap orang dengan kekayaan-Nya tersendiri. Watak, pandangan, dan sikap terhadap hal yang sama dapat berbeda, selera dan cita-cita pun dapat berbeda antar setiap orang. Justru perbedaan inilah yang memberikan kita pengetahuan akan gambaran dunia berbeda, memberikan inspirasi dari berbagai perspektif yang berbeda sebab muncul dari setiap individu dengan karakternya masing-masing.

2. Memerlukan rasa damai dan sejahtera.

Manusia di mana tempat kita hidup memerlukan kebutuhan akan adanya rasa damai. Keluarga dan masyarakat perlu sadar bahwa anggotanya menginginkan rasa sejahtera yang terpenuhi. Rasa damai yang tidak terpenuhi dapat menjadi sumber konflik, karena tiap individu seolah mencari kedamaian tersebut. Maka kesejahteraan bersama ini justru yang perlu selalu dijadikan sebagai acuan bersama dalam menyikapi perbedaan dan konflik. Kita tidak dapat melupakan bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada kepentingan pribadi dan ada kepentingan bersama, jika saja setiap orang bisa dengan rendah hati menaruh kepentingan pribadinya di bawah kepentingan bersama, alangkah rasa damai itu dapat diperjuangkan. Rasa damai membuat kehidupan lebih maju. Tidak ada pihak yang merasa tertindas, terintimidasi yang dapat menghambat kemajuan.

3. Bersedia masing-masing orang dalam suasana dialog antara *partner* yang setara.

Komunikasi merupakan jembatan musyawarah untuk menemukan kembali kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi simbolik yang merupakan fondasi komunikasi konstruktif, komunikasi aktif atau dialog. Para pihak bebas berekspresi dalam menyampaikan pesan positif kepada pihak lain agar dapat menghilangkan sikap yang saling curiga. Apabila pesan positif telah diterima antar pihak yang berkon-



flik, maka kecurigaan akan punah sehingga kepercayaan akan terbangun dengan baik. Dengan dialog komunikasi yang kondusif, para pihak dapat bersama-sama saling bertukar pikiran melihat kembali kepentingan bersama yang mungkin saja sudah buram akibat ego masing-masing.

4. Bersedia berdialog untuk kepentingan bersama.
Untuk bersedia melakukan sesuatu diperlukan kerendahan hati dan kemauan. Menyadari keberadaan diri kita berguna, sekecil apapun usaha yang kita lakukan terlebih penting setiap individu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama. Bersedia untuk berdialog demi kepentingan bersama yang lebih luas. Di tengah masyarakat ada kepentingan kelompok, golongan, yang diperjuangkan. Hal ini dapat menjadi sumber konflik jika masing-masing mementingkan keinginannya sendiri. Maka perjuangan mereka harus diarahkan agar terkait dengan nilai-nilai yang menyangkut kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama hanya tercapai bila hormat akan martabat manusia dijunjung tinggi, keadilan dan kebenaran ditegakkan.
5. Perjuangan diri atau kelompok tidak boleh melawan HAM.
Bersikap positif dalam menyikapi konflik berarti mau menerima bahwa perjuangan diri atau kelompok tidak boleh berlawanan dengan HAM, bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Sekecil apapun konflik yang terjadi tidak boleh melewati batas HAM bagi setiap manusia. Menerima bahwa setiap orang memiliki martabat yang patut dijunjung dan dihormati, akan membuat kita berjalan dalam perjuangan dengan arah yang benar atau jalan yang lurus. Konflik bukan berarti perpecahan dan pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki manusia, kita perlu memandang setiap orang berharga.
6. Kerendahan hati.
Kerendahan hati berkaitan dengan penguasaan diri. Orang yang dapat menguasai diri seringkali disebut lebih dari pemenang, karena kerendahan hati menempatkan kita mengalahkan ego yang harusnya diperjuangkan. Kerendahan hati meninggalkan pandangan dan sikap yang sempit dan mau memperhitungkan kepentingan yang benar dan adil dari pihak lainnya. Setiap

orang perlu mendapat porsi yang adil yang seharusnya tidak dapat dicuri oleh siapa pun.

7. Kasih sayang untuk memaafkan.

Dibutuhkan kasih dan sayang untuk memaafkan. Kasih menutupi kita akan kesalahan. Kita perlu memandang selayaknya diri pribadi, orang lain juga berhak dimaafkan dengan frekuensi yang tidak terukur. Ini semua adalah cakupan yang perlu kita hayati untuk menyikapi perbedaan dan konflik secara positif.

Mari kita songsong hari esok dengan mengembangkan kemampuan kita untuk hidup dalam diri kita, persaudaraan sejati dalam keluarga dan di tengah masyarakat.

Penutup

Konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi harus disikapi dengan cara-cara yang tepat. Upaya menyikapi konflik antara lain memandang konflik sebagai hal yang wajar dengan rasa damai dan sejahtera, dialog antara *partner* dalam suasana kesetaraan, bersedia berdialog bagi kepentingan bersama, memperjuangkan kepentingan tidak boleh melanggar HAM, kerendahan hati, serta bersedia memaafkan dengan penuh kasih sayang. Dengan berbagai upaya tersebut, mencerminkan cara pandang dan cara menyikapi konflik. Semangat persatuan dan keutuhan perlu dijunjung demi kesejahteraan bersama yang akan dinikmati bersama. Hidup damai dengan semua orang dapat menjadi tujuan kita bersama.§

Daftar Pustaka

- Baba, V.V dan Jamal, M. (1991). "Routimization of Job Context and Job Content as Related To Employees Quality of Working Life: A Study of Canadian Nurses". dalam *Journal of Organizational Behavior*.
- Babin. (1996). *Exploring The Psychodynamics of Consumer Shoplifting Behaviour*. American Marketing Association Conference Proceedings: Webster.
- Defleur, Melvin, dan Sandra J. Ball Rokeach. (1977). *Theories Of Mass Communication*. New York: David Mc. Kay Inc
- Frost, J.H. dan Wilmot, W.W. (1978). *Interpersonal Conflict*. Dubuque, Iowa: William C. Brown Publishers.
- Greenhaus, J.H. dan Beutell, N.J. (1985). *Sources of Conflict Between Work and Family Roles*. Academy of Management Review.
- Katz, Daniel dan Robert Louis Kahn. (1966). *The Social Psychology of Organization*. New York: Willey



- Luthans, Fred. (1973). *Cases and Study Guide to Accompany Luthans Organizational Behavior*. New York: Mc Graw Hill
- Mulyana, Deddy. (2006). *Komunikasi Organisasi*. PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Netmeyer, Richard G. James S. Boles dan Robert Mc Murrian. (1996). *Development and Validation of Work- Family Conflict and family work conflict scales. Journal of Applied Psychology*.
- Robbins, Stephen. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samovir, Porter, McDaniel. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya edisi 7*. Jakarta: Salemba Humanika.



MENCEGAH KONFLIK MELALUI KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

Agustina Zubair

Komunikasi bukan panacea, bukan satu-satunya obat mujarab pemecah masalah atau konflik yang terjadi dalam hubungan antarpribadi, antarkelompok atau antaretnik. Bagaimanapun ketika terjadi konflik, orang akan menoleh ke peran komunikasi, apakah komunikasi sudah menjalankan tugas dan fungsinya? Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan paparan tentang prinsip-prinsip komunikasi antarpribadi yang sudah dipraktekkan dengan sangat baik oleh orang Cina di Bangka ketika dia berinteraksi dengan orang Melayu Bangka sehingga kita tidak pernah mendengar terjadinya konflik antara Cina dan Melayu di Bangka.

Dua pribadi yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang sama sekalipun tidak jaminan akan dapat menjalin hubungan secara efektif jika secara pribadi tidak memperdulikan prinsip-prinsip dalam komunikasi antarpribadi. Untuk tercapainya sebuah tujuan dan kepentingan dengan cara baik, mengapa harus membiarkan hambatan menjadi dominan dan diselesaikan dengan kekerasan baik psikis maupun fisik dengan efek konflik merugikan yang berkepanjangan. Komunikasi telah menyediakan caranya, terbukti bisa digunakan dan hubungan menjadi harmonis.

Kata kunci: prinsip komunikasi antarpribadi, kompetensi komunikasi, efek konflik

Pendahuluan

Membaca topik komunikasi konflik mengingatkan penulis pada prinsip-prinsip yang melekat pada komunikasi. Salah satunya adalah prinsip yang menyebutkan bahwa komunikasi bukan panacea, maksudnya adalah komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan secara ampuh untuk menyelesaikan masalah. Walaupun memang dalam kenyataannya tidak sedikit persoalan atau konflik baik itu antar personal maupun antar kelompok dan antar etnik diawali atau disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi.

Prinsip komunikasi bukan panacea menjadi semacam kerendahan hati intelektual ilmu komunikasi, setelah sebelumnya dengan lugas memaparkan betapa pentingnya arti komunikasi dalam kehidupan manusia, bahwa komunikasi sesuatu yang selalu serba hadir, bahwa manusia tidak bisa tidak berkomunikasi tetapi kemudian tetap menyadari bahwa selain komunikasi ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi penyebab sebuah konflik. Tetapi sebagai orang komunikasi penulis tetap akan memaparkan bahwa memang komunikasi itu faktor penting yang secara filsafat memiliki tujuan luhur yaitu menciptakan dunia yang harmoni.

Konteks komunikasi yang penulis angkat dalam artikel ini adalah komunikasi antarpribadi karena bagaimanapun pihak yang berinteraksi adalah orang-orang yang sebetulnya adalah dirinya sendiri. Walaupun memang setiap orang akan membawa latar belakang baik yang bersifat demografi, agama maupun sosial budaya. Prinsip komunikasi yang lain mengatakan bahwa semakin mirip latar belakang sosial budaya antara dua orang atau kelompok yang sedang berkomunikasi semakin efektif komunikasi yang terjalin. Dalam arti tujuan masing-masing pihak yang sedang berkomunikasi bisa tersampaikan dengan baik sekaligus bisa diterima sesuai dengan harapan.

Masalahnya tidak semua pihak-pihak yang berkomunikasi bisa memilih dengan siapa dia harus berkomunikasi, Jika seseorang menginginkan kepentingan atau tujuannya tercapai maka dia harus siap berhadapan dengan siapapun dengan latar belakang sosial budaya yang beragam. Dua pribadi yang sedang berinteraksi dengan

latar belakang sosial budaya yang sama sekalipun tidak bisa dijamin akan terjalin komunikasi yang efektif. Hubungan antara dua pribadi menurut penulis sudah bisa dikategorikan hubungan antarbudaya. Karena tidak pernah ada dua orang yang memiliki pemikiran, perasaan dan kepentingan yang persis sama. Artinya memang dibutuhkan kompetensi untuk mengelola sebuah hubungan. Kompetensi ini tumbuh dan terbentuk pada diri seseorang berdasarkan pengalamannya selama berinteraksi dengan orang lain. Dibutuhkan kemauan dan kerelaan terlebih dahulu pada diri seseorang untuk mengenal orang lain baik secara sosial, agama dan budaya. Pengenalan itu menjadi pengetahuan bagi dirinya untuk bisa memprediksi seperti apa respons yang akan diterima dari orang lain. Untuk itu dalam komunikasi antarpribadi terdapat prinsip-prinsip yang bisa dipelajari oleh seseorang agar dia bisa memiliki kompetensi menjalin hubungan dengan orang-orang lain secara harmoni. Hal ini bukan sesuatu yang bersifat abstrak sebetulnya karena nyatanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya mungkin tanpa kita sadari.

Pembahasan

Penulis akan memberikan contoh bagaimana Orang Cina di Bangka dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan orang Melayu di Bangka. Keberadaan orang Cina di Bangka adalah berkaitan dengan reaksi yang ditunjukkan oleh orang Cina ketika dia berkemauan seperti kelompok budaya yang dominan seperti belajar bahasa, tata cara berbusana, berbicara, dan condong bergaul dengan kelompok budaya Melayu, sehingga meminimalkan perbedaan latar belakang budaya yang terbawa oleh individu minoritas. Apa yang dicapai masing-masing orang dapat dipandang sebagai sesuatu yang terbentuk dari proses pembelajaran, dari proses pengalaman yang panjang, yang disampaikan dan dipelajari melalui interaksi dalam keluarga dan lingkungannya.

Reaksi adaptasi budaya ini diperkuat oleh motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama dari berdagang yang tidak bisa orang Cina ini lakukan tanpa berinteraksi dengan orang Melayu Bangka. Sehingga orang Cina akan mengerahkan seluruh kemampuan dan pengetahuan komunikasinya dalam membangun dan



mempertahankan hubungannya dengan orang Melayu. Sebuah motivasi yang disebut kemampuan berbudaya ini direpresentasikan oleh kesadaran orang Cina akan perbedaan budaya yang dibawanya sebagai minoritas dan orang Cina memiliki pengetahuan akan kedua budaya tersebut yaitu budaya Melayu dan budaya Cina. Individu ini akan bersikap berbeda sesuai dengan situasi kelompok budaya yang dihadapinya, bilamana berhadapan dengan sesama kelompok budayanya ia akan menggunakan bahasa dan tata caranya sendiri, namun bila berhadapan dengan kelompok budaya dominan, ia akan mampu berbicara atau bersikap seperti mereka.

Reaksi adaptasi budaya yang dilakukan oleh orang Cina adalah melebur, orang ini memiliki pengetahuan mengenai budaya asalnya negeri Cina dan budaya baru Melayu. Reaksi tersebut melibatkan reaksi kelompok budaya Melayu, jadi proses adaptasi budaya yang menimbulkan reaksi dan aksi ini sangat dinamis melibatkan banyak motivasi termasuk motivasi ekonomi. Jika orang Cina ingin usaha dagangnya berhasil dan berkembang maka dia akan berusaha melakukan adaptasi melebur ke dalam budaya Melayu agar usahanya tidak mengalami hambatan. Orang ini akan berusaha mengembangkan kompetensi komunikasinya agar bisa diterima oleh orang Melayu. Menjadi menarik untuk menggali, mengamati dan memahami bagaimana aktivitas perilaku komunikasi tertentu yang secara aktif dipilih individu-individu dari orang Cina dalam hubungan antarpribadi dengan orang Melayu guna mencapai tujuannya.

Dalam artikel ini penulis akan fokus pada konteks komunikasi antarpribadi, karena ingin melihat bagaimana orang Cina ini secara pribadi berinteraksi dengan orang Melayu di Bangka. Komunikasi antarpribadi menurut Steven A. Beebe, Susan J. Beebe dan Mar V. Redmond (1996: 6) adalah *the process of interacting simultaneously and sharing mutual influence with others person*. Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi secara simultan dan saling mempengaruhi dengan orang lain.

Komunikasi antar pribadi ini menurut Beebe & Beebe adalah bentuk spesial dari *human communication* yang terjadi ketika berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi secara simultan artinya kedua belah pihak

yang berkomunikasi bertindak pada informasi yang sama dan pada saat yang sama. Saling mempengaruhi artinya kedua belah pihak dipengaruhi oleh interaksi yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka, perasaan dan cara mereka menginterpretasi informasi yang mereka pertukarkan. Sekali lagi Beebe & Beebe menekankan bahwa *the simultaneous interaction and mutual influence may or may not involve words*. Interaksi secara simultan dan saling mempengaruhi antara dua pihak yang sedang berinteraksi mau tidak mau meliputi kata-kata.

Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa seseorang dari sosial dan budaya yang berbeda jelas memiliki perbedaan tentang bagaimana masing-masing melihat suatu realitas. Komunikasi antarpribadi merujuk pada komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (2007:187) mengutip Berger dalam bukunya *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* menjelaskan bahwa konteks komunikasi antarpribadi banyak membahas tentang bagaimana suatu hubungan dimulai, bagaimana mempertahankan suatu hubungan dan keretakan suatu hubungan.

Artikel ini berkaitan dengan bagaimana dari hubungan antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka ini, Orang Cina Bangka berhasil membangun kompetensi komunikasi antarpribadi selama hubungannya dengan orang Melayu Bangka. Hubungan antara dua orang dijelaskan oleh Littlejohn (2002: 234) sebagai serangkaian harapan antara dua orang terhadap perilaku yang didasarkan pada pola-pola interaksi diantara mereka berdua. Masalah hubungan ini sudah diakui sangat berarti dalam komunikasi antarpribadi.

Pembahasan

Prinsip-prinsip dalam komunikasi antarpribadi dijelaskan oleh Julia T. Wood (2010:27) dalam bukunya *Interpersonal Communication: Everyday Encounters*. T. Wood menjelaskan mengenai delapan prinsip-prinsip dalam komunikasi antar pribadi yaitu Prinsip 1: *We Cannot Not Communicate*, Prinsip 2: *Interpersonal Communication Is Irreversible*, Prinsip 3: *Interpersonal Communication Involves Ethical Choices*, Prinsip 4: *People Construct Meanings in Interpersonal Communication*, Prinsip 5: *Meta-communication Affects Meaning*, Prinsip 6: *Interpersonal Communication De-*



velops and Sustains Relationship, Prinsip 7: *Interpersonal Communication Is Not a Panacea*, dan Prinsip 8: *Interpersonal Communication Effectiveness Can Be Learned*.

Prinsip yang menyangkut etik yaitu prinsip yang ketiga diaplikasikan oleh orang Cina Bangka sedemikian rupa saat melakukan hubungan dengan orang Melayu Bangka. Etik adalah bagian dari filosofi yang fokus pada prinsip moral dan *code of conduct*. Isu-isu etik fokus pada baik dan benar. Karena komunikasi antarpribadi tidak bisa ditarik kembali dan mempengaruhi satu sama lain, hal ini memiliki implikasi etik. Orang Cina Bangka tanpa disadari selama melakukan hubungan dengan orang Melayu fokus pada prinsip moral seperti mengutamakan kejujuran, kepercayaan, keseimbangan, mengalah, bersikap sopan dan menghargai nilai-nilai budaya orang Melayu. Orang Cina sangat mengatur dan mengelola apa yang dia katakan dan lakukan mempengaruhi perasaan, persepsi, pikiran mereka tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berpikir tentang orang Melayu. Orang Cina Bangka tampak selalu berusaha untuk bertanggungjawab dengan berhati-hati mengenai tuntunan etik dalam berkomunikasi. Walaupun bisa dikatakan mereka melakukan itu dengan satu kepentingan atau tujuan tertentu yaitu kelanjutan mereka dalam jangka panjang.

Dalam hubungan antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka, orang Cina Bangka lebih banyak mengaplikasikan prinsip ke enam yaitu *Interpersonal Communication Develops and Sustains Relationship*. Komunikasi antarpribadi adalah cara utama orang Cina Bangka dalam membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang Melayu Bangka. Orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka berinteraksi berbicara mengatur harapan dan pemahaman-pemahaman dari interaksi mereka, terdapat usaha-usaha dari orang Cina Bangka untuk menyesuaikan topik-topik dan gaya komunikasi yang sesuai maupun yang tidak sesuai dan sifat dari hubungan itu sendiri.

Orang Cina Bangka memiliki kompetensi tentang kapan dan bagaimana dan cara apa yang dapat dia perhitungkan satu sama lain, bagaimana orang Cina ini menangani ketidaksetujuan apakah dengan diam, mengalah dan melakukan pendekatan lagi atau lang-

sung menggunakan strategi untuk memperbaiki harmoni. Karena komunikasi tidak memiliki makna intrinsik, kitalah yang harus menghasilkan atau membangkitkannya dalam diri kita sendiri di dalam serangkaian interaksi.

Komunikasi juga membiarkan kita membangun atau membongkar sejarah individu dan kerjasama. Pada saat orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka berpikir dan merasakan, mereka menghasilkan pembagian makna untuk mereka sendiri, interaksi mereka dan hubungan mereka. Komunikasi juga merupakan alat utama dengan mana orang Cina ini melakukan perbaikan citra diri dan pemeliharaan citra diri. Komunikasi memberikan orang Cina ruang untuk mengekspresikan dan berbagi kesan diri, menjalinnya kedalam pembagian pemahaman dari kelanjutan hubungan.

Demikian pula orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka membangun makna melalui komunikasi diantara mereka. Tanpa disadari mereka mengaplikasikan prinsip yang ke empat yaitu *People Construct Meanings in Interpersonal Communication*. Signifikansi komunikasi dalam hubungan mereka tidak bisa dibohongi dalam kata-kata dan perilaku nonverbal. Makna muncul tergantung pada bagaimana orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka ini menginterpretasikan komunikasi. Untuk itu orang Cina Bangka menggunakan simbol *Fan Ngin* untuk menyebut orang Melayu Bangka yang maknanya adalah orang Melayu kalau berbicara struktur kalimatnya terbalik, tetapi jika di depan orang Melayu mereka akan mengatakan *Fan ngin* artinya adalah orang melayu, tidak lebih dari itu. Atau simbol dengan kata-kata "sama saja" (*Fan Ngin Tong Ngin Jit Jong*) untuk mengungkapkan bahwa Cina dan Melayu di Bangka sama saja, tidak ada yang dominan dan tidak ada yang menjadi subordinat.

Dalam komunikasi antarpribadi, antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka akan melakukan interpretasi satu sama lain. Ketika hubungan dimulai, orang Cina Bangka beranggapan konfrontasi dengan orang Melayu adalah sesuatu yang tidak perlu, mereka memilih simbol diam berdasarkan prinsip mengalah yang mereka yakini. Mereka memilih untuk menghindari dari argumentasi. Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan orang Melayu Bangka, orang Cina Bangka sudah berbagi makna mengenai men-



genai konflik. Orang Cina Bangka sudah memiliki pengalaman bagaimana mengatasi konflik jika itu terjadi.

Berdasarkan pengetahuannya mengenai karakter orang Bangka yang cukup keras, orang Cina akan memilih diam dan mengalah berdasarkan prinsip kalau kita baik maka orang laian akan baik. Kalau yang pertama dan kedua tidak baik maka yang ketiga pasti baik. Keyakinan ini menjadi dasar orang Cina Bangka dalam menghadapi perbedaan atau konflik dengan orang Melayu. Mereka selalu mengatakan kita hidup dalam satu pulau harus saling bersaudara.

Makna-makna dari anggapan tentang konflik sangat bergantung juga pada latar belakang budaya. Dengan latar belakang budaya Cina yang mengutamakan hidup damai dalam satu samudera atau satu pulau, atau prinsip hidup seimbang bertemu dengan prinsip-prinsip Islam mayoritas orang Melayu Bangka yang juga mengutamakan kerukunan membantu bagaimana antara dua etnis ini mengelola komunikasinya selama berinteraksi. Jadi latar belakang budaya Cina dan budaya Melayu mempengaruhi bagaimana kedua orang mengatasi konflik jika itu terjadi pada interaksi mereka selama mereka membangun dan mempertahankan hubungan .

Sementara prinsip ke lima *Metacommunication Affects Meaning* juga terjadi pada interaksi antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka. Metakomunikasi artinya komunikasi tentang komunikasi. Orang Cina Bangka selalu mengungkapkan kata-kata bijak tentang bagaimana orang Cina peduli dengan sopan santun, kejujuran dan perdamaian, orang Cina suka kedamaian dan harmoni, mengutamakan keseimbangan, menurut penulis mereka sebetulnya ingin mengungkapkan bahwa mereka adalah orang dengan karakter yang sangat positif bahkan intelek dan sangat berbudaya.

Tidak seperti *stereotype* selama ini bahwa orang Cina tidak punya etika dan menghalalkan segala cara. Hanya saja orang Melayu Bangka tidak menginterpretasikannya secara terbuka dan serius biasanya akan ditanggapi dengan bercanda, walaupun orang Melayu Bangka me-ngetahui ada makna lain, bentuk metakomunikasi mereka kadangkala disampaikan dengan serius dengan mengatakan: ”*Ya kami tahu kalian turunan orang baik-baik atau iya ya kalian tahu sopan santun*” atau dengan bercanda mengatakan ”*jangan takutlah*” kalau

dibilang bukan orang baik atau ”*nggak usah pamerlah.*” Orang Melayu memang lebih sering mengungkapkannya dengan bercanda selama itu tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu harga diri orang Melayu. Pernyataan-pernyataan orang Melayu tersebut adalah metakomunikasi karena mengkomunikasikan mengenai komunikasi nonverbal lawan bicara kita tersebut. Metakomunikasi bisa termasuk verbal dan nonverbal. Kita dapat menggunakan kata-kata untuk berbicara mengenai kata-kata orang lain atau tindakan nonverbal orang lain. Kita juga memetakomunikasikan secara nonverbal. Metakomunikasi nonverbal sering memperkuat komunikasi verbal.

Seperti yang diungkapkan oleh Beebe & Beebe (1996:10) komunikasi antar pribadi adalah *the process of interacting simultaneously and sharing mutual influence with others person*. Komunikasi antar pribadi merupakan proses interaksi yang berlangsung secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi antara orang Cina dan orang Melayu di Bangka merupakan proses interaksi secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Orang Cina yang memiliki karakter dasar serius dan tidak suka membuang waktu dengan mengobrol. Tetapi saat ini kita akan bisa melihat orang Cina Bangka menjadi suka mengobrol dan mau bercanda ketika berkomunikasi dengan orang Melayu.

Orang Melayu sendiri memang cenderung suka mengobrol dan kumpul-kumpul terutama orang laki-laki dan juga punya kecenderungan humor yang cukup tinggi. Menurut orang Cina Bangka orang Cina sekarang jadi suka ngobrol dan ikut menjadi malas seperti orang Melayu tidak mau susah dan ingin cepat untung, tidak mau ulet bekerja keras. Sebaliknya saat ini tidak sedikit orang Melayu yang sudah lama berinteraksi dengan orang Cina mengikuti cara kerja orang Cina, sekarang banyak pedagang orang Melayu yang sukses karena mau ulet dan bekerja keras.

Komunikasi antar pribadi ini menurut Beebe & Beebe (1996:6) merupakan bentuk spesial dari *human communication* yang terjadi ketika berinteraksi secara simultan dengan orang lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. *Human communication* adalah *“the process of making senses out of the world and sharing that senses with others.* “*Human Communication*” merupakan proses terbentuknya kesadaran akan du-



nia luar melalui penginderaan dan pembagian kesadaran tersebut dengan orang lain. Kita mempelajari dunia dengan mendengarkan, observasi, merasakan, menyentuh dan membaui dan kita bagi kesimpulan kita kepada orang lain. Komunikasi yang terjadi antara orang Cina dan Melayu Bangka merupakan bentuk *human communication* dimana kedua orang saling berbagi kesadaran tentang pengalaman interaksinya satu sama lain.

Kesimpulan

Orang Cina dan Melayu di Bangka telah melakukan interaksi secara simultan artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi bertindak pada informasi yang sama dan pada saat yang sama. Kedua orang ini juga kemudian saling mempengaruhi artinya kedua belah pihak dipengaruhi oleh interaksi yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka, perasaan dan cara mereka menginterpretasi informasi yang mereka pertukarkan. Sekali lagi Beebe & Beebe menekankan bahwa *the simultaneous interaction and mutual influence may or may not involve words*. Interaksi secara simultan dan saling mempengaruhi antara dua pihak yang sedang berinteraksi mau tidak mau meliputi kata-kata. Pada interaksi antara orang Cina Bangka dan orang Melayu Bangka juga terjadi interaksi secara simultan dan keduanya saling mempengaruhi selama membangun dan mempertahankan hubungan.§

Daftar Pustaka

- Beebe, Steven A. & Beebe, Susan J, Redmond, Mark V. (1996) *Interpersonal Communication Relating to Others*. USA: Allyn & Bacon A Simon & Schuster Company,
- Littlejohn W. Stephen and Foss A. Karen. (2005). *Theories of Human Communication, Eighth Edition*. Spain: Thomson Wadsworth.
- West, Richard, and Turner, H. Lynn. (2007). *Introducing Communication Theory*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Wood, Julia T. (2010). *Interpersonal Communication Everyday Encounters*. USA: Wadsworth.



MENCEGAH KONFLIK MELALUI KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI

Nurjanah

This research is focused to communication strategy in efforts to conflict finishing that are being happening between traditional fisherman and modrn fisherman. The fenomenant that will be reseached be identified as "How the problem solving approach in the conflict finishing between traditional fisherman and modern fisherman? How the communication strategy that has be done."

The yield of reseach shows that the finishing's approach conflict trough: 1) culture, finishing of conflict trough culture should contrive to wishing of society that be in effect the customary law the shape of ulayat right, 2) social, development of social group who have influence in the society, 3) economic, development of alternatif livelihood so that the fishermen are not only hanging on the sea for meet their need daily life, 4) love, socializes the well role who have been gone out by the government of regency, province, and center of government. The strategy which has done by Government on efforts to finish the conflict pass through per-suasif communication as negosiation, mediation, fasilities and diplomation, confrotative.

keyword: communication strategy, conflict, interpersonal communication

Pendahuluan

Konflik bisa muncul dalam banyak bentuk, dan hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, ia terjadi antara individu, kelompok dan antar orang-orang yang bekerja sama. Konflik adalah proses dinamis yang bisa dipercepat, dikembangkan dan diatur dengan pendekatan komunikasi bersama pihak-pihak yang terlibat. Konflik muncul ketika orang memandang orang lain, sebagai penyebab terhambatnya pencapaian tujuan mereka.

Salah satu daerah yang terjadi konflik sosial dalam memperebutkan sumber daya perikanan adalah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebagian besar penduduknya yang tinggal di daerah pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada umumnya merupakan nelayan tradisional dengan menggunakan alat tangkap *rawai*, jaring *ingsang*, *pukat* pantai, *langgai* dan *empang*. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka merupakan ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Dengan adanya nilai ekonomis yang tinggi dan didukung oleh kebijakan negara tentang modernisasi perikanan (*blue revolution*) telah mempengaruhi secara signifikan kondisi sumberdaya setempat. Para pemodal mulai menggunakan peralatan modern dengan mengintroduksi sejenis jaring *ingsang* (*gill net*) yang dioperasikan di dasar laut dan dengan menggunakan alat pendeteksi keberadaan ikan, dan setiap menarik jaring dipastikan karang-karang yang tumbuh akan tersapu oleh jaring. Jaring ini dikenal dengan nama jaring batu atau jaring *kurau*. Baik jaring batu maupun jaring *rawai* keduanya merupakan alat tangkap yang dioperasikan di dasar perairan. Sasarannya juga relatif sama yaitu ikan-ikan yang dikenal aktif di dasar perairan seperti ikan *kurau*, *malung*, *jenak*, kerapu, pari dan *kelampai*. Ikan-ikan ini harganya mahal di pasar lokal maupun ekspor.

Dampak semakin sulitnya memperoleh hasil tangkapan adalah terjadinya peningkatan kesenjangan, penurunan pendapatan, dan kemiskinan, serta kurangnya kesejahteraan di kalangan masyarakat nelayan tradisional. Kelangkaan sumberdaya perikanan, khususnya untuk jenis-jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan pasar yang prospektif serta alat tangkap yang dipergunakan merupakan faktor yang dianggap sebagai sumber pemicu konflik. Inten-



sitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penangkapan yang dipergunakan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya.

Teori Konflik

Teori konflik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik Dahrendorf (Ritzer, 2004:153) pada dasarnya masyarakat tidak dapat menghilangkan konflik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konflik menjadi fungsional dan mendukung terjadinya perubahan dalam proses perkembangan dan kemajuan. Timbulnya konflik disebabkan (1) sumber daya alam yang tidak merata (2) kesenjangan dalam memperoleh sumber daya alam (3) persaingan kepentingan antara kelompok dominan (pihak yang menguasai) dengan kelompok yang didominasi (pihak yang dikuasai).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian Republik Indonesia 1988 (dalam Kusnadi, 2002:1) untuk mengkaji fenomena konflik sosial pada masyarakat nelayan, intensitas konflik merupakan penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan yang lain). Struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.

Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya. Struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak. Sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan yang digunakan masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional.

Teori Komunikasi Persuasif

Dalam perspektif komunikasi, menurut teori kebutuhan ma-



nesia (Fisher, et al, 2001:8) berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia; fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran utama teori ini adalah pertama; membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tak terpenuhi, dan mengupayakan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua; agar pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Proses komunikasi paling penting di dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, salah satunya adalah dengan menggunakan metode komunikasi persuasi dalam konflik. Cara persuasif adalah dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik, maupun

Komunikasi persuasif secara umum mengandung arti suatu komunikasi dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kehendak penyampai pesan (Perloff, 2010:12). Di dalam persuasi digunakan cara-cara tertentu sehingga orang mau melakukan sesuatu dengan senang hati tanpa paksaan. Kesediaan itu timbul dari dalam dirinya sebagai akibat adanya dorongan atau rangsangan tertentu yang menyenangkan.

Rancangan sebuah strategi komunikasi merupakan sebuah model seperti yang dirumuskan oleh Harold Lasswell, (dalam Effendy, 2005:33) menjelaskan (*statement*) siapa mengatakan apa melalui *channel* apa dan apa yang dapat mempengaruhinya?

Strategi Manajemen Konflik

Untuk membantu memahami konflik yang terjadi, intervensi yang tepat akan melibatkan strategi penyelesaian dan resolusi konflik. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marc Howard Ross, (1993:7-8) strategi manajemen konflik dapat dilakukan dengan dua pendekatan teori yaitu: Pertama, teori struktural yang memandang bahwa perbedaan kepentingan sulit untuk dijematani sehingga diperlukan tindakan unilateral atau bantuan pihak ketiga sebagai perantara pihak-pihak yang bertikai. Dari teori ini, muncullah

strategi yang dikenal sebagai strategi *self-help* dan strategi *third party decision making*. Metode ini seringkali dipakai ketika satu pihak menggunakan berbagai tindakan pembalasan untuk melawan pihak lain, dan menawarkan pilihan-pilihan yang cukup penting bagi pihak yang lemah.

Kedua, teori psikokultural memfokuskan pada proses yang bisa mengubah persepsi, atau mempengaruhi hubungan antara kedua pihak yang bertikai. Teori ini memandang bahwa kepentingan-kepentingan antar pihak lebih bersifat subyektif dan dapat diubah. Dari teori ini diturunkanlah suatu strategi yang dikenal sebagai strategi *joint problem solving* yang merupakan strategi manajemen konflik dalam bentuk tindakan bersama antara pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah.

Metode-metode yang terdapat dalam strategi *joint problem solving* yaitu dengan cara identifikasi kepentingan, pembobotan kepentingan, bantuan dan dorongan dari pihak ketiga, komunikasi efektif, dan pembuatan kesepakatan antar kedua pihak untuk tetap menjaga perdamaian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan informasi yang diperlukan. Kemudian observasi partisipan untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian di lapangan. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya, diolah dan dianalisis secara deskriptif atau kualitatif sesuai dengan materi.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Faktor mendasar yang menyebabkan konflik terpelihara diidentifikasi menjadi empat bagian:

1. Budaya

Secara kultural, suatu komunitas memiliki nilai-nilai yang berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan atau interaksi sosial, baik hubungan dengan alam maupun sesamanya. Untuk



membedakan masyarakat dengan satuan sosial lainnya, Koentjaraningrat 1990 (dalam Satria 2002:45) memaknai masyarakat sebagai suatu komunitas. Satuan sosial tersebut mencakup kerumunan, golongan sosial, kategori sosial, jaringan sosial, kelompok, himpunan, dan komunitas. Sementara unsur pengikat tersebut mencakup pusat orientasi, sarana interaksi dalam komunikasi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional. Hubungan komunitas dengan alam dalam konteks konflik ini adalah hubungan antara komunitas nelayan tradisional dengan sumberdaya perikanan. Bila keberadaan nilai-nilai ini tidak diakui oleh nelayan pendatang, maka yang terjadi adalah munculnya konflik.

Nelayan tradisional telah mengklaim wilayah tangkap mereka sebagai wilayah hukum adat laut atau hak ulayat laut. Wilayah hukum adat nelayan tradisional Kecamatan Bantan memiliki batas wilayah secara alami yaitu dari Tanjung Jati sampai Tanjung Sekodi ke arah laut sejauh 12 mil. Jarak 12 mil ini mereka tentukan berdasarkan lamanya berlayar dengan kecepatan angin. Dalam wilayah hukum adat mereka telah ditentukan aturan penggunaan alat tangkap, waktu tangkap dan upacara ritual sehubungan dengan pelestarian sumberdaya perikanan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Seperti acara adat dan ritual yang rutin dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional yang dilakukan setiap setahun sekali pada bulan *Muharram* atau istilah kampung setempat bulan *surau* dikenal dengan istilah *Semahan*. Dalam upacara tersebut bukan berarti membawa *sesajen* berupa makanan lalu dibawa ke laut tanpa dimakan, akan tapi makanan dibawa untuk dimakan bersama warga yang datang, dan disitulah bisa terjadi komunikasi antara warga masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibicarakan untuk kepentingan bersama.

Penyelesaian konflik melalui pendekatan budaya harus mengacu pada keinginan dari masyarakat yaitu diberlakukan hukum adat setempat berupa pemberlakuan hak ulayat laut di wilayah tersebut. Hak ulayat laut adalah seperangkat peraturan atau praktik pengelolaan atau manajemen wilayah laut dan sumber-

daya yang terkandung didalamnya. Perangkat peraturan ini menyangkut hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi yang ada di wilayah laut. Satu-satunya yang diinginkan nelayan *rawai* adalah jaring batu tidak beroperasi di wilayah itu, yaitu dari Tanjung Sekodi sampai Tanjung Jati.

2. Sosial

Fenomena yang terjadi ketika nelayan jaring *batu* beroperasi dalam waktu dan tempat yang sama. Nelayan *rawai* beroperasi di siang hari dan nelayan jaring *batu* beroperasi siang dan malam. Konflik pemanfaatan timbul karena pengguna sumberdaya berkompetisi untuk menggunakan sumberdaya yang sama dalam ruang laut yang sama, dan tidak sesuai satu dengan yang lain (Dahuri et al., 2001:46).

Intensitas konflik ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penangkapan yang digunakan nelayan, keterbatasan teritorial distribusi spesies, dan jumlah nelayan yang memperebutkannya (Kusnadi, 2002:76). Nelayan modern dengan konstruksi yang mampu menyapu area tangkap yang lebih luas, memiliki laju tangkap yang lebih tinggi dibanding *rawai*, sehingga dalam setiap operasi penangkapan, jaring batu mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Nelayan *rawai* mengklaim jaring *batu* sebagai alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem dasar perairan. Pertama, sulitnya nelayan *rawai* mendapatkan ikan ketika jaring *batu* beroperasi. Kedua, jaring *batu* membawa karang, kayu sebagai tempat perlindungan dari dasar perairan pada saat proses pengangkatan jaring. Dengan adanya fakta tersebut alat tangkap jaring batu dianggap merupakan penyebab kerusakan ekosistem perairan.

Solusi konflik antara kelompok nelayan di Kecamatan Bantan dilakukan strategi pendekatan sosial dengan mengembangkan kelompok sosial masyarakat yang memiliki pengaruh di masyarakat. Peranan sosial, diperlukan suatu sistem komunikasi dan interaksi sosial dalam komunikasi untuk mengeliminir konflik yang terjadi antarnelayan.



Di sinilah peran lembaga-lembaga sosial baik formal maupun informal sebagai media interaksi komunikasi sosial pada kelompok masyarakat untuk pengembangan kelompok sosial dalam penyelesaian konflik.

3. Ekonomi

Kegagalan kebijakan pembangunan pedesaan, modernisasi perikanan, dan program-program pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan nelayan; kesulitan menciptakan peluang-peluang kerja nonperikanan atau diversifikasi usaha perikanan, dan terbatasnya sumber daya ekonomi lainnya akan semakin meningkatkan ketergantungan nelayan terhadap hasil laut. Akhirnya, tekanan-tekanan terhadap sumber daya perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengangguran di desa, sehingga kegiatan nelayan menjadi satu-satunya alternatif kerja yang tersedia.

Pendekatan ekonomi adalah salah satu faktor yang paling penting dalam upaya penyelesaian konflik pada kelompok nelayan di Kecamatan Bantan, pendekatan ini merupakan upaya dalam menanggulangi kemiskinan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bentuknya berupa pengembangan mata pencaharian alternatif sehingga nelayan tidak hanya tertumpu pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pemberian bantuan kepada buruh nelayan jaring batu berupa dana bergulir dengan tingkat bunga yang rendah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Program BUMD merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan berupa modal usaha kecil, mikro di bidang tangkap, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, program pengembangan usaha kecil dan koperasi, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Dengan kondisi demikian, maka BUMD dapat dikembangkan di lingkungan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan perikanan budidaya.

4. Hukum

Konflik yang terjadi antara nelayan sebenarnya dapat diselesaikan apabila aparat penegak hukum dapat menjalankan



tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum harus diberlakukan secara adil terhadap siapapun bagi mereka yang melanggar hukum. Para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui proses pengadilan. Selanjutnya pemerintah dan aparat terkait juga harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan, proses penyelesaian konflik dari jalan hukum tidak dapat dilaksanakan, karena antara kedua belah pihak masing-masing berbeda pendapat dan tidak ada yang mau mengalah, ditambah aparat yang tidak tegas dalam melaksanakan proses hukum.

Bagi nelayan jaring batu, apa yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, karena alat tangkap yang digunakan termasuk alat tangkap yang selektif dan tidak melanggar batas wilayah. Sementara bagi nelayan tradisional, selain aparat penegak hukum tidak bertindak sesuai hukum bagi yang melanggar batas wilayah hukum, juga mereka mengklaim bahwa alat tangkap yang digunakan jaring *batu* adalah alat tangkap yang merusak lingkungan dan melanggar batas wilayah yang telah ditetapkan.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bengkalis No 52 Tahun 2003 tentang Pelarangan Pengoperasian Jaring *batu* atau *kurau* (*Bottom Gill Net*) di Wilayah Perairan 0-4 mil Kabupaten Bengkalis, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi bentrokan antarnelayan. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau mengeluarkan Keputusan Nomor 523.41/KL/SK-27 Tahun 2003 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring *batu* di Wilayah Perairan Propinsi Riau. Keputusan ini tidak melarang beroperasinya jaring batu, namun hanya menetapkan wilayah operasionalisasi jaring *batu* yakni di atas 6-12 mil (termasuk jalur II dalam Kepmentan 392 Tahun 1999) dengan ukuran mata jaring lebih dari enam *inchi* dan panjang jaring maksimal 2.500 meter ternyata tidak menjadi solusi dalam penyelesaian konflik karena pemilik jaring batu sering melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh instansi terkait.



Pada kenyataannya pelarangan ternyata belum memberikan kondisi yang kondusif bagi nelayan tradisional dalam mengakses sumberdaya perikanan. Tidak diindahkannya kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dikarenakan pengawasan dan penegakan hukum yang lemah pada tataran implementasi. Selanjutnya kewenangan kabupaten dalam pengaturan ini tidak mencakup seluruh kawasan tangkap nelayan tradisional Kecamatan Bantan, mengingat wilayah tangkap nelayan tradisional lebih jauh dari 4 mil yaitu hingga 12 mil dari pantai ke arah laut.

Strategi Komunikasi dalam Proses Penyelesaian Konflik

Proses komunikasi paling penting di dalam upaya penyelesaian konflik, salah satunya adalah penyelesaian komunikasi persuasi dalam konflik. Cara persuasif adalah dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Tujuan persuasi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat nelayan.

Penyelesaian konflik dalam masyarakat Kecamatan Bantan merupakan hal yang sangat sulit untuk mencapai suatu kesepakatan, karena masing-masing pihak saling mempertahankan pendapatnya. Bagi nelayan tradisional laut harus dijaga dari alat tangkap yang merusak lingkungan, karena laut merupakan jaminan hidup bagi anak cucu generasi selanjutnya, sedangkan bagi nelayan jaring batu laut tempat mencari ikan dan hanya untuk dieksploitasi habis-habisan tanpa memikirkan masa yang akan datang, karena bagi jaring batu kalau habis di daerah satu bisa berpindah ke daerah lain dimana ada ikan yang mempunyai nilai ekonomis.

Meskipun sulit, penyelesaian konflik mutlak diperlukan untuk mencegah: (1) semakin mendalamnya konflik, berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik, (2) semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik, karena biasanya konflik berkembang semakin mendalam dan meluas.

Menjalankan strategi komunikasi berarti mencari solusi tentang

bagaimana perubahan diciptakan, dan perubahan itu merupakan hasil dari proses komunikasi, baik komunikasi secara formal maupun informal. Penggunaan komunikasi secara sistematis dilakukan untuk mengimplimentasikan suatu program dalam meningkatkan partisipasi untuk mendapatkan dukungan terhadap terciptanya proses penyelesaian konflik yang terjadi di daerah ini.

Penyelesaian Secara Negosiasi

Masalah konflik yang berkepanjangan antara nelayan jaring *rawai* dengan nelayan jaring *batu*, memerlukan cara penyelesaian yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan dan kepedulian dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dianggap ada keterkaitannya dengan masalah ini, terutama dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan dan keputusan. Untuk penyelesaian konflik tersebut diperlukan adanya negosiasi, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fisher, dkk (2001:115) negosiasi merupakan suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.

Tujuan negosiasi yang dilakukan untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba mencari kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya dilakukan dengan pihak-pihak pembuat keputusan dan kebijakan, agar keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kepentingan bersama dan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi.

Konflik yang terjadi sejak tahun 1983 sampai sekarang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah atau keputusan dalam wilayah kewenangan pejabat tertentu, dukungan mereka terhadap proses penyelesaian sengketa dan hasilnya dapat sangat menentukan. Advokasi gagasan penyelesaian sengketa secara kooperatif, yang mengajukan manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak dari proses itu, membuka peluang untuk menyelenggarakan proses yang baik dengan dukungan dan keterlibatan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

Penyelesaian konflik melalui cara ini telah dilakukan terutama



antara kelompok nelayan jaring *rawai* dengan nelayan jaring *batu*, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan yang dianggap ada keterkaitannya dengan masalah ini, tapi hasilnya konflik tetap kembali terjadi karena salah satu pihak yang berkonflik tidak melaksanakan hasil yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan, karena tidak didukung oleh penerapan kebijakan secara tegas oleh pemerintah.

Penyelesaian Secara Mediasi

Pendekatan mediasi secara aktif dilakukan untuk mengusahakan penyelesaian terbaik bagi semua pihak, dan tidak serta merta menyerahkannya kepada para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa mediator bertanggung jawab atas substansi dan bukan hanya sekadar proses, dan upaya yang dilakukan tanpa mengorbankan netralitas, walaupun pada hakekatnya ada kecenderungan untuk memihak antara kedua belah pihak. Cara ini harus dilakukan oleh mediator guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

Sejak timbulnya konflik tahun 1983 sampai sekarang telah melakukan beberapa kali pertemuan, rapat-rapat, baik antar pihak yang berkonflik, instansi yang terkait, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi. Dari beberapa kali pertemuan dan rapat-rapat tersebut maka diperoleh beberapa kesepakatan antar pihak-pihak yang berkonflik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kesepakatan tersebut belum dapat menyelesaikan konflik yang terjadi karena masih adanya kecurigaan masyarakat nelayan baik dari nelayan *rawai* atau tradisional maupun nelayan jaring *batu* maupun antar nelayan dengan pemerintah.

Penyelesaian Secara Fasilitasi dan Diplomasi

Proses penyelesaian konflik pada dasarnya adalah proses komunikasi antara pihak yang bersengketa dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran komunikasi itu. Dalam proses komunikasi banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu pemerintah harus memahami dasar-dasar komunikasi serta ter-

ampil terhadap penerapan prinsip-prinsip dalam tatacara diskusi, negosiasi, dan diplomasi yang baik kepada kedua belah pihak yang berkonflik.

Pemerintah sebagai komunikator harus mempunyai kemampuan untuk melakukan wawancara, merancang proses kerja dalam penyelesaian masalah, memfasilitasi pertemuan, merancang dan melaksanakan lokakarya, pelatihan yang interaktif, dan mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda, serta memfasilitasi diskusi yang baik antara mereka.

Penyelesaian Konflik Secara Konfrontatif

Aksi sosial sering dilakukan oleh kedua belah pihak selama terjadi konflik, aksi tersebut mencakup berbagai usaha untuk mencoba menggalang kekuatan sosial untuk memperkuat posisi pihak sendiri serta memaksa pihak lawan untuk menerima posisi tersebut. Selain berhadapan dengan lawan sengketa, banyak aksi sosial yang terarah pada usaha-usaha untuk mengubah suatu keputusan atau kebijakan lembaga pemerintah yang menjadi pangkal sengketa.

Dengan adanya beberapa aksi tersebut, maka ada perhatian dari pemerintah dengan membentuk suatu Panitia Khusus (Pansus) untuk mengklarifikasi antara jaring *batu* dengan nelayan tradisional. Pansus tersebut bertujuan untuk mencari solusi agar permasalahan konflik dapat terselesaikan. Pansus diketuai oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Tujuannya untuk mendapatkan masukan-masukan dalam mengambil langkah kebijakan terkait konflik.

Kesimpulan

Pada hakekatnya kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat nelayan tradisional dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya kawasan pesisir dan laut harus memperhatikan dan mengadopsi norma-norma sosial budaya di tingkat lokal (keberadaan pranata lokal) agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kebijakan tersebut harus menjamin hak memperoleh pendapatan ekonomi secara adil dan



merata dan harus berpihak pada kepentingan komunitas lokal seperti pengakuan secara legal adanya Wilayah Hukum Adat Laut (Hak Ulayat Laut) nelayan tradisional Kecamatan Bantan yang dinyatakan dalam PERDA.[§]

Daftar Pustaka

- Dahrendorf, Ralf. (1996). Ali Mandan (pen), *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritis*, Jakarta : CV. Rajawali
- Dahuri, R.J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. (2002). *Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis*. Tidak Diterbitkan.
- Effendy, Onong Uchjana. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I. A., Richard S. dan Sue W. (2001). *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia. Jakarta.
- Kusnadi. (2002). *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Perikanan*. LKIS. Yogyakarta.
- Nimmo, Dan. (2004). *Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan dan Media*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Perloff, M. Richard. (2010). *The Dynamics of Persuasion*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Ritzer, George dan Douglas J. Googman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta
- Ross, Marc Howard. (1999) “*The Management of Conflict Interpretations and Interests in Comparative Perspective*”, Yale University Press, New Haven and London.
- Santoso, (1988). *Analisa Kebijakan Publik*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Satria, A. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Pustaka Cidesindo. Jakarta

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENGANTISIPASI POTENSI KONFLIK ANTARA PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT Studi Kasus di PT Pupuk Kalimantan Timur

Yugih Setyanto

Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat sebenarnya dapat diminimalisir melalui pendekatan komunikasi. Pupuk Kaltim sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan berlokasi di Bontang Kalimantan Timur menjadi salah satu perusahaan penyumbang keuntungan bagi negara. Selain dituntut memberi keuntungan sebagai sebuah entitas bisnis, Pupuk Kaltim juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu dapat memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tuntutan seperti ini tentu bukanlah perkara mudah. Namun, itikad baik Pupuk Kaltim untuk ikut mensejahterakan masyarakat terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada anggota masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa memberi kesejahteraan secara materi menjadi tanggung jawab tunggal dari perusahaan. Persepsi ini muncul sebagai kompensasi eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Akibat ketidakpuasan tersebut, beberapa anggota masyarakat berusaha “menyerang” perusahaan melalui isu-isu negatif. Bagaimana perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim mencoba membina masyarakat melalui strategi yang bisa menjadi solusi meredam konflik?

Kata kunci: komunikasi, konflik, public relations, CSR

Keberadaan suatu perusahaan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif suatu perusahaan ditinjau dari sisi ekonomi dan sosial adalah perusahaan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan atau dimana perusahaan tersebut beroperasi. Tentu hal ini dapat dilihat dari perekrutan pegawai yang diambil dari warga lokal. Selain itu juga pemanfaatan sumber-sumber daya sekitar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

Hubungan perusahaan dan masyarakat ini menjadi sebuah interaksi sosial yang membawa pada hubungan saling membutuhkan. Bagi perusahaan sendiri, ada keuntungan nonmateri yang bisa didapat. Perusahaan sadar bahwa hidup dan keberlanjutannya sangat lah bergantung pada dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan yang terjalin dengan baik antara perusahaan dan masyarakat menjadi modal dasar kelangsungan perusahaan.

Terkait dengan BUMN, sebagian masyarakat masih ada yang mempunyai anggapan bahwa BUMN adalah perusahaan negara sehingga masyarakat juga memilikinya. Sikap ikut memiliki dapat dilihat dalam dua sisi yang berbeda. Sisi baiknya, hal ini menjadi keberhasilan PR perusahaan dalam membina masyarakat sehingga menumbuhkan rasa memiliki serta ikut menjaga dan merasakan manfaat kehadiran perusahaan. Sayangnya sikap ini juga dapat berakibat munculnya pendapat bahwa perusahaan milik negara berarti masyarakat berhak menuntut apapun dari perusahaan. Tidak jarang sikap ini dinyatakan dalam hal misalnya penyerobotan lahan perusahaan karena dianggap milik masyarakat juga.

Pupuk Kaltim adalah salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang berlokasi di Bontang Kalimantan Timur. BUMN ini menjadi salah satu perusahaan yang memberikan deviden besar bagi negara. Saat ini total pendapatan BUMN Rp1.129 triliun, dengan laba bersih Rp 98,676 triliun. Asetnya Rp 2.975 triliun dan ekuitasnya Rp 607,774 triliun. Selain dituntut memberi keuntungan sebagai sebuah entitas bisnis, Pupuk Kaltim- dan juga BUMN lainnya- juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu dapat memberi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Tuntutan seperti ini tentu bukanlah perkara mudah.



Namun, itikad baik Pupuk Kaltim untuk ikut mensejahterakan masyarakat terkadang tidak selalu berjalan mulus. Ada anggota masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa memberi kesejahteraan secara materi menjadi tanggung jawab tunggal dari perusahaan. Salah satu alasan mengapa persepsi ini muncul adalah telah dieksploitasinya sumber daya alam oleh perusahaan. Akibat ketidakpuasan tersebut, beberapa anggota masyarakat berusaha “menyerang” perusahaan melalui isu-isu negatif.

Konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat menjadi sebuah permasalahan yang sebenarnya dapat diminimalisir melalui pendekatan komunikasi. Perusahaan besar seperti Pupuk Kaltim mencoba membina masyarakat sebagai sebuah bagian strategi yang bisa menjadi solusi meredam konflik. Selain itu, dapat membuat perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis yang dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bukan sekadar mencari keuntungan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia.

Memahami khalayak adalah dasar menghindari konflik

HSBC sebagai sebuah perusahaan finansial internasional mempunyai motto yang mudah diingat “*world’s local bank*”. Motto ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Bank Dunia Bertradisi Anda”. Sebagai sebuah perusahaan multinasional dengan perusahaan yang berada di seluruh dunia memahami budaya setempat menjadi sebuah keharusan. Demi menjaga kelangsungan perusahaan perlu dilakukan strategi yang membuat dekat dengan masyarakat. Apalagi perusahaan tersebut hakikatnya harus bersaing dengan perusahaan nasional yang lebih memahami konsumennya.

Contoh HSBC bisa dijadikan sebagai sebuah bukti pentingnya memahami khalayak tempat dimana perusahaan beroperasi. Ini merupakan salah satu strategi memenangkan hati khalayak untuk kepentingan perusahaan. Sebuah perusahaan yang besar dengan cabang dimana-mana tentu akan menghadapi khalayak yang beraneka ragam pula. Bahkan tantangan memahami khalayak juga bisa datang dari internal perusahaan itu sendiri. Misal, Bank Mandiri yang beroperasi di Manokwari pastilah sebagian besar karyawan-



nya berasal dari penduduk setempat. Karakter penduduk tentu bisa ikut mewarnai budaya internal Bank Mandiri di Manokwari. Walau tetap karakter budaya organisasi Bank Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan nasional terbesar di Indonesia mendominasi budaya organisasi secara umum. Belum lagi bila kita mempelajari karakter nasabah di setiap cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia tentu akan menjadi sangat beraneka.

Hal utama yang dilakukan Pupuk Kaltim dalam mengetahui potensi konflik yang ada adalah memetakan *stakeholders* yang ada. Pemetaan ini sebagai cara mendapat gambaran mengenai siapa-siapa saja pihak eksternal perusahaan. Dari hasil pemetaan ini kemudian dianalisis untuk dapat membuat strategi apa yang tepat dalam melakukan komunikasi kepada *stakeholders* tersebut.

Pemahaman karakter *stakeholders* menjadi modal utama dalam mengembangkan komunikasi perusahaan kepada masyarakat. komunikasi yang dijalin dengan konstruktif dapat menumbuhkan *stakeholders* yang bisa membantu perusahaan saat perusahaan dihadapkan pada permasalahan konflik yang dapat menimbulkan krisis. Menciptakan hubungan yang kuat dengan *stakeholders* dapat membantu perusahaan saat dilanda konflik yang mengarah pada krisis. Menurut Heath ada dua manfaat bagi organisasi saat dilanda krisis apabila telah memiliki hubungan yang kuat dengan para *stakeholders* (Handoko-Widodo, 2007). Pertama, *stakeholders* yang memiliki kepentingan pribadi tertentu (*vested interest*) dalam keberhasilan suatu organisasi, dapat memberi dukungan (*network of support*) bagi organisasi tersebut. Kedua, krisis yang menimpa organisasi memang memberikan dampak negatif bagi para *stakeholders*, namun apabila organisasi tidak memiliki hubungan yang baik sebelum krisis terjadi, *stakeholders* tersebut dapat menarik dukungan mereka kepada organisasi.

Apa yang akan terjadi bila suatu perusahaan tidak memahami karakter *stakeholders*. Bukan saja perusahaan tersebut membikin jarak dengan khalayaknya namun yang lebih bahaya adalah potensi konflik suatu saat bisa muncul. Konflik menjadi sebuah bahaya laten karena perusahaan seakan hidup di dalam tembok besar pabrik, eksklusif, dan jauh secara psikologis dengan masyarakat. Hal seperti

ini menimbulkan kesenjangan baik sosial maupun ekonomi.

Sudah ada banyak contoh di Indonesia, sebuah perusahaan multinasional dengan modal investasi triliunan, mampu menggaji pegawainya di atas standar rata-rata penduduk tempat perusahaan beroperasi sementara di sekelilingnya masih tampak penduduk miskin yang mengharap belas kasihan dari perusahaan. Tentu kondisi masyarakat seperti ini bukan menjadi tanggung jawab perusahaan semata namun dari segi sosial dapat menciptakan kecemburuan yang menjadi potensi ledakan konflik antara perusahaan dan masyarakat.

Indonesia adalah negara yang sedang giat memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, dimana-mana dibangun pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi produk. Daerah-daerah yang kaya sumber alam menjelma menjadi kota yang ramai dan berkembang. Kemajuan ini menjadi magnet bagi individu-individu yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Tumbuhlah sebuah masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Bagi perusahaan sendiri, gelombang pertumbuhan ekonomi di Indonesia membuat perusahaan ikut berkembang. Perkembangan ini tentu melahirkan konsekuensi akan kebutuhan sumber daya manusia serta pendukung kebutuhan perusahaan lainnya. Perusahaan memerlukan masyarakat lokal untuk menjadi penopang operasinya pabrik-pabrik, tambang atau apapun jenis usaha yang dilakukan. Kebutuhan ini menimbulkan *multiply effect* yang mengakibatkan laju pertumbuhan suatu daerah menjadi begitu cepat.

Dampaknya tentu tidak selamanya positif. Laju perekonomian yang tidak dibarengi kemampuan mengatur pemerataan pertumbuhan mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Ada pihak-pihak yang menikmati sementara pihak lain malah menjadi penonton pinggir lapangan yang tidak merasakan buah kenikmatan ekonomi. Kondisi ini ditambah dengan isu otonomi daerah yang menjadi “mainan” para politikus lokal. Isu-isu ketimpangan ekonomi dijadikan komoditi penarik simpati masyarakat miskin dengan menyalahkan perusahaan yang tidak peduli. Perusahaan dianggap hanya



menghisap kekayaan alam namun tidak mengembalikannya kepada masyarakat. Dalam menghadapi situasi eksternal seperti ini, perusahaan perlu melakukan strategi antisipatif.

Tidak hanya pengaruh persaingan politik di luar perusahaan ternyata tidak sedikit konflik juga dimulai dari dalam perusahaan sendiri. Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan pernah menyatakan bahwa keinginan seorang personil untuk menduduki jabatan direktur di perusahaan menimbulkan persaingan yang terkadang malah menjurus ke perpecahan di internal perusahaan. Menurutnya, calon yang diperkirakan akan menjadi direktur utama dihancurkan. Kebisingan itu bertambah-tambah karena masing-masing orang juga melobi kanan-kiri, atas-bawah, muka-belakang ([http://fokus.vivanews.com/news/read/282255-pergantian-direksi-yang-sangat-bising 30/05/2012](http://fokus.vivanews.com/news/read/282255-pergantian-direksi-yang-sangat-bising-30/05/2012)).

Apa yang disampaikan Menteri Negara BUMN dapat diartikan bahwa masing-masing calon mencoba mencari dukungan demi mendapatkan jabatan yang diinginkannya. Sangat mungkin meminta dukungan dari luar perusahaan. Konflik internal ini kadang terbawa sampai keluar perusahaan. Akibatnya, reputasi perusahaan dipertaruhkan. Perusahaanlah yang menjadi korban.

Isu seperti ini kerap dihembuskan oleh segelintir elit selain untuk menarik simpati juga sebagai alat tawar-menawar kepada perusahaan. Ancaman akan mengerahkan massa, memblokir jalan, bahkan sampai menutup pabrik menjadi alat untuk menekan perusahaan agar mau bekerja sama sehingga perusahaan terpaksa mau menggelontorkan bantuan materi kepada elit yang menekan. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi di berbagai daerah tempat beroperasi perusahaan-perusahaan besar.

Lalu, apa peran komunikasi dalam meredam konflik yang bisa saja muncul. Komunikasi lebih efektif bila dilakukan sebelum konflik terjadi. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah mencoba tetap berinteraksi dengan semua *stakeholders*. Pemuka agama, tokoh masyarakat, ketua adat bahkan pimpinan parpol merupakan komunikasi yang patut untuk dijadikan mitra perusahaan. Sadar bahwa perusahaan hidup dalam masyarakat, maka jadikanlah perusahaan menjadi bagian dari mereka juga.



Biarkan masyarakat yang ‘menjaga’ perusahaan. Begitu pula perumpamaan hubungan yang mesti diciptakan perusahaan dan masyarakat. Pada implementasi kebijakan perusahaan di Pupuk Kaltim mengenal istilah *buffering* dan *bridging* (Wawancara Kadep Humas Tedy Nawardin). Keduanya adalah strategi dalam rangka mengantisipasi konflik melalui jalur pembinaan masyarakat. *Buffering*, adalah membayangkan sebuah pagar yang mengelilingi perusahaan. Pagar ini bukanlah untuk menjauhkan perusahaan, bila diibaratkan mobil, pagar ini menjadi *bumper* manakala terjadi tabrakan. Dan begitulah fungsi *buffering* yang diterapkan Pupuk Kaltim. Mekanisme *buffering* adalah membina masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi guna menumbuhkan dukungan pada perusahaan. Kelak bila ada bibit konflik yang muncul, maka masyarakat yang telah dibina menjadi “pagar” yang akan membentengi perusahaan dari sekelompok anggota masyarakat yang ingin mengganggu jalannya perusahaan.

Sedangkan *bridging* adalah upaya perusahaan membuka saluran komunikasi untuk mengakomodir aspirasi masyarakat terhadap perusahaan. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap perusahaan kemudian disesuaikan dengan kepentingan bersama. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa perusahaan juga mempunyai tujuan bisnis guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan masyarakat tetap harus mempunyai kemampuan sendiri agar lepas dari ketergantungan dengan perusahaan.

Seperti disampaikan Broom dan Smith (1979) yang membagi peran *public relations* menjadi empat dan salah satunya adalah *communication facilitator*. *Public relations* sebagai wakil perusahaan berperan sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan khalayaknya. Bisa saja dalam pelaksanaan *bridging* menimbulkan hasil yang tidak memuaskan sekelompok orang, bila hal ini terjadi dilakukan strategi *buffering* seperti telah dijelaskan di atas.

Konflik Perlu Diantisipasi

Telah dikemukakan sebelumnya pentingnya mengantisipasi potensi konflik sejak dini. Konflik memang dapat dihindari namun tetap harus diupayakan sebuah strategi yang dikedepankan bila



suatu saat konflik muncul. Hampir tidak mungkin sebuah perusahaan luput dari konflik setidaknya dalam skala yang ringan.

Ada empat strategi yang dilakukan Pupuk Kaltim dalam menghadapi potensi konflik (Wawancara Kadep Humas Pupuk Kaltim). Pertama adalah strategi inaktif yaitu diam dan membiarkan sebuah isu berlalu. Cara ini dilakukan bila dinilai potensi konflik belum melibatkan secara langsung perusahaan misalnya konflik Pilkada. “Keributan” saat Pilkada tidak perlu ditanggapi oleh perusahaan karena justru akan menyeret perusahaan kedalam arena politik.

Strategi kedua adalah reaktif. Berbeda dengan sebelumnya yang lebih bersikap “*wait and see*” pada sebuah isu, dalam strategi ini, dilakukan tindakan untuk menanggapi sebuah isu yang mengarah pada perusahaan. Sebelum melakukan tindakan, dilakukan analisa dari lintas sektoral yang terkait di dalam perusahaan. Kasus yang pernah terjadi misalnya adalah sekelompok masyarakat yang mengklaim tanah perusahaan. Masalah ini tentu harus melibatkan bagian legal sehingga dalam melakukan reaksi didukung data formal yang dapat memperkuat strategi komunikasi.

Strategi ketiga adalah proaktif yaitu perusahaan melakukan penilaian suatu isu yang dianggap berpotensi konflik. Artinya, dalam strategi ini perusahaanlah yang aktif melakukan komunikasi agar suatu isu yang dianggap akan menjadi konflik dapat dihindari. Untuk itu diperlukan kepekaan dalam membaca situasi masyarakat serta kemampuan “*intelejen*” dalam mendapatkan informasi yang akurat mengenai suatu isu. Strategi ini bisa dilakukan dengan baik bila hubungan *stakeholders* juga dibina dengan baik.

Terakhir adalah strategi interaktif. Melalui strategi ini sebuah potensi konflik dapat dicari solusinya dengan melakukan komunikasi yang konstruktif antara perusahaan dan pihak yang terlibat. Masing-masing pihak sama-sama aktif mencari titik temu melalui lobi dan pembicaraan-pembicaraan secara formal dan informal.

Strategi yang dilakukan tentu dalam kerangka mencari solusi yang membangun dan mengedepankan kepentingan kedua belah pihak. Intinya adalah bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif ini akan tercapai bila ada sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Jangan sampai sebuah

konflik mengganggu hubungan perusahaan dan *stakeholders*.

Tentu strategi antisipasi konflik bukanlah pekerjaan dalam waktu singkat. Upaya pembinaan masyarakat melalui –diantaranya– kegiatan CSR menjadi sebuah strategi besar perusahaan berkembang bersama masyarakat. Perlu biaya, ketulusan, itikad, dan komitmen segenap jajaran manajemen dan karyawan yang sudah dimulai semenjak perusahaan itu berdiri, secara terus menerus dan berkelanjutan. §

Daftar Pustaka

- Cutlip, Scott M, Center, Allen Broom, Glen M. (2009). *Effectives Public Relations*. Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana Nada Pranada Media Group.
- Company Profil PT Pupuk Kalimantan Timur.
- Handoko-Widodo, Creszentia. N, *Komunikasi Korporat dalam Krisis*, (disertasi), Universitas Indonesia, 2007
- <http://fokus.vivanews.com/news/read/282255-pergantian-direksi-yang-sangat-bising-30/05/2012>



KOMUNIKASI MULTIKULTURAL DAN PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL

Studi Terhadap Padepokan Seni Budaya Betawi Manggar Kelape Kemang Jakarta-Selatan

Halimatusa'diah

Jakarta adalah *megacity* yang berubah cepat dari waktu ke waktu. Terbukanya peluang kerja dalam jumlah besar mendorong urbanisasi yang mengakibatkan Jakarta menjadi miniatur etnik dan budaya Indonesia. Keragaman etnik di Jakarta sebenarnya dapat menjadi peluang untuk membangun masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun, di sisi lain, keragaman tersebut berpotensi menjadi lahan subur tumbuhnya konflik sosial.

Kemang sebagai salah satu dari kantong komunitas Etnik Betawi yang berada di Jakarta Selatan, merupakan wilayah yang dikenal sebagai perkampungan modern internasional. Dengan beragam etnik yang ada di dalamnya menyebabkan Etnik Betawi di wilayah tersebut harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai etnik pendatang.

Hidup dalam masyarakat multikultur, tidak menjamin interaksi sosial yang sehat bagi Etnik Betawi di Kemang. Pendekatan komunikasi multikultural berdasarkan asas pluralisme adalah solusi yang dilakukan oleh Padepokan Seni Budaya Betawi *Manggar Kelape* sebagai salah satu kelompok Etnik Betawi di Kemang untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial.

Kata kunci: komunikasi multikultural, konflik sosial

Pendahuluan

Jakarta merupakan mosaik yang menjadi tuan rumah bagi proses industrialisasi yang masif. Bukan hanya itu, sebagai sebuah ibukota negara, Jakarta juga menjadi sentra perguliran roda pemerintahan nasional. Dengan demikian, Jakarta menjadi miniatur Indonesia dalam komposisi etnik dan budaya. Terbukanya peluang kerja dalam jumlah besar mendorong proses urbanisasi yang mengakibatkan perubahan demografis secara signifikan.

Pembangunan Jakarta sebagai sentra-sentra bisnis, pariwisata, maupun pemerintahan membuka peluang kerja yang besar. Peluang ini mendorong terjadinya urbanisasi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk Jakarta secara drastis. Menurut Shahab (dalam Wibowo, 2005: 73), penduduk Jakarta berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1930, penduduk Jakarta hanya berjumlah 435 ribu jiwa. Tiga puluh satu tahun kemudian (1961) meningkat menjadi 2,9 juta jiwa. Jumlah ini terus bertambah sepanjang tahun. Pada tahun 1967, penduduk Jakarta menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah menjadi 8,22 juta jiwa dan akhir tahun 2010 mencapai 8,52 juta jiwa (<http://www.kependudukancapil.go.id>, diakses pada 1 Juni 2012).

Kemang di Jakarta Selatan, sebagai salah satu *enclave* Betawi juga mengalami pembangunan. Sebagai kawasan ekspatriat, di sini dibangun berbagai sarana untuk kenyamanan orang asing. Wilayah yang dijuluki perkampungan modern internasional ini seakan menghipnotis orang yang datang ke kawasan elit itu (www.mediaindonesia.com, diakses pada tanggal 1 Juni 2012).

Migrasi penduduk ke Jakarta, mendorong etnik Betawi di Kemang berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnik lain. Dengan beragam etnik yang ada di dalamnya menyebabkan Etnik Betawi di wilayah tersebut harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai etnik pendatang. Hidup dalam masyarakat multikultur, tidak menjamin interaksi sosial yang sehat bagi Etnik Betawi di Kemang.

Prasangka bisa sewaktu-waktu muncul dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Namun, hidup berdampingan dengan da-



mai dalam masyarakat yang berbeda suku bangsa, agama, ras, dan golongan tetap merupakan sesuatu yang harus diciptakan dalam masyarakat multietnik dan multikultur di wilayah tersebut.

Menyadari keragaman budaya yang ada di wilayahnya serta potensi konflik yang akan muncul, mendorong sekelompok organisasi berbasis budaya Betawi yaitu Padepokan Seni Budaya Betawi *Manggar Kelape* (PSBBMK) untuk melakukan berbagai pendekatan yang bertujuan menciptakan kawasan Kemang sebagai wilayah masyarakat multikultural. PSBBMK yang mengawali pembentukannya sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan Betawi selanjutnya berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial melalui pendekatan komunikasi multikultural.

Konflik sosial

Bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan masyarakat yang majemuk, maka untuk mencapai suatu masyarakat dapat hidup berdampingan dengan berbagai yang berbeda suku bangsa, agama, ras, dan golongan yang berbeda bukanlah hal yang mudah dilakukan. Mengapa? Karena tidak banyak orang yang tidak memahami benar bahwa hakikat suku bangsa, agama, ras dan golongan dalam masyarakat juga merupakan manifestasi dari etnik yang memiliki latar belakang, sosial dan budaya dan karena itu membentuk cara berpikir, sikap dan tindakan.

Lantaran ketidakpahaman atas etnik dan ras sebagai identitas sosial dan budaya itulah, banyak orang yang tidak memahami bagaimana seharusnya hidup dalam masyarakat majemuk dengan multietnik dan multikultur. Dengan demikian, akan timbul semacam dorongan memetakan masyarakat berdasarkan suku bangsa, agama, ras dan golongan di atas peta mayoritas dengan minoritas. Akibatnya, hubungan antaretnik sering diwarnai oleh prasangka sosial yang berpotensi menimbulkan konflik.

Kesalahpahaman terhadap perbedaan kultur dapat menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan (Mulyana, 1999:13). Kita sering mendengar dan menyaksikan di berbagai media massa tentang kerusuhan di tanah air yang bersumber dari perbedaan budaya atau agama. Pasca reformasi misalnya muncul banyak konflik

mulai dari konflik horizontal seperti konflik Ambon Maluku, Poso Sulawesi dan Kalimantan Timur (konflik suku Madura dan suku Dayak) sampai konflik vertikal atau konflik antara masyarakat dengan aparat pemerintah seperti di Tasikmalaya dan Situbondo (Isre, 2003:41).

Setiap konflik sosial yang terjadi di masyarakat senantiasa dianggap sebagai konflik horizontal antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain. Konflik tersebut semata-mata dilihat sebagai peristiwa agama atau suku, karena berkaitan dengan eksistensi suatu kelompok. Liliweri (2009:250) mendefinisikan konflik antaretnik sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan.

Konflik sosial menurut Tomagola (2003:86) biasanya terjadi karena bertemunya tiga bagian utama konflik yang dianalogikan dengan struktur bom rakitan yang dibuat di wilayah konflik. Sebuah bom rakitan terdiri dari (1) wadah keras; (2) amunisi serta (3) sumbu bom. Agar bom rakitan itu dapat meledak diperlukan satu faktor eksternal yang bernama (4) pemicu (*trigger*). Bila struktur bom itu diaplikasikan pada struktur anatomi konflik sosial maka secara berturut-turut sebagai berikut (1) wadah keras = konteks yang memfasilitasi; (2) amunisi = inti atau akar permasalahan; (3) sumbu = sentimen suku dan agama; serta (4) pemicu = provokator.

Demikian juga Mudzhar (2002:238) menyebutkan ada empat elemen utama konflik yang hadir dalam waktu yang bersamaan. Keempat elemen itu ialah *facilitating contexts* (konteks pendukung), *core of conflict* (akar konflik), *fuse factor* (sumbu) dan *triggering factor* (pemicu).

Di antara konflik sosial yang terjadi di Indonesia biasanya disebabkan oleh faktor kesukuan dan faktor agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh kesukuan contohnya kasus Sampit, Kalimantan Barat. Sedangkan konflik sosial yang disebabkan oleh faktor agama seperti Kasus Poso dan Ambon.

Terdapat beberapa faktor yang sangat berperan dalam memfasilitasi konflik sosial diantaranya: pertama, pola pemukiman yang tersegregasi menurut suku dan agama. Kedua, persaingan sengit



antar lembaga-lembaga agama, 30 baik dalam upaya memperbanyak pengikut maupun dalam memperluas teritori agama. Ketiga, masuknya imigran dari daerah lain yang berbeda suku atau agamanya dan Keempat, terjadinya penghancuran sistematis atas lembaga-lembaga adat tradisional atau hukum adat yang sebelumnya bisa menjadi media penyelesaian konflik (Tomagola, 2003: 57-64).

Konflik sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih biasanya mengalami eskalasi proses berikutnya yang menyusul. Eskalasi bisa berarti semakin luasnya sasaran atau wilayah konflik, atau semakin banyaknya orang yang terlibat, atau semakin canggihnya alat-alat konflik yang digunakan. Terkadang eskalasi itu bersifat *undirectional* (satu arah), dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat konflik. Tetapi pada umumnya eskalasi itu bersifat *bi-directional*, bersifat dua arah. Artinya eskalasi konflik yang dilakukan oleh salah satu pihak akan dibalas dengan eskalasi pihak lawan. Demikian seterusnya, sehingga tingkat eskalasi itu semakin besar dan saling bersahutan dari kedua belah pihak.

Sementara itu, faktor pelanggeng konflik juga muncul, yaitu *prejudice*. *Prejudice* adalah sikap atau kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk merendahkan orang lain, pernyataan negatif, atau pengungkapan perilaku permusuhan atau diskriminasi terhadap anggota suatu kelompok masyarakat hanya karena keanggotaan mereka dalam kelompok itu (Mulyana, 1997:12).

Prejudice bukan hanya bersifat kognitif, tetapi juga meliputi emosi dan tingkah laku. Biasanya jenis kelamin, kesukuan, ras dan umur, menjadi ajang sasaran *prejudice*. Demikian pula kelompok-kelompok sosial yang terbangun karena menganut faham atau ajaran tertentu juga dapat menjadi ajang sasaran *prejudice*. Dua kelompok yang sedang terlibat konflik, biasanya juga memiliki *prejudice* satu terhadap yang lain. Kemudian semakin bereskalasi konflik itu terjadi, maka akan semakin peka dan membesar rasa *prejudice* itu. Di sinilah peran komunikasi multikultural perlu dibangun. Dengan mengedepankan dialog antar berbagai komunitas dan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan kultur.

Komunikasi Multikultural

Multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia merupakan kenyataan sosial budaya yang seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang alamiah dalam pengertian membicarakannya dalam proporsi yang berimbang. Multikulturalisme secara sosial budaya berarti menempatkan semua pembicaraan tentang suku bangsa pada suatu tingkatan yang sederajat. Kompleksitas permasalahan kesukubangsaan tidak direfleksikan oleh banyaknya warga komunitas, tetapi lebih melihat kepada substansi problema yang dihadapi dalam rangka menegakkan rasa kebangsaan (Patji, 2001 : 1).

H.A.R Tilaar (2004: 43) menjelaskan bahwa multikulturalisme bukanlah sebuah istilah yang mudah dipahami. Dalam istilah multikulturalisme terkandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu "multi" yang berarti plural dan "kulturalisme" yang artinya kultur atau budaya. Plural selain mengandung arti yang berjenis-jenis, juga mempunyai implikasi politis, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, multikulturalisme erat kaitannya dengan pluralisme dalam prinsip demokrasi. Pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas yang mempunyai budaya yang khas.

Ada tiga istilah yang banyak digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Semuanya istilah itu mengacu kepada adanya 'ketidaktunggalan'. Konsep pluralitas mengandikan adanya 'hal-hal yang lebih dari satu' (*many*); keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang 'lebih dari satu' itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan (Watson, 2000:72)

Sementara itu, Havilland (1993 : 289) mengartikan multikulturalisme merupakan interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berfikirnya dalam masyarakat yang sama. Secara ideal, multikulturalisme berarti penolakan kefanatikan, prasangka, rasisme, dan penerimaan sikap menghargai kebudayaan tradisional orang lain. Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu entitas keberagaman yang menunjukkan diri sebagai keniscayaan dalam pluralisme. Multikulturalisme kemudian men-



jadi suatu kondisi yang tidak terbantahkan karena masing-masing entitas perbedaan dengan sendirinya menghendaki karakter yang beragam. Isu-isu yang lahir dalam multikulturalisme adalah perbedaan untuk satu kualitas persamaan (*equality*). Entitas perbedaan layaknya ras, religi, feminitas, kelas, etnisitas, mempunyai hak yang sama dalam kualitas, kelayakan dan keberlangsungan hidup (Abdillah, 2002: 179).

Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan, multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama (Glazer, 1997: 45).

Hasil *Fourth National Conference of the Federation of Ethnic Councils of Australia* menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat multikultural adalah sebagai berikut :

1. Adanya variasi dari perbedaan budaya.
2. Kebebasan dalam menjalankan perbedaan beragama.
3. Bahasa dan adat sosial yang berbeda.
4. Adanya kepedulian dalam berbagai nilai.
5. Semua kelompok etnik menekankan toleransi budaya, bahasa, dan agama meskipun berbeda antara satu dengan yang lainnya agar mereka tidak kehilangan identitas (Liliwari, 2009:89).

Watak masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat *peaceful co-existence*, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih tetap membawa serta jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, tetapi juga tidak diperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain. Dalam perspektif multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok dari berbagai entitas etnik dan budaya hidup dalam *social cohesion* tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Masyarakat bersatu dalam ranah sosial tetapi antarentitas tetap ada jarak. Jarak itu harus dijaga dengan komunikasi, dialog dan toleran-



si yang kreatif (HAR. Tilaar, 2004: 13).

Konsep multikulturalisme memang mengagungkan perbedaan. Tetapi, ia tidak berhenti di situ. Perspektif ini memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal dan oleh karenanya sama. Tetapi ketika bicara soal cara hidup (*way of life*), aturan berpikir (*rule of thinking*), dan pendirian atau prinsip hidup (*state of mind*), multikulturalisme justru melihat bahwa sungguh tidak adil kalau realitas keanekaan itu dinafikan entah dengan cara apapun. Perbedaan dipandang sebagai kesempatan untuk memanifestasikan hakikat sosial dan sosiabilitas manusia dengan dialog dan komunikasi. Masyarakat yang hidup dalam perspektif ini sangat mementingkan dialektika yang kreatif. Jadi multikulturalisme adalah sebuah perspektif alternatif untuk mengatasi pertentangan dan konflik sosial bernuansa etnis, dalam hal ini konflik antaretnik didefinisikan sebagai “suatu bentuk pertentangan yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama, golongan, dan lain-lain) karena mereka memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan (Liliweri, 2009: 250).

Adapun komunikasi multikultural sebagaimana yang diungkapkan oleh Ronda J. Stanton (2002) adalah kemampuan komunikasi dengan disertai pemahaman tentang budaya:

“The need for effective multicultural communication is becoming more prevalent in the world as countries do more business globally and borders disappear. To be effective in multicultural communication we must anticipate audience expectations, which can be known only through the study of the culture.” (www.stc.org/confproceed/2002, diakses pada 1 Juni 2012)

Komunikasi multikultural dipengaruhi oleh berbagai simbol kebudayaan yang bersumber dari karakter individual manusia sebagai subyek penentu pertumbuhan, perkembangan dan perubahan budaya suatu masyarakat. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Samovar (1981:10), bahwa untuk memahami interaksi antar budaya, maka terlebih dahulu harus dipahami bagaimana komunikasi manusia. Sebab dengan memahami komunikasi berarti memahami apa yang terjadi selama komunikasi itu berlangsung, mengapa terjadi, apa yang dapat terjadi, akibat apa yang terjadi dan akibatnya apa yang dapat diperbuat.



Dengan demikian, untuk mencapai komunikasi multikultural yang efektif, hal penting yang harus disadari adalah kesadaran perbedaan antara diri sendiri dan orang lain; menyadari perbedaan di antara anggota-anggota suatu kelompok; menyadari perbedaan adat kebiasaan yang berlaku dalam setiap konteks budaya.

Memahami Pluralisme

Secara teoritis, pluralisme (budaya) menurut Suzuki (1984) merupakan sebuah konsep yang menerangkan ideal (ideologi) kesetaraan kekuasaan dalam masyarakat multikultur, di mana kekuasaan “terbagi secara merata” di antara kelompok-kelompok etnik yang berfariasi sehingga mampu mendorong timbal balik antar mereka.

Di dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-kelompok etnik tersebut, kelompok-kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka menjalankan tradisi kebudayaannya (Liliweri, 2009: 66).

Perbedaan budaya dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan, karena hakikatnya dalam masyarakat pasti terdapat individu-individu yang latar belakangnya beraneka ragam. Jadi, pluralisme terdalem akan sampai pada kesepahaman, bahwa perbedaan budaya mengartikulasikan hak-hak orang lain dan inti dari kesatuan dalam perbedaan. Multikulturalisme menciptakan struktur dan proses yang memperbolehkan ekspresi berbagai kebudayaan, komunitas, dan individual baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks ini, Dewanto (1991: 25) menyatakan bahwa kita tidak sedang dan hidup dalam aneka dunia yang terpisah satu dengan lainnya, melainkan dalam berbagai dunia yang saling bersentuhan, saling pengaruh, saling memasuki satu dengan lainnya. Karena itu, dunia kita bukanlah dunia yang plural melainkan dunia yang tetap saja tunggal tetapi bersifat multikultural. Pluralitas merupakan tahap awal dari proses ke arah itu, salah satu jalan yang memungkinkan kita untuk toleran dan terbuka untuk memasuki dan dimasuki.

Peran PSSBMK dalam Meminimalisir Konflik Sosial: Sebuah Pendekatan Komunikasi Multikultural

Heterogenitas budaya seringkali diikuti dengan perbedaan tata bahasa, simbol dan perilaku masyarakat yang ada di dalamnya. Banyak orang yang salah menginterpretasi perbedaan kultur dan heterogenitas budaya tersebut sehingga seringkali hal itu menjadi pemicu berbagai konflik sosial sekaligus menjadi penghalang terjadinya interaksi harmonis antar masyarakat (Mulyana dan Rakhmat, 2000: 151)

Dengan menggunakan pendekatan komunikasi multikultural maka beberapa langkah solusi alternatif untuk meminimalisir konflik sosial antaretnik yang dilakukan oleh PPSBMK melalui: Pertama, memberikan pemahaman dan penerimaan kepada masyarakat di wilayah Kemang akan adanya pluralitas budaya (*cultural pluralism*) sebagai sebuah realitas dan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini langkah kongkretnya adalah dengan mengedepankan dialog antar berbagai komunitas dan tokoh masyarakat dengan menggunakan pendekatan kultur.

Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan pemahaman multikultural dalam masyarakat tersebut akan hakikat dan realitas multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat multikultur. Dengan kegiatan tersebut diharapkan setiap individu menyadari bahwa dalam masyarakat terdapat beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai pluralitas dalam masyarakat maka akan tercipta iklim kehidupan masyarakat yang kondusif. Dalam arti setiap warga masyarakat menyadari pentingnya saling menghargai budaya masing-masing. Sehingga, individu dalam masyarakat akan merasakan pentingnya keberagaman kultur dalam kehidupan.

Kedua, melakukan pembauran dan integrasi semua etnik dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam paradigma multikulturalisme, etnik apa pun tidak dibenarkan merasa sebagai etnik yang paling tinggi di antara etnik yang lain. Atau, tidak dibenarkan adanya dominasi etnik tertentu yang mayoritas terhadap etnik lainnya yang minoritas. Dalam realitas, hampir semua etnik tidak menemui kesulitan untuk melakukan pembauran dalam kegiatan



kemasyarakatan itu. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk Festival Budaya Betawi “Palang Pintu”. Kegiatan rutin setiap tahun ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa Etnik Betawi di Kemang adalah etnik yang terbuka dan menerima segala bentuk perbedaan. Dalam kegiatan itu, PPSBMK membuka peluang semua etnik yang berada di wilayah tersebut untuk dapat berpartisipasi mengekspresikan seni budaya yang menjadi khas daerahnya.

Ketiga, memberikan sikap keteladanan para tokoh masyarakat Betawi dalam berinteraksi dengan etnik pendatang. Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih dikenal paternalistik, yakni mudah mengikuti para tokoh atau pemimpinnya. Jika para pemimpin menunjukkan sikap yang lemah lembut dan menciptakan suasana yang sejuk dalam berinteraksi etnik pendatang. Terlebih masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya yang masih memegang falsafah kepemimpinan kepamongan, yakni *Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani* (di depan dapat memberi contoh, di tengah atau lapangan mau bekerja secara langsung, dan di belakang dapat memberi motivasi), jelas peran keteladanan para tokoh masyarakat Betawi tersebut sangat besar.

Salah satu faktor pendukung utama dalam proses tersebut adalah keberadaan penduduk asli yang memang memiliki sikap terbuka dengan pendatang, hal ini tidaklah mengherankan karena memang Etnik Betawi Kemang dikenal sebagai Betawi modern. Dalam hal ini mereka dapat hidup berdampingan dengan saling menghargai satu dengan lainnya.

Dengan demikian, pendekatan komunikasi multikultural yang dilakukan PSSBMK membuat peranan PSSBMK tidak hanya mampu dalam meminimalisir konflik sosial, namun juga sebagai fasilitator terbentuknya masyarakat multikultural. Karenanya, PPSBMK membawa masyarakat di wilayahnya pada pemahaman akan keberadaan pluralitas bangsa dan hal ini merupakan tahap awal dari proses ke arah integrasi bangsa.

Penutup

Dalam konteks dan perspektif gagasan yang singkat dan terasa



kurang ini, kajian tentang komunikasi multikultural bagi upaya meminimalisir potensi konflik sosial hanyalah satu dari sekian banyak solusi yang dapat ditawarkan dalam upaya pencegahan konflik sosial. lainnya. Sentuhan pada aspek-aspek sosial masyarakat kiranya dapat memberikan kesadaran kritis pada masyarakat tentang pentingnya pendekatan komunikasi dalam meminimalisir konflik sosial, yang dapat dilakukan dalam tataran mikro antara lain melalui: pendidikan multikultural dan *character building* di lingkungan keluarga dengan menekankan pada nilai-nilai budaya.

Di samping itu, perlu juga diperkaya dengan perangkat-perangkat metodik seperti metode *knowledge society*. Metode-metode di atas dikembangkan dalam rangka memberikan pemahaman kepada anak agar ia menjadi partisipan yang positif dalam arena pluralisme kultural yang paham betul akan arti dan aksi sikap empati, kepercayaan, kerjasama, dan memahami kualitas kehidupannya sejak awal serta memahami nilai-nilai bersama sebagai nilai-nilai universal (*we are living together*).

Dengan demikian, untuk meminimalisasi konflik sosial, kini lebih diperlukan pendekatan pemecahan masalah, yang melihat konflik dari berbagai aspeknya, termasuk latar belakangnya, isu sentralnya, dan sebagainya. Pendekatan komunikasi multikultural berasas pluralisme merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan guna meminimalisasi konflik sosial yang sering muncul selama ini terutama konflik sosial di Indonesia. §

Daftar Pustaka

- Abdillah S, Ubed. (2002). Politik Identitas Etnik : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang : Indonesiatara.
- Dewanto, Nirwan. (1991). “Kebudayaan Indonesia: Pandangan 1991” dalam *AKADEMIKA*, Jurnal Kebudayaan Vol. 4, No. 1, April 2006.
- Glazer, Nathan. (1997). *We Are All Multiculturalists Now*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Havilland, William. (1993). Antropologi: Edisi Keempat jilid 2. Jakarta : Erlangga
- Isre, Soleh M. (2003). Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer, Baitbang Depag
- Liliweri, Alo. (2009). Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur. Jogjakarta : PT. LKIS Pelangi Aksara.



- Mudzhar, Atho, HM. (2002). Pendekatan Studi Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyana, Deddy. (1999). Nuansa-nuansa Komunikasi, Rosdakarya : Bandung
- Mulyana, Deddy, dan Jalaluddin Rakhmat. (2000). Komunikasi Antarbudaya, Rosdakarya: Bandung
- Patji, Abdul Rachman. (2001). “Primordialisme dalam Pluralitas Etnis”, dalam Indonesia menapak Masa Depan dalam Kajian Sosial dan Budaya. Ed. Muhammad Hisyam. Jakarta : Peradaban.
- Tomagola, Amal, Tamrin. (2003). Anatomi Konflik Komunal di Indonesia dalam Konflik Etno Religius di Indonesia Kontemporer, Jakarta: Depag RI
- Tilaar, H.A.R.(2004). Multikulturalisme : Tantangan Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Watson, C.W., (2000). Multiculturalism. Buckingham-Philadelphia : Open University Press
- Wibowo, Wahyu., dan Somadi. (2005). Betawi Punye Gaye. Jakarta: PSB UNAS dan Dikmenti Prop. DKI Jakarta

Sumber Internet :

www.kependudukancapil.go.id, diakses pada 5 Januari 2011

www.mediaindonesia.com, di akses pada 5 Januari 2011

Ronda J. Stanton, Multicultural Communication: Back to the Basics, dalam www.stc.org/confproceed/2002)



MEMBANGUN KEMBALI HARMONI DAN KEARIFAN KOMUNIKASI Menyemai Perdamaian dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia

Setio Budi H.H.

Konflik di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya antara masyarakat dengan pemerintah (penguasa), tapi juga dengan korporasi, dan antarmasyarakat. Beragam isu menjadi potensi konflik berdimensi vertikal dan horisontal. Mulai dari hal yang substantif, yaitu HAM, ekonomi, wilayah, politik serta SARA, sampai hal yang pribadi.

Akar konflik sosial bisa jadi merupakan warisan pemerintahan sebelumnya yang tidak tuntas dicari solusinya dan bibit kekerasan semakin menjadi subur dan menjadi fenomena sehari-hari. Membiarkan potensi konflik berkembang adalah kesalahan besar dalam konteks pembangunan peradaban Indonesia. Bagaimana menyemai dan menumbuhkan bibit perdamaian, mencari model atau formula resolusi konflik melalui komunikasi yang bertumpu pada kearifan lokal dan menjunjung harmoni, adalah intisari tulisan ini.

Kata kunci: akar konflik, resolusi, model komunikasi

Pasca reformasi dinamisitas masyarakat Indonesia terlihat semakin kuat, pertama dalam kehidupan sehari-hari kritik sosial politik menjadi wacana yang bebas. Kedua, media menjadi lebih lugas dan bebas dalam mengembangkan diskusi publik atas suatu isu, termasuk melalui media sosial. Ketiga, berbagai kelompok masyarakat mengembangkan berbagai cara untuk menyatakan pendapat, mengorganisir diri melalui berbagai cara.

Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa setelah reformasi, yang menjamin ekspresi demokrasi di Indonesia, kekerasan, tawuran dan konflik sosial semakin marak di berbagai wilayah? Berbagai peristiwa konflik, tindak kekerasan tidak hanya oleh masyarakat, siswa sekolah atau mahasiswa, keagamaan namun juga sampai aparat. Apakah ini bagian dari “letusan” sosial akibat warisan masa ORBA yang cenderung memilih kebijakan “*avoiding*” dan juga kegagalan Orde Reformasi, baik pada sisi, pemerintah dan masyarakat dalam “*managing*” konflik. Akar konflik sosial tidak tuntas dicari solusinya dan bibit kekerasan semakin menjadi subur dan menjadi fenomena sehari-hari.

Membiarkan potensi konflik berkembang adalah kesalahan besar dalam konteks pembangunan peradaban Indonesia. Bagaimana menyemai dan menumbuhkan bibit perdamaian, mencari model atau formula resolusi konflik melalui komunikasi yang bertumpu pada kearifan lokal dan menjunjung harmoni, adalah intisari tulisan ini.

Persoalan Konflik: Ketidakadilan, Kesenjangan, Demokrasi

Demokratisasi paska reformasi menjadi batu ujian tersendiri bagi masyarakat Indonesia, apakah, perkembangan tersebut menunjukkan suatu lompatan – perkembangan yang lebih baik dari era sebelumnya, atau sebaliknya. Pertanyaan ini tentu perlu dijawab menggunakan ukuran yang tepat, dari berbagai perspektif, namun hal yang paling penting di balik berbagai metodologi riset adalah kondisi riil di masyarakat, apa yang dirasakan, dipikirkan dan dilakukan oleh mereka.

Pelajaran penting reformasi adalah masyarakat madani (*civil society*), yang menurut Nyman (dalam Marco dan Andreas, 2009: 252)

menguat pasca Soeharto, dan hal tersebut tidak muncul atau terjadi dalam semalam. Proses dan dinamikanya melalui perjalanan yang panjang. Kesadaran akan penguatan masyarakat madani sejak Indonesia merdeka dan terutama pada saat era Orde Baru, ketika rejim pada saat itu telah bergeser ke arah otoritarian, dengan kendali penuh pada Soeharto yang disokong oleh militer dan Partai Golkar yang berkuasa saat itu.

Persoalan kesenjangan, ketidakadilan, hak asasi manusia, demokrasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah lima faktor dasar diantara berbagai persoalan yang ada pada masa itu dan masih tetap ada sampai saat ini. Faktor kesenjangan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial yang semakin melebar mengakibatkan jarak si kaya dan si miskin makin jauh, terutama jika dikaitkan dengan aspek ketidakadilan dalam alokasi dan kesempatan akses pada sumberdaya ekonomi yang ada. Kemudian yang terlihat secara kasat mata, sebagai contoh adalah pertumbuhan pasar modern, pengusuran pedagang kecil dan rumah liar atau kumuh nampak lebih menonjol daripada fasilitas pasar untuk rakyat yang bermodal kecil (dan rentan terhadap kekuatan kapital) dan pertumbuhan perumahan dan berbagai fasilitas untuk masyarakat kelas menengah. Termasuk pula adalah eksploitasi sumberdaya manusia yang disebut buruh itu, dengan gaji, fasilitas dan jaminan sosial yang hampir minim. Demikian pula dengan kebijakan hubungan industrial yang sering mengakibatkan ketegangan antara buruh, industri dan pemerintah.

Berbagai kasus perebutan tanah antara rakyat (termasuk adat) dengan korporasi dan negara, serta perlakuan keras terhadap rakyat kecil yang tidak setimpal dengan masyarakat kelas yang lebih atas dari sudut hukum adalah cermin isu ketidakadilan dan hak asasi manusia. Unsur yang sangat menonjol dan akhirnya mendorong reformasi adalah aspek demokrasi. Pembungkaman atas sikap kritis masyarakat, tekanan atau larangan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas atas berbagai kebijakan publik, dan termasuk pemberangusan atas media yang dianggap oposan terhadap pemerintah adalah problem demokrasi yang signifikan.

Dalam beberapa catatan kritis atas fenomena konglomerasi dan



korupsi yang besar di Indonesia adalah eksploitasi atas sumber daya alam Indonesia yang diberikan kepada sekelompok kecil orang baik didalam maupun luar negeri. Dampaknya adalah sebagian rakyat kehilangan hak atas hak ulayatnya, terutama yang signifikan adalah kehilangan penghidupan atas hutan, misalnya, karena tergantikan dengan hutan tanaman industri yang hanya dimiliki oleh segelintir orang atau korporasi.

Eksplorasi ini tentu tidak dibayangkan hanya berupa aspek pemberian kuasa pengolahan kepada pihak korporasi atau sekelompok orang, termasuk didalamnya adalah aspek kebijakan, regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat. “Wilayah” konflik tidak hanya menyangkut masyarakat dengan masyarakat, namun beberapa kasus menajam pada generasi muda, seperti berbagai tawuran antar pelajar yang terjadi di berbagai tempat.

Problem tersebut, secara akumulatif, ditambah dengan prasangka atas “siapa membuat menderita siapa”, melebar menjadi sikap antipati terhadap pemerintah (yang dianggap gagal membuat kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat) dan kerap menjadi isu yang menyangkut SARA. Menjadi melebar ke peran pemerintah karena ketika konflik terjadi : lambat ditangani, menimbulkan korban jiwa, gagal dicegah, sampai ke isu pembiaran dan tidak selesai-selesai. Masa Orde Baru, secara etnis suku dan kultur Jawa sangat mendominasi terutama secara politik, secara ekonomi etnis Tionghoa yang memegang peranan penting di Indonesia ini, paduan faktor ekonomi politik tersebut apabila sampai pada isu yang sensitif, khususnya SARA, sangat mudah “meledak”. Persoalan menjadi lebih rumit jika masuk faktor sentimen agama.

Salah satu hasil dari era reformasi adalah otonomi daerah, khususnya di kabupaten dan kota. Otonomi daerah sebenarnya memiliki arti strategis, terutama untuk memastikan daerah memiliki optimalisasi untuk merencanakan, mengelola dan membangun wilayahnya, sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai media dan analisis politik justru melihat otonomi daerah perlu untuk dikoreksi karena beberapa fenomena, yaitu sentimen kesukuan yang semakin menguat, politik praktis dan gesekan kepentingan, perebutan akses po-

tensi ekonomi atau sumberdaya alam, khususnya dan praktek “kartel” atau dinasti politik di wilayah tersebut.

Berbagai gesekan terjadi baik saat pemilihan umum lokal (pilkada) maupun dalam kehidupan sehari-hari, beberapa kasus di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya menyangkut konflik antara masyarakat dengan bupati mengenai tambang emas di Bima, perebutan tanah di Mesuji, Lampung, berbagai sengketa pilkada, yang menurut Mahfud MD: “hampir semua pilkada berbuntut sengketa” (www.republika.co.id, 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012).

Apa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya menyangkut konflik antara masyarakat dengan pemerintah (penguasa), termasuk juga dengan industri atau korporasi, dan antarmasyarakat itu sendiri. Apakah menyangkut isu ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan ideologi, konflik dan potensi konflik yang terjadi, sudah berdimensi vertikal dan horisontal. Isu dan isi dari konflik juga melebar dari hal yang substantif, yaitu aspek HAM, ekonomi, wilayah, politik serta SARA, sampai pada hal yang sangat pribadi dan kemudian memanfaatkan potensi massa (dari sengketa pilkada sampai tawuran pelajar) dan pada beberapa kasus tawuran antar warga atau pelajar sudah tidak jelas apa isu dan yang dipermasalahkan.

Konflik: Menguatnya Isu Etnosentrisme

Augoustinos dan Reynolds (2001: 1) mengatakan bahwa menjelang berakhirnya abad 20, berbagai peristiwa internasional berfokus pada isu prasangka dan rasisme, meningkatnya etnonasionalistik di bekas Yugoslavia dan Uni Soviet, berbagai konflik di Timur Tengah dan Afrika. Beberapa negara pecah menjadi beberapa negara baru, berbagai peristiwa pembunuhan massal, atas nama etnis dan agama juga terjadi di beberapa wilayah, baik kawasan Eropa/Balkan, Afrika dan Timur Tengah.

Augoustinos dan Reynolds (2001:3) mengatakan bahwa prasangka lebih merujuk pada fenomena individu, sementara rasisme adalah konstruksi yang lebih luas yang menghubungkan antara kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik individu pada praktik-praktik dan norma-norma sosial dan institusional yang lebih luas.



Brewer (dalam Ashmore dkk, ed, 2001 : 18) mengatakan etnosentrisme adalah istilah teknis yang menjelaskan pandangan dimana suatu kelompok menjadi pusat dari semuanya, dan kelompok lain di skala (ukur) dan dinilai dengan referensi ini. Menurut Brewer pada isi inilah kebanggaan, harga diri kelompok dibangun kuat, dan mendorong pandangan yang superior dan “membagi” mana yang termasuk kelompoknya, mana yang “outsider”. Menurut Brewer (2001:19) ada empat proposisi yang penting untuk dipaparkan dalam konteks etnosentrisme ini :

1. Kelompok sosial manusia diorganisasikan melalui perbedaan katagori “*in group – out group*” atau prinsip kategori sosial.
2. Individu-individu menilai positif “*in group*” dan memelihara secara positif hubungan kerjasama dengan anggota dari “*in group*”.
3. Kepositifan “*in group*” dikembangkan melalui perbandingan sosial dengan kelompok “*out group*”, dimana atribut-atribut “*in group*” dan hasilnya dievaluasi sebagai lebih baik daripada atau lebih superior dari kelompok “*out group*”.
4. Hubungan antara “*in group dan out group*” dikarakterisasi melalui: antagonisme, konflik, dan serangan atau permusuhan.

Beberapa poin di atas sangat relevan untuk menggambarkan beberapa situasi di Indonesia, terutama ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat semakin menunjukkan kekuatannya dan melakukan berbagai definisi yang menunjukkan superioritas atas yang lain, misalnya atas nama putra daerah, kelompok, atau organisasi berdasar etnis atau wilayah, dan memiliki kuasa untuk menekan, secara sosial atau politik terutama.

Lebih dari itu kecenderungan kelompok etnis, sosial, politik tertentu yang disebut “superior” di masing-masing wilayah misalnya, sekarang katagorinya telah bertambah dengan tambahan label agama. Maka visi sosial, politik atau etnis yang juga menggunakan faktor agama (dogmatis) dan menganggap “superior” telah pula ikut dalam wilayah, yang bahkan dalam gerakan yang sifatnya fisik (penyerbuan atau perusakan), lebih dari perjuangan pada aspek moralitas, dan ini kerap kali bersinggungan dengan kelompok lain. Faktor agama, tentu saja tidak berarti hanya satu agama saja, di beberapa

negara lain, situasi tersebut juga muncul, untuk mengatakan bahwa fanatisme atau dogmatisme agama telah bergeser ke wilayah di luar wilayah moral yaitu sebagai penekan dan fisik.

Dalam skala yang besar, yaitu Indonesia, gejala separatisme (keinginan untuk memisahkan diri) pada era awal kemerdekaan, pada puncaknya dengan lepasnya Timor Timur (Timor Leste) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian Aceh, yang hampir saja lepas, dalam pengertian jika tanpa proses kesepakatan atau perdamaian, serta Papua, yang secara sporadis terus bergejolak. Kondisi ini sebenarnya mengisyaratkan tanda tentang problem kebangsaan, sebagaimana pada awalnya telah diupayakan oleh pendiri bangsa ini, untuk membuat pondasi kokoh berdirinya bangsa dan negara Indonesia.

Persoalan parsial di masing-masing wilayah atau konteks dan persoalan yang lebih besar yaitu bangsa Indonesia perlu dipahami sebagai kompleksitas konflik baik secara vertikal maupun horison-tal. Etnosentrisme yang dibayangkan sebagai ancaman besar terhadap NKRI masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama jika masalah separatisme sebagai contoh, memiliki akar persoalan pada hal yang mendasar, yaitu HAM, ketidakadilan, kesenjangan dan macetnya proses demokrasi.

Jika yang dibahas adalah etnosentrisme dalam artian kelompok entnis saja, Eriksen (dalam Ashmore, 2001:45) bahwa definisi bangsa (*nation*) memiliki hubungan dengan negara (*state*), tidak masalah apakah mereka memiliki kesamaan etnisitas atau tidak. Ini juga penting untuk mengatakan bahwa etnis Jawa yang mendominasi elit politik, belum menjadi ancaman atas kemungkinan perpecahan negara ini.

Mengelola konflik : Aspek Konsep dan Komunikasi

Dalam beberapa rujukan, pembahasan mengenai konflik biasanya menyangkut pertanyaan apakah konflik harus dihindari atau segera diakhiri atau perlu aspek pengelolaan atau manajemen. Perspektif pembahasan menyangkut pertanyaan apa manfaat dari konflik dan sebaliknya, jika ditangani atau tidak. Ivancevich, Kono-paske, Matteson (2005) menggambarkan bahwa peristiwa konflik bisa



bersifat fungsional dan disfungsional. Dalam skala kecil atau organisasional, konflik adalah suatu hal yang perlu untuk dicermati, untuk itu perlu pemahaman atas konflik, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1
Konflik dan Implikasi Penanganan

	Level of Intergroup Conflict	Probable Impact on Organization	Organization Characterized By	Level of Organizational Performance
Situation I	Low or none	Dysfunctional	Slow adaptation to environment Few changes Little stimulation of ideas Apathy Stagnation	Low
Situation II	Optimal	Functional	Positive movement toward goals Innovation and change Search for problem solutions Creativity and quick adaptation to environmental changes	High
Situation III	High	Dysfunctional	Disruption Interference with activities Coordination difficulties Chaos	Low

Sumber: Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2005

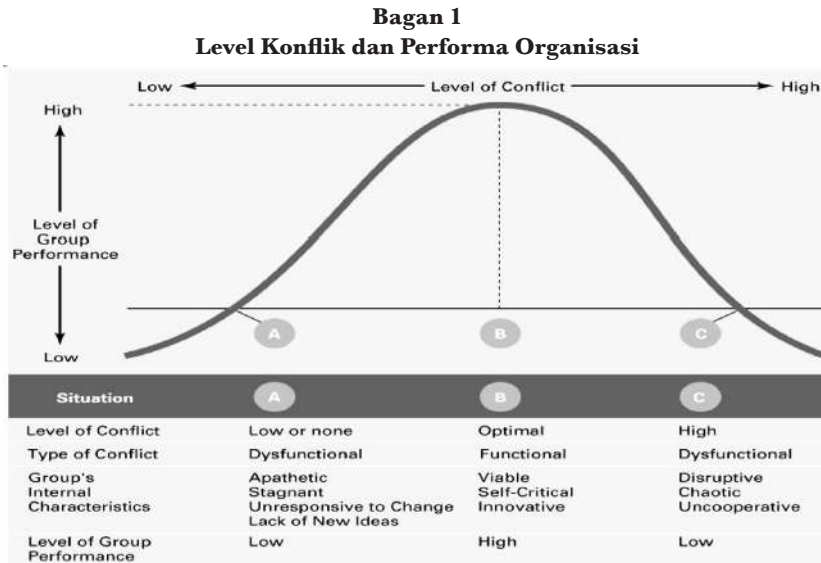
Situasi II adalah kondisi dimana konflik dianggap berjalan secara fungsional karena akan mengakibatkan performa, dalam hal ini organisasi menjadi optimal, karena konflik dikelola dengan baik, terutama bagaimana konflik yang terjadi bisa tetap masuk pada tujuan organisasi. Konflik yang terjadi justru bisa berpotensi menciptakan inovasi dan perubahan, pengalaman pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, termasuk kreativitas dan adaptasi, dibanding jika konflik hanya bersifat individu atau kelompok dan faktor emosional yang mendasarinya – tanpa solusi.

Dengan demikian fokusnya bukan konfliknya itu sendiri, tetapi solusi apa yang muncul dari peristiwa konflik itu. Inilah yang disebut sebagai konflik yang fungsional. Situasi I, jika dianggap tidak ada atau minim konflik juga dianggap disfungsional, karena kemungkinan dinamisitas yang rendah sehingga kondisi masyarakat atau organisasi menjadi stagnan.

Demikian pula pada situasi III, terlalu banyak konflik justru kontraproduktif dan disfungsional karena berpotensi untuk meng-

ganggu berbagai “operasional” yang ada dan kemungkinan situasi yang chaostik, karena fokus lapangan yang terkadi bukanlah penyelesaian konflik, namun justru pada konfliknya itu sendiri.

Untuk memperjelas situasi konflik dan aspek kemanfaatannya, Robbins, Coulter, dan Langton (2005) menyusun hubungan antara level konflik dan performa organisasi sebagaimana pada bagan berikut ini :



Sumber : Robbins, Coulter, and Langton, 2005

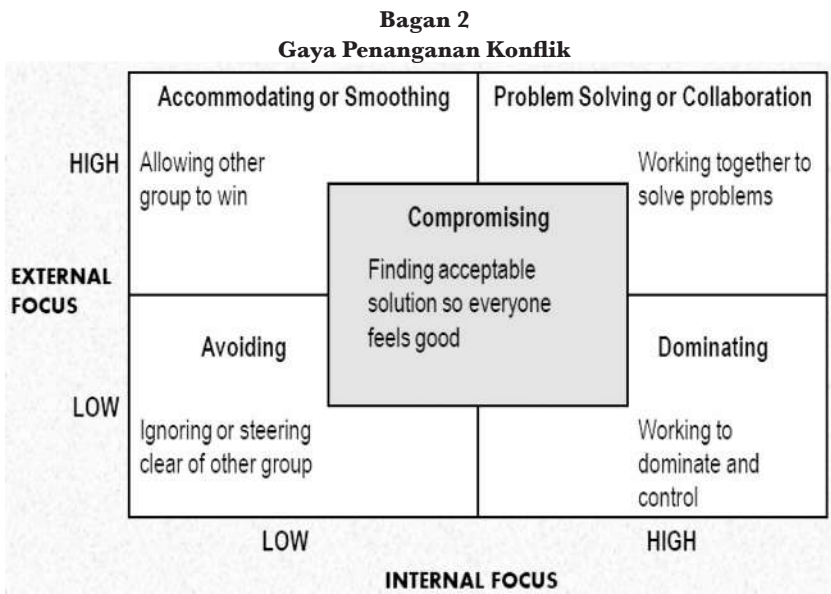
Dengan pemahaman yang lebih jelas bahwa konflik yang di-manajementi atau dikelola dengan baik akan menciptakan performa yang baik pula, terutama karena pihak-pihak yang berkonflik memiliki pengalaman mencari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan atau solusi atas konflik. Posisi B adalah kondisi optimal yang berkaitan dengan performa tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan beberapa kunci penting dalam penanganan konflik, pada umumnya, yang pertama adalah kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik, kedua mencari sekaligus waspada pada pihak ketiga yang bisa membantu menyelesaikan dan atau akan justru memperkeruh suasana. Ketiga adalah keterbukaan, “*fairness*” dan adaptasi, yaitu pemahaman atas posisi masing-masing dan kesiapan melakukan negosiasi, yang berkaitan



dengan kemungkinan mencari solusi baru yang bisa jadi berbeda dengan keinginan masing-masing pihak, untuk itu perlu kemampuan adaptasi. Sebagai contoh beberapa konflik pilkada, menurut Mahfud MD (www.republika.co.id, 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012), karena pihak yang kalah tidak mau menerima kekalahan dan melakukan berbagai cara untuk mengambil alih kemenangan.

Di bawah ini adalah bagan yang menunjukkan bagaimana gaya yang diperlukan untuk menangani konflik, sebagai berikut :



Sumber : Ivancevich, Konopaske, Matteson, 2005

Alternatif gaya tersebut merupakan varian dari posisi individu yaitu apakah lebih mementingkan posisi diri (fokus internal) dan fokus eksternal. Secara normatif ada keseimbangan diantara keduanya. Seseorang atau kelompok orang yang fokus pada diri sendiri akan menyulitkan dalam negosiasi penyelesaian konflik, atau dalam bahasa sehari-hari menggunakan istilah atau kata: “pokoknya”. Paduan keduanya merujuk pada situasi: mau membuka diri atas kemungkinan alternatif dalam penyelesaian masalah.

Kompromi sering disamaratakan dengan kolaborasi, semestinya kompromi menunjukkan derajat situasi yang bisa diterima bersa-

ma, terutama secara psikologis. Pada kolaborasi, posisinya ada pada fokus internal dan eksternal yang tinggi, oleh karenanya diperlukan kerjasama untuk mencari pemecahan masalah yang menjadi bagian dari negosiasi kedua belah pihak.

Inti dari aspek gaya penanganan konflik tersebut adalah maksimalisasi potensi komunikasi. Aspek komunikasi memegang peranan penting tidak hanya pada level konsep-praktik saja namun juga menyangkut seni dalam penanganan konflik tersebut. Apabila dikaitkan dapat dilihat variasinya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Hubungan Antara Gaya Penanganan Konflik dan Aspek Komunikasi

NO	GAYA PENANGANAN KONFLIK	ASPEK KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN
1	<i>AVOIDING</i>	CENDERUNG SEARAH, TIDAK ASERTIF DAN TIDAK KOOPERATIF
2	<i>DOMINATING</i>	SEARAH, ASERTIF TAPI TIDAK KOOPERATIF
3	<i>COLLABORATION</i>	DUA ARAH TIMBAL BALIK, ASERTIF DAN KOOPERATIF
4	<i>ACCOMMODATING</i>	CENDERUNG DUA ARAH, TIDAK ASERTIF, KOOPERATIF
5	<i>COMPROMISING</i>	DUA ARAH TIMBAL BALIK, ASERTIF DAN KOOPERATIF SEDANG

Pada dasarnya variasi gaya penyelesaian konflik diperlihatkan melalui bagaimana pola komunikasi yang terjadi diantara pihak yang berkonflik. Gaya “*avoiding dan dominating*” memiliki kecenderungan menggunakan pola satu arah, yang menunjukkan satu posisi lebih dominan dalam memegang peranan daripada posisi lainnya, aspek “komando” dari posisi “*dominating*” menunjukkan aspek asertif namun tidak kooperatif, karena situasinya yang mengarah pada dominasi satu pihak. Pada gaya *accommodating*, posisinya berbalikan dengan “*dominating*” terutama karena satu pihak memberi kesempatan pada pihak lain untuk “menang”, yaitu dengan menerima satu atau beberapa hal berkaitan dengan konflik yang ada.

Gaya “*collaborating dan compromising*” pada dasarnya sama, perbedaanya terletak pada intensitas atau kualitas dari komunikasi dan proses pemecahan masalah, “*compromizing*” cenderung pada level



sedang, pada “*collaborating*” ada pada posisi maksimal, karena secara fokus tinggi ada aspek internal maupun eksternal, dan kedua pihak sepakat untuk memecahkan masalah konflik tersebut, yang nampaknya cenderung rasional, dibanding “*compromising*” yang aspek psikologisnya nampak.

Maka kemudian bagaimana suatu konflik dan levelnya apakah pada tingkat geografis lokal atau yang lebih luas, kemudian pada tataran kelompok atau antar kelompok, demikian pula pada posisi horisontal atau vertikal, paparan di atas dapat dijadikan sebagai panduan untuk melakukan negosiasi, terutama untuk memetakan persoalan yang ada melalui sudut pandang pihak yang berkonflik, apakah fokus pada kepentingan internal atau kelompoknya atau juga fokus pada kepentingan eksternal.

Pengetahuan posisi ini membantu proses negosiasi dan seni penanganan konflik. Tentu saja dengan persyaratan sebagaimana dikemukakan di atas bahwa pihak-pihak yang berkonflik memang mau menyelesaikan konflik yang ada. Aspek rasionalitas bertemu dan emosionalitas, sehingga proses pemecahan konflik bukan hanya aspek emosi namun diselesaikan dengan aspek rasionalitas. Jam terbang pemecahan masalah membantu setiap potensi konflik yang ada, sehingga tidak berlarut dan menjadi hal yang menumpuk.

Catatan Penutup: Kearifan Lokal dan Harmoni Komunikasi

Tumpuan penyelesaian konflik di berbagai konteks di Indonesia selain aspek substansi persoalan dan “*goodwill*” pihak-pihak yang terlibat yaitu masyarakat, pemerintah, dan lainnya sesuai kultur bangsa, diperlukan pendekatan yang relatif pas dan kontekstual, yaitu mengembangkan kearifan lokal.

Pelajaran penting pada masa Orde Baru, yaitu ketika muncul konflik dalam berbagai konteks, penguasa cenderung menggunakan “*avoiding*” sebagai strategi untuk meniadakan peristiwa konflik menjadi membesar. Peredaman ini sebenarnya sangat kental dengan filosofi kultur Jawa yang sangat menekankan penghindaran konflik dan mengedepankan harmoni dalam kehidupan sosial. Dalam satu sisi ini bisa dianggap benar oleh wilayah kultur tersebut, namun pada sisi lain, jika substansi konflik tersebut tidak teratasi, peredam-

an tersebut seperti bara apa, yang sewaktu-waktu akan menyala lagi.

Panggabean (dalam Choppel, ed, 2006 : 217-220), memaparkan tentang bagaimana pendekatan rejim Orde Baru dalam menyelesaikan konflik :

1. Konflik adalah destruktif
2. Konflik sebagai perilaku
3. Konflik sebagai agresi
4. Perspektif hidrolis

Dalam pandangan rejim dan media massa Orde Baru, konflik digambarkan sebagai sesuatu yang desktruktif, pengertian lain adalah ini bagian dari strategi penguasa untuk mengamankan ideologi pembangunanisme, yang menjadi jargon utama Orde Baru. Setiap konflik dalam pandangan Orde Baru adalah potensi menggagalkan pembangunan, oleh karena itu harus diredam –ditiadakan. Media memerankan peranan yang penting dalam konteks ini, konstruksi yang dibangun adalah anti pembangunan kepada pihak yang dianggap mengganggu jalannya pembangunan. Sejarah mencatat pengusuran, pencaplokan tanah, dan sebagainya marak terjadi dan dilaksanakan oleh penguasa atas nama pembangunan.

Konflik sebagai perilaku dalam telaah Panggabean adalah, dalam persepsi pemerintah Orde Baru dan reportase media, konflik dipresentasikan sebagai suatu perilaku, khususnya perilaku kekerasan, dalam pendekatan ini menurut mereka tidak ada konflik sebelum ada (perilaku) kekerasan tersebut, kecenderungannya adalah tidak menganggap ada konflik atau problem sosial yang ada, tanpa adanya aspek perilaku kekerasan tersebut. Akibatnya sering terjadi pelabelan anti pembangunan dalam berbagai istilah untuk pihak yang berkonflik –terutama jika berbeda pandangan dengan penguasa.

Menurut Woodier (dalam Cole, ed, 2006:42), jumlah kasus-kasus pencemaran nama baik (*libel*) atau fitnah meningkat, terutama ketika karena ini bagian dari suatu “strategi”, yaitu termasuk aspek kepemilikan, pengaruh dan kekerasan oleh politisi, “orang kuat lokal atau daerah, kelompok religius dan sektor kepolisian dan angkatan bersenjata yang mengendalikan media. Dalam konteks ini,



media adalah alat penting dalam konteks pelabelan konflik tersebut.

Konflik sebagai agresi menurut Panggabean berimplikasi pada aspek represi, berbagai protes masyarakat atas suatu kebijakan misalnya, dianggap sebagai potensi agresi, oleh karenanya aparat akan melakukan upaya peredam melalui tindakan represif. Pendekatan hidrolik menggambarkan masyarakat sebagai suatu “*pressure cooker*”, dimana suatu waktu ada tekanan yang muncul, dan pemerintah meminta mereka untuk bisa mengendalikan diri, agar tidak meledak menjadi suatu peristiwa konflik atau kekerasan. Pengalaman pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa ketika pemerintah menangani konflik yang memuncak, akan muncul istilah-istilah: provokator, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pemancing di air keruh, aktor intelektual, untuk menunjukkan tekanan agar masyarakat bisa mengendalikan diri.

Aspek filosofis Jawa sangat kentara, yaitu ketika konflik dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni masyarakat, oleh karenanya harus dihindari atau ditiadakan. Filosofi Jawa yang dikedepankan oleh Soeharto, nampak perlu dikoreksi dan dikontekstualisasi. Dikoreksi karena interpretasinya ada dalam ranah politik, dikontekstualisasi karena filosofi tersebut akan mungkin konflik dengan filosofi kultur lain, yang lebih mengedepankan aspek keterbukaan dalam penanganan konflik.

Orang Jawa mengenal aspek harmoni, sebagai filosofi, sebagai hal penting dalam kehidupan sosial, namun harmoni tentu tidak identik dengan tidak ada konflik. Dalam beberapa “*paribasan*” atau semacam peribahasa Jawa, istilah “*ana rembug dirembug*” merujuk pada kalau bisa dibicarakan masalah bisa diselesaikan. “*Aja ngomong waton, nanging ngomongo nganggo waton*”, jangan asal bicara, tapi bicaralah dengan alasan – yang jelas, merujuk pada aspek argumentasi dan nalar yang tepat, agar komunikasi ada dalam arah yang jelas. “*Aja rumongso biso, nanging biso rumongso*” yang artinya janganlah selalu merasa bisa, namun bisalah merasa, ini adalah ukuran untuk menggambarkan posisi seseorang dan pengukuran diri, konteksnya adalah bagaimana menempatkan diri secara tepat dalam dinamika masyarakat agar tidak salah posisi dan merasa paling benar.

Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, dikenal “*aja gu-*

munan, aja kagetan lan aja dumeh” , yang merujuk pada jangan mudah terheran-heran atau heboh, jangan mudah kaget dan jangan merasa hebat, demikian pula “*wani ngalah duwur wekasane*” merujuk pada anjuran untuk berani mengalah dan memberi kesempatan pihak lain, agar konflik tidak semakin meruncing. Selain itu dikenal juga Falsafah *Tri Bata* memiliki tiga prinsip yaitu pertama “*rumongso melu handarbeni*”: merasa ikut memiliki, kedua: “*melu hangrungkebi*”: wajib ikut membela dengan ikhlas, dan ketiga “*mulat sariro hangrasa wani*” : mawas diri dan memiliki sifat berani untuk kebenaran.

Beberapa cuplikan “*paribasan*” dan falsafah merupakan kearifan lokal yang tetap memiliki nilai yang perlu direaktualisasi kembali, terutama menemukan gaya pemecahan masalah atas konflik yang terjadi baik tingkat lokal maupun yang lebih luas. Ini penting terutama untuk konteks ke-Indonesia-an dan ke-*Bhineka Tunggal Ika*-an, sebagai aset dan menemukan kearifan lokal ketika berhadapan dengan berbagai metode barat yang didominasi oleh aspek individual, rasionalitas, sementara, bangsa Indonesia, dengan filosofi ketimurannya juga mengenal aspek harmoni, rasa, dan aspek kolektivitas.

Pengalaman Orde Baru adalah sejarah atas interpretasi nilai kearifan lokal ketika digunakan hanya untuk kepentingan politik. Pengalaman Orde Reformasi adalah interpretasi demokrasi yang sangat berorientasi pada aspek hak individual atau kelompok, dan kehilangan nilai harmoni. Orang dengan santai menyatakan haknya atas hak orang lain, dan perdebatan itulah yang menonjol pada *frame* media, bukan substansi persoalan dan jalan keluar yang bijaksana, dalam konteks pengembangan kehidupan berbangsa. Penanganan konflik membutuhkan pula konsep dan seni berkomunikasi, maka pengembangan budaya komunikasi yang merujuk pada kearifan lokal dan membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang menarik untuk dikembangkan.§

Daftar Pustaka

- Ashmore , Richard D; Jussim Lee, and Wilder, David (eds). (2001). *Social Identity, Intergroup Conflict, and Conflict Reduction*. New York: Oxford University Press
- Augoustinos, Martha and Reynolds, Katherine J (eds). (2001). *Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict*. London: Sage Publication



- Cole, Benjamin. (2006). *Conflict, Terrorism and the Media in Asia*. New York: Routledge.
- Büntel, Marco and Ufen, Andreas (eds). (2009) *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. New York: Routledge.
- Charles A. Coppel (ed). (2006) *Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution*. New York: Routledge.
- Ivancevich, John M; Konopaske, Robert; Matteson, Michael T. (2005). *Organizational : Behavior and Management*, 7ed. New York: Mc Graw Hill/ Irwin.
- Raharjo, Turnomo, dkk (ed). (2012). *Literasi Media dan Kearifan Lokal: Konsep dan Aplikasi*. Penerbitan kerjasama UKSW, *United Board*, ASPIKOM, Buku Litera
- Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langto. (2005). *Fundamentals of Management* 5ed. Canada: Pearson Education.
- www.republika.co.id, 20 Januari 2012, diakses 21 Mei 2012
- www.suaramerdeka.com, 27 September 2011, diakses 21 Mei 2012





PENANGANAN KONFLIK

Teori Identitas dan Komunikasi Akomodasi: PERAN PENTING KOMUNIKASI DALAM MENGATASI KONFLIK

Dorien Kartikawangi

Teori tentang identitas (*identity theory*) dan komunikasi akomodasi (*communication accommodation theory*) dapat menjelaskan bagaimana interaksi antar identitas terjadi. Pemahaman akan hal ini dan upaya implementasinya akan dapat membantu penyelesaian atau pencegahan konflik.

Identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat dimana komunikasi merupakan mata rantai yang membuat hubungan tersebut terjadi. Ketika individu dengan karakteristik dan identitasnya masing-masing saling berinteraksi melalui komunikasi, dapat menghasilkan sikap saling menghargai dan menerima, atau sebaliknya.

Dalam situasi ini individu secara efektif mampu mempertahankan identitasnya, tetapi juga mampu menelusuri identitas lainnya dan membolehkan individu lain merasakan identitasnya atau disebut sebagai *functional biculturalism*. Melalui komunikasi lintas budaya, yaitu bahasa dan perilaku bahasa (*language and language behavior*), perilaku nonverbal (*nonverbal behaviour*), nilai-nilai (*values*), dan pola pikir (*pattern of thought*) dapat diatasi sehingga kemungkinan munculnya konflik dapat dihindari.

Kata kunci: identitas, komunikasi akomodasi, konflik, komunikasi lintas budaya

Pendahuluan

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara merepresentasikan ribuan pulau yang menjadi wadah ribuan kekhasan lokalitas pribumi dengan segala perbedaannya yang disatukan dalam semangat kebangsaan (Alfian, 2011). Sekarang banyak orang mengatakannya sebagai *Bhinneka tinggal luka*, anekdot memilukan yang muncul belakangan ini menggantikan semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*. Anekdote tersebut muncul sebagai ekspresi dari keprihatinan terhadap mudarnya nilai *guyub rukun*, gotong royong dan harmoni sosial yang sangat kental hidup di masyarakat kita di masa lampau

Seiring dengan euphoria reformasi dan semangat desentralisasi, konflik horisontal antar kelompok etnis dan agama yang disertai dengan anarkisme dan radikalisme justru semakin menguat, seperti konflik di Sampit, Maluku, Poso dan Papua. Keragaman lebih dari 491 etnis, 567 bahasa dan dialek serta aneka agama dan berbagai kelompok yang selama ini dibangga-banggakan sebagai ciri khas dan modal sosial bangsa justru berubah menjadi pemicu konflik, kekerasan dan pertikaian (Iqbal & Chusniyah, 2011), seiring dengan semakin mudarnya berbagai bentuk kearifan hidup lokal yang berjiwa multikultur (Nugrohadi, 2007). Sebaliknya benih intoleransi terhadap kelompok minoritas dan kelompok yang berbeda bahkan secara tidak disadari dipupuk sejak pendidikan dini (Marpinjun, 2007; Riswan, 2007). Di satu sisi berbagai upaya dan perhatian telah diberikan oleh pemerintah, kalangan intelektual dan sosial serta tokoh-tokoh lintas agama untuk mengatasi masalah ini. Namun di sisi lain pertikaian, kekerasan dan anarkisme justru semakin marak.

Dalam konteks ini, bagaimana komunikasi dapat berperan serta, baik mencegah maupun mengatasi atau menagani konflik. Bukan hal yang mudah, namun bukan pula tidak mungkin. Berikut ini akan dipaparkan tentang teori identitas dan akomodasi komunikasi yang dapat menyumbangkan pemikiran resolusi konflik dari perspektif komunikasi. Dengan memahami dan mengimplementasikan keduanya, rasa percaya antar individu dan kelompok dapat berkembang. Karenanya, pendidikan karakter bagi agen perubahan yang menyertakan pengembangan kemampuan komunikasi dipandang perlu dalam upaya ini.



Teori Komunikasi tentang Identitas

Tentang identitas, Michael Hect dalam Littlejohn dan Foss (2005) menyatakan bahwa didalamnya terdapat tiga konteks budaya, yaitu: individu, komunal dan publik. Dikatakan bahwa identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat dimana komunikasi merupakan mata rantai yang membuat hubungan tersebut terjadi.

Terdapat empat dimensi identitas, yaitu kognisi, afeksi, perilaku dan transenden (spiritual). Komunikasi merupakan alat yang membentuk atau mengubah identitas ketika terjadi interaksi sosial. Dalam hal ini terdapat *subjective dimension* (yang dilihat oleh diri sendiri) dan *ascribed dimension* (yang dilihat/dikatakan oleh orang lain). Keduanya berinteraksi dalam empat tingkatan, yaitu *personal layer* (keberadaan diri dalam situasi sosial), *enactment layer* (pengetahuan orang lain berdasarkan perilakunya), *relational* (kaitannya dengan individu lain), dan *communal* (ikatan kelompok atau budaya yang lebih besar).

Stella Ting-Toomey dalam Littlejohn dan Foss (2005) melanjutkan pemikiran Hect dengan mengeksplorasi bagaimana identitas dinegosiasi dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam berbagai budaya. Identitas atau refleksi diri dibentuk melalui negosiasi ketika individu menyatakan, memodifikasi atau menentang identifikasi diri dan orang lain.

Lebih lanjut, dalam diri individu terdapat identitas kebudayaan dan identitas etnik. Identitas kebudayaan dikaitkan dengan rasa keterkaitan pada kelompok kebudayaan yang lebih besar. Hubungan kebudayaan yang penting bagi banyak orang adalah keetnikan. Identitas etnik terdiri dari gabungan keturunan atau sejarah kelompok dari satu generasi dan generasi lainnya. Termasuk didalamnya negara, ras, agamanya, dan bahasa. Identitas etnik dapat menjadi bagian penting dalam menentukan siapa diri seseorang sebenarnya. Identitas etnik dan kebudayaan ditandai oleh *value content* atau evaluasi yang dibuat berdasarkan pada keyakinan-keyakinan akan budaya dan *saliance* atau ciri khas berdasarkan kekuatan afiliasi.

Menurut Ting-Toomey, ketika individu berkomunikasi dengan kelompok kebudayaan yang sama maka akan merasakan persamaan, kejelasan, keterikatan dan konsistensi. Namun tidak demiki-

an halnya ketika berkomunikasi dengan kelompok kebudayaan yang berbeda. Disamping itu, terdapat individu yang secara efektif mampu mempertahankan identitasnya, tetapi juga mampu menelusuri identitas lainnya dan membolehkan individu lain merasakan identitasnya. Ting-Toomey menyebutnya sebagai *functional biculturalism*. Ketika individu mampu berganti dari satu konteks budaya ke lainnya dengan sadar dan mudah, maka ia sudah pada tahap *cultural transformer* karena telah memiliki kompetensi lintas budaya (*intercultural competence*). Kompetensi lintas budaya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengetahuan, kesadaran, dan ketrampilan. Dengan tiga komponen ini negosiasi identitas melalui komunikasi dinilai efektif jika pihak-pihak yang berkomunikasi merasa dipahami, dihormati, dan dihargai.

Melengkapi Hect dan Ting-Toomey, Condon (1974) dalam kajiannya mengklasifikasikan masalah komunikasi lintas budaya dalam empat kategori, yaitu bahasa dan perilaku bahasa (*language and language behavior*), perilaku nonverbal (*nonverbal behaviour*), nilai-nilai (*values*), dan pola pikir (*pattern of thought*). Dua kategori pertama lebih mudah dikaji dan dijelaskan, sedangkan dua kategori terakhir tidak secara langsung dapat teramati. Dalam negosiasi lintas budaya, masalah yang muncul tidak hanya disebabkan oleh 'apa yang dikatakan', tetapi juga 'bagaimana hal dikatakan tersebut diinterpretasikan'

Teori Komunikasi Akomodasi (*Communication Accommodation Theory*)

Giles menjelaskan perkembangan teori akomodasi komunikasi yang juga berasal dari teori komunikasi interpersonal. Teori akomodasi komunikasi kemudian banyak diimplementasikan oleh para peneliti untuk mengkaji komunikasi kelompok dan organisasi, serta komunikasi massa. Penjelasan terbesut ditulis oleh Giles bersama dengan Ogay dan dimuat dalam Buku *Explaining Communication Contemporary Theories and Exemplars*. (2007: 293 – 332)

Adanya beragam dimensi sosial yang terlibat dalam setiap situasi komunikasi memunculkan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak mengubah gaya komunikasinya untuk disesuaikan



dengan satu dengan yang lain dan perilaku yang seperti apakah yang kemudian muncul dalam relasi antar pihak yang berinteraksi. Dalam menjawab pertanyaan tersebut teori akomodasi komunikasi (*Communication Accomodation Theory*, selanjutnya disingkat CAT) menyediakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan beragam penyesuaian yang dilakukan individu untuk menciptakan, memelihara atau mengurangi jarak dalam interaksi. CAT mengeksplorasi perbedaan cara pelaku interaksi mengakomodasi komunikasinya, motivasi melakukannya, serta konsekuensinya.

CAT yang ditujukan untuk masalah komunikasi interpersonal pada gilirannya terkait dengan konteks yang lebih luas, seperti antar kelompok. Artinya, seringkali komunikasi antar individu dilandasi oleh identitas personal sebagai anggota organisasi atau kelompok masyarakat tertentu. CAT yang mulai diterima pada awal tahun 1970-an telah melalui berbagai perubahan konseptual dan elaborasi teoritikal, seperti misalnya bahwa CAT telah bergeser dari *speech* ke nonlinguistik.

Pada awalnya CAT merupakan salah satu model sosiopsikologikal yang mengeksplorasi logat dan pergeseran *bilingual* dalam interaksi, saat ini CAT telah berkembang menjadi model interdisipliner tentang proses-proses relasional dan identitas. Dalam hal ini selain bahasa, simbol-simbol lain seperti pola makan, gaya rambut dan lain sebagainya juga dapat dipahami melalui perspektif CAT.

Prinsip-Prinsip Dasar dan Konsep CAT

Dalam tulisannya, Giles dan Ogay (2007, hal 293 - 307) menjelaskan secara sistematis prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi CAT. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah bahwa:

- *Communication is influenced not only by features of the immediate situation and participants' initial orientations to it, but also by the socio-historical context in which the interaction is embedded* (komunikasi tidak hanya dipengaruhi oleh gambaran situasi sesaat dan orientasi inisial peserta, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks sosio-historikal dimana interaksi terjadi)
- *Communication is not only a matter of merely and only exchanging information about facts, ideas, and emotions, but salient social category membership are often negotiated during an interaction through process of accom-*

modation (komunikikasi tidak sekadar masalah dan pertukaran informasi tentang fakta, gagasan dan emosi, melainkan juga menegosiasikan keanggotaan kategori sosial selama terjadinya interaksi melalui proses akomodasi)

- *Interactants have expectations regarding optimal levels of accomodation. This expectation are based on stereotypes about outgroup members as well as on the prevailing social and situational norms* (peserta interaksi memiliki harapan bedasarkan tingkat akomodasi yang optimal. Harapan tersebut berdasarkan pada stereotipi tentang anggota kelompok sebagaimana norma sosial dan situasional)
- *Interactants use specific communication strategies (in particular, convergence and divergence) to signal their attitudes towards each other and their respective social group* (peserta interaksi menggunakan strategi komunikasi tertentu (khususnya konvergensi dan divergensi) untuk menandakan sikap mereka satu dengan yang lain dan kelompok sosialnya)

CAT menyatakan bahwa individu menggunakan komunikasi dalam rangka mengindikasikan perilaku mereka satu dengan yang lain dan sebagai ukuran jarak sosial mereka. Perilaku konstan baik mendekat atau menjauh dari yang lain dengan mengubah perilaku komunikasi disebut sebagai akomodasi. Strategi yang paling banyak diteliti dan menjadi inti historis CAT adalah konvergensi (*convergence*). Konvergensi ini didefinisikan sebagai strategi dimana individu mengadaptasi perilaku komunikasinya berkaitan dengan pilihan bahasa yang luas (misalnya logat), paralinguistik (misalnya jeda) dan gambaran nonverbal (misalnya senyum) dengan cara tertentu supaya menjadi lebih mirip dengan perilaku lawan bicaranya. Sebaliknya, strategi divergensi (*divergence*) mengarah pada perbedaan logat bicara maupun nonverbalnya antara satu dengan yang lain (Giles dan Ogay, 2007, hal 295). Distingsi konseptual lainnya yang penting adalah apakah konvergensi atau divergensi tersebut ke atas (*upward*) atau ke bawah (*downward*) berkaitan dengan valensi sosialnya (Giles dan Powesland, 1975).

Terdapat motif yang melatarbelakangi mengapa orang melakukan strategi konvergensi maupun divergensi dalam interaksinya dengan orang lain. Motif konvergensi adalah untuk memperoleh kesepakatan satu dengan yang lain. Byrne (1971) menyatakan premis bahwa semakin sama kita dengan teman bicara, semakin tinggi



hormat teman bicara tersebut pada kita, dan semakin besar penghargaan sosial yang dapat diharapkan.

Menyamakan gaya bahasa juga akan meningkatkan efektivitas komunikasi yang kemudian juga diasosiasikan dengan meningkatnya prediksi, mengurangi ketidakpastian dan terciptanya pemahaman bersama. Namun demikian, konvergensi dapat juga merugikan, misalnya dimungkinkannya kehilangan identitas personal maupun sosial ketika berinteraksi. Sedangkan motif yang melatarbelakangi divergensi adalah keinginan untuk menekankan perbedaan atau jarak para peserta interaksi, biasanya berdasarkan keanggotaan kelompok.

Mengikuti premis dari *social identity theory*, hal ini biasanya muncul ketika para peserta interaksi mendefinisikan situasi lebih kepada '*intergroup*' ketimbang '*interindividual*'. Interaksi *intergroup* adalah ketika masing-masing individu memperlakukan satu sama lain dalam konteks keanggotaan kategori sosialnya. Interaksi *interindividual* adalah ketika pelaku interaksi berkomunikasi satu dengan lainnya berdasarkan perbedaan individual dalam watak dan sifat, dan dimana etnis, jenis kelamin, usia dan lain sebagainya bukan menjadi hal yang utama.

Dinamika komunikasi membuat kondisi ini semakin rumit mengingat identitas sosial sebagian dibagikan diantara pelaku interaksi dan sebagian tidak. Divergensi juga dapat diadopsi dalam rangka membentuk atribusi dan perasaan penerima. Komunikasi melebur dalam konteks makro yang luas. Tidak hanya terdapat individu yang berinteraksi, melainkan juga mereka yang mewakili keanggotaan kategori sosial yang berbeda. Hubungan yang telah lalu maupun saat ini antar kelompok sosial tersebut membangun suatu konteks sosiohistorikal bagi interaksi mereka. Pengaruhnya pada upaya akomodasi dan luarannyalah yang menjadi perhatian utama CAT, yang menjelaskan bahwa hubungan antara kelompok sosial mempengaruhi akomodasi pelaku interaksi satu dengan yang lain.

Evaluasi atas Konvergensi dan Divergensi

Upaya integrasi sosial atau indentifikasi dengan alat konvergensi telah secara umum memperoleh evaluasi positif oleh penerima



(Bourhis, Giles, & Lambert, 1975). Konvergensi memberikan validasi pada bagaimana penerima mengekspresikan diri dengan caranya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Buller, LePoire, Aune, & Eloy (1992) menyatakan bahwa: *"Increasing similarity in communicative behavior such as speech rate increase both speakers' perceived attractiveness as well as their ability to gain addressees' compliance."* (meningkatkan kemiripan dalam perilaku komunikasi seperti rata-rata pembicaraan meningkatkan daya tarik penerimaan dan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan masing-masing pembicara). Menyatukan pembicaraan umumnya dilihat lebih menguntungkan daripada membedakan, dan lebih dapat memelihara serta dipandang lebih efisien dan kooperatif dalam komunikasi mereka.

Motif untuk mencapai konvergensi merupakan hal yang sangat penting baik untuk memperoleh reaksi positif maupun negatif. Penyampai pesan memiliki setidaknya mengandalkan tiga faktor dalam membuat inferensi dan evaluasi yang baik, yaitu kompetensi bahasa lawan bicara, upaya yang dimunculkan, dan tekanan eksternal yang memaksa pembicara bertindak secara khusus (Simard, Taylor, & Giles, 1976). Namun demikian, jika pembicara diketahui tidak memiliki kompetensi komunikasi yang semestinya dan terganggu oleh tekanan eksternal, non-akomodasi yang terjadi dapat diabaikan.

Variabel kekuasaan (*power*) juga tidak dapat dihilangkan. Umumnya mereka yang dalam posisi subordinat akan mengupayakan pemahaman atas superordinat, hal ini disebut sebagai konvergensi ke atas (*upward convergence*). Sebaliknya, status individual yang lebih tinggi dapat menyamakan dengan yang lebih rendah disebut sebagai konvergensi ke bawah (*downward convergence*). Tindakan akomodatif juga dihargai secara berbeda oleh anggota kelompok, tergantung pada seberapa kuat ikatan mereka pada kelompok.

Akomodasi dapat bervariasi tergantung pada perkiraan pembicara terhadap pola komunikasi penerimaannya (Bradac, Mulac, & House, 1988; Street, 1982). Lebih lanjut, penerima memiliki harapan (*expectations*) pada tingkat optimal konvergensi dan divergensi. Harapan ini berdasarkan stereotipi anggota kelompok tertentu, khususnya kompetensi komunikasinya. Gallois dan Callan (1991) mengatakan bahwa harapan pembicara pada tingkat konvergensi



atau divergensi tertentu juga dipengaruhi oleh norma situasional bagi kontak *intergroup* yang diturunkan, seperti misalnya bahasa apakah yang paling tepat digunakan pada situasi tersebut.

Baik konvergensi maupun divergensi dapat mutual dalam kasus dimana dalam komunikasi yang terjadi komunikan memiliki kesamaan mengarah pada penyatuan atau pemisahan, namun dapat juga nonmutual dalam kasus dimana dalam komunikasi yang terjadi antara komunikan yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan arah. Sementara itu konvergensi yang terjadi dapat sebagian (*partial convergence*) atau seluruhnya (*complete convergence*).

Rasa Percaya dalam Hubungan Antar Kelompok

Rasa percaya pada dasarnya tumbuh dan berkembang karena pengenalan terhadap kemampuan, integritas dan niat baik dari pihak yang dipercayai (Dahesihsari, Murniati & Erlan, 2011). Namun rasa percaya juga bisa berkembang terhadap anggota kelompok, walaupun secara pribadi tidak dikenali dengan baik, yang disebut dengan *identity based trust*. Lebih spesifik lagi Mc Allister (1995) menyebutnya sebagai *affect based trust* karena rasa percaya tersebut muncul hanya atas dasar afeksi. Dengan demikian proses kategorisasi juga mempengaruhi rasa percaya (*trustworthiness*) terhadap anggota lain dalam kelompok tersebut.

Sejumlah penelitian telah menunjukkannya dalam fenomena yang disebut dengan *in group bias*, yakni kecenderungan menilai kelompoknya jujur, kooperatif dan bisa diandalkan atau dipercaya. Sebaliknya kelompok lain (*out group*) dipandang kurang jujur, kurang bisa diandalkan dan relatif rendah keterpercayaannya.

Identitas sosial yang sama menghasilkan rasa percaya yang lebih besar terhadap sesama anggota kelompok. Pada saat yang sama juga memunculkan rasa tidak percaya terhadap kelompok lain yang merupakan lawan atau pesaing dari kelompoknya, yang dipandang sebagai ancaman (Brewer, 2007).

Penutup: Pendidikan Karakter

Dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, pendidikan karakter bagi agen perubahan menjadi penting. Karakter dalam



pemahaman Aristotelian merujuk pada kepribadian yang bermoral. Para pemikir modern juga mengkaitkan karakter dengan tata nilai dan kepribadian. Simon Philips (2008) mendefinisikan karakter sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh seseorang.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter terkait dengan cara pandang seseorang, hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang menjadi sifat alamiah dari seseorang serta kualitas kepribadian yang ditunjukkan seseorang dalam wujud perilaku yang baik atau bermoral. Dari pengertian itu, unsur-unsur karakter meliputi: sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan dan kemauan serta konsepsi diri.

Pengetahuan yang baik, keinginan yang baik dan perilaku yang baik, merupakan ciri dari karakter, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lickona (1991) dalam buku “*Educating Character*,” bahwa karakter mempunyai tiga komponen nilai penting yaitu moral *knowing*, moral *feeling* dan moral *behavior*. Dalam perujudannya ketiga komponen nilai tersebut secara simultan saling tergantung, saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketiga komponen nilai tersebut mengarahkan individu pada maturitas perkembangan moral yang sangat penting dalam kehidupan individu.

Pendidikan karakter yang menyertakan pengembangan diri individu dalam kemampuan komunikasi lintas budaya dan komunikasi akomodasi akan menjadi salah satu cara untuk mencegah dan menagani konflik yang makin marak. Individu, tetap dengan identitasnya memiliki rasa percaya pada orang lain, menjadi lebih mampu menerima orang lain dan perbedaan yang ada, serta dapat saling menghargai dan menghormati. §

Daftar Pustaka

- Alfian, Ilham Nur (2011). Prolog. Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Allport, G.W. (1958). *The Nature of Prejudice*. Cambridge, Garden City, NY: Doubleday.



- Amelia, A (2009). Kaitan antara persepsi karyawan lokal terhadap strategi komunikasi yang dilakukan karyawan Jepang dengan hubungan antar kelompok antara karyawan Jepang dan lokal. Studi di PTN. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.
- Angela (2011). Gambaran *Trust* Pedagang Etnis Tionghoa terhadap Pemerintah Indonesia Pasca Kerusuhan Mei 1998. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.
- Astuti, Nurul Margi (2010). Gambaran Identifikasi Sosial Berbasis Angkatan Pada Siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.
- Brewer, M.B. (2007). “*The Social Psychology of Intergroup Relations: Social Categorization, In-group Bias and Out-group Prejudice*”. In A.W. Kruglanski & E.T. Higgins (2nd.ed.) *Social Psychology: Handbook of Basic Principles*. New York: The Guilford Press.
- Condon, J.C. (1974). “*Perspective for the conference*”. In J.C. Condon & M. Saito, eds., *Intercultural Encounters with Japan*. Tokyo: Simul Press.
- Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana., & Erlan, Hoshael Waluyo.(2011). Menonjolnya Kategorisasi Agama dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5 (2), 105-117.
- Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana., & Erlan, Hoshael Waluyo.(2011). *Dinamika Hubungan Antarkelompok*. Buku Ajar. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Dahesihsari, Rayini., Murniati, Juliana. & Erlan, Hoshael Waluyo. (2011). “Membangun Ikatan Saling Berbagi Identitas dalam Kemajemukan Masyarakat Indonesia”. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Dovidio, J.F., Gaertner, S.I., & Kawakami, K. (2003). “*Intergroup Contact: The Past, Present and The Future*. *Group processes & Intergroup Relations*”, 6(1), 5-21.
- Gallois, C. (2000). “*Accommodating intercultural encounters: intergroup and interpersonal dimensions*”. *Proceeding of the 7th. International Conference on Language and Social Psychology*. Cardiff: UK.
- Gardner, R.C., Masgoret, A.M., & Tremblay, P.F. (1999). “*Home background characteristics and social language acquisition*”. *Journal of Language and Social Psychology*, 18, 419-437.
- Giles, Howard & Tania Ogay (2007). “Communication Accommodation Theory”, in *Explaining Communication Contemporary Theories and Exemplars*, Bryan B. Whaley and Wendy Samter (ed), New Jersey: Lea
- Giofani, Maria (2009). Hubungan Antarkelompok pada Siswi Kelas 3 SD Mardi Waluyo Cipanas. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.
- Gudykunst, W.B. (1998). *Bridging differences. Effective Intergroup Communication*. (3rd.ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Iqbal, M., & Chusniyah, Tutut (2011). Islam menolak/menerima pluralisme. *Prosiding Temu Ilmiah Nasional Psikologi Peran Psikologi dalam Pluralisme Masyarakat Indonesia*. Fakultas Psikologi Univer-

- sitas Airlangga.
- Jini, F. (2011). Perbedaan *Trust* Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta terhadap Polisi Lalu Lintas. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.
- Jones, E., Watson, B., Gardner, J., & Gallois, C. (2004). "Organizational communication: challenges for the new century". *Journal of Communication*, Dec 2004, 722-750.
- Kartikawangi, Dorian (2009), *Dinamika Komunikasi Eksternal Organisasi: Konvergensi Simbolis dan Komunikasi Akomodasi dalam Relasi Perusahaan Multinasional dengan Pemerintah dan Masyarakat di Indonesia*.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. (2005). *Theories of Human Communication* (8th ed). Belmont, CA: Wadsworth
- Marpinjun, Sri. (2007) *Isu keberagaman dalam pendidikan taman kanak-kanak (Kasus di Kabupaten Bantul)*. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- McAllister, D.J. (1995). "Affect and cognition based trust as a foundation for interpersonal cooperation in organizations". *Academy of Management Journal*, 38, 24-59.
- Mu'in, Fatchul. (2011). *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik & Praktik*, Ar-Ruzmedia, Jakarta.
- Nugrohadi, G. Edwin (2007). *Merajut keragaman Indonesia dengan local wisdom yang multikultur*. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Putnam, L.L., Poole, M.S. (1987) *Conflict and Negotiation*. Newbury Park, CA: Sage
- Rengganis, Nindyah (2007). *Kelompok minat mahasiswa: berkegiatan sekaligus mengelola keberagaman*. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Riswan, Yulianingsih (2007). *Ragam aksi agama dalam masyarakat*. Program pembuatan dan diseminasi film pendek tentang eksklusivisme pada pendidikan anak usia dini. Prosiding Semiloka Nasional Keragaman Suku Agama Ras Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani Risiko Tantangan Peluang. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Sihotang, Kasdin, et.al (2011). *Best Practices of Character Building: Kejujuran sebagai Budaya Akademik*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya & Dikti, Jakarta.
- Soerjodipocero, R (2008). *Gambaran proses komunikasi antar kelompok dalam tim pelatihan program pengembangan diri siswa dan guru di*



DKI Jakarta Yayasan Putra Bahagia. Skripsi Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya.

- Tajfel (1982). “*Social psychology of intergroup relations*”. *Annual Review of Psychology*, 33, 1-39.
- Turner, J.C. (1982). “*Towards a cognitive redefinition of the social group*”. In H. Tajfel (Eds). *Social Identity and Intergroup Relations*. Cambridge: University Press.
- Yuki (2003). “*Intergroup comparison versus intergroup relationships: a cross cultural examination of social identity theory in north american and east asian cultural context*”. *Social Psychology Quarterly*, 66 (2), 166-183.



IDEOLOGI SANTUNISME DAN PENYELESAIAN KONFLIK

Mustika Ranto Gulo

Konflik bisa menimbulkan hal-hal negatif namun tidak bisa dimungkiri juga bahwa konflik itu justru melahirkan hal-hal positif. Dalam konflik yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat masyarakat ingin melihat cara penyelesaian yang nyata sesuai dengan wibawa yang melekat kepada seorang pemimpin yang dipuja dan patut dihormati.

Melihat akar permasalahan konflik di dalam internal partai, salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian sikap seorang pemimpin. Ragu-ragu dan terlalu lama membiarkan luka-luka itu busuk dan meluas (epidemik), tidak cepat dalam melokalisir persoalan, dengan cara menjatuhkan sanksi dan hukuman kepada kader yang nakal (kader politikus hitam).

Konflik dapat menguji sebuah hubungan dalam organisasi, sekaligus dapat memunculkan kebenaran baik karena dominasi ataupun kebenaran yang muncul karena proses hukum. Menempatkan diri pada posisi yang benar dalam organisasi, memahami hak dan kewajiban, serta tanggungjawab adalah bagian dari upaya memunculkan kebenaran yang bisa meminimalkan gesekan-gesekan.

Kata kunci: konflik partai politik, komunikasi organisasi, penyelesaian konflik

Latar Belakang Masalah

Prof. Hamdi Muluk, mengatakan: “Berpolitik Santun Hanya Kedok, demikian Guru besar psikologi Universitas Indonesia (UI), menambahkan “tidak ada santun dalam politik”. Kritik sangat keras ini telah mengundang banyak reaksi bahkan dunia akademisi ikut merumuskan apa itu ”Berpolitik Santun”. Kemudian saya menyebutnya sebagai sebuah ideologi baru yang dikembangkan oleh penganut faham santunisme. Prof. Doni Gahral Ardian, Dosen Filsafat UI, “mempertanyakan faham santun dalam politik, bahwa santun itu mengandung makna tipu muslihat, karena tidak ditemukan filsafat santun dalam berpolitik”.

Fenomenal, bahwa sudah terlanjur jauh citra kepemimpinan SBY itu berideologi santunisme. Oleh karena itu kritik apapun, tidak akan bisa melepaskan diri dari image yang sudah menempel padanya sejak tahun 2004 itu. Gaya SBY yang santun, diharapkan bisa menyelesaikan masalah pelik dalam tubuh Partai Demokrat yang didirikannya itu. Masyarakat berharap agar SBY berkonsentrasi untuk urusan kesejahteraan rakyat tanpa mengurus partai lagi sejak ia menjadi Presiden RI terpilih; Seharusnya menyerahkan urusan partai itu kepada Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Celaknya Ketua Umum Partai Demokrat pun menjadi bagian dari masalah itu sendiri, ia disalibkan sebelum terbukti bersalah oleh opini publik. Inilah masalahnya, tekanan publik sangat keras, bahkan sedang disorot oleh media dan para lawan politiknya, baik dari dalam Partai Demokrat sendiri maupun dari eksternal partai.

Prahara ini dimulai dengan sidang Pengadilan Tipikor kasus Nazarudin dan Angelina Sondakh, dimana nama Anas disebut-sebut turut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang, di Bogor. Sejak itu persoalan dalam internal partai bagaikan bola panas yang sangat liar. Konflik berkepanjangan semakin bias sehingga menimbulkan sikap saling curiga antarkader, rasanya sangat tidak nyaman.

Masyarakat berharap agar SBY tampil dengan wibawanya tegas untuk mengambil sikap dalam waktu yang tepat dan tidak terlalu lama. Ujian bagi SBY apakah mampu menghadapi korup-

tor dengan santun? Dalam kesempatan ini, masyarakat menunggu dan masih merindukan agar sosok SBY menjadi negarawan sejati, layaknya pahlawan seperti presiden-presiden pendahulunya. Harus diakui, untuk menjadi presiden dua periode itu adalah prestasi maksimal dalam merebut kepercayaan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, masalah pelik dalam Partai Demokrat pun seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang santun, mudah, berwibawa dan cepat.

Perumusan Masalah

Santun berasal dari bahasa melayu kuno, yang dapat diartikan sopan bertutur kata, beretika dan bermoral. Kata ‘santun’ ini telah dicitrakan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah menjadi Presiden RI untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014. Citra santun yang disematkan pada SBY telah membawa kesuksesan kepada seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden selama dua periode sampai sekarang.

Tuaian badai kritik atas pencitraan tersebut datang silih berganti, namun nyatanya SBY tetap saja langgeng melewati badai itu, misalnya kejadian yang melanda oknum elit Partai Demokrat yang terlibat korupsi yang telah menimbulkan konflik di dalam internal partai. Selain itu, hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) tentang adanya penurunan tajam kinerja pemerintahan jilid II (Kompas, 17 Juni 2012). Dua peristiwa tersebut di atas menguji ideologi santunisme yang dianut oleh SBY dan para pengikutnya.

Santunisme mungkin saja sebagai istilah baru, namun penganut ideologi kesantunan yang menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam bertindak, telah sukses membesarkan nama SBY. Memaknai arti santun berpolitik, berarti cara-cara politik bermoral tanpa kekerasan baik fisik maupun kata-kata, tuduhan atau fitnah.

Konflik Wajar Terjadi

Konflik wajar saja terjadi, bahkan tidak bisa dihindari; yang terpenting bagaimana mengelola konflik itu sehingga bisa mencapai hasil akhir yang memuaskan. Konflik antara pemimpin dan kader dalam suatu partai memang tidak dapat dihindari karena jiwa poli-



itik itu selalu memihak kepada kepentingan saja. Konflik itu terjadi di antara dua pihak (individu) yang bersengketa, atau lebih, bahkan antarkelompok, antarsuku dan antarbangsa.

Konflik adalah suatu situasi dimana ada dua atau lebih pendapat, keinginan dan pemahaman yang berbeda sehingga ada upaya menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Dalam rangka mempertahankan kebenaran menurut diri sendiri itulah terjadi upaya mengalahkan kebenaran lainnya, sehingga terjadi perang ideologi bahkan bisa perang secara frontal seperti konflik di beberapa belahan dunia.

Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan cara “paksaan”, maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya proses paksaan (koersi). Memaksakan peraturan demi kebersamaan, misalnya pemaksaan ideologi tertentu sehingga pada proses menuju masyarakat yang berkelompok (berkomunitas) berasal dari kesepakatan dari sikap pro kontra atau konflik pada awalnya. Pada akhirnya individu menyetujui dan menyepakati tata cara hidup bersama yang akhirnya menjadi budaya. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan *power*. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. Untuk sementara saya mendahului teori lainnya bahwa berdasarkan teori Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf. Inilah sebenarnya dasar dari penolakan atas politik santun itu, karena tidak ditemukan dasar falsafahnya.

Mengelola Konflik

Pandangan “*The Interactionist View*” menganjurkan agar merancang sebuah konflik dalam suatu kelompok, komunitas, atau organisasi. Dengan ketentuan bahwa harus bisa dikendalikan (*under control*). Karena kalau tidak bisa dikendalikan maka akan menjadi bola liar yang memakan korban pada pihak-pihak yang dirancang untuk menang. Tujuannya agar tetap ada semangat untuk maju (*viable*), bahkan berupaya memperbaiki diri secara kritis (*self-critical*) dan selalu lebih kreatif (*creative*).

Buku *The Social Psychology of Group Identity and Social Conflict*,



mengkaji pengaruh lebih jauh dari Herbert C. Kelman, seorang psikolog yang adalah seorang ilmuwan dan pembawa damai, yang menyarankan metode *'win win solution'*. Kelman terkenal karena kontribusinya untuk mempelajari pengaruh sosial dalam psikologi sosial serta resolusi konflik internasional dan gerakan penelitian untuk mencari solusi perdamaian. Ia mengembangkan metode pemecahan masalah interaktif, yang membantu meletakkan dasar bagi perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan PLO. Tetapi kenyataannya ditemukan berbagai paksaan untuk menemukan kata sepakat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.

Karyanya telah sangat mempengaruhi cara di mana psikolog sosial berpikir tentang hubungan antara identitas pribadi dan nasional, antara intragroup dan proses antar kelompok dan antara perilaku individu dan fungsi sistem sosial. Dalam menyelesaikan konflik, Kelman menyumbangkan pemikiran dari hasil pengalamannya yaitu (1) etika penelitian sosial, (2) kesesuaian dan ketaatan, (3) identitas nasional dan nasionalisme, dan (4) resolusi konflik etnis.

Konflik bisa diselesaikan dengan cara menguntungkan semua pihak yang bersengketa, sekalipun tidak selamanya mampu memenuhi semua tuntutan. Terlanjur basah, mencitrakan SBY dalam koridor politikus yang santun, namun menuai banyak kritik tajam, bahwa ideologi santun (=santunisme) itu tidak ditemukan dalam dunia politik, dan tidak bisa menyelesaikan banyak konflik bangsa ini, buktinya dalam Partai Demokrat sendiri, nyatanya berlarut-larut dan gagal mengedepankan santunisme sebagai alat penyelesaian masalah. Lalu, bagaimana cara untuk mengakhiri konflik?

Antisipasi Konflik

Menurut Wijono (1993, pp.113-125), ada beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi diantaranya adalah:

a. Pendekatan Birokratis (*bureaucratic approach*)

Konflik muncul karena adanya hubungan birokratis yang terjadi secara vertikal dan untuk menghadapi konflik vertikal model ini, manajer cenderung menggunakan struktur hirarki (*hierarchical structure*) dalam hubungannya secara otokritas. Kon-



flik terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi untuk pemecahan masalah konflik seperti ini biasanya dipergunakan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan birokratis untuk mengontrol pribadi bawahannya. Pendekatan birokratis (*bureaucratic approach*) dalam organisasi bertujuan mengantisipasi konflik vertikal (hirarki) didekati dengan cara menggunakan hirarki struktural (*structural hierarchical*).

- b. Pendekatan Intervensi Otoritatif dalam Konflik Lateral (*authoritative intervention in lateral conflict*)

Bila terjadi konflik lateral, biasanya akan diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian jika konflik tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, biasanya manajer langsung melakukan intervensi secara otoritatif kedua belah pihak.

- c. Pendekatan Sistem (*system approach*)

Model pendekatan perundingan menekankan pada masalah-masalah kompetisi dan model pendekatan birokrasi menekankan pada kesulitan-kesulitan dalam kontrol, maka pendekatan sistem (*system approach*) adalah mengkoordinasikan masalah-masalah konflik yang muncul. Pendekatan ini menekankan pada hubungan lateral dan horizontal antara fungsi-fungsi pemasaran dengan produksi dalam suatu organisasi.

- d. Reorganisasi Struktural (*Structural Reorganization*)

Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak, seperti membentuk wadah baru dalam organisasi nonformal untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut sebagai akibat adanya saling ketergantungan tugas (*task interdependence*) dalam mencapai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga fungsi organisasi menjadi kabur.

Kisah Count Victor Lustig, seorang pria yang bisa berbicara dalam beberapa bahasa, membanggakan dirinya atas halusnyanya budi bahasanya yang banyak disanjung orang, perawakannya yang san-



tun dan berbudaya adalah seorang penipu yang hebat pada zaman modern. Ia dikenal atas kehebatannya menguasai psikologi manusia serta keberaniannya. Dalam sejenak saja ia bisa menipu siapa saja hanya dengan dengan modal kesantunannya yang hebat. Karena ia mengetahui bahwa ia tidak bisa menipu dengan cara kasar seperti preman.

Dalam buku *Komunikasi Serba Serbi*, Liliweri (2012) menyumbang pemikiran bagaimana cara “komunikasi dan perdamaian”. Konsep tentang perdamaian merentang antara agama dan kebudayaan karena dia berkaitan dengan nilai-nilai seperti keamanan dan keselarasan, martabat dan keadilan. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila setiap sistem agama dan kepercayaan, baik bersifat sekuler atau religius, mempunyai ajaran tentang perdamaian baik yang nyata maupun perdamaian akhirat yang dijanjikan sebagai implementasi tentang ajaran-ajaran.

Menurut Hendardi, Ketua Pengurus Setara Institut, dalam beretika pertama-tama bukanlah pemanfaatnya tetapi kesalahannya. Artikel “Etika Memaafkan” (Kompas, 7/1/2012) perang dan damai merupakan suatu kenyataan riil yang tidak dapat dibantah atau dihindari, dan merupakan suatu fakta berganda yang terjadi silih berganti dan berlangsung secara terus menerus dalam suatu *continuum*, sehingga menimbulkan *adagium* yang bersifat *paradox* yang berbunyi: *si vis pacem para bellum*, yang berarti siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk perang. Oleh karena itu, sambil melanjutkan usaha untuk hidup sejahtera dalam suasana damai, pimpinan suatu bangsa dan negara harus mempersiapkan diri secara terus menerus menghadapi kekerasan yang potensial akan dilancarkan oleh bangsa dan negara lain, atau para pemberontak.

Korupsi adalah musuh negara yang harus diperangi tanpa ampun. Jadi, citra santun (=santunisme) yang dijadikan paham atau ideologi tidak mampu memberi arti apa-apa dalam rangka menyelesaikan konflik dan tidak bermakna apa-apa untuk menjaga eksistensi bernegara bahkan dalam mewujudkan perdamaian.

Ideologi Santunisme

Apakah pencitraan SBY yang menerapkan ideologi santunisme



itu masih berharap mampu mengatasi persoalan di internal Partai Demokrat? Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Doni Gahral Adian, mengatakan bahwa semakin tebal *kedok* seseorang dalam berpolitik, semakin besar dosa yang disembunyikan.

Doni mengatakan, gaya berpolitik santun ini dipraktikkan politisi Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai, "...kedok. Makin tebal kedoknya (santun), semakin banyak pula dosa politik yang ditutupi". Dalam diskusi "Politik Santun, Antara Retorika dan Kenyataan" di Rumah Perubahan 2.0, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2012), Doni menyatakan gaya berpolitik seperti itu pernah dilakukan Presiden Soeharto.

Lain halnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Seringnya melabrak aturan yang sudah ada, namun kebijakannya memberi manfaat bagi orang banyak. Menurut Doni, berpolitik santun saat ini menjadi alat untuk perebutan kekuasaan dan menyembunyikan kebijakan yang mencederai masyarakat. Hal itu diperkuat dengan budaya masyarakat Indonesia yang selalu melihat sesuatu yang tampak, padahal di belakang itu tersembunyi kebohongan.

Prof. Hamdi Muluk, ternyata juga mengatakan hal yang sama: Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), itu menyatakan tidak ada istilah santun dalam politik. Menurutya politik itu pertempuran, keras, saling serang. Santun hanyalah jargon kosong yang diulang-ulang. "Akan jauh lebih bermanfaat, kalau SBY mengusung politik beretika, berintegritas dan bermartabat. Orang yang berpolitik dengan etika, Integritas, dan bermartabat pasti akan menghindari korupsi," ujar Hamdi Muluk saat menjadi pembicara diskusi yang sama. Menurut Hamdi, politik santun yang diwujudkan dengan pencitraan, adalah bagian dari ajaran Machiavelli untuk mempertahankan kekuasaan. Dia menilai, SBY merupakan sosok politisi yang giat melakukan pencitraan.

Pakar filsafat politik Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral mengatakan pernyataan SBY yang berkali-kali minta agar para politisi santun dalam berpolitik, tidak sesuai dengan realitas. Mungkinkah kata santun itu berarti bermoral tetapi tidak berani mengatakan kebenaran? Menurut Donny, rakyat Indonesia cenderung

menerima apa yang tampak dari luar. Akibatnya, politik pencitraan yang dilakukan SBY dianggap suatu nilai positif. Padahal, belum tentu faktanya sesuai dengan yang dicitrakan. “Pada Pemilu 2009 lalu, semua capres sama-sama kampanye akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun setelah diteliti, cara yang mereka tempuh baru ketahuan mana yang neolib dan mana yang konstitusional,” ungkapnya.

Lebih bermanfaat jika SBY memilih dengan tegas siapa lawan dan siapa kawan disaat seperti ini, sehingga dirinya tidak diseret dalam debat kusir demi sebuah citra santun. Harus jeli dari sisi strategi perang, menurut saya bahwa tidak perlu mengajarkan seorang SBY, mantan seorang prajurit yang berpangkat bintang empat ini untuk hal itu, tetapi mengapa masih berlarut-larut? Banyak kalangan menilai penyelesaian masalah ini sangat lamban.

Kata Maaf Untuk Menyelesaikan Konflik

Sama sekali, saya tidak percaya kalau kata maaf itu bisa menyelesaikan masalah diantara kedua pihak yang berseteru. Sekalipun banyak teori, bahwa maaf itu bisa menjadikan orang yang bersalah terbangun kembali dan tunduk pada kesepakatan bersama dengan cara dominasi. Dalam rangka menyelesaikan masalah kita jarang menuntaskannya dengan baik, seperti apa yang tulis oleh Madame Swetchine (penulis Rusia, 1782-1857) bahwa “sangat jarang kita memaafkan, tetapi sangat sering kita melupakan.”

Demi rasa keadilan masyarakat, memaafkan dan membebaskan bahkan melupakan kesalahan para koruptor itu hal yang tak mungkin. Justru, akan menimbulkan konflik baru yang lebih besar, akumulasi emosi dan tuntutan penegakkan keadilan dan kebenaran semakin besar, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bernegara.

Dalam konsep bernegara Republik Indonesia pernah juga memakai kata maaf untuk mengakhiri tuntutan kepada Mantan Presiden Soeharto, dimana sampai akhir hayatnya tidak ada penyelesaian secara hukum atas tuduhan KKN pada dirinya; namun, hanya dengan peninjauan karena alasan kemanusiaan, kasusnya ditutup.



Menyelesaikan Konflik

Kata Maaf tidak efektif dalam menyelesaikan masalah karena akan menjadi preseden yang buruk bagi generasi bangsa ini. Kata ‘maaf’ itu tidak sama dengan niat suci untuk melupakan kesalahan demi menghindari konflik. Memaafkan seakan-akan tindakan yang beretika, keharusan moral dengan berkedok perintah agama. Memaafkan tidak boleh mengabaikan rasa keadilan begitu saja.

Korupsi, tindakan yang biadab dan berdosa kepada seluruh bangsa, jika ingin menyelesaikannya dengan sebuah kata maaf, maka minta maaf kepada 235 juta rakyat Indonesia, apakah mereka akan berbondong-bondong mengantarkan paket kata maaf itu kepada koruptor? Jika kita terpengaruh oleh berbagai kelemahan itu, maka kita terjebak pada cara pandang picik yang menjadikan kesalahan si bersalah bagai bencana.

Itulah yang disebut *catastrophizing*, ditulis Aaron Beck (1999) dalam *Prisoners of Hate: The Cognitive Basis of Anger, Hostility, and Violence*. Kata ‘maaf’ memang tidak mengandung makna untuk menuntut keadilan atas nama hukum, sebab tidak diatur dalam undang-undang mana pun. Letaknya dalam diri setiap orang dengan batasan sangat subjektif, sehingga jika seseorang mengulangi kesalahan yang sama, tidak ada wadah untuk menghukumnya. Kata Jacques-Marie Pohier dalam John Monbourquette (2000), ”karena itu memaafkan itu sulit karena kita takut akan risikonya.”

Apakah mungkin memaafkan para koruptor dan melupakan kesalahan mereka begitu saja demi ideologi santunisme? Apakah dengan santun uang Negara yang dikorupsi itu, kita relakan dan biarkan saja sebagai bukti kesantunan? Apakah kita tiba-tiba menjelma dan berwajah dewa ketika menjatuhkan hukuman kepada koruptor sambil menghunuskan pedang dari belakangnya? Sebagai manusia, kita wajib mengasihi para koruptor dalam kemanusiaannya tetapi membenci perbuatannya yang kotor. Mengasihi jiwanya sebagai milik sang pencipta langit dan bumi, tetapi konsekuensi hukum atas korupsinya harus ditegakkan.

Seharusnya Pemerintah lebih fokus pada perang melawan korupsi, dimana pelakunya adalah sahabat, mitra dan bahkan saudara yang pernah membesarkan kita. Apakah, sanggup mengalahkan



rasa bersalah kita dan merelakan mereka diproses secara hukum? Tidak semudah itu, sebab membangun kebersamaan dalam partai sejak dari awal sangat membutuhkan pengorbanan yang besar; lalu ada rasa tega untuk membiarkan mereka mati dalam penjara karena hukuman? Hal ini yang menjadi ujian bagi ideologi santunisme.

Santunisme dan Politik

Bahwasanya ideologi santunisme sulit dibuktikan sebagai solusi penyelesaian masalah, satu prinsip dasar yang pasti diingat oleh setiap orang yang membaca buku klasik Carl Von Clausewitz, bahwa perang pada dasarnya adalah politik, hanya dengan cara lain wujudnya berbeda. Maknanya bahwa ranah politik itu adalah perang ideologi, pemenang akan berkuasa, sekalipun itu dengan cara demokrasi.

Jadi, ketika masuk dalam ranah politik berarti telah mengambil suatu keputusan besar untuk memulai dan juga mengakhiri perang; ini adalah merupakan ranah kewenangan para negarawan dan politisi, melalui penerapan doktrin, strategi, taktik, dan teknik (termasuk dalam memobilisasi militer), dengan tujuan maksimal untuk menghancurkan musuh, dan tujuan minimal untuk mematahkan semangatnya melakukan perlawanan.

Peran Tokoh Partai

Perdamaian dapat dicapai dengan cara mengungkap siapa yang salah dan diadili secara hukum yang berlaku, kemudian benahi partai dengan orang-orang yang loyal. Peran tokoh sangat diharapkan untuk mengambil posisi netral dan tidak memihak kepada kepentingan faksi dalam partai, tegas dan berwibawa. Masalahnya, siapa tokoh dalam Partai Demokrat yang bakal menggantikan SBY kelak? Pertanyaan ini menggelitik, sebab akankah sang pewaris juga menerapkan ideologi santunisme atau tidak? Jika ada sosok yang tampil mampu menyelesaikan konflik internal partai itu selain SBY, akan sangat menguntungkan partai.

Banyak kader tetapi mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Esensi partai politik yang sukses adalah kolektifitas dari para tokoh, faktanya bahwa dibalik kesuksesan partai ada kom-



posisi tokoh yang memiliki massa. Bergabungnya para tokoh itu bukan berarti mereka rela melebur identitas pribadinya dan menempelkan identitas baru di dadanya.

Partai adalah kendaraan politik saja, sehingga kepentingan adalah satu-satunya alasan untuk berada di sana, jadi santun sulit ditemukan di arena itu. Karena itulah esensi sebuah partai politik, akan tersegmentasi, yang sering disebut sebagai faksi, mereka terkotak-kotak berdasarkan kepentingan. Sebagai sebuah organisasi yang berkecimpung dalam bidang politik, maka pengaruh, kekuatan dan kekuasaan syarat untuk menang. Apakah secara individu maupun secara organisasi selalu saja, tujuan akhir adalah menang dari lawan.

Pemetaan Siapa Lawan Dan Siapa Kawan

Umumnya setiap kongres partai di Indonesia, berujung pada perpecahan akibat tidak dapat menerima kekalahan. Tidak bisa dielakkan hal ini terjadi dalam rangka memenangkan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum pada Kongres 2010 di Bandung. Meskipun demikian sikap dan niat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, telah memberikan pengakuan kepadanya, sekalipun ada yang tidak puas. Ketidakpuasan sebagian faksi dan individu itulah yang kemuadain mengawali balas dendam, dan lahirlah benih perpecahan yang memicu konflik. Pada awalnya, faksi-faksi yang berseberu itu, malu-malu untuk tampil dipermukaan karena alasan politik santun seperti yang dicitrakan kepada SBY.

Jika konflik itu tidak ada maka sulit membedakan siapa lawan dan siapa kawan dalam organisasi masa seperti partai. Ikatan personalitas dalam organisasi itu sifatnya kolektif, sehingga hak dan kewajiban didasarkan pada kepentingan. Banyak kalangan menyekali sikap elit partai yang sangat reaktif, seakan-akan saat ini situasi dalam keadaan genting seumpama situasi perang yang sengit. Salah satu buktinya yaitu berdirinya Forum Deklarator Partai Demokrat yang disinyalir sebagai penyelamat sekaligus bukti kepanikan dengan tujuan untuk membuat situasi bisa lebih kondusif. Seakan-akan kuasa yang ada di tangan Ketua Dewan Pembina kurang kuat untuk memanggil mereka yang bersalah dan cukup diselesaikan di meja



sang Ketua Dewan Pembina saja.

Seakan sudah terlambat, sekarang SBY sedang dihadapkan pada dua pilihan seperti prajurit menghadapi musuh, membunuh atau dibunuh. Bukan karena politik itu tidak santun, tetapi menghadapi tekanan publik tidak bisa ambivalensi menjaga keseimbangan kepentingan menghancurkan koruptor atau membangun partai. Sikap SBY jelas, seperti saat berpidato sebagian kalangan mengatakan sangat keras, tetapi sebagian juga mengatakan bahwa itu sikap yang menggambarkan ketakutan dan kepanikan, bagaikan seorang prajurit yang stres melepaskan peluru membabi buta. Mengapa tidak memanggil Anas dan bicara empat mata saja? Akhirnya sikap itu bagaikan melepaskan peluru nyasar yaitu menyampaikan pesan yang sangat keras tapi tidak jelas kepada siapa, agar siapapun dia segera mundur dari partai karena tersangkut masalah korupsi. Kenyataannya tidak satupun satupun anggota partai yang bersedia mundur.

Dalam teori komunikasi, stimulus respons (SR), komunikator dan khalayak harus jelas, dari siapa dan kepada siapa, sehingga makna pesan yang disampaikan bisa diterjemahkan oleh komunikasi dengan benar. Pesan SBY tidak jelas kepada siapa, sementara respons Anas sasarannya kepada SBY, itu jelas sekali. Nilai konflik diantara mereka adalah satu pribadi berbahasa dengan gaya politik santun, abu-abu, tidak jelas sasarannya, sementara yang satu lagi menembak dengan jitu.

Membedah Konflik

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. konflik realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. konflik non-realistik, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Co-



ser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembalasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti *teluh*, *santet* dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Apakah ini indikasi bahwa ideologi yang terkandung dalam ikon SBY telah kehilangan makna? Sebagian kalangan justru memuji cara komunikasi politik SBY itu, sudah baik; namun digerogeti oleh kader yang kurang santun berpolitik, mereka yang masih belum menemui jati diri untuk mengimplementasikan apa itu kekuasaan dan kekuatan, bukan karena tidak berani tetapi karena ideologi kesantunan yang tidak mampu mereka terjemahkan dengan baik.

Penelitian dapat diarahkan misalnya, “Mengkaji sumber konflik antara individu dan kelompok dalam organisasi, misalnya apakah benar pencitraan santunisme ada hubungannya dengan konflik yang berkepanjangan di tubuh Partai Demokrat?” Atau makna santunisme adalah kesalahan pencitraan karena tidak terbukti efektif menghadapi persoalan politik praktis.

Kesantunan, tidak mampu menyelesaikan masalah politik, akhirnya mau tidak mau nama besar itu diseret ke arena perang yang seharusnya cukuplah prajurit yang ada di arena konflik itu. Kejadiannya lebih meruncing ketika SBY berhasil dipancing untuk turun ke arena perang, pada saat berpidato (konferensi pers) tersebut, secara keseluruhan PD mendapatkan gangguan cukup kuat, baik dari kalangan internal maupun eksternal. Secara internal, konflik partai itu cukup memanas, saling curiga satu sama lain.

Beberapa media menyebutkan bahwa ada indikasi ketidakserasian antara ketua dewan pembina dengan ketua umum partai. Pernyataan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan kader partai yang tidak bersih diharapkan mundur. Banyak ditafsirkan ditujukan kepada Anas Urbaningrum yang kini menduduki ketua umum partai. Perlawanan itu nyata, ketika pernyataan ketua umum partai yang mengatakan kinerja pemerintah harus baik untuk meningkatkan citra partai, banyak yang menafsirkan ditujukan kepada Presiden Indonesia.



Kalau merespons kalimat "...siapa kader yang tidak bersih..." sama sekali tidak efektif, sebab tidak mungkin ada seorang pejuang mengantar kepalanya di meja *jagal* untuk dibantai. Lalu berkata "Silahkan potong leher saya tuan". Arena ini, arena perang, kesantunan tidak mungkin berlaku di sini, perlawanan, taktik dan strategi, bahkan licik dan picik.

Mencoba untuk meneropong sumber persoalan yang rumit itu, tidaklah sulit, karena jauh-jauh hari yaitu menjelang Kongres PD tahun 2010 yang lalu sudah terindikasi adanya kepentingan faksi-faksi di dalam partai tersebut. Gesekan-gesekan itu sebenarnya wajar saja, namun memang dibutuhkan seorang leader yang gesit untuk menjawab "*how to manage conflict*" yaitu orang yang memiliki kepiawian khusus, dalam memimpin partai yang tiba-tiba *gendut* itu (300 persen naik dari 2004 ke 2009). Sebenarnya, perebutan kursi ketua umum adalah asal muasalnya masalah ini, persoalan ini bagaikan benang kusut yang melilit sampai ke leher tanpa kelihatan dimana ujungnya. Semoga saja sosok SBY yang selama ini dijadikan sebagai ikon pemersatu di antara faksi-faksi Partai Demokrat tersebut mampu mengayomi berbagai perselisihan di dalam partai.

Tuntutan kepada SBY sangat tinggi, itu murni dari niat masyarakat demi wibawa bangsa yang bermoral dan beretika, dan yang lebih penting adalah menegakkan konstitusi. Memberantas korupsi adalah janji nomor satu SBY ketika kampanye pada tahun 2009 lalu. Mewujudkan janji tersebut, merupakan bukti bahwa janji itu tidak sebatas retorika belaka yang diragukan kebenarannya. Tuntutan ini juga yang digunakan oleh lawan-lawan politiknya.

Sosok SBY yang terlanjur didewakan di kalangan Partai Demokrat menghadapi masalah ketika cara penyelesaian masalahnya bukan cara dewa. Sosok SBY yang dianggap sebagai "Ikon Pemersatu Partai Demokrat" diseret turun gunung untuk berhadapan sejajar dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum, dalam persoalan dugaan korupsi yang sedang dihadapi. Sementara, Anas belum ada status hukum apapun, sehingga mungkin saja orang-orang dekat SBY bermaksud agar persoalan ini segera selesai, lalu mendesak SBY untuk segera meminta Anas mundur secara kesatria; mengajak siapapun yang terlibat korupsi alias tidak bersih untuk secara santun



legowo mundur.

Banyak kalangan memuji sikap SBY yang dinilai tepat karena tidak menyebut jelas nama Anas dengan alasan yang bersangkutan masih belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga demi wacana etika dan moral, maka obatnya adalah ‘sikap moralitas’ yang kesatria untuk mundur. Kenyataan tidaklah demikian, perlawanan itu terlihat dari sikap Anas urbaningrum, yang menyatakan bahwa alasan dalam pernyataan SBY itu tidak benar. Sebab hasil survey LSI yang dijadikan referensi oleh SBY untuk memukul, itu salah. LSI tidak menyorot apa penyebab merosotnya elektabilitas Partai Demokrat terakhir ini. Lembaga Survei itu menyorot kinerja pemerintah, bukan partai. SBY pasti tidak menduga reaksi Anas sekeras itu, dan apa akibatnya? Peristiwa ini terbuka di publik dan digoreng oleh media, untuk memperlihatkan siapa yang cerdas diantara mereka. Akhirnya SBY sekarang telah berhadap-hadapan dengan anak yang dibesarkannya sendiri, ada kesan bahwa dirinya sengaja ditarik ke bawah di arena perang, sehingga konflik menjadi “pilihan” yang susah dikendalikan.

Mengapa SBY Terjebak Dalam Konflik Ini?

Seandainya SBY cukup duduk di singgasana tanpa turun tahta, mengeluarkan satu kalimat sakti yang dikemas sedemikian rupa, memerintahkan dan menghukum dengan tangannya sendiri siapa pelaku kejahatan yang mengganggu ektabilitas diri dan partainya itu, maka persoalan selesai. Bila dianalisa bagaimana cara SBY yang memberi perintah dengan alasan dan latar belakang kesantunan membuka peluang konflik yang menganga lebar, pasti ada perlawanan, bagaimanapun juga hal ini dipandang sebagai kesalahan dalam retorika dan metodologi penyampaian pesan. Kehilangan kepercayaan diri adalah salah satu faktor mengapa menyampaikan pesan yang tidak jelas kepada siapa. Perintah ini bukan *broadcast* di stasiun radio atau TV, ini perintah. Tanpa disadari SBY terjebak dalam konflik politik praktis dalam partainya sendiri.

Gangguan Eksternal Partai

Noise yang sangat *interference* yaitu sebuah gangguan dalam sin-



yal penyampaian pesan; secara eksternal, di saat Partai Demokrat sedang guncang, tiba-tiba Aburizal Bakrie, calon presiden dari Partai Golkar, mencoba melirik Ibas (kader Partai Demokrat dan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono) untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Memanfaatkan situasi, apakah itu tulus, atau hanya sebuah ejekan; ada keinginan untuk koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Jelas-jelas ini adalah gangguan yang sangat bising yaitu disaat Partai Demokrat sedang butuh konsentrasi yang tinggi, tiba-tiba ada tawaran yang sangat mengganggu.

Sebagian menganggap bahwa ini keberuntungan, karena ada yang sungguh-sungguh diuntungkan, tetapi ada juga yang menanggapi bahwa ini membenaran bahwa Partai Demokrat itu telah kehilangan posisi elektabilitasnya, sehingga Aburizal bakrie tidak malu-malu untuk menawarkan posisi wakil saja untuk mereka. Tetapi langsung saja dibantah, seperti apa yang ditanggapi oleh petinggi partai Demokrat bahwa tawaran ini adalah strategi marketing untuk menjual picisan kosong seorang pengusaha seperti Aburizal Bakrie.

Kesimpulan

Kini realitas yang bicara, bahwa santunisme sulit meredam cara berpolitik mereka, karena buktinya sekarang satu persatu angkat bicara dan berani membangkang, realitanya tidak santun sama sekali. Silang pendapat antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan ketua umum partai, sesungguhnya bisa juga dilihat dari sisi positif yang bisa membawa kepada perubahan yang membangun.

Menurut Lewis Coser, sosiolog yang menekuni persoalan konflik, bahwa konflik tidak seluruhnya bersifat negatif. Bisa juga bermakna positif, sehingga mengungkap sebuah kebenaran sejati. Dalam Proses itu harus ada yang menyuarakan keinginan untuk memfasilitasi setiap konflik yang ada, supaya membuka wawasan masyarakat secara lebih luas. Meninjau konflik sebagai sesuatu yang juga mempunyai sifat positif justru memberikan pelajaran sosial yang baik di masa depan. Sekalipun akhirnya menyakitkan hasilnya sebagai akibat munculnya sebuah kebenaran, itu harus bisa kita terima sebagai konsekuensi dari konflik itu sendiri. Satu-satunya cara mengakhiri sengketa adalah adanya status hukum tetap untuk menyatakan siapa



yang salah dan siapa yang benar.

Ideologi santunisme, belum terbukti efektif dalam upaya berpolitik praktis, namun ini hanya sebuah kajian, yang membuktikan bahwa kritikan pedas selama ini, sangat beralasan. Hal ini berguna untuk sebuah koreksi, demi bangsa dan Negara yang bersih dari KKN, berani menegakkan konstitusi sesuai amanat UU. Ungkapan “badai segera berlalu” yang sering disampaikan oleh elit Partai Demokrat, seharusnya bisa dibuktikan dalam berbagai tindakan dan semangat untuk menyelesaikan konflik di dalam internal partai.

Saran

Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009, dan SBY adalah sosok yang diusung oleh Partai Demokrat terpilih menjadi Presiden RI periode untuk masa jabatan ke dua 2009 – 2014 patutlah diapresiasi dan dihormati karena itu adalah hasil sistem demokrasi. Sekalipun badai belum berlalu, bahkan badai justru semakin besar, namun harapan untuk menyelesaikannya tetap diupayakan. Kita menyadari bahwa masalah ini berat, penyelesaiannya tidak mulus bahkan bisa saja tidak sesuai dengan harapan.

Kesadaran semua pihak untuk menahan diri dan mau menegakkan konstitusi untuk membarantas KKN merupakan hal yang harus dikedepankan. Tantangan kita adalah ideologi santunisme belum bisa membuktikan manfaatnya untuk berpolitik, sebagaimana pencitraan kepada bapak Susilo Bambang Yudhoyono selama ini, dan yang perlu diantisipasi adalah munculnya kepentingan pribadi dan kelompok (faksi) di dalam internal Partai Demokrat, yang menjelang Pemilu 2014 mulai unjuk gigi. Sekalipun telah nyata-nyata beberapa kader sudah mulai berpihak, dan sulit untuk diredam namun harapan kita kiranya sosok SBY masih bisa mengayomi dengan baik.

Peran media tidak bisa diabaikan sebagai corong perdamaian untuk penyelesaian masalah. Kiranya status hukum kasus korupsi yang dituduhkan kepada para elit partai bisa jelas dan memiliki status hukum yang tetap. §

Daftar Pustaka

Abrar Rivai, Kompasiana, (18 Juni 2012) <http://politik.kompasiana>.



- com/2012/06/18/sby-presiden-ri-atau-presiden-pd-sih/
Yudha Manggala P Putra, Republika, Antara (25 April 2012) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/04/25/m30p7q-vonis-nazarudin-lahirkan-koruptor-ganas>
- Alice H. Eagly, PhD; Reuben M. Baron, PhD; and V. Lee Hamilton, PhD (2010) *The Social Psychology of Group Identity and Social Conflict: Theory, Application, and Practice*; Edited by , page 288 bisa lihat juga di <http://www.apa.org/pubs/books/4318088.aspx>.
- Kiki Budi Hartawan, Editor by Laksono Hari W (Selasa, 19 Juni 2012) <http://nasional.kompas.com/read/2012/06/19/20461531/Berpolitik.Santun.Hanya.Kedok.Belaka>
- Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (2010) *Komunikasi, Serba Serbi*. Page 433
- Lewis Coser , (1956). *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press. page. 151-210
- Saafroedin Bahar (2007); *Peran Krusial Rakyat dan Penduduk Sipil Lainnya Dalam Perang Non-Konvensional Masa Kini dan Implikasinya Pada Sistem Pertahanan Rakyat Semesta*. setneg.co.id atau lihat <http://serbasejarah.wordpress.com/2011/03/24/si-vis-pacem-para-belum/>
- Robert Greene, (2007) ; 48 *Hukum Kekuasaan*, Kharisma Publishing Group
- Michael E Porter, (1998); *Strategy Bersaing* ; Kharisma Publishing Group <http://ymayowan.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/KONFLIK-DAN-STRESS.pdf>



FUNGSI “KALOSARA” SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA

M. Najib Husain

Pemuka pendapat dan tokoh-tokoh adat dapat membantu pihak aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat karena sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan pendekatan kearifan lokal. Salah satu contoh penerapannya dengan menggunakan media komunikasi tradisional “Kalosara” di Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

Penggunaan hukum adat atau aturan adat pada masyarakat Suku Tolaki memberikan kepastian hukum atau sanksi yang ada dalam pelaksanaan hukum adat (Osara) dengan menggunakan “Kalosara”.

“Kalosara” dalam hubungannya dengan media komunikasi, merupakan media tradisional atau dikenal juga sebagai media rakyat dan alat atau perangkat hukum adat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Lebih dari itu, “kalosara” dianggap sebagai benda yang keramat dan sakral serta dihormati dari setiap keputusan yang dihasilkannya. Sehingga masyarakat Suku Tolaki selalu menggunakan “Kalosara” dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul, persoalan adat istiadat maupun konflik sosial di masyarakat.

Kata kunci: fungsi kalosara, media komunikasi tradisional, konflik sosial

Pendahuluan

Kebudayaan Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dari dunia Barat, terutama sebagian dari wilayah Indonesia yang sejak dahulu kala telah mengadakan kontak dengan orang-orang Eropa. Akibatnya timbul berbagai macam masalah serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang juga memerlukan pemecahan yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tidaklah berarti bahwa nilai budaya bangsa yang telah diwariskan dari generasi ke generasi harus dikorbankan dan diganti dengan nilai-nilai budaya yang baru yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, penyelamatan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan mutlak harus dipertahankan dan dengan nilai-nilai budaya kita sendirilah kita membangun negeri ini.

Pesatnya pembangunan yang berlangsung beberapa dasawarsa terakhir telah mempengaruhi kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia terutama dalam nilai-nilai, norma-norma, adat-istiadat, dan hubungan antar etnik serta dalam masalah kehidupan sosial budaya lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam berbagai suku bangsa nampaknya tidak mudah diselesaikan karena melibatkan banyak kepentingan baik dari kalangan pendukung kebudayaan suatu etnik maupun dari kalangan di luar etnik.

Berbagai kepentingan dalam perkembangan kebudayaan suku bangsa yang berada di dalam masyarakat yang multietnik sering menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik, baik konflik terbuka maupun konflik laten (potensi konflik). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman mengenai kebudayaan suatu suku bangsa terutama pemahaman terhadap kebudayaan etnik lokal di mana berbagai etnik itu hidup berdampingan.

Konflik berbasis etnis telah ada sejak lama. Konflik Dayak-Madura misalnya, merupakan rentetan dari daftar kasus serupa selama tiga dasawarsa. Tujuh kasus kekerasan diungkap *Human Rights Watch Asia-HWRA* (1998) pada 1968 ketika orang Madura membunuh orang Dayak; pada tahun 1977, orang Madura menusuk polisi Dayak hingga memicu kerusuhan; pada 1979, orang Madura menyerang orang Dayak hingga menyebabkan perang etnis dan



akhirnya pemerintah mensponsori perjanjian damai; pada 1982, orang Madura membunuh mantan polisi Dayak (Sidik); pada 1992, orang Madura memerkosa anak Sidik; dan pada tahun 1993, orang Madura menghajar polisi yang berselingkuh dengan istri orang Madura. Sejarah pertikaian tersebut, menurut HWRA merupakan faktor penguat permusuhan antara Dayak dan Madura.

Kabupaten Kolaka, yang dihuni oleh etnik Tolaki Mekongga sebagai etnik lokal, merupakan salah satu kabupaten yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Bugis, Buton, Muna, Jawa, Bali, dan lain-lain. Keragaman etnik ini jika tidak dibarengi oleh adanya saling memahami kebudayaan masing-masing etnik, terutama kebudayaan etnik lokal, akan menjadi potensi konflik terbuka seperti yang pernah terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Namun tidak berarti bebas dari konflik, hanya konflik dalam skala yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui pendekatan budaya Tolaki yang berlaku bagi semua etnis yang ada di wilayah kekuasaan Tolaki Mekongga.

Suku bangsa Tolaki Mekongga yang terletak di Propinsi Sulawesi Tenggara yang mendiami wilayah daratan Kabupaten Kolaka, menerapkan penggunaan hukum adat atau aturan adat pada masyarakat suku tolaki bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atau sanksi yang ada dalam pelaksanaan hukum adat (*Osara*) ini, menggunakan “*Kalosara*” sebagai lambang, atau (simbol) dalam mengekspresikan konsepsi orang Tolaki, mengenai manusia, alam semesta dengan isinya dan kebudayaannya.

Kalosara dalam hubungannya dengan media komunikasi merupakan media tradisional atau dikenal juga sebagai media rakyat. Masyarakat suku bangsa Tolaki sangat menjunjung tinggi *Kalosara* dan memperlakukan sebagai alat atau perangkat hukum adat dalam menyelesaikan persoalan adat istiadat, maupun dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat. Lebih dari itu, *Kalosara* dianggap sebagai benda yang keramat dan sakral serta patut dihormati dari setiap keputusan yang dihasilkannya. Hal ini masyarakat Suku Tolaki selalu menggunakan *Kalosara* dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul, persoalan adat istiadat maupun konflik sosial di masyarakat.



Mencermati kondisi saat ini, dimana sejak bergulirnya roda reformasi di Indonesia yang penekanannya tidak lain untuk menjadi pembaharuan dan perubah disegala sektor dan bidang, tetapi ternyata dalam realita tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga melahirkan tindakan yang selama ini tidak diinginkan oleh aparat hukum di negara Indonesia. Seperti adanya tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat yang meng-atasnamakan massa tidak lain merupakan tindakan yang sama brutalnya dengan pelaku yang melakukan kesalahan. Karena persoalan tidak akan selesai dengan jalan memberikan sanksi di tempat dengan jalan pemukulan. Oleh sebab itu, maka para pemuka pendapat dan tokoh-tokoh adat dapat membantu pihak aparat keamanan dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat karena sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan pendekatan budaya, salah satu contoh penerapannya dengan menggunakan media komunikasi tradisional *Kalosara* di daerah Sulawesi Tenggara.

Komunikasi Budaya

Komunikasi dan budaya tak dapat dipisahkan, dimana ada budaya di situ ada komunikasi, dimana ada komunikasi di situ pula ada budaya sebagaimana diungkapkan Mulyana (2000:19), bahwa sebagai konsekuensinya budaya merupakan landasan komunikasi.

Setiap masyarakat akan memiliki sistem komunikasi sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Menurut Susanto dalam Kuswarno (2008 : 8). Bahasa menjadi inti dari komunikasi sekaligus sebagai pembuka realitas bagi manusia. Kemudian dengan komunikasi, manusia membentuk masyarakat dan kebudayaannya. Sehingga bahasa secara tidak langsung turut membentuk kebudayaan pada manusia, begitu pula beriringan dengan terbentuknya suatu pola-pola komunikasi khususnya dalam keluarga.

Tidak sekadar untuk itu, tetapi yang paling penting adalah jika manusia mampu menyesuaikan makna bahasa dengan siapa saja yang diajak berkomunikasi dalam arti berbeda budaya sekali pun hanya menggunakan bahasa nonverbal, yang menekankan efek sebagai hasil interaksinya sehingga dapat membangun budaya tertentu



tu. Karena itu komunikasi antarbudaya adalah sangat menentukan terjadinya suatu budaya baru dalam suatu kelompok masyarakat, yang mana dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar komunikasi tentang komunikasi antarbudaya, antara lain:

Menurut Devito (1997:298) bahwa komunikasi antarbudaya mencakup beragam komunikasi meliputi komunikasi antarkultur-kultur yang berbeda, ras yang berbeda, kelompok etnis yang berbeda, agama yang berbeda dan bangsa yang berbeda.

Selanjutnya Tubbs dan Moss dalam Mulyana (2001:236) bahwa komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik atau perbedaan sosio-ekonomi. Bahkan Mulyana sendiri mengatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang – orang yang sedang berkomunikasi) dalam konteks komunikasi antarbudaya, ia merumuskan pula bahwa semakin mirip latar belakang sosial - budaya semakin efektiflah komunikasi. Selain itu secara singkat diungkapkan Liliweri (2003:9) bahwa komunikasi antarbudaya yakni komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaan atau komunikasi antar pribadi yang berbeda latar belakang kebudayaan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut bahwa komunikasi antarbudaya sangatlah penting untuk meningkatkan suatu budaya dalam satu kelompok masyarakat, yang mana pengembangannya dapat difokuskan pada komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok yang bersifat dialogis, meskipun berbeda suku atau etnik, sosio-ekonomi dan berbagai macam perbedaan lainnya.

Budaya merupakan milik seluruh kelompok manusia yang tidak terlepas dari komunikasi dan budaya mulai diperoleh dalam kelompok keluarga, karena itu komunikasi keluarga tergantung pada cara, waktu, tempat, dan musim. Oleh karena itu, pola komunikasi dipengaruhi oleh budaya atau latar belakang etnik keluarga. Sebagaimana Galvin dan Brommel, (1986 : 50) menyatakan bahwa pola komunikasi bisa diwujudkan melalui gerak, sentuhan, belaian, senyuman, mimik, atau ungkapan kata. Pola komunikasi berbeda untuk setiap keluarga. Pola komunikasi ini pun akan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang.



Pola komunikasi dipengaruhi budaya dalam keluarga. Soekanto (1995:188) menyatakan, “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan. Yang termasuk unsur kebudayaan adalah; (1) peralatan dan perlengkapan hidup, (2) mata pencaharian, (3) sistem kemasyarakatan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, dan (7) religi.

Sesuai unsur kebudayaan tersebut akan mempengaruhi pola komunikasi keluarga. Karena terbangunnya komunikasi dalam setiap keluarga dalam suatu komunitas tertentu maka akan terbentuk pula suatu budaya pada etnis atau suku tertentu seperti halnya pada masyarakat Tolaki di Kabupaten Kolaka.

Setiap orang memiliki perbedaan persepsi dan karakter karena sangat di pengaruhi oleh faktor biologis (*gen*) yang dibawa lahir ke dunia serta faktor lingkungan dimana ia berada sehingga bakat dan potensi berbeda untuk mempengaruhi pola komunikasinya begitu pula pengembangan budayanya. Berbicara tentang persepsi menurut Mulyana (2007: 214) bahwa semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas dan oleh karena tidak ada dua orang yang mempunyai nilai-nilai budaya yang persis sama, maka tidak pernah ada dua orang yang mempunyai persepsi yang persis sama. Lanjut Larry A.Samovar dan Richard E.Poster dalam Mulyana (2007; 214) mengemukakan enam unsur budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi kita ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain, yaitu: (1) kepercayaan (*beliefs*), nilai (*values*) dan sikap (*attitudes*); (2) pandangan dunia (*worldview*); (3) organisasi sosial (*social organization*); (4) tabiat manusia (*human nature*); (5) orientasi kegiatan (*activity orientation*); dan (6) persepsi tentang diri dan orang lain (*perception of self and others*).

Media Komunikasi Tradisional

Media tradisional adalah alat komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (desa) sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih digunakan di daerah



itu, adapun isinya masih berupa lisan, gerak isyarat atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian (Nurudin, 2000 :81).

Media tradisional tidak dapat dipisahkan dari seni tradisional yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan media tradisional. Media komunikasi tradisional sering disebut sebagai bentuk *folklor* antara lain: (1) cerita prosa rakyat, berupa mitos, legenda, dongeng; (2) ungkapan prosa rakyat, berupa peribahasa, pameo dan pepatah; (3) puisi rakyat; (4) nyanyian rakyat; (5) teater rakyat, (6) gerak isyarat berupa memicingkan tanda cerita; (7) alat pengingat berupa *mengiring sirih* atau berarti memining; serta (8) alat bunyi-bunyian berupa *kentongan*, gong dan *bedug* (Nurudin, 2000:81).

Menurut Bascom (Nurudin, 2000 :81) mengemukakan fungsi-fungsi *folklor* sebagai berikut (1) sistem proyeksi (*projective system*), (2) pengesahan atau penguatan adat; (3) alat pendidikan (*pedagogical device*), (4) alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya.

Ugboajah (Gillers 1995 : 112) mendefinisikan media tradisional merupakan ciri-ciri budaya yang tampak yang biasa berlaku, yang melestarikan dan menentukan hubungan sosial yang ada serta pandangan kelompok tentang dunia. Media ini mempunyai berbagai bentuk dan kaya dengan simbol atau lambang. Dalam kaitannya dengan hal itu, menurut Ugboajah ciri-ciri media tradisional atau media rakyat adalah sebagai berikut : (1) mempunyai bentuk yang sederhana, (2) pada umumnya dapat didapatkan tanpa biaya material, (3) merupakan milik umum, (4) tidak diketahui asalnya, (5) sedikit sekali perbedaan antara penghasil dan pemakai, (6) berhubungan langsung melalui indera dan orientasinya selalu bertatap muka, (7) menciptakan reaksi secara cepat, dan (8) bersifat dialog.

Sedangkan menurut Clavel (Gillers, 1995: 112) fungsi media tradisional atau media rakyat adalah sebagai berikut: (1) mencerminkan bagian-bagian rinci suatu budaya yang biasa dijumpai dan menyatukan situasi umum kehidupan sehari-hari, (2) mengesahkan budaya, memberikan alasan bagi upacara keagamaan dan adat istiadat, (3) mendidik terutama dalam masyarakat buta huruf, (4) mempertahankan penyesuaian kelompok terhadap tingkah laku, (5)

menghibur, serta (6) mempunyai fungsi katarsis.

“*Kalosara*” merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Hal itu dimungkinkan karena manusia selalu menggunakan media-media fisik seperti mata, telinga, hidung, tangan, dan lidah, untuk tindakan melihat, mendengarkan, mencium, meraba, dan merasakan. Itulah awal dari akal manusia untuk menggunakan kemampuan fisiknya sebagai media pengirim pesan-pesan dalam perilaku non verbal

Arti dan Makna *Kalosara*

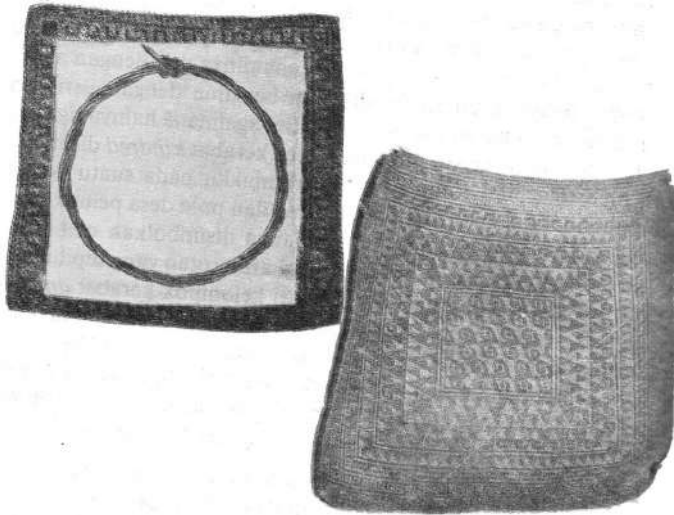
Secara harfiah *kalo* menurut Tarimana (1989 : 20) adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan-pertemuan atau kegiatan-kegiatan bersama di mana pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran maka cara membuat *kalo* itu menjadi berbentuk sebuah lingkaran pada dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua ujungnya tali pada satu simpul.

Berdasarkan konsep *kalo* yang dikemukakan oleh Tarimana tersebut, maka *kalo* dalam bahasa Tolaki berarti sebuah “lingkaran rotan” atau sebuah benda yang terbuat dari rotan yang sudah diraut lalu disimpulkan menjadi tiga, yang kedua ujungnya dipertemukan sehingga membentuk sebuah lingkaran.

Konsep *kalo* dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkupnya. Menurut A. Hamid Hasan, Arsamid, Husen A. Chalik, Abdul Rachim, Nehru Dundu dan Mangarati (Tarimana 1985: 22) menjelaskan bahwa *kalo* secara umum meliputi “*osara*” (adat istiadat), khususnya *Sara Owoseno Tolaki* atau *Sara Mbu'uno Tolaki*, yaitu adat pokok yang merupakan sumber dari segala adat istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka.

Sedangkan kata “*Sara*” adalah berasal dari bahasa Tolaki yang secara etimologis terdiri dari kata sandang ‘*O*’ artinya suatu.... Dan kata dasar *sara* artinya hukum. Dengan demikian *sara* berarti hukum adat, sehingga sering disamakan “*Sara Wonua*” artinya hukum adat negeri. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar : Kalo dan Wadah anyaman

Berdasarkan konsep *kalo* dan pengertian *sara* (*osara*) tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa *kalosara* adalah merupakan suatu benda atau alat yang digunakan dalam melaksanakan aturan hukum adat (adat istiadat) orang Tolaki baik dalam urusan adat istiadat itu sendiri maupun dalam urusan kemasyarakatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Tarimana (1989:21) bahwa :

konsep *kalosara* dalam kebudayaan *tolaki* adalah suatu benda yang digunakan sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja di zaman kerajaan, upacara penyambutan adat bagi para pejabat pemerintah yang berkunjung ke daerah atau desa-desa, upacara perdamaian atas suatu sengketa, dan *kalosara* dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palem (*Owiu*) dan kain putih sebagai alas dari wadah tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam lilitan *kalosara* yaitu lilitan pertama menandakan adanya tuhan, lilitan kedua menandakan adanya pemerintahan, dan lilitan ketiga menandakan adanya adat.

Fungsi Kalosara Terhadap Konflik Sosial di Masyarakat

Proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan kelompok menimbulkan suatu kekuatan sosial yang dapat bersifat assosiatif dalam arti memepererat dan

memperkuat hubungan antar manusia yang terwujud dalam kerjasama, saling menghargai dan saling menguntungkan. Atau dapat bersifat dissosiatif dalam arti saling memisahkan, menjauhkan dan saling tolak menolak yang terwujud dalam konflik, rasa benci, curiga dan rasa unggul diri.

Hubungan yang bersifat assosiatif biasanya berpangkal pada persamaan-persamaan yang dimiliki oleh masing-masing partisipan, seperti persamaan keturunan, etnik, bahasa, kebudayaan, dan agama. Sebaliknya, hubungan yang bersifat dissosiatif terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang menyangkut hal-hal tersebut di atas, tetapi dapat juga timbul karena para partisipan saling berebutan barang atau hal lain yang jumlahnya terbatas tetapi sama-sama dibutuhkan. Hal ini tampak dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Wawancara Anwar Hawa, Ketua Adat Tolaki Mekongga:

Konflik antar sesama masyarakat biasanya seputar masalah tanah atau masalah keluarga. Biasanya konflik yang terjadi antara masyarakat soal tanah dapat diselesaikan oleh pemuka adat *tolaki mekongga*. Karena pemuka adat *tolaki mekongga* dapat mengetahui dengan baik riwayat tanah di kampungnya. Satu hal yang bernuansa magis, bila keputusan itu sudah diambil dan *kalo* sudah turun maka masyarakat akan menaatinya, karena mereka berkeyakinan bila hal tersebut di langgar akan membawa akibat atau hukuman pada mereka (Kolaka, 22 Mei 2012).

Menurut Anwar Haka konflik sosial tidak hanya terjadi pada sesama orang Mekongga tetapi juga dengan masyarakat pendatang, konflik ini terjadi antara dua orang yang berbeda etnis tetapi mereka saling bertetangga. Pertetangan ini berawal dari persoalan adanya kebiasaan etnis Toraja untuk memelihara hewan yang tidak disukai oleh etnis Mekongga:

Orang *mekongga* mengatakan *Iee noteeni toraa nggiroo mokosisi, ehe mombiara ronga monggaa obeke, ielo inggito tatoehe mesabeangge rongga keloonggo mombiara obeke iamo kambo ipomalaa mano nimune iahoma* (Ia mengatakan orang toraja itu kotor, mereka beternak dan makan babi makanya kita tidak mau berteman dan kalau mau beternak babi jangan di kampung *pomalaa* ini tapi keluar kalau perlu kembali ke kampungmu).



Suku Toraja dalam hal beternak piaran “Babi” yang bagi sebagian orang dengan suku dan keyakinan agama berbeda, merupakan hal yang bertentangan. Di Pomala suku Toraja sudah membentuk perkampungan-perkampungan yang mengimitasi perkampungan di tanah asal mereka Tana Toraja sehingga memelihara binatang babi menjadi hal yang lumrah karena lingkungan mereka yang mayoritas sama sehingga tidak terjadi masalah. Namun di Pomala mereka harus ditertibkan dalam pemeliharaan bintang tersebut salah satunya adalah dengan menempatkan piaran itu didalam *kandang-kandang* dan senantiasa dibersihkan sehingga kotorannya tidak membuat polusi udara di sekitarnya.

Wawancara dengan Kepala Desa Pelambua Pomalaa Kolaka, Martinus (48 tahun) mengatakan :

Pemeliharaan babi merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat Toraja hal ini disebabkan karena binatang piaran ini nantinya selain dapat dijual dan bernilai ekonomis di sisi lain memiliki makna dan fungsi yang utama yaitu sebagai simbol pembayaran yang akan digunakan pada acara-acara adat budaya toraja seperti misalnya upacara kematian atau *rambu solok* yang membutuhkan bintang peliharaan diantaranya kerbau dan babi yang dipakai sebagai prasyarat dalam pelaksanaan upacara tersebut (Kolaka, 23 Mei 2012).

Merupakan kenyataan bahwa terdapat beberapa kasus tentang ketidakrukunan hidup antarwarga kelompok etnik di dalam suatu masyarakat yang bersifat multietnik. Kerusuhan massal yang terjadi di Ketapang dan Kupang akhir tahun 1998, serta Ambon dan Sambah awal tahun 1999 meskipun ditengarai banyak pihak penyebabnya adalah adanya kesenjangan sosial, namun peristiwa-peristiwa tersebut melibatkan kelompok-kelompok etnik yang berbeda. Kelompok-kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasi dirinya, merupakan *in-group*, dan kelompok di luar kelompok sosial itu adalah *out-group*-nya yang sering dihubungkan dengan istilah “kami” dan “mereka” (Soekanto, 1981:99).

Sikap *in-group* pada umumnya mempunyai faktor simpati dan solidaritas yang tinggi, serta selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota kelompoknya. Sedangkan sikap terhadap *out-group* bi-

asanya ditandai dengan suatu kelainan dan bahkan antagonisme atau antipati.

Perasaan *in-group* dan *out-group* merupakan dasar dari sikap etnosentrisme, yaitu suatu anggapan bahwa segala yang termasuk dalam kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik, jika dibandingkan dengan kebiasaan kelompok lainnya. Atau dengan kata lain, suatu sikap untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran-ukuran kebudayaan sendiri (Polak, 1991 : 113).

Stereotip dilontarkan dengan anggapan bahwa tiap-tiap individu memiliki karakteristik atau ciri khas perilaku dan emosi yang sama dalam suatu kelompok primordial (hariyono, 1993 : 57). Stereotip bisa menumbuhkan fanatisme dan kecurigaan, yang akhirnya akan semakin menutup diri masing-masing kelompok dan memperkuat stereotip itu sendiri. Keadaan ini tentu saja menghambat komunikasi yang sangat diperlukan bagi terjadinya interaksi sosial yang harmonis. Bila rintangan dalam proses komunikasi tidak dapat diantisipasi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan, baik antara atasan dan bawahan, maupun antara para pekerja yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, sehingga interaksi yang harmonis tidak dapat terwujud yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah konflik.

Bila kejadian tersebut berlangsung maka, biasanya tokoh-tokoh adat dari dua etnis yang berbeda dan akan bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan, dalam pertemuan tersebut akan hadir *Kalo*. Karena salah satu fungsi *kalo* adalah *Kalo* sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan orang Tolaki.

Untuk memulihkan suasana-suasana yang demikian, maka tak ada jalan lain yang lebih menjamin berhasilnya pemulihan kecuali mengadakan *Mosehe Wónua* (upacara besar yang diikuti oleh sebagian besar warga masyarakat orang Tolaki). Dalam upacara itu diungkapkan bahwa mereka telah melanggar adat dan norma agama. Pernyataan ini dikumandangkan oleh dukun upacara agar didengar oleh seluruh peserta upacara dan roh nenek moyang, dewa, dan Tuhan. Dukun upacara juga menyatakan bahwa mereka telah tobat,



dan bersumpah bahwa mereka akan kembali kepada ajaran-ajaran kalo yang sesungguhnya, adat pokok mereka.

Dalam suasana kehidupan di luar upacara yang bersifat sakral, sering terdengar kata-kata orang tua bahwa barang siapa yang tidak mentaati kalo maka ia menjadi *bere-bere olutu ruru mbenao*, artinya tersisih dari pergaulan umum masyarakat. Ia tidak dikunjungi oleh sesama dan begitu sebaliknya, karena ia telah dianggap berakhlak rendah oleh warga masyarakat. Apabila sudah begitu keadaannya maka ia menjadi seorang yang disebut *mbirito*, artinya manusia yang tidak punya harga diri lagi. Biasanya orang demikian tidak betah lagi untuk bertahan tinggal menetap di lingkungannya, dan terpaksa harus pindah ke tempat lain dan jika tidak melakukan bunuh diri.

Simpulan

1. “*Kalosara*” adalah merupakan suatu benda atau alat yang digunakan dalam melaksanakan aturan hukum adat (adat istiadat) orang Tolaki baik dalam urusan adat istiadat itu sendiri maupun dalam urusan kemasyarakatan
2. Ada beberapa fungsi “*kalosara*” sebagai alat upacara perkawinan adat, upacara pelantikan raja, upacara penyambutan adat bagi para pejabat pemerintah yang berkunjung ke daerah atau desa-desa, upacara perdamaian atas suatu sengketa.
3. *Kalosara* dalam penggunaannya dilengkapi dengan wadah anyaman dari tangkai daun palem (*Owiu*) dan kain putih sebagai alas dari wadah tersebut. Adapun makna yang terkandung dalam lilitan *kalosara* yaitu lilitan pertama menandakan adanya tuhan, lilitan kedua menandakan adanya pemerintahan, dan lilitan ketiga menandakan adanya adat.

Saran

1. Bagi pemerintah, perlunya kembali melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, khususnya bagi masyarakat Tolaki dan menjadikan sebagai pokok pembahasan dalam mata pelajaran muatan lokal.
2. Bagi generasi muda, disarankan untuk tidak menghindari budaya-budaya lokal daerah sendiri dan menjadikan sebagai bahan



diskusi dan kajian.

3. Bagi pihak universitas, disarankan untuk menetapkan beberapa desa yang mayoritas dihuni mayoritas etnis tolaki sebagai laboratorium masyarakat bagi para mahasiswa. §

Daftar Pustaka

- Colleta, Nat. J. dan Umar Kayam. (1987). *Kebudayaan dan Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Devito, Joseph.A. (1997). *Komunikasi Antar Manusia*. Profesional Books. Jakarta.
- Gillers, Frans Josep. (1995). *Berkomunikasi Antar Budaya*. NTT. Nusa Indah Flores.
- Human Rights Watch Asia. (1998). “*Indonesia Communal Violence in West Kalimantan*”. Vol. 9 No 10 (c) Desember 1997. Terj. Herlan Artono, *Konflik Etnis di Kalimantan Barat*. Jakarta. Institut Studi Arus Informasi.
- Koentjaraningrat. (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta. UI Press.
- Koentjaraningrat. (2000). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuswarno, Engkus. (2008). *Etnografi Komunikasi*, Bandung. Widya Padjadjaran.
- Liliwari, Alo. (1997). *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Liliwari, Alo. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung. Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung Rosdakarya.
- Nurudin. (2000). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta. Bilgraf Publishing.
- Philip, Lewis. (1980). *Organizational Communication : The Essence of Effective Management*, Grid Publishing Inc. Columbus, Ohio.
- Samovar, Larry A. and Richard E. Porter. (1981). *Understanding Intercultural Communication*. California. Wadsworth Publishing Company.
- Soekanto, Soerjono. (1995). *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Tarimana, Abdurrauf. (1985). *Kalo sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Tarimana, Abdurrauf. (1989). *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Yin. Robert K. (1997). *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta. PT. Raja Persada.



RESOLUSI KONFLIK PADA KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN TAMBANG Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi

*Prima Mulyasari
Agustini*

Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat pada *stakeholders*. Perusahaan diwajibkan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR), sebagai bentuk kepedulian sosial pada masyarakat sekitar, yang salah satu tujuannya untuk melakukan proses transformasi sosial ekonomi dari kondisi ketergantungan menjadi masyarakat mandiri dan siap berkompetisi di dunia usaha.

Beberapa perusahaan menerapkan *dual diamond method* dalam pelaksanaan CSR untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Transformasi sosial, budaya, dan ekonomi melibatkan proses perubahan struktur, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem ekonomi masyarakat. Proses itu menimbulkan beragam konflik yang berdampak pada aktivitas perusahaan dan perkembangan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan perusahaan pada *stakeholders* memiliki peran penting, mengingat keberadaan perusahaan pada posisi sebagai inisiator, fasilitator, dan katalisator kolaborasi peningkatan mutu hidup dengan stakeholder lainnya. Komunikasi dalam resolusi konflik sangatlah diperlukan, agar tujuan kegiatan CSR memberikan manfaat optimum bagi *stakeholders* dan perusahaan.

Kata kunci: komunikasi, konflik, corporate social responsibility

Pendahuluan

Konflik di lingkaran tambang marak terjadi. Berita mengenai konflik di pertambangan acapkali muncul di media massa. Sebut saja kasus konflik pertambangan di Bima Nusa Tenggara Barat yang cukup menyita perhatian publik. Resolusi konflik di Bima berakhir dengan mencabut ijin pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara yang ditengarai memicu konflik di tiga kecamatan, yakni Sape, Lambu, dan Langgudu. Masih banyak kasus konflik pertambangan lainnya yang perlu diselesaikan. Menurut data yang dimiliki Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, hingga Januari 2012 saja, ada 22 tempat rawan konflik masyarakat dengan perusahaan tambang. Ke-22 daerah tersebut, adalah :

Desa Loleba (Kecamatan Wasilei Halmahera Timur), Pulau Kabaena dan Gemaf, (Halmahera Tengah), Desa Betaua Kecamatan Tojo (Sulawesi Tengah), Desa Uekuli Kabupaten Tojo Una-una (Sulawesi Tengah), Kel. Batu IX Tanjungpinang (Kepulauan Riau), Makroman dan Samarinda (Kalimantan Timur), Kecamatan Tinanggea Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), Bahodopi dan Morowali (Sulawesi Tengah), Desa Rindu Hati Kab. Bengkulu Tengah (Bengkulu), Sei Serai Kecamatan Bukit Bestari (Tanjungpinang), Desa Pakis (Kab Rembang), Pulau Bangka, Sulawesi Utara, Desa Sulaho Kec. Lasusua (Mandailing Natal), Wotgalih, Lumajang, Jawa Timur, Kulonprogo (Yogyakarta), Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia di Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, Cipatujah dan Cikalong, kab. Tasikmalaya, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumba Tengah, Cek Bocek Selesek Reen Sury, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Sumber: <http://m.jpnn.com/news.php?id=118757>, diakses 30 Mei 2012).

Resolusi konflik di pertambangan yang menutup perusahaan tambang pun dinilai beberapa pihak bukan solusi tepat. Sebab pertambangan sangat membantu pendapatan negara, yang berarti mempercepat proses pembangunan dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, pendirian perusahaan tambang selain memerlukan ijin kelayakan untuk menambang juga memerlukan ijin sosial.

Eksplorasi tambang dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan berimplikasi pada kelanjutan pembangunan. Namun, pertambangan memang merusak lingkungan hidup, seperti mencemari udara, air, tanah, juga merusak hutan dan tanah. Pertambangan



berpengaruh pula pada tatanan serta pola kehidupan masyarakat dan keluarga, sehingga membawa pengaruh pada dinamika masyarakat. Dalam hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan ini rentan terjadi konflik. Masing-masing pihak perlu penyesuaian, kearifan, dan kedewasaan. Perusahaan harus mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan hidup dalam strategi bisnisnya. Hubungan perusahaan, masyarakat dan lingkungan akan saling menguatkan, asalkan pemerintah memiliki regulasi dan dijalankan secara tepat.

Saat ini, perusahaan tambang yang tengah beroperasi diharapkan menjaga keharmonisan diantara perusahaan dan masyarakat di lingkaran tambang. Pemerintah mengenakan kewajiban *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan ekstraktif, dengan berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas, pasal 74, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bulan Juli 2007. Program CSR penting untuk diimplementasikan, karena masyarakat merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perusahaan tambang. CSR ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang mandiri, dan siap berkompetisi di dunia usaha.

Namun demikian, implementasi kegiatan CSR juga berpotensi dan menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Penerapan *double diamond method* dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, mulai diterapkan pada kegiatan CSR di Indonesia, sejak 2007. Penerapan metode ini, untuk membantu transformasi sosial ekonomi masyarakat untuk mencapai kemandirian. Proses transformasi sosial ekonomi ini melibatkan *stakeholders* yang berkonflik karena perbedaan kepentingan, yakni perusahaan, masyarakat, dan pemerintah sebagai penentu kebijakan yang akan mempengaruhi kegiatan CSR. Mengingat posisi perusahaan sebagai inisiator, fasilitator, dan katalisator dalam pelaksanaan CSR, maka perusahaan yang menjadi motor penggerak proses transformasi ini.

Proses transformasi sosial ekonomi yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan perusahaan demi berlangsungnya pembangunan nasional, memerlukan peran komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR perusahaan. Komunikasi juga diperlukan dalam

pengelolaan konflik di lingkaran tambang berkaitan dengan kegiatan CSR. Oleh karena itu, perlu dikaji hal-hal berikut: (1) bagaimana konflik pertambangan di Indonesia?, (2) bagaimana kegiatan CSR pada perusahaan tambang di Indonesia?, dan (3) bagaimana peran komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR di perusahaan tambang?

Konflik Pertambangan di Indonesia

Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, ijin sosial merupakan keharusan. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan pertambangan disarankan melaksanakan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampaknya kepada *stakeholders*. Pro dan kontra di awal kegiatan, semestinya dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan semangat menuju kebaikan untuk semua.

Kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi telah diatur secara rinci oleh peraturan dan perundangan yang ada di bawah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain oleh pelaku pertambangan sendiri, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diintensifkan lagi, baik oleh tingkat pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) maupun tingkat daerah (bupati dan dinas terkait). Namun demikian, pendirian perusahaan tambang, terutama pembukaan lahan tambang harus mendapatkan ijin dari masyarakat di lingkaran tambang, sebab hal ini rentan konflik.

Berdasarkan catatan Harian Kompas (20 Februari 2012: 1), konflik pertambangan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Tabel 1 di samping. Konflik pertambangan ini memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dan *stakeholders*. Bagi perusahaan, konflik yang melibatkan perusahaan pertambangan akan bisa menjadi sinyal negatif bagi para investor. Investor akan mengamati aktivitas perusahaan mulai dari hulu hingga hilir. Apabila konflik tersebut mengganggu kinerja perusahaan, misalnya dalam hal produksi, maka kemungkinan besar investor akan bereaksi negatif. Hal itu



Tabel 1. Kategori Konflik Tambang di Indonesia

No	Kategori Tambang	Lokasi	Aspek Konflik
1	Bijih Besi	Kabupaten Aceh Besar	pencemaran lingkungan, penolakan warga, konflik lahan dengan warga
2		Kab Kota Baru, Kalimantan Selatan	penambangan pulau kecil, pencemaran lingkungan, penolakan warga.
3	Emas	Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara	penolakan warga, tumpang tindih lahan.
4		Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	pencemaran lingkungan, tumpang tindih lahan, dan penolakan warga
5		Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara	persoalan penolakan warga, tumpang tindih lahan.
6		Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat	penolakan dari warga, tumpang tindih lahan.
7		Kabupaten Mimika, Papua	pencemaran lingkungan, ketenagakerjaan, konflik dengan masyarakat
8	Timah	Kabupataen Dairi, Sumatera Utara	penolakan warga, tumpang tindih lahan
9	Minyak	Provinsi Riau	pencemaran lingkungan, konflik lahan dengan warga.
10	Batubara	Muara Enim, Sumatera Selatan	tumpang tindih lahan
11	Batu Kapur	Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah	pencemaran lingkungan
12	Pasir Besi	Kebupaten Kulon Progo DI Yogyakarta	konflik lahan dengan warga
13	Tembaga dan Mangan	Kabupaten Pacitan, Jawa Timur	pencemaran lingkungan, penolakan warga
14	Tembaga dan emas	Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	pencemaran lingkungan

tentu akan berpengaruh terhadap pergerakan saham pertambangan.

Penambangan energi dan sumber daya mineral bisa meminimalisasi konflik bila prosesnya dilakukan transparan kepada ma-



syarakat sekitar. Bila masyarakat di sekitar pertambangan protes, padahal prosesnya sudah berlangsung, disinyalir keuntungan yang diterima pemerintah tidak menetes sampai ke masyarakat. Konflik pertambangan telah terjadi di beberapa tempat karena pembagian hasil yang dinilai tidak adil atau perijinan yang tidak jelas. Misalnya kegiatan penambangan PT Freeport Indonesia di Papua dan eksplorasi panas bumi PT Chevron Geothermal Indonesia di Kabupaten Bandung.

Perusahaan tambang, seringkali diterpa isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan. Beberapa isu sosial yang mempengaruhi daya saing perusahaan tambang, diantaranya: keselamatan kerja, kesetaraan gender, kesehatan pekerja, penggunaan air, penggunaan energi, dampak lingkungan, kemiskinan pada komunitas sekitar perusahaan, dan keterampilan dan pendidikan pekerja (Rachman, dkk, 2011: 87). Isu-isu ini memunculkan beragam konflik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.

CSR pada Perusahaan Tambang di Indonesia

Saat ini, pemerintah telah mewajibkan perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU PT) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli 2007.

CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sangkat, dalam Rudito, dkk, 2004: 72).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (dalam Rudito, dkk, 2004: 72), definisi CSR adalah komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. CSR merupakan tindak-



an sosial, termasuk lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan perundang-undangan. CSR sebagai konsep tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam organisasi bisnis dan para *stakeholders*-nya.

Kontribusi terhadap komunitas dan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi perusahaan dalam merespons dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi. Hal ini sebagai akibat proses operasional perusahaan di lingkungan masyarakat dan komunitas itu berada. Partisipasi perusahaan ini seringkali dikaitkan dengan isu tanggung jawab sosial yang kemudian diintegrasikan dengan strategi bisnis perusahaan dalam bentuk CSR.

Kontribusi untuk perkembangan ekonomi, peran perusahaan diintegrasikan melalui strategi bisnis dalam bentuk CSR memiliki maksud untuk meningkatkan kinerja dan potensi ekonomi masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. CSR merangsang peran masyarakat secara signifikan dalam membangun usaha-usaha yang menguntungkan masyarakat dan lingkungannya.

Dalam hal masalah sosial, peran perusahaan tambang melalui program CSR yakni dengan menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkaran tambang, sebelum maupun setelah perusahaan beroperasi. Kemampuan perusahaan beserta sumber daya manusianya dalam menanggapi masalah-masalah dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan dasar, dan akses pada sumber daya alam, merupakan satu nilai tambah bagi kelanjutan operasional perusahaan. Selain itu, aktivitas ini dapat memperbaiki reputasi perusahaan, juga meningkatkan peran perusahaan dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan.

CSR perusahaan tambang, tidak dapat dilepaskan dari peran *stakeholders*. *Stakeholders* dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholders* terhadap suatu isu. *Stakeholders* prioritas merupakan *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung dengan kehadiran perusahaan, yakni masyarakat dan tokoh masyarakat, serta lembaga atau badan publik yang bertang-

gungjawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

Stakeholders kunci merupakan *stakeholders* yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan, seperti bupati, DPR, Pemda, dan dinas terkait. CSR diarahkan untuk memaksimalkan manfaat kehadiran perusahaan bagi *stakeholders* prioritasnya dan perusahaan itu sendiri. Mengintegrasikan dimensi sosial ke dalam proses bisnis di perusahaan tambang membutuhkan proses, waktu dan sumber daya. Dalam proses transformasi sosial dan ekonomi, *stakeholders* perlu belajar, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Transformasi sosial ekonomi untuk mencapai tujuan CSR, yakni masyarakat yang mandiri, dalam prosesnya menimbulkan dan berpotensi konflik. Tahapan panjang dalam transformasi sosial memang memerlukan pengelolaan konflik yang tepat. Adapun tahapan transformasi sosial ekonomi dalam CSR pada perusahaan tambang, sebagai berikut:

1. Proses pemetaan atau riset sosial ekonomi,
2. Proses perencanaan program penguatan kondisi sosial ekonomi,
3. Proses pembentukan lembaga kolaborasi pengawal program strategi bersama pada program CSR,
4. Proses asistensi, pendampingan, dan *couching* implementasi program CSR menuju arah transformasi,
5. Proses perekayasaan, adopsi teknologi, inovasi dan proses penguatan bisnis, serta mobilisasi sumber daya lokal,
6. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan program CSR (Rachman, 2011: 107).

Pada proses transformasi ini perusahaan sebagai pelaku utama, yang menjadi inisiator, fasilitator, dan katalisator dalam pencapaian tujuan CSR, yakni perubahan dari kondisi masyarakat yang memiliki ketergantungan menjadi masyarakat yang mandiri dan siap berkompetisi di dunia usaha.

Pada tahun 2007, untuk mendukung pelaksanaan CSR perusahaan tambang, perusahaan mulai menerapkan *double diamond method*, dimana analisis yang dilakukan mencakup analisis situasi kondisi



sosial ekonomi di beberapa lokasi tambang. *Double diamond method* ditunjukkan untuk *stakeholders* prioritas yang terkait dengan proses transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju masyarakat mandiri. Dengan metode ini, banyak manfaat bisa diperoleh, yakni *stakeholders* dapat menggali, memetakan, dan mengenali keunggulan daerah, yang diharapkan dapat terjadi kola-borasi diantara *stakeholders* untuk memanfaatkan keunggulan daerahnya.

Peran Komunikasi dalam Resolusi Konflik pada Kegiatan CSR di Perusahaan Tambang

Resolusi konflik merupakan suatu bentuk usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa berarti positif jika dikelola dan diselesaikan secara kolaboratif. Dalam proses transformasi sosial ekonomi pada masyarakat di lingkaran tambang, *stakeholders* prioritas, harus berperan aktif untuk mencapai masyarakat yang mandiri.

Masyarakat berperan dalam proses transformasi sosial ekonomi karena menjadi subjek dan objeknya, sehingga perlu berperan dalam merencanakan proses transformasi sosial ekonomi, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Pemerintah perlu berkontribusi dalam proses transformasi ini, sebab CSR membantu pemerintah dalam program pembangunan dan menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab pembangunan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses transformasi sosial ekonomi. Perusahaan, jelas membutuhkan CSR, karena lebih menjamin operasionalisasi perusahaan.

Dalam proses transformasi sosial ekonomi, yang menuntut peran serta *stakeholders* prioritas, seringkali menimbulkan konflik. Konflik yang muncul pada implementasi CSR di perusahaan tambang, umumnya adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Konflik merupakan hubungan diantara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik ti-

dak dapat dicapai secara simultan (Pruit dan Rubin, 2011: 10). Pihak yang terlibat di dalamnya bisa perorangan, maupun kelompok, yang pasti memiliki kepentingan dan sasaran yang hendak dituju-nya (Kartikasari, 2001:4). Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan memiliki peran penting dalam proses transformasi sosial. Untuk melalui tahap transformasi sosial ini, diperlukan fasilitator, mediator, dan kolaborator untuk mengakomodasi beragam kepentingan yang perlu disesuaikan dengan tujuan CSR.

Melihat tingginya tingkat kompleksitas persoalan konflik yang terjadi pada implementasi CSR pada perusahaan tambang, jalan terbaik adalah mengoptimalkan fungsi dan peran komunikasi di dalamnya. Seluruh unsur yang terlibat di dalam konflik mesti dipandang sebagai keragaman sumber daya yang perlu dikelola untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Masyarakat, pemerintah, dan perusahaan perlu berkomitmen untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Komunikasi sangat berperan penting dalam pe-ngelolaan dan penggerakan sumber daya yang terlibat dalam proses transformasi sosial ekonomi dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam upaya pencapaian tu-juan.

Pengelolaan konflik merupakan keterampilan memainkan peran dan tindakan untuk mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Untuk itu dibutuhkan keterampilan komunikasi, agar bisa mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam area yang sejajar untuk bisa memperoleh titik temu dari berbagai kepentingan.

Kepemilikan kemampuan negosiasi dan kemampuan melakukan komunikasi persuasi untuk mewujudkan mediasi yang dapat diterima semua pihak, sangatlah penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Putnam dan Poole (dalam Miller, 1995: 223), bahwa:

Komunikasi merupakan esensi dari konflik karena konflik terjadi melalui formasi isu-isu yang berlawanan, persepsi dari konflik yang dirasakan, mewujudkan emosi dan persepsi kedalam perilaku konflik, dan rangkaian tahapan konflik berikutnya. Jadi, komunikasi merupakan instrumen dalam setiap aspek konflik termasuk menghindari atau menekan konflik, ekspresi berlawanan yang terbuka, dan evolusi isu-isu.



Littlejohn (1999: 478) menawarkan konsepsi tentang *direct communication* yang memiliki tiga keuntungan ketika diaplikasikan dalam manajemen konflik di pertambangan sebagai berikut:

- a. Komunikasi itu sifatnya simbolis dan tidak mendatangkan konsekuensi yang sesungguhnya dari gerakan nyata. Melalui komunikasi, setajam apapun perbedaan di antara anggota masyarakat hanya dikonseptualisasikan ke ranah komunikasi dan tidak diikuti gerakan nyata yang mengantarkan lahirnya konflik terbuka. Semua bisa dimediasi dalam komunikasi yang berlangsung di antara pihak yang terlibat.
- b. Komunikasi mengubah kemungkinan gerakan dan bisa mengurangi tingkat persaingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Berbagai perbedaan dan harapan telah diformat ke dalam pesan komunikasi sehingga mengurangi persaingan yang mengarah pada konflik.
- c. Komunikasi bisa menghasilkan perubahan orientasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah. Orientasi berubah terutama setelah terdapat dialog yang membawa implikasi pemahaman baru di antara pihak-pihak yang terlibat masalah, sehingga arah dan tujuan individu atau kelompok bisa mengalami perubahan. Setelah berlangsung komunikasi diantara para *stakeholders*, maka masing-masing pihak memahami perannya dalam transformasi sosial ekonomi untuk mencapai tujuan CSR.

Dengan peran komunikasi yang memiliki kontribusi besar dalam resolusi konflik, para pihak yang berkonflik hendaknya memiliki keterampilan mengelola konflik, seperti yang dikemukakan Winardi (1994: 57) yang meliputi:

- a. Keterampilan teknis yang berupa kemampuan seseorang untuk mempergunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan untuk melaksanakan tugas khusus pasca-pelatihan. Keterampilan ini direalisasikan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan pada tokoh masyarakat atau pihak lain sebagai pembekalan diri terkait dengan kemampuan intelektualitasnya secara komprehensif dalam mencari solusi konflik. Contoh: *training* manajemen konflik bagi tokoh masyarakat di lingkaran tambang.



- b. Keterampilan *human relations* yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun jaringan maupun relasi sosial yang bisa dijadikan komponen untuk menopang manajemen konflik. Suatu konflik yang bersifat kompleks dibutuhkan pandangan dan penyelesaian secara luas, bahkan melibatkan unsur yang berada di luar jangkauan konflik secara langsung. Kuncinya adalah jaringan sosial yang dimiliki orang-orang yang terlibat konflik yang dibangun melalui komunikasi.
- c. Keterampilan konseptual yang berwujud kemampuan seseorang untuk memahami kompleksitas masyarakat secara menyeluruh, termasuk mengetahui apakah yang dilakukannya sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada. Keterampilan ini mengajarkan pada setiap individu untuk selalu memperhatikan dinamika dan perubahan yang terjadi ditengah masyarakat sebagai referensi untuk memudahkan setiap usaha mencari solusi atas konflik yang terjadi. Oleh karenanya, amat diperlukan keberadaan dokumen yang berhubungan dengan dinamika sebuah masyarakat.

Agar proses transformasi sosial ekonomi ini berjalan baik, perlu pengelolaan konflik dan resolusi konflik diantara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, dengan membuat lembaga kolaborasi yang terdiri dari pelaku usaha dan asosiasi yang menjadi tema transformasi, aparat pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, juga tokoh masyarakat dan elemen perusahaan setempat. Lembaga kolaborasi ini, berperan untuk mengawal proses transformasi sosial ekonomi yang telah disepakati bersama.

Perusahaan perlu memperkuat dan memberdayakan lembaga kolaborasi. Lembaga ini yang akan berperan pada proses transformasi, baik ada atau tidak adanya perusahaan. Lembaga kolaborasi ini berfungsi sebagai:

1. *fasilitasi*, yaitu menghubungkan komponen dan sumber daya yang ada untuk proses transformasi sosial ekonomi.
2. *interface*, yaitu mewakili kepentingan para pelaku transformasi sosial ekonomi terhadap pihak luar, yang memiliki sumber daya, tetapi tidak termasuk dalam lembaga kolaborasi.
3. *clearing house*, yaitu sebagai *service centre* dengan menyediakan data



dan informasi untuk membantu proses transformasi sosial ekonomi.

4. advokasi, yaitu bertanggung jawab membela dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan proses transformasi sosial ekonomi sesuai dengan agenda yang telah disepakati (Rachman, 2011: 205).

Menilik fungsi lembaga kolaborasi yang penting sebagai salah satu cara menengahi beragam konflik yang terjadi pada CSR perusahaan tambang, maka komunikasi memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan menjalankan lembaga kolaborasi. Komunikasi dapat mengubah kemungkinan gerakan dan bisa mengurangi tingkat persaingan dari pihak-pihak yang terlibat konflik, serta komunikasi juga bisa menghasilkan perubahan orientasi dari pihak-pihak yang terlibat terhadap masalah (Littlejohn, 2008: 478).

Media komunikasi berperan sebagai saluran-saluran yang menjadi sasaran sosialisasi dan menjadi agen perubahan pada masyarakat transformasi, untuk mencapai masyarakat yang mandiri. Di akhir masa pelaksanaan program CSR, upaya mendekatkan lembaga kolaborasi kepada pemerintah memerlukan peran komunikasi, untuk mengingatkan dan mengembalikan tanggung jawab pengembangan masyarakat kepada pemerintah. Agar pemerintah dapat menindaklanjutinya sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Simpulan

1. Konflik pertambangan yang terjadi umumnya karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu suatu langkah antisipasi, termasuk koordinasi dengan semua pihak terkait, agar jelas persoalan potensi konflik dan proaktif mencari langkah penyelesaian. Perusahaan perlu mengubah paradigma, dari yang hanya berpegang pada kontrak, menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab pada masyarakat setempat. Para *stakeholders* prioritas, yakni pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus memiliki kompromi.
2. CSR sebagai salah satu resolusi konflik antara perusahaan tam-

bang dan masyarakat. Perusahaan diminta oleh pemerintah untuk berbagi keuntungan dengan masyarakat setempat melalui program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan tambang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dana-dana CSR diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkaran tambang.

3. Komunikasi sangat berperan penting dalam pengelolaan dan penggerakan sumber daya yang terlibat dalam proses transformasi sosial ekonomi dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi, dalam upaya pencapaian tujuan CSR. Pengelolaan konflik merupakan keterampilan memainkan peran dan tindakan untuk mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Untuk itu dibutuhkan keterampilan komunikasi, agar bisa mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik dalam area yang sejajar untuk bisa memperoleh titik temu dari berbagai kepentingan.

Saran

1. Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus disampaikan. Sisi positif perusahaan pertambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, efek domino ekonomi.
2. Pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus dengan masukan dari pihak yang berkompeten. Pemerintah memfasilitasi, mendukung dan memberi penghargaan kepada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya ini. Pemerintah dapat mengawasi proses interaksi antar pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap pihak lain. Pemerintah mestinya mampu menciptakan kebijakan satu atap untuk pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perlu diantisipasi sedini mungkin dengan melakukan koordinasi lintas instansi di daerah.



3. Mengingat pentingnya komunikasi dalam resolusi konflik pada kegiatan CSR di perusahaan tambang, maka pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perlu membekali diri dengan kemampuan mengelola konflik dan keterampilan komunikasi, untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dan memberikan kontribusi pada resolusi konflik. §

Daftar Pustaka

- Kartikasari, SN (Ed.) (2000). *Mengelola Konflik*. Jakarta: RTC British Council.
- Littlejohn, Stephen W. (1999). *Theories of Human Communication*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Miller, Kathrine. (1995). *Organizational Communication: Approaches and Processes*. California, USA: Wadsworth Publishing Company.
- Pruit, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar Offset.
- Rachman, Nurdizal. M, dkk. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR – Corporate Social Responsibility*. Penebar Swadaya.
- Rudito, Bambang, Arif Budimanta, dan Adi Prasetyo. (2004). *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: *Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD)*.
- Winardi. 1994. *Manajemen Konflik*. Jakarta: Rajawali Press.

Sumber lain:

<http://m.jpnn.com/news.php?id=118757>, diakses 30 Mei 2012

Harian Kompas, 20 Februari 2012. Tambang Banyak Picu Masalah.



MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN RESOLUSI KONFLIK

STUDI KASUS KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Inda Fitriyarni dan
Hj. Hairunnisa*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Fenomena konflik perkebunan kelapa sawit (Kaltim Sejuta Hektar Sawit) di wilayah perintis perkebunan kelapa sawit sangat menarik mengingat bahwa penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut memiliki keanekaragaman suku, budaya dan adat istiadat. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengalaman masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik perkebunan kelapa sawit.

Faktor penyebab konflik berkaitan dengan pembagian plasma, pola manajemen satu atap dan replanting. Keseluruhan jenis konflik yang meliputi *pseudoconflict*, *simple conflict*, dan *ego conflict* menjadi penghambat komunikasi antara masyarakat, PTPN XIII dan pemerintah daerah. Komunikasi dalam proses pengelolaan konflik antar masyarakat dan perusahaan perkebunan terlihat belum memberikan kontribusi yang signifikan, karena komunikasi dilakukan hanya sampai pada tahapan pengungkapan harapan atau kebutuhan, dan untuk mengklarifikasi masalah yang ada, tidak sampai pada penuntasan masalah.

Kata kunci: konflik antar kelompok, adat istiadat dan komunikasi konflik.

Pendahuluan

Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada seringnya terjadi konflik (kerusuhan), yang bersifat vertikal maupun horizontal, baik konflik politik, sosial maupun konflik agraria dan sumber daya alam. Peristiwa kecil akhirnya sering berkembang menjadi masalah besar yang berkepanjangan.

Merebaknya konflik-konflik di daerah-daerah yang relatif kecil seperti: Sambas, Pontianak, Maluku, Indramayu, Solo, dan Sampit yang banyak melibatkan generasi muda menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di daerah-daerah tersebut. Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah pada lebih satu dasawarsa terakhir lalu, baik dalam eskalasi besar maupun kecil telah membawa korban jiwa manusia, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan.

Beberapa konflik yang terjadi salah satunya adalah konflik sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Tragedi Mejuji yang mencuat pada pertengahan Nopember 2011 lalu hanyalah bagian kecil dari bara konflik pertanahan Indonesia (2011, www.antara.com). Motif dari kasus konflik dengan petani ini hampir sama, yakni karena adanya perampasan lahan perkebunan warga oleh pengusaha.

Konflik sengketa lahan merupakan sebagian kecil konflik sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. Hampir setiap hari media massa memberitakan konflik sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan baik perusahaan milik negara maupun swasta. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Namun demikian penanganan konflik sosial berkaitan sengketa lahan selama ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat terbukti kurang mampu untuk mengatasi konflik maupun potensi konflik.

Resolusi konflik yang dilakukan selama ini belum mampu meredakan konflik untuk jangka panjang. Sehingga potensi konflik yang bersifat *pseudoconflict* dikhawatirkan bisa menjadi bencana sosial di kemudian hari. Untuk mengatasi *pseudoconflict* tersebut maka diperlukan suatu kajian manajemen komunikasi konflik sebagai deteksi dini bencana sosial.



Studi yang dilakukan Inda dan Nisa dari Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman (2012) dimaksudkan untuk menganalisis Manajemen Komunikasi Konflik serta resolusi konflik sosial sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser. Lokasi penelitian meliputi dua desa yaitu Desa Sawit Jaya dan Desa Lombok Kecamatan Long Ikis. Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu menggugah kita sebagai masyarakat, individu, pihak perusahaan maupun pemerintah bahwa manajemen komunikasi konflik perlu dilakukan baik saat kondisi konflik terjadi maupun kondisi pasca konflik sebagai deteksi dini untuk mencegah bencana sosial melalui resolusi konflik yang memuaskan kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme. Menurut Nasution (1988) dalam Ruslan (2006), postpositivisme mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan holistik, memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang holistik. Selain itu, postpositivisme juga memahami makna suatu permasalahan dan memandang hasil penelitian sebagai kegiatan bersifat spekulatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, FGD (*focus group discussion*), studi literatur dan dokumentasi. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam sementara metode lain digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara mendalam.

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari pihak pemerintah kabupaten (kepala bagian tata pemerintahan), kepala desa, pengusaha perkebunan sawit (dalam hal ini adalah humas dan *general manager* pihak PTPN XIII), serta tokoh-tokoh berpengaruh (*opinion leaders*) sebagai *key informant*.

Selain itu peneliti melakukan observasi atau pengamatan untuk beberapa hal seperti keadaan harmoni sosial di dua desa yaitu Desa



Sawit Jaya dan Desa Lombok. Informan yang diwawancarai di lapangan sebanyak 15 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* dan *snowball*.

Manajemen Komunikasi Konflik

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain (Terry, 2005).

Manajemen berasal dari kata *manage* (bahasa latinnya; *manus*) yang berarti: memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. Sedangkan menurut Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan memberdayakan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam manajemen merupakan suatu proses yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*), meliputi; penerapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta ramalan (prediksi) apa yang akan terjadi.
2. Pengorganisasian (*organizing*), meliputi: pemberian tugas terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan jalur wewenang, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan terorganisir.
3. Penyusunan Formasi (*staffing*), meliputi; menentukan persyaratan personnel yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, menentukan *job description* dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, melakukan penilaian dan pelatihan termasuk didalamnya pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manajemen organisasi.
4. Memimpin (*leading*), meliputi: membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahan, serta mencipt-

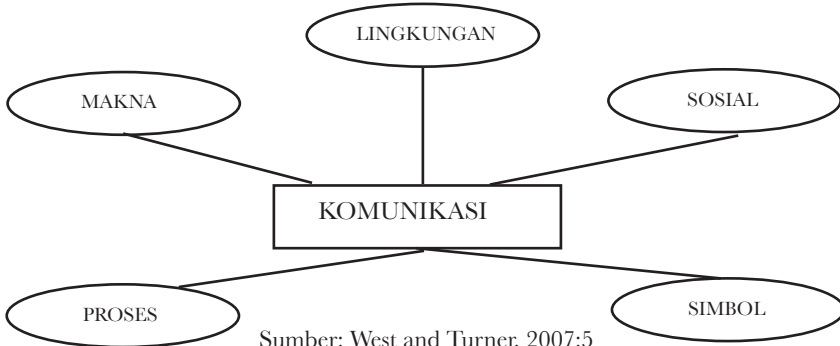


takan iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif –khususnya dalam metode komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya– sehingga timbul saling pengertian dan kepercayaan yang baik. Menumbuhkan disiplin kerja dan *sense of belonging* (rasa memiliki) pada setiap karyawan dan jajaran manajemen (*public internal*).

5. Pengawasan (*controlling*), fungsi terakhir manajemen ini mencakup; persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra positif (Basu Swasta, 1996).

Komunikasi merupakan proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.

Gambar 1. Definisi Komunikasi



Pemahaman mengenai nilai-nilai komunikasi disampaikan oleh pakar dengan definisi berbeda-beda. Hovland dalam buku *Sosial Communication* menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses bila-mana seseorang individu (komunikator) menyampaikan stimulan (lambang kata-kata) untuk mengubah tingkah laku individu lainnya (komunikan).

Effendy (1984) dalam buku *Ilmu Komunikasi* mengatakan komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Robbins (1994) dalam buku *Essential of Organizational Behavior* bahwa komunikasi



menjalankan 4 (empat) fungsi utama di dalam suatu kelompok (kontrol, pengawasan, motivasi pengungkapan emosi dan informasi). Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan).

Kriesberg (1998) mendefinisikan konflik sebagai “*two or more persons or groups manifest to belief that they have incompatible objectives*”. Aman Saputra (2009:1), konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses-proses sosial. Secara teoritik, konflik sering didefinisikan sebagai sesuatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan atau kepentingan.

Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti kepentingan (ekonomi), nilai, status, kekuasaan, otoritas dan sebagainya. Konflik sosial berkaitan dengan perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri.

International Strategy for Disaster Reduction-United Nations, mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi sistem masyarakat yang mengakibatkan kerugian berskala besar yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana dikemukakan, ”bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.



Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam, non alam dan bencana sosial.

Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti teror dan konflik sosial. Dengan kata lain, bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat faktor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya bencana banjir, gunung meletus, wabah penyakit, teror bom, konflik sosial, dan lain-lain.

Konflik sosial merupakan suatu hal yang tak terelakkan dalam masyarakat yang terdiri dari latar belakang suku, agama, adat istiadat, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya. Konflik sosial dapat menjadi bencana ketika telah menjadi kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana umum dan tempat tinggal serta trauma psikologis (sumber: Masyarakat Penanggulangan Bencana).

Manajemen konflik merupakan sebuah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan (Wirawan, 2010:129). Sedangkan manajemen komunikasi konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada proses komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi. Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Dari beberapa poin di atas maka diperlukan manajemen komunikasi konflik yang digunakan untuk mengatasi pseudo konflik atau potensi konflik di tengah masyarakat atau golongan sehingga tidak mengganggu situasi dan kondisi suatu masyarakat atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan (disintegrasi), kerusuhan,



tindakan negatif yang dapat merugikan golongan atau individu tersebut.

Resolusi Konflik

Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (konsensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui konsensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan sehingga tidak terjadi konflik yang menjadi sebuah bencana sosial. Model Resolusi Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi sehingga melahirkan model resolusi litigasi (hukum), nonlitigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) serta pranata adat.

Berkaitan dengan model resolusi yang ditawarkan Dahrendorf, teori *Human Relations* menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

Suksesnya seseorang dalam melaksanakan "*Human Relations*" karena ia berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati orang lain. Teori hubungan manusiawi (Littlejohn, 2002:255) mengemukakan bahwa suatu kelompok memiliki kehidupannya sendiri lengkap dengan segala adat kebiasaan, norma dan kontak sosial yang efektif atas anggotanya. Dalam proses penyelesaian konflik tersebut, unsur komunikasi tidak lepas dari model tersebut baik model litigasi maupun nonlitigasi.

Manajemen Komunikasi Konflik dan Resolusi Konflik

Hasil penelitian Inda dan Nisa (2012) di Desa Sawit Jaya dan Desa Lombok Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser tentang manajemen komunikasi konflik di daerah tersebut bisa dikatakan sangat kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perencanaan pasca konflik maupun saat konflik terjadi. Perencanaan

dalam rangka mencegah maupun mengatasi konflik tidak dilakukan dari pihak masyarakat, pemerintah dan perusahaan.

Saat penelitian ini berlangsung, masih ada potensi konflik yang bersifat pseudo karena walaupun masalah sengketa lahan sudah dapat diatasi akan tetapi permasalahan lain muncul menjadi konflik baru. Tabel di bawah ini akan menggambarkan tentang konflik dan potensi konflik yang terjadi di perkebunan kelapa sawit Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 1. Konflik dan Potensi Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

Pihak	Konflik	Bentuk Konflik	Faktor Penyebab
Masyarakat dan Perusahaan	Perebutan Lahan Perkebunan	Tuntutan ganti rugi dan pengembalian lahan dengan cara demonstrasi dan pemblokiran akses PTPN XIII oleh masyarakat	Tumpang tindih lahan, perbedaan dasar kepemilikan lahan/pengelolaan
	Konflik kemitraan (pembagian inti plasma, penentuan kredit, penjualan TBS, peremajaan dan jaminan hidup)	Penolakan, pengingkaran kesepakatan, ketidakpedulian dan kecurigaan	Ketidakadilan, transparansi, tidak adanya sosialisasi, kemampuan kepemimpinan dan hubungan manusia (<i>human relation</i>)
Masyarakat dan masyarakat	Pembagian plasma, ganti lahan diluar daerah	Kecemburuan dan tuntutan kebun plasma	Ketidakadilan dan transparansi

Sumber: olahan peneliti

Dari tabel tersebut di atas ditemukan garis besarnya bahwa konflik antara masyarakat dan perusahaan meliputi tuntutan kehilangan lahan karena lahan masuk pada wilayah konsesi perusahaan kelapa sawit. Selain itu, upah yang rendah serta kurangnya transparansi dalam penentuan harga jual TBS (Tandan Buah Segar) dan kredit. Ini artinya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan (PTPN XIII) lebih disebabkan oleh kebijakan pemberian izin oleh pemerintah (pusat maupun daerah) yang tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari masyarakat.



Kebijakan tata ruang yang tidak mengakomodir keberadaan hak tanah ulayat menjadi sumber masalah utamanya.

Sikap pemerintah yang kurang koordinasi dengan lembaga agraria dan masyarakat adat menimbulkan korban baik perusahaan maupun masyarakat lokal. Beroperasinya perusahaan perkebunan besar tersebut tentu akan sangat tergantung pada perijinan yang diberikan oleh negara. Maka hal ini kembali menunjukkan usaha perkebunan dengan sama sekali tidak memperhitungkan kerugian sosial ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah lebih bersifat otoriter dan komunikasi dilakukan secara vertical karena perusahaan masuk ke wilayah adat hanya berbekal memo dari pemerintah kabupaten untuk kemudian ditindaklanjuti pemerintah desa tanpa disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat.

Selain itu, pemicu konflik sosial adalah ketidakjelasan hak antara klaim tradisional masyarakat lokal/adat dengan kawasan yang menjadi domain Negara yang diperuntukkan bagi pengembangan sector perkebunan. Masyarakat lokal di dua desa dalam penelitian ini menganggap bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dikeluarkan pihak Kecamatan telah memiliki kekuatan hukum sedangkan perusahaan perkebunan berpatokan pada sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengantongi HGU.

Dari sisi organisasi, pemerintah bersikap pasif kecuali Kepala Desa Sawit Jaya yang proaktif memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Jalur penyelesaian konflik belum terorganisir dengan baik. Masyarakat yang belum sadar media masih menganggap bahwa media massa perlu dihindari karena khawatir dampak dibalik pemberitaan media massa. Sedangkan dari sisi pengendalian pemerintah desa sebagai mediator dalam upaya resolusi konflik melalui pertemuan dengar pendapat di balai desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan PTPN XIII difasilitasi pihak pemerintah. Pada akhir tahun 2000 mencapai klimaks saat terjadi demonstrasi dan pemortalan jalan ketika perusahaan hendak memanen kelapa sawit. "Lebih baik parang jalan duluan daripada berbicara". Itulah semboyan masyarakat suku

dayak Paser.

Keadaan masyarakat yang miskin dan kelaparan telah membuat masyarakat sadar dan bersatu untuk melakukan gerakan dan perlawanan demi kembalinya tanah-tanah mereka yang dulunya mereka miliki. Pilihan mereka hanya dua, yaitu mati tertindas karena kelaparan dan bangun melawan demi kehidupan yang lebih baik. Akibat tuntutan ini terjadilah sengketa lahan negara oleh masyarakat lokal.

Ada 10 desa yang melakukan penuntutan pengembalian lahan kepada pihak PTP yaitu Desa Modang, Desa Lempesu, Desa Peke-sau, Desa Damit, Desa Bekoso, Desa Lolo, Desa Pasir Moyang, Desa Batuah, Desa Pait dan Desa Lombok. Selama setahun dan didapatkan penyelesaian di bulan Oktober 2001, atas permintaan kedua belah pihak, konflik ini dimediasi oleh pemerintah desa setempat.

Mediasi sengketa lahan perkebunan melalui jalur komunikasi diluar pengadilan. Dengan didampingi oleh 2 LSM sebagai “penunjuk jalan”, masyarakat berusaha menyampaikan tuntutan dan aspirasi mereka kepada anggota DPR RI dan Menteri Perkebunan.

Setelah melewati 12 kali perundingan, mediasi ini berhasil mencapai kesepakatan penting. Tetapi perlu dicatat bahwa pascasengketa lahan antara PTPN XIII dengan masyarakat lokal yang dimediasi oleh pemerintah desa, masyarakat mendapatkan kembali lahan dan diberikan kebun plasma sesuai janji PTP. Tetapi pemberian lahan plasma tersebut berada di lahan daerah atau desa lain yaitu di Kecamatan Paser Balengkong di ibukota kabupaten yaitu Tanah Grogot. Penyerahan kebun plasma sebesar 2000 Ha pada 5 Oktober 2001 dibagikan untuk 10 desa yang melakukan penuntutan.

Penyerahan lahan plasma dikoordinir oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih paham akan kondisi masyarakat. Tetapi belakangan diketahui bahwa pembagian lahan plasma ternyata ternyata tidak *fair* akibatnya timbul konflik horizontal antardesa yang memperebutkan lahan. Desa Lombok dan Desa Sawit Jaya tidak mendapatkan lahan seperti yang dijanjikan oleh pihak PTPN XIII.

Berikut disajikan tabel berkaitan resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Long Ikis:



Tabel 2. Resolusi Konflik Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser

No	Faktor Pemicu	Akibat
1.	Orientasi kebijakan	Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi
2.	Sifat	Kapitalis
3.	Strategi	Pengambilan tanah rakyat dan pembangunan industri tanpa penataan struktur yang baik
4.	Intervensi	Diupayakan dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, melibatkan militer, dan pemberian HGU.
5.	Konflik yang terjadi	Antara rakyat dengan pemilik modal dan Negara atau pemilik modal yang didukung Negara. Antarsesama masyarakat.
6.	Prinsip	Tanah untuk pertumbuhan ekonomi.
7.	Resolusi	Pembangunan kebun plasma kepada petani oleh PTPN XIII/pindah lokasi

Sumber: olahan peneliti

Resolusi yang diimplementasikan pada saat konflik terjadi belum terinternalisasi dengan baik oleh pihak pemerintah maupun perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada potensi konflik di wilayah tersebut berkaitan dengan peremajaan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta PT Indomas. Perusahaan asal Malaysia ini membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Lombok dengan cara yang sama dilakukan oleh PTPN XIII dulu, penjaluran tanpa salam.

Kesimpulan

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan resolusi konflik sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Long Ikis adalah, pertama, kurang efektifnya kepemimpinan pro aktif serta manajemen komunikasi konflik yang buruk. Peran pemerintah bisa dikatakan setengah nihil dalam penyelesaian kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit sehingga tidak ditemukan pola komunikasi yang jelas berkaitan penyelesaian sengketa lahan.

Kedua, pemerintah belum mempunyai sumber daya yang memadai serta mekanisme yang baik dan relevan dengan kondisi keki-

nian dalam penyelesaian konflik sengketa lahan yang terjadi.

Ketiga, pengalaman konflik atau situasi pasca konflik tidak dijadikan pembelajaran dan pengalaman dalam rangka mencegah konflik sosial yang berpotensi menjadi bencana sosial melalui komunikasi efektif dan pendekatan Human Relations.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diperlukan guna mencegah bencana sosial:

1. Maksimalisasi peraturan yang sudah ada dan memperbaiki kinerja dan koordinasi aparat dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik atau konflik.
2. Memberdayakan penguatan kohesi sosial masyarakat melalui kegiatan seni, budaya dan olahraga.
3. Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi pengembangan media komunitas serta menjalin hubungan baik dengan pers.
4. Pengadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat. §

Daftar Pustaka

- Alwi, Afrizan. (2006). Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan: Studi Kasus di Sumatera Utara. Medan: Cahaya Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aspikom. (2011). *Komunikasi Bencana*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Bachriadi, Dianto. (1999). *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Petani di Indonesia (Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an)*. Yogyakarta: LP3ES.
- Denzin, N.K. & Yvonna S.L. (2000). *Handbook of Qualitative Research. 2nd Edition*. London: Sage Publication.
- Eduard dan Colin MacAndrews. (1978). *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Madja University Press.
- Effendy, Onong U. (1981). *Komunikasi dan Modernisasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Effendy, Onong U. (1984). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Remaja Karya.



- Emery, Edwin.(1968). *Introduction to Mass Communications. Second Edition*. New York: Toronto.
- Gerungan, W.A. (1988). Psikologi Sosial. Bandung: Penerbit P.T. Eresco.
- Hadi, Sutrisno. (1980). Metodologi Research. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Sosial UGM.
- Kalo, Syafruddin. (2005). Kapita Selekta Hukum Pertanahan di Sumatera Timur. Medan: USU Press.
- Kreitner R. (1989). Manajemen 4th Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Kriesberg, L. (1998). *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*. New Jersey. Prentice Hall.
- Kriyantono, Rachmat. (2009). Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lestari, Puji. (2007). Manajemen Komunikasi Bencana di Daerah Rawan Bencana. Jurnal Ilmu Komunikasi Terakreditasi UPN “Veteran”. Yogyakarta. Volume 5 Nomor 3, September-Desember.
- Littlejohn, Stephen W. (2002). *Theories of Human Communication*. New Mexico: Wadsworth.
- Muhajir, H.Noeng. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. (1996). Komunikasi Antar Budaya. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimo, Dan.(1993). Komunikasi Politik.Bandung. Penerbit PT Rosdakarya.
- Robbins, S.P. (1994). *Essential of Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Ritzer, G. dan Goodman, DJ. (2003). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana.
- Ruslan, Rosady. (1997). Kampanye Public Relations. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. (2006). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Edi dan Mite Setiansah. (2010). Teori Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sardjono, Mustofa Agung. (2004). Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik, dan Kelestarian Sumberdaya. Yogyakarta: Debut Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). (1995). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3S.
- Suprpto, Tommy. (2009). Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi. Jakarta: MedPress.
- Susanto, Astrid. (1988). Komunikasi Sosial di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Swasta DH, Basu. (1996). Asas-asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Terry, R. George, Alih Bahasa Winardi, (2006). Asas-asas Manajemen. Bandung: Penerbit Alumni.



- Venus, Antar. (2005). *Transactional Analysis Theory* dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi. Vol. 4. No. 1. April.
- West, Richard and Lynn H. Turner. (2007). *Introducing Communication Theory*. New York: Mc Graw Hill Companies.
- Yin, Robert K. (2002). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Edisi Revisi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ilmiah:

- Jurnal. Analisis Sosial. Vol. 6 No. 2. Juli 2001. Juni Thamrin. Gagasan dalam Pengelolaan Sumber Daya Agraria Yang Partisipatif dan Berkelanjutan. Akatika. Bandung. Hal. 112
- Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember 2004
- Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana. Vol. I No.2. 2010. Hal. 30-38. Tukino, Diana Harding. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempererat Kekerabatan Sosial Dalam Mendukung Integrasi Masyarakat.
- Jurnal Komunikasi dan Informasi. September 2002. Fisip Universitas Padjajaran. Bandung.

Sumber Internet:

- <http://www.beritalingkungan.com/berita/2011-10/perusahaan-sawit-picu-konflik-lahan-di-muara-tae/>, diakses tanggal 6 November 2011.
- walhikaltim.org/index.php?option=com_content, diakses tanggal 7 November 2011.
- <http://perkebunan.kaltimprov.go.id/komoditi-3-kelapa-sawit.html>, diakses 09 Nopember 2011



PERANAN *PELA-GANDONG* DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI AMBON MALUKU

*Enos Rudy Jovan
Tomasila*

Konflik sosial di Ambon, Maluku beberapa tahun silam ternyata masih meninggalkan bekas. Belum lama ini, tepatnya pada 11 September 2011, konflik serupa kembali terjadi dipicu isu perbedaan agama dan sikap kecurigaan. Hal ini menunjukkan bahwa suku dan agama merupakan kekayaan sekaligus potensi kerentanan konflik.

Menariknya terdapat tradisi dan kearifan lokal *Pela-Gandong* yang mampu merekatkan berbagai sekat dan perbedaan agama. Sebagai warisan leluhur sempat teruji saat konflik tahun 1999 hingga 2004. *Pela* dan *Gandong* telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dilestarikan masyarakat Ambon-Lease hingga saat ini.

Namun dalam penyelesaian konflik tahun 1999, nampaknya nilai budaya lokal ini kurang dimanfaatkan dan diberdayakan pemerintah. Segalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah nampaknya kurang berhasil dalam memulihkan kondisi saat konflik. Hingga akhirnya budaya dan kearifan lokal *pela* dan *gandong*-lah yang mengembalikan kesadaran masyarakat Ambon-Lease dalam proses rekonsiliasi konflik demi membawa kedamaian di bumi Maluku.

Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan.

Pendahuluan

Konflik sosial di Ambon berlangsung sejak Januari 1999, dan dikenal sebagai peristiwa Ambon berdarah. Menurut data *International Crisis Group*, konflik sosial di Ambon menewaskan sekitar 5000 – 10.000 jiwa, 70.000 orang mengungsi dan dikategorikan sebagai salah satu konflik terbesar yang melibatkan dua kelompok agama di Indonesia, Islam dan Kristen.

Konflik itu dilatar belakangi perkelahian dua pemuda dari dua kelompok agama tersebut, yakni Nursalim dari kampung Batu Merah (Kampung Muslim) dan Yopy dari Mardika (Kampung Kristen) yang akhirnya menjadi konflik dengan membawa Agama. Satu hal yang perlu diketahui bahwa perkelahian pemuda di Ambon merupakan hal yang telah biasa terjadi. Konflik sendiri terjadi bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Fitri 19 Januari 1999.

Hingga saat ini terdapat dua versi pendapat yang menjelaskan tentang perkelahian di antara Nursalim dan Yopy (Fatwa, 2007: 84-85). Versi pertama, versi tim pengacara Gereja dan diyakini kebenarannya oleh umat Kristen. Versi kedua, versi tim pencari fakta muslim Ambon yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam. Masing-masing pihak percaya bahwa versinya yang benar. Kedua versi tersebut tidaklah diragukan oleh mereka, namun ketika *The Human Right Watch* mengkonfirmasi ke polisi, muncul berita lain bahwa para pemicu itu bukan dari Batumerah dan bukan pula dari Mardika akan tetapi *preman-preman* Ambon Jakarta yang sengaja dipulangkan dan dimobilisasi untuk menyulut kerusuhan di Ambon (Hilmy, 2004: 72).

Kesengajaan itu mengandung arti bahwa ada pihak di luar masyarakat Ambon yang telah merencanakan kerusuhan tersebut dengan matangnya dan mereka berhasil memicu konflik. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian masyarakat yang mengaku melihat orang-orang dengan wajah baru atau asing yang tergabung dalam pergerakan massa di awal kerusuhan. Contoh ini membenarkan argumen Smelser, bahwa adanya faktor pemercepat atau pemicu suatu peristiwa dramatis atau desas-desus mempercepat munculnya perilaku kekerasan kolektif (Depag, 2003: 112-113). Bahkan hasil investigasi Kontras pada konflik 1999-2002, jelas menemukan in-



dikasi keterlibatan anggota-anggota TNI dan Polri di setiap ranting dalam konflik (www.detiknews.com, 9 September 2011).

Dari permulaan inilah, terjadi konflik yang akhirnya menyebar ke semua wilayah secara serentak. Terjadinya mobilisasi massa karena provokasi dari pihak tertentu yang menyebarkan isu-isu berbeda diantara kedua kelompok. Di antara kelompok Kristen terdengar isu bahwa Gereja Pusat Maranatha akan diserang, dan sebaliknya di kelompok Muslim terdengar kabar bahwa Masjid Jami' Al-Fatah akan diserang. Namun kenyataannya isu tersebut tidak benar. Isu-isu inilah yang kemudian membuat kedua kelompok tersebut menjadi panas. Masing-masing kelompok bergerak hanya untuk mempertahankan rumah ibadah maupun kampung mereka.

Situasi menjadi semakin tak terkendali ketika terlihat mobilisasi massa yang cukup besar dan terorganisir dengan baik mulai melakukan aksi aksi anarkis dan menyerukan isu-isu sara yang menyebabkan masyarakat panik dan terpecah. Awalnya masyarakat hanya tahu bahwa ini adalah konflik biasa yang mampu diselesaikan. Sebelum pecahnya kerusuhan 19 januari, telah terjadi beberapa kerusuhan kecil di beberapa kampung yang tidak berkepanjangan, yakni di Kampung Waillete, dan Kampung Bak Air (Tualeka, 2010: 92). Beberapa hari setelah 19 Januari barulah tersebar isu dan masyarakat sadar bahwa ini adalah konflik kelompok dengan isu agama.

Hal ini semakin diperkuat dengan tayangan resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengusung tema persahabatan antara Acang (Anak Islam) dan Obet (Anak Kristen) yang bersahabat dan menginginkan perdamaian. Pesan ini disiarkan melalui TVRI Stasiun Maluku. Sekilas cuplikan iklan ini sangat menyentuh masyarakat Ambon yang bertikai, karena pesan-pesan didalamnya mengangkat isu-isu kekeluargaan dan kekerabatan *Pela-Gandong*. Pesan iklan tersebut menyerukan perdamaian dan keinginan untuk kembali hidup berdampingan seperti dahulu, akhirnya konflik tampaknya reda untuk beberapa saat.

Namun lagi-lagi masyarakat Ambon-Lease sangat mudah diprovokasi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Konflik pun berkobar kembali. Aksi anarkis, bakar membakar yang diikuti dengan pembantaian terhadap orang yang berbeda agama pun ter-

jadi. Baik kaum Muslim maupun Kristen yang saat itu terprovokasi saling membantai siapapun yang berbeda agama. Semua dilakukan tanpa melihat adanya perasaan kekerabatan dan kekeluargaan yang telah dirintis leluhur dalam ikrar *Pela-Gandong*. Saat itu, seolah hubungan *Pela-Gandong* yang ada selama ratusan tahun seakan sirna kehilangan kekuatannya.

Penanganan Konflik dengan Pendekatan Budaya *Pela-Gandong*

Kerusuhan Ambon-Lease dan Maluku pada umumnya berpusat di Kota Ambon. Hal ini dapat dibagi dalam beberapa babakan sampai hingga situasi dinyatakan benar kondusif yakni pada tahun 2004. Sebelumnya dari tahun 1999, kerusuhan yang terjadi ibarat arang dalam sekam kadang padam dan akan menyala ketika tertiuip angin (Tempo Interaktif, 29 April 2001). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku, khususnya Ambon–Lease adalah orang-orang yang sangat mudah diprovokasi.

Selama kerusuhan terjadi pemerintah berusaha menyelesaikan dengan cara yang radikal hingga moderat. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden hanya dapat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri permasalahan ini. Dalam pertemuan dengan tokoh agama, adat dan pemuda, Gus Dur mengatakan, ”kerusuhan Ambon hanya dapat diselesaikan oleh orang Ambon sendiri. Pemerintah pusat hanya akan berperan sebagai pendorong dan membantu” (Tempo Interaktif, 20 Desember 1999).

Keputusan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada masyarakat Ambon sendiri, terbilang tidak banyak direalisasikan. Nyatanya setelah kerusuhan berlangsung lebih setahun dan korban terus berjatuhan setiap harinya. Memang terasa aneh dan terkesan pemerintah melalui aparat penegak seperti TNI dan Polri tidak serius dalam penanganan konflik. Mereka malah memperkeruh suasana. Penyelesaian sendiri yang diharapkan Gus Dur juga terkesan mustahil mengingat kedua kelompok bertikai sama-sama berada dalam situasi mental–psikologis yang tidak stabil, sehingga membutuhkan kehadiran pihak ketiga yakni kelompok-kelompok yang



netral dan serius membantu penyelesaian masalah yang terjadi.

Upaya penanganan dan rekonsiliasi untuk meredakan konflik Ambon-Lease telah dilaksanakan beberapa kali, baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi, DPR, akademisi perguruan tinggi, Komnas HAM, LSM, dan politisi. Namun usaha tersebut belum membuahkan hasil bahkan implementasinya tidak terlalu nyata terlihat dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan tidak sedikit masyarakat menjadi apatis dengan pemerintah. Bahkan banyak masyarakat berpikir bahwa konflik akan berakhir bila salah satu kelompok menyerah ataupun lenyap dari Bumi Maluku.

Dalam kurang lebih sepuluh kali upaya rekonsiliasi, yang dilakukan menghadirkan perwakilan dari kedua belah pihak yang bertikai, yakni anak-anak negeri Ambon-Lease dari kedua kelompok. Dalam pertemuan tersebut, mereka sadar bahwa resolusi-resolusi yang melibatkan mereka belum sepenuhnya menyentuh cara-cara damai yang agamis, adatis, dan berbasis budaya lokal. Di sini belum tampak adanya upaya memasukkan *Pela-Gandong* sebagai referensi dalam perdamaian di tanah kelahirannya sendiri, karena masih terdapat adanya kendala-kendala yang telah terbangun secara sistematis sejak lama, baik secara eksternal maupun internal.

Pola penyelesaian konflik perspektif masyarakat Ambon-Lease yang telah tercatat sejak lama adalah *pela-gandong*. Cara seperti ini telah memiliki akar dan dilaksanakan masyarakat Ambon sejak ratusan tahun silam, diawali para leluhur dan kemudian secara turun-temurun berlaku sampai sekarang. Dilestarikan dengan upacara panas *Pela* tiga atau lima tahun sekali. Kehadiran dan perkembangan Sistem *Pela-Gandong* telah teruji ketika mengalami gelombang dinamika kehidupan sosial yang kental dengan perubahan. Realitas sejarah menunjukkan bahwa Sistem *Pela-Gandong* mampu mendaikkan problematika kehidupan masyarakat Maluku sejak ratusan tahun silam.

Menurut S.H. Maelissa, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Maluku, dalam makalahnya “*Pela* dan *Gandong* sebagai Bentuk Kearifan Lokal di Maluku”, sistem budaya *Pela-Gandong* merupakan ikatan persahabatan dan persaudaraan yang diaktualisasikan dalam sapaan kekerabatan, seperti *Nyong Pela*, *Nona*

Pela, *Gandongee*, *Bongsoee*, maupun aktivitas tolong-menolong dalam keadaan aman serta kesusahan (Warisan, Oktober 2011).

Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masyarakat Ambon terbagi berdasarkan agama, namun *Pela-Gandong*, sebagai sebuah aliansi unik untuk menjaga hubungan persaudaraan antara Kampung Kristen dan Kampung Muslim sebagai sistem resolusi konflik. Dan ini menjadi sebuah mekanisme tersendiri dalam mempertahankan identitas sebagai masyarakat Ambon untuk mencari solusi secara damai. Disamping itu menurut Prof. DR. M.G. Ohorella, SH dalam makalah “Modifikasi Bentuk-Isi – Fungsi *Pela* dan *Gandong* Menuju Abad Modern” menyatakan bahwa *Pela-Gandong* memiliki kelebihan dalam menciptakan keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan antar ummat beragama (Islam-Kristen di Maluku) baik di daerah Maluku maupun di luar daerah Maluku.

Oleh karena itu dalam upaya menyelesaikan konflik di Ambon, terdapat nilai lokal yang bisa menjembatani penyelesaian konflik. Melalui perjanjian Malino misalnya, perdamaian kedua kelompok masyarakat lebih bermuara kepada kesadaran adanya ikatan budaya dan agama. Nilai-nilai yang berakar dari tradisi budaya, agama dan kepercayaan masyarakat. Penggunaan budaya *Pela-Gandong* ini bahkan dikatakan oleh Prof. Dr. J.E. Lokollo, SH, sebagai sebuah keharusan. Hal ini dikatakan dalam makalahnya “Modifikasi Bentuk – Isi – Fungsi *Pela* dan *Gandong* dalam Kerangka Sistem Pengendalian Sosial”.

Menurut Pimpinan Pusat Pelajar Muhammadiyah Jakarta Sedek Bahta, *Pela-Gandong* sangat berperan dalam penyelesaian konflik di Ambon. Sedek yang asli Ambon ini menyatakan, *Pela-Gandong* adalah sebuah perkumpulan yang tidak memandang latar belakang agama. Menurutnya, saat terjadi kerusuhan beberapa hari lalu, keberadaan *Pela-Gandong* sangat berperan dalam meredam meluasnya bentrokan. Dia menjelaskan, orang-orang *Pela-Gandong* saling berhubungan untuk membantu meredam kerusuhan. ”Pada saat terjadi kerusuhan itu pun, orang-orang *Pela-Gandong* ini saling SMS, berhubungan untuk membantu menenangkan kelompoknya masing-masing. Peranan mereka besar dalam menenangkan massa agar tidak terprovokasi (Pelita Online, Kamis, 15/9).



Eksistensi *Pela-Gandong* dalam Memelihara Perdamaian

Pela merupakan suatu relasi perjanjian antara satu negeri dengan negeri lain baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan berlainan pulau, juga antara etnis dan agama yang berbeda. Hubungan *Pela* ini mempunyai efek yang sangat penting dimana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

Pela merupakan hubungan yang terjalin antara dua kampung dalam menjaga toleransi bersama baik antara Kampung Muslim dengan Muslim, Kampung Kristen dengan Kristen maupun Kristen dengan Muslim. Untuk mempertahankan budaya ini biasanya diadakan upacara panas *pela* tiga atau lima tahun sekali, atau bergantung kesiapan desa dan negeri yang ber-*pela*.

Pela-Gandong sendiri pernah menjadi referensi dalam pembahasan tentang toleransi kehidupan beragama di dunia (Tualeka, 2004 : 65). Dengan melaksanakan adat *Pela-Gandong*, maka kurang lebih lima abad Ambon Lease tidak pernah tergoncang konflik hebat, sekalipun memiliki potensi konflik yang besar. Ketika cara-cara damai menurut berbagai versi tak juga mampu mendamaikan, maka yang dinanti adalah kehadiran *Pela-Gandong*. Adat tersebut dapat tetap eksis dalam penyelesaian konflik, meskipun terhimpit perkembangan modernitas.

Penggunaan kearifan lokal dianggap efektif sebab suatu budaya yang berlaku di dalam masyarakat secara otomatis telah terinternalisasi dalam kehidupan nyata masyarakatnya, sehingga terdapat ikatan moral dan sosial antara penganutnya. Bila dunia saja ingin mempelajari *Pela-Gandong* sebagai referensi dalam menjalin hubungan antara agama, maka sangat jelas bahwa *Pela-Gandong* ini merupakan resolusi konflik yang baik dalam penanganan konflik Ambon-Lease.

Pela-Gandong pernah jatuh bangun dalam himpitan modernitas sosial politik, ekonomi dan agama. Salah satunya adalah dengan implementasi peraturan pemerintah, termasuk PP No. 5 Tahun 1975 yang secara nyata, menghapus sistem pemerintahan raja dan *latu pati* dengan kepala desa. Padahal, sesungguhnya sistem pemerintahan itu merupakan kesatuan dalam sistem kekerabatan *Pela-Gandong* se-

bagai faktor eksternal, dari luar anak-anak negeri Ambon-Lease. Secara internal, dalam perjalanannya *Pela-Gandong* pernah mendapat gangguan berat justru dari anak-anak negeri Ambon-Lease sendiri karena dianggap menghalangi jalannya ekspansi agama yang diamanatkan kepada mereka.

Di sini kita bisa melihat bahwa, di satu sisi tradisi *Pela-Gandong* dapat memelihara kegerejaan ratusan tahun lamanya, namun di sisi lain *Pela-Gandong* pulalah yang tidak memungkinkan berkembangnya kegerejaan. Menurut orang Kristen, atau sebagian mereka, secara sosiologis psikologis adat *Pela-Gandong* dianggap sebagai sesuatu yang menghambat jalan dan lancarnya kristenisasi di Ambon-Lease dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan tradisi *Pela-Gandong* yang masih menggunakan kepercayaan kepercayaan leluhur. Ada juga pihak muslim yang menganggap sistem *Pela-Gandong* bukanlah produk Nabi dan Allah SWT, sehingga dianggapnya suatu *bid'ah* dan harus dihindari. Hal hal inilah yang kemudian membuat eksistensi *Pela-Gandong* sedikit menurun di kalangan generasi muda Maluku.

Berbagai informasi di lapangan melahirkan optimisme bahwa sistem *Pela-Gandong* saat ini masih berperan penting, terutama di daerah Maluku Tengah. Karena rasa persatuan dan identitas bersama disadari dan dihayati dengan kuat dalam upacara-upacara pembaharuan *pela* (melalui upacara *panas pela*) yang masih sering berlangsung. Sejak perang Dunia II, sejumlah *pela* baru diadakan dengan sadar untuk menguatkan hubungan antara dua golongan itu.

Dapat dikatakan bahwa berkat Sistem *Pela-Gandong* itu, pertentangan antara muslim dan umat Kristen yang terjadi pada tahun 1998-2002 dapat diredam. Berkat *Pela-Gandong* tak sedikit calon-calon korban yang terdapat dalam daftar orang akan dibunuh akhirnya selamat dari rencana-rencana jahat karena lebih dahulu mendapat informasi sebelum kejadian datang menimpanya. Itulah beberapa peranan *Pela-Gandong* sebelum terjadinya Tragedi Idul Fitri Berdarah di Ambon-Lease tanggal 19 Januari 1999.

Pada saat konflik terjadi, *Pela-Gandong* tetap berfungsi dan efektif, sehingga sekat-sekat perbedaan agama tidak sampai menembusnya. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada perang antara dua



bangsa yang memiliki hubungan *Pela-Gandong* di saat konflik Ambon-Lease terjadi pada tahun 1999-2002. Seandainya perekat itu tidak ada, atau tidak berfungsi sama sekali, maka sudah tentu tensi konflik akan lebih dahsyat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kisah korban yang selamat dari kerusuhan. Mereka menceritakan bahwa mereka diselamatkan oleh kampung tetangga yang ber-*pela* dengan mereka. Bahkan jauh hari sejak konflik terjadi mereka telah saling memperingatkan agar berjaga-jaga.

Beberapa contoh nyata peranan *Pela-Gandong* seperti yang dilakukam oleh Raja Tulehu, Liang, Suli, Passo dan Batu merah saat konflik 11 September 2011. Saat itu mereka mengimbau masyarakat masing-masing agar tidak terprovokasi. Bahkan mereka saling mengingatkan lewat telepon agar setiap desa tetap membuka akses seperti biasa (Forum Keadilan. 19 september 2011). Desa Liang dan Waai adalah dua desa yang ber-*pela* begitu pula dengan Passo dan Batu Merah. Hal itu menunjukkan bahwa meskipun potensi konflik selalu ada, namun *Pela-Gandong* selalu menjadi solusi dalam meredakan bahkan menangani konflik tersebut.

Contoh lainnya, kita bisa melihat kisah dari model penyelesaian konflik melallui jalur adat lokal yaitu perbedaan antara Desa Passo (Komunitas Kristen) dan Batu Merah (Komunitas Islam) di Ambon. Dengan semangat dan kesadaran yang tinggi masyarakat kedua desa telah bergotong-royong secara adat memperbaiki rumah ibadah masjid dan gereja yang rusak, sedangkan peresmiannya telah dikukuhkan secara adat pula pada 4 September 2002 lalu. Peristiwa itu merupakan usaha awal perdamaian yang menyeluruh tidak muncul begitu saja tanpa persiapan yang matang, ulet dan pantang menyerah dari berbagai pihak terkait.

Setelah upacara adat di atas tanpa diperkirakan sebelumnya muncullah reaksi spontan dari raja-raja pulau Ambon yang mewakili komunitas Islam dan Kristen serta rektor dan staf Universitas Pattimura yang memutuskan untuk membentuk Forum Diskusi AntarRaja Pulau Ambon dan *Latupati* (Saparua, Haruku, dan Nusa Laut) dalam rangka penyelesaian masalah konflik Maluku secara adat. Reaksi positif berikutnya terjadi lagi pada Sabtu, 7 September 2002 dimana para Raja dari Galala, Halong, Latta, Lateri, dan

Hatiwe Keci bersama komunitas warganya sekitar seratus orang mengunjungi Desa Hitu Meseng (Komunitas Islam, dari kelima negeri Kristen di atas) untuk tujuan silaturahmi (Sinar Harapan, September 2002).

Di luar itu banyak pengamat dan akademisi yang juga putra daerah yang merasa penting *Pela-Gandong* dalam penanganan konflik di Ambon-Lease dan Maluku. Salah satunya adalah Aziz Tuny yang mengemukakan hasil penelitian dan optimistismenya terhadap *Pela-Gandong* lantaran semakin hari semakin terbuka ruang perdamaian dan rekonsiliasi (Tuny, 2006:5). Dalam pengamatan Tuny, adanya *Pela-Gandong* ini membuat ruang rekonsiliasi semakin terbuka karena hubungan kekerabatan meskipun berbeda agama. Optimistisme semacam itu juga dimiliki hampir semua anak negeri Maluku yang berdomisili di dalam maupun luar Maluku.

Bahkan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, kagum terhadap keamanan di Ambon-Lease dan Maluku pascakonflik satu dasawarsa silam. Seperti dilansir Jawa Pos, ia mengutus empat anggota Komisi Nasional untuk Kebebasan Beragama Amerika Serikat yang dipimpin oleh Michael Cromartie, dengan anggota Scott Flipse, David Dettoni dan David Phelps ke Indonesia. Mereka berkunjung ke Ambon tanggal 18 Mei 2010. Menurut tim tersebut, informasi yang diperoleh akan mereka sampaikan sebagai masukan kepada Kongres Amerika Serikat dan Gedung Putih, dengan harapan penanganan konflik dan kekerasan di Ambon-Lease bisa dijadikan model dalam penanganan konflik dan kekerasan di beberapa negara yang masih bertikai (Jawa Pos, 19 Mei 2010).

Dari sini kita dapat melihat bahwa memang benar perdamaian atau penanganan konflik dengan menggunakan pendekatan kultural cukup efektif. Penggunaan budaya setempat akan sangat menunjang tercapainya sebuah rekonsiliasi yang diharapkan, karena budaya merupakan sesuatu hal yang dihormati oleh masyarakat timur. Khususnya budaya *Pela-Gandong* masih memiliki kekuatan bagi masyarakat Ambon-Lease. Di samping itu penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya ini juga telah terbukti efektif. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dan aturan tersebut telah terinternalisasi dalam masyarakat. Sehingga penghargaan dan penerimaan terhadap sebuah



keputusan akan lebih lama bertahan, karena konteks sosial budaya yang menjadi latar keputusan, merupakan representasi dari masyarakat tersebut.

Pendekatan budaya memang menjadi solusi utama bagi penyelesaian konflik sosial, sebab budaya bersifat aktual dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Seperti dikatakan Sultan Hamengku Buwono X, “Ketika kita jenuh menjalani hidup, jalan yang bijak adalah menyelam ke danau kebudayaan. Pendekatan kultural sesungguhnya adalah mediasi kemanusiaan yang bersumber hati nurani guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan” (Kompas, Kamis 25/ 2).

Saat ini budaya *Pela-Gandong* orang Maluku mulai digunakan pemerintah sebagai cara mengembangkan kebersamaan di antara masyarakat Maluku yang berbeda agama, ras, dan suku. Kebersamaan yang ada diharapkan menjadi pendorong kedamaian, ketentraman, dan keamanan Maluku. Tetapi semua itu bukan hanya tugas pemerintah semata, sebagai warga masyarakat Maluku kita juga harus berusaha dengan cara saling menghargai dan bertoleransi antara umat beragama, suku, dan di mana masyarakat Maluku sendiri memiliki banyak keragaman di antara masyarakat.

Pela-Gandong di Maluku dapat dijadikan salah satu contoh nyata penanganan konflik berbasis kearifan lokal di Indonesia. Kearifan lokal sangat tepat digunakan di tengah kondisi sosiokultural bangsa Indonesia yang pluralistik. Selain itu kearifan lokal sudah membudaya dalam masyarakat, dan mengakar melalui proses dialektis yang panjang, baik melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Dengan demikian, pelaksanaan kearifan lokal akan lebih mudah dan cepat diterima masyarakat.

Dengan menggunakan budaya lokal maka, masyarakat setempat dapat diberdayakan dan diikuti sertakan dalam penanganan konflik yang terjadi. Masyarakat juga selain mengetahui langkah dan peran serta pemerintah, mereka juga dapat ikut dalam menciptakan proses rekonsiliasi dalam konflik yang ada. Di sisi lain penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal juga ikut memperkaya budaya bangsa.



Penutup

Konflik merupakan hal yang tak dapat dihindari dalam interaksi berbangsa dan bernegara. Namun melalui konflik, kita dapat belajar tentang bagaimana memahami sebuah interaksi dalam komunikasi dengan lebih baik lagi, khususnya dalam keberagaman suku, budaya, maupun agama. Segala perbedaan ini memiliki potensi besar terhadap munculnya konflik. Namun bila dengan diagnosa dan penanganan tepat maka bukanlah hal yang mustahil konflik besar dapat terselesaikan.

Seperti halnya konflik di Ambon, Maluku. Dengan beragam cara dan pendekatan akhirnya ditemukan pendekatan tepat yakni budaya yang dibingkai hubungan *Pela-Gandong*. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, sebenarnya masyarakat telah diberdayakan dan dilibatkan dalam proses rekonsiliasi. Dimana inisiatif penuh berasal dari masyarakat bawah (akar rumput) yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan rekayasa tangan-tangan kotor yang merusak keharmonisan persaudaraan lintas agama, suku, ras antar golongan selama ini.

Harapan kita semua, budaya *Pela-Gandong* yang merupakan bingkai pemersatu orang-orang Maluku lebih diperhatikan dan dilestarikan. Sebab budaya *Pela-Gandong* bisa menjadi sebuah acuan atau referensi bagi daerah lain bahkan dunia agar melihat kekuatan budaya dalam menciptakan perdamaian. Agar Maluku bisa menjadi daerah yang penuh dengan kedamaian walaupun banyak sekali terdapat perbedaan yang bisa menjadi potensi konflik. §

Daftar Pustaka

- Achmad, Nur (2001), *Pluralitas Agama, Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Kompas.
- Kastor, Rustam (2000), *Suara Maluku Membantah*, Rustam Kastor Menjawab. Yogyakarta: Wihdah Press.
- Tualeka Zn, Hamzah (2004), *Penyebaran dan Perkembangan Kristen di Ambon-Lease*. Surabaya: Alpha.
- Centre for humanitarian dialogue (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jakarta : LIPI
- Tualeka Zn, Hamzah, (2010), *Ringkasan Disertasi; Konflik dan Integrasi sosial bernuansa agama (Studi tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon- Lease dalam Perspektif Masyarakat)*. Surabaya, IAIN Su-



nan Ampel.

- Depag.(2003), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Departamen Agama RI.
- Fatwa, Achmad Fajruddin. (2007), *Jembatan Hukum Islam Menyikapi Kekerasan Atas Nama Agama*. Qualita Ahsana. Volume IX, Nomor 1: 77-92 .
- Hilmy, Masdar at al. (2004), *Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama Etnik PascaOrde Baru*. Surabaya: Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel.
- Lokollo, J.E, (1997). *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

Sumber Internet :

- Sarlito wirawan Sarwono. Kearifan local. Diakses dari :<http://www.malukueyes.com/legend/culture-a-tradition/1340-kearifan-lokal> (10 juli 2011)
- Indonesia, *The violence in Ambon*. Diakses dari :[http://www.neevia.com\(Maret1999](http://www.neevia.com(Maret1999)
- Redaksi Antaranews. Com. Jusuf Kalla – Pela dan Gandong harus di tingkatkan. Diakses dari :<http://ambon.antaranews.com/print/16537/jusuf-kalla-pela-gandong-harus-ditingkatkan>
- DR. Abidin Wakano, M.Ag. Identitas Kultural dalam Konteks Maluku. Diakses dari :[http://www.radarambon.co/readopini-20120307090918-identitas-kultural-dalam-konteks-maluku-opini\(2](http://www.radarambon.co/readopini-20120307090918-identitas-kultural-dalam-konteks-maluku-opini(2) juni 2012)
- Darman Tanjung. Merajut kembali *pela gandong* di tanah Maluku. Diakses dari :<http://www.forumkeadilan.com/nasional.php?tid=281> (25 September 2011)
- Balitbang Kementrian pertahanan RI. Penanggulangan Konflik Maluku. Diakses dari :<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/penanggulangan-konflik-maluku> (30 juni 2011)
- Redaksi koran siwalima online. Persatuan pemuda Pela Gandong gelar aksi damai. Diakses dari: [http://www.siwalimanews.com/post/persatuan_pemuda_pela_gandong_gelar_deklarasi_damai\(29](http://www.siwalimanews.com/post/persatuan_pemuda_pela_gandong_gelar_deklarasi_damai(29) november 2011)
- Salmony, Rooy John. Kerusuhan Ambon sebagai Konflik Sosial. Diakses dari:<http://www.suaramerdeka.com/harian/9908/11/kha2.htm> (10Agustus2009)
- Tunny, Aziz. Nadi Toleransi di Lumbung Konflik, Pela-Gandong Salam-Sarane, Diakses dari: <http://www.geocities.com/lokkie2005/rvp070306.htm> (5 Maret 2006)
- Hatib Abdul Khadir. Filsafat Lokal Patasiwa dan Siwalima dalam masyarakat Maluku. Diakses dari :<http://etnohistori.org/filsafat-lokal-patasiwa-dan-siwalima-dalam-masyarakat-maluku-bagian-1> hatib-ak.html (28 januari 2012)
- Tim Pengacara Gereja. Himbauan Tim Pengacara Gereja. Diakses dari

- :<http://www.fica.org/hr/ambon/idHimbauan.html>
- Sudiarto. Pengelolahan konflik sosial di Poso, Maluku, dan Papua. Diakses dari :http://interseksi.org/blog/files/konflik_maluku.php (23 agustus 2011)
- Redaksi Kompas. Jusuf Kalla bicara solusi konflik di KompasTV. Diakses dari :<http://filsafat.kompasiana.com/2011/10/28/jk-bicara-solusi-konflik-di-kompas-tv/> (OKTOBER 2011)
- Kronologi konflik di Maluku. Tempo Interaktif.com 29 april 2004.
- Alex Dinuth. Penyelesaian konflik Ambon dengan pendekatan budaya akar rumput. Diakses dari :<http://www.oocities.org/soija2002/sinarharapan011002.htm> (30 september 2002)
- Siti Maria. Panas Pela sebagai Perikat hubungan persaudaraan. Diakses dari :<http://www.scribd.com/doc/74144394/4551-1359-PANAS-PELA>
- Antoius Ponco. Tiga Negeri di Ambon menggelar panas Gandong. Diakses dari :<http://regional.kompas.com/read/2011/10/04/16083616/Tiga.Negeri.Ambon.Gelar.Panas.Gandong>





MEDIA DAN KONFLIK

DARI MANIFESTASI SAMPAI TERMINASI KONSTRUKTIF Kasus Konflik Antar Agama

Riris Loisa

Konflik merupakan realitas yang terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Perbedaan kepentingan, nilai dan tujuan senantiasa hadir selama manusia hidup berdampingan. Keberadaan konflik yang selalu muncul di dalam berbagai level kehidupan, merupakan daya tarik tersendiri bagi media. Sayangnya, ketertarikan ini seringkali berupa pemberitaan konflik yang berkembang secara destruktif.

Sebetulnya media punya peran strategis, melampaui kode etik dari sebatas memberitakan konflik secara berimbang. Dalam perspektif fungsionalisme, media merupakan kapasitas untuk mendampingi ketika suatu konflik mulai muncul, mengalami eskalasi dan mencari resolusi, agar konflik bernilai konstruktif bagi masyarakat.

Tulisan ini akan membahas peran media massa di dalam pendampingan terhadap pihak yang berkonflik melalui elaborasi isu dari berbagai sumber yang memungkinkan siklus konflik bergerak secara sistematis kepada alternatif-alternatif resolusi konstruktif. Secara khusus artikel ini akan berfokus pada konflik antar agama, dengan meminjam beberapa konsep dari pemikiran sosiolog Louis Kreisberg.

Kata kunci: peran media, konflik agama, eskalasi dan terminasi konflik konstruktif.

Indonesia: Masyarakat Pluralis, Media, dan Kritik Intoleransi Agama

23 Mei 2012, sidang periodik Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa di Jenewa, menyorot kasus kebebasan agama di negeri ini. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan beberapa perwakilan dari Kepolisian, Kemenag, dan Ditjen Kemenkumham dikritik cukup keras oleh beberapa negara. Tidak hanya negara Barat, melainkan berbagai negara Asia dan Timur Tengah yang menekankan komitmen Indonesia untuk memberikan kebebasan beragama sebagai salah satu hak paling hakiki manusia. Bahkan negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Libanon pun memaparkan pentingnya bagi Indonesia agar menghormati kebebasan beragama¹.

Indonesia yang selama ini menjadi model masyarakat plural dan toleran, sedang dihadapkan pada tantangan dengan terjadinya konflik berkaitan dengan isu intoleransi agama. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini sangat kontradiktif dengan kondisi beberapa tahun ke belakang. Sebagai contoh, pada tanggal 18 Februari 2009, *The New York Times* versi *online* mengutip pernyataan menteri luar negeri AS, Hillary Clinton mengenai keharmonisan agama dan demokrasi di Indonesia. “Jika anda ingin tahu apakah Islam, demokrasi, modernitas dan perempuan serta hak-hak perempuan dapat hidup berdampingan, pergilah ke Indonesia”, demikian kutipan dalam artikel berjudul “Clinton Puji Demokrasi Indonesia” di media tersebut.²

Hanya berselang tiga tahun, pengakuan internasional ini sepertinya tidak lagi relevan, bahkan media yang sama, kini mengangkat isu kemunduran toleransi antar agama di Indonesia, berkaitan dengan penutupan tempat ibadah umat Kristen yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal di beberapa wilayahnya. Media ini bahkan menyerukan penindakan terhadap kelompok ekstrimis serta perlindungan terhadap kelompok minoritas³. Ironi ketika

1 <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/05/321883/284/1/> Wajar-Penilaian-Dewan-HAM-PBB-terkait-Intoleransi-Beragama

2 <http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/no-model-for-muslim-democracy.html>

3 http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/indonesiasrisingreligiousintolerance.html?_r=1



melihat kenyataan bahwa konflik yang terjadi di dalam negeri begitu mendapat perhatian di dalam dunia internasional, sementara di dalam negeri kasus ini sempat nyaris tak terdengar.

Ketika isu ini menjadi perhatian di level internasional, media massa di Indonesia pada saat itu sibuk berpolemik seputar masalah selebritas di dalam industri musik. Selagi konflik agama menjadi perhatian media massa-media massa asing, di Indonesia sendiri media massa lokal terkesan tidak terlalu memberi tempat terhadap kasus ini. Media Indonesia.com, Suara Pembaruan.com dan Liputan 6.TV merupakan segelintir insitusi pemberitaan dalam payung media *mainstream* yang memberitakan kasus tersebut, itupun berupa pemberitaan singkat dalam bingkai kekerasan.

Isu konflik memang memiliki daya tarik tersendiri bagi media. Sa-yangnya, hal ini biasanya hanya sebatas pemberitaan mengenai kekerasan yang terjadi ketika konflik mengalami eskalasi dan bermuatan kekerasan. Padahal, sebagai institusi yang memiliki posisi strategis, media punya kemampuan yang melampaui kode etik sebatas memberitakan konflik secara berimbang (*cover both sides*). Media memiliki kapasitas besar untuk mendampingi ketika suatu konflik mulai muncul ke permukaan, mengalami eskalasi dan mencari resolusi, agar konflik yang terjadi bernilai konstruktif bagi masyarakat.

Tulisan ini membahas peran media massa di dalam pendampingan terhadap pihak yang berkonflik melalui elaborasi isu dari berbagai sumber yang memungkinkan siklus konflik bergerak secara sistematis kepada alternatif-alternatif resolusi konstruktif. Secara khusus artikel ini akan berfokus pada kapasitas media dalam pendampingan konflik pluralisme agama berkaitan dengan penutupan beberapa tempat ibadah agama Kristen, analisis dilakukan dengan meminjam beberapa konsep dalam pemikiran sosiolog Louis Kreisberg.

Konflik Sosial: Manifestasi Keyakinan yang Bertentangan

Konflik sosial terjadi ketika dua kelompok atau lebih yang ada di dalam suatu masyarakat, memanifestasikan keyakinan bahwa mereka memiliki kepentingan yang bertentangan. Konflik umum-

nya dimulai ketika setidaknya salah satu pihak berkeyakinan bahwa kelompok lain dalam tingkatan tertentu menjadi penghalang sekaligus “lawan” bagi pencapaian kepentingan kelompoknya (Kreiserberg, 2007: 2).

Konflik dimanifestasikan melalui berbagai cara, mulai dari persuasi yang elegan, sampai ke tindakan-tindakan anarkis yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat di mana kelompok-kelompok yang bertikai berada. Bagaimana konflik dimanifestasikan, berkembang dan diakhiri, sangatlah bervariasi berdasarkan banyak faktor. Berdasarkan pengalamannya di dalam menangani konflik berbagai negara di seluruh dunia, sosiolog Louis Kreiserberg, mengidentifikasi beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi dinamika suatu konflik sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi: (1) pihak-pihak yang berkonflik; (2) konteks dan (3) cara berkonflik.

Siapa saja pihak yang terlibat di dalam konflik, berkaitan dengan bagaimana anggota kelompok yang berkonflik melihat dirinya sendiri (*self concept*) dan melihat kelompok lain (*the other*); konteks berkaitan dengan karakteristik sistem sosial dimana kelompok berkonflik, dimana dalam sistem sosial lebih luas biasanya ada pihak-pihak lain yang ikut berkepentingan dan ikut berusaha untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi; sedangkan cara berkonflik, bervariasi dari negosiasi sampai peperangan; dari bentuk episode-episode antagonistik jangka pendek sampai perjuangan jangka panjang, tergantung pada derajat penegakan peraturan yang berlaku (Kreiserberg, 2007: 10-19).

Konflik agama berkaitan dengan penutupan gereja di Indonesia, menempatkan Kelompok Muslim radikal dan anggota gereja lokal sebagai pihak-pihak yang bertikai. Di dalam sistem sosial yang lebih luas, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menerima keberadaan empat agama lain dan aliran kepercayaan. Pluralisme agama secara resmi dijamin di dalam Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum dan UUD 1945. Sayangnya negeri ini sedang menghadapi masalah untuk menerapkan ideologinya ke dalam tataran operasional. Untuk itu diperlukan pihak-pihak lain selain pemerintah untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. Saat ini konflik antar agama yang terjadi cen-



derung berbentuk episode-episode antagonistik jangka pendek -seperti penutupan tempat ibadah di beberapa wilayah di Indonesia-, tetapi beberapa di antaranya mulai bergeser ke perjuangan jangka panjang seperti kasus HKBP Filadefia di Bekasi dan GKI Jasmin di Bogor yang berlarut-larut.

Salah satu pihak yang sangat potensial untuk membantu dalam hal cara berkonflik adalah media massa sebagai salah satu subsistem di dalam sistem sosial di mana konflik berlangsung. Memang benar penyelesaian konflik seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi tidak berarti bahwa sub-sub sistem lain, khususnya media massa tidak perlu atau tidak berkepentingan untuk melakukan sesuatu. Meskipun tidak dapat terlepas dari tekanan ekonomi politik internal, media sepatutnya menjalankan fungsinya di tengah-tengah dan untuk kepentingan masyarakat.

**Kekuatan Media dan Pengaruhnya terhadap Konflik:
Perspektif Fungsionalisme dan Arena Pergulatan Makna**

Sejauh mana media massa dapat berperan di dalam suatu konflik sosial masih sering diperdebatkan. Sebagian meyakini bahwa media massa merupakan institusi yang *powerfull*, sementara lainnya mempertanyakan kekuatan media. Contoh konflik di Rwanda tahun 1994 misalnya, memperlihatkan bagaimana media massa khususnya radio justru memegang peran penting, sayangnya media massa di Rwanda justru menggiring eskalasi konflik antar kelompok budaya secara destruktif dan mengerikan⁴. Bagaimanapun, kasus ini membuktikan kepada dunia bahwa media massa merupakan institusi yang *powerfull* terhadap eskalasi konflik secara destruktif.

Di satu sisi media bisa berperan dahsyat secara destruktif, tapi di sisi lain media juga berpotensi untuk menggiring eskalasi konflik secara konstruktif. Pasca peristiwa genosida Rwanda, media massa lokal mengembangkan pesan-pesan dengan konten rekonsiliasi. Penelitian-penelitian yang dilakukan memperlihatkan dampak positif dari pesan-pesan media tersebut terhadap masyarakat Rwanda. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth L. Paluck dari Universitas Harvard pada tahun 2008 misalnya, membuktikan bahwa media se-

4 <http://icswww.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/3041/bratic.pdf>



cara substansial mempengaruhi persepsi pendengar mengenai norma-norma sosial yang direalisasikan melalui perilaku yang terukur, seperti negosiasi aktif, ekspresi terbuka tentang topik-topik sensitif, dan terhadap kerja sama⁵. Pesan-pesan di media massa pada satu sisi dapat berdampak destruktif, sementara di sisi lain berdampak konstruktif, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap media.

Konflik kelompok Kristen dan Katolik di Inggris dan Irlandia, merupakan kasus antar agama yang mengalami kemajuan nyata karena dukungan kampanye media. Setelah bekonflik selama tiga dekade, tokoh-tokoh perdamaian kedua kelompok bersepakat untuk mengupayakan perdamaian melalui kesepakatan “Jumat Agung”. Pada mulanya kesepakatan ini justru mendapat reaksi kebencian di kedua belah pihak. Hal ini berubah, ketika pemerintah Inggris menggunakan jasa agen periklanan McCann Erickson untuk menyusun media campaign, berisikan manfaat kesepakatan damai tersebut. Satu bulan sejak kampanye diluncurkan, 71% dari masing-masing kelompok yang bertikai mendukung kebijakan kesepakatan damai “Jumat Agung” (Ark Survey, 1988)⁶. Meskipun tidak menyelesaikan konflik secara keseluruhan, tetapi kampanye media yang dilakukan memberi pengaruh terhadap resolusi konflik secara konstruktif melalui dukungan terhadap persetujuan perdamaian.

Studi lainnya mengenai dampak positif media terhadap konflik terlihat di dalam penelitian *pre-test* dan *post-test* mengenai efek serial televisi *Sesame Street* versi Israel dan Palestina, “*Rechov Sumsum* atau *Shara’a Simsim*”, yang dirancang khusus dengan muatan pesan-pesan untuk saling menghormati dan saling pengertian antara orang Israel dan Palestina. Hasil penelitian terhadap efektivitas *Sesame Street* versi Israel-Palestina menunjukkan terjadinya penurunan stereotip pada generasi anak-anak yang menonton, terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

Penelitian lain menyimpulkan meningkatnya penggunaan atribut positif oleh masing-masing anggota yang berkonflik terha-

5 https://psych.princeton.edu/~psych/psychology/research/levy_paluck/pubs/2009%20reducing%20intergroup%20prejudice.pdf

6 dalam <http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/3041/bratic.pdf>.



dap orang-orang di luar kelompoknya. Hal ini menunjukkan efektivitas intervensi berbasis media dalam mengkonter stereotip, yang dilakukan dengan cara memperkenalkan kehidupan sehari-hari kelompok budaya satu sama lain melalui media⁷.

Dalam perspektif fungsionalisme, masyarakat ditempatkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub-sub sistem yang saling terkait, dan saling memberi kontribusi, sehingga memungkinkan masyarakat tersebut tertata dan berkelanjutan. Dengan demikian di dalam perspektif ini, kelompok radikal Muslim, anggota komunitas gereja lokal dan institusi-institusi media massa, bersama-sama dengan berbagai macam kelompok atau institusi lainnya merupakan sub-sub sistem yang saling terkait atau tergantung dari masyarakat Indonesia sebagai sistem yang lebih besar.

Dengan demikian agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik, sub-sub sistem ini perlu bekerja sama dan saling memberi kontribusi, khususnya ketika satu atau beberapa subsistem tidak berfungsi dengan baik, sub-sub sistem yang lain justru bekerja lebih keras untuk menunjang *equilibrium* sistem secara keseluruhan. Jika tidak, sistem sosial secara keseluruhan cepat atau lambat akan terganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih serius bagi keseluruhan sistem sosial.

Masih di dalam perspektif fungsionalisme, media dipandang sebagai suatu sub-sistem yang menjalankan beberapa fungsi khusus, antara lain: (1) fungsi informasi; (2) fungsi korelasi, dan (3) fungsi mobilisasi (McQuail, 2005 : 97-98). Dalam menjalankan fungsi informasi, media massa dikatakan berfungsi dengan baik jika menyediakan informasi mengenai peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi di dalam masyarakat dan dunia pada umumnya.

Sangat disayangkan, ketika artikel ini disusun, penulis hanya menemukan informasi yang sangat terbatas mengenai isu konflik agama berkaitan dengan penutupan tempat-tempat ibadah agama Kristen dari media massa lokal. Seperti disampaikan di bagian awal, media massa lokal kelihatannya kurang tertarik, berhati-hati atau mungkin menunggu media lainnya untuk lebih dulu memberitakan isu ini.

7 <https://www.education.umd.edu/EDHD/faculty/Fox/publications/32.pdf>



Media massa bisa saja menggunakan independensi media sebagai justifikasi isu yang akan diangkat dan dibiarkan berlalu begitu saja. Para penganut teori *agenda setting*, membuktikan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat di dalam menetapkan hal-hal apa saja yang mereka pikirkan (Baran & Davis, 2010: 346). Ketika media memilih untuk tidak menempatkan isu konflik antar agama di dalam agendanya, atau tidak menempatkan isu ini di dalam prioritasnya, hal ini menjadi indikasi kurang berfungsinya media sebagai subsistem yang memegang peran penting di dalam menyediakan informasi bagi masyarakat sebagai keseluruhan sistem.

Jika media tidak memberikan informasi yang memadai, artinya media --baik disadari maupun tidak--, membiarkan hal ini untuk tidak masuk ke dalam agenda masyarakat. Padahal masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua, memerlukan informasi akurat mengenai isu yang sensitif ini. Kondisi ketiadaan informasi yang bisa andalkan akan menjadi lebih rumit, ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi. Telepon seluler pintar, media sosial, dan berbagai *gadget* canggih memungkinkan bermacam-macam informasi tidak resmi dengan cepat beredar di dalam masyarakat dalam format rumor, yang justru dapat berakibat ambiguitas, ketidak tenteraman dan rawan hasutan. Hal-hal seperti ini dapat berpengaruh destruktif terhadap sistem sosial yang secara alamiah berusaha memelihara *equilibrium*.

Media merupakan pembuat keputusan jurnalistik, sebagai *goal keeper* yang menentukan isu-isu apa saja yang akan diteruskan kepada masyarakat, isu-isu apa yang di-*blow-up*, isu apa saja yang dijadikan isu “pinggiran”, atau sama sekali tidak disampaikan kepada masyarakat dan perlahan-lahan menjadi hening sejalan dengan hiruk-pikuk berita-berita yang lebih seksi. Ketika media menyimpan suatu isu atau membatasi peliputannya, tanpa disadari media dapat terjebak sebagai pelaku di dalam pembungkaman pengalaman-pengalaman (pahit) dari kelompok-kelompok minoritas.

Ketika media hanya gencar melakukan publisitas isu-isu yang sejalan dengan kepentingan dan minat kelompok mayoritas, pada saat yang bersamaan media –disadari maupun tidak—sedang me-



nempatkan pendapat dan pandangan kelompok minoritas di dalam suatu spiral keheningan (Litlejohn, 2009 429-431).

Di dalam menjalankan fungsi korelasi, media sebagai sub-sistem seharusnya menjelaskan, menginterpretasikan dan memberikan komentar terhadap konflik yang terjadi. Ketika “membantu” masyarakat bagaimana memaknai realitas yang terjadi, di sini media juga merupakan arena pergulatan makna yang *legitimate*, media memiliki legitimasi sebagai institusi profesional bagaimana memaknai realitas. (Louw, 2001: 3-5). Dalam hal ini, termasuk realitas mengenai konflik yang terjadi.

Di dalam arena pergulatan makna bagaimana sudut pandang media yang tercermin dari pembingkaihan realitas (*framing*) akan sedikit banyak menuntun masyarakat bagaimana memaknai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Jadi, ketika media memaknai konflik agama sebagai suatu masalah yang perlu menjadi perhatian bersama, perlu dicarikan jalan keluar terbaik, akan membantu masyarakat untuk memaknai konflik agama dengan pemaknaan yang sedikit banyak dipengaruhi oleh media.

Dalam fungsi korelasi ini, media juga memiliki kapasitas untuk menjadi sarana sosialisasi dan membangun konsensus, dalam hal ini konsensus untuk menolak cara-cara kekerasan di dalam berkonflik, untuk membangun konsensus cara-cara berkonflik yang konstruktif, untuk mencari terminasi berupa jalan keluar konflik yang konstruktif bagi kelompok-kelompok yang berkonflik maupun bagi sistem sosial yang lebih luas.

Selain itu, media massa juga dapat menjalankan fungsi mobilisasi, ketika mengkampanyekan tujuan-tujuan masyarakat di dalam ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan dan di dalam wilayah keagamaan. Dalam hal ini media massa memiliki kekuatan untuk mengkampanyekan cara-cara berkonflik sekaligus jalan keluar dari konflik yang bersifat konstruktif bagi kelompok yang berkonflik maupun bagi masyarakat luas.

Dalam mengkampanyekan cara-cara berkonflik dan jalan keluar yang konstruktif media dapat melibatkan *stakeholders* di negeri ini khususnya yang berkaitan dengan isu pluralisme dan toleransi antar agama.

Media dan Siklus Konflik Agama: Dari Manifestasi sampai Terminasi Konstruktif

Lalu apa yang dapat dilakukan media? Sebetulnya media memiliki peluang yang sangat besar untuk membawa pengaruh positif terhadap konflik di dalam masyarakat., khususnya konflik antar agama. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Louis Kreisberg, berbagai konflik di berbagai belahan dunia, berkembang melalui beberapa tahap walaupun sangat bervariasi, tetapi umumnya bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya di mana solusi konflik akan kembali menjadi basis bagi terjadinya konflik baru, sehingga membentuk suatu siklus konflik. Tahap-tahap tersebut meliputi: (1) manifestasi, (2) eskalasi, (3) de-eskalasi, dan (4) terminasi (Kreisberg, 2007 : 22-23).

Ketika setidaknya salah satu pihak meyakini akan adanya kontestasi kepentingan mengembangkan identitas bersama, membangun rasa ketidakpuasan akan situasi yang mereka hadapi, membangun tujuan untuk mengubah pihak lainnya untuk mengurangi ketidakpuasan yang dirasakan, dan berkeyakinan bahwa mereka dapat mewujudkan perubahan yang diharapkan. Faktor-faktor ini merupakan basis yang menyebabkan munculnya konflik ke permukaan, dan dimanifestasikan dalam berbagai cara. Baik dalam cara yang persuasif maupun cara-cara radikal. Ketika terjadi manifestasi konflik, media berperan penting untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di dalam sistem sosial tersebut.

Dalam kasus konflik antar agama yang saat ini terjadi, jika media massamenapatkan kasus ini di dalam agendanya, masyarakat akan menyadari bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah interreligi yang jika tidak dicarikan jalan keluarnya, berpeluang untuk menjadi lebih besar dan destruktif terhadap Indonesia di masa depan. Sayangnya pada saat ini tidak banyak media yang mengangkat kasus ini secara terbuka, meskipun kasus ini telah masuk ke tahap eskalasi. Pada tahap ini media memiliki kapasitas untuk mengarahkan konflik secara konstruktif dengan melakukan elaborasi isu melalui jurnalisme investigasi menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.



Esakalasi konflik terjadi ketika pihak yang bertikai menilai kemungkinan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan, dan mengintensifkan penggunaan sarana-sarana konflik. Biasanya kekerasan terjadi pada saat konflik mengalami eskalasi, biasanya pula, tahap inilah yang justru paling banyak mengundang perhatian media, yang diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi khalayak media (McQuail, 2010: 383-384).

Dalam masa eskalasi konflik, media massa dapat melakukan tekanan-tekanan kepada pihak yang berkonflik, dan kepada aparat negara untuk melakukan pembekuan tekanan-tekanan tidak sah secara hukum, baik melalui elaborasi peran negara dari sudut pandang hukum, maupun dari ketata kelolaan negara. Di sini peran media sebagai pilar ke-empat demokrasi untuk memastikan bagaimana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Setelah melewati eskalasi konflik secara intensif, konflik dapat mengalami de-eskalasi. Pada masa ini pihak-pihak yang berkonflik menurunkan intensitas berkonflik. Masa ini merupakan saat-saat yang sangat penting untuk mencari jalan keluar bagi terminasi konflik. Di dalam masa de-eskalasi inilah media bisa sangat berperan, tidak sekadar memfasilitasi isu secara konstruktif dengan memberi ruang melalui *cover both sides*, mengalokasikan waktu, atau melakukan investigasi. Tetapi media memiliki kapasitas untuk melakukan pergulatan pemaknaan bersama yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik maupun *stakeholders* termasuk dewan pakar negeri ini untuk mencari jalan keluar bagi terminasi konflik dan merumuskan norma-norma sosial bersama di dalam berkonflik.

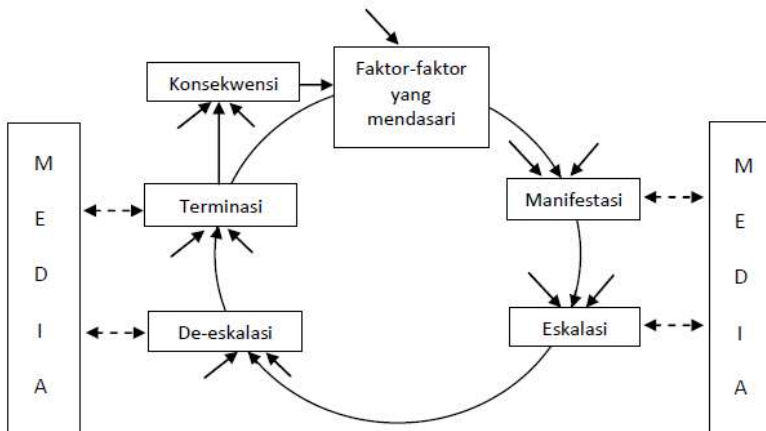
Pada tahap ini juga *stakeholders* bersama-sama mempertimbangkan konsekwensi terhadap setiap alternatif jalan ke luar, agar membawa masyarakat ke tingkat kematangan hidup bersama secara pluralis. Dari berbagai studi mengenai konflik, jalan keluar pada suatu siklus konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang pada gilirannya menjadi basis untuk munculnya konflik baru di masa selanjutnya. Di sini, sumber daya manusia dalam institusi media menjadi salah satu indikasi penting untuk menjadi fasilitator yang cerdas dan bijaksana bagi pergulatan makna, yang berwujud *rally* diskusi-diskusi terfokus (*focus group discussion*) antara para *stakeholders* termasuk dewan pakar

secara terarah, berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat pluralis yang toleran.

Ketika terminasi tercapai, media massa berperan penting untuk memelihara rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berkonflik melalui berbagai strategi media, baik melalui program-program pemberitaan maupun melalui program-program non-pemberitaan, seperti yang telah terbukti di berbagai wilayah konflik seperti di Rwanda dan jalur Gaza. Di negara-negara pasca konflik ini, media memperkenalkan hidup berdampingan secara damai terutama melalui program-program non-pemberitaan, seperti Program anak-anak *Sesame Street* versi Israel-Palestina atau Opera Sabun di Rwanda. Program-program ini berusaha mengurangi stereotip dan mendorong penerapan norma-norma sosial dalam kehidupan yang pluralistik. Di sini kreativitas media menjadi kunci bagi pengembangan program-program pluralisme yang menarik, menghibur sekaligus mendidik.

Secara garis besar, peran media di dalam siklus konflik dilaksanakan dari mulai konflik dimanifestasikan, mengalami eskalasi, de-eskalasi sampai terminasi, seperti yang terlihat di dalam siklus konflik dan media di bawah ini.

Gambar Siklus Konflik dan Media



Sumber: Kreisberg, 2007: 23
(Catatan : tambahan unsur media oleh penulis)

Media massa di Indonesia pernah berhasil membawa suatu konflik menjadi isu yang konstruktif, misalnya kasus Prita. Ketika



media massa secara intensif memberitakan masalah ini dan menggalang dukungan terhadap Prita. Walaupun kasus ini tetap berjalan pada tataran hukum, tetapi berhasil menggalang kepedulian dan solidaritas masyarakat. Kasus ini berada pada tataran individu versus insitusi tunggal.

Konflik agama merupakan masalah yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, melibatkan bagian dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas yang ada di negeri ini, sepatutnya media massa berperan aktif, agar tidak hanya menjadi institusi yang membela kepentingan-kepentingannya, tetapi juga menjadi insitusi yang berperan di dalam memperjuangkan agar masa depan negeri ini menjadi lebih baik, di mana masyarakat yang pluralis dapan hidup berdampingan, walaupun berbeda keyakinan. §

Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. (2010). *Teori Komunikasi Massa – Dasar, Pergolakan dan Masa Depan*, edisi ke 5, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Bratic, Vladimir. (2012). “*Media Effect During Violence Conflict: Evaluating Media Contributions to Peace Building*”, dalam *Conflict and Communication Online*, Vol. 5, No. 1, 2006, dalam <http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/3041/bratic.pdf>, 30 Mei 2012.
- Cole, Charlotte F., et. all., “*The educational impact of Rechov Sumsum/Shara’aSimsim: A Sesame Street television series to promote respect and understanding among children living in Israel, the West Bank, and Gaza*”, dalam *International Journal of Behavioral Development*, 2003, 27 (5), 409-422, dalam <https://www.education.umd.edu/EDHD/faculty/Fox/publications/32.pdf>, diunduh 30 Mei 2012
- Harsono, Andreas, “*No Model for Muslim Democracy*”, dalam *The New York Times*, 21 Mei 2012, dalam <http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/no-model-for-muslim-democracy.html>, diunduh 25 Mei 2012.
- Kreisberg, Louis. (2007). *Constructive Conflict from Escalation to Resolution* 3rd ed. . Maryland: Rowman& Littlefield Publishers, Inc., dalam: http://www.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=O5RCMQ0DXWsC&oi=fnd&pg=PR9&dq=louis+kriesberg+constructive+conflict&ots=c4sdfzU_fV&sig=4HgBuqInI3xx7UveHHYj3ZgfS_0&redir_esc=y#v=onepage&q=louis%20kriesberg%20constructive%20conflicts&f=false, diunduh 24 Mei 2012.
- Landler, Mark, “*Clinton Praises Indonesian Democracy*”, dalam *The New York Times*, 18 Februari 2009, dalam <http://www.nytimes.com/2012/05/22/>

- opinion/no-model-for-muslim-democracy.html, diunduh 25 Mei 2012.
- Littlejohn, Stephen W. (2009) *Teori Komunikasi* edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Louw, Eric, *The Media and Cultural Production*. (2001). London: Sage Publication Ltd., dalam http://www.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zLQe5vhzjBMC&oi=fnd&pg=PR7&dq=%22Eric+Louw%22&ots=P1BCyuq9IJ&sig=8XMyhzR7LOYLCidBidTw9Hn60Q&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Eric%20Louw%22&f=false, diunduh 4 Juni 2012.
- Mukti, Hafidz, *Indonesia Tuai Kritik Keras di Dewan HAM PBB*, 24 Mei 2012, dalam *dalam Media Indonesia.com.*, dalam http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/05/321883/284/1/Wajar_Penilaian_Dewan_HAM_PBB_terkait_Intoleransi_Beragama, diunduh 25 Mei 2012
- McQuail, Dennis. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th ed.. London: Sage Publication Ltd.
- Paluck, Elizabeth Levy. (2012) "Reducing Intergroup Prejudice and Conflict Using the Media: A Field Experiment in Rwanda", dalam *Journal of Personality and Social Psychology*, 2009, Vol. 96, No. 3, 574–587, dalam https://psych.princeton.edu/~psych/psychology/research/levy_paluck/pubs/2009%20reducing%20intergroup%20prejudice.pdf, diunduh 30 Mei 2012.
- Rogers, Benedict, *Indonesia's Rising Religious Intolerance*, dalam *The New York Times*, 21 Mei, 2012, dalam http://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/indonesias-rising-religiousintolerance.html?_r=1, diunduh 25 Mei 2012.



PEMBERITAAN MEDIA DALAM RESOLUSI KONFLIK HORIZONTAL

Afdal Makkuraga Putra

Although reforms have respect for the freedom freedom of expression), in fact precisely horizontal conflicts thrive post-reform era, for example the conflict of Ambon, Poso, and Papua, etc. The question is whether the coverage of the conflict could lead to the growing proliferation of the next conflict or even direct the coverage conflict of resolution. This article will describe the peace journalism approach is considered capable of bridging of conflict resolution. Peace journalism is expected to provoke conflict parties to find a way out. The press should do a win-win approach and expand the alternative of conflict resolution

keyword: peace journalism, horizontal conflict

Reformasi yang berlangsung sejak 1998 membawa perubahan penting dalam dalam penghormatan dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia. Sejumlah instrumen HAM mulai dilembagakan, sebut misalnya dimasukkannya HAM pasal tersendiri di UUD 1945, disahkannya UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Namun dibalik kesuksesan memperbaiki instrumen hukum HAM, ternyata reformasi juga membawa kenyataan lain, yakni meningkatnya eskalasi konflik di sejumlah tempat di wilayah Indonesia. Sebut misalnya konflik Ambon, Poso, Sampit, Papua, dan Aceh.

Konflik-konflik tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak menentu. Betapa tidak, ditengah situasi politik yang tidak pasti, konflik membawa korban jiwa dan harta benda yang luar biasa besarnya terus terjadi secara sporadis. Setiap saat masyarakat terancam, suasana masyarakat yang tadinya harmonis, toleran dan demokratis, kini berubah, diganti dengan kecurigaan dan dendam.

Kalau tadinya konflik hanya melanda kota-kota besar dimana struktur masyarakatnya heterogen baik dari segi etnis, agama, ras, anta golongan dengan latar belakang yang lebih bersifat politis, kini konflik mulai merambah hingga ke pedesaan. Desa yang dikenal dengan toleransi, kompromi dan harmonis kini terusik dan tidak tentram lagi.

Rangkain konflik-konflik yang terjadi di Indonesia melahirkan sebuah tesis yang bersifat spekulatif bahwa derajat harmoni dan toleransi yang tinggi dalam masyarakat, ternyata menyimpan potensi konflik yang besar, dan letupannya pun sedemikian dahsyat yang selalu dapat melahirkan korban jiwa dan materi yang sangat luar biasa besarnya. Nuansanya sangat menonjolkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Nuansa SARA bahkan memporakporandakan hampir semua tatanan sosiokultural yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang dipandang sebagai "*local genius*" dan menjadi citra masyarakat, kini sekan tidak mampu memperlihatkan perannya dalam mengelola masyarakatnya sendiri.

Konflik Maluku harus diakui merupakan bagian dari keseluruhan rentetan konflik yang pernah terjadi di Indonesia saat ini. Konflik yang terjadi selama kurang lebih tiga tahun ini, menyebabkan



terjadinya korban jiwa dan harta benda yang luar biasa besarnya. Sampai dengan tahun 2000 saja, korban meninggal hampir 1000 orang, luka berat 1.279 orang, luka ringan 874 orang. Korban di pihak TNI/Polri tercatat 18 orang meninggal dunia, 56 luka berat dan 47 luka ringan. Rumah penduduk yang terbakar/hancur 11.814 unit, tempat ibadah 140 unit, kantor pemerintah/swasta 103 unit, sekolah 57 unit, ruko 601 unit, pasar 10 unit, serta 8 unit Puskesmas. Adapun jumlah pengungsi 104.186 jiwa (Republika, 26 Januari 2000).

Konflik Maluku belum lagi selesai, pecah Konflik Poso. Konflik ini juga hampir mirip dengan Ambon, yang dilatarbelakangi oleh SARA. Awal konflik sebenarnya sangat sepele, yakni pemuda yang sedang mabuk menyerang kelompok pemuda lain. Namun mabuk sebenarnya bukan pemicunya, tetapi latar belakang agama kemudian dibawa-bawa sehingga konflik ini selanjutnya berkobar.

Sampai saat ini belum pernah dirilis angka resmi jumlah korban konflik Poso, tetapi menurut *Crisis Center* GKST menyebutkan sedikitnya 267 korban tewas, 6.984 rumah rusak berat, 3.492 buah diantaranya ludes terbakar dan 635 dinyatakan rusak ringan dan puluhan kendaraan bermotor rusak dan terbakar. Konflik itu juga memaksa ribuan orang mengungsi meninggalkan rumah dan tanah moyangnya.

Konflik sepertinya tak ingin menjauh dari bumi nusantara, lepas Konflik Poso pecah konflik antaretnis di Kalimantan Barat yang melibatkan suku Dayak dan Madura. Awal konflik memang sepele, yakni perkelahian kelompok pemuda di pasar Sambas memperebutkan lahan parkir. Peristiwa langsung menyulut bara konflik menjadi lebih besar. Akibatnya bisa diprediksi, yakni jatuhnya korban jiwa dan harta benda yang luar biasa.

Menurut tesis Thung Ju Lan¹, terdapat tiga tipe konflik di Indonesia, yaitu:

1. konflik separatis adalah konflik antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan sekelompok orang yang memperjuangkan ke-

1 Lihat Thung Ju Lan, Program Manajemen dan transformasi konflik, dalam buku Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik. Editor: Dewi Fortuna Anwar, Buku Obor, 2003, hal 84

- merdekaannya, atau disebut dalam literatur sebagai konflik vertikal,
2. konflik komunal, konflik yang pecah antara dua atau tiga kelompok masyarakat karena antagonisme atau perseteruan primordial atau warisan sejarah, kadang-kadang berdasarkan ideologi atau agama,
 3. konflik memperebutkan sumberdaya alam, konflik ini biasanya menyangkut kontrol atas sumberdaya hutan atau mineral.

Sedangkan akar penyebab konflik tersebut bermacam-macam, namun secara garis besarnya penyebab hanya ada dua; yakni ketimpangan kesejahteraan dan keragaman suku. Pertama, ketimpangan kesejahteraan sebuah kelompok berarti kesenjangan antara tingkat kesejahteraan yang diharapkan dan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya diperoleh, sebagai akibat dari merosotnya dengan cepat status umumnya ekonomi kelompok, dibandingkan dengan status sebelumnya atau dengan kelompok atau kelompok-kelompok lainnya. Ketimpangan kesejahteraan dapat ditemukan di banyak konflik-konflik di tanah air. Di Kepulauan Maluku misalnya, kemerdekaan Indonesia menurunkan status penduduk Kristen, yang lama menikmati perlakuan khusus dari Belanda, dan ini menguntungkan penduduk Muslim setempat dan para imigran lokal yang berasal dari Bugis/Makassar, Jawa yang umumnya beragama Islam.

Konflik di Kalbar juga tak bisa dipisahkan dari ketimpangan kesejahteraan antara etnis Madura dengan Dayak. Konflik di Kalbar sesungguhnya memiliki akar yang panjang, diawali dengan tibanya para imigran Madura di awal tahun 1900-an. Para juragan kapal yang sering bolak-balik ke Kalbar-lah yang mula-mula membawa mereka ke sana. Bila calon migran tidak punya ongkos, juragan kapal bersedia menanggungnya lebih dahulu, dengan perjanjian akan dilunasi setelah mereka bekerja di Kalbar. Para migran ini dipikat lewat “janji surga” betapa gampangya mencari kekayaan di tanah seberang. Pameo yang kondang saat itu ialah, “Sejengkal memotong akar pinang, mendapat uang 50 ketip.”

Kedatangan mereka, ternyata menggantikan etnik Dayak atas penguasaan sumber-sumber ekonomi. Terutama sektor perdagangan-



gan. Akibatnya etnik Dayak makin terpinggir dan makin masuk ke dalam hutan.

Konflik separatisme yang terjadi di Aceh dan Papua tak bisa dilepaskan dari ketimpangan kesejahteraan antara pusat dan lokal. Aceh dan Papua adalah provinsi yang mengandung dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeksploitasi kekayaan tersebut dan membawa ke pusat sedangkan distribusi ke provinsi pemilik kekayaan alam sedikit sangat sedikit. Pameo yang terkenal, mengambil sekarung mengembalikan sesendok. Akibatnya terjadi ketimpangan kesejahteraan penduduk antara pusat dan daerah. Daerah-daerah kaya tersebut masyarakatnya menderita kemiskinan yang luar biasa. Ketimpangan itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok elit untuk memprovokasi warga untuk mengangkat senjata.

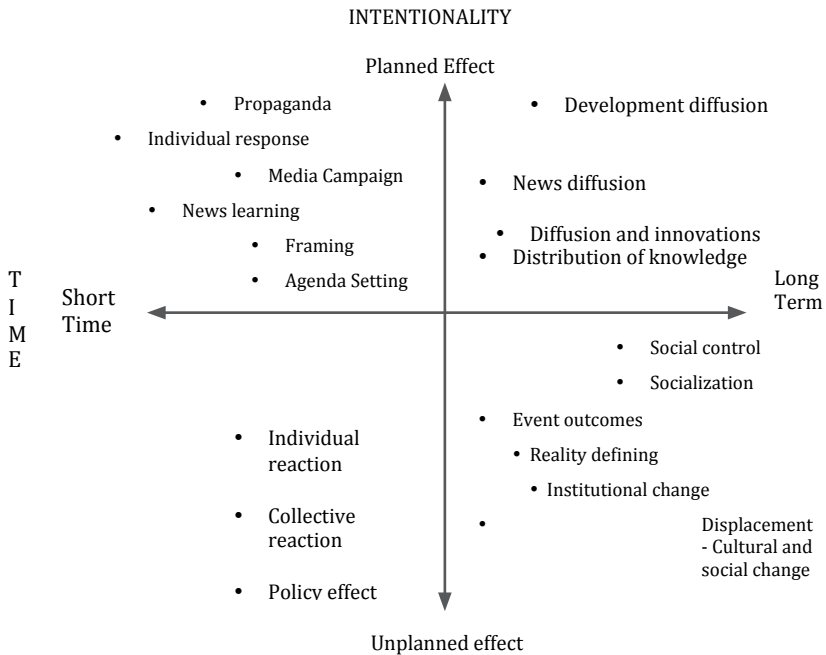
Kedua, keragaman suku. Tesis Rummel menunjukkan bahwa keragaman suku berkaitan dengan potensi konflik yang lebih besar. Menurut Rummel perbedaan suku ditemukan sebagai penyulut konflik di antara negara yang dilanda kekerasan dahsyat seperti perang gerilya dan perang saudara. Keberagaman suku juga sudah menjadi penjelasan resmi bagi kekerasan di Indonesia².

Menurut Collier dan Hoeffler dalam Kivimaki situasi yang paling mudah memicu konflik adalah saat dua kelompok suku utama bersaing memperebutkan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Masyarakat yang terdiri dari banyak suku yang sama-sama kuat cenderung, sama halnya masyarakat bersuku tunggal, tidak mudah melancarkan perang.

Peranan Media Massa

Pertanyaannya kemudian, apakah pemberitaan konflik tersebut akan berdampak terhadap makin meluasnya eskalasi konflik tersebut ke daerah-daerah lain atau pemberitaan tersebut mengarah ke resolusi konflik. Sebelum kita membahasnya, mungkin sebaiknya kita melihat tipologi efek media yang dikemukakan oleh Golding dalam McQuail (2005: 468).

2 Lihat Timo Kivimaki, Penelitian Konflik Suku dalam Masyarakat multi-budaya. dalam buku *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Editor: Dewi Fortuna Anwar, Buku Obor, 2003, hal 84



Menurut Golding dalam McQuail gambar di atas menunjukkan empat tipologi dampak pemberitaan media. Dampak jangka pendek yang disengaja dapat dipandang sebagai “bias”; dampak jangka pendek yang tidak disengaja dipandang sebagai “bias yang tidak disadari”; dampak jangka panjang yang disengaja disebut sebagai “kebijakan”; sedangkan dampak berita jangka panjang yang tidak disengaja disebut sebagai “ideologi.”

Dalam konteks kerusuhan yang bernuansa SARA, dampak media yang dikhawatirkan muncul adalah reaksi kolektif (*collective reaction*). Reaksi ini bermakna adanya dampak media yang alami oleh individu secara serentak oleh banyak orang, yang menimbulkan tindakan bersama, biasanya tindakan yang tidak teratur dan tidak dilembagakan. Dampak yang sering timbul antara lain rasa takut, cemas, dan marah, yang mengakibatkan kepanikan dan konflik horisontal (McQuail, 2005:469)

Benarkah media massa mampu menimbulkan dampak reaksi kolektif? Sejumlah penelitian memang telah dilakukan namun hasilnya masih menimbulkan pro dan kontra. Penelitian Singer (1970)



yang dikutip McQuail (1987:240) menunjukkan bahwa ada bukti tertentu media massa dapat turut terlibat dengan hanya mengisyratkan kejadian dan lokasi terjadinya peristiwa kerusuhan, disertai publikasi insiden yang menyebabkan timbulnya perilaku rusuh atau dengan mengetengahkan publisitas yang memungkinkan timbulnya kerusuhan. Akan tetapi menurut Kerner dalam McQuail (1987:240) media massa belum terbukti sebagai faktor pokok atau penyebab utama lahirnya kerusuhan. Menurut McQuail, hubungan pribadi memainkan peran lebih besar ketimbang media dalam situasi rusuh apapun.

Menurut Spilerman dalam McQuail, media dapat pula mempengaruhi penentuan waktu atau bentuk perilaku rusuh. Dalam studinya, Spilerman memberi dukungan pada hipotesis ini dan hipotesis lainnya, atas dasar pembuktian yang agak negatif. Meskipun dengan penelitian yang *extensive*, tidak dapat ditemukan penjelasan struktural yang memuaskan atas banyak kerusuhan di daerah urban di Amerika Serikat. Spilerman menyimpulkan bahwa televisi dan struktur berita jaringannya bertanggung jawab atas kerusuhan itu khususnya menciptakan “solidaritas kulit hitam yang dapat menerobos batas komunitas.

Pertanyaan selanjutnya apakah bijaksana untuk menghindari meluasnya konflik horisontal kita lantas menghentikan berita-berita kerusuhan yang bernuansa SARA? Ternyata menghentikan berita bukan sesuatu yang bijaksana. Selain mengkhianati asas *public right to know*, penghentian berita melalui media massa, sama dengan menyumbat saluran komunikasi resmi. Bila saluran komunikasi resmi ditutup biasanya yang tumbuh subur adalah rumor atau desas-desus.

Menurut A.S. Achmad (1990:118) desas-desus adalah suatu proposisi terhadap kepercayaan mengenai rujukan yang bersifat pembicaraan ramai yang tersiar tanpa pembuktian resmi. Dalam berbagai studi menunjukkan bahwa rumor senantiasa membawa: keingintahuan (penasaran), ketakutan (horor), permusuhan dan kepanikan.

Bila desas-desus membawa dampak kepada ketakutan yang lebih-lebih mengarah kepada kepanikan masyarakat, maka pada akhirnya dengan mudah menyulut bahkan memperbesar kerusu-

han atau konflik itu sendiri atau bahkan memicu lahirnya kerusuhan atau konflik baru.

Menurut hemat penulis, cara yang tepat digunakan untuk menghindari dampak meluasnya kerusuhan bernuansa SARA akibat pemberitaan media, namun tidak menghentikan pemberitaan adalah melalui jurnalisme damai (*peace journalism*). Praktek jurnalisme ini diperkenalkan oleh Johan Galtung ahli studi pembangunan yang merasa miris melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih: kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang (Stanley, 2001).

Jurnalisme perang lebih tertarik pada konflik, kekerasan, korban yang tewas, dan kerusakan material. Pola seperti ini juga yang banyak dianut infotainment, yang lebih suka mendasarkan kerjanya pada konflik rumah tangga selebritis. Penganut jurnalisme perang enggan menggali asal-usul konflik, mencari alternatif-alternatif penyelesaian, berempati pada akibat-akibat kemanusiaan yang ditimbulkannya. Jurnalisme perang lebih suka memperjauh jarak pihak berkonflik dalam kerangka kalah-menang, bukan mendekati keduanya untuk berdamai.

Ide Galtung kemudian diikuti Annabel McGoldrick dan Jake Lynch-- mendorong pers untuk mengubah teori klasik jurnalisme perang itu menjadi jurnalisme damai (*peace journalism*). Pers haruslah mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai untuk menemukan jalan keluar. Pers harus melakukan pendekatan menang-menang dan memperbanyak alternatif penyelesaian konflik

Jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban-korban konflik daripada liputan kontinyu tentang jalannya konflik itu sendiri. Jurnalisme damai memberi porsi yang sama kepada semua versi yang muncul dalam wacana konflik. Jurnalisme damai juga berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pihak, bahkan kalau perlu menyebutkan nama pelaku kejahatan (*evildoers*) di kedua belah pihak. (Pantau, edisi 09, 2000:47).§



Daftar Pustaka:

- Achmad, A.S. (1990). *Manusia dan Informasi*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Dominick, Joseph R. 1999. *The Dynamics of Mass Communication*. USA: McGraw-Hill.
- Lowery, Shearon & DeFleur, Melvin L. (1995). *Milestones in Mass Communication Research: Media effect*. USA: Longman Publisher.
- McQuail, Dennis. (2005) *Mass Communication Theory*. London: Sage Publication.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2000). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sendjaja, S. Djuarsa. (1998). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Severin, Werner J & Tankard, James W. JR. (1997). *Communication Theories: Origin, Method, and Uses In The Mass Media*. USA: Longman Publisher.
- Stanley. (2001). "Konflik dan Ide Jurnalisme Perdamaian" Makalah pada *Seminar Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai*, Yayasan Kippas, Medan, 19 April 2001.



MEDIA MASSA DAN KONFLIK SOSIAL DI JAWA TIMUR Studi Kasus Harian Regional Surya

*Yuli Nugraheni dan
Maria Yuliasuti*

Pada Agustus 2011 muncul kasus pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah oleh Gubernur Jawa Timur yang mengundang prokontra masyarakat Jawa Timur, juga kasus sontek massal di Surabaya dan banyak kasus lain. Peran media massa diperlukan sebagai pembentuk kohesi sosial (penyatuan). Kohesi sosial merupakan syarat dasar bagi sebuah masyarakat.

Terdapat lima dimensi utama kohesi sosial dari empat dokumen kebijakan pemerintah Perancis dan Kanada, OECD, dan Kelompok Roma (Berger-Schmitt, 2000) antara lain: (1) kebersamaan-isolasi (identitas, komitmen), (2) pengikutsertaan-pengesampingan (akses setara), (3) partisipasi-ketidakterlibatan (politik, ekonomi, sosial, budaya), (4) penerimaan-penolakan (toleransi perbedaan) dan (5) legitimasi-ilegitimasi (institusi sebagai mediator konflik).

Melalui teknik tersebut, hukum dan etika media harus diterapkan dan diawasi guna mendukung peran media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Penulis ingin melihat peran Harian SURYA sebagai harian regional terbesar Jawa Timur dalam melakukan kohesi sosial terhadap beragam konflik yang muncul.

Kata kunci : konflik sosial, media massa, kohesi sosial

Pendahuluan

Tidak ada yang menyangkal bahwa Indonesia memang memiliki kekayaan yang berlimpah, didukung dengan budaya yang beranekaragam, mulai dari suku, aliran kepercayaan, ras, dan agama. Namun, bila ditelaah lebih jauh lagi, Indonesia masih minim prestasi sebagai sebuah bangsa yang demokratis terhadap kekayaan pluralismenya. Toleransi, kesetaraan dan keadilan bagi pluralisme belum terbentuk. Lima landasan pokok Pancasila sering diceraiberaikan, bukan satu kesatuan lagi.

Masing-masing pihak cenderung egois terhadap apa yang menjadi identitas pribadinya, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Toleransi sering diabaikan baik secara sadar ataupun tidak. Tampak bahwa realitas pluralisme di Indonesia memang menjadi salah satu bagian yang sulit diterima oleh masyarakat.

Sebut saja kasus yang terjadi pada Agustus 2011 lalu, adanya aksi penolakan jemaat Ahmadiyah di sejumlah daerah. Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk sikap intoleran atau tidak bertoleransi terhadap antarpemeluk kepercayaan.

Ulil Abshar Abdalla, Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat mengatakan, “Permasalahan Ahmadiyah saat ini berkaitan erat dengan konstruksi negara Indonesia yang berdasarkan *Bhinneka Tunggal Ika*. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan atau kepercayaannya, meski setiap orang bilang Ahmadiyah sesat” (www.mediaindonesia.com, 8 Maret 2011).

Jika kondisi ini terus menerus diabaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa sikap intoleran akan semakin menyebar. Di sinilah peran media dibutuhkan, media diharapkan memiliki kekuatan besar untuk mampu menyuarakan toleransi. Media harus mampu memberikan informasi, inspirasi dan banyak hal untuk memberikan pandangan berimbang pada masyarakatnya. Media idealisnya tidak hanya condong pada keberpihakan satu kepentingan tertentu. Penegakan pluralisme merupakan kewajiban mendasar bagi mereka yang peduli dengan demokrasi dan keberlangsungan hidup bangsa ini.



Detil Kasus

Kasus pelarangan aktivitas Jamaah Ahmadiyah oleh Gubernur Jawa Timur sempat mengundang pro dan kontra masyarakat di Jawa Timur. Berikut adalah petikan berita yang dimuat beberapa media oleh www.voa-islam.com, tanggal 3 Maret 2011 sebagai berikut:

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyatakan siap menghadapi gugatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia terkait Surat Keputusan Pelarangan Ahmadiyah yang dibuatnya. Menurut Soekarwo, Surat Keputusan Gubernur nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur merupakan hasil kajian dan kesepakatan dengan sejumlah pihak di Jawa Timur. “Silakan jika akan digugat. Saya siap (menghadapi), ini *kan* negara hukum,” kata Soekarwo di Kabupaten Bondowoso, Kamis (3/3/2011).

Gubernur yang akrab disapa *Pakde* Karwo itu juga menegaskan bahwa surat keputusan pelarangan segala kegiatan keagamaan Jemaat Ahmadiyah itu dimaksudkan untuk meredam potensi kemarahan umat Islam atau mencegah konflik sosial. “Jadi pemerintah propinsi tidak mengurus keyakinan atau akidah dan ritual mereka, apalagi mau membubarkan Ahmadiyah,” katanya.

Soal pembubaran Jemaat Ahmadiyah, kata dia, adalah wewenang pemerintah pusat. “Jadi, sebagai gubernur, saya tidak ingin ada konflik sosial karena persoalan Ahmadiyah terjadi di Jawa Timur,” katanya.

Pernyataan Gubernur *Pakde* Karwo itu disampaikan menanggapi rencana pihak jemaat Ahmadiyah yang melakukan gugatan. Sebelumnya, Senin (28/2/2011), Humas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Mubarik Ahmad mengatakan pihak Ahmadiyah menyatakan tidak terima dengan SK Gubernur Jawa Timur. Menurut Mubarik, JAI akan melakukan segala daya upaya agar umatnya tetap bisa beraktivitas menjalankan ajaran sesuai keyakinannya yakni dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Sesuai petunjuk dari penasehat hukum, banyak upaya yang akan kita lakukan seperti upaya hukum dan upaya lainnya yang dibolehkan. Namun jalur yang paling sederhana ya ke PTUN. Itu jalan satu-satunya kita uji melalui PTUN,” kata Mubarik.

Sedangkan SK Gubernur Jatim No 188 /94 /KPTS/013 /2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur itu antara lain berisi:



1. Aktivitas jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Jatim.
 - a. Melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan maupun melalui media elektronik.
 - b. Melarang memasang papan nama organisasi Ahmadiyah di tempat umum.
 - c. Melarang memasang papan nama pada masjid, mushola, lembaga pendidikan dengan identitas jamaah Ahmadiyah Indonesia.
2. Melarang penggunaan atribut jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya.

SK tersebut ditembuskan kepada sepuluh instansi, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Kanwil Kementerian Agama Jatim, Kanwil Hukum dan HAM Jawa Timur dan PB Ahmadiyah Indonesia di Jakarta.

Kasus sosial lain adalah ditemukannya sontek massal di Surabaya yang sempat meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu. Demikian kutipan berita dari www.tempo.co, tanggal 15 Juni 2011 sebagai berikut:

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelesaikan konflik sosial yang muncul selepas kontroversi sontek massal di Sekolah Dasar Negeri 2 Gadel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang terjadi di sekolah dasar itu menurut Nuh hanya masalah akademik.

“Selesaikan benturan sosialnya dengan cara kedua pihak dipertemukan, difasilitasi, rukunkan kembali sebagai warga,” kata Nuh dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu, 15 Juni 2011.

Al, siswa SDN 2 Gadel, melaporkan ke ibunya, dia diminta gurunya memberikan sontekan kepada kawan-kawannya. Ibu Al, Siami, lantas melaporkannya ke kepala sekolah dan membukanya ke media massa.

Namun, Al dan keluarganya sejak pekan lalu terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya di Dusun Lumpang, Desa Sedapur Klagen, Kecamatan Gadel, Kabupaten Gresik. Ia mengaku takut dan terusir dari rumahnya setelah warga setempat berunjuk rasa mengecam dirinya yang membongkar praktik sontek massal itu.

“Ibu Siami kita hargai karena menyampaikan kebenaran,” kata Nuh. “Tapi, jangan pula dengan menghargai Siami, kita mengorbankan kelompok lain, mengangkat yang satu dan menjatuhkan yang lain kan politik belah bambu.”

Nuh menyayangkan masalah akademik itu ditarik ke ranah sosial hingga membuat dunia pendidikan dicap kehilangan kejujuran. Padahal, menurut Nuh, tudingan sontek massal itu tak terbukti. Meski demikian, Nuh mengakui ada pelanggaran yang diperbuat guru sekolah dasar itu, yakni menyuruh muridnya berbuat curang. “Guru itu telah dijatuhi sanksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” kata Nuh.

Kutipan kedua kasus tersebut adalah contoh dari beberapa pemberitaan di surat kabar. Melalui kutipan berita tersebut, secara tidak langsung justru menambah panas masyarakat pembacanya. Pada kasus pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah, muncul diberitakan adanya Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau SK pelarangan Ahmadiyah di berbagai daerah. Hal tersebut juga mempengaruhi sikap aparat yang cenderung melakukan justifikasi tindakan diskriminasi. Dan ujung-ujungnya bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Tidak jauh berbeda dengan kasus sontek massal yang juga justru menjadi semakin memuncak. Masyarakat dibingungkan, tidak ada informasi ataupun solusi dan sanksi tegas mulai dari secara tidak langsung menyalahkan tindakan Al dan ibunya atau sebaliknya dengan mendukung pihak pemerintah.

Surat kabar sebagai media massa diharapkan tidak hanya sebagai penyebar informasi saja. Namun, surat kabar diharapkan memiliki tanggung jawab lebih untuk turut serta memimpin masyarakat untuk memilih sikap yang positif, menciptakan hubungan dan integrasi yang berkesinambungan. Surat kabar diharapkan mampu menjadi pendorong kohesi sosial yang melibatkan individu yang satu dengan yang lain, juga kelompok atau komunitas dan kelas sosial yang tentunya terwadahi keseluruhannya di media massa.

Surat Kabar sebagai Media Massa

Surat kabar merupakan salah satu bentuk industri media massa, pernyataan ini didukung oleh pendapat Biagi (2010: 11) bahwa in-



dustri media massa terdiri dari delapan jenis antara lain buku, surat kabar, majalah, rekaman, radio, film, televisi, dan internet.

Fungsi Sosial Media Massa

Media massa seturut dengan fungsi sosialnya mampu memberikan informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi, seperti yang disampaikan oleh McQuail (2011a:108) sebagai berikut:

Fungsi informasi berarti media harus mampu: (1) menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia; (2) menunjukkan adanya hubungan kekuatan; dan (3) memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi dan pertumbuhan.

Fungsi korelasi berarti media harus mampu: (1) menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi; (2) menyediakan dukungan untuk kekuasaan dan norma yang mapan; (3) sosialisasi; (4) mengatur aktivitas yang terpisah; (5) membangun konsensus; dan (6) mengatur tatanan prioritas dan melambangkan status relatif.

Fungsi keberlanjutan berarti media harus mampu: (1) mengekspresikan budaya dominan dan memahami perkembangan kultur dan subkultur yang baru; dan (2) mendorong dan memelihara kesamaan nilai. Sementara fungsi hiburan berarti media harus mampu: (1) menyediakan kesenangan, pengalihan, dan sebagai alat relaksasi; dan (2) mengurangi tekanan sosial.

Fungsi mobilisasi media harus mampu: mengampanyekan tujuan sosial di ranah politik, perang, perkembangan ekonomi, pekerjaan, dan terkadang agama. Selain itu ditemukan fungsi sosial yang lain yaitu: (1) mengikat masyarakat menjadi satu, (2) memberikan kepemimpinan bagi masyarakat, (3) menolong membangun ranah publik, (4) menyediakan pertukaran ide antara pemimpin dan masa, (5) memuaskan kebutuhan informasi, (6) memberikan cerminan atas masyarakat itu sendiri dan (7) bertindak sebagai kesadaran dari masyarakat (McQuail (2011: 97).

Surat kabar memiliki tugas yang cukup berat dengan mengemban karakteristik sekaligus fungsinya sebagai mandat yang tidak bisa dihindari. Mengingat konflik yang sering terjadi di lingkungan sosial



kita, maka surat kabar diharapkan cukup sigap untuk mengatasinya. Karakteristik surat kabar dengan didukung oleh fungsi sosialnya diharapkan tidak lepas dari unsur media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Konflik yang terjadi di masyarakat diharapkan mampu diredam supaya tidak semakin memuncak.

Media sebagai Pendorong Kohesi Sosial

Media massa memiliki tugas yang tidak mudah, banyaknya konflik yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat bukan berarti hanya begitu saja disajikan. Namun, harus dilakukan proses dimana berita tersebut diolah agar tidak menambah panas konflik itu sendiri. Dimana ketika media massa ikut turut serta meredam konflik, tentunya akan mengurangi runcingnya konflik itu sendiri.

Dengan kata lain media massa diharapkan mampu merangsang masyarakat untuk memikirkan bahwa konflik dapat memisahkan masyarakat itu sendiri, dan hal itu bukan sebuah solusi yang baik. Media massa memiliki fungsi untuk mendorong kohesi sosial. Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan, dimana media massa diharapkan mendorong masyarakat untuk bersatu. Diasumsikan bahwa kohesi sosial merupakan syarat dasar bagi sebuah masyarakat (Siddique dalam Colletta, Lim dan Viitanen, 2001 :18).

Terdapat lima dimensi utama dari kohesi sosial yang ditemukan dari empat dokumen kebijakan pemerintah Perancis dan Kanada, OECD, dan Kelompok Roma (Berger-Schmitt, 2000) diantaranya adalah (1) kebersamaan – isolasi (nilai-nilai bersama, identitas, perasaan komitmen), (2) pengikutsertaan – pengesampingan (kesempatan yang setara untuk memperoleh akses), (3) partisipasi – ketidakterlibatan (dalam hal kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya), (4) penerimaan – penolakan (menghargai dan mentoleransi perbedaan dalam masyarakat majemuk) dan (5) legitimasi–ilegitimasi (akan institusi-institusi yang berperan sebagai mediator dalam konflik di masyarakat majemuk).

Lima dimensi tersebut merupakan pilihan, pilihan yang tentunya akan diambil salah satu oleh media massa. Hal ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh media massa. Merupakan sebuah tantangan, apakah media massa mampu me-



liput beritanya dengan teknik *cover both sides* (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang) atau bahkan *all sides* (meliput dua sisi yang berbeda secara seimbang).

Dengan menggunakan teknik tersebut, secara tidak langsung media massa turut berperan melakukan kohesi sosial. Dimana adanya usaha untuk penyatuan atau pengintegrasian atas konflik yang terjadi. Penerapan fungsi media massa sebagai pendorong kohesi sosial sebenarnya juga sudah didukung dengan adanya hukum dan etika media massa. Hukum dan etika media massa ini tentunya bukan hanya sebagai hiasan semata, namun harus diterapkan dan benar-benar diawasi serta dipantau dalam prosesnya untuk mendukung terciptanya media massa sebagai pendorong kohesi sosial.

Hukum dan Etika Media Massa pada Peliputan Konflik

Sebuah kode etik jurnalistik mengacu pada serangkaian prinsip perilaku profesional yang dipungut dan dikendalikan oleh para jurnalis sendiri. Beberapa prinsip dalam kode etik jurnalistik yang sering ditemukan adalah kebenaran informasi, kejernihan informasi, perlindungan terhadap hak-hak publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standar dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi serta menghormati integritas sumber (Biagi, 2005:190-191).

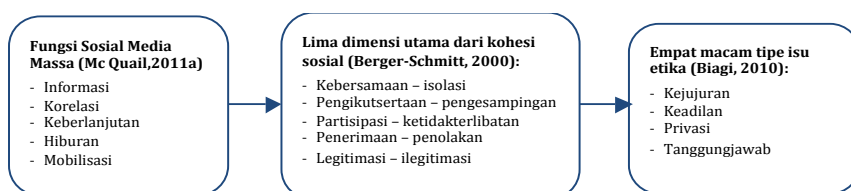
Pada intinya, hukum media massa memberikan jaminan pada media untuk melakukan kegiatan profesional dan melindungi masyarakat dari dampak negatif media massa. Dimana media memiliki empat macam tipe isu etika yang juga harus benar-benar diterapkan dan dijaga sepenuhnya yaitu :

1. Kejujuran (*truthfulness*) dalam melaporkan berita bernilai lebih daripada keakuratan dan menyampaikan yang sebenarnya untuk mendapatkan sebuah berita. Kejujuran juga berarti tidak salah merepresentasikan seseorang atau terdapat motif tersembunyi akan sebuah berita kepada pembaca atau penonton, serta tidak melaporkan berita yang salah. Aspek lain dari kejujuran adalah kepercayaan bahwa pegawai pemerintah seharusnya tidak menggunakan media untuk mengakhiri masalah mereka dengan “menanamkan” berita yang tidak benar (Biagi, 2010:



- 419).
2. Keadilan (*fairness*) menyiratkan ketidakberpihakan (*impartiality*) bahwa wartawan tidak memiliki kepentingan pribadi untuk memperoleh hasil dari laporan atau berita yang dibuat, bahwa tidak ada keuntungan tersembunyi untuk wartawan ataupun narasumber dari cerita yang disajikan atau yang tidak disajikan (Biagi, 2010: 423).
 3. Privasi, bagaimana pers menyeimbangkan anatara kebenaran dan penemuan fakta yang membutuhkan privasi (Biagi, 2010: 426).
 4. Tanggungjawab. Kejadian yang dipilih para wartawan untuk diberitakan dan cara mereka menggunakan informasi yang mereka kumpulkan merefleksikan pengertian profesi tanggungjawab publik (Biagi, 2010: 427).

Keterkaitan konsep-konsep diatas dapat dijelaskan melalui skema berikut :



Sumber : olahan penulis

Empat macam isu etika tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi media massa sebagai pendorong kohesi sosial. Pemberitaan media massa harus mampu membangun opini menyejukkan dengan tetap memenuhi asas jurnalisme (objektif, akurat, dan seimbang) dengan tidak meninggalkan empat macam isu etika.

Harian Regional Jawa Timur “SURYA”

Di Jawa Timur telah hadir surat kabar harian regional SURYA yang sangat berperan aktif dalam pemberitaan, khususnya informasi seputar regional Jawa Timur. Telah terbukti dari prinsip dasar yang telah disusun oleh harian SURYA di dalam *company profile* Harian SURYA, Januari 2012’, sebagai berikut:



Harian SURYA saat ini telah memposisikan dirinya sebagai koran regional no.1 di Jawa Timur, ini jelas terbaca dalam rumusan visinya yang menyatakan menjadikan SURYA sebagai perusahaan media informasi terbesar, terpadu dan terbaik di Jawa Timur melalui penerbitan surat kabar regional dan *online* dengan menyajikan informasi yang terpercaya. Hal ini juga didukung oleh konsep editorial yang disajikan Harian SURYA yaitu secara isi 80% berisi berita regional atau daerah Jawa Timur dan 20% berita nasional dan internasional.

SURYA memiliki sejarah kepemilikan sebagai berikut: berawal dari Mingguan SURYA yang dimiliki Grup Pos Kota kemudian beralih ke Harian SURYA yang dimiliki oleh Kompas Gramedia Group. SURYA tergabung dalam kelompok media Kompas Gramedia, Tribune (*group of regional newspaper*), www.surya.co.id (portal Surabaya terkini).

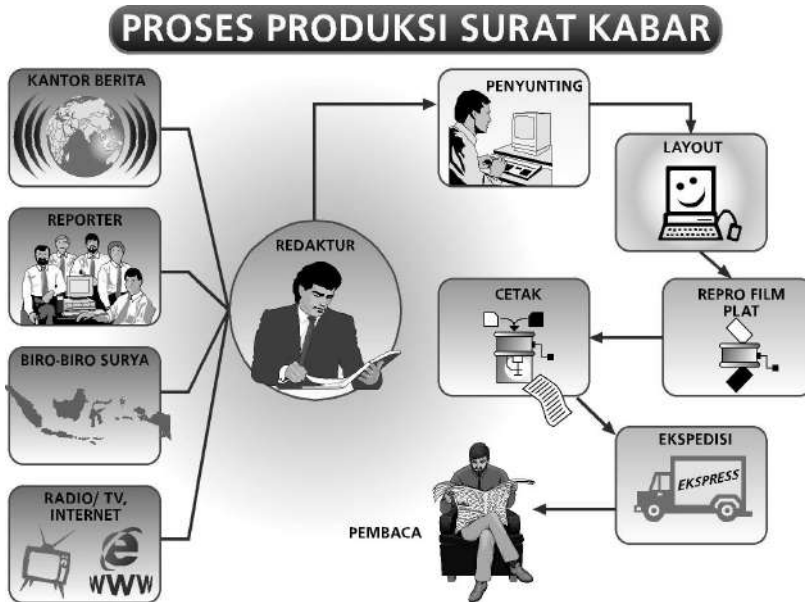
Sejarah kepemilikan SURYA mulai pada 26 Juni 1986 SURYA terbit secara mingguan dan dimiliki grup Pos Kota. Pada 10 November 1989 SURYA terbit secara harian dan dimiliki oleh dua grup media yaitu Grup Pos Kota dan Grup Kompas Gramedia. Perkembangan terakhir adalah pada Mei 2001 SURYA tetap terbit secara harian dan dimiliki secara penuh oleh Grup Kompas Gramedia.

Misi Harian SURYA adalah menjalankan bisnis secara sehat yang menguntungkan bagi *shareholders*, karyawan, dan masyarakat. Jika dicermati masyarakat menjadi bagian dari misi utama Harian SURYA. Sejak 1 Januari 2011 bidang usahanya dikembangkan pada 2 unit usaha yaitu penebitan dan jasa percetakan. Penerbitan dikelola oleh PT Antar Surya Media sedangkan jasa percetakan dikelola oleh PT Antar Surya Jaya (Gramedia Surabaya Plant) yang melayani percetakan dalam grup sendiri yaitu Harian SURYA, Harian KOMPAS, Tabloid Nova, Tabloid Bola, Tabloid Otomotif, Tabloid Otoplus, Tabloid Soccer, dan juga melayani percetakan di luar grup.

Harian SURYA terbit dengan rata-rata jumlah 20 halaman dengan oplah mencapai 155.000 eksemplar. Segmen pasar harian SURYA dikhususkan pada pembaca dengan rentang usia dewasa 20-60 tahun. Sementara jika ditinjau dari komposisi jenis kelamin profil pembaca Harian SURYA adalah pria sebesar 60% dan wanita sebesar 40%. Perimbangan antara pelanggan tetap dan eceran hampir sama yaitu sebesar 46% dan 54%.

Nilai berita yang dianut oleh Harian SURYA adalah baru, tragedi atau bencana, konflik, glamor, seks, *human interest*, kedekatan, *prominence*. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Harian SURYA dalam mengelola bisnis informasi ini adalah keinginan konsumen, kecenderungan perubahan sosial, kiat-kiat pesaing, mencermati perubahan teknologi, ekonomi, sosial, dan politik.

Sementara proses produksi Harian SURYA digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Company Profile Harian Surya 2012

Konflik Sosial dan Harian Surya

Pada Harian SURYA, keterlibatan narasumber atas konflik yang terjadi (konflik figur) dapat dilihat dari dua sisi. Skala konflik dan orang-orang yang terlibat di sana. Dalam kasus Ahmadiyah, ini pernah diangkat Harian SURYA, karena salah satu elemen yang ada dalam kasus ini adalah konfliknya. Harian SURYA menyajikan informasi peristiwa dan *background* kasusnya. Namun demikian, figur kritis tetap masuk. Bahwa, pemerintah gagal melindungi warga. Yang utama, adalah menunjukkan substansi masalahnya, Harian SURYA berusaha tidak mengeksplorasi kasus ini sekadar *talking news*. Harian SURYA menampilkan *feature* juga, bagaimana warga Ahmadiyah menjalankan Shalat Jumat, bagaimana sesungguhnya keyakinan setiap umatnya muncul di sana. Dengan demikian tidak ada penghakiman.

Sementara dalam kasus sontek figur, ini kita angkat karena punya *news value* yang tinggi. Harian SURYA boleh dibilang kalah *start* soal munculnya berita ini. Namun dengan pola editorial yang disaji-



kan, dengan *menjelaskan* (menjelaskan panjang lebar, pen.) sedetil mungkin jalannya cerita, *rating* Harian SURYA nomor satu di *online* tentang kasus Alif dan Ny. Siami. Bahkan mendapat ‘Penghargaan Nominasi Adiwarta Sampoerna’ yang diumumkan tanggal 13 Desember 2011 lalu.

Pada tulisan Ny. Siami, Harian SURYA mengangkat *micro people*. Pada pemberitaan awal, Harian SURYA menunjukkan betapa masyarakat tidak lagi punya nilai-nilai kejujuran, ketika mereka melakukan protes apa yang dilakukan Alif dan ibunya. Namun Harian SURYA juga mengkritisi, apa yang kemudian terjadi pada Ny. Siami ketika sudah menjadi figur-figur. Ada sesuatu yang juga bergeser pada dirinya, yaitu juga membuat masyarakat tidak suka. (Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanaan Harian SURYA, tanggal 13 Desember 2011)

Etika Redaksional Harian SURYA

Sebagai media massa, tentu saja ada peran *problem solver* yang harus dimainkan sebuah lembaga media di tengah berbagai gejolak sosial yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, apapun bentuk peran itu tentu saja harus berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai jurnalistik

Tidak bisa sebuah media mengabaikan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, manakala ada hak-hak dari masyarakat yang dicerderai. Namun, sebagai media, Harian SURYA berusaha tidak menutup mata manakala ada sesuatu yang sudah berlebihan atas gejolak tersebut. Sebagai media, Harian SURYA harus tetap proporsional, tidak larut dalam kepentingan tetapi bisa memberi pencerahan, menjelaskan duduk persoalan sesuai konteksnya.

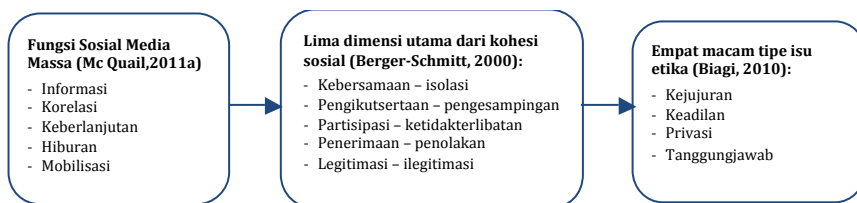
Di media massa manapun, redaksi selalu menekankan bahwa sebuah berita harus kaya narasumber. Karena itu, sebuah berita terkadang tidak cukup *cover both sides*, melainkan *all sides*. Hal itu juga selalu ditekankan pada reporter Harian SURYA. Praktikanya, kadang ini tidak mudah. Bukan karena tidak dijalankan, namun karena keterbatasan *space* halaman yang ada. Kerapkali, dalam sebuah berita, pihak Harian SURYA telah memiliki berbagai *angle* berita dari banyak pihak, namun karena *space* terbatas, maka bagian-bagian berita

tersebut dengan terpaksa tidak bisa dimuat.

Terkait kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam etika redaksional, selama ini Harian SURYA sudah mencoba menerapkan hal ini kepada seluruh awaknya. Tentu saja masih ada kekurangan di sana sini. Terkait masalah uang misalnya, beberapa karyawan telah diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika wartawan. Demikian juga tentang tanggungjawab, ada sanksi yang harus diterima manakala ada pelanggaran yang dilakukan. Semua ini semata-mata untuk menjaga agar kredibilitas lembaga terjaga (Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanaan Harian Surya, Desember 2011).

Analisis

Hubungan tegas antara karakteristik surat kabar sebagai media massa yang tidak hanya memiliki fungsi memberikan informasi, namun sekaligus sebagai pendorong kohesi sosial tanpa meninggalkan ketentuan hukum dan etika media massa pada peliputan konflik. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui skema berikut ini:



Sebagai surat kabar, Harian SURYA harus memenuhi fungsi sosialnya sebagai media. Pertama Harian SURYA harus mampu menyediakan informasi mengenai mengenai peristiwa dan kondisi dalam masyarakat utamanya mengenai beragam peristiwa konflik sosial yang muncul di wilayah Jawa Timur. Kedua Harian Surya harus mampu berfungsi sebagai korelasi dengan cara menjelaskan bahkan menafsirkan dan memberikan komentar atas makna peristiwa dan informasi, berkaitan dengan konflik sosial Harian Surya sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menyajikannya.

Ketiga, Harian Surya harus mampu menjalankan fungsi keberlanjutan yang berarti harus mampu mendorong dan memelihara kesamaan nilai terutama nilai-nilai kesatuan regional yang ada di Jawa Timur. Keempat, Harian Surya harus mampu menjalankan



fungsi menghibur yang berarti mampu menyajikan informasi untuk mengurangi tekanan sosial. Dan, fungsi yang terakhir adalah mobilisasi yang berarti Harian Surya harus mampu mengampayekan tujuan sosial yaitu kohesi sosial di masyarakat Jawa Timur.

Kelima fungsi sosial media massa tersebut sudah dimiliki sepenuhnya oleh Harian SURYA, tentunya langkah selanjutnya adalah fungsi Harian SURYA sebagai pendorong kohesi sosial. Dimana untuk memenuhi fungsi sebagai kohesi sosial, diperlukan lima dimensi dari kohesi sosial. Pertama, adanya pilihan kebersamaan atau isolasi. Dan Harian SURYA memilih adanya kebersamaan, ditunjukkan dengan sikap Harian SURYA yang berusaha tidak mengeksplorasi kasus Ahmadiyah sekadar *talking news*. Dengan tetap menampilkan figur kritis di dalamnya bahwa pemerintah telah gagal melindungi warganya.

Kemudian Harian SURYA juga lebih memilih pengikutsertaan dan penerimaan sekaligus melegitimasi sebagai tahap selanjutnya dari kohesi sosial. Di mana Harian SURYA mengemas berita dalam bentuk feature, menunjukkan bagaimana warga Ahmadiyah menjalankan Shalat Jumat, bagaimana sesungguhnya keyakinan setiap umatnya muncul di sana. Dengan demikian tidak ada penghakiman.

Tidak jauh pula dengan kasus sontek massal, walaupun Harian SURYA boleh dibilang terlambat memberitakan kasus tersebut dibanding media lain. Namun, Harian SURYA tetap memegang teguh peranannya sebagai pendorong kohesi sosial. Ditunjukkan dengan pola editorial yang disajikan, dengan memberikan penjelasan sedetil mungkin jalannya cerita dari awal peristiwa.

Dengan mengangkat Ny. Siami yang merupakan *micropeople* seharusnya diberikan penghargaan lebih atas sebuah kejujuran. Namun juga dampak selanjutnya, dimana Ny. Siami tidak lagi dihargai di lingkungannya dan dikucilkan. Kemudian Harian SURYA juga menunjukkan betapa masyarakat tidak lagi punya nilai-nilai kejujuran, ketika mereka melakukan protes apa yang dilakukan Alif dan ibunya. Harian SURYA juga mengkritisi, apa yang kemudian terjadi pada Ny. Siami. Dimana ada sesuatu yang juga bergeser pada diri Ny. Siami yaitu juga membuat masyarakat tidak suka atas tindakan yang dilakukannya.



Hal tersebut menunjukkan adanya kohesi sosial yang sudah diterapkan oleh Harian SURYA. Hingga akhirnya Harian SURYA menerima ‘Penghargaan Nominasi Adiwarta Sampoerna’ yang diumumkan tanggal 13 Desember 2011 lalu. Nilai-nilai kebersamaan, identitas figur konflik dan perasaan mereka turut diungkapkan. Kemudian adanya porsi setara yang diberikan antara pihak yang menjadi korban dan sebaliknya untuk memperoleh akses atau kesempatan dalam pemberitaannya.

Berikut juga dilibatkannya narasumber yang pro ataupun kontra dengan konflik tersebut untuk lebih memberikan penghargaan dan toleransi atas perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Juga keterlibatan institusi-institusi yang berperan sebagai mediator dalam konflik di masyarakat majemuk menjadi jembatan yang tidak luput dari perhatian Harian SURYA.

Dalam hal yang terkait dengan hukum dan etika media massa pada peliputan konflik, Harian SURYA tidak meninggalkan empat tipe isu etika yang menyertainya. Dimana terdapat nilai kejujuran, keadilan, privasi, serta tanggung jawab yang melingkupi sebuah pemberitaan. Harian SURYA telah berusaha untuk berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai jurnalistik tanpa mengabaikan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, manakala ada hak-hak dari masyarakat yang dicerai. Namun sebaliknya, apabila dinilai terdapat sesuatu yang berlebihan atas gejolak tersebut, Harian SURYA juga akan berusaha maksimal untuk tetap proporsional, dan tidak larut dalam kepentingan lembaga secara pribadi tetapi dapat memberi pencerahan. Sehingga Harian SURYA dapat menjelaskan duduk persoalan sesuai konteksnya dan berimbang.

Walaupun di tengah perjalanan pemberitaannya, Harian SURYA masih menemui kendala baik dalam hal *space* yang terbatas maupun karyawan yang melakukan pelanggaran atas etika redaksional. Pemberitaan yang berimbang, tidak hanya diterapkan menggunakan *cover both sides* namun juga *all sides* membuat Harian SURYA memiliki banyak *angle* pemberitaan dari banyak pihak. Namun, terlalu banyak *angle* pemberitaan tentunya tidak luput dari banyaknya *space* yang harus disediakan oleh Harian SURYA. Dan hal tersebut akhirnya berakibat dengan minimnya *space* yang dimiliki oleh Harian



SURYA yang mengharuskan dipangkasnya sebuah berita. Terpaksa tidak bisa dimuat.

Terkait kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam etika redaksional sekali lagi memang diterapkan secara ketat oleh Harian SURYA. Misalnya saja terkait masalah uang, beberapa awak media Harian SURYA diberhentikan karena melakukan pelanggaran etika wartawan. Sanksi tegas harus dijalankan untuk semakin memupuk rasa tanggungjawab tinggi atas nilai kejujuran dan keadilan. Juga tentunya untuk tetap menjaga kredibilitas Harian SURYA sebagai media massa yang memang bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu berkaitan dengan pemberitaanya.

Penutup

Mencermati kondisi di atas peran Harian SURYA sebagai media massa tidak lepas dari fungsi sebagai pendorong kohesi sosial. Dimana secara ideal harus mampu lepas dari kepentingan oknum-oknum tertentu untuk melahirkan berita berimbang demi kepentingan masyarakat secara umum dan sesuai dengan karakteristik sebuah surat kabar regional khususnya. §

Daftar Pustaka

- Berger-Schmitt. (2000). *“Social Cohesion as an Aspect of the Quality of Societies: Concept and Measurement”*. EuReporting Working Paper No 14.
- Biagi, Shirley. (2010). *Media/Impact Pengantar Media Massa*. Edisi 9. Salemba Humanika.
- Colletta, Nat.J. dan Teck Ghee Lim, Anita Kelles-Viitanen. (2001). *Social Cohesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity through Development*. Washington D.C.: The World Bank.
- Johan Galtung. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage.
- LittleJohn, Stephen W dan Karen A Fos. (2011). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Online:

<http://www.tempo.co/read/news/2011/06/15/079340849/Mendiknas-Minta-Konflik-Sosial-Sontek-Massal-Dirukunkan>. Diakses tanggal 3 Januari 2012. Pukul 11.26 WIB.



<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/03/03/13585/sk-pelarangan-ahmadiyah-gubernur-jatim-siap-hadapi-gugatan/>.
Diakses tanggal 3 Januari 2012. Pukul 11.20 WIB.

http://www.cprn.org/documents/15723_en.pdf . Diakses tanggal 4 Januari 2012. Pukul 16.12 WIB.

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/208589/18/1/Ulil-Abshar-Pers-Harus-Terus-Suarakan-Pluralisme>, Diakses tanggal 8 Maret 2011. Pukul 19.34 WIB.

Sumber lain:

Company Profile Harian Surya 2012

Wawancara Taufiq Zuhdi, Redaktur Pelaksanaan Harian SURYA, tanggal 13 Desember 2011



EKSISTENSI MEDIA SOSIAL DALAM ESKALASI KONFLIK TENTANG IRSHAD MANJI

*Novena Adekweis
Gisela*

Artikel ini memaparkan peranan media sosial, terutama *twitter* dan media *cyber* dalam eskalasi konflik Irshad Manji yang terjadi awal bulan Mei 2012. Pemahaman masyarakat dalam kasus ini masih kurang, namun mereka bisa menarik benang merah ketika dikaitkan dengan batalnya konser Lady Gaga.

Ditemukan fakta bahwa sudut pandang yang sama-sama didasarkan pada paham agama Islam tersebut saling bertentangan, terutama saat bersentuhan dengan nurani dan kekerasan yang menghiasi penolakan terhadap Irshad Manji.

Beberapa *public figure* pun menggunakan *account twitter* mereka untuk membagi pemikiran mereka mengenai perbedaan sudut pandang dalam kasus ini, walaupun tidak serta-merta menjurus ke nama Irshad Manji.

Kata kunci: Irshad Manji, twitter, website, Islam

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara multikultural dengan penduduk yang ramah. Itu dulu. Sekarang wajah negeri ini telah berubah akibat ulah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama untuk mengganggu umat dengan keyakinan yang berbeda dari mereka. Penolakan tersebut juga dialamatkan kepada penganut Islam yang memiliki pandangan berbeda dari Islam yang mereka kenal. Salah satunya adalah Irshad Manji, penulis buku *Allah, Liberty, and Love* asal Kanada yang juga Direktur *Moral Courage Project* dari *New York University*.

Irshad Manji adalah wanita keturunan India-Mesir yang lahir di Uganda tahun 1968, tercatat pernah menerima *Chutzpah Award* dari Oprah Winfrey untuk keteguhan pendirian dan keberanian. Kedatangan Irshad ke Indonesia bukan untuk yang pertama kalinya. Empat tahun yang lalu, Irshad mengunjungi Indonesia dalam rangka mempromosikan buku “Beriman tanpa Rasa Takut”, terjemahan *The Trouble with Islam Today: A Wake-Up Call for Honesty and Change*.

Pemikirannya mengenai persamaan hak wanita dan kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) terungkap dalam wawancaranya dengan Purwani Diyah Prabandari dari Tempo. Berikut salah satu cuplikannya yang dikutip dari majalah Tempo edisi 14-20 Mei 2012 yang juga bisa dibaca di tempo.co:

“Kritik yang paling sering dialamatkan kepada Anda adalah soal homoseksualitas.”

“Sebenarnya, hak gay dan lesbian lebih gampang diperoleh daripada hak perempuan. Hal ini karena ada ketakutan di kalangan masyarakat pluralis bahwa mereka akan dicap homofobia (antihomoseksual). Sayangnya, mereka tak khawatir dicap sexist (bias gender), merasa tak mengapa menggaji perempuan lebih kecil dibanding laki-laki untuk pekerjaan sama. Tapi saya tak akan berbicara banyak tentang ini.”

“Kalau begitu, Indonesia dalam krisis moral?”

“Faktanya. Saat ini, memang ada gerakan melarang Ahmadiyah. Juga ada aturan soal pakaian perempuan di beberapa daerah. Di sisi lain, banyak muslim moderat Indonesia yang tidak ingin bersitegang dengan ekstremis. Itulah yang disebut Martin Luther King Junior sebagai perdamaian negatif. Ketegangan memang tidak ada, tapi ketidakadilan tetap terjadi. Sebuah kemajuan tak pernah terjadi tanpa ketegangan.”



Alih-alih memperluas wawasan masyarakat Indonesia, Irshad Manji dituduh menyebarkan paham lesbian. Artikel terkait dimuat dalam sebuah portal khusus LGBT¹.

Runtutan Kejadian

Pembubaran pertama diskusi buku Irshad Manji terjadi pada tanggal 4 Mei 2012 di Serambi Salihara, Jalan Salihara No. 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kronologi peristiwa ini diposting oleh Goenawan Mohamad dalam *blog* “Membumikan Toleransi” yang bisa dibaca di <https://membumikantoleransi.wordpress.com/tag/goenawan-mohamad/>.

Bermula dari SMS permintaan penghentian paksa diskusi dengan Irshad Manji yang dikirimkan oleh Intel Polsek Pasar Minggu kepada Sekuriti Salihara, akhirnya diskusi terpaksa dibubarkan oleh Kapolsek Pasar Minggu, Kopol Adry Desas Puryanto, SH. Dengan alasan acara ini tidak memiliki izin RT, RW, dan Kepolisian, serta keberatan warga sekitar dan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam dan Forum Komunikasi Anak Betawi.

Hal serupa juga terulang di kantor Lembaga Kajian Islam dan Sosial di Yogyakarta, bahkan pihak Rektorat Universitas Gadjah Mada melarang pelaksanaan diskusi Irshad Manji tepat lima hari setelah peristiwa di Salihara. Klarifikasi pembatalan di Universitas tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Fakultas Hukum pada tanggal 15 Mei 2012 dalam diskusi berjudul “Pembatalan Diskusi Irshad Manji: Matinya Universitas dan Demokrasi” di Fakultas Hukum.

Acara ini menghadirkan moderator Mas Adip (LKIS) dan pembicara, antara lain: Zainal Abidin Baghir (Direktur *Center for Religious and Cross-Cultural Studies*), Ari Dwipayana (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM), Hasrul Halili (Dosen Hukum UGM), dan Kartika Nurohman (perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)².

Kendati demikian, diskusi di Universitas Islam Negeri Syarif

1 <http://ourvoice.or.id/id/2012/05/irshad-manji-dituduh-menyebarkan-faham-lesbian/>

2 <http://dianparamita.com/2012/05/15/diskusi-matinya-universitas-demokrasi-fakultas-hukum-ugm/#comment-14497>, diakses tanggal 4 Juni 2012

Hidayatullah, Ciputat, dan di Aliasi Jurnalis Independen Jakarta tetap berlangsung lancar.

Peranan Media Online

Salah satu ungkapan terkenal Marshall McLuhan adalah “*global village*” atau “desa global”, sebuah ide bahwa teknologi komunikasi baru akan memungkinkan orang untuk terlibat lebih banyak dengan kehidupan orang lain (Baran, 2012: 406).

Ditilik dari teori spiral keheningan oleh Elizabeth Noelle-Neuman (1976), media massa memiliki fungsi sebagai pembentuk opini publik. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapatnya dalam hubungannya dengan pendapat orang-orang lain. Lalu media massa memberikan interpretasi pada individu-individu itu tentang perbedaan yang sebenarnya dalam opini publik pada berbagai isu. Media mendukung opini-opini kelompok kiri dan biasanya menggambarkan kelompok tersebut dalam posisi yang dominan.

Teori spiral keheningan ini dibangun dengan empat unsur pokok, yaitu: media massa, komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, pernyataan individu tentang suatu hal dan persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Saat orang-orang pada akhirnya menerima opini publik, itu adalah hasil akibat pengaruh lingkungannya.



The image shows a screenshot of a Twitter thread. The first tweet is from St. Habibah Jazila (@St_Jazeela) posted 18 hours ago. The text of the tweet is: "@IrshadManji heard that that your session @Balai Soedjatmoko, Gramedia, Solo is canceled due to the protest?". Below the text is an "Expand" link. The second tweet is a reply from IrshadManji (@IrshadManji) also posted 18 hours ago. The text of the reply is: "@St_Jazeela There r protests. but I will NOT drop Solo event. If I have to show up *outside* instead of inside. so be it. Join me. @Balai". Below the reply text are interaction options: "Hide conversation", "Reply", "Retweet", and "Favorite". At the bottom of the tweet, there are statistics: "3 RETWEETS" and "1 FAVORITE", followed by three small profile picture icons.



Kesadaran media massa akan pentingnya penggunaan teknologi membuat mereka mengintegrasikan situs berita *online* dengan *account facebook* dan *twitter* yang lebih mudah diakses dengan *smartphone* atau *tablet PC*. *Facebook* dan *twitter* merupakan situs jejaring sosial yang digunakan untuk bersosialisasi dan sifatnya menjadi wajib bagi masyarakat.

Media Sosial: *twitter*

Perkembangan *citizen journalism* kini seolah dimasyarakatkan dengan kehadiran *twitter*, situs *micro blogging* dengan 140 karakter. Menurut Fred Cavassa, *twitter* termasuk ke dalam kategori *publish* bersama *WordPress*, *Blogger*, *Tumblr*, dan *Wikipedia*.

Berdasarkan penelitian *Semiocast*, lembaga riset media sosial yang berpusat di Paris, Perancis, ternyata jumlah pemilik *account twitter* di Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia dengan jumlah *account* 19,5 juta.

Dalam konflik Irshad Manji, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas pengguna *twitter* di Indonesia belum memahami kasus tersebut secara benar. Hal ini ditunjukkan dengan isi *tweet* berisi opini yang hanya mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap eksistensi Irshad Manji tanpa menyebutkan alasan konkrit dan sumber yang jelas.

tweet berikut ditemukan melalui pencarian di *twitter*. Kesemuanya merupakan postingan setelah tanggal 28 Mei 2012 dengan nama *tweeps* yang dihilangkan:

“@AKB48_FC lo ga liat baru2 ini gue getol ngetweet nolak Lady Gaga sama Irshad Manji? Hha.”

“Datangnya tokoh feminis lesbi Irshad Manji, rencana konser iblis Lady Gaga dan pembahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender?”

“Kecuali kalo mau promosiin lady gaga n irshad manji.. Mending diem! Senyap! Kalo rame entar digeruduk IFP hehe”

“Plg tdk udah 2 ekor #setan kapok dig ke Indonesia, irshad #manji & lady #Gaga (!) Islam liberal kalah telak, lumayan.”

“Ok, saya ingat Irshad Manji ni lelaki. Bwahahahahaha.”

Beberapa hari setelah konflik Irshad Manji, merebak isu batalnya konser Lady Gaga karena alasan keamanan yang dikemukakan

oleh pihak Big Daddy selaku promotor konser akibat ketidaksetujuan organisasi masyarakat berbasis agama bernama Front Pembela Islam (FPI). Konser Lady Gaga tentu saja menjadi isu yang lebih menarik daripada Irshad Manji, walaupun masyarakat awam telah menyadari persamaan antara kedua isu tersebut terletak pada pola pikir yang bertolak belakang antara anak muda. Penampilan Lady Gaga merupakan salah satu contoh kebebasan berekspresi. Sementara oleh penganut agama Islam radikal penampilan dan lirik lagu Lady Gaga dianggap vulgar dan mengandung ideologi pemuja setan.

Maka dari itu, *tweet* setelah pemberitahuan bahwa konser bertajuk “The Born This Way Ball” ini batal lebih banyak mengungkapkan keterkaitan antara kedua kasus tersebut.

Public Figure sebagai Opinion Leader

Salah satu kelebihan *twitter* dibanding media sosial lainnya adalah memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara orang yang di-*follow* dengan *followers*-nya. Penggunaanya pun bebas memilih *following* sesuai dengan minat masing-masing, semisal artis, pejabat, seniman, atau account tertentu yang dirasa bisa memberikan manfaat bagi penggunaanya.

Secara tidak langsung, mereka didaulat oleh warga *twitter* untuk menjadi *opinion leader*. *Opinion leader* memiliki ketertarikan pada isu tertentu dan memperoleh informasi yang belum tentu dipaparkan oleh media massa. Maka dari itu, *opinion leader* bisa jadi penggerak massa yang berpengaruh.

Berbeda dengan pengguna *twitter* biasa, beberapa *account public figure* menanggapi kejadian Irshad Manji, walaupun secara tidak frontal. Savic Alielha (@savicali), *founder* Khatulistiwa.net, memilih untuk berbagi pengetahuan dan pandangannya tentang agama Islam.

“Aku tidak terkesan dengan pemikiran Manji dan berada dalam posisi yang berbeda. Tapi terkait kekerasan, itu harus dilawan! Semua orang boleh punya pandangan beda. Di Islam pun ada banyak sekali aliran. Boleh kontestasi ide, tapi tak boleh intimidasi apalagi kekerasan.” (10 Mei 2012)



Serupa dengan Ahmad Dhani (@AHMADDHANIPRAST), pendiri Republik Cinta *Management* dan Hanung Bramantyo, sutradara film ‘?’ yang sempat menuai kontroversi. Mereka menyoroti konflik yang bersumber pada pelanggaran hak asasi manusia dari sisi agama.

“Apabila ada orang yang berkata: Manusia telah rusak! Maka dia adalah yang paling rusak diantara manusia – HR Muslim.” (10 Mei 2012)

“@IrshadManji Respect others people opinion is the way make a true harmony.” (13 Mei 2012)

Selain *twitter*, *blog* juga menjadi ajang untuk berbagi pemikiran kaum intelektualis. Salah satunya adalah artikel ‘Irshad Manji: Reformer Islam atau Suara Dominan Imperium?’ yang ditulis oleh Airlangga Pribadi, Kandidat Ph.D. *Asia Research Centre Murdoch University* dan Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya. Berlatarbelakang seorang pengajar, Airlangga mengkaji kasus Irshad Manji dari berbagai sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan dengan opininya sendiri dalam <http://indoprogress.com/2012/05/07/irshad-manji-reformer-islam-atau-suara-dominan-imperium/> yang diakses tanggal 5 Juni 2012.

Tulisannya meneropong sejarah Islam dan perbandingannya dengan pemahaman sesungguhnya di Indonesia dan di negara-negara Barat, kekurangan dari penulisan buku Irshad Manji, dan opini pribadi Airlangga yang sekali lagi, menentang kekerasan berbasis agama.

*“Islam sebagai agama akan mandek dan berhenti memberi kontribusi bagi dinamika peradaban manusia, ketika ummatnya berpretensi menjadi pembela Islam dan pembela Tuhan dengan membubarkan, melarang, membakar buku, dan mengejar-ngejar mereka yang berpikiran bebas atau berpandangan berbeda dengan arus utama pemikiran Islam. Sejarah Islam memberikan pelajaran bagi kita semua, seperti diuraikan dengan brilian oleh Sosiolog Spanyol Armando Salvatore dalam *The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism and Islam* (2007). Salvatore mengatakan, ketika ruang publik begitu terbuka, dan kalangan ilmuwan diberi kesempatan yang amat luas untuk mengembangkan ilmu dan filsafat di masa kekhilafahan Islam Andalusia, khasanah intelektual Islam menjadi tulang punggung dan memberikan sumbangan yang sangat menentukan bagi hadirnya masa pencerahan, era Aufklarung, dan terbitnya fajar peradaban modern. Demikian pula dengan warisan peradaban Islam pada dinasti Fathimiyah*

Syiah di Mesir, yang menyumbangkan peradaban akademik dunia dengan universitas Al-Azhar dan perpustakaan di Alexandria.”

“Irshad Manji gagal melihat persoalan Palestina dalam kaca mata problem profan duniawi, yakni sebagai problem penjajahan satu bangsa atas bangsa lainnya. Radar sekularisme Irshad Manji gagal menangkap problem sekular imperialisme Zionis Israel atas Palestina, sebagai problem kemanusiaan bersama.”

“Analisis Irshad Manji yang secara tergepoh-gepoh melakukan kritik terhadap tradisi Islam dan berdiri kagum memandang gemerlap Patung Liberty, di New York, Amerika Serikat, bukanlah suara pembebasan multikulturalisme demokratik.”

“Namun demikian, dengan segala kritisisme ini, saya membela hak Manji untuk berbicara dalam ruang publik Islam, sekaligus menentang tindakan fasis seperti yang diperagakan FPI. Di atas meja intelektual itulah kita bisa mengkritik dan menunjukkan kelemahan teoritis, serta posisi politiknya yang bias kepentingan imperialisme.”

Pemberitaan di Media Massa

Salah satu media yang aktif menginformasikan kasus Irshad Manji adalah Tempo. Melalui majalah Tempo, linimasa @TEMPOUpdate, @Tempodotco, @korantempo, @temponewsroom, yang masing-masing mengabarkan berita mengenai Irshad Manji walaupun isi beritanya sama.

Ditemukan juga beberapa informasi dari portal berita yang disadur oleh portal berita lainnya dan *blog* dengan massa yang lebih spesifik. Salah satunya adalah berita Irshad Manji dituduh menyebarkan faham lesbian yang juga dimuat dalam *Our Voice*, portal khusus LGBT.

Penutup

Internet beserta segenap fiturnya memang menawarkan berbagai kemudahan untuk mengungkapkan opini, mengekspresikan diri, dan mencari informasi seluas-luasnya. Namun, hal tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman etika menggunakan media sosial. Terutama ketika suatu kasus bersinggungan dengan isu-isu yang sensitif seperti SARA. §



Daftar Pustaka

Baran, Stanley (2012), Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5. Jakarta, Penerbit Erlangga

<https://membumikantoleransi.wordpress.com/tag/goenawan-mohamad/>

<http://dianparamita.com/2012/05/15/diskusi-matinya-universitas-demokrasi-fakultas-hukum-ugm/#comment-14497>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-studies/2246549-teori-spiral-silence/>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/02/072381323/Indonesia-Pengguna-Twitter-Terbesar-Kelima-Dunia>



KONFLIK SUPORTER SEPAK BOLA DALAM PEMBERITAAN MEDIA

Menyoal Kontribusi Media Massa dalam Konflik Suporter Sepak Bola di Indonesia

Fajar Junaedi

Konflik yang melibatkan suporter sepak bola adalah peristiwa yang memiliki implikasi negatif bagi publik. Konflik itu dengan mudah akan menjadi berita utama dalam pemberitaan media massa. Konflik yang lazim disebut sebagai hooliganisme justru kemudian menyebabkan konflik suporter sepak bola semakin merebak. Di Indonesia, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola juga semakin mengkhawatirkan, sebagaimana yang terlihat dari semakin maraknya kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

Sebagaimana premis dalam praktek jurnalistik “*good news is bad news*”, konflik dan terutama kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola menjadi santapan bagi media massa untuk dibingkai menjadi berita. *Paper* ini berusaha mengeksplorasi bagaimana media massa di Indonesia membingkai pemberitaan tentang konflik suporter sepak bola dengan menggunakan berita-berita di media massa sepanjang bulan Januari sampai dengan April 2012 sebagai obyek kajian.

Kata kunci: konflik antar kelompok, keanekaragaman masyarakat dan kebhinekaan.

Holiganisme di Eropa telah menjadi penyakit dalam berbagai pertandingan sepak bola. Salah satu puncak dari holiganisme di Eropa terjadi ketika suporter *Liverpool* secara brutal menyerang suporter *Juventus* dalam pertandingan Piala *Champion* (kini bernama Liga *Champion*) di tahun 1985.

Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Heysel, Brussel Belgia pada bulan Mei 1985 menjadi contoh dari kebrutalan suporter di Eropa dan dikenal dengan (Tragedi *Heysel*) sampai sekarang. Partai Final Liga Champions antara Juventus (Italia) melawan Liverpool (Inggris) yang dimenangkan 1-0 oleh Juventus harus dibayar mahal dengan tewasnya 39 orang *Juventini* (suporter Juventus), 38 warga Italia, dan 1 warga Belgia.

Sebelum pertandingan dimulai, terjadi bentrok di Heysel yang menewaskan 39 orang dan mencederai puluhan lainnya. Tragedi ini telah mendapat perhatian dari dunia internasional secara luas, terutama publik internasional yang menyoroti persoalan sosial di Inggris yang berbentuk perilaku kekerasan dan pengrusakan yang dilakukan oleh minoritas substansial dari suporter sepak bola di Inggris (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:362).

Tragedi Hillsborough (1989) dalam pertandingan sepak bola di Inggris yang menyebabkan puluhan nyawa melayang akibat kekerasan hooligan adalah fakta lain tentang merebaknya holiganisme dalam konflik suporter sepak bola.

Jika ditelusuri, kekerasan dan konflik yang terjadi antar suporter sepak bola bisa dilihat dari era dekade 1950-an sampai dengan 1960-an di Inggris. Media massa di Inggris mulai memberitakan suporter sepak bola yang terlibat kekerasan dengan suporter sepak bola lain. Puncak perhatian media massa di Inggris terjadi di tahun 1966 ketika media massa di Inggris mulai menaruh perhatian pada *gang* anak muda *holigan* baik di dalam maupun di luar stadion (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:365).

Pemberitaan media massa di Inggris, terutama di koran, mulai memberikan nominalisasi pada pelaku kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola dengan menggunakan angka ratusan (*hundreds*). Selain itu, pemberitaan koran-koran di Inggris tidak hanya menyoroti jumlah pelaku kekerasan dalam konflik suporter sepak bola, na-

mun juga mulai memberikan perhatian pada lokasi kekerasan yang bukan hanya terjadi di dalam stadion, namun juga di luar stadion, terutama di jalur-jalur yang dilalui oleh rombongan suporter sepak bola seperti stasiun kereta api, terminal bis, jalan ke arah stadion dan juga klub malam (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:365).

Koran-koran di Inggris sejak pertengahan dekade 1960-an mulai menggunakan retorika militeristik dalam pemberitaan tentang pertandingan sepak bola dan perilaku kerumunan suporter sepak bola dan sebagai hasil dari interaksi kedua hal ini, kekerasan yang terjadi dalam dunia sepak bola terpublikasikan dalam jumlah yang lebih banyak seiring dengan semakin meluasnya lokasi kekerasan suporter sepak bola (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:363).

Dekade 1960-an dianggap sebagai awal dari merebaknya kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Inggris. Holiganisme, dengan cepat menjadi berita utama dalam berbagai pemberitaan media massa di Inggris sejak dekade ini. Pemberitaan media massa yang cenderung memperbesar peristiwa, seperti dengan nominalisasi dan pemilihan kata-kata yang cenderung provokatif menyebabkan konflik di antara suporter sepak bola semakin meruncing dan sekaligus menjadi bom waktu yang setiap saat meledakan kekerasan antarsuporter sepak bola.

Bom waktu ini akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Sebagai akibat dari kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, sejak awal dekade 1970-an, polisi di Inggris memperbesar jumlah aparat yang diturunkan untuk mengawasi fans tamu yang datang pada pertandingan besar yang memiliki resiko tinggi terjadinya kekerasan (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:372).

Dekade 1970-an, sebagai akibat dari semakin merebaknya kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Inggris, media massa dan aparat keamanan mulai merilis daftar hitam suporter yang diidentifikasi lekat dengan holiganisme. Sebagai contoh, di tahun 1974, suporter dari klub *Manchester United*, yang mendapat julukan *Red Army* (Tentara Merah), dibingkai dalam pemberitaan media massa nasional Inggris pada peringkat teratas kekerasan suporter sepak bola.



Semakin merebaknya kekerasan yang dilakukan suporter sepak bola menyebabkan otoritas sepak bola, aparat keamanan dan media massa semakin frustrasi. Rasa putus asa ini diwujudkan dengan melabeli para suporter yang melakukan kekerasan dan vandalisme sebagai *wild animals* (binatang liar) (Williams, Dunning dan Murphy, 1986:371).

Penelitian yang dilakukan oleh John Williams, Eric Dunning dan Patrick Murphy dengan mengutip sebuah pemberitaan dalam Majalah *Observer Colour* Edisi 1 Desember 1974 ini memperlihatkan rasa frustrasi media massa dalam membingkai pemberitaan tentang holiganisme yang semakin mengkhawatirkan :

The Stretford End of Manchester United soccer ground is a kind of academy of violence, where promising young fans can study the arts of intimidation. This season the club installed a metal barrier between the fans and the ground. It resembles the sort of cage, formidable and expensive, that is put by a zoo to contain the animal it needs to accommodate but slightly fears. Its effect has been to make the Stretford terraces even more exclusive and to turn the occupants into an elite (Williams, Dunning dan Murphy, 1986: 371)

Fenomena “tabloidisasi” dari pers yang harus bersaing dengan televisi yang berkembang pesat menjadi faktor kunci dalam kontribusi media massa dalam merebaknya holiganisme di Inggris (Dunning, 2000:144). Fenomena ini bisa ditemukan dalam judul pemberitaan yang cenderung sensasional. Sebagai contoh adalah Tabloid *The Sun* yang membuat judul tentang terbunuhnya suporter sepak bola dalam perkelahian di dalam kereta dengan kalimat “*Murder on Soccer Train*” (Pembunuhan di atas Kereta Sepak Bola) pada *headline* *The Sun* tanggal 22 September 1976 (Melnick, 1986:4)

Gaya pemberitaan ala tabloid yang diwarnai dengan praktik jurnalisme kuning menyebabkan konflik yang terjadi dalam ranah suporter sepak bola semakin merebak. Riset yang dikerjakan oleh Merril J. Melnick tentang pemberitaan media massa di Inggris mengenai suporter di Inggris menemukan fakta bahwa media massa secara umum dan terutama pers, ada poin penting dalam membangun pandangan publik tentang holiganisme suporter sebagai gabungan dari manusia prasejarah dan Conan yang barbarian (Melnick, 1986:3).

Suporter Sepak Bola dan Kerusuhan di Indonesia

Di Indonesia, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebagaimana ditandai dengan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola. Sebagaimana umumnya yang terjadi di Inggris, kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia umumnya diawali dengan adanya konflik lama yang pernah terjadi.

Konflik ini umumnya adalah kekerasan dialami suporter sepak bola tertentu, dan kemudian pihak korban berusaha melakukan pembalasan pada pihak lain yang dianggap sebagai pelaku. Namun ada beberapa fenomena menarik dalam persoalan konflik yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia dibandingkan dengan konflik yang terjadi di luar negeri. Pertama, konflik yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak memiliki latar belakang ideologi yang kuat. Sebagai perbandingan adalah konflik suporter sepak bola di Italia yang beberapa diantaranya disebabkan oleh faktor perbedaan ideologi. Contohnya suporter sepak bola dari klub Livorno yang identik dengan ideologi sosialisme kiri sedangkan suporter klub Lazio identik dengan fasisme. Jika kedua klub ini bertemu, kekerasan menjadi rentan terjadi karena perbedaan ideologi yang melatarbelakanginya.

Kedua, konflik suporter sepak bola di Indonesia tidak memiliki dasar kuat dalam konteks ekonomi seperti perbedaan status sosial. Di luar negeri, seperti di Roma Italia, perbedaan status ekonomi menjadi alasan kuat terjadinya konflik. Di kota ini, suporter Lazio berasal dari kelas menengah ke atas, sedangkan AS Roma didukung oleh penduduk kota Roma yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Di Inggris, hooliganisme diekspor oleh suporter dari klub-klub yang berasal dari wilayah utara seperti Liverpool dan Manchester yang berlatar belakang kota industri dan pelabuhan ke selatan, terutama London, yang pendukungnya berasal dari kawasan metropolitan.

Ketiga, konflik suporter di Indonesia tidak memiliki latar belakang perbedaan kultur dan agama yang kuat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Sebagai ilustrasi adalah konflik suporter yang terjadi di Skotlandia yang melibatkan pendukung dua klub



terkemuka di negara ini, *Glasgow Cellics* dan *Glasgow Rangers* yang dilatarbelakangi perbedaan agama yaitu Kristen Protestan dan Katolik.

Walaupun tidak ada latar belakang ideologi, ekonomi serta kultur dan agama, namun faktanya kekerasan yang melibatkan supporter sepak bola di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Ini ditunjukkan dengan tingginya angka kematian supporter sepak bola yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di antara supporter sepak bola.

Bahkan dalam beberapa kasus ada fenomena yang menarik dalam konflik yang melibatkan supporter sepak bola di Indonesia, dimana konflik yang terjadi bukan hanya melibatkan supporter yang mendukung klub yang berbeda, namun juga supporter yang mendukung klub yang sama. Tabel di bawah ini akan memperjelas tentang konflik dan kekerasan yang melibatkan supporter sepak bola di Indonesia pada tahun 2012.

Tabel 1. Daftar Konflik Supporter Sepakbola di Indonesia tahun 2012

No	Tanggal	Kejadian
1	4 Januari 2012	Supporter klub PSIM Yogyakarta yang berbeda kelompok, Brajamusti dan Maident terlibat perpecahan yang berujung pada perkelahian di kawasan Kotagede Yogyakarta yang menyebabkan tiga orang supporter masuk rumah sakit akibat tusukan senjata tajam.
2	19 Januari 2012	Sesama supporter PSIS Semarang yang berbeda kubu, yaitu Panser Biru dan Snex terlibat perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Seorang supporter dari <i>Snex</i> meninggal dunia akibat perkelahian yang terjadi.
3	3 Februari 2012	Supporter Persija Wamena terlibat dalam perkelahian massal dengan supporter Persija Jakarta ketika pertandingan Liga Super Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Tidak ada laporan adanya korban yang mengalami luka serius dalam kerusuhan ini, namun kerusuhan ini sempat disiarkan langsung karena pertandingan yang memang disiarkan langsung oleh stasiun televisi anTV.

Lanjutan Tabel 1.

No	Tanggal	Kejadian
4.	6 Februari 2012	Suporter Persipura Jayapura terlibat perkelahian massal dengan suporter Persija Jakarta ketika pertandingan Liga Super Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Perkelahian terjadi ketika pertandingan masih berlangsung dan berlanjut sampai dengan pertandingan selesai di dalam dan di luar stadion. Belasan suporter terluka parah akibat kekerasan yang terjadi. Kerusuhan ini sempat masuk dalam siaran langsung di stasiun televisi AnTV yang menyiarkan langsung pertandingan.
5.	4 Maret 2012	Sesama suporter PSS Sleman yang berbeda kubu, yaitu Slemania dan Brigata Curva Sud (BCS) terlibat perkelahian di atas rumput stadion Maguwoharjo pasca pertandingan PSS vs Persepar Palangkaraya. Perkelahian dipicu oleh perpecahan dalam komunitas suporter PSS Sleman yang berujung saling provokasi di akhir pertandingan. Beberapa suporter dari kedua kubu yang terlibat tawur massal mengalami luka.
6.	11 Maret 2012	Empat suporter Persebaya, Bonek meninggal dunia akibat terjatuh dari kereta yang mereka tumpangi di Stasiun Babat Lamongan. Ada beberapa versi penyebab peristiwa ini. Versi pertama berasal dari kepolisian yang menyatakan korban meninggal karena kecelakaan akibat membentur palang dan kabel di atas jalur rel kereta yang melintasi Lamongan. Versi kedua berasal dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang didirikan oleh beberapa elemen Bonek yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat lemparan dari bawah serta ada kabel yang dilintangkan di atas jalur kereta. Versi ketiga adalah korban meninggal karena kehilangan konsentrasi karena ada lemparan dari sekitar jalur kereta sehingga tidak melihat ada kabel dan palang yang melintang.
7.	14 Maret 2012	Suporter PSIM yang berbeda kelompok, Brajamusti dan Maident terlibat perpecahan yang berujung pada perkelahian di kawasan Wirobrajan Yogyakarta menyebabkan seorang suporter yang berasal dari kubu Maident meninggal dunia.
8.	23 April 2012	Suporter PSS Sleman, Slemania dan BCS terlibat bentrok dengan suporter Persis Solo, Pasoepati dalam pertandingan di Stadion Maguwoharjo Sleman. Konflik fisik antara BCS dan Pasoepati berlanjut di luar stadion. Belasan suporter Pasoepati mengalami luka-luka akibat lemparan benda keras, beberapa diantaranya harus masuk rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif akibat luka yang parah. Sebuah sepeda motor dibakar dalam pertandingan ini.



Lanjutan Tabel 1.

No	Tanggal	Kejadian
9.	29 April 2012	Suporter BCS yang akan berangkat mendukung PSS kala bertanding di Rembang melawan PSIR Rembang terlibat bentrokan dengan suporter Snex di Semarang. Seorang pelajar SMP dirawat di rumah sakit akibat dikeroyok suporter BCS.
10.	29 April 2012	Suporter Pasoepati melakukan sweeping di daerah Purwodadi dan Gemolong, Sragen dengan menggunakan senjata tajam pada suporter BCS yang dalam perjalanan pulang dari Rembang pasca pertandingan PSS melawan PSIR.

Sumber : Pemberitaan di Kedaulatan Rakyat, Solopos, Joglosemar, Jawa Pos, Tribun Jogja dan Harian Jogja yang diolah kembali oleh penulis. Data ini hanya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta sampai bulan April 2012.

Tabel 1 di atas memperlihatkan adanya fenomena baru dalam konflik dan kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola di Indonesia. Pertama, konflik suporter sepak bola terjadi di kota-kota yang berdekatan. Kedekatan kota menyebabkan suporter tamu datang jumlah massif sehingga koordinasi menjadi semakin sulit.

Ini terlihat dari kekerasan fisik yang terjadi antara suporter Peris dan PSS yang *notabene* berasal dari kota Solo dan Sleman yang hanya berjarak sekitar 70 kilometer. Sebelum kerusuhan meledak, sebenarnya relasi antara suporter yang berasal dari kedua kota ini cukup baik. Hampir tidak ada konflik baik nonfisik maupun fisik yang sebelumnya melanda suporter dari kedua kota ini sebelumnya.

Kedua, kekerasan yang terjadi di antara suporter sepak bola melibatkan suporter yang berasal dari satu kota, dan bahkan mendukung klub yang sama. Konflik fisik yang terjadi di Sleman, Yogyakarta dan Semarang menjadi bukti tentang konflik suporter Indonesia yang khas. Umumnya di luar negeri, konflik suporter sepak bola melibatkan suporter yang mendukung klub yang berbeda, sedangkan di Indonesia konflik fisik yang bahkan menyebabkan jatuhnya korban jiwa terjadi di antara suporter yang mendukung klub yang sama. Persoalan ini menambah daftar panjang rumitnya persoalan konflik suporter di Indonesia.

Konflik Suporter dan Pemberitaan Media Massa

“*Bad news is good news,*” (Berita yang buruk adalah berita yang baik). Asumsi ini telah melekat dalam praktek jurnalisme, terutama di tengah persaingan media massa dalam meningkatkan oplah dan *rating*. Kompetisi yang semakin ketat baik antar media dengan format yang sama, seperti persaingan antar koran maupun persaingan antar media massa yang memiliki format yang berbeda, seperti persaingan media cetak, elektronik dan internet, yang semakin kompetitif menyebabkan asumsi ini semakin kuat menancap dalam praktek jurnalisme. Untuk menyebut sebuah peristiwa adalah *bad news*, peristiwa tersebut umumnya adalah peristiwa yang menabrak norma-norma sosial, seperti konflik terutama konflik yang berbentuk kekerasan fisik.

Konflik yang melibatkan suporter sepak bola bisa dilihat sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita, yang layak untuk diberitakan kepada khalayak. Konflik antar suporter sepak bola, terutama yang berujung pada kerusuhan dan kekerasan fisik, adalah berita yang berpotensi untuk menaikkan oplah dan *rating* karena khalayak dari berita seperti ini jelas segmentasinya yaitu suporter sepak bola yang terlibat konflik.

Pemberitaan tentang konflik fisik yang melibatkan suporter sepak bola bisa dilacak dari pemberitaan media massa di Inggris yang mulai memberi perhatian pada konflik yang berujung pada kekerasan yang melibatkan suporter sepak bola pada dekade 1960-an. Pemberitaan media massa di Inggris pada dekade ini dan dekade selanjutnya justru menyebabkan konflik yang melibatkan suporter sepak bola semakin meningkat ekskalasinya. Gaya pemberitaan yang diwarnai dengan sensasionalisme, sebuah gaya yang melekat pada “jurnalisme kuning”, dituding sebagai faktor yang menyebabkan media massa dituding memiliki kontribusi dalam penyebaran holiganisme di Inggris.

“Jurnalisme kuning” sendiri sebenarnya adalah istilah yang berasal dari Amerika Serikat, sebuah negara yang tidak memiliki tradisi kuat dalam dunia sepak bola. Istilah ini berasal dari kompetisi memperebutkan pasar antara Joseph Pulitzer, yang menerbitkan koran *New York World* dan William Radolf Hearts, yang di tahun 1887



menjadi editor dari koran *The San Fransisco Examiner*. William Radolf Hearts memasukan unsur sensasionalisme dalam pemberitaan di *The San Fransisco Examiner* melalui penekanan dalam penggunaan judul berita. Judul berita dicetak dalam huruf yang besar dan tebal serta dalam bahasa yang sensasional (Bittner,1986:41).

Kompetisi antara kedua koran ini semakin sengit tatkala William Radolf Hearts membajak ilustrator papan atas dari New York World, bernama Richard F. Otcault. Richard F. Otcault dikenal dengan lukisan kartunnya tentang seorang anak kecil yang memakai baju berwarna kuning, yang kemudian karena warna bajunya ini disebut sebagai “anak kuning” (*yellow kid*).

Perpindahan Richard F. Otcault ke New York Morning Journal diikuti dengan perpindahan karakter kartun ini. Sejak inilah persaingan ketat antar koran yang diwarnai dengan pemberitaan yang sensasional dan bahkan juga tidak bertanggung jawab mulai muncul dalam dunia pers. Pers seperti inilah yang disebut sebagai “jurnalisme kuning”, meminjam karakter kartun buatan Richard F. Otcault yang berpindah dari *New York World* ke *New York Morning Journal* (Bittner,1986:42).

Praktek “jurnalisme kuning” membawa implikasi pada pemberitaan media massa yang diragukan kredibilitasnya terutama karena berita yang disajikan secara sensasional. Praktek ini kemudian dengan cepat menyebar, termasuk ke Inggris dan juga Indonesia.

Konflik yang melibatkan suporter sepak bola menjadi peristiwa yang dengan mudah dikemas dalam pemberitaan yang sensasional. Salah satu contoh media massa melakukan praktek sensasionalisme ini terjadi ketika Karni Ilyas, *Editor in Chief* stasiun televisi berita *TVOne* dalam acara *Indonesia Lawyer Club* (ILC) pada Selasa 6 Maret 2012 membuat generalisasi pada suporter Persebaya Surabaya yang dikenal dengan sebutan *Bonek*. Dalam salah satu pernyataannya, Karni Ilyas menyebutkan “*Bonek* pulang kampung, menghancurkan rumah orang dan merampok makanan”.

Statement Karni Ilyas ini kemudian mendapat tanggapan dari Bonek dengan mendatangi kantor perwakilan *TVOne* di Surabaya serta mengirimkan pesan pendek sms serta surat elektronik (*e-mail*) pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Banyaknya



aduan yang masuk konon bahkan berhasil menjadi rekor pengaduan yang masuk ke KPI, dimana ada sekitar 2.400 sms pengaduan dan e-mail yang masuk ke KPI. Karni Ilyas pun akhirnya meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Di tahun 2012 tragedi kekerasan yang melibatkan supporter sepak bola terjadi di Lamongan ketika empat orang Bonek meninggal dunia akibat terjatuh dari kereta api pada tanggal 10 April 2012. Sehari setelah peristiwa ini terjadi, berbagai koran yang terbit sehari sesudahnya menempatkan peristiwa ini dalam berita utama di halaman pertama.

Dilihat dari judul-judulnya berita tentang meninggalnya Bonek di Lamongan memperlihatkan kecenderungan pembingkai media massa yang menempatkan Bonek sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan supporter lain, terutama dalam hal ini adalah supporter klub Persela Lamongan yang dikenal dengan sebutan *LAmania*.

Beberapa judul berita tersebut diantaranya adalah judul berita harian Kedaulatan Rakyat tanggal 11 Maret 2012 yaitu “Menumpang di Atap Gerbong, Dilempari Batu: 4 Bonek Tewas Jatuh dari KA”. Harian Kedaulatan Rakyat dalam kepala berita (*lead in*) berita utamanya tanggal 11 Maret 2012 membingkai tragedi Lamongan dengan kalimat sebagai berikut :

Lawatan Persebaya Surabaya ke Persibo Bojonegoro dalam lanjutan Indonesian Premier League (IPL), Sabtu (10/3) harus dibayar mahal. Empat pendukung Persebaya yang biasa disebut Bonek, meninggal dunia karena terjatuh dari kereta api setelah dilempari batu.

Harian Jawa Pos dalam *headline*-nya memberi judul berita pada tragedi Lamongan dengan kalimat “Ke Bojonegoro, Empat Bonek Tewas : Karena Kecelakaan dan Pelemparan”. Portal situs berita Tempo.co tanggal 10 Maret 2012 memberitakan peristiwa ini dengan judul “Empat Bonek Tewas, Polisi Lamongan Siaga Penuh”. Dalam salah satu paragraf dari berita ini, Tempo menulis sebagai berikut :

Empat Bonek itu meninggal saat menumpang kereta barang jalur Stasiun Pasar Turi menuju Semarang yang melintas Lamongan dan Bojonegoro. Empat Bonek ini meninggal karena luka akibat lemparan batu dan sejenisnya.



Kedua koran ini dan portal berita Tempo secara jelas membongkar bahwa meninggalnya *Bonek* disebabkan oleh pelemparan yang terjadi di Lamongan. Pemberitaan atas peristiwa Lamongan ini menimbulkan kemarahan di Surabaya. Warung-warung pedagang kaki lima di kota ini yang memakai label Lamongan mendapat serangan yang bisa diperkirakan berasal dari pendukung Persebaya yang marah akibat kematian empat orang Bonek di Lamongan.

Media telah menjadi bagian penting dalam penyebaran konflik suporter sepak bola di Indonesia. Salah satu kontribusi terbesar disumbangkan oleh media televisi yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola secara langsung (*live*). Dalam kultur sosiologis suporter sepak bola di Indonesia umumnya konflik akan semakin membesar ketika satu kelompok suporter melakukan provokasi pada suporter lain yang dianggap sebagai musuhnya melalui perilaku mereka di tribun ketika klub sedang bertanding. Perilaku ini bisa berupa *yel-yel*, lagu, spanduk dan baju serta *syal* yang dikenakan oleh suporter.

Sebagai contoh, ketika Persebaya bertanding melawan klub lain maka para *Bonek* akan menyanyikan lagu yang provokatif terhadap Aremania, suporter klub Arema dari Kota Malang yang menjadi rivalnya. Sebaliknya juga ketika Arema bertanding, para *Aremania* juga melakukan provokasi terhadap *Bonek*.

Ketika pertandingan yang dijalani kedua klub ini disiarkan langsung melalui stasiun televisi, suara *koor* para suporter akan terdengar jelas melalui pesawat televisi. Stasiun televisi tentu saja mengharapkan adanya *natural sound* (*natsound*) dari lapangan saat mereka melakukan siaran langsung dan sebagai konsekuensi negatifnya, provokasi dari suporter ikut ke dalam *natsound* yang didengar oleh publik secara luas, termasuk oleh suporter musuh yang dihujat.

Berikut ini adalah beberapa lagu dari Bonek yang dengan jelas memprovokasi suporter musuh:

“Iwak peyek, iwak peyek sego jagung// Sampek elek, sampek tuwek, sampek malek Persebaya tetap kudukung// Persebaya jago, Persebaya jago, Arema jxxxxx” (Ikan rempeyek, ikan rempeyek, nasi jagung// Sampai jelek, sampai tua, sampai mati Persebaya tetap kudukung// Persebaya jago, Persebaya jago, Arema jxxxxx).

“Arema jancok, suporternya banci-banci // Kalo siang Aremania, kalo malam Arewaria. Arema jxxxxx dibunuh saja”

Sebaliknya *Aremania* juga setali tiga uang dalam melakukan provokasi. Lagu-lagu berikut ini memperlihatkan provokasi dari supporter ini.

“Bapakku benci Bonek. Ibuku benci Bonek // Bonek jxxxxx dibunuh saja”

“Singone singo edan // Singo edan Aremania. Sekarang kamu harus menang. Bonek jxxxxx dibunuh saja” (Singanya singa gila // Singa gila Aremania // Sekarang kamu harus menang. Bonek jxxxxx dibunuh saja)

Lagu-lagu provokasi seperti ini dengan mudah ditemui dalam siaran langsung pertandingan sepak bola di Indonesia. Bahkan di kota-kota dengan kultur supporter yang kuat, seperti Surabaya dan Malang, anak-anak kecil sudah fasih menyanyikan lagu-lagu seperti ini. Di kota-kota lain, terutama di Jawa Tengah dimana supporter dari satu klub terpecah menjadi dua kelompok atau bahkan lebih, provokasi menjadi lebih rentan berubah menjadi konflik fisik yang menjurus pada kekerasan. Ini tidak lepas bahwa kelompok-kelompok supporter dari klub yang sama berada pada tribun stadion yang sama dan pada waktu yang sama ketika mereka mendukung klub. Alih-alih hanya berkonsentrasi mendukung klub, provokasi antar kelompok supporter menjadi rentan terjadi sehingga konflik fisik dengan mudah pecah baik di dalam maupun di luar stadion.

Konflik fisik yang terjadi di Semarang, Sleman dan Yogyakarta, dimana di ketiga kota ini kelompok supporter terpecah-pecah, membuktikan kerentanan konflik yang terjadi. Untungnya klub dari ketiga kota ini tidak bertanding dalam level kompetisi tertinggi, sehingga jarang disiarkan langsung melalui televisi. Namun demikian, media massa lokal terutama koran menjadi aktor kunci dalam memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi dalam konflik supporter di ketiga daerah ini.

Kasus kekerasan yang melibatkan *Pasoepati* dan BCS di Stadion Maguwoharjo dalam pertandingan PSS Sleman melawan Persis Solo diberitakan oleh Solopos, koran lokal terkemuka di Solo, terbitan 22 April 2012 dengan judul *”Pasoepati Bentrok: Dua Anggota Pa-*



soepati Masih Dirawat di Rumah Sakit”. Bagian pembuka dari berita ini ditulis demikian oleh Solo Pos :

Pasoepati masih belum dapat menerima uluran tangan pendukung Sleman, Brigata Curva Sud (BCS) setelah kedua suporter terlibat bentrok di Stadion Maguwoharjo Sabtu (21/4). Bentrok yang terjadi kemarin adalah hal yang terburuk dalam hubungan kedua suporter. Sejauh ini, masih ada dua anggota Pasoepati yang menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat diserang BCS.

Sebagai akibat dari keributan yang terjadi di Sleman, Pasoepati berusaha membalas dengan menghadang rombongan BCS yang pulang dari mendukung PSS bertanding di Rembang melawan PSIR Rembang. Sebelum ke Rembang, rombongan BCS terlibat bentrok dengan suporter di Semarang dan menyebabkan seorang anak SMP menjadi korban. Akibatnya, rombongan BCS berusaha menghindari jalur Semarang ketika pulang, namun usaha menghindari Semarang ini justru menyebabkan mereka hampir diserang oleh *Pasoepati*.

Harian terkemuka di Semarang, Suara Merdeka terbitan 30 April 2012 memberitakan keributan yang melibatkan BCS di Semarang saat perjalanan ke Rembang dengan berita berjudul ”Siswa SMP Dikeroyok Suporter PSS Sleman”. Dalam kepala beritanya, Suara Merdeka menuliskan sebagai berikut :

Malang benar nasib Zihan Amanoe (16). Ketika hendak pulang ke rumah dia dikeroyok puluhan orang yang diduga suporter PSS di Jalan Arteri Yos Sudarso, tepatnya di bundaran akan menuju Jalan Kaligawe kemarin sekitar pukul 10.00. Akibatnya siswa kelas IX SMPN 3 Semarang yang baru saja menyelesaikan Ujian Nasional (UN) itu harus mendapatkan perawatan serius di RS Sultan Agung.

Pemberitaan Suara Merdeka ini membingkai bahwa kerusuhan suporter bukan hanya melibatkan suporter namun juga melebar sehingga menyebabkan warga yang belum atau tidak teridentifikasi sebagai suporter menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.

Rombongan BCS dalam perjalanan pulang dari Rembang berusaha menghindari jalur Semarang dengan melewati jalur Purwodadi yang mengarah ke Kota Solo. Suporter *Pasoepati* yang masih

marah akibat kekerasan yang mereka alami di Stadion Maguwoharjo berusaha membalas dengan mencegat rombongan suporter BCS. Harian *Joglosemar* yang terbit di Solo pada tanggal 1 Mei 2012 menuliskan peristiwa ini dengan judul "Ribuan Pasoepati Adang BCS Sleman". Dalam kepala beritanya, *Joglosemar* menuliskan sebagai berikut :

Sekitar 2.000 laskar Pasoepati berkumpul dan memadati ruas jalan sekitar perempatan Gemolong sejak Minggu (29/4) pukul 17.00 hingga Senin (30/4) sekitar pukul 01.00 WIB. Meski bentrok yang dikhawatirkan tidak terjadi, kehadiran Pasoepati yang membawa batu, kayu dan sejumlah alat untuk bentrok itu membuat wilayah Gemolong mencekam selama 8 jam.

Berita yang ditulis oleh *Joglosemar* memperlihatkan adanya nominalisasi jumlah suporter yang terlibat dalam konflik dalam angka yang cenderung diperbesar dengan menggunakan kata "ribuan" dalam judul berita. Padahal dalam kepala berita yang angka yang lebih pasti disebut 2.000. Angka 2.000 ini juga masih dilematis, karena diikuti dengan kata "laskar", bukan "orang".

Dalam kultur suporter di Jawa Tengah dan Yogyakarta, laskar adalah sekumpulan orang yang terutama berasal dari satu daerah yang sama yang menginduk pada komunitas suporter yang lebih besar. Jadi angka "2.000" ini masih diperdebatkan, jika merujuk pada kepala beritanya, apakah 2.000 orang anggota laskar ataukah 2.000 laskar yang di setiap laskar masih terdiri dari beberapa orang.

Berbagai pemberitaan tentang konflik suporter sepak bola bukannya meredakan konflik, namun justru menambah daftar panjang konflik yang terjadi. Penyebaran konflik suporter melalui media massa memperlihatkan kemampuan media dalam melakukan *agenda setting*. *Agenda setting* menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer apa yang menjadi agenda dalam pemberitaannya menjadi agenda publik (McCombs dan Shaw dalam Griffin, 2000:360).

Secara lebih jelas, teori agenda setting menyebutkan bahwa media massa mempunyai kemampuan potensi dalam penyusunan isu-isu publik (Baldwin, Perry dan Moffit, 2004:193). Selanjutnya publik akan memberikan respons tidak pada peristiwa yang sebenarnya ter-



jadi (*actual event*), melainkan publik menanggapi dalam pikiran mereka. Oleh Walter Lippmann respons ini disebutnya sebagai respons itu sebagai *the pseudo environment* (Lippman dalam Griffin, 2000:360).

Pemberitaan media massa tentang meninggalnya Bonek di Lamongan akibat lemparan batu di sepanjang jalur kereta yang melintasi Lamongan yang memantik pembalasan di Surabaya berupa penyerangan terhadap pedagang kaki lima dari Lamongan memperlihatkan kemampuan media massa dalam membangun *agenda setting*. *Sweeping* yang dilakukan oleh Pasoepti terhadap rombongan BCS yang pulang dari Rembang di daerah Purwodadi juga bisa dilihat dari kerangka *agenda setting* media dalam membangun agenda publik, terutama di kalangan suporter Pasoepti di Kota Solo.

“Jurnalisme kuning”, sebuah praktek jurnalisme yang tidak diakui oleh media massa karena dianggap menurunkan kredibilitasnya, menjadi fenomena yang menggeliat dalam pemberitaan media massa terutama koran dan portal berita. Konflik antar suporter sepak bola yang menjurus pada kekerasan fisik menjadi realitas yang dengan mudah dikemas menjadi berita yang laku dijual, apalagi jika dibumbui dengan sensasionalisme. Nominalisasi yang berlebihan dengan menggunakan kata ”ribuan” memperlihatkan adanya kecenderungan sensasionalisme dalam praktek jurnalisme, sebuah kecenderungan yang melekat pada jurnalisme kuning. §

Daftar Pustaka

- Baldwin, John R ; Perry, Stephen D dan Moffitt, Mary Anne (2004). *Communication Theories for Everyday Life*. Boston: Pearson
- Bittner, John R. (1986). *Mass Communication : An Introduction 4th Edition*. New Jersey: Prentice Hall
- Dunning, Eric (2000). “Towards A Sociological Understanding of Football Hooliganism as A World Phenomenon”, dalam *European Journal on Criminal Policy and Research* Volume 8 Tahun 2000.
- Dunning, E. P. Murphy dan J. Williams (1988). *The Roots of Football Hooliganism*. London: Routledge
- Griffin, EM (2000). *A First Look at Communication Theory, 4th Edition*. Boston: McGraw-Hill Higher Education
- Melnick, Merril J (1986). “The Mythology of Football Hooliganism : A Closer Look at British : A Closer Look at The British Experience”, dalam *Jurnal International Review for Sociology Sport* Volume 21 tahun 1986



HERMENEUTIKA MEDIA Naratologi Konflik Agama dan Pluralisme dalam Sinema Indonesia

Ahmad Toni

Makna-makna humanis yang terwujudkan dalam semangat toleransi beragama dan berbangsa menjadi slogan ditengah-tengah gencarnya arus komunikasi media. Film “tanda tanya” ialah sebuah pembumian konsep multikulturalisme agama, agama dalam arti yang sangat luas, dimana konsep multikulturalisme merupakan detail antropologi dalam sistem sosial masyarakat Indonesia.

Adanya ruang-ruang yang kosong dalam sinema memposisikan penontonnya pada ruang kosong yang reflektif, dan makna yang optimal yang diwujudkan hermeneutika hadir memberikan makna tersebut. Titik pijak interpretasi subjektif melalui paradigm dan perspektif yang berbeda, kemajemukan pandangan inilah sebagai wujud keberagaman dan kekayaan yang berdasarkan kepada estetika, etika dan logika.

Film sebagai media propaganda diharapkan bisa memberikan sebuah upaya untuk membendung konflik-konflik agama yang terjadi di hampir setiap wilayah di negeri ini. Melalui propaganda inilah, media film dengan pesan intrinsik dan ekstrinsiknya mampu memenuhi ruang-ruang kosong daya imajinasi manusia yang disalurkan dengan daya refleksi setiap penontonnya.

Kata kunci: hermeneutika, naratologi, sinema, Tanda Tanya

Pendahuluan

Konflik agama yang hampir setiap hari menghiiasi layar televisi di rumah kita seakan-akan menjadi sebuah tontonan wajib yang hadir begitu saja di ruang keluarga, ruang makan, warung, tokoh, mal, dan ruang publik lainnya, kekerasan dan konflik agama yang disampaikan oleh media begitu vulgar dan nyata. Kehadiran konflik agama yang tanpa permisi dan meminta izin hadir di ruang *privacy* keluarga menjadi ancaman psikologis generasi muda bangsa, bahkan secara tidak sengaja dikonsumsi pula oleh anak-anak yang secara psikologis masih labil, karena media tidak mengenal keadaan dan jiwa penontonnya.

Media menempatkan khalayak pada konsekuensi logis yang cerdas, sementara khalayak menempatkan media pada kebutuhan dan bagian hidup keluarga mereka. Media dengan segala efek dan kekuatannya seba-gai instrumen perubahan sosial menjadi anomali-anomali yang berjalan beriringan dengan sistem nilai yang membawa masyarakat kepada kondisi tertentu yang nyaman.

Media massa, terutama televisi menayangkan konflik agama Ahmadiyah di Cikeusik Banten, peristiwa yang terjadi 6 Februari 2011 tersebut hampir setiap hari, setiap waktu, pagi, siang, petang dan malam dita-yangkan sebagai *headline* di hampir semua televisi nasional. Peristiwa penyerangan ormas Islam kepada Ahmadiyah tersebut kemudian melebar ke beberapa daerah, seperti Parung Bogor, Kuningan Cirebon, Ciampea Bogor, Makasar, NTB dan wilayah Jawa Barat lainnya.

Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani kasus ini menjadikan isu Ahmadiyah sebagai isu yang sensitif, dan negara tidak mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada waganya dalam menjalankan kehidupan beragama. Bahkan beberapa tahun yang lalu, konflik di Ambon yang terjadi secara besar-besaran yang tidak ditangani serius oleh pemerintah menjadi konflik yang dapat ditarik kepada konflik antar agama yang secara dominan menempatkan agama-agama samawi sebagai isu keyakinan yang mampu menimbulkan konflik semakin membesar dan tanpa penyelesaian yang jelas.

Media terkadang terlalu *over* dalam pemingkaian isu, wacana



dan faktualitas untuk memberikan dramaturgi aktualitas dan faktualitasnya. Bahkan beberapa konflik Ahmadiyah yang terekam kamera jurnalis dihadirkan dan disiarkan secara *gambang* tanpa pertimbangan etika dan estetikanya, dengan alasan dan berlindung pada prinsip-prinsip kaidah jurnalisme. Sebagai contoh: konflik pembakaran dan penganiayaan saudara-saudara muslim kita yang meyakini Ahmadiyah sebagai bagian dari keimanan mereka ditayangkan secara jelas dan nyata, berulang-ulang, sehari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Konflik lain yang menginformasikan konflik Ahmadiyah di beberapa daerah di Jawa Barat menjadi *hot issue* dan media secara terus menerus menjadikan peristiwa tersebut sebagai tema besar di hampir di setiap program acara siarannya.

Konsep Hermeneutika Media

Istilah hermeneutika media ialah sebuah dasar media, baik televisi, cetak, film, *cyber* dan lain-lain untuk menempatkan instrument pesan dalam meramu dan mengemasnya, pesan atau konten dengan semangat konsepsi kemanusiaan, konsep dan prinsip-prinsip pesan Ilahiyah yang bermakna kemanusiaan dan universal menjadi pondasi hermeneutik. Sebuah pesan Ilahiyah yang bisa diterima oleh kaum, golongan, suku, ras, dan agama manapun dan di manapun tempatnya. Dikarenakan pesan yang terkemas dan tersampaikan kepada khalayak tersebut ialah pesan-pesan yang bersifat religi (agama) yang membumi, dimana pesan tersebut berguna untuk mewujudkan sikap toleransi, saling menghargai dalam semangat pluralisme, karena pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda, dan perbedaan itu bukan untuk diperentangkan tetapi perbedaan itu untuk dihargai dan guna mewujudkan kebersamaan hidup.

Istilah hermeneutika, “baik secara ilmu maupun metode memegang peran penting dalam filsafat, hermeneutika dianggap sebagai metode ilmiah tertua, secara etimologis hermeneutika berasal dari kata *hermeneuein* (Yunani) yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. Hermeneutika dikaitkan dengan Hermes untuk menyampaikan pesan Ilahiyah, pada dasarnya medium yang digunakan ialah bahasa, jadi penafsiran disampaikan lewat bahasa.



Sementara karya sastra perlu ditafsirkan sebab disatu pihak karya sastra terdiri atas bahasa, disisi lain banyak makna yang tersembunyi di dalamnya. Fungsi utama hermeneutika ialah sebagai metode untuk memahami agama, pada tahap tertentu teks agama sama dengan teks sastra, dimana agama merupakan kebenaran keyakinan dan sastra ialah kebenaran imajinasi (Ratna, 2009: 44-45).

Sebagaimana dinyatakan Gadamer “hermeneutika adalah ontologi dan fenomenologi pemahaman, pemahaman teks masa kini dan masa lampau” (Ratna, 2009: 241). Artinya ada semacam pertemuan interpretasi masa lampau dengan konteks masa kekinian, dimana jika dikaitkan dengan media yang menjadi instrument penyampaian pesan Ilahiyah, hermeneutika ialah menerapkan konsepsi al-Qur’an dengan kontekstulasisasinya. Bagaimana al-Qur’an dimaknai dan ditafsirkan bukan berdasarkan kebutuhan masa lalu, namun penafsirannya dilakukan dengan konteks dan kebutuhan manusia pada masa sekarang dengan berpijak pada kejadian masa lampau. Ada semacam partisipasi dan keterbukaan wacana penafsiran dan proses dialektika yang kontinu untuk mendapatkan format interpretasi yang bersifat universal dengan semangat multikulturalisme.

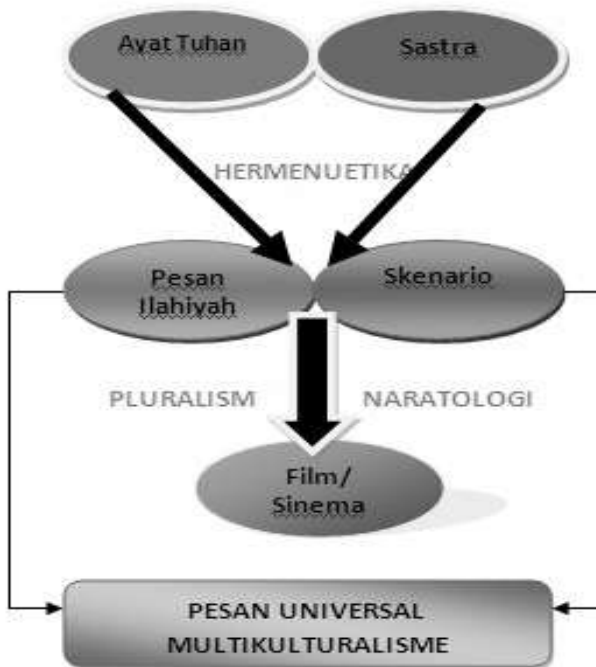
Dilthey dalam Ricoeur (2012: 217) “mengusulkan sebagai ilmu kemanusiaan (*Geistwissenschaften*), kesadaran historis, bahwa manusia ialah wujud historis yang hanya dapat hidup, dipahami, dan memahami secara historis, kebenaran bagi manusia selalu dalam konteks”. Sementara Ricoeur menyatakan bahwa “hermeneutika bukan diarahkan kepada teks melainkan diarahkan kepada realitas itu sendiri untuk menemukan eksistensi yang bersifat historis” (Ricoeur, 2012: 219).

Selanjutnya Gadamer (Ratna, 2009: 240-242) menyatakan bahwa “faktor dalam proses interpretasi ialah makna tidak diperoleh melalui metode, semisal memisahkan bentuk dan isi, hermeneutika memahami teks, isu utama kitab suci (agama) menyediakan ruang penafsiran, sebagai ruang kosong yang memerlukan penafsiran”. Berikut adalah elemen yang terdapat dalam hermeneutika:

1. *Bildung*: pembentukan jalan pikiran secara harmonis dimana latar belakang seorang penafsir akan mempengaruhi hasil pe-

- mikirannya, budaya, usia, dan tingkat pendidikan.
2. *Sensus communis*: istilah ini bukan dimaknai “pendapat umum” tetapi dimaknai sebagai pertimbangan praktis yang baik, sebuah pertimbangan kemasyarakatan atau hidup bermasyarakat.
 3. Pertimbangan: menggolongkan dan mengelompokkan hal-hal yang khusus atas dasar pandangan yang universal.
 4. *Taste* (selera): sikap subjektivitas yang didasari rasa instink, panca indera, kebebasan intelektual untuk meminimalisir dan atau menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan keindahan dan kebaikan.

Dari pengertian dan prinsip-prinsip dasar hermeneutika diatas maka hermeneutika media dijadikan sebagai sebuah istilah yang menjadikan media sebagai *tools* (alat), sebagai instrumen untuk menyampaikan pesan Ilahiyah (pesan-pesan ke-Tuhanan). Berikut ialah alur bagan yang menempatkan media sebagai instrumen hermeneutika:



Bagan diatas menunjukkan bahwa ayat-ayat Tuhan yang bersifat global dan sastra dalam kajian hermeneutika diposisi-

kan berdampingan yakni sebagai sebuah penempatan logis untuk menafsirkan kebenaran keyakinan dan kebenaran imajinatif yang tertuang pada dua elemen berikutnya yakni *content* informasi Ila-hiyah yang termanifestasikan dalam bingkai narasi skenario yang kemudian diproduksi untuk menyampaikan hasil interpretasi nilai-nilai universal yang mampu diterima semua kalangan.

Naratologi dan Konsep Pluralisme

Sebagai sebuah akibat dari struktur naratif, sastra memainkan peran yang kompleks terhadap berbagai jenis deskriptif, dimana ruang-ruang deskriptif ini memberikan suatu ruang kosong yang diterima dan diimplementasikan oleh pembaca, ada proses dialogis yang muncul pada ruang kosong tersebut sebagai bentuk kompromi keduanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ratna (2009: 239-240) “komplikasi antara *fibula* dan *sjuzet* (formalis pada umumnya), *histoire* dan *recit* (Genette), *story* dan *text* (Mieke Bal dan Rimmon-Kennan) menampilkan problematika ruang-ruang kosong yang harus dipecahkan oleh pembaca”.

Naratologi ditempatkan pada ruang postrukturalisme sebagai bidang ilmu yang mengusung sistem narasi (penceritaan) dan segala bentuk-bentuknya. Konsepsi narasi merupakan ruh dan konsekuensi dasar dari sebuah media film, film yang menempatkan narasi menjadi benang merah sistematika sinematografi mewujudkan alur penceritaan yang diterapkan dengan sistem dramaturginya, yakni *curiosity*, *suspance*, *konflik* dan *surprise*.

Tidak ada sistem sinema dan tata bahasa bersifat naratif, melainkan bahwa formula dasarnya ialah sintaksis, segala jenis hubungan subjek dan objek yang membangun kompleksitas didalamnya. Barthes (2007: 65) menyatakan bahwa “kebebasan mengkombinasikan kalimat-kalimat adalah kebebasan yang paling besar diantara kebebasan lain, sebab tidak ada lagi batasan di tingkat sintaksis (koherensi mental diskursus dalam tatanan linguistik)”.

Secara metodologis hampir sama persamaan kebebasan pengkombinasian sistem naratif kebahasaan dan sistem pengkombinasian sistem audio visual dalam narasi film, film yang termanifestasikan dari salah satu unsurnya, yakni sastra memberikan analisis



struktural cerita yang berasal dari pengembangan teori sastra yang bersifat struktural. Ada semacam eksistensi “*poetic*” yang terwujud dalam pesan *literer*, antropologis dan sosiologis.

Sistem formalisasi dalam tinjauan postrukturalis menurut tradisi Arsitotelian terbagi atas *mythos* dan *mimesis*. Sistem *mythos* adalah *plot* yang didefinisikan sebagai struktur cerita dengan alasan temporalitas dan kausalitasnya. Dalam struktur naratif, karya diorganisasikan oleh *plot* sebagai sistem kronologis kausalitas, kaum postrukturalisme menampilkan sistem ini kedalam dekonstruksi naratif sebagai penolakan atas peranan struktur yang tersistematiskan.

Menurut Genette (Ratna, 2009: 252) naratologi adalah “*histoire, recit* dan *narration*. *Histoire* adalah perangkat peristiwa sebagai naratif. *Recit* adalah wacana atau teks naratif itu sendiri. Sedangkan *narration* adalah tindak naratif yang menghasilkan teks”. Pola dialektikanya untuk menemukan ruang kosong yang terkandung di dalam sistem sinema ialah muncul atas tiga tindakan guna menganalisis ruang kosong tersebut, diantaranya adalah:

1. Analisis pernyataan narasi sinema, analisis ini menampilkan detail kekuasaan yang terjadi dalam suatu peristiwa narasi film yang ditampilkan, kontekstualitas narasi menjadi pondasi dalam menentukan pernyataan representasi tindakan, aksi dan gerakan pada sistem kekuasaan yang telah, sedang dan akan terjadi.
2. Analisis kontekstual narasi sinema, pola ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara dan atau kaum yang dominan menjadi referensi untuk mendukung keterkaitan sistem narasi film dengan sistem sosial politik yang sedang terjadi.
3. Analisis isi narasi sinema, untuk menempatkan ruang-ruang yang terjadi sebagai hubungan *scene*, *sequence*, babak yang memberikan gambaran dan deskriptif narasi penceritaan yang didukung dengan instrument dekonstruksi.

Sementara Gerald Prince yang memberikan konsep naratologi sebagai *narrate*. “*Narrate* dianggap *partner* komunikasi *narrator*, individu aktual dalam narasi nonfiksi, tetapi sebagai konstruk tekstual dalam fiksi” (Ratna, 2009: 255). Dalam konteks sinema konsepsi ini menempatkan sutradara film sebagai seorang *narrator* dalam proses



penceritaan kepada pembaca (penonton). Pada suatu saat penonton akan menentukan pesan yang tersurat dan tersirat dari sistem gambar dan audio untuk dimasukkan kepada ruang kosong dirinya untuk selalu diingat, diimplementasikan, ditransmisikan kepada orang-orang di sekitarnya. Penonton sebagai konstruks yang diajak bicara oleh sutradara melalui bahasa audio visual merupakan cara dan pola yang mendekonstruksi sutradara, sekaligus sebagai subjek yang memberikan fungsi-fungsi lain sesuai dengan pengalaman dan keadaan psikologis dirinya.

Ruang kosong yang dikonstruksikan oleh penonton menjadi proses dialogis wacana, dimana narasi merupakan wacana, dan wacana yang kontekstual dengan sistem sosial politik ke-Indonesiaan ialah multikulturalisme, dimana nilai-nilai pluralis dan kebhinekaan yang terkandung dalam pondasi bernegara ialah sebuah semangat kemajemukan dan konsep to-leransi didalamnya untuk saling menghargai dan menghormati serta saling memahami.

Wacana dalam film ialah unitas, kesatuan, transformasi dan regulasi diri yang termanifestasikan secara verbal, sinematik dan artistik. Dimana *action* dalam sinematik ialah sebuah tindakan yang membuka dan merangsang orang lain melakukan tindakan yang demikian. Dimana wacana yang disampaikan oleh film ialah bentuk kompetisi yang menopang kemampuan *implicit*, pengetahuan yang dalam (luas), dan hakikat filsafati makna-makna kemanusiaan yang terkandung dalam nilai pluralisme.

Konsep naratologi juga secara jelas dinyatakan oleh Barthes (2007:260) “sistem yang memungkinkan untuk memahami wacana (narasi) adalah kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode aksi dan kode kultural”. Hermeneutika dan media menjadi komponen yang secara kontinu memberikan kolaborasi produksi pesan-pesan dalam komunikasi sebagai sebuah prioritas terhadap penonton sinema, penonton film diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memaknai dan memformulasikan pesan dalam konteks yang berkaitan.

Sistem dialogis penonton ditunjukkan oleh pada sifat-sifat sosial sebagai konsekuensi film sebagai representasi wacana sosial dan dialogis keterwakilan suara yang termanifestasikan dalam narasi film



sebagai konsekuensi suara yang didengar oleh khalayak massa.

Konsep pluralisme secara umum diartikan sebagai gagasan yang menyatakan bahwa semua agama sama dan tidak ada yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Perbedaan agama hanya dianggap sebagai perbedaan persepsi dalam memahami hakekat ke-Tuhanan yang dalam implementasi keberagaman tersebut ditemukan banyak kesamaan.

Pluralisme dalam media film menjadi semangat media dalam menjalankan fungsi wacananya kepada khalayak. Sebagaimana dinyatakan oleh Kymlicka (2003: 18) “tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme ialah loyalitas bersama sebagai bentuk identitas nasional”. Selanjutnya Kymlicka menyatakan bahwa “suatu pandangan liberal mensyaratkan kebebasan di dalam kelompok minoritas dan kesetaraan antara kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas. Suatu sistem hak minoritas yang menghormati kedua batasannya (2003: 232).

Dalam konsepsi tersebut terkandung pola-pola toleransi antara mayoritas dan minoritas dalam berbangsa dan bernegara sebagai konsekuensi bertindak dalam sistem sosial. Makna toleransi ialah mewadahi kepentingan etnis, suku, ras dan agama sebagai elemen besar suatu negara. Grosby menyatakan bahwa “bangsa adalah komunitas kekerabatan, berbatasan secara spesifik, secara teritorial luas, komunitas kelahiran yang erat untuk sementara waktu”. Istilah komunitas merujuk pada tingkat kesadaran diri dan mengakui orang lain sebagai bentuk toleransi.

Konflik dan Hermeneutika

Konflik agama di Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur agama hanya dipahami sebagai sebuah kebenaran yang parsial dan bertumpu pada semangat pemahaman sepihak dalam historisitas kejayaan agama tersebut dan dipahami sebagai alat pemersatu semua makhluk yang bernama manusia tanpa ada upaya memahami pihak-pihak lain yang berseberangan ideologi dan keyakinan dengan golongan dan pengikut agama tertentu. Klaim kebenaran atas nama agama menjadi cikal bakal lahirnya gesekan-gesekan mental dan fisik yang *sensitive* yang melahirkan sejumlah kasus kon-



flik antar agama, dan konflik dalam agama itu sendiri.

Dalam konteks ke-Indonesiaan klaim kebenaran agama sebenarnya sah-sah saja, jika dilakukan dalam domain internalitas rumah ibadah, gereja, pura, vihara, kelenteng, masjid, yang tujuannya ialah menanamkan keyakinan kepada pengikutnya. Tetapi jika dilakukan dalam domain publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk akan menjadi sebuah kesalahan besar. Kesalahan yang mengarah kepada tindak anarkis dan kekerasan fisik serta penodaan keyakinan itu sendiri, yang mengalahkan rasionalitas.

Pemahaman fundamentalis agama jika dilakukan dalam domain publik ialah pemahaman yang bersifat universal, yang hakikatnya ialah nilai-nilai kemanusiaan, proses ini ialah bentuk interpretasi hermeneutik yang bertumpu pada nilai-nilai agama yang bersifat universal dan dapat dipahami dan dijalakan oleh semua pihak dalam bermasyarakat. Hermeneutika bukan lagi memandang drajat pemeluk agama lain lebih rendah dari pemeluk agama lainnya.

Konflik dan Media

Serangkaian konflik agama di Indonesia secara beruntun terus terjadi, nilai-nilai kemajemukan bangsa ini seakan-akan runtuh dengan kemunculan anarkisme ormas agama, kelompok fundamentalis agama, bahkan anarkisme yang ditimbulkan oleh kesalahan memahami nilai-nilai agama yang berakibat pada bentrok dan peristiwa tragis yang muncul dan dimunculkan atas nama agama. Perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap masjid dan Kampung Ahmadiyah di Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemboikotan dan pengusiran jemaat gereja di Bogor, dan aksi brutal dan *sweeping* jalanan di beberapa kota di Indonesia oleh orang-orang yang mengaku menegakan syariat Islam.

Media massa, koran, majalah, radio dan televisi yang berlandung dengan prinsip-prinsip aktualitas dan faktualitas jurnalistik berupaya berlomba-lomba menempatkan pemberitaan konflik agama sebagai sebuah pembahasan dan rutinitas isu yang menarik, menarik bagi khalayak, menarik bagi industri periklanan dan menarik untuk terus dibicarakan sebagai program *talkshow* yang mengundang se-

jumlah pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif negeri ini untuk menjadi narasumber utama. Media menjadikan isu konflik sebagai komoditas isu yang menarik iklan dan memberikan pendapatan lebih bagi industri media.

Pada hakikatnya, media massa ialah penjaga sistem sosial dalam menjadikan isu agama sebagai bentuk-bentuk persoalan bersama, dimana nilai positif dan negating media sebagai berikut:

- a. Merangsang khalayak memikirkan dan mencari solusi atas sejumlah peristiwa konflik agama yang sering terjadi.
- b. Media sebagai wahana diskusi dalam penanganan konflik agama di negeri ini dalam perspektif masing-masing agama.
- c. Media menjadikan konflik agama sebagai komoditas yang menghasilkan bagi lembaga media.
- d. Media menjadikan konflik sebagai hiburan yang menarik dan terformat dalam segmentasi tontonan khalayak.

Hermeneutika Naratologi Sinema

“Tanda tanya” merupakan film garapan Hanung Bramatyo yang menghadirkan konsep-konsep multikulturalisme dan toleransi beribadah, bermasyarakat dan bernegara. Konsep pembuahan nilai-nilai Ilahiyah terkemas apik dalam sederet gambar hidup produksi yang disutradarainya. Pesan Ilahiyah itu ialah bagaimana kita hidup dalam bingkai toleransi dan memahami dan menghargai kemajemukan. Dan konteks ayat Tuhan itulah yang berusaha untuk ditransmisikan kepada khalayak, dimana khalayak film ini ditujukan kepada masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan keadaan dan kehidupan yang plural.

Indonesia ialah sebuah negara yang terbingkai oleh kemajemukan, Indonesia merupakan bukti kebesaran dan nyata ayat Tuhan sebagai negara yang dihuni oleh suku-suku, bangsa-bangsa, untuk saling mengenal dan menghargai. Bangsa ini telah membuktikannya selama berabad-abad mewujudkan sikap dan semangat pluralisme, dimana nilai-nilai multikulturalisme dijadikan sebagai semboyan berbangsa dan bernegara yakni: *Bhinneka Tunggal Ika*, dimana banyak pihak mengartikannya sebagai “berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan”. Tujuan yang dimaksudkan ialah tujuan kerukunan dalam



keberagaman.

Film ini memberikan bingkai-bingkai pluralisme yang detail tentang suatu keadaan, suatu keadaan dan kondisi bangsa, dimana konsep konflik agama dan konflik sosial tumbuh akibat pemahaman nilai-nilai agama secara dangkal dan tidak mendalam, hakikat Islam sebagai sebuah agama ialah mengakui perbedaan dan kemajemukan serta sikap saling menghormati dan menghargai. Konsep ini dijadikan pondasi dalam berhubungan (*muamalah*) satu sama lain, kelompok dan berbangsa dan bernegara.

Islam secara jelas dan nyata mengakui persamaan derajat setiap manusia, dan tolak ukur kemuliaan manusia dinilai dengan bentuk takwanya kepada Tuhan. Artinya manusia tidak berhak untuk menilai derajat kebaikan dan keburukan, kedudukan, kelas dan sebagainya, jika manusia memposisikan diri sebagai manusia seutuhnya. Namun jika manusia berusaha untuk tidak mengakui konsepsi ini maka secara otomatis manusia berusaha memposisikan diri sebagai Tuhan, karena manusia sudah memerankan kendali dan peran Tuhan untuk menilai seseorang.

Sikap yang demikian inilah yang banyak menimbulkan konflik baik secara pemikiran maupun secara fisik, penafsiran ayat Tuhan diperlukan untuk bisa merangkul, mewadahi pihak-pihak, kelompok lain yang berkeyakinan lain. Hanung Bramantyo berusaha untuk mengkampanyekan nilai-nilai semangat pluralisme yang diambil dari konsepsi Al-Qur'an, sutradara memposisikan diri pada keadaan netralitas dari dan kepada agama manapun, yang memandang manusia dalam hakikatnya menyembah Tuhan.

Kritik terhadap agama besar di Indonesia menempatkan sutradara dalam bingkai toleran, konsepsi Islam sebagai agama yang toleran merepresentasikan kebesaran Islam bukan hanya dimiliki oleh penganutnya semata, melainkan harus bisa dirasakan oleh pihak-pihak lain yang secara nyata berada pada lingkungan Islam. Dengan demikian nilai-nilai Islam dapat dirasakan dan dinikmati oleh pihak dalam dalam membangun negara ini.

Kecaman terhadap kehadiran film ini yang dianggap mengganggu stabilitas kehidupan beragama sebenarnya tidak mendasar, bahkan nilai-nilai sekulerisme, pluralisme dan liberalisme yang di-



manifestasikan dalam narasi sinematiknya dianggap bertentangan dengan paham Islam. Pluralisme dimaknai dangkal oleh segenap ormas Islam, pluralisme dimaknai sebagai paham yang metoleransi terhadap pemikiran, agama, dan kebudayaan.

Semangat pluralisme sejati ialah suatu paham yang mewujudkan kepada setiap pemeluk agama tidak lagi menunjukkan agama yang diyakininya ialah agama yang paling benar, membenaran agama. Bukan berarti peraguan seseorang terhadap agama yang diyakininya sebagai satu-satunya kebenaran, tetapi kebenaran dalam pandangan pluralisme yang diambil dari paham Islam ialah sebuah kebenaran penganutnya dan kebenaran murni suatu golongan agama ialah Tuhan yang menentukan.

Sosok laki-laki yang terorganisir dalam kekuatan paramiliter Nahdlatul Ulama (NU) yang meninggal saat menjaga perayaan Natal di sebuah Gereja. Disinilah semangat hermeneutika agama dalam bingkai media mencoba merepresentasikan bahwa toleransi terhadap kaum minoritas di negeri ini harus dimanifestasikan secara dini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dilihat sebagai bentuk seremonial agenda kenegaraan dan keagamaan lainnya, tetapi terwujudkan pada setiap makhluk hidup atas nama kemanusiaan. Paham Islam sebagai paham mayoritas bangsa yang memahami nilai-nilai kemanusiaan, toleran, damai, dan tentunya mengusung paham kebangsaan dan kebhinekaan menjadi dasar kita sebagai bagian dari bangsa yang besar ini.

Bahkan sosok perempuan berjilbab dihadirkan sebagai seorang pelayan rumah makan (restoran-china) yang menjual menu daging babi dan ayam. Disinilah nilai-nilai toleran yang dimunculkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi membangun umat, hidup berbangsa bukan sekadar mencari harta tetapi ada sebuah kejujuran dalam dinamika keagamaan, dimana dinamika itu ialah toleransi kejujuran tentang agama masing-masing, halal dan haram, dan segenap instrumen yang berujung kedalam keadaan halal dan haram tersebut, baik alat memasak yang terpisah, piring penyajian dan lain-lain sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak keagamaan dalam bingkai kemajemukan dan kebhinekaan.

Bahkan seorang pemuda pengangguran yang beragama Islam



tetapi membutuhkan uang untuk menyambung hidup dan berperan sebagai Jesus dalam sebuah pementasan liturgi perayaan umat Kristiani adalah bentuk toleransi dan imbal balik keadaan, seorang ibu yang murtad dari Islam dan harus beragama Nasrani dengan anak kandungnya yang masih kecil beragama Islam, memberikan kasih sayang tanpa berusaha mengkotak-kotakan keyakinan anak dan ibu dalam sistem keluarga. Artinya Islam sebagai agama yang mengandung semangat paham toleran, pluralisme dan multikulturalisme ialah bersifat universal, dimana Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi umat agama lain, suku, ras, golongan lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Konsep kita sebagai negara pancasila-is termanifestasikan dengan pengakuan sila pertama dasar negara: “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dimana hakikat kita dalam hidup bernegara ini tertuang dalam pengakuan nilai-nilai toleransi beragama yang didalamnya mengakui jalan masing-masing menuju jalan Tuhan yang diakui masing-masing sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, ada suatu akomodir nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk tatanan nilai kenegaraan.

Konsepsi ini mewujudkan kesetaraan konsep Ilahiyah dalam pergaulan beragama yang berada pada bangsa Indonesia yang majemuk untuk memberikan rasa keamanan dan keyamanan dalam beribadat. Konsep negara kita ialah produk hermeneutika yang dihasilkan berdasarkan interpretasi konsep ke-Tuhanan yang bisa mengakomodir semua agama, dan konsep ketuhanan tersebut dapat diimplementasikan dengan nilai-nilai pembumian yang universal.

Penutup

Konsep hermeneutika sebagai *content* dari media film menempatkan nilai-nilai ke-Tuhanan sebagai nilai informasi dan pesan yang ditransmisikan sebagai bentuk karakteristik naratologi sebagai ciri khas *content* sinema untuk membendung konflik-konflik agama di Indonesia yang banyak diinformasikan media televisi. Hermeneutika media ialah sebuah istilah yang ditujukan kepada sinema



sebagai media yang mampu membawa misi pesan Ilahiyah, dimana ayat-ayat Tuhan yang bersifat universal mampu diimplementasikan dalam konteks dan situasinya, untuk bisa menjauhkan manusia dari pembenaran masing-masing agama yang berimbas pada konflik. Ayat-ayat Tuhan mampu dibumikan secara sadar dan diterima oleh semua golongan dalam konsistensi toleran yang hakiki sebagai hakikat dari semua ajaran agama di dunia.§

Daftar Pustaka

- Barthes, Roland, (2007), *Petualangan Semiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barthes, Roland, (2005). *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Barthes, Roland, Stephen Heath, (2010), *Imaji Musik Teks: Analisis Semiologi Atas Fotografi, Iklan, Film, Musik, Alkitab, Penulisan dan Pembacaan Serta Kritik Sastra*, Jalasutra: Yogyakarta.
- Grosby, Steven, (2011). *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kymlicka, Will, (2002). *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES
- Ratna, Nyoman Kutha, (2009). *Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratna, Nyoman Kutha. (2009). *Stilistika, Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



MEDIA, KONFLIK, DAN PEREMPUAN Pentingnya Media Ikut Mensosialisasikan UNSCR 1325

*Bonaventura Satya
Bharata*

Di mana posisi perempuan dalam konflik? Dalam banyak kasus, media lebih sering terjebak untuk memberitakan bagaimana perempuan menjadi korban konflik dan perempuan sebagai agen konflik terasa lebih menjadi topik yang seksi dibandingkan memberitakan perempuan sebagai agen perdamaian. Realitas perempuan sebagai korban dan agen konflik, terasa lebih memenuhi kriteria jurnalistik (baca: news values atau nilai-nilai berita) sehingga lebih layak diangkat sebagai berita ketimbang perempuan sebagai agen perdamaian. Padahal media memiliki peran besar untuk turut berpartisipasi dalam meredakan konflik.

Media dengan perspektif jurnalisme damai harusnya juga memberikan tempat yang memadai untuk mendeskripsikan realitas sosial yang berkaitan dengan resolusi damai, terutama yang berhubungan dengan perempuan. Apalagi kehadiran perempuan sebagai agen perdamaian juga dilindungi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB UNSCR 1325. Dengan pemberitaan-pemberitaan ini, media turut berkontribusi pada pemberdayaan perempuan yang selama ini masih banyak mendapatkan diskriminasi di masyarakat bahkan juga di media itu sendiri.

Kata kunci: media, perempuan, pemberitaan konflik

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari sisi etnis, suku, agama, dan bahasa, harus diakui bahwa Indonesia memiliki potensi konflik yang sangat tinggi. Pada era Orde Baru, tercatat beberapa konflik yang mengemuka, konflik antara pemerintah dengan PKI, yang ditandai dengan kontroversi masalah pembantaian massal (1965-1967), konflik antara pemerintah dengan Islam pada kasus drama pembajakan pesawat Garuda Woyla (tahun 1981) kasus Tanjung Priok (1984), dan kasus Warsidi-Lampung (1989), konflik separatisme baik di Aceh, Papua, dan di Timor Timur (yang sekarang disebut sebagai Timor Leste) yang memuncak pada Insiden Santa Cruz tahun 1991.

Pada era pasca Orde Baru, di beberapa wilayah Indonesia dilanda berbagai konflik. Seperti yang tidak dapat dilupakan adalah Konflik Ambon di Maluku (1999-2002) dan Konflik Poso di Sulawesi Tengah (1998-2005) yang merupakan konflik antar agama dan Konflik Sambas, Singkawang, dan Sampit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang merupakan konflik antar etnis (1999-2001). Belum lagi konflik yang bersifat sparatis, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Konflik yang terjadi tidak hanya memakan korban harta benda, namun juga korban jiwa manusia. Usaha meredakan konflik pun bukan berarti tidak ada. Tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga masing-masing pihak mau menerima resolusi atas konflik yang terjadi.

Di tingkat yang lebih luas pun seperti Asia Tenggara, beberapa negara tetangga Indonesia, seperti Phillipina, Thailand, dan Myanmar juga rawan sebagai daerah konflik. Di Phllipina, konflik panjang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir adalah konflik antara pemerintah dan bangsa Moro di Philipina Selatan. Kemudian konflik di Thailand terjadi antara pemerintah Thailand dengan pejuang Islam di Thailand Selatan, dekat perbatasan dengan Malaysia.

Sedangkan konflik di Myanmar melibatkan antara pemerintah junta militer dengan para penggiat atau aktivis prokemerdekaan. Selain itu, di negara tetangga Timor Leste yang merupakan mantan provinsi ke 27 dari Indonesia, juga terlibat konflik yang berkepan-



jangan pasca penyerahan kedaulatan dari PBB tahun 2001. Dengan demikian bila ditilik secara regional, wilayah Asia Tenggara ternyata banyak terlibat konflik, entah itu konflik antara pemerintah dengan masyarakat, konflik sparatisme, konflik antar umat beragama, dan konflik etnis.

Institut Pengembangan Demokrasi dan HAM (IPENDHAM) dan Lembaga Informasi Nasional tahun 2004 pernah melakukan penelitian secara khusus mengenai konflik-konflik yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut mengidentifikasi konflik ke dalam beberapa jenis dan bentuk, yakni (1) konflik kewilayahan atau separatisme (neo-nasionalisme) seperti yang terjadi di Aceh dan Papua; (2) konflik perburuhan, antara buruh dan pemilik modal, seperti yang terjadi di beberapa wilayah industri (Tangerang); (3) konflik agraria yang merupakan konflik yang bersinggungan dengan kasus kepemilikan tanah pertanian, seperti yang terjadi di Malang-Jawa Timur; (4) konflik agama dan etnis, seperti yang terjadi di Ambon dan Poso (konflik agama) dan Kalimantan (koffik etnis); dan (5) konflik kultural, yang merupakan benturan antar kebudayaan, seperti yang terjadi di kabupaten Buleleng-Bali. (Wahyono, dkk, 2004: 11-18).

Pertanyaan yang mengemuka dari meletusnya demikian banyak konflik ini adalah mengapa wilayah Asia Tenggara umumnya dan Indonesia khususnya, sangat rawan akan konflik? Paling tidak ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut (dalam Trijono, 2004: 2). Pertama, kebanyakan negara-negara Asia Tenggara terdiri atas beragam etnis dan agama. Seperti Indonesia misalnya, terdiri atas sekitar 200 etnis dan agama yang tersebar di lebih dari 300 pulau yang ada. Di Malaysia sendiri, masalah etnis dan agama menjadi isu sensitif yang mampu menaikkan ketegangan di negara tersebut, dan termanifestasi menjadi konflik kekerasan. Dengan demikian logika terjadinya konflik sangat sederhana, semakin banyak perbedaan yang terjadi semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik.

Alasan kedua, Secara alami, bila sudah terjadi, konflik relatif sulit untuk diredam atau dicarikan solusinya. Dalam banyak kasus, malah upaya-upaya penyelesaian justru memunculkan konflik yang baru. Konflik Poso merupakan contoh yang baik. Walau upaya per-

damaian sudah dilakukan pasca Malino I dan Malino II, namun bibit-bibit terjadinya konflik masih membayangi. Ketiga, dalam banyak kasus konflik etnis dan agama yang terjadi di wilayah Asia Tenggara merupakan manifestasi dari konflik kekerasan dan merusak. Kasus konflik Ambon disinyalir berawal dari konflik sederhana. Yang mulanya hanya perseteruan antara pemuda Batur Merah dengan pemuda Mardika, pada akhirnya membesar menjadi konflik antar agama.

Lepas dari semua bentuk-bentuk konflik yang telah disebutkan di atas, konflik selalu membawa korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Di Maluku Utara misalnya, antara periode waktu Oktober 1999 sampai dengan Maret 2000, tercatat 2004 orang tewas, 1769 terluka, dan 2315 orang hilang. Data ini semakin bertambah ketika digabungkan dengan wilayah Maluku yang lain. Tercatat 3000-4000 orang tewas sampai awal tahun 2000. Padahal konflik masih akan berlangsung sampai sekitar tahun 2002. Jumlah ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh dalam periode waktu yang sama di tahun 1989-1992 dan yang terjadi di Kalimantan Barat tahun 1997 (Klinken dalam Coppel, 2006: 130).

Kerugian harta benda juga tidak sedikit. Dalam konflik Poso-Sulawesi Tengah misalnya, pemerintah melalui Departemen Sosial melansir sampai dengan Oktober 2001, tercatat rumah tinggal yang terbakar sebanyak 5616 buah, rumah rusak berat 2414 buah, rumah ibadah terbakar 31 buah, fasilitas umum yang rusak 37 buah dan fasilitas lain yang terbakar 120 buah, serta kendaraan bermotor tercatat 70 buah yang dibakar (Huda Mangun dalam Jurnal Perempuan, 2002: 39).

Perempuan di Arena Konflik: Di Mana Posisinya?

Satu pertanyaan yang selalu menggeliat ketika mencermati terjadinya konflik, adalah di mana posisi perempuan dalam konflik? Dari beberapa literatur, didapatkan informasi bahwa ada beberapa posisi perempuan dalam konflik :

1. Perempuan sebagai korban. Dalam banyak laporan penelitian dan literatur disebutkan bahwa posisi perempuan sebagai kor-



ban menempati posisi teratas dari semua posisi yang ada. Seperti yang terjadi pada konflik bersenjata di Aceh, disebutkan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang sering menjadi korban pada konflik. Kehilangan suami dan keluarga, pengalaman kekerasan seksual (mulai dari pelecehan seksual, perdagangan seksual, sampai dengan pemerkosaan), dan penyiksaan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan dalam konflik (Sahardin dalam Jurnal Perempuan, 2002: 12).

Kemudian juga yang terjadi pada konflik Poso-Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, sampai dengan kekerasan seksual. Uniknya kekerasan yang terjadi tidak hanya berlangsung di ruang publik namun juga berlangsung di ruang domestik¹. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berlangsung di masa-masa terkini. Menilik pengalaman masa lalu, seperti pada kekerasan massal (baca: pembantaian) tahun 1965-1967 terhadap orang-orang yang dituduh PKI, perempuan-perempuan yang dituding sebagai anggota PKI ternyata juga mengalami kekerasan luar biasa, seperti penyiksaan dan kekerasan seksual².

Untuk kasus luar negeri, yang paling dekat adalah konflik yang terjadi di Timor Leste pasca jajak pendapat tahun 1999 lalu. Di sini perempuan mengalami penderitaan luar biasa sebagai korban konflik. Dikatakan bahwa perempuan menanggung derita atas segala pelanggaran yang dilakukan semasa konflik, baik secara langsung maupun tidak. Perempuan ditolak menentukan nasib mereka sendiri, dibunuh, dilenyapkan, dipindahkan, kekurangan makan, ditahan, disiksa, dan disidang dengan tidak adil. Mereka juga menderita kehilangan hak ekonomi dan sosial dalam hal makanan, perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Perempuan juga menderita secara tidak langsung. Penahanan, kecelakaan atau kematian suami atau anggota

-
- 1 <http://www.undp.or.id/programme/cpr/documents/PDA/Thematic%20Assessment%20Report/Women%20and%20Peace%20Building/Gender-Final-%20Kajian%20Tematis-INA.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2009
 - 2 lebih lengkapnya bisa dibaca di Nadia, 2008

keluarga juga membuat perempuan menjadi korban karena meningkatkan kerentanan dan beban mereka³.

2. Perempuan sebagai agen konflik, maksudnya adalah perempuan justru aktif terlibat dalam prosesi konflik. Bersama kaum laki-laki, perempuan ikut aktif terlibat dalam konflik, entah berperan sebagai pejuang atau tentara, penyedia logistik, dan pelindung keluarga ketika berlangsungnya konflik. Pada kasus Aceh, dikenal adanya barisan *Inong Balee*, yang merupakan kesatuan tentara perempuan yang juga aktif melakukan perlawanan terhadap pasukan TNI (Sahardin dalam Jurnal Perempuan, 2002: 21).

Kemudian di Poso dan Maluku Utara, memiliki istilah *kombatan*. *Kombatan* di antaranya beranggotakan para perempuan yang bertugas menjadi pelindung kombatan laki-laki pada saat terjadinya konflik. Perannya yang lain adalah mengorganisasi perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan tempat perlindungan yang aman, menyediakan logistik dan pasokan (seperti makanan dan obat-obatan), serta memberikan dukungan moral untuk para *kombatan* laki-laki. Di Maluku Utara, terdapat pula Laskar Mujahidah yang menyediakan dukungan medis, logistik, dan spritual kepada Laskar Mujahidin⁴.

3. Perempuan sebagai agen perdamaian, maksudnya adalah kaum perempuan ikut aktif dalam proses penyelesaian konflik dan pemulihan pasca konflik. Untuk ini memang membutuhkan beberapa prasyarat, seperti adanya kesempatan bagi perempuan untuk ikut ambil bagian dan aktif sebagai pengambil keputusan dalam perundingan konflik dan adanya kesempatan bagi perempuan untuk turun langsung untuk meredakan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

Namun sayangnya tidak banyak data yang menunjukkan keterlibatan aktif kaum perempuan dalam proses perdamaian ketika terjadi sebuah konflik di Indonesia. Artinya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih sangat terbatas

3 <http://www.cavrtimorleste.org/updateFiles/indonesian/Perempuan%20dan%20Chegal.PDF>, diakses tanggal 24 Maret 2009

4 <http://www.undp.or.id/programme/cpr/documents/PDA/Thematic%20Assessment%20Report/Women%20and%20Peace%20Building/Gender-Final-%20Kajian%20Tematis-INA.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2009



sifatnya. Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) bekerja sama dengan *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dan Pusat Pengembangan Masyarakat dan Pendidikan (CCDE) untuk konflik Aceh, disebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian konflik Aceh masih sangat terbatas. Dan ini tidak hanya terjadi pada pelaksanaan perdamaiannya saja, namun sudah terjadi pada proses perundingan perdamaian antara pemerintah RI dan GAM (CMI-UNIFEM, 2006: 27).

Dalam kasus konflik Poso juga terjadi hal serupa. Keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian walaupun ada tetapi tetap saja masih sangat terbatas. Keterlibatan perempuan dalam perundingan Deklarasi Malino menunjukkan hanya ada empat perempuan yang terlibat. Selebihnya didominasi oleh kaum laki-laki yang datang dari kalangan elit pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama⁵.

Media di Arena Konflik : Apa yang Sudah Dilakukan untuk PEMBERDAYAAN PEREMPUAN di Wilayah Konflik?

Pertanyaan menggelitik berikutnya adalah bagaimana dengan peran media di arena konflik? Pertanyaan lebih jauhnya yang berkaitan dengan permasalahan perempuan dan konflik, apa yang sudah dilakukan oleh media untuk pemberdayaan perempuan di wilayah konflik? Dalam tataran ideal, media sebagai ruang publik harusnya mampu untuk berperan aktif sebagai resolusi konflik. Artinya dengan adanya media, konflik seharusnya dapat diredakan. Ini dapat terjadi bila media berhasil memposisikan diri sebagai aktor yang memediasi pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam banyak kasus konflik, salah satu kesulitan terbesar adalah semakin terbatasnya akses-akses komunikasi yang dapat memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Kondisi masyarakat yang berkonflik umumnya akan tersegregasi (menjadi terpisah secara geografis akibat konflik). Ini tentu menyulitkan pihak-pihak yang berkonflik di masyarakat tersebut untuk saling berkomunikasi satu sama lain guna

5 <http://www.undp.or.id/programme/cpr/documents/PDA/Thematic%20Assessment%20Report/Women%20and%20Peace%20Building/Gender-Final-%20Kajian%20Tematis-INA.pdf>, diakses tanggal 24 Maret 2009

mencari solusi atas konflik yang terjadi. Di sinilah sebenarnya peran sentral dari media massa. Media dapat berperan sebagai penghubung atau sebagai jembatan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik di masyarakat.

Namun demikian beberapa penelitian menunjukkan fakta yang sebaliknya, bahwa media sering kali terjebak untuk turut serta memprovokasi terjadinya konflik lebih lanjut. Konflik justru semakin membesar karena kehadiran media. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pada tahun 2001 dan 2002 melakukan beberapa penelitian yang berkait dengan bagaimana peran media di wilayah konflik, seperti di Ambon (Maluku), Sampit (Kalimantan Tengah), dan Sambas (Kalimantan Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa seperti surat kabar dan radio, gagal mempertahankan posisi netralnya di tengah konflik. Media akhirnya terseret arus konflik dengan berpihak pada salah satu pihak yang tengah berkonflik.

Kasus pada konflik Ambon (Maluku) di tahun 1999-2002, Eriyanto (2003 : 187) menunjukkan bahwa akhirnya media ikut larut dalam suasana konflik. Walaupun keikutsertaan media pada wilayah konflik ini lebih terutama disebabkan masalah teknis.

Pada awal konflik, media di Ambon sebenarnya relatif netral memberitakan konflik yang terjadi. Jurnalis di media-media Ambon tidaklah datang dari aktivis partai ataupun agama. Mereka yang berprofesi sebagai jurnalis bukan ingin mengobarkan kebencian melalui media. Namun karena kemudian eksalasi konflik yang terjadi semakin membesar dan masyarakat mulai tersegregasi pada dua wilayah yang terpisah, mulai ada kesulitan bagi jurnalis untuk melakukan peliputan konflik.

Belum lagi ancaman yang dihadapi oleh jurnalis media untuk meliput konflik juga tidak bisa dikatakan ringan. Ancaman tertembak saat meliput dan tidak adanya jaminan keselamatan untuk keluarga dan tempat tinggal menyebabkan jurnalis sulit untuk bersikap netral dalam konflik. Muara akhirnya, media justru memprovokasi konflik lebih lanjut.

Posisi media dalam konflik Ambon menjadi semakin unik ketika diketahui bahwa dua media yang saling bertikai tersebut, yakni Suara Maluku dan Ambon Ekspes, ternyata dimiliki oleh korporasi



media besar nasional yang sama. Ini terjadi karena kesulitan yang dialami oleh sebagian jurnalis dari salah satu kelompok yang bertikai, yakni kesulitan untuk mengakses kantor media Suara Maluku. Posisi kantor media tempat mereka bekerja berada di wilayah kelompok konflik yang berlawanan. Ini tentu akibat segregasi yang terjadi di masyarakat ketika konflik berlangsung. Otomatis jurnalis-jurnalis tersebut tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi kehidupannya. Untuk mengatasi masalah ini, pihak korporasi media yang memiliki media tersebut, berinisiatif mendirikan media baru (Ambon Ekspres) sebagai wadah untuk para jurnalis tersebut.

Sampai di sini permasalahan selesai? Solusi yang diambil ini justru tidak menyelesaikan masalah konflik. Memang benar bahwa jurnalis-jurnalis yang awalnya kehilangan sumber penghasilan, berhasil mendapatkan pekerjaannya kembali, namun kehadiran media baru tersebut pada akhirnya memperparah konflik yang terjadi. Karena dengan demikian, pada periode berikutnya, muncul dua media yang saling berlawanan dan saling memprovokasi konflik. Konflik bukannya mereda, sebaliknya justru semakin membara.

Kasus konflik di Sampit (Kalimantan Tengah) dan Sambas (Kalimantan Barat) tahun 2000-2001 tidak jauh berbeda. Media yang dalam hal ini adalah surat kabar, pada mulanya bersifat netral. Media berusaha untuk mengakomodasi secara memadai pihak-pihak yang berkonflik. Media pun berupaya untuk tidak ikut dalam arus konflik. Namun seiring dengan berjalannya konflik, media akhirnya kesulitan untuk mempertahankan netralitasnya. Menjadi semakin unik ketika media-media Kalimantan yang bergabung dalam korporasi media besar nasional yang sama, justru memiliki suara yang saling berbeda. Ketika media yang satu terlihat dingin memberitakan konflik, media yang lain justru sangat berapi-api (Eriyanto, dkk 2001: 149).

Indikasi bagaimana peran media dalam arena konflik juga terdapat dalam kasus-kasus konflik di luar negeri. Seperti kasus di Rwanda (Afrika) dan Yugoslavia (Eropa). Dalam kasus Rwanda tahun 1990-1994, media radio berperan besar untuk semakin mengobarkan konflik dalam bentuk *genocide* (pembunuhan massal) ter-

hadap minoritas suku Tutsi oleh suku Hutu. Ironisnya media di sini memang sengaja dibentuk oleh sekelompok masyarakat Suku Hutu dan mendapatkan restu dari pemerintah yang sedang berkuasa. Artinya pemerintah memberikan dukungan bagi suku Hutu untuk dengan sengaja melakukan *genocide* terhadap minoritas suku Tutsi dan dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitasi lembaga media radio. Tercatat lebih dari setengah juta orang dari minoritas Tutsi menjadi korban pembantaian yang kejam Suku Hutu⁶.

Eriyanto (2003 : 185) menuturkan di Yugoslavia pada tahun 1990-1991 juga terjadi hal yang serupa, *genocide* warga Bosnia oleh etnis Serbia. Sama persis dengan yang terjadi di Rwanda (Afrika), pemerintah etnis Serbia memberikan dukungan warga etnis Serbia untuk melakukan *genocide* terhadap warga Bosnia melalui siaran televisi pemerintah. Televisi Serbia menayangkan hal yang buruk dan menyebarkan prasangka mengenai etnis Bosnia.

Salah satu penggambaran yang dilakukan dengan menghubungkan antara Kroasia dan Bosnia dengan *kamp* konsentrasi Nazi Jerman di era Perang Dunia II. Selain itu dikampanyekan pula warga Kosovo yang sering memperbudak perempuan dan anak-anak. Pesan media ini seolah memberikan legitimasi bagi pemerintah di bawah Slobodan Milosevic melakukan *genocide* terhadap etnis Bosnia.

Melihat deskripsi di atas, jelas belum banyak atau bahkan bisa jadi belum ada yang dilakukan oleh media untuk turut melakukan pemberdayaan perempuan di arena konflik. Ketika media justru terlibat di dalam arena konflik, bisa dipastikan pesan media yang disampaikan akan terus dan massif bercerita tentang konflik yang berlangsung. Kemasan beritanya pun terkesan justru memprovokasi konflik.

Sudibyo (2000: 173) mengidentifikasi kemasan berita konflik selama konflik Ambon berlangsung. Pengemasan dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui gaya bahasa metafora, sarkasme, dan hiperbola, membentuk *stereotype* atau prasangka dan labelisasi, visualisasi dramatis melalui gambar dan foto yang berkaitan dengan konflik, sampai tampilan fisik berupa bentuk dan warna huruf (*font*)

⁶ Lebih jelasnya bisa dibaca dalam Kirschke, 1996



headline yang mencolok mata pembaca.

Tidak lupa kesemua ini membungkus realitas dalam kemasan khusus (*framing*) dengan menonjolkan pihak tertentu (kami) dan meniadakan pihak yang lain (mereka), yang merupakan musuh dalam konflik. Dengan demikian media masih jarang menyorot perempuan sebagai kelompok yang rentan ketika terjadi konflik.

Siaran pers Komnas Perempuan mencatat bahwa dari penelusuran berita yang dilakukan pada konflik yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2011 sampai dengan Februari 2011 seperti konflik di Mesuji-Lampung dan konflik di Sape-Bima NTB, masih belum banyak pemberitaan media yang menyinggung nasib kelompok rentan masyarakat, yakni perempuan dan anak-anak, baik sebagai korban maupun agen konflik⁷.

Di sini kesimpulan sederhana bisa ditarik, bahwa media masih sangat umum dalam memberitakan konflik. Fokus berita konflik lebih mengarah pada konflik yang terjadi (apa, bagaimana proses, dan apa akibat dari konflik yang terjadi). Media belum mencoba untuk melihat konflik secara lebih holistik, dalam hal ini adalah bagaimana nasib perempuan (dan juga anak-anak) yang menjadi kelompok masyarakat yang rentan terkena eksese konflik.

Bila media masih jarang atau belum intens berbicara tentang nasib perempuan sebagai korban dan agen konflik, bisa dipastikan media juga belum berbicara tentang bagaimana banyak kelompok perempuan ternyata aktif untuk turut serta meredakan konflik yang terjadi di beberapa wilayah konflik di tanah air. Tim peneliti Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) – Universitas Atma Jaya Yogyakarta (dalam Listiorini, dkk, 2009: 89) menemukan data menarik mengenai bagaimana posisi perempuan dalam Konflik Poso, Sulawesi Tengah tahun 1998-2005.

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa ternyata pada saat berlangsungnya konflik, beberapa kelompok perempuan, dimotori oleh mahasiswi, aktivis perempuan, bahkan juga banyak di antaranya adalah para ibu rumah tangga telah turun ke medan-medan konflik. Mereka melakukan aktivitas atau kegiatan bersama, dan

7 <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/pentingnya-pemulihan-bagi-korban-dalam-konflik-di-sape-%E2%80%93-bima-2/> diakses tanggal 1 Maret 2012

mengupayakan terwujudnya perdamaian. Semua ini dilakukan dengan tanpa rasa takut, melintasi batas agama dan suku yang tengah hebat berkonflik.

Dina Listiorini, dkk (2009 : 31-37) menuturkan, ada banyak cara dilakukan oleh para perempuan Poso untuk bertindak sebagai agen perdamaian di tengah konflik. Di antaranya adalah dengan membuka pasar kebutuhan pokok. Pada saat konflik berlangsung, kehidupan sendi-sendi ekonomi di Poso langsung lumpuh. Padahal kehidupan keluarga harus terus berlangsung walau para perempuan dan anak-anak berada di pengungsian. Beberapa perempuan yang berstatus ibu rumah tangga akhirnya memberanikan diri untuk membuka pasar di tengah medan konflik.

Pasar yang dibuka ini bersifat lintas agama dan suku. Jika tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang kebutuhan, barter pun bisa menjadi alat pembayaran yang sah. Awalnya memang masih ada perasaan asing dan canggung satu sama lain. Namun akhirnya karena desakan ekonomi yang cukup kuat, para perempuan dari lintas agama dan suku ini justru bercampur baur menjadi satu tanpa rasa curiga satu dengan yang lain. Tujuannya hanya satu, memenuhi desakan kebutuhan hidup masing-masing keluarga yang saling berbeda tersebut.

Berangkat dari pertemuan intens para perempuan ini di pasar, digagaslah aktivitas-aktivitas berikutnya yang mengarah ke perdamaian. Misalnya membentuk perkumpulan untuk saling membantu, saling mengunjungi antar keluarga yang berbeda agama dan suku, sampai aktif turun membantu keluarga-keluarga korban konflik. Para perempuan yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga ini juga mendapatkan pelatihan-pelatihan pemberdayaan. Berbagai pelatihan ini juga diberikan oleh para perempuan (mahasiswi dan aktivis perempuan). Akhirnya semua perempuan dari berbagai latar belakang ini bersatu padu mengupayakan perdamaian di tengah konflik.

Para perempuan Poso juga percaya bahwa semua ini dapat terjadi karena kuatnya kearifan lokal di masyarakat Poso, yakni semboyan *Sintuwu Maruso*. *Sintuwu Maruso* atau *Mosintuwu* adalah sebuah konsep kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Te-



ngah. Kebersamaan ini sesungguhnya merupakan adat yang mendasari kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat, tidak hanya di Poso namun juga di wilayah Sulawesi Tengah yang lain (Listi-orini, dkk, 2009 : 39-48).

Mengherankan memang jika melihat keberanian para perempuan Poso ditinjau dari kuatnya bias gender masyarakat Indonesia. Namun itulah yang terjadi, para perempuan bahu membahu untuk mendorong terciptanya perdamaian di wilayah Poso. Tetapi dalam hal ini, lebih mengherankan lagi ketika media alpa mengangkat semua peristiwa ini sebagai berita.

Aktivitas kelompok perempuan sebagai penggagas perdamaian dalam konflik Poso luput dalam pemberitaan. Media hanya memberitakan konflik demi konflik yang terjadi. Media terjebak hanya melihat konflik tidak secara holistik, bahwa jika ada konflik pasti-lah hanya ada tindak kekerasan (kerusuhan, pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan). Tidak ada pesan damai di dalamnya, apalagi pesan damai yang dibawa oleh perempuan.

Lebih jauh, media juga tidak meyakini bahwa kehadiran perempuan sebagai agen perdamaian dalam konflik sebenarnya sudah dilindungi oleh sebuah perangkat legal. Uniknya perangkat legal tersebut bukan di tingkat nasional, namun di tingkat internasional, yakni resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (UNSCR 1325). Indonesia sendiri malah belum memiliki perangkat legal untuk mendorong dan melindungi aktivitas perempuan sebagai agen perdamaian di arena konflik.

Dalam riset yang dilakukan oleh PUSKIT-UAJY, Dina Listi-orini, dkk (2009 : 75) menemukan data bahwa UNSCR 1325 belum-lah populer dikenal oleh para aktivis perempuan di Indonesia, baik aktivis perempuan yang ada di daerah-daerah konflik luar Jawa ataupun juga yang ada di daerah-daerah perkotaan di Jawa. Ada beberapa dugaan yang dapat dikembangkan mengenai ketidakpopuleran UNSCR 1325. Pertama, UNSCR 1325 relatif masih baru. Pengesahannya baru dilakukan pada bulan Oktober 2000, sedangkan beberapa konflik sudah terjadi beberapa tahun sebelum itu. Konflik Poso semula terjadi pada 1998, Konflik Ambon pada 1999, dan Konflik Sambas dan Sampit tahun 2000-2001. Kedua, UNSCR

1325 hanya setingkat resolusi, berbeda dengan Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 yang setingkat kovenan sehingga di Indonesia sudah diratifikasi menjadi undang-undang. Ketiga, media di Indonesia sebagai saluran komunikasi ke masyarakat banyak yang belum memahami UNSCR 1325 sehingga terlambat atau belum banyak memberitakan kehadirannya.

Apa dan Bagaimana UNSCR 1325?

United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) merupakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya melindungi dan mengakui perlunya keterlibatan perempuan sebagai agen perdamaian guna meredakan konflik.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 ini ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2000. Dalam pembukaannya dijelaskan bahwa resolusi ini mengacu pada beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya yakni resolusi 1261 pada 25 Agustus 1999, resolusi 1265 pada 17 September 1999, resolusi 1296 pada 11 April 2000, dan resolusi 1314 pada 11 Agustus 2000, yang kesemuanya mengacu pada resolusi untuk konflik yang berlangsung di beberapa wilayah dunia, seperti Afrika dan Timur Tengah.

Resolusi 1325 ini juga dikuatkan oleh pidato dari Ketua Dewan Keamanan PBB pada Peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2000. Landasan Aksi dari Konferensi Sedunia IV untuk Perempuan yang berlangsung di Beijing pada tahun 1995 juga mendasari kelahiran Resolusi 1325 ini. Dalam konferensi sedunia untuk perempuan tersebut disebutkan bahwa kekerasan dan perempuan dan perempuan dalam konflik bersenjata merupakan dua bidang dari 12 bidang kritis yang harus segera ditindaklanjuti melalui tindakan aksi.

Munculnya resolusi 1325 ini dilandasi atas keprihatinan akan kondisi perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dalam setiap terjadinya konflik. Karenanya resolusi 1325 ini juga mengamanatkan perlunya keterlibatan perempuan dalam sebagai agen yang turut aktif berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari resolusi 1325



ini, di antaranya⁸:

1. Desakan Dewan Keamanan PBB kepada seluruh negara-negara anggota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, regional wilayah, bahkan internasional guna merumuskan mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan resolusi konflik.
2. Desakan Dewan Keamanan PBB kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan (untuk perempuan) guna menyusun dan mensosialisasi pedoman perlindungan dan keperluan atau kebutuhan perempuan selama berlangsungnya konflik, sekaligus mendesak kepada negara-negara anggota guna menyediakan anggaran keuangan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tersebut.
3. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik untuk selalu :
 - a. Memperhatikan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan khusus terhadap perempuan dan anak-anak perempuan baik selama berlangsungnya konflik dan selama masa pemulihan (rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi) pasca konflik.
 - b. Memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan lokal yang memiliki inisiatif untuk melakukan perintisan perdamaian melalui resolusi konflik serta melibatkan secara aktif perempuan di seluruh mekanisme pelaksanaan perjanjian damai.
 - c. Memberikan dukungan berupa penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi perempuan untuk keterlibatannya pada resolusi konflik.
4. Seruan kepada semua pihak dalam konflik bersenjata untuk menghormati sepenuhnya hukum internasional berlaku untuk hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak perempuan, khususnya sebagai warga sipil, di bawah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi 1951 dan Protokol tahun 1967, Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979 dan

8 http://www.un.org/events/res_1325e.pdf , diakses 23 Maret 2009



- Opsional Protokol tambahan tahun 1999 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 dan dua Opsional Protokol tambahan dari 25 Mei 2000, dan untuk mengingatkan kembali ketentuan *Statuta Roma* tentang Pengadilan Pidana Internasional.
5. Menekankan tanggung jawab semua negara anggota untuk mengakhiri impunitas dan untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang kejahatan termasuk yang berkaitan dengan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari UNSCR 1325 di atas. Pertama, UNSCR 1325 mendorong dan menjamin keterlibatan atau partisipasi perempuan sebagai agen yang juga dapat meredakan dan menyelesaikan konflik. Desakan PBB, dalam hal ini adalah Dewan Keamanan, kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dan memfasilitasi pelatihan-pelatihan guna memberdayakan perempuan, merupakan dorongan dari PBB agar keterlibatan perempuan lebih ditingkatkan sebagai agen perdamaian dalam konflik.

Dan yang kedua, UNSCR 1325 memberikan perlindungan terhadap perempuan yang akan dan sedang aktif untuk melakukan resolusi sebagai agen perdamaian di wilayah konflik. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada para pihak yang bertikai dalam konflik untuk selalu memberikan dukungan dan menghormati hak-hak azasi perempuan yang aktif dalam resolusi konflik, tentu dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan.

Ketiga, UNSCR 1325 juga memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban dalam konflik. Seruan Dewan Keamanan PBB kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati sepenuhnya aturan hukum internasional (termasuk Konvensi Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979) dan menekankan tanggung jawab negara anggota untuk mengakhiri impunitas, tentu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan di arena



konflik.

Dengan demikian UNSCR 1325 selain memberikan perlindungan terhadap perempuan di arena konflik, namun juga memberikan dukungan dan jaminan keterlibatan perempuan untuk ambil bagian dalam resolusi konflik. Mengacu pada isi UNSCR 1325 di atas, maka dalam tataran ideal untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik, mensyaratkan adanya :

1. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan yang terlibat dalam proses perdamaian. Artinya apabila ini adalah konflik sparatisme yang merupakan konflik antara pemerintah dengan kaum atau kelompok sparatis, maka harus ada keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil keputusan yang nantinya akan melakukan perundingan perdamaian.
2. Dalam pelaksanaan resolusi konflik, harus ada pula keterlibatan perempuan di lapangan (termasuk perempuan-perempuan lokal). Keterlibatan ini tidak hanya pada sisi kuantitas semata, namun juga peran yang dimainkan oleh perempuan untuk melakukan resolusi konflik juga harus menonjol.
3. Penggunaan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelesaian konflik selama berlangsungnya perundingan dan implementasi hasil-hasil perundingan, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap perempuan-perempuan lokal yang memiliki inisiatif untuk terlibat dalam resolusi konflik
4. Fasilitasi pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan perempuan yang akan terlibat dalam resolusi konflik, mulai yang berperan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan ataupun yang berperan di lapangan.

Media sebagai Sarana Sosialisasi UNSCR 1325

Seperti yang telah diutarakan di atas, media masih terlihat lemah bila terjebak di tengah arena konflik. Walaupun pada tahap awal media relatif dapat menjaga netralitasnya, pada fase-fase berikutnya media cenderung terseret oleh pusaran arus konflik. Parahnya adalah pusaran ini akhirnya justru membuat konflik kian keruh.



Media juga gagal untuk melihat konflik dengan lebih holistik. Fokus media yang hanya melulu melihat konflik dan konflik, membuat media tidak memperhatikan dengan utuh apa saja yang sebenarnya terjadi di seputaran konflik itu sendiri. Seperti bagaimana partisipasi perempuan ternyata memberikan sumbangsih yang tidak kecil untuk membangun perdamaian pada saat konflik.

Media menutup mata bahwa peran perempuan ini sebenarnya juga memiliki nilai keunikan tersendiri sehingga menjadi peristiwa yang patut diberitakan. Singkat kata, media belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bersuara sebagai kelompok masyarakat yang sebenarnya rentan menjadi korban konflik (*voice the voiceless*).

Di sisi lain, aktivitas perempuan sebagai agen perdamaian belum secara khusus mendapatkan perlakuan istimewa dari perangkat legal yang berlaku di Indonesia. Partisipasi perempuan sebagai agen perdamaian di arena konflik ternyata justru berjalan seiring sebangun dengan apa yang dianjurkan oleh perangkat legal internasional, yakni resolusi Dewan Keamanan PBB UNSCR 1325.

Perempuan di beberapa wilayah konflik di Indonesia, khususnya di Poso (Sulawesi Tengah), bahkan sudah melaksanakan UNSCR 1325 beberapa tahun sebelum resolusi ini disahkan. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak mengetahui secara persis bahkan tidak mengenal adanya resolusi ini. Di sini berarti ada peran yang dapat dimainkan oleh media untuk mensosialisasikan UNSCR 1325.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh media untuk mendukung perempuan dan UNSCR 1325. Pertama, di dalam dunia media Indonesia sebenarnya mengenal konsep jurnalisme damai. Di samping itu pula, media di Indonesia juga mengenal jurnalisme sensitif gender.

Jurnalisme damai (dalam Syahputra, 2006: 90) merupakan pendekatan peliputan dan penulisan berita di arena konflik dengan cara memberikan bingkai berita yang lebih luas, seimbang, dan akurat, menggambarkan di balik analisis dan transformasi konflik. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa jurnalisme damai tidak harus melulu berbicara tentang konflik dan konflik. Jurnalisme damai juga memberikan kesempatan pada peristiwa-peristiwa yang berada di



seputaran konflik yang justru memberikan angin segar untuk terciptanya perdamaian. Sedangkan jurnalisme sensitif gender (dalam Subono, 2003: 59) memiliki arti sebagai pendekatan jurnalisme yang memperjuangkan kesetaraan perempuan. Jurnalisme ini mengenalkan dan mempromosikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi setara dalam relasinya dengan laki-laki.

Jurnalisme seperti ini memang didesain untuk memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Akan menarik bila dua pendekatan ini digabungkan untuk menjadi jurnalisme damai yang sensitif gender. Media dituntut untuk mampu memberitakan aktivitas-aktivitas perdamaian yang diupayakan justru oleh kelompok perempuan.

Dengan demikian bila ini dilakukan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perempuan di arena konflik, seperti yang ada di Poso, akan dengan sendirinya diekspos oleh media. Seperti bagaimana para perempuan membangun pasar di tengah konflik, membentuk perkumpulan-perkumpulan untuk saling menolong, saling mengunjungi antar keluarga atau tetangga yang berbeda agama dan suku, serta mengikuti latihan pemberdayaan perempuan, dan akhirnya bagaimana kearifan lokal *Sintuwu Maruso* memberikan kekuatan bagi para perempuan tersebut untuk melakukan aktivitas perdamaian dapat diberitakan untuk masyarakat yang lebih luas. Bukankah kesemua peristiwa tersebut memiliki nilai berita unik dan luar biasa sehingga pantas atau layak untuk diberitakan ?

Kedua, media juga bisa turut mengkampanyekan poin-poin penting dalam UNSCR 1325, seperti masalah keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil keputusan dalam konflik (eksekutif dan legislatif). Ini dilakukan dengan tujuan untuk selalu mengingatkan masyarakat akan pentingnya lembaga-lembaga tersebut memiliki wakil-wakil perempuan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Tujuan akhirnya agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat sensitif terhadap permasalahan perempuan, khususnya perempuan di wilayah konflik. Kemudian juga media dapat selalu mengingatkan pentingnya penggunaan perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap perundingan perdamaian khususnya untuk melindungi para perempuan yang memiliki niat untuk turun aktif sebagai agen



perdamaian. Termasuk dalam hal ini mengingatkan pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan pemberdayaan perempuan-perempuan tersebut.

Terakhir atau yang ketiga, media dapat andil untuk tetap mengaktualkan kehadiran UNSCR 1325 pada momen-momen tertentu, seperti momen kelahiran UNSCR 1325 pada setiap 30 Oktober, Hari Perempuan Internasional pada setiap 8 Maret, Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap 10 Desember, dan Hari Ibu pada setiap 22 Desember.

Dengan pemberitaan yang massif seperti ini, diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui secara persis apa dan bagaimana UNSCR 1325. Apalagi mengingat Indonesia sebagai negara yang majemuk, tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian ekstra dari pihak media. Bukankah untuk sebagian kalangan ahli komunikasi menyatakan bahwa berita pada dasarnya merupakan hasil konstruksi subyektif dari si jurnalis? Artinya jurnalis tidak perlu menunggu terjadinya sebuah peristiwa untuk kemudian baru dapat memberitakan. Jurnalis dapat menggunakan inisiatifnya untuk menuliskan sesuatu yang nantinya akan dipercaya sebagai berita, termasuk tentang UNSCR 1325. Jika media percaya pada pernyataan ini, bukan hal yang sulit untuk dapat menyusun berita yang bertujuan untuk mensosialisasikan UNSCR 1325. §

Daftar Pustaka

Buku:

- Coppel, Charles A. (ed), (2006). *Violent Conflicts in Indonesia, Analysis, Representation, and Resolution*, New York, Routledge Contemporary Southeast Asian Series
- Eriyanto, dkk, (2001), *Media dan Konflik Etnis*, Jakarta, ISAI
- Eriyanto, dkk, (2003), *Media dan Konflik Ambon*, Jakarta, KBR68H
- Kirschke, Linda, (1996), *Broadcasting Genocide : Censorship, Propaganda, and State Sponsored Violence in Rwanda 1990-1994*. London, Article XIX
- Nadia, Ita E., (2009), *Suara Perempuan Korban Tragedi '65*, Yogyakarta, Galang Press
- Sudibyoy, Agus, Ibnu Hamad, dan Muhammad Qodari, (2001), *Kabar-kabar Kebencian, Prasangka Agama di Media Massa*, Jakarta, ISAI
- Syahputra, Iswandi, (2006), *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*, Yogyakarta, P-Idea



- Trijono, Lambang (ed), (2004). *The Making of Ethnic and Religious Conflicts in Southeast Asia, Cases and Resolutions*. Yogyakarta-Penang, CSPS Books-SFACSN
- Wahyono, Sugeng Bayu, dkk. (2004). *Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi, Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa*, Yogyakarta, IPENDHAM
- JURNAL Jurnal Perempuan No. 24, 2002, Perempuan di Wilayah Konflik Jurnal Perempuan No. 28, 2003, Perempuan dan Media HASIL RISET
- Listiorini, Dina, Bonaventura S. Bharata, Y. Tri Subagya, (2009), *Peran Perempuan di Arena Konflik, (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai Wacana Perempuan dalam Rekonsiliasi Konflik dengan Perspektif Cultural Politics dan UNSCR 1325 di Poso-Sulawesi Tengah)*, Yogyakarta, PUSKIT-UAJY

Sumber Internet:

- <http://indonesia.unfpa.org/publications/2007/Brochure%20GBV%20in%20Conflict%20-%202007%20a.pdf>
- http://www.cmi.fi/files/aceh_mou_bahasa.pdf+MOU+Helsinki&cd=1&hl=id&ct=clink&gl=id
- <http://www.undp.or.id/programme/cpr/documents/PDA/Thematic%20Assessment%20Report/Women%20and%20Peace%20Building/Gender-Final-%20Kajian%20Tematis-INA.pdf>
- http://209.85.173.132/search?q=cache:GlKg8YK_rk0J:www.un-instraw.org/en/gps/general/implementation-of-un-scr-1325.html+UNSCR+1325&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a
- http://www.un.org/events/res_1325e.pdf
- <http://www.undp.or.id/programme/cpr/documents/PDA/Thematic%20Assessment%20Report/Women%20and%20Peace%20Building/Gender-Final-%20Kajian%20Tematis-INA.pdf>
- <http://www.cavrtimorleste.org/updateFiles/indonesian/Perempuan%20dan%20Chega!.PDF>
- <http://www.komnasperempuan.or.id/2012/02/pentingnya-pemulihan-bagi-korban-dalam-konflik-di-sape-%E2%80%93-bima-2/>

KONTRIBUSI JURNALISME MULTIKULTURAL DALAM KONFLIK DAN UNTUK PERDAMAIAN

Andy Corry Wardhani

Berita-berita di media, selalu diwarnai dengan berita konflik ataupun pertentangan. Berita yang banyak mewarnai media kita akhir-akhir ini adalah konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Konflik-konflik kedaerahan yang sering terjadi, seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultural. Dalam masyarakat multikultural, media massa memegang peranan penting dalam mengelola konflik dan menciptakan kondisi damai.

Kegiatan-kegiatan jurnalisme memberikan pengaruh besar terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu multikultural. Kontribusi jurnalisme multikultural diarahkan kepada mempertimbangkan kepentingan masyarakat multikultural dalam menciptakan kondisi damai. Jurnalisme multikultural memiliki peran strategis dalam situasi konflik, ia bisa menurunkan eskalasi konflik dan mendorong perdamaian.

Kata kunci: jurnalisme kultural, konflik, perdamaian.

Pendahuluan

Istilah multikultural akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Konflik yang terjadi karena perbedaan keyakinan, budaya dan sosial seringkali menghiasi pemberitaan di media massa. Konflik yang terjadi tersebut seiring dengan ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur.

Masyarakat dengan berbagai keberagamannya dikenali dengan istilah masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang tingkat keanekaragamannya tinggi. Wacana multikultural saat ini menjadi isu penting ditengah seringnya konflik yang dialami bangsa Indonesia. Sudah merupakan kodratnya, manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman budaya, suku dan bangsa karena itu pembangunan haruslah memperhatikan keanekaragaman tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam budaya, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang didasarkan atas multikultural. Konflik yang kerap melanda Indonesia terutama yang bernuansa suku, agama, ras dan antar go-longan berkaitan erat dengan kurangnya pemahaman tentang kearifan budaya.

Kurangnya pemahaman atau ketidakadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur juga menimpa daerah-daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Lampung pada awal tahun 2012, terjadi konflik antara warga suku Lampung dengan warga suku Bali yang berakhir dengan pembakaran pemukiman dan pengusiran warga. Persoalan warga yang menuai konflik muncul akibat kurangnya kesetiakawanan sosial, sikap mementingkan kelompoknya sendiri, tidak peka terhadap perbedaan yang ada dan kurang menghargai pendapat orang lain.

Dalam masyarakat multikultural media massa memiliki peranan penting dalam mengatasi konflik dan menciptakan kondisi damai. Kegiatan jurnalisme dapat mempengaruhi pemberitaan seputar persoalan-persoalan multikultural. Jurnalisme multikultural merupakan kegiatan jurnalistik yang memasukkan kepentingan masyarakat multikultural dalam pemberitaannya dengan tujuan terciptanya situasi dan kondisi yang damai dalam masyarakat multikultural.



Multikultural

Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau beragam dan kultural yang berarti budaya. Dengan demikian multikultural berarti keragaman budaya. Istilah multikultural digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Istilah ini memiliki tiga unsur yaitu budaya, keragaman budaya dan cara khusus untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya tersebut.

Kesadaran akan adanya keragaman budaya disebut sebagai kehidupan multikultural. Namun tentu tidak cukup hanya sampai disitu. Bahwa suatu kemestian agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman mesti ditingkatkan lagi menjadi apresiasi dan dielaborasi secara positif. Pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme.

Multikulturalisme bertujuan untuk kerjasama, kesederajatan dan mengapresiasi dalam dunia yang kian kompleks dan tidak monokultur lagi. Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individu maupun kebudayaan. Yang menarik disini adalah penggunaan kata ideologi sebagai penggambaran bahwa betapa mendesaknya kehidupan yang menghormati perbedaan dan memandang setiap keberagaman sebagai suatu kewajiban serta sederajat (Parsudi, 2011).

Multikulturalisme menjadi salah satu asas penting dalam media massa. Berita ataupun gagasan-gagasan multikultural perlu disampaikan kepada masyarakat karena ini akan berpengaruh pada cara pandang orang terhadap kelompok lain yang berbeda dengannya. Pemahaman tentang adanya perbedaan akan menciptakan hubungan yang lebih baik diantara masyarakat.

Kondisi multikultural dalam masyarakat dunia pada saat ini tidak dapat dihindari karena teknologi komunikasi dan informasi telah mendorong orang untuk saling berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari budaya dan bangsa yang berbeda. Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam kesederajatan (Watson, 2000).



Menurut Voekes et al, (1996), multikulturalisme berkembang dalam masyarakat, maka ideologi ini juga berpengaruh terhadap komunikasi antara masyarakat yang berasal dari kelompok, kaum, agama dan negara yang berbeda. Kondisi ini kemudian membuat ahli-ahli media berpikir, apakah media perlu juga memberikan respons terhadap gagasan multikulturalisme.

Jurnalisme Multikultural

Perbedaan yang ada dalam masyarakat memiliki potensi terjadinya konflik, bila tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini media massa perlu memberi respons terhadap perkembangan multikultural, seperti yang dikatakan Voakes et.al (1996), jurnalisme multikultural perlu dikembangkan untuk meningkatkan peranan media massa dalam mendukung pembangunan masyarakat multikultural.

Jurnalisme multikultural bermakna kegiatan pemberitaan yang memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multikultural untuk memelihara kondisi damai. Jurnalisme multikultural menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat multikultural dan menghindari berita yang dapat menyentuh sensitivitas hubungan multicultural. Praktik jurnalistik multikultural menekankan perlunya pertimbangan khusus untuk menghasilkan berita yang tidak mengganggu hubungan multikultural dalam masyarakat.

Para jurnalis perlu senantiasa mendorong masyarakat untuk mengakui realitas perbedaan supaya perbedaan tidak dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya perbedaan perlu dianggap sebagai realitas yang mesti diterima secara bersama-sama sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan konflik.

Surat kabar misalnya, sebagai media komunikasi berperan untuk menampilkan perbedaan kepada masyarakat. Surat kabar dapat berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang kemajemukan dan dapat mengangkat nilai-nilai positif yang terdapat dalam satu kelompok kepada kelompok lainnya. Pengeetahuan yang benar dan pengangkatan nilai-nilai positif dapat mendorong pembangunan masyarakat multikultural itu (Junaidi, 2010).



Konstruksi Realitas Sosial Media

Dalam proses pemuatan berita, tidak hanya jurnalis yang menentukan berita yang akan dimunculkan, tetapi juga ada peran organisasi dan media. Dalam konstruksi sosial terhadap realitas memang ada beberapa faktor yang sangat dominan dalam proses konstruksi sebuah berita. Faktor itu adalah *individual level* (tingkat individual), *media routines level* (level rutinitas media) dan *organizational level* (tingkat organisasi) (Shoemaker dan Reese, 1991).

Individual Level

Pada tingkat level individu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu faktor intrinsik pekerja media. Faktor ini terdiri dari tiga hal, pertama, karakteristik komunikator dan latar belakang personal serta profesional pekerja media, misalnya tingkat pendidikan si jurnalis. Pada level kedua, tingkah laku personal dan pekerja media, dan nilai serta kepercayaan yang dianut, dicontohkan dengan sikap politik dan agama jurnalis. Ketiga, orientasi profesional dan konsep peran yang terkait dengan pekerjaannya, contoh apakah jurnalis menganggap dirinya netral atau tidak dalam membuat beritanya.

Media Routines Level

Rutinitas media terkait dengan organisasi dalam media massa. Pada dasarnya rutinitas organisasi berbeda, namun media memiliki kemiripan dengan efisiensi aktifitas media. Efisiensi adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi media untuk menghasilkan produk yang paling dapat diterima oleh khalayak dalam waktu dan ruang yang terbatas guna mendapat keuntungan.

Dalam menentukan isi media, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan yakni cerita dari sumber yang ada, selera dan keinginan khalayak dan kebutuhan organisasi media itu sendiri. Untuk mengetahui keinginan khalayak, informasi *rating* yang dibuat oleh lembaga survei yang memuat tentang pembagian penonton dari program-program televisi serta karakteristik demografinya dibutuhkan oleh media. *Rating* inilah yang akan memungkinkan pengiklan untuk memutuskan akan memasang iklan di program televisi.



Organizational Level

Pada tingkat ini, yang menjadi sorotan adalah pengaruh organisasi media terhadap isi media yang berhubungan dengan bagaimana organisasi menyelesaikan masalah produksinya. Hal ini berkaitan dengan peran organisasi, struktur internal, tujuan, teknologi dan pasar. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial, formal, ekonomi yang memperkerjakan pekerja media untuk menghasilkan isi media yang memiliki tujuan tertentu. Terdapat tiga tingkat pekerja media, pertama, pekerja garis depan misalnya dalam organisasi media jurnalistik seperti reporter. Kedua, tingkat menengah contoh produser atau editor. Ketiga, tingkat atas yang terdiri dari para eksekutif yang membuat kebijakan organisasi.

Berdasarkan pembahasan tentang level yang dominan dalam konstruksi media, terlihat bahwa jurnalis bukanlah satu-satunya komponen yang mengkonstruksi berita. Ada unsur lain dalam media yang mengkonstruksi realitas yaitu rutinitas media dan organisasi media. Dengan demikian, berita bukan saja dilihat dari pandangan jurnalis saja, tetapi juga ada kepentingan dan bias dari media dan organisasi tempat jurnalis itu bekerja. Pada saat jurnalis, media dan organisasi media memiliki pandangan yang sama bahwa jurnalisme perang merupakan hal yang penting sebagai landasan peliputan perang, maka konsep ini akan digunakan sebagai ideologi dalam pemberitaan tentang perang.

Kepentingan merupakan komponen yang dominan ketika mengkonstruksi realitas. Seorang jurnalis tidak akan membuat berita berdasarkan pandangannya sendiri. Jurnalis bekerja dalam media yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan yang menonjol antara lain adalah mendapatkan keuntungan ekonomi. Berita dibuat berdasarkan keinginan pasar, menarik banyak penonton dengan memuat fakta dan gambar yang menimbulkan sensasi.

Sebagai agen konstruksi sosial, media melakukan interpretasi terhadap fakta dan peristiwa perang yang terjadi. Di lapangan ketika melihat fakta dan peristiwa perang, jurnalis sebagai bagian dari media seringkali mengalami hambatan dalam meliput berita yang dilihatnya, mengingat medan yang sulit dijangkau. Akhirnya

berita yang disampaikan hanya terbatas pada salah satu pihak yang berkonflik. Efek yang ditimbulkannya tentu saja berita yang diperoleh tidak seimbang.

Kontribusi Jurnalisme Multikultural

Media massa memegang peranan penting dalam menjalankan jurnalisme multikultural, mengingat media massa punya potensi besar menciptakan perbedaan tajam konflik antargolongan di tengah masyarakat. Media massa yang tidak dikelola dengan semangat menegakkan jurnalisme multikultural, akan berubah menjadi agen utama dalam menciptakan *survival of the fittest* (siapa yang kuat akan menang) di sekitar kita.

Jurnalisme multikultural berorientasi perdamaian. Pada dasarnya jurnalisme multikultural merupakan upaya meluruskan kembali apa yang menyimpang dari jurnalisme dalam praktik. Pada hakekatnya jurnalisme bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Apabila suatu pemberitaan media tidak memberi pertimbangan penyelesaian konflik atau pemberitaannya itu malah memicu konflik, maka jelas jurnalisme seperti itu bukanlah memberikan kebaikan pada masyarakat.

Jurnalisme multikultural lebih menonjolkan aspek-aspek kesadaran akan adanya keberagaman budaya yang mendorong terbentuknya masyarakat damai dan harmonis di tengah beraneka ragam latar belakang kebudayaan. Agar terbentuk masyarakat damai pada masyarakat multikultural, Lynch dan Mc. Goldrick, (2005) mengemukakan, jurnalisme damai terwujud ketika redaktur dan reporter menetapkan pilihan-pilihan bersifat damai tentang berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya. Bersifat damai berarti bentuk pemberitaan yang menciptakan peluang bagi sebagian besar masyarakat untuk mempertimbangkan dan menghargai tanggapan tanpa kekerasan terhadap konflik yang bersangkutan.

Pers dapat menjalankan perannya sebagai provokator tetapi bukan sebagai provokator eskalasi konflik, melainkan sebagai provokator yang menjalankan tugas memprovokasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar mengatasi konflik. Pendekatan dilakukan pada pendekatan *win-win solution*, bukan siapa yang



menang atau kalah dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada kedua belah pihak untuk berdamai.

Ketika terjadi kerusuhan misalnya, media hendaknya menempatkan kerusuhan itu dalam bingkai yang lebih luas dan akurat dan berdasarkan pada informasi pada konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk menghindari konflik yang lebih luas pada peristiwa kerusuhan, media perlu menyembunyikan suatu informasi yang kalau diberitakan dapat memperluas konflik. Jurnalisme yang dilaksanakan seperti ini, perlu dipahami para jurnalis.

Pedoman bagi para jurnalis yang meliput konflik, terlihat penting sekali pada negara yang masyarakatnya multikultural. Dalam masyarakat seperti ini, jurnalisme hendaknya memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat multikultural untuk memelihara kondisi damai dan menjalankan usaha-usaha konstruktif dalam pembangunan masyarakat multikultural. Hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari berita yang dapat menyentuh sensitivitas hubungan multikultural.

Isi media dengan karakter, lebih banyak mengembangkan wacana multikulturalisme yang menonjolkan konstruksi dan *positioning* nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya berbagai kelompok etnik yang ada. Nilai-nilai universal seperti mobilitas sosial, individualisme dan pemberian semacam “*privilege*” terhadap kelas yang dianggap minoritas (atau mungkin dimarjinalkan), lebih memperoleh tempat dalam tayangan dengan karakter multikulturalisme. Perihal yang bersifat ideal dari golongan (etnis dan budaya) yang memegang hegemoni justru cenderung tidak memperoleh penonjolan (Gray, 2002).

Kontribusi lain dari jurnalisme multikultural adalah memfasilitasi pembentukan opini publik sekaligus pada saat bersamaan mengembalikan opini publik itu kepada masyarakat untuk dapat merumuskan ulang opini mereka setelah diskursus itu berlangsung. Hal ini berarti menyediakan ruang bagi semua budaya, baik mayoritas maupun minoritas untuk dapat mengekspresi gagasan-gagasannya. Selain itu, jurnalisme multikultural hendaknya dapat berfungsi sebagai suatu saluran yang memungkinkan budaya-budaya dapat mengadvokasi pandangan mereka. Dengan demikian, kegiatan ju-

rnalisme multikultural haruslah terbuka terhadap budaya-budaya tersebut.

Penutup

Dalam masyarakat multikultural, media massa memegang peranan penting dalam mengelola konflik dan menciptakan kondisi damai. Kegiatan-kegiatan jurnalisme memberikan pengaruh besar terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu multikultural. Kontribusi jurnalisme multikultural diarahkan kepada mempertimbangkan kepentingan masyarakat multikultural dalam menciptakan kondisi damai. Jurnalisme multikultural memiliki peran strategis dalam situasi konflik, ia bisa menurunkan eskalasi konflik dan mendorong perdamaian. §

Daftar Pustaka

- Junaidi. (2010). Pandangan Editor Surat Kabar Indonesia dan Malaysia terhadap Jurnalisme Multikultural. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta*. Vol.8.No.2 Tahun 2010.
- Lynch, Jake, dan McGoldrick, Anabel. (2005). *“Peace Journalism: How To Do It?”*, Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya? LSPP dan The British Council.
- Shoemaker, P.J dan Reese, S.D. (1991). *Mediating the Message: Theories of Influences on Media Content*. New York: Logman Publisher.
- Suparlan, Parsudi. (2011). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. <http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm>.
- Voakes et al. (1996). *“Diversity in the News. A Conceptual and Methodological Frame Work”*. *Jurnalism and Communication Quaterly*, Vol 73, No.3.
- Watson, C.W. (2000), *Multiculturalism*. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.



JURNALISME DAMAI DAN RUTINITAS MEDIA

Farid Rusdi

Media massa sebagai industri berkepentingan untuk memberitakan peristiwa yang terjadi, termasuk konflik horizontal. Para praktisi media sadar tentang jurnalisme damai dalam peliputan. Tapi rutinitas media membuat praktisi media tidak bisa menghindari kecenderungan pembuatan berita yang menampilkan peristiwa *ala* jurnalisme perang atau konflik.

Tulisan ini menghubungkan bagaimana jurnalisme damai dan rutinitas media. Rutinitas media tersebut kemudian akan dicari kaitannya dengan *news judgment* jurnalis dalam proses produksi berita.

Penelitian ini menggunakan pandangan teoretis Shoemaker yang melihat bahwa media membentuk rutinitas-rutinitas untuk mengatasi dan beradaptasi dengan keterbatasan-keterbatasan fisik dalam merespons banjir peristiwa dalam realitas sebenarnya. Rutinitas ini kemudian membatasi kemampuan jurnalis untuk melihat dunia secara utuh.

Kata kunci: rutinitas media, jurnalisme damai, berita konflik

Pendahuluan

Masyarakat dan konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Di negara manapun terjadinya konflik bisa karena berbagai sebab. Mulai dari masalah agama, etnis, ekonomi, hingga pertandingan olah raga yang mengedepankan sportifitas pun memunculkan konflik yang berimbas pada jatuhnya korban. Inilah yang selalu tidak diinginkan dari sebuah konflik. Kesedihan dan keprihatinan selalu lebih menjadi hasil dari konflik daripada resolusi.

Meski menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, konflik diminati untuk diketahui masyarakat melalui media massa. Berita-berita headline surat kabar nasional yang menjadi sorotan masyarakat berawal dari konflik, baik itu konflik horizontal dan vertikal. Dalam jurnalistik, konflik adalah news value. Mereka tertarik mengikuti berita konflik karena adanya pro dan kontra. Bahkan mereka juga terlibat secara emosi dengan pihak yang berkonflik.

Memberitakan konflik bukan suatu hal yang mudah bagi seorang jurnalis. Karena ia dituntut tidak boleh memihak, dan harus netral. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang menilai berita-berita di media massa tidak berimbang. Bukan berarti media itu tidak berupaya untuk berimbang tapi rutinitas media selalu menjadi alasan.

Dalam suasana konflik, jurnalis sebagai ujung tombak dalam mengumpulkan berita cenderung untuk melaporkan hal-hal yang justru dapat memperkeruh konflik. Mereka tidak sadar apa yang mereka buat dapat menyulitkan salah satu pihak, atau bahkan mengancam jiwa seseorang atau sekelompok orang. Para jurnalis hanya fokus pada konflik dan kekerasan yang terjadi serta perkembangan peristiwa yang terjadi.

Terlebih lagi saat ini persaingan media massa yang semakin ketat sehingga para awak media dituntut bekerja cepat dalam menaikkan berita demi eksklusifitas. Akibatnya berita itu secara tidak disadari ternyata memperkeruh upaya resolusi konflik. Para jurnalis melalui media massa seperti dua sisi uang logam pada pemberitaan konflik. Pada satu sisi ia dapat menyulitkan proses perdamaian, tapi di sisi lain ia justru dapat mengedepankan pentingnya proses penyelesaian konflik.

Dalam menghasilkan berita, media massa mengkonstruksi reali-



tas melalui verbal dan visual. Meski jurnalis dituntut obyektif, tidak beropini, dan netral tapi dalam memproduksi berita ia melakukan konstruksi atas fakta-fakta yang ia peroleh di lapangan. Pesan yang disampaikan bisa jadi bentuk dari manipulasi dari fakta yang ada (Shoemaker, 1996: 37). Oleh karena itu para jurnalis memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi dampak konflik hingga mempercepat proses perdamaian (Wolsfeld, 2004:1).

Pengaruh signifikan media massa dalam konflik, telah mendorong berkembangnya pendekatan alternatif dalam praktek jurnalistik. Sebelumnya pada saat konflik media massa lebih banyak melakukan pendekatan konvensional yakni Jurnalistik Perang yang lebih menampilkan sisi kekerasan dan kemenangan salah satu pihak. Dalam Jurnalistik Damai yang dikembangkan oleh Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, media didorong untuk lebih mengedepankan nilai-nilai yang bukan kekerasan,

Peace Journalism is when editors and reporters make choices – of what stories to report and about how to report them – that create opportunities for society at large to consider and value nonviolent responses to conflict. (Lynch, McGoldrick, 2007: 256)

Dengan jurnalistik damai media massa didorong untuk lebih peduli pada dampak dari konflik kepada masyarakat, bukan hanya pada elit atau pihak yang bertikai. Inilah yang lebih banyak terjadi pada jurnalis lapangan yang banyak terjebak pada pernyataan elit atau pimpinan yang berkonflik sehingga tanpa disadari memperuncing masalah konflik bukan sebaliknya.

Kecenderungan dari para jurnalis ini untuk lebih menggunakan pendekatan jurnalisme perang pada peliputan konflik ini karena mereka dipengaruhi oleh lingkungan mereka sendiri. Salah satunya adalah kegiatan media atau rutinitas media (Shoemaker & Reese, 1996).

Dalam menghasilkan sebuah produk berita, seperti pabrik, media massa memiliki sebuah proses sehingga membuat setiap produk berita yang dibuat memiliki standar yang sama. Aturan main yang ditetapkan oleh organisasi media ditujukan untuk mengontrol kualitas liputan. Tapi pada beberapa kasus pemberitaan terjadi kesalah-

an teknis dalam pemberitaan, sehingga menimbulkan prasangka adanya ketidakberimbangan. Misalnya media hanya mendapatkan pernyataan dari pimpinan salah satu pihak yang berkonflik. Karena alasan *deadline*, media menaikkan berita itu berdasarkan pernyataan dari satu pihak saja tanpa melakukan verifikasi dengan pihak lain yang berkonflik.

Dalam catatan ini, penulis melakukan konstruksi bagaimana pendekatan jurnalistik damai saat ini terhadap pemberitaan konflik dan bagaimana pengaruh rutinitas media terhadap pemberitaan konflik dengan pendekatan jurnalistik damai.

Jurnalisme Damai

Ide pendekatan Jurnalisme Damai awalnya dikemukakan di tahun 1970-an oleh Profesor Ilmu Damai Johan Galtung. Kemudian oleh Jake Lynch dan Annabel McGoldrick mengembangkan konsep praktis dari Jurnalisme Damai itu di tahun 1990-an. Pada dasarnya Jurnalisme Damai ini berupaya untuk meminimalkan celah antar pihak yang berkonflik dengan tidak membesar-besarkan fakta yang berpotensi dapat memperkeruh konflik (Lynch, McGoldrick, 2001: 6)

Jurnalisme Damai menjadi alternatif setelah sebelumnya media massa larut dalam peliputan dengan pendekatan Jurnalisme Perang, yang cenderung memberitakan konflik yang hanya mengacu peristiwa yang terjadi, sehingga pemberitaan lebih menampilkan soal kekerasan bahkan potensi kekerasan yang dapat terjadi. Perbedaan antara Jurnalisme Damai dan Perang sudah dikonsepsikan oleh Johan Galtung seperti yang ada pada tabel 1.

Dengan pendekatan ini, dalam meliput konflik jurnalis dituntut tidak hanya terpaku pada orang-orang dari pihak yang bertikai saja tapi juga melihat para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan konflik itu. Sehingga pemberitaan tidak hanya mengacu pada masalah siapa menang siapa kalah dari dua pihak yang bertikai, tapi harus bisa membongkai berita konflik dari semua pemangku kepentingan yang mungkin terlibat.



Tabel 1. Konsep Galtung tentang Jurnalisme Damai

<i>PEACE/CONFLICT JOURNALISM</i>	<i>WAR/VIOLENCE JOURNALISM</i>
<p><i>I. PEACE/CONFLICT ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Explore conflict formation, x parties, y goals, z issues</i> • <i>General “win, win” orientation</i> • <i>Open space, open time; causes and outcomes anywhere, also in history/culture</i> • <i>Making conflicts transparent</i> • <i>Giving voice to all parties; empathy, understanding</i> • <i>See conflict/war as problem, focus on conflict creativity</i> • <i>Humanisation of all sides; more so the worse the weapon</i> • <i>Proactive: prevention before any violence/war occurs</i> • <i>Focus on invisible effects of violence (trauma and glory, damage to structure/culture)</i> 	<p><i>I. WAR/VIOLENCE ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Focus on conflict arena, 2 parties, 1 goal (win) war</i> • <i>General zero-sum orientation</i> • <i>Closed space, closed time; causes and exits in arena, who threw the first stone</i> • <i>Making wars opaque/secret</i> • <i>“Us-them” journalism, propaganda, voice for “us”</i> • <i>See “them” as the problem, focus on who prevails in war</i> • <i>Dehumanisation of “them”; more so the worse the weapon</i> • <i>Reactive: waiting for violence before reporting</i> • <i>Focus only on visible effect of violence (killed, wounded and material damage)</i>
<p><i>II. TRUTH ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Expose untruths on all sides / uncover all cover-ups</i> 	<p><i>II. PROPAGANDA ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Expose “their” untruths / help “our” cover-ups/ lies</i>
<p><i>III. PEOPLE ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Focus on suffering all over; on women, aged, children, giving voice to voiceless</i> • <i>Give name to all evil-doers</i> • <i>Focus on people peace-makers</i> 	<p><i>III. ELITE ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Focus on “our” suffering; on able-bodied elite males, being their mouth-piecer</i> • <i>Give name to their evil-doers</i> • <i>Focus on elite peace-makers</i>
<p><i>IV. SOLUTION ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Peace = non-violence + creativity</i> • <i>Highlight peace initiatives, also to prevent more war</i> • <i>Focus on structure, culture, the peaceful society</i> • <i>Aftermath: resolution, reconstruction, reconciliation</i> 	<p><i>IV. VICTORY ORIENTATED</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Peace = victory + ceasefire</i> • <i>Conceal peace initiative, before victory is at hand</i> • <i>Focus on treaty, institution, the controlled society</i> • <i>Leaving for another war, return if the old flames up again</i>

Sumber: Lynch dan McGoldrick (2007: 251)

Rutinitas Media

Sesuai dengan etika jurnalistik yang ada, para jurnalis dituntut harus netral dan profesional dalam menghasilkan suatu produk jurnalistik. Mereka harus menulis berita dengan obyektif tanpa mengikutsertakan opini atau perasaan pribadi ke dalam tulisan mereka atau produk jurnalistik mereka. Sehingga produk jurnalistik sebagai media content diasumsikan laporan fakta yang ada di lapangan tanpa dilebih-lebihkan atau sebaliknya. Ini yang selalu menjadi pegangan bagi para calon jurnalis yang akan terjun ke lapangan untuk meliput.

Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Meski banyak media massa meliput dari peristiwa yang sama, masing-masing media

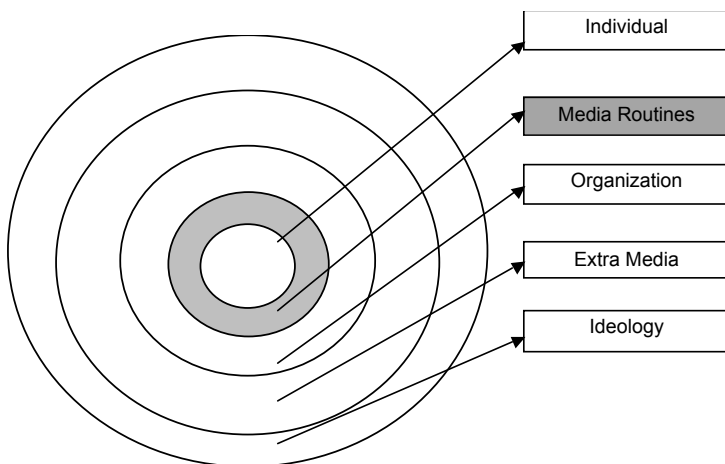


mempunyai *angle* berita dan *framing* yang berbeda. Ini terkait dengan kebijakan dari organisasi media di mana jurnalis itu bekerja. Adanya *agenda setting* melalui rapat redaksi, serta perintah dari para kordinator liputan terhadap para jurnalis, hingga proses pengeditan atas hasil liputan, mempengaruhi hasil akhir produk berita itu.

Dalam teori *media content* yang dikembangkan oleh Pamela Shoemaker dan Stephen Reese (1996), bahwa lingkungan di mana para jurnalis bekerja mempengaruhi *media content* yang mereka buat. Mulai dari individu para jurnalis sendiri, kegiatan para jurnalis dalam memproduksi suatu berita, organisasi media di mana jurnalis bekerja, lingkungan di luar media, dan ideologi.

Dalam hirarki pengaruh atas *media content*, individu jurnalis yang paling mempengaruhi media content. Pengalaman, nilai, pendidikan, dari para individu jurnalis bisa menentukan bagaimana suatu peristiwa tergambar oleh media. Bagi jurnalis yang baru pertama kali meliput di tempat konflik misalnya, akan kesulitan dalam memilih berita yang penting dan tidak dari berbagai fakta dan data yang ia kumpulkan. Penilaian layak be-rita atau *news judgement* dari individu jurnalis dipengaruhi pengalaman. Belum lagi nilai-nilai yang dianut oleh si jurnalis dari sisi agama atau kepercayaan.

Gambar. Hirarki Pengaruh atas Media Content



Sumber: Shoemaker dan Reese (1996: 106)



Untuk menekan pengaruh individu jurnalis pada *media content*, organisasi media telah menyiapkan proses *gatekeeping* atau pemilahan dan pengeditan informasi dan data yang diperoleh oleh jurnalis di lapangan. Proses ini bagian dari rutinitas media atau *media routine*, yakni hirarki kedua pengaruh atas *media content*.

Dengan adanya rutinitas media maka individu jurnalis akan mengikuti tata nilai dan kebijakan yang ada organisasi media ia bekerja. Dalam memilah berita selain mengacu pada *news value* (*prominence, human interest, conflict/controversy, the unusual, timeliness, proximity*), para jurnalis juga mengacu pada ketentuan *news value* dari organisasi versi organisasi media. Misalnya jika ia menemukan satu fakta tentang orang pimpinan di organisasi media tempat ia bekerja apakah dinaikkan atau tidak. Ini yang menjadi dilema juga dari para jurnalis di Indonesia yang media tempat mereka adalah pimpinan partai politik atau terlibat kasus korupsi.

Terkait dengan peliputan konflik, rutinitas media bisa menekan kemungkinan pemberitaan yang sensitif. Pemberitaan yang tidak berimbang atau cenderung membahayakan pihak tertentu, bisa disaring melalui proses *gatekeeping* dalam organisasi media. Dalam media jenis surat kabar, proses *gatekeeping* bisa dikatakan ideal, karena ia memiliki proses yang cukup panjang sebelum dicetak. Mulai dari tingkat editor hingga rapat redaksi bisa mengontrol materi berita sebelum dicetak.

Tapi ada juga proses *gatekeeping* sangat singkat. Seperti pada media televisi, dengan alasan kecepatan dan persaingan antar media, siaran langsung dari tempat kejadian oleh para reporter sangat rentan dengan pemberitaan yang cenderung mengedepankan karakter jurnalistik perang. Mereka menaikkan berita tanpa mengetahui latar belakang dari satu peristiwa yang akhirnya hanya mengedepankan aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Apalagi pada media televisi yang lebih pada visual, yang lebih tentu bisa memberikan pengaruh pada khalayak.

Demikian juga media elektronik lain, seperti radio. Saat ini media radio memiliki reporter yang langsung memberikan laporan dari tempat kejadian. Dengan hanya menggunakan fasilitas komunikasi telepon genggam reporter sudah bisa melakukan siaran langsung.



Akhirnya proses *gatekeeping* pun hanya dilakukan oleh reporter langsung. Sementara *gatekeeper* yang ada di ruang siaran yang memilah berita dari *lead* atau judul berita yang disampaikan reporter di lapangan sebelum ia diberi kesempatan untuk *live* dari tempat kejadian.

Selain itu juga banyaknya organisasi media yang mempekerjakan reporter paruh waktu, *freelance*, kontributor, koresponden, atau penyebutan lainnya rentan dengan pemberitaan yang cenderung pada pemberitaan jurnalisme perang. Banyak saat ini organisasi media di Indonesia mempekerjakan jurnalis yang *outsourcing* atau bukan karyawan tetap. Mereka diberi upah berdasarkan jumlah laporan mereka yang telah disiarkan. Sebagian besar mereka berada di daerah-daerah rawan konflik.

Dan tidak tertutup kemungkinan para jurnalis ini terdistorsi oleh masalah konflik yang ada, sehingga sensitifitas mereka mulai berkurang terhadap upaya resolusi damai. Mereka tidak lagi peduli pada dampak buruk konflik tapi lebih peduli pada aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Ini tidak lepas pada orientasi para jurnalis yang diberi upah per berita, sehingga mereka lebih mengutamakan berita-berita dengan kekerasan dan konflik agar berita mereka bisa 'naik'.

Penutup

Jurnalisme damai menjadi jawaban bagi para jurnalis bisa berperan untuk mengubah dunia ke arah lebih baik. Situasi di hampir penjuru belahan dunia yang tidak lepas dari konflik membutuhkan media yang bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan mereka yang tidak mampu dan menjadi korban dari situasi konflik.

Di beberapa negara seperti di Irlandia Utara, dan Palestina-Israel, Jurnalisme Damai sudah berhasil diterapkan untuk menjadi bagian dalam mengkonstruksikan resolusi konflik (Woldsfeld, 2004), Tapi di beberapa kasus lain, Jurnalisme Damai masih sulit untuk diterapkan. Industri media yang saat ini berkembang pesat dengan dikendalikan oleh pasar bebas, membuat pemilik modal menjadi penguasa. Mereka bebas dan tidak di bawah kuasa pemerintah, dan mereka bisa mengendalikan isi media sesuai kepentingan mereka



(Hackett, 2007: 50-51). Ini juga terjadi di Indonesia setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Media massa di Indonesia saat ini kuasai oleh beberapa kelompok besar yang beberapa di antaranya pimpinan partai politik,

Seperti yang diungkapkan oleh Herman dan Chomsky (Hackett, 2007: 50), bahwa media massa saat ini memiliki justru tidak lepas dari karakteristik Jurnalistik Perang. Karena mereka dalam memandang apa yang bertentangan dengan mereka selalu menggunakan kata-kata negatif, dan sebaliknya mengedepankan kata-kata positif untuk yang mendukung pihaknya. Bahkan mereka pun melakukan pemilihan layak tidaknya suatu berita bukan karena ada tidaknya nilai berita, tapi karena masalah persaingan media, ideologi, hingga suatu hal yang mengancam atau tidak kepentingan bisnis mereka.

Prinsip-prinsip jurnalisme damai sebaiknya tidak hanya pada individu jurnalis saja, tapi juga mewarnai rutinitas media. Level individu jurnalis dengan organisasi media pada hirarki pengaruh pada media content dihubungkan oleh rutinitas media. Untuk menghindari agar *media content* tidak terdistorsi pada level individu jurnalis, dan organisasi media, maka perlu adanya penguatan rutinitas media dalam hal mengedepankan jurnalistik damai.§

Daftar Pustaka

- Hackett, Robert A. 2007. “*Journalism versus Peace? Notes on a Problematic relationship.*” dalam Bailie, Mashoed (ed.) *Global Media Journal: Mediterranean Edition* 2(1). Spring 2007 hal: 47-53. http://globalmedia.emu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=84:spring-2007&catid=48:archive&Itemid=60
- Lynch, Jake. McGoldryck, Annabel. 2007. “*Peace Journalism*”. dalam Webel, Charles. Galtung, Johan (ed.). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. hal 248-264. Routledge. New York.
- Lynch, Jake. McGoldryck, Annabel. 2001. “*What is Peace Journalism?*” dalam *Activate*. The quarterly journal of IMPACS, the Institute for Media, Policy and Civil Society. Winter 2001. Hal 6-9. IMPACS, Canada.
- Shoemaker, Reese, 1996. *Mediating The Message*. Longman Publisher. USA.
- Syahputra, Iswandi. 2006. *Jurnalistik Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik*. P_Idea. Yogyakarta.
- Woldsfeld, Gadi. 2004. *Media and The Path to Peace*. Cambridge. UK.

MEDIA KONTEMPORER DAN KONFLIK DI INDONESIA

Elwinaro Ardianto

Berkembangnya media kontemporer di Indonesia, ternyata tidak menjadi solusi untuk meredam atau menghilangkan konflik, seperti konflik antar etnik beda agama (Kasus Poso dan Ambon), perbedaan paham seagama (Kasus Ahmadiyah), konflik antarkampung, antarpenduduk kota, antarpelajar, geng motor, dan konflik lain. Konflik ini terjadi, selain media sebagai pemicunya, karena isi media seperti televisi hanya mengandung tiga aspek saja, yaitu aspek erotika atau seks, aspek mistik (tahayul), dan aspek kekerasan. Selain itu ternyata literacy media (kecerdasan bermedia) masyarakat masih rendah, di tengah overload information atau banjir informasi. Masyarakat masih dalam masa transisi antara nilai lama sudah mulai ditinggalkan, tetapi nilai baru belum begitu dipahami, terutama nilai-nilai yang dibawa oleh media sebagai salah satu bentuk imperialism sosial budaya, sehingga tayangan media lebih banyak membentuk sikap dan perilaku hedonism (mendewakan kesenangan), sehingga masyarakat sudah kehilangan idealism, seperti kasus anak remaja dan anak muda meng-oplos minuman dengan zat lain mematikan mereka, karena mereka sudah kehilangan idealisme, sebagai salah satu landasan spiritual.

Kata kunci: media kontemporer, konflik antar kelompok, literasi media

Pendahuluan

Konflik di Indonesia sejak era kemerdekaan sampai era reformasi ini tidak pernah berhenti, mulai dari konflik separatis (suatu daerah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI), se-perti adanya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Gerakan Papua Merdeka atau GPM, Rakyat Maluku Selatan atau RMS, PRRI di Sumatra Barat, dan beberapa daerah lain yang ada letupan ingin menjadi negara sendiri yang terpisah dari Indonesia.

Selain konflik separatis, kini di era reformasi bermunculan konflik antaretnik, seperti Kasus Poso, Kasus Maluku atau konflik antaragama, seperti Kasus Ahmadiyah yang menjadi sasaran umat Islam, konflik antarkampung di desa dan kota, tawuran pelajar dan mahasiswa, munculnya geng motor dan permasalahan sosial lainnya yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan tentram.

Penduduk Indonesia yang sangat heterogen ini, yakni terdiri dari multietnik (banyaknya suku bangsa: Aceh, Sunda, Jawa, Minang, Batak, Palembang, Manado, Bugis, Makassar, Papua, dan suku-suku lainnya), multibudaya (budaya yang sangat beragam), multisosial (masalah sosial yang sangat banyak), multiagama (berbagai agama dan kepercayaan ada di Indonesia). Kondisi ini sangat rentan untuk memicu terjadi konflik di Indonesia, tetapi di sisi lain sebenarnya kondisi multi atau sangat beragam ini sebuah kekayaan yang sangat besar, hanya bagaimana semua komponen bangsa ini dapat mengelola konflik atau manajemen konflik ini ke arah yang lebih positif yakni menjadi bangsa yang memiliki etos kerja, etos belajar dan menjadi negara produktif bukan konsumtif.

Intinya bagaimana manajemen konflik di tanah air ini menjadi lebih konstruktif atau membangun bukan destruktif atau menghancurkan. Kerawanan konflik ini sebetulnya harus menjadi *political will* atau kemauan politik pilar negara (eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers/media). Mengingat konflik tidak bisa dihilangkan, tetapi dikurangi dan tidak menimbulkan kerugian yang banyak.

Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, konflik yang berkembang sebenarnya dapat dipilah ke dalam dua tipe yaitu konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang didasarkan



ide komunitas tertentu yang dihadapkan kepada penguasa. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antarkomunitas dalam masyarakat akibat banyak aspek misalnya komunitas lain dianggap mengancam kepentingan, nilai-nilai, cara hidup dan identitas kelompoknya.

Pada era reformasi konflik horizontal menjadi hal yang sanga menggejala di Indonesia. Kompas (20 Desember 2000) misalnya berdasarkan *polling* yang dilakukan pada hampir 1500 responden mencatat bahwa ada tiga jenis konflik horizontal yang mencemaskan yaitu konflik antarumat beragama .mencapai 73%, antarsuku mencapai 81%, dan konflik antarwilayah sebesar 90%.

Akhir-akhir ini kita masih banyak mendengar dan melihat konflik horizontal itu terjadi. Apapun jenis konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya konflik antarumat beragama sebenarnya tidak berdiri sendiri melainkan berkelindan dengan aspek-aspek lain, seperti persoalan politik atau kebijakan pemerintah. Kesukuan, ekonomi, pendidikan, dan penguatan identitas daerah setelah berlakunya otonomi daerah (Ismail. 2011: 1).

Maraknya konflik antarumatbergama tersebut tidak dapat di laepaskan dari kontirbusi penguasa era Orde baru. Sebab melalau politik SARA-nya penguasa telah menekan semua perbedaan yang berbau kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan. Semuanya dimasukkan dalam bingkai kesatuan, dan stabilitas politik dan keamanan demi pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini menjadikan konflik, baik laten maupun manifest, haruis dtekan dan celakanya tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Pendekatan tersebut dari luar tampak berhasil, di mana kerukunan hidup bergama terlihat *ayem-tentrem*. Akibat masih sering muncul kasus konflik antarumat beragama di berbagai daerah menjadi *ganjalan* kerukunan seperti di Bali, Situbondo, Pasuruan, Yogyakarta, Solo, Bandung, Tasikmalaya, dan Ambon. Konflik yang memakan banyak korban harta maupun jiwa itu ada yang dapat relatif ditemukan penyelesaiannya, namun ada yang sampai sekarang masih menggantung dan berlangsung.

Konflik yang terjadi itu telah merusak pertemanan, hubungan antarmanusia yang telah terjalin, dan tentu diperlukan waktu yang



panjang untuk memulihkan trauma dan sakit hati. Jika proses pemulihan tidak dilakukan dengan serius, tidak mustahil masalah kerukunan di Indonesia pada tahun-tahun mendatang hanya sebuah nama (Ismail, 2011: 1-2).

Konflik dan Perdamaian

Pengertian konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan (menurut kamus Inggris Indonesia oleh John. M. Echols dan Hassan Shadily. 2005. Penerbit Gramedia Pustaka Utama-Jakarta).

Konflik (*conflict*) adalah ketidaksesuaian antara tindakan dan tujuan. Konflik yang dikelola dengan kreatif dapat memberikan hasil yang membangun. Sebuah hubungan atau sebuah organisasi tanpa konflik kemungkinan adalah hubungan dan organisasi yang apatis. Konflik menandakan keterlibatan, komitmen, dan kepedulian. Apabila konflik dipahami dan disadari, hal tersebut dapat mengakhiri tekanan dan mendorong pembaruan serta perbaikan hubungan manusia. Tanpa konflik orang-orang jarang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalahnya (Myers. 2012: 244).

Damai (*peace*) adalah kondisi yang ditandai dengan rendahnya tingkat permusuhan dan agresi serta dengan hubungan yang saling menguntungkan. Damai yang sesungguhnya lebih dari sebuah penekanan terhadap munculnya konflik terbuka, lebih dari ketenangan yang rapuh dan palsu. Damai adalah hasil dari konflik yang dikelola secara kreatif. Damai adalah rekonsiliasi perbedaan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dan mencapai persetujuan yang sesungguhnya (Myers, 2012: 244).

Apa saja yang menimbulkan konflik: (1) dilema sosial, seperti ancaman senjata nuklir, perubahan iklim, ledakan penduduk, penipisan sumber daya alam, gas rumah kaca, (2) kompetisi, sering muncul ketika kelompok-kelompok bersaing atau berkompetisi untuk pekerjaan yang langka, atau sumberdaya. Ketika kepentingan berbenturan, konflik meletus, suatu fenomena yang diidentifikasi sebagai konflik nyata kelompok (*realistic group conflict*), (3) ketidakadilan yang dirasakan, “itu tidak adil”, “itu suatu perampasan”, “kami pantas menerima yang lebih baik!” demikian komentar-komentar yang melambangkan konflik yang dikobarkan oleh rasa ketidak-adi-

lan, (4) kesalahpahaman, ingatlah bahwa konflik adalah ketidaksesuaian antara tindakan dan tujuan. Berbagai konflik hanya memiliki inti dasar yang sederhana dari suatu hal yang benar-benar tidak sesuai dengan tujuan; permasalahan yang lebih besar adalah kesalahpahaman akan motif dan tujuan orang lain (Myers. 2012: 244-257).

Komunikasi, Pluralisme dan Konflik

Komunikasi untuk menyelesaikan dilema sosial (konflik), seringkali komunikasi memungkinkan orang-orang untuk bekerjasama. Komunikasi membentuk norma-norma kelompok dan harapan bersama serta memberikan tekanan pada anggota untuk mengikuti mereka. terutama ketika orang-orang saling berhadapan-hadapan, hal tersebut memungkinkan diri mereka sendiri untuk melakukan kerjasama (Myers, 2012: 251).

Ilmu komunikasi, sebelum berdiri sebagai suatu disiplin ilmu sendiri dalam kelompok ilmu sosial, dikembangkan dan diperjuangkan oleh pakar disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, politik, antropologi, bahkan dasar-dasarnya sebagai kajian ilmiah dan metodologinya berasal dari berbagai disiplin ilmu.

Lahirnya ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tidaklah menghabiskan hubungan ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya, bahkan kini sebagai “pusat” bagi perkembangan disiplin dan kajian ilmu lain. Ilmu komunikasi telah tumbuh sebagai disiplin sendiri (bersifat elektif), tentu masih berhak “kawin:” dengan ilmu-ilmu lainnya, yang kemudian melahirkan berbagai subdisiplin, seperti komunikasi politik (dengan ilmu politik), komunikasi organisasi (dengan ilmu administrasi), komunikasi lintas budaya (dengan antropologi), komunikasi kesehatan (dengan ilmu kesehatan masyarakat), komunikasi pertanian (dengan ilmu pertanian) (Ardianto. 1999: 75-76).

Sebagai contoh bahwa ilmu komunikasi kini sudah *ajeg* atau mapan: Sebelumnya ada subdisiplin sosiologi komunikasi atau psikologi komunikasi, artinya ilmu komunikasi bisa dikaji oleh ilmu lain yakni sosiologi atau psikologi. Kini, karena ilmu komunikasi sudah semakin dewasa, maka muncul kajian-kajian di atas, seperti komunikasi



politik, komunikasi organisasi, komunikasi lintas budaya, komunikasi kesehatan, komunikasi pertanian, komunikasi bisnis, komunikasi pendidikan, dan lainnya, artinya komunikasi bisa mengkaji ilmu lain, tidak sekadar “kawin” dengan ilmu lain itu.

Komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar yakni *communication is science* dan *communication is tool*. Kategori pertama bahwa komunikasi lebih berorientasi sebagai bidang kajian ilmu, yang melahirkan berbagai teori, paradigma, model dan konsepsi ilmu komunikasi. Sedangkan kategori kedua lebih menekankan kepada komunikasi sebagai alat atau sebagai fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis.

Komunikasi sebagai ilmu tentunya banyak berbicara tentang berbagai penelitian komunikasi, yang dapat menguji teori (verifikatif), menemukan teori atau pun pemecahan masalah komunikasi. Termasuk bagaimana peran penelitian komunikasi untuk meneliti dampak sosial perkembangan teknologi komunikasi. Akhirnya tidak akan terlepas kaitan antara perkembangan metodologi penelitian komunikasi dan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Kompetensi ilmuwan komunikasi dalam bidang teknologi bukan perangkat keras (*hardware*) atau perangkat lunak (sistem/informatika-nya), tetapi dalam *content of technology* (membuat program-program acara) dan meneliti dampak sosial teknologi komunikasi pada masyarakat.

Komunikasi sebagai alat, tentunya komunikasi menjadi suatu seni tersendiri yang dapat digunakan secara praktis. Ujung-ujungnya komunikasi praktis ini melahirkan profesi komunikasi, seperti halnya profesi lainnya kedokteran, pengacara, akuntan publik, insinyur dan lain sebagainya.

Komunikasi sebagai ilmu maupun profesi keberadaannya semakin dibutuhkan masyarakat, bahkan mulai sejajar dengan profesi lainnya yang telah terbelah dahulu mapan dan telah lama diakui masyarakat. Sebagai ilmu, khususnya di tanah air, semakin banyak perguruan tinggi yang kini membuka fakultas, jurusan, atau program studi komunikasi. Sedikitnya di Indonesia kini terdapat 60 perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) membuka bidang kajian komunikasi.



Secara praktis pun kini banyak dunia industri, perdagangan, lembaga pemerintahan, insitusi militer perusahaan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya semakin membutuhkan orang profesional dalam bidang komunikasi. Secara profesi komunikasi menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan secara finansial maupun secara prestisius.

Kendati sebagai ilmu maupun profesi bidang komunikasi dapat dikatakan paling “buncit” dibandingkan ilmu dan profesi lainnya, ternyata perkembangannya sangat pesat sekali. Bahkan ada seorang akademisi mengatakan bahwa bidang komunikasi ini ibarat mobil yang sangat cantik dan banyak peminatnya, sehingga bagaimana memproduksi mobil cantik ini tetap diminati orang, tetapi tetap menjaga kualitas agar tidak menurunkan citra kendaraan yang cantik ini.

Berbicara komunikasi baik sebagai ilmu maupun sebagai alat atau fungsi terlalu banyak sekali berbagai fenomena, teori, perspektif bidang komunikasi untuk ditulis. Mengacu kepada judul tulisan ini, maka uraian berikut ini berbicara komunikasi sebagai suatu pengantar saja, dengan mencoba mengembangkan tiga bentuk komunikasi, yakni komunikasi antarpersona atau antarpribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.

Pluralisme atau kebinekaan agama merupakan suatu kenyataan aksiomatis (yang tidak bisa dibantah) dan merupakan keniscayaan sejarah (*historical necessary*) yang bersifat universal. Dalam bahasa agama, pluralitas ini merupakan *summat al-Allah* (kepastian hukum Allah) yang bersifat abadi (perennial) (Riyadi. 2007: 59-60).

Konteks sosial Indonesia yang plural-religius dan plural-kultural, dalam realitasnya, pluralitas agama dan pluralitas budaya di Indonesia menyimpan potensi konflik yang besar, karena didukung oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan hukum yang tidak kondusif bagi pemeliharaan kebinekaan.

Tidak jarang kebinekaan agama justru penulut konflik dan kerusuhan seperti terjadi di beberapa daerah. Konteks sosial tersebut melahirkan diskursus *teologia religionum* untuk memaknai kembali teks kitab suci, yang selama ini dianggap sebagai sumber eksklusivisme keagamaan, ketidakramahan, diskriminasi, konflik, kerusuhan



dan peperangan atas nama Tuhan (Riyadi. 2007: vi-vii).

Media Kontemporer dan Konflik di Indonesia

Media (komunikasi) yang berkembang pertama kali sering disebut media rakyat, karena lahir dari kreativitas rakyat sebagai wujud penciptaan seni dan budaya, tetapi media rakyat yang sebelumnya sebagai seni dan budaya, ternyata oleh insan komunikasi digunakan untuk media komunikasi dan *medium is message* (media-nya itu sendiri sudah menjadi pesan).

Media rakyat itu antara lain: *kentongan, bedug, calung, wayang, angklung*, api unggun, *kendang*, seni dan budaya tradisional, *reog, tanjidor, lenong, ketuk tilu, gondang*, ketoprak, pencak silat, dan lainnya. Di jaman pemerintahan Orde Baru, media rakyat ini sangat kental digunakan dalam menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Selain ada gabungan antara media rakyat dengan media tradisional.

Media tradisional adalah surat kabar, majalah, radio, televisi. Media massa cetak dan elektronik ini ternyata sudah menjadi media komunikasi tradisional, karena sekarang sudah mulai berkembang media kontemporer atau masa kini atau terbaru, terutama setelah munculnya teknologi komunikasi yakni internet atau media komunikasi *online*.

Media komunikasi kontemporer adalah mass media *online: newspaper online, magazine online, digital radio, dan digital television*. Non-mass media *online: chatting dan e-mail* (komunikasi antarpersona), *teleconference dan video conference* (komunikasi kelompok). *Social media online: facebook, twitter, blog, dan web* (Ardianto, dalam Junaedi. 2011: xii).

Media kontemporer dapat digunakan untuk mengatasi konflik di Indonesia, terutama dikemas sedemikian rupa sehingga media ini dapat membentuk opini publik atau opini khalayak tentang perlunya memelihara perdamaian bukan memicu konflik.

Media kontemporer ini dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi konflik di Indonesia tentunya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (1) pemetaan sosial publik (*public social mapping*), (2) pemetaan informasi publik (*public information mapping*), (3) strategi komunikasi publik (*public communication strategic*), (4) taktik komunikasi publik (*public communication tactic*), (4) audit komunikasi



publik (*public communication audit*).

Public social mapping: Pemetaan sosial publik berdasarkan kepentingan dan *power* yang mereka miliki dalam komunitas atau masyarakat (mitra kunci, bangun relasi, berbagi informasi, *say hallo*). Setiap publik tersebut dikelompokkan berdasarkan rendah tinggi *power* (pengaruhnya) terhadap komunitas dan tingkat kepentingannya terhadap isu yang sedang menjadi pengamatan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka untuk aktivitas berikutnya kita bisa menentukan dari kelompok orang-orang tersebut apa yang harus kita lakukan, terutama pada tahap implementasi sebuah program. Publik yang memiliki pengaruh atau *power* rendah dalam komunitas tersebut dan juga memiliki kepentingan rendah terhadap program yang akan kita jalankan mungkin saja bisa kita abaikan. Sedangkan untuk *stakeholders* yang lain mungkin harus mendapatkan perhatian sendiri dan perlu strategi dalam mengahadapinya.

Bentuk hubungan berdasarkan kepentingan dan *power* yang dimiliki publik dalam komunitas atau masyarakat (menjaga hubungan dan informasi, bangun strategi kemitraan, prioritas rendah, perlakukan secara wajar. Berdasarkan pemetaan *stakeholders* itu, maka kita bisa menentukan seberapa jauh tingkat ketergantungan kita terhadap *stakeholders*, juga terhadap agenda yang akan dilakukan dalam komunitas atau masyarakat tersebut.

Public information mapping: pemetaan ini melihat publik mana yang kaya informasi dan miskin informasi, serta publik mana yang banyak mengakses media dan sedikit yang mengakses media, termasuk pemilikan media itu sendiri. Publik yang kaya informasi setidaknya mereka memiliki dan mengakses berbagai media, mulai dari media tradisional atau konvensional (suratkabar, majalah, radio, televisi, televisi kabel: Indovision, Telkomvision, film dan buku sampai media kontemporer, masa kini atau *media online: newspaper online, magazine online, digital radio, digital television*).

Public communication strategic. Strategi terdiri dari perencanaan dan program. Sebuah strategi dalam komunikasi publik untuk mengatasi konflik di Indonesia ini berdasarkan *fact finding* atau mengacu kepada data yang faktual yang dihasilkan dari pemetaan sosial publik dan pemetaan informasi publik. Selama ini setiap program yang



dijalankan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan negara, perusahaan swasta atau organisasi nirlaba, lebih banyak *by feeling* atau *by heart* (hanya berdasarkan perasaan dan hati saja, tidak berdasarkan data).

Public communication tactic: Taktik terdiri dari tindakan dan komunikasi. Tindakan ini adalah pelaksanaan komunikasi publik yang tepat sasaran, termasuk tepat momen atau waktu, sedangkan komunikasi adalah bagaimana mengemas pesan yang baik agar terjadi komunikasi efektif, mengena atau berhasil. Dalam komunikasi ini termasuk pemilihan media yang tepat untuk digunakan dalam komunikasi untuk mengatasi konflik di Indonesia.

Public communication audit: Komunikasi publik untuk mengatasi konflik di Indonesia harus diaudit, untuk melihat berhasil tidaknya komunikasi publik yang dilakukan, terutama komunikasi publik ini bertujuan untuk mencapai *mutual understanding* (saling pengertian), terutama mengubah konflik menjadi perdamaian. Diharapkan bahwa komunikasi publik ini merupakan salah satu manajemen konflik untuk membangun suasana yang saling menguntungkan dalam komunitas yang pernah mengalami konflik tersebut.

Penutup

1. Penduduk Indonesia yang sangat heterogen ini sangat rentan terjadinya konflik, hanya konflik dapat dikelola menjadi situasi dan kondisi yang atau kondusif atau membangun.
2. Media kontemporer ini dapat memberikan kontribusi untuk mengatasi konflik di Indonesia tentunya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pemetaan sosial publik (*public social mapping*), (2) pemetaan informasi publik (*public information mapping*), (3) strategi komunikasi publik (*public communication strategic*), (4) taktik komunikasi publik (*public communication tactic*), (4) audit komunikasi public (*public communication audit*). §

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. (2011). "Media jejaring Sosial dari Perspektif Komunikasi dan Kualifikasi Sarjana Komunikasi Teknologi Komunikasi," dalam Junaedi, Fajar. 2011. Komunikasi 2.0: Teoritisi dan Implikasi. Yogyakarta: ASPIKOM, Buku Litera, Perhumas BPC Yogyakarta.



- Ardianto, Elvinaro. (2011). Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ardianto, Elvinaro. (2011). *Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardianto, Elvinaro. (1999). “Kehadiran Ilmu Komunikasi, Paradigma Komunikasi Politik Rezim dan Masyarakat Madani,” (Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi/ISKI), Vol. IV/Oktober, 1999. Jakarta: ISKI dan Remaja Rosdakarya.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. (2011). Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Jakarta: RajaGrafindo-Rajawali Pers.
- Ismail, Nawari dan Muhaimin A.G. (2011). Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal. Bandung: Lubuk Agung.
- Myers, David G. (2012). Psikologi Sosial. Penerjemah: Aliya Tussyani, dkk. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. Buku 2.
- Riyadi, Hendar. (2007). Melampaui Pluraisme: Etika Al-Quaran Tentang Keragaman Agama. Jakarta: RMBOOKS& PSAP





Penulis dan Editor

PENULIS

Afdal Makkuraga Putra menyelesaikan S1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 1995 dan S2 Komunikasi Politik Universitas Indonesia (2008). Mengikuti pendidikan Human Rights di University of Technology Sydney, Australia, 2003. Menulis chapter pada buku, *Media's Challenge: Asian Tsunami and Beyond* yang diterbitkan oleh Unesco bersama Asian Media Information and Communication Center (AMIC) dan Nanyang Technology University, Singapore (2006) dan menulis buku berjudul *Isu Pluralisme dalam Perspektif Media*. Ia juga menjadi penulis tetap di *Jurnal Media Watch* The Habibie Center sejak tahun 2000. Kini menjadi Sekretaris Jurusan Program Studi Broadcasting di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.

Agustina Zubair. Lulusan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik – Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Jember (1982), Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial – Jurusan Komunikasi, Universitas Indonesia (1994) dan Program Doktorat Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran (2011). Sejak tahun 2000 menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) (2007 -2010). Saat ini menjadi anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Jakarta, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).

Ahmad Toni Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur Jakarta. Mengajar mata kuliah Produksi Radio dan Televisi. Selain itu juga mengajar mata kuliah Semiotika Film di Institut Bisnis Nusantara Jakarta. Lulusan S1 Jurusan Komunikasi Penyiaran dan Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 Jurusan Media dan Komunikasi Politik Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana. Lelaki kelahiran Indramayu, 6 Juli 1982 ini pernah menyabet juara dalam Lomba Penulisan Naskah Skenario Film Departemen Pariwisata Tahun 2006. Aktifitas rutin lain adalah mengikuti call for paper baik tingkat nasional atau internasional.

Andy Corry W. Dosen sejak tahun 1988. Mengajar dengan Jabatan Lektor Kepala pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung dan Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Menyelesaikan Doktor Ilmu Komunikasi dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2004). Aktif menjadi pembicara, peneliti dan penulis dalam berbagai kegiatan. Menjadi Konsultan Komunikasi, Kebi-



jakan Publik dan Sumberdaya Manusia di berbagai kementerian, pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

Bambang Sukma Wijaya adalah pengajar dan peneliti di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie, Jakarta. Menulis di berbagai media seperti Media Indonesia, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Cakram, Marketing, MIX, ADOI dan beberapa majalah populer lainnya. Juga di beberapa jurnal ilmiah dan prosiding International Conference on Business and Management, Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting, International Conference on Business and Communication, International Seminar on Scientific Issues and Trends, dan International Conference on Management, Hospitality and Accounting. Selain itu, Bambang telah menelurkan 3 buku: *Iklan Ambient Media: Konsep, Strategi Pesan dan Implementasi*, *The Voices of Consumers* dan *Etika Periklanan dan Komunikasi Pemasaran*. Bambang dapat dihubungi melalui email: bswijaya98@yahoo.com dan blog: <http://www.komunikasiana.com>.

Bonaventura Satya Bharata lahir di Jakarta, 5 Agustus 1971. Menamatkan studi S-1 di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL-UGM Yogyakarta (1990-1995) dan S-2 di Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi-Ilmu Komunikasi UI Jakarta dengan spesialisasi Manajemen Media (2001-2003). Tercatat sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP-Universitas Atma Jaya Yogyakarta (1998-sekarang) dan Staf Peneliti Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur (PUSKIT) sejak 2007 di universitas yang sama. Bersama beberapa kolega dosen Ilmu Komunikasi dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Salatiga sempat pula ikut membantu membidani kelahiran Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia (ASPIKOM) di Tuntang-Salatiga tahun 2007. Tercatat pula sebagai pengurus ASPIKOM di Divisi Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum (2007-2010) dan sampai sekarang masih aktif sebagai salah satu editor untuk Jurnal ASPIKOM. Sempat pula menjadi konsultan dan trainer untuk materi Media Relations bersama Jogja Education Partners (JEP) pada 2007-2010. Menjadi salah satu kontributor penulis untuk beberapa buku, seperti *Metode Penelitian Komunikasi* (2005), *Quo Vadis Televisi : Masa Depan TV dan TV Masa Depan* (2010), *Mixed Methodology* (2011), *Mozaik Indonesia* (2012). Menulis pula beberapa artikel opini di surat kabar lokal Yogyakarta, seperti *Radar Jogja*, *Harian Jogja*, dan *Bernas Jogja*.



Dewi S. Tanti. *Peneliti pada Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar tetap pada Jurusan Broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Lulusan Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta (2010) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi AWS Surabaya (2002). Tengah mengembangkan kajian media literasi dan pendidikan karakter, selain itu juga mengelola rujukan literatur bidang komunikasi, rumakom. e-mail: dstanti@gmail.com*

Dorien Kartikawangi. *Lahir di Solo pada 23 Januari 1966. Menyelesaikan studi S1 bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Negri Sebelas Maret, Surakarta dan studi S2 serta S3 pada bidang ilmu yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta. Pengajar pada Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya, Jakarta. Anggota International Public Relation Association (IPRA) dan International Communication Association (ICA). Aktif menulis makalah, chapter book dan buku, serta menjadi pembicara di berbagai konferensi nasional dan internasional, baik di dalam maupun di luar negeri. e-mail: dorien.kartika@atmajaya.ac.id*

Eko Harry Susanto. *Kini menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Pria kelahiran Pekalongan, 4 April 1958 ini menyelesaikan pendidikan sarjana dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan (1981), Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jakarta (1996), dan Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung (2004). Sejak tahun 2005, menulis 64 artikel/opini di media cetak nasional /lokal : Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung. Sering menjadi penceramah, pemandu workshop dan berbagai pelatihan di bidang public relations, kepuasan pelanggan dan komunikasi publik. Sekarang menjabat Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Nasional. email: ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com, blog: www.ekoharrysusanto.wordpress.com.*

Elvinaro Ardianto. *Lahir di Jakarta, 16 Oktober 1959. Saat ini memiliki banyak aktivitas, mulai dari instruktur, konsultan, peneliti, dan penulis buku. Sebelumnya pernah menjadi wartawan Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, (1986-1989) dan di Bandung (1989-1995). Saat ini menjadi*

dosen tetap FIKOM Universitas Padjajaran, Bandung. Gelar doktor bidang *Public Relations Politik* diselesaikan dari Pascasarjana Universitas Padjadjaran-Bandung (2009). Sementara Magister Sains (M.Si.) Bidang Komunikasi Pembangunan, Pasacasarjana Institut Pertanian Bogor (1996) dan doktorandus (Drs.) bidang *Public Relations* dari Fakultas Ilmu Komunikasi Univertitas Padjadjaran (1985).

Enos Rudy Jovan Tomasila. Lahir di Ambon, 16 April 1990 . Mahasiswa *Public Relations* Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Anak kedua dari empat bersaudara, pasangan Stefanus Tomasila dan Elsheba Nahumury. Sejak SD hingga SMA menghabiskan waktu di Ambon Maluku.

Fajar Junaedi. Lahir di Madiun pada tanggal 20 Mei 1979. Mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Buku yang ditulisnya berjudul *Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis* (2007), *Membuat Film Dokumenter, Sebuah Panduan Praktis* (2011), *Menyulap Kekalahan : Operasi Militer Amerika Serikat dalam Televisi dan Film Hollywood* (2012) serta *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi* (sedang naik cetak). Selain menulis sendiri juga menulis dalam beberapa buku bersama kolega-koleganya seperti *Komunikasi 2.0 : Teoritisasi dan Implikasi* (2011) dan *Komunikasi Bencana* (2011). Meminati kajian tentang sport communication khususnya tentang suporter sepak bola. Beberapa tulisan akademik tentang suporter sepak bola telah dipresentasikan dalam berbagai konferensi dan diterbitkan dalam proceeding akademis, yaitu pertama, *Konflik Multikultur di Balik Gemerlap Sepakbola* (2008) yang dipresentasikan dalam *Konferensi Nasional Kajian Media dan Komunikasi di Universitas Airlangga Surabaya* dan dipublikasikan dalam buku *Transformasi Industri Media dan Komunikasi di Indonesia* (2008). Kedua, *Anak Muda, Suporter, Media Sosial dan Rekonsiliasi* (2011) yang dipresentasikan call for paper *Remaja Digital di Universitas Muhammadiyah Surakarta* dan dipublikasikan dalam buku *Remaja Digital* (2011). Ketiga, *Sepak Bola sebagai Komunikasi Politik*, dimuat dalam buku *Komunikasi Politik* (2011) yang diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Keempat, *Sepak Bola Lokal sebagai City Branding* (2011) yang dipresentasikan dalam *National Conference on City and Branding Universitas Brawijaya*. Beberapa tulisan lain tentang sepak bola dan suporter dimuat di berbagai media massa. Selain mengajar menjadi pengurus pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) dan menjadi redaktur *Jurnal Komunikator* dan *Jurnal Ilmu Komunikasi Aspikom*. Penulis



dapat dihubungi di twitter @fajarjun

Farid Hamid U. Doktor Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Padjajaran Bandung, saat ini menjadi dosen tetap pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif dan Perspektif Teori Komunikasi. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dan Direktur Pusat Studi dan Pengembangan Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta.

Farid Rusdi. Lahir di Jakarta 27 Mei 1976. Lulus S-1 Sastra Rusia, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia tahun 1998, dan S-2 Manajemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia tahun 2007. Lebih dari sepuluh tahun menjadi jurnalis radio di Jakarta News FM dan Trijaya FM (Sindo Radio). Selama menjadi jurnalis radio meliput berita politik dan peristiwa nasional, termasuk menjadi wartawan Istana Kepresidenan antara tahun 2001-2011. Sempat mengikuti Workshop TOT Jurnalisme Damai yang diselenggarakan LSP dan The British Council di Jakarta. Saat ini menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Gregorius Genep Sukendro. Lahir di Jogjakarta. Menyelesaikan sekolah S1 dan S2 ilmu komunikasi. Dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Sempat menjadi wartawan di surat kabar nasional. Tetapi memilih mundur dari surat kabar tersebut karena mendapat tugas meliput dengan tujuan menjatuhkan Gus Dur dari kursi Kepresidenan. Masuk dunia iklan diawali menjadi copywriter, terlibat menjadi editor majalah periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jakarta, dan terakhir menjabat manajer strategic planner. Bersama kawan-kawan grafis yang mempunyai kepedulian untuk perubahan sosial mendirikan grafisosial, dan menjadi salah satu ketuanya. Bersama-sama anak-anak muda membuat film dokumenter dan film pendek. Menulis buku "PANC?SILA: Riwayatmu Kini" yang diterbitkan oleh Yayasan Tifa, grafisosial, dan Ikon.

Hj. Hairunnisa. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung dan S2 Ilmu Manajemen, Universitas Mulawarman. Saat ini menjadi pengajar pada Jurusan Administrasi Negara-Ilmu Komunikasi ISI-POL Unibersitas Mulawarman. Karya yang sudah dibukukan Dialektika Lembaga Amil dan Zakat (2009) dan Motif Mahasiswa dalam Mengakses

Situs Jejaring Sosial (2010). Beberapa penelitian bertema konflik antara lain Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bontang (2009) dan Alternatif Pencegahan Konflik Sosial dalam Pemanfaatan SDA melalui Penguatan Modal Sosial di Kalimantan Timur (2010)

Hendri Yulius Wijaya. Lahir di Bandar Lampung, 20 Juli 1988. Usai menyelesaikan kuliah S1 di bidang Administrasi Bisnis, kini ia sedang bekerja di salah organisasi internasional dan segera menempuh pendidikan S2-nya di bidang kebijakan publik (Public Policy). Sejak di bangku kuliah, ia telah mendalami bidang kajian gender, feminisme, cultural studies, dan juga filsafat. Beberapa tulisannya telah dimuat di *Jurnal Perempuan*, *Majalah BHINNEKA*, *Majalah MATABACA*, dan dibukukan dalam beberapa antologi. Selain itu, ia juga pernah menjadi Global Youth Advisory Panel untuk United Nations Population Fund (UNFPA), badan PBB yang bergerak dalam dana kependudukan.

Inda Fitriyarni. Sejak tahun 2008 menjadi dosen tetap pada FISIPOL Universitas Mulawarman. Sebelumnya pernah menjadi dosen luar biasa pada Universitas Trunajaya Bontang dan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang (STITEK) Bontang. Kelahiran Madiun, 5 September 1978 ini menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2001) dan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Konsentrasi Teori dan Penelitian Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta (2004). e-mail: inda.unmul@gmail.com

Maria Yuliasuti. Saat ini menjadi pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. e-mail: yulinugraheni2000@yahoo.com

M. Najib Husain Dilahirkan di Kota Ujung Pandang pada tahun 1975. Kandidat Doktor PKP Universitas Gadjah Mada, Merupakan staf pengajar pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo dan UMK Sultra. Selain mengajar, juga menjadi Pengurus KAHMI Sultra, Ikatan Alumni Percik Salatiga di Sultra, Narasumber di Dialog Interaktif TVRI Sultra, dan penulis opini di Surat Kabar, serta aktif sebagai pembicara pada forum nasional dan Internasional. Telah menghasilkan karya buku berjudul. *Di Balik Interupsi: Potret fenomena kehidupan* (Sanggar, Bandung 2007), *Otonomi Daerah – Pemekaran Wilayah : Antara Idealitas dan Realitas* (LEPKISS, Surabaya 2008). *Komunikasi Pembangunan dan Dinamika Politik di Aras Lokal.* (Pintal dan Impulse. Yogyakarta 2011)



M.T. Hidayat. Staf pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak tahun 2007 menjadi pemateri bidang media dan kehumasan pada Pusdiklat Kementerian Kominfo. Pernah menjadi peneliti media di Pusat Kajian Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2003 hingga 2006. Lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya (2001), kini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. e-mail: mthidayat@hotmail.com

Mustika Ranto G. Mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta. Tahun 2004 mendirikan PT Micro Tellindo, tahun 2011 meninggalkannya dalam keadaan di puncak keberhasilan, kemudian mutasi ke PT. Softellindo Multimedia yang merupakan induk dari PT. Micro Tellindo, PT. Owasa Tehnik, PT. Bisnis Online Indonesia, dan PT. Showcase Indonesia Dotcom. Selama lima tahun memimpin Softellindo Group sebagai Presiden Komisaris (CEO) dan 7 Tahun di PT. Micro Tellindo sebagai Presiden Direktur.

Novena Adelwis Gisela. Mahasiswa Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Jakarta. Lahir di Jakarta, 30 November 1990. Mendalami dunia tulis-menulis karena kebiasaan membaca buku sejak kecil. Namun, penulis baru aktif menulis sejak memasuki bangku kuliah, terutama sejak salah satu artikelnya dimuat di salah satu koran nasional. Penulis memiliki ketertarikan dalam dunia perfilman, sosial (terutama HAM), lifestyle, dan apapun yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selangkah lagi, penulis akan menyelesaikan studi Strata 1 di Jurusan Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Sebagai orang Influence-Compliance, dia telah merencanakan untuk bekerja sesuai passion dan menjadi penulis skenario film. e-mail: novena_adelweisela@yahoo.com

Nurjanah. Lahir di Bengkalis Provinsi Riau, 2 April 1969. Menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN SUSKA Pekanbaru pada tahun 1996. Alumnus Magister Sains Universitas Padjajaran Bandung (2005) Program Studi ilmu Sosial/Ilmu Komunikasi. Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau, bidang konsentrasi Hubungan Masyarakat. Selain itu menjadi dosen Luar Biasa Jurusan Ilmu Komunikasi Rab University, Fakultas Dakwah UIN SUSKA Pekanbaru, dan Jurusan Ilmu

Komunikasi Persada Bunda. Pada kajian keilmuan aktif dalam melakukan diskusi ilmiah tentang Sosial, Politik, Budaya dan Perkembangan Media Massa. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain: Strategi Pengelolaan Objek Wisata Bahari dan Kuliner di Desa Selatbaru, Strategi Komunikasi Persuasif Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Prapat Tunggal Desa Meskom Kec. Bengkalis, Analisis Pengelolaan Program Corporate Social Responsibility (CRS) Dalam Membangun Citra Perusahaan Pada PT. Chevron Pasific Indonesia Pekanbaru, Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jamkesmas di Kabupaten Karo Tim FISIP USU – FISIP UNRI bekerjasama dengan Yayasan TIRI & Kemitraan Jakarta. Fokus pada kegiatan pengabdian dan penyuluhan Pengelolaan Objek Wisata Bahari Dan Kuliner di daerah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Prima M. Agustini. Dosen tetap Manajemen Komunikasi Fikom Universitas Islam Bandung dan dosen Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana. Penulis yang berpangkat Lektor Kepala ini, sebagai kandidat Doktor di bidang Ilmu Komunikasi pada Universitas Padjajaran, memperoleh gelar Magister Sains di bidang Manajemen Unpad, dan memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fikom Unisba. Penulis yang lahir 5 Juni 1975 ini, aktif sebagai trainer dan konsultan di berbagai perusahaan dan lembaga pemerintah, serta peneliti di Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Pascasarjana UMB. Karya ilmiah dan artikelnya dimuat diberbagai jurnal dan surat kabar nasional maupun lokal.

Riris Loisa. Lahir di Palembang, 23 Januari 1968. Menyelesaikan S1, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (1992); S2, Jurusan Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia (1996). Pernah menjadi dosen tidak tetap di program S1 dan S2, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (1996-2006). Selain itu juga menjadi staff Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI (1994-2003) dan anggota Kelompok Kerja Analisis Pemantauan Isi Siaran Televisi tentang Perempuan, Komisi Penyiaran Indonesia (2005-2006). Selain mengajar juga aktif dalam Asosiasi Pascasarjana Komunikasi, FISIP UI, Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI), dan ASPIKOM. Saat ini menjadi dosen tetap di, Jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara.



Yenrizal. Lahir di Talu (Sumatera Barat), 23 Januari 1974. Pendidikan S1 dari FISIP Universitas Sriwijaya, tamat 1997, sementara jenjang S2 di BKU Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Komunikasi, Unpad angkatan 2011. Penulis aktif menulis di berbagai media massa, seperti di HU Sriwijaya Post, HU Sumatera Ekspres, HU Berita Pagi, dan HU Tribun Jabar. Berbagai penelitian ilmiah juga kerap dilakukannya, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, komunikasi, dan lingkungan hidup. Selain kegiatan ilmiah, penulis juga aktif sebagai fasilitator in class maupun out class.

Yugih Setyanto. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fikom jurusan Humas Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta dan pendidikan S2 ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Pernah bekerja di Bagian Pemberitaan Biro Humas Departemen Pertahanan (1999-2003) dan staf perbantuan Departemen Humas PT. Pupuk Kaltim di kantor perwakilan Jakarta (2003-2011). Saat ini mengajar di Fikom Universitas Tarumanagara.

Yuli Nugraheni. Saat ini menjadi pengajar pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. E-mail: yulinugraheni2000@yahoo.com

PENGANTAR BUKU

Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, S.Sos, M.Si. Selain sebagai guru besar dan aktif mengajar di Pascasarjana dan FISIP universitas 17 Agustus 45 Surabaya, aktif juga memberikan seminar di berbagai institusi. Dikenal sebagai aktivis NGO sejak 1986, pada tahun 1995-1999 menjadi Dekan FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya kemudian tahun 2005 menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Sampai saat ini menjadi CEO di The BuBu Center dan menjadi konsultan di lembaga ini sampai hari ini.

Dr. Suprawoto, S.H., M.Si. Saat ini menjadi Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. Menyelesaikan Master (S2) di Program Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya (1998). Program doktoral diselesaikan dari Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya (2007). Lulus program Lemhanas PPRA XLIV Tahun 2010. Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara (sejak 2007). Staf pengajar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Pasca Sarjana STIA-Yappan Jakarta. Pengajar mata kuliah Sistem Pers Indonesia, Hukum Media, Manajemen Public Relations, Sistem Komunikasi Indonesia, dan Sistem Informasi Manajemen, Manajemen TIK dan Kebijakan Publik. Di sela waktu luang kerap menulis di media cetak dan pengisi tetap rubrik "email saka Jakarta" di majalah Jawa Panjebar Semangat.



EDITOR

Heri Budianto. Lahir di Bengkulu tahun 1974, Kandidat Doktor Media and Cultural Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Lulus Magister Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Sarjana Fisipol Universitas Bengkulu. Saat ini merupakan pengajar pada Program Magister Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan juga mengajar di beberapa universitas di Jakarta, Batam, dan Ambon. Aktif melakukan penelitian bidang media, masyarakat, dan politik. Menjadi pembicara seminar nasional dan internasional dan menjadi instruktur pada Balai Diklat KOMINFO. Saat ini adalah Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis (PUSKOMBIS) Universitas Mercu Buana. Berbagai aktivitas organisasi diikuti saat ini adalah Wakil Sekjen Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) dan Ketua Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI). Juga penggiat jaringan Integrity Education Network (I-en) sebuah jaringan yang fokus pada pendidikan integritas dan anti korupsi. Selain itu juga aktif melakukan aktivitas media watch.



Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari akademisi, praktisi, dan mahasiswa mengenai komunikasi dan konflik di Indonesia. Secara umum diarahkan untuk menelisik akar konflik dalam perspektif komunikasi di Indonesia.

Bagian yang menarik, selain mengidentifikasi peran komunikasi dalam meredam kerawanan konflik dan solusi konflik, buku ini juga menyuguhkan pesan komunikasi tentang konflik dan mengonstruksi teori-teori komunikasi dengan basis nasionalisme yang khas Indonesia. Sekaligus mengembangkan sisi solutif komunikasi terhadap konflik yang pernah terjadi atau mungkin terjadi di Indonesia.